PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGADA

TAHUN 2021 - 2026

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN NGADA

TAHUN 2021 - 2026

BUPATI NGADA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NGADA TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGADA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2021 – 2026;

4. Peraturan…

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan…

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2021 – 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.

7. Isu Strategis…

7. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai ataudihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
11. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
12. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
13. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka memadu serasikan aspirasi dan usulan dalam menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
19. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.
20. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
21. Perencanaan Daerah berbasis e-planing adalah pendekatan perencanaan menggunakan aplikasi informasi dan teknologi.
22. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
23. Bupati adalah Bupati Ngada.
24. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

25. Pemerintah…

25. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

(1) Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2021-2026 adalah memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ngada untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis, kemampuan keuangan daerah, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.

(2) Tujuan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan strategis pembangunan yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai arahan dalam RPJPD Kabupaten Ngada periode 2021-2026;
   b. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), dan perencanaan penganggaran;
   c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi
      Nusa Tenggara Timur; dan
   d. Sebagai instrumen indikator untuk perencanaan, pelaksanaan,
      evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB II
ISI DAN SISTIMATIKA RPJMD

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD meliputi:
   a. Bab I Pendahuluan;
   b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
   c. Bab III Gambaran Keuangan Daerah;
   d. Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
   e. Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
   f. Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
   g. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daetah;
   h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   i. Bab IX Penutup.

(2) Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
(2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 5

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

(1) Dalam rangka kesinambungan pembangunan, Bupati menyusun RKPD tahun terakhir pemerintahannya.
(2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor

8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 9 Juli 2021

BUPATI NGADA,

PARU ANDREAS

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 9 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2021 NOMOR 1
NO. REG: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2021 NOMOR : 01/2021

PENJELASAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NGADA TAHUN 2021 – 2026

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngada Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dimana penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngada serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat arahan kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang memuat Prioritas Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah Kebijakan Fiskal Daerah serta Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk Kerangka Regulasi dan Pendanaan yang bersifat Indikatif.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Ngada Tahun 2021–2026 mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026 yang terdiri dari: Bab I pendahuluan; Bab II gambaran umum kondisi daerah; Bab III pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan; Bab IV permasalahan dan isu-isu strategis; Bab V visi, misi, tujuan dan sasaran; Bab VI strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah; Bab VII kebijakan umum dan program pembangunan daerah; Bab VIII kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah; Bab IX kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; Bab X pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan; dan Bab XI penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2021
NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NGADA
TAHUN 2021 – 2026

ISI DAN URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN NGADA TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngada 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Ngada. Dokumen RPJMD Kabupaten Ngada disusun dengan berbagai pendekatan perencanaan berupa teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah, bawah-atas, serta tematik-holistik, integratif, dan spasial. RPJMD Kabupaten Ngada sebagai operasionalisasi visi dan misi, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan dan perangkat daerah, serta kerangka pendanaan pembangunan daerah. Rumusan tujuan, sasaran, dan program pembangunan disertai indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan pembangunan daerah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Ngada disusun berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kaidah perumusan kebijakan perencanaan. Dokumen ini utamanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, kaidah penyusunan RPJMD berdasarkan pedoman teknis penyusunan RPJMD dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD Kabupaten Ngada agar tercipta sinergi dengan berbagai dokumen perencanaan, maka memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngada 2006-2026, RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023, dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Upaya sinergi antar dokumen perencanaan juga dilakukan dengan menelaah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD yang memuat upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD, BP-Litbang dan seluruh perangkat daerah, serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026. Dokumen RPJMD diharapkan menjadi panduan dan dijalankan oleh para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan, terutama dalam rangka mencapai Visi pembangunan 2021-2026, yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan"**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xix
DAFTAR GRAFIK xxiii
DAFTAR GAMBAR xxv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen 7
1.3.1. Keselarasan RPJMD dengan RPJMN 2020-2024 8
1.3.2. Keselarasan RPJMD dengan RPJMD-P Povinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 11
1.3.3. Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Ngada 12
1.3.4. Keselarasan RPJMD dan RTRW Kabupaten Ngada 13
1.3.5. Keselarasan RPJMD dengan KLHS 17
1.3.6. Keselarasan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan RPJMD 23
1.3.7. Keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan RPJMD 23
1.3.8. Keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan RPJMD 24
1.4. Maksud Dan Tujuan 24
1.5. Sistematika Penulisan 25

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH 27
2.1. Aspek Geografi dan Demografi 27
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 27
2.1.2. Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 45
2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah 66
2.1.4. Wilayah Rawan Bencana 78
2.1.5. Demografi 91
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 93
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 94
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 109
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga 119
2.3. Aspek Pelayanan Umum 123
2.3.1. Fokus Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 123
2.3.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 165
2.3.3. Fokus Urusan Layanan Pilihan 192
2.3.4. Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan 205
2.4. Aspek Daya Saing 210
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 225
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 231
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi 239
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia 241

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 244
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu. 245
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD. 245

3.1.2. Neraca Daerah 249
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 251
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran 251
3.2.2. Analisa Pembiayaan 252
3.3. Kerangka Pendanaan 255
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja 255
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan 259

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 265
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Berbasis Kinerja Urusan Pemerintah Daerah 265
4.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Pencapaian Misi di RPJMD sebelumnya 284
4.2.1. Permasalahan Infrastruktur 284
4.2.2. Permasalahan Perekonomian Daerah 285
4.2.3. Permasalahan Penataaan Perkotaan 287
4.2.4. Permasalah Pendidikan 287
4.2.5. Permasalahan Kesehatan 288
4.2.6. Permasalahan Sosial 288
4.2.7. Permasalahan Tata kelola Pemerintahan 288
4.3. Isu-Isu Strategis 289
4.3.1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 289
4.3.2. Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 298
4.3.3. Telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngada 2012-2032 331
4.3.4. Isu strategis Global 353
4.3.5. Isu Strategis Nasional 355
4.3.6. Isu Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur 357
4.3.7. Kebijakan Perencanaan Daerah Sekitar 361
4.3.8. Isu Strategis Daerah Kabupaten Ngada 363
4.3.9. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan/Isu Utama 368

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 376
5.1. Visi 376
5.2. Misi 381
5.3. Tujuan Dan Sasaran 385

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 403
6.1. Strategi dan Arah Kebijakan 403
6.2. Arah Kebijakan Tahunan 419
6.3. Arah Kebijakan Kewilayahan 419
6.3.1. Pengembangan dan Kesesuaian Kebijakan Kewilayahan 420
6.3.2. Konsep Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Ngada 421
6.3.3. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kabupaten Ngada 425
6.3.4. Arah Pengembangan Wilayah dan Pemanfaatan Ruang 427
6.4. Program Pembangunan Daerah 432
6.5. Integrasi Rekomendasi Program KLHS RPJMD 508

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 578

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH **654**
8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah 654
8.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 656
8.3. Indikator Kinerja Kunci 665

BAB IX PENUTUP **680**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Target Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara Timur dalam RPJMN 2020-2024 9
Tabel 1. 2. Indikator Makro Provinsi NTT 2019-2023 dalam RPJMD-P 11
Tabel 1. 3. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Ngada 2006-2026 12
Tabel 1. 4. Keselarasan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Ngada 15
Tabel 1. 5. Pencapaian TPB RPJMD Kabupaten Ngada 21

Tabel 2. 1. Topografi Kabupaten Ngada Menurut Kecamatan dan Ketinggian 28
Tabel 2. 2. Kluster Kondisi Topografi di Kabupaten Ngada 31
Tabel 2. 3. Karakteristik Geologi Wilayah Kabupaten Ngada Dirinci Per Kecamatan 33
Tabel 2. 4. Data nama sungai di Kabupaten Ngada 39
Tabel 2. 5. Sebaran Iklim Kabupaten Ngada 40
Tabel 2. 6. Curah Hujan di Kabupaten Ngada 40
Tabel 2. 7. Jenis Tanah Wilayah Kabupaten Ngada Dirinci Per Kecamatan 42
Tabel 2. 8. Total Produksi Komoditi Pertanian dan Perkebunan 47
Tabel 2. 9. Total Produksi Komoditi Kehutanan 48
Tabel 2. 10. Total Produksi Komoditi Perikanan 49
Tabel 2. 11. Total Produksi Komoditi Peternakan 49
Tabel 2. 12. Kebutuhan Luas Lahan Hidup Layak 50
Tabel 2. 13. Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Pangan (Beras) Kabupaten Ngada 53
Tabel 2. 14. Koefisien Limpasan Air Tanah 59
Tabel 2. 15. Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Ngada 2017 60
Tabel 2. 16. Luas Limpasan Air di Kabupaten Ngada 60
Tabel 2. 17. Total Kebutuhan Air Pada Tahun 2037 61
Tabel 2. 18. Kawasan Perkotaan di Kabupaten Ngada 66
Tabel 2. 19. Sistem Pusat Perkotaan di Kabupaten Ngada 68
Tabel 2. 20. Potensi Bencana di Kabupaten Ngada 79
Tabel 2. 21. Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Ngada Tahun 2016 – 2020 80
Tabel 2. 22. Sejarah Kejadian Bencana periode waktu Januari – September 2020 di Kabupaten Ngada 81
Tabel 2. 23. Potensi Bahaya di Kabupaten Ngada 82
Tabel 2. 24. Potensi Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kabupaten Ngada 83
Tabel 2. 25. Potensi Bahaya Banjir Bandang Per Kecamatan di Kabupaten Ngada 83
Tabel 2. 26. Potensi Bahaya Gempabumi Per Kecamatan di Kabupaten Ngada 84
Tabel 2. 27. Potensi Bahaya Kekeringan PerKecematan di Kabupaten Ngada 85
Tabel 2. 28. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kabupaten Ngada 86
Tabel 2. 29. Potensi Bahaya Tanah Longsor Per Kecamatan di Kabupaten Ngada 87
Tabel 2. 30. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Ebulobo 88
Tabel 2. 31. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Inelika 88
Tabel 2. 32. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Inerie 88
Tabel 2. 33. Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan 89
Tabel 2. 34. Bahaya Tsunami Per Kecamatan di Kabupaten Ngada 90
Tabel 2. 35. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi 91
Tabel 2. 36. Jumlah Penduduk Per Kecamatan 92
Tabel 2. 37. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ngada (Milyar Rupiah), Tahun 2016-2020 96
Tabel 2. 38. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020 (dalam Milyar Rupiah) 100

Tabel 2. 39. Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Maumere Tahun 2016 – 2019 Menurut Kelompok Pengeluaran 103
Tabel 2. 40. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020 104
Tabel 2. 41. Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020 105
Tabel 2. 42. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Ngada dan NTT tahun 2016-2020 109
Tabel 2. 43. Komponen Pembentuk IPM Tahun 2016-2020 110
Tabel 2. 44. Jumlah Penduduk >15 tahun menurut Kegiatan Utama 118
Tabel 2. 45. Rasio Guru Murid, Rata-rata Murid Guru dan Rata-rata Murid Sekolah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019 128
Tabel 2. 46. Rasio Puskesmas dan Sarana Kesehatan Desa (Pustu, Polindes, Poskesdes) per penduduk masing-masing Kecamatan Tahun 2019 133
Tabel 2. 47. Jumlah Pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 2016-2019 134
Tabel 2. 48. Data Tempat Tidur Keadaan Desember 2019 138
Tabel 2. 49. Rasio Tenaga Kesehatan dibandingkan dengan Jumlah Penduduk tahun 2019 140
Tabel 2. 50. Jenis Ketersediaan Tenaga Medis Di RSUD Bajawa Keadaan Midterm 2020 142
Tabel 2. 51. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 143
Tabel 2. 52. Kinerja Urusan Gizi Balita Tahun 2016 - 2019 Kabupaten Ngada 144
Tabel 2. 53. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019 149
Tabel 2. 54. Capaian Kinerja Keluarga Berencana 150
Tabel 2. 55. Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting 3 Tahun Terakhir Per Kecamatan di Kabupaten Ngada 154
Tabel 2. 56. Desa Lokasi Fokus Intervensi Stunting Di Kabupaten Ngada Tahun 2020 dan 2021. 155
Tabel 2. 57. Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi dan Jalan Kewenangan Kabupaten Tahun 2016 - 2019 157
Tabel 2. 58. Panjang Jalan dan Jenis Permukaan Jalan Kewenangan Provinsi dan Jalan Kewenangan Kabupaten Tahun 2016 - 2019 158
Tabel 2. 59. Kondisi Jembatan di Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020 159
Tabel 2. 60. Capaian Kinerja Pembangunan Irigasi Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020 159
Tabel 2. 61. Capaian Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019 161
Tabel 2. 62. Capaian Kinerja Urusan Ketentraman,Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ngada Tahun 2015-2019 163
Tabel 2. 63. Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Ngada Tahun 2016 - 2019 164
Tabel 2. 64. Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2016-2019 172
Tabel 2. 65. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Ngada Tahun 2019 174
Tabel 2. 66. Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020 176
Tabel 2. 67. Data Jumlah Perlengkapan Jalan dan Kendaraan Umum di Kabupaten Ngada Tahun 2016 - 2020 180
Tabel 2. 68. Arus Kedatangan dan Arus Keberangkatan Angkutan Umum Tahun 2017-2019 181

Tabel 2. 69. Jumlah Arus Orang dan Barang,Tahun 2017-2019 182
Tabel 2. 70. Pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada 184
Tabel 2. 71. Perkembangan UMKM Kabupaten Ngada, Tahun 2016-2019 186
Tabel 2. 72. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Ngada Tahun 2016 - 2019 188
Tabel 2. 73. Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan, Tahun 2016-2019 192
Tabel 2. 74. Data Objek Wisata Budaya dan Kunjungan Wisata Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020 194
Tabel 2. 75. Data Objek Wisata Alam dan Kunjungan Wisata KabupatenNgada Tahun 2016-2020 195
Tabel 2. 76. Luas Panen,Produksi, dan Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019 197
Tabel 2. 77. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Potensial Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019 198
Tabel 2. 78. Perkembangan Potensi Komoditas sektor Peternakan Kabupaten Ngada 2016 – 2020 198
Tabel 2. 79. Luas Kawasan Pengembangan Ternak Tahun 2016-2019 199
Tabel 2. 80. Data jumlah Ternak Keluar 200
Tabel 2. 81. Jumlah Pasar dan Pedagang di Kabupaten Ngada, Tahun 2016-2019 203
Tabel 2. 82. Perkembangan Industri Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019 204
Tabel 2. 83. Capaian Indikator Urusan Perencanaan 2016 - 2019 206
Tabel 2. 84. Capian Kinerja Urusan Keuangan 207
Tabel 2. 85. Capain Kienerja Urusan Kepegawian dan Diklat 209
Tabel 2. 86. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020 211
Tabel 2. 87. Rata- Rata Konsumsi per Kapita menurut Kelompok Konsumsi 2016 – 2019 (Rupiah per Bulan) 229
Tabel 2. 88. Jumlah PDRB dari Setiap Sektor dan Angkatan Kerja Kabupaten Ngada Tahun 2016-2018 230
Tabel 2. 89. Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2017 s.d 2019 232
Tabel 2. 90. Rasio Wilayah Produktif 233
Tabel 2. 91. Jenis Simpanan Bank di Kabupaten Ngada per 31 Desember 2017-2019 (Rupiah) 234
Tabel 2. 92. Jumlah Hotel dan Restoran di Kabupaten Ngada Tahun 2016 -2019 234
Tabel 2. 93. Fasilitas Hotel dan Penginapan di Kabupaten Ngada Tahun 2017 -2019 235
Tabel 2. 94. Cakupan Pelayanan Air Bersih PDAM Tahun 2016-2020 236
Tabel 2. 95. Angka Kriminalitas di Kabupaten Ngada Tahun 2016 - 2020 239
Tabel 2. 96. Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Ngada, Tahun 2016-2019 240
Tabel 2. 97. Rasio Lulusan rasio lulusan S1/S2/S3 yang diperoleh dari PNS di Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020 242

Tabel 3. 1. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ngada, Tahun 2016-2020 247
Tabel 3. 2. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017-2019 250
Tabel 3. 3. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ngada Tahun 2018 - 2020 251
Tabel 3. 4. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Ngada, Tahun 2018-2020 252
Tabel 3. 5. komposisi Penutupan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Ngada, Tahun 2018-2020 253

Tabel 3. 6. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Ngada, Tahun 2018-2019 254
Tabel 3. 7. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ngada (Rupiah), Tahun 2022 - 2026 256
Tabel 3. 8. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Ngada (Rupiah), Tahun 2021-2026 261
Tabel 3. 9. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada (Rupiah), Tahun 2021-2026 262

Tabel 4. 1. Permasalahan Pembangunan Daerah Berbasis Urusan Pemerintah 266
Tabel 4. 2. Persentase Pencapaian TPB di Kabupaten Ngada 298
Tabel 4. 3. Kategori TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional 300
Tabel 4. 4. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional 301
Tabel 4. 5. Kategori TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional 310
Tabel 4. 6. Tujuan, Target dan Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional 311
Tabel 4. 7. Indikator yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional 318
Tabel 4. 8. Indikator yang BelumDilaksanakan danBelum Mencapai Target Nasional 319
Tabel 4. 9. Tujuan,Target dan Indikator TPB yang Belum Mempunyai Data 322
Tabel 4. 10. Hasil Telaah Struktur Ruang 340
Tabel 4. 11. Telaahan Pola Ruang Kabupaten Ngada 347
Tabel 4. 12. Telaah Rencana Pembangunan Daerah Sekitar 362
Tabel 4. 13. Daftar Panjang Isu Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Ngada 369
Tabel 4. 14. Hasil Pengelompokan Isu PB Kabupaten Ngada 373
Tabel 4. 15. Keterkaitan Isu KLHS dengan Isu RPJMD 375

Tabel 5. 1. Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026 378
Tabel 5. 2. Keterkaitan Antara Visi-Misi RPJMD Kabupaten Ngada dengan Visi-Misi RPJMN dan RPJMD Provinsi Nusa Tengga Timur 383
Tabel 5. 3. Keterkaitan Tujuan RPJMD dengan Sasaran Pokok RPJPD, dan Arah Kebijakan Tahap 4 RPJPD 385
Tabel 5. 4. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026 391

Tabel 6. 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ngada 2021-2026 404
Tabel 6. 2. Aspek dan Kriteria *Performance Matrix* Pemilihan Alternatif Pengembangan Kabupaten Ngada 421
Tabel 6. 3. Rencana Sistem Pusat Pelayanan di Kabupaten Ngada 425
Tabel 6. 4. Arahan dan Pemanfaatan Kecamatan di Kabupaten Ngada 428
Tabel 6. 5. Program Pembangunan Daerah disertai Pagu Indikatif Kabupaten Ngada 2021-2026 433
Tabel 6. 6. Integrasi Rekomendasi Program KLHS RPJMD ke dalam RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026 509
Tabel 6. 7. Rekomendasi KLHS RPJMD di dalam RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026 515

Tabel 7. 1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngada 2021-2026 579

Tabel 7. 2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Ngada 2021-2026 579

Tabel 8. 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Ngada 2021-2026 655
Tabel 8. 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 656
Tabel 8. 3. Penetapan Indikator Kinerja DaerahTerhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten NgadaTahun 2021-2026 665

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1. Pencapaian TPB/SDGs dalam KLHS RPJMD 2016-2021 20

Grafik 2. 1. Persentase Rincian Pemanfaatan Kawasan Budidaya Kabupaten Ngada 44
Grafik 2. 2. Piramida Penduduk Kabupaten Ngada Tahun 2019 93
Grafik 2. 3. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ngada Tahun 2016 -2020 95
Grafik 2. 4. Perkembangan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier terhadap PDRB ADHB Kabupaten Ngada, Tahun 2016 – 2019 97
Grafik 2. 5. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngada, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2020 (%) 99
Grafik 2. 6. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Ngada Tahun 2016 -2019 99
Grafik 2. 7. Inflasi Maumere, Kota Kupang, NTT dan Nasional Tahun 2016 - 2019 102
Grafik 2. 8. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ngada 2016-2020 106
Grafik 2. 9. Persentase Pola Pengeluaran Perkapita Perbulan Kab. Ngada untuk Makanan dan Non Makanan 2016-2020 107
Grafik 2. 10. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020 108
Grafik 2. 11. Perkembangan IPM Kabupaten Ngada, Kota Kupang, Prov. NTT dan Nasional Tahun 2016-2020 110
Grafik 2. 12. Perkembangan Angka Harapan Hidup Ngada, NTT dan Indonesia Tahun 2016-2020 111
Grafik 2. 13. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kabupaten Ngada, NTT dan Indonesia Tahun 2016-2020 112
Grafik 2. 14. Perkembangan Rata – rata Lama Sekolah Kabupaten Ngada, NTT dan Nasional 2016-2020 113
Grafik 2. 15. Perkembangan Daya Beli Kabupaten Ngada, NTT dan Nasional Tahun 2016-2019 114
Grafik 2. 16. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, dan Nasional tahun2017-2020 115
Grafik 2. 17. Penduduk 15 tahun keatas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2020 116
Grafik 2. 18. Penduduk 15 tahun keatas yang menganggur menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2020 116
Grafik 2. 19. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Ngada dan Provinsi NTT Tahun 2017-2020 117
Grafik 2. 20. Capaian Indikator Pendidikan Anak Usia Dini /TK Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020 124
Grafik 2. 21. Capaian Indikator APK,APM,APS Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020 124

Grafik 2. 22. Persentase Capaian Indikator Angka Kelulusan di Kabupaten Ngada Tahun 2016 – 2019 126
Grafik 2. 23. Capaian Indikator Jumlah Siswa Melanjutkan Sekolah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019 127
Grafik 2. 24. Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019 127
Grafik 2. 25. Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi SI/D-IV Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019 130
Grafik 2. 26. Capaian Indikator Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Tahun 2016-2019 131
Grafik 2. 27. Jumlah Penambahan Sarana Puskesmas di Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2011-2019 132
Grafik 2. 28. Persentase Cakupan Pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Ngada 2016-2019 134
Grafik 2. 29. Strata Posyandu di Kabupaten Ngada Tahun 2019 136
Grafik 2. 30. Persentase Pemanfaatan RSUD Bajawa Lima Tahunan dari 2015-2019 138
Grafik 2. 31. Capaian Indikator Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Ngada 2016-2019 144
Grafik 2. 32. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Tahun 2016 – 2019 146
Grafik 2. 33. Cakupan Pelayanan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019 147
Grafik 2. 34. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019 148
Grafik 2. 35. Cakupan Penjaringan Anak Usia Pendidikan Dasar 150
Grafik 2. 36. Capian Kinerja Pelayanan Penduduk Usia Lansia 151
Grafik 2. 37. Capaian Kinerja Pelayanan Penyakit Tidak Menular 152
Grafik 2. 38. Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019 166
Grafik 2. 39. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019 168
Grafik 2. 40. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019 169
Grafik 2. 41. Capaian Kinerja Urusan Pangan Nabati Tahun 2016-2019 170
Grafik 2. 42. Produksi Komoditas Pangan Hewani Tahun 2016-2019 171
Grafik 2. 43. Persentase Kinerja Penanganan Persampahan Tahun 2016-2019 174
Grafik 2. 44. Persentase IDM Kabupaten Ngada Tahun 2019 dan 2020 177
Grafik 2. 45. Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur Kabupaten Ngada 2017-2019 178
Grafik 2. 46. Cakupan PUS yang ingin ber KB Tidak Terpenuhi (*unmetneed*) 179
Grafik 2. 47. Angka Kecelakaan di Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020 181
Grafik 2. 48. Jumlah Pengguna HP, Internet dan Komputer Tahun 2017-2019 183
Grafik 2. 49. Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Ngada Tahun 2017-2019 185
Grafik 2. 50. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku di Kabupaten Ngada Tahun 2020 191
Grafik 2. 51. Capaian Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019 202
Grafik 2. 52. Jumlah Rata- Rata Konsumsi per Kapita menurut Kelompok Konsumsi 2016 – 2019 (Rupiah per Bulan) 225
Grafik 2. 53. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Makanan dan Non Makanan dalam Sebulan di Kabupaten Ngada dan Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2018-2019 (Rupiah) 226
Grafik 2. 54. Nilai Tukar Petani di Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020 228

Grafik 2. 55. Produktivitas Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 -2018 230
Grafik 2. 56. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2016 – 2019 232
Grafik 2. 57. Capaian Pelayanan Air Bersih 237
Grafik 2. 58. Pengguna HP dan Layanan internet Tahun 2017-2019 238
Grafik 2. 59. Penggunaan Media Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada 238
Grafik 2. 60. Rasio Ketergantungan 243

Grafik 3. 1. Proporsi Aset Kabupaten Ngada Tahun 2019 249

Grafik 4. 1. Persentase Capaian Indikator TPB 299
Grafik 4. 2. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional 300
Grafik 4. 3. Indikator yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional 310
Grafik 4. 4. Indikator yang BelumDilaksanakan danBelum Mencapai Target Nasional 319
Grafik 4. 5. Indikator TPB yang Belum Mempunyai Data 322

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan 8
Gambar 1. 2. Peta Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara 10
Gambar 1. 3. Integrasi Muatan KLHS RPJMD ke dalam Dokumen RPJMD 18
Gambar 1. 4. Indikator Tujuan pembangunan berkelanjutan 20

Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kabupaten Ngada 29
Gambar 2. 2. Peta Kondisi Topografi Kabupaten Ngada 31
Gambar 2. 3. Peta Ketersediaan Pangan (Beras) Kabupaten Ngada 54
Gambar 2. 4. Peta Kebutuhan Pangan (Beras) Kabupaten Ngada 55
Gambar 2. 5. Peta Status Daya Dukung Pangan (Beras) Kabupaten Ngada 56
Gambar 2. 6. Peta Ketersediaan Air Kabupaten Ngada 63
Gambar 2. 7. Peta Kebutuhan Air Kabupaten Ngada 64
Gambar 2. 8. Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Ngada 65
Gambar 2. 9. Kondisi Tempat Pembuangan Sampah sementara yang tidak layak 175

Gambar 5. 1. Filosofi Tuka, Tuku, Teka dalam Kehidupan Masyarakat Ngada 377

Gambar 6. 1. Peta Rencana Pengembangan Wilayah Kabupaten Ngada 424
Gambar 6. 2. Program Tematik-Holistik menjabarkan *Tagline* Tante Nela Paris 507

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Ngada yang terbentuk sejak Tahun 1958 melalui Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Ngada merupakan gabungan dari tiga daerah Swapraja yaitu Swapraja Ngadha, Swapraja Nagekeo dan Swapraja Riung, sehingga corak budaya dan ragam sosial yang dimiliki sangat bervariasi yang juga memberikan ciri dan corak khusus pada perilaku masyarakat.

Perkembangan pembangunan Kabupaten Ngada sampai dengan saat ini telah dirasakan manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun seiring dengan dinamika pembangunan serta kebutuhan masyarakat dan tantangan pada masa mendatang, diperlukan keberlanjutan dan perubahan kearah yang lebih baik. Proses pembangunan diharapkan dapat mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Ngada 2006-2026 untuk mewujudkan "**Masyarakat Unggul dan Mandiri**"

Periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Ngada 2021-2026 merupakan periode kepemimpinan **Bupati Paru Andreas, S.H., M.H dan Wakil Bupati Raymundus Bena, S.S., M.Hum.** Pasangan Bupati dan Wakil Bupati berupaya mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan melalui dukungan segenap sumber daya Kabupaten Ngada, serta kolaborasi dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Upaya mewujudkan visi, misi dan program pembangunan diawali dengan proses perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah

kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN.

Penyusunan dan pelaksanaan dokumen RPJMD harus berpedoman pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB beserta skenario implementasinya memberikan konsep dasar dalam penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program serta pilihan indikator pembangunan jangka menengah yang akan dijalankan oleh Kabupaten Ngada. TPB sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyususnan RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2021 -2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk PenangananPandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang MembahayakanPerekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem KeuanganMenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Ngada dengan Kabupaten Nagekeo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1098);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Ngada dengan Kabupaten Manggarai Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 796);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);

35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1. 1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan

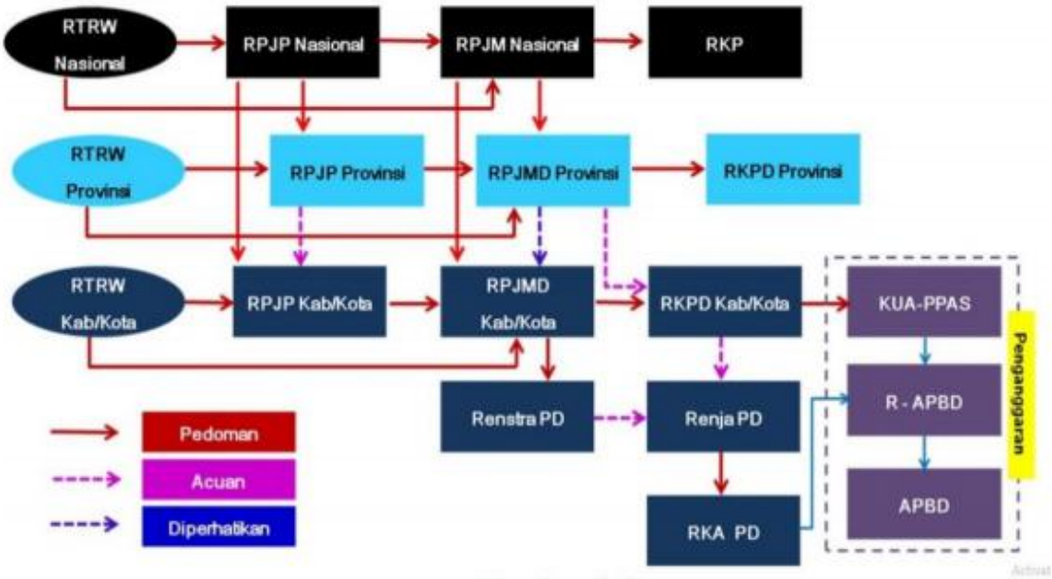

Sumber: Permendagri No.86 Tahun 2017

1.3.1. Keselarasan RPJMD dengan RPJMN 2020-2024

RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026 memperhatikan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024 karena pembangunan daerah merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Tujuan pembangunan Nasional akan tercapai jika didukung oleh pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pendapatan perkapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian

yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut, Presiden menetapkan 5 arahan pembangunan utama yang harus diperhatikan oleh semua pemangku kepentingan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Dalam RPJMN untuk wilayah Nusa Tenggara permasalahan pembangunan dapat dijelaskan sebagi berikut : Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara masih menghadapi permasalahan: (a) belum optimalnya pelayanan dasar, (b) belum optimalnya pengembangan potensi unggulan berbasis sumberdaya alam; (c) belum terwujudnya konektivitas yang memadai khususnya intrapulau dan antarpulau di Kepulauan Nusa Tenggara; (d) belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan; (e) masih lemahnya tata kelola pemerintahan daerah; dan (e) masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai, serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan. Sesuai dengan permasalahan pembangunan tersebut, dalam RPJMN telah ditetapkan sasaran/target pembangunan wilayan Nusa Tenggara sebagai berikut :

Tabel 1. 1. Target Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara Timur dalam RPJMN 2020-2024

Indikator Pembangunan	Target NTT dalam RPJMN 2020-2024			
	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,50	6,90	7,30	7,50
Tingkat Kemiskinan (%)	17,35	16,15	14,56	12,35
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,70	2,60	2,20	2,00
Perkiraan kebutuhan investasi (Rp triliun)	63,91	71,47	80,94	91,78

Gambar 1. 2. Peta Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara

Sumber : RPJMN 2020 -2024

Untuk mencapai target Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dalam tahun 2020-2024 diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah di bidang perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong transformasi perekonomian dengan memperkuat peran sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan *industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE); industri kreatif berbasis budaya, percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; serta pengembangan industri mangan dan tembaga. Sementara itu, strategi pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Kabupaten Ngada secara khusus bagian dari koridor pertumbuhan wilayah NTT, dengan beberapa prioritas pembangunan berupa pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antar kampung berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa Bersama, pengembangan komoditas unggulan kopi, serta pengembangan komoditas unggulan lada, pala dan cengkeh.

1.3.2. Keselarasan RPJMD dengan RPJMD-P Povinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023

RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026 harus memperhatikan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 karena Pembangunan kabupaten merupakan bagian dari pembangunan provinsi. Tujuan Pembangunan provinsi akan dapat dicapai apabila didukung oleh pembangunan kabupaten yang selaras dengan tujuan pembangunan provinsi.

Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2018-2023 merupakan gambaran pernyataan kondisi yang dicita-citakan pada tahun 2023, yaitu:

"NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".

Visi ini kemudian dicapai melalui penjabaran misi Provinsi yang terdiri atas 5 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional *(Ring of Beauty);*
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam menjalankan misi RPJMD, telah diuraikan berbagai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Rumusan tujuan, sasaran dan indikator masing-masing digunakan untuk mencapai target indikator makro RPJMD-P yang perlu didukung pencapaiannya oleh kabupaten sebagai berikut:

Tabel 1. 2. Indikator Makro Provinsi NTT 2019-2023 dalam RPJMD-P

Indikator	*Baseline*	Target		
		2021	2022	2023
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,20	5,87-6,50	6,33-6,90	6,7-7,3
PDRB per kapita (Rp juta)	19,5	20-23	23-25	25-27

Indikator	*Baseline*	Target		
		2021	2022	2023
Indeks Pembanguna Manusia (poin)	65,23	65,54-67	67,35-69	70-71
Penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	20,62	21-19,63	19,35-16,15	15-12
Inflasi (%)	0,67	3-3,34	3-3,32	3-3,32
Prevalensi stunting (%)	27,9	21,8	16,7	10-12
Indeks Gini (poin)	0,355	0,35-0,34	0,34-0,33	0,34-0,32
Indeks Pembangunan Gender (poin)	92,72	94	95	95
Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,35	3,2-2,6	2,5-1,9	1,9-1,5
Rasio PAD (%)	23,90	25,31	30,12	39,74
Emisi gas rumah kaca ($tCO2^{eq}$)	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829
Kebutuhan investasi (Rp triliun)	44,93	63,91	71,47	80,94
Indeks Reformasi Birokrasi (poin)	60,37	65	69	71

1.3.3. Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Ngada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada merupakan dokumen perencanaan yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD harus berpedoman kepada RPJPD. RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2006-2026 memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Tabel 1. 3. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Ngada 2006-2026

Visi RPJPD 2006-2026	Misi RPJPD 2021-2026
Terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Ngada berbasis keunggulan dan kemandirian	1. Memberdayakan masyarakat sebagai kekuatan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan
	2. Memberdayakan institusi-institusi sosial kemasyarakatan sebagai wahana untuk menumbuhkembangkan etos kerja dan kemampuan produktif masyarakat
	3. Mendorong perwujudan institusi pemerintah yang bersih, berakuntabilitas tinggi, efisien, efektif, dan berkarakter melayani
	4. Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan yang berkelanjutan, selaras lingkungan dan pelayanan publik yang efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Visi RPJPD 2006-2026	Misi RPJPD 2021-2026
	5. Mendorong penciptaan sinergi antara berbagai elemen strategis masyarakat sebagai modal sosial untuk menciptakan dan menjamin terlaksananya pembangunan secara optimal dan berkesinambungan

Arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Ngada 2006–2026 merupakan koridor yang dibentuk untuk mengarahkan jalannya pembangunan selama 20 tahun berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Ngada yang telah ditetapkan. Sejalan dengan agenda pembangunan Nasional dan Pembangunan Provinsi NTT, ditetapkan 9 agenda yang menjadi sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing masyarakat.
2. Pengembangan ekonomi
3. Pemantapan penyelenggaraan pemerintah
4. Penegakan hukum dan HAM
5. Pemberdayaan perempuan, pemuda dan perlindungan anak
6. Penguatan kelembagaan sosial kemasyarakatan
7. Pengembangan wilayah
8. Pengembangan institusi kepemilikan tanah
9. Peningkatan kapitalisasi perdesaan

1.3.4. Keselarasan RPJMD dan RTRW Kabupaten Ngada

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada. Rencana tata ruang wilayah berisikan rencana pola ruang dan struktur ruang yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan sejumlah program pembangunan. Tujuan penataan ruang daerah Kabupaten Ngada yaitu mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pariwisata didukung kawasan agropolitan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Adapun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Ngada yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Pemantapan sistem agropolitan, agroindustri dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam ekowisata;
2. Pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan;
3. Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis antara pusat pengembangan utama di ibukota daerah dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman perdesaan berbasis agropolitan, agroindustri dan minapolitan;
4. Pengembangan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi pertanian dan pelayanan pariwisata;
5. Pendayagunaan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku, sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian;
6. Peningkatan jaringan energi dan pelayanan secara merata sampai pada pelosok;
7. Peningkatan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan telekomunikasi serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan pertanian, pariwisata, dan perikanan kelautan;
8. Pengoptimalan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan dan limbah guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih
9. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang penelitian, dan edukasi;
10. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan, agroindustri, minapolitan dan ekowisata, dengan tetap mengembangkan sektor-sektor lain sebagai sektor pendukung pertumbuhan perekonomian wilayah;

11. Pengembangan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis budaya dan kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan; dan
12. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan pesisir untuk meningkatkan kualitas lingkungan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil sebagai sektor pendukung wisata.

Tabel 1. 4. Keselarasan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Ngada

No	Arahan Indikasi Program RTRW Kabupaten Ngada 2012-2032 pada PJM-3	Program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Ngada
1	**Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut** (Peningkatan fungsi & status Pelabuhan Aimere sebagai Pelabuhan pengumpan)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2	**Sistem Jaringan Prasarana Energi** (Penyusunan Masterplan Kelistrikan Kabupaten Ngada dan Pengembangan Pembangkit listrik Tenaga Surya)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3	**Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi**	- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) - Program Informasi dan Komunikasi Publik - Program Aplikasi Informatika
4	**Sistem Jaringan Sumber Daya Air** (Pengembangan kinerja pengelolaan air minum berkualitas, Penguatan Kawasan Tangkapan Air, Optimalisasi pelayanan air bersih melalui pengembangan kapasitas dan jaringan, Memperluas jangkauan layanan untuk wilayah yang belum terlayani jaringan pipa air bersih)	- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Sumber Air Minum
5	**Hutan Lindung** (Mempertahankan fungsi kawasan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung)	- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

No	Arahan Indikasi Program RTRW Kabupaten Ngada 2012-2032 pada PJM-3	Program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Ngada
		(KEHATI) - Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
6	**Kawasan Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya** (Perlindungan terhadap kawasan resapan air dengan menghindari pengembangan perkebunan pada kawasan ini)	- Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7	**Kawasan Lindung Geologi** (Membatasi aktivitas pada kawasan rawan bencana geologi, Pelindungan Cagar Alam Geologi mata Air Panas Soa, Menjaga Kelestarian Air Tanah)	- Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
8	**Kawasan Perlindungan Lainnya (Terumbu Karang)**	- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang - Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
9	**Hutan Produksi** (Memantapkan produktivitas Hutan Produksi dan Reboisasi Hutan)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
10	**Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian**	- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Perizinan Usaha Pertanian - Program Penyuluhan Pertanian - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
11	**Pengembangan Kawasan**	- Program Pengelolaan Perikanan

No	Arahan Indikasi Program RTRW Kabupaten Ngada 2012-2032 pada PJM-3	Program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Ngada
	Peruntukan Perikanan	Tangkap - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
12	**Kawasan Peruntukan Pertambangan**	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
13	**Kawasan Peruntukan Industri** (Pemeliharaan/ rehabilitasi kawasan industri dan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
14	**Kawasan Peruntukan Permukiman** (Pengembangan Pemukiman Perkotaan dan Pengembangan Pemukiman Perdesaan)	Program Kawasan Permukiman

1.3.5. Keselarasan RPJMD dengan KLHS

KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang bertujuan untuk memastikan kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. Pembangunan berkelanjutan sendiri diartikan sebagai suatu upaya untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan tidak melebihi kemampuan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup, sehingga tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Pelaksanaan KLHS RPJMD didasarkan pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, pembentukan tim kelompok kerja KLHS RPJMD;
2. Tahap pengkajian pembangunan berkelanjutan;

3. Tahap penyusunan skenario dan rekomendasi pembangunan berkelanjutan;
4. Tahap pelaporan; dan
5. Tahap penjaminan pualitas, pendokumentasian, dan validasi.

Pada tahapan kelima yaitu pendokumentasian dan validasi terdapat arahan untuk melakukan pengintegrasian muatan-muatan hasil laporan KLHS RPJMD ke dalam dokumen RPJMD. Secara garis besar, proses integrasi muatan KLHS RPJMD ke dalam dokumen RPJMD ditampilkan pada gambar berikut.

Gambar 1. 3. Integrasi Muatan KLHS RPJMD ke dalam Dokumen RPJMD

Sumber: Paparan Kementerian Dalam Negeri, 2018

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengintegrasian pelaksanaan KLHS RPJMD ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026 dimaksudkan untuk memastikan prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026. Terintegrasinya prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan

Kabupaten Ngada sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar pelaksanaan KLHS diterapkan sejak dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan ke dalam empat pilar, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

Pemerintah Kabupaten Ngadaturut berperan aktif dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development* Goals(SDGs). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdapat 319 indikator sasaran dan sesuai dengan kewenangan Kabupaten Ngada terdapat 220 indikator seperti tergambar dalam bagan alir berikut:

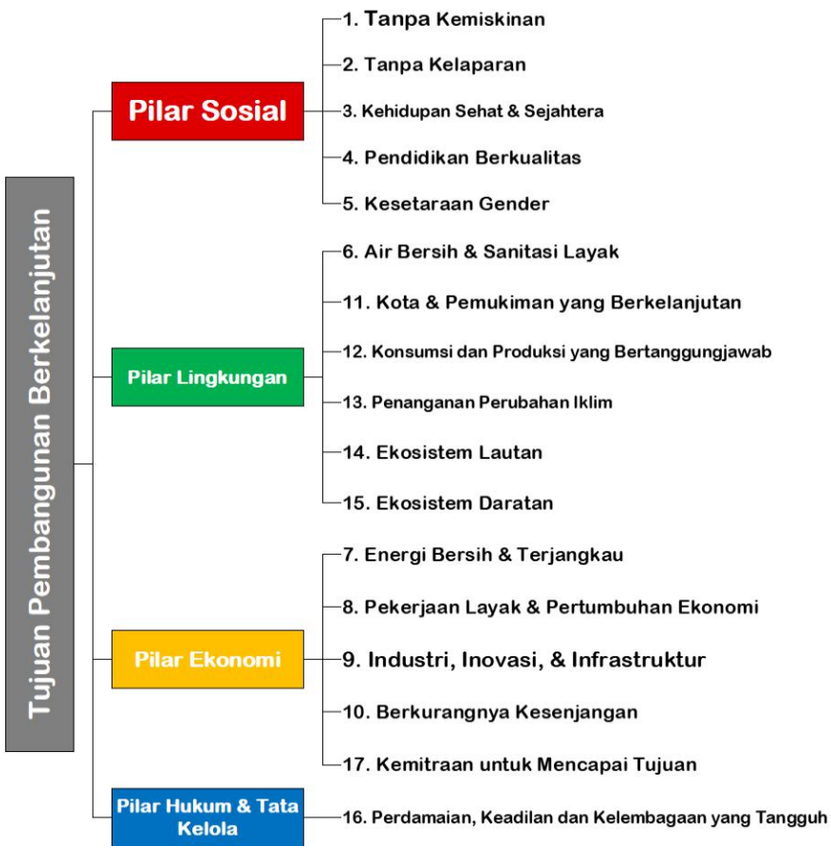

Gambar 1. 4. Indikator Tujuan pembangunan berkelanjutan

Hasil Penilaian Pencapaian TPB/SDGs dalam KLHS RPJMD tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 1. 1. Pencapaian TPB/SDGs dalam KLHS RPJMD 2016-2021

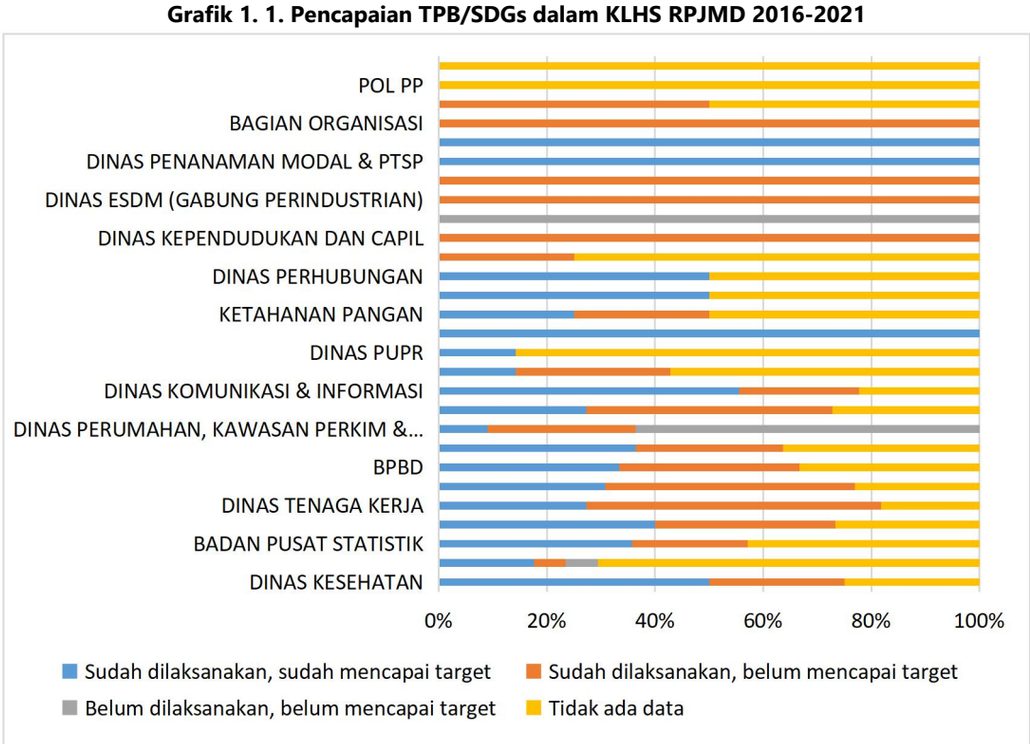

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2021-2026

Dari 220 indikator SDGs terdapat 79 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 61 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target, 11 indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target dan 69 indikator yang tidak ada data.

Tabel 1. 5. Pencapaian TPB RPJMD Kabupaten Ngada

NO TPB	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target	Sudah dilaksanakan, belum mencapai target	Belum dilaksanakan, belum mencapai target	Tidak ada data
TPB 1. Tanpa Kemiskinan	9	11	0	4
TPB 2. Tanpa Kelaparan	7	1	0	3
TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	14	10	0	10
TPB 4. Pendidikan Berkualitas	6	5	0	2
TPB 5. Kesetaraan Gender	7	4	0	3
TPB. 6 Air Bersih	2	2	7	7
TPB 7. Akses Energi	0	0	0	2
TPB 8. Pertumbuhan Ekonomi	7	9	0	3
TPB 9. Inovasi Industri Infrastruktur	5	1	0	7
TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan	2	3	0	6
TPB 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	5	3	0	5
TPB 12. Produksi Berkelanjutan	0	0	0	5
TPB 13. Perubahan Iklim	1	1	0	0
TPB 15. Ekosistem Daratan	1	1	1	1
TPB 16. Perdamaian dan Keadilan	5	5	0	11
TPB 17. Kemitraan Berkelanjutan	8	5	3	0
Jumlah	**79**	**61**	**11**	**69**

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2021-2026

Pasal 16 Permendagri 07 Tahun 2018 menyatakan bahwa laporan KLHS RPJMD yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen RPJMD digunakan untuk: a. gambaran umum kondisi daerah; b. permasalahan dan isu strategis daerah; c. tujuan; dan d. sasaran strategis. Isu Strategis Daerah dirumuskan pada saat dilakukan Uji Publik – I. Pada penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Ngada ini, Uji Publik – 1 dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2020di Aula BP-Litbang Kabupaten Ngada. Uji publik dihadiri oleh penyusun KLHS, OPD terkait, akademisi, LSM, filantropi, organisasi rmasyarakat dan perusahaan swasta. Isu utama didapatkan dengan mengumpulkan isu pembangunan berkelanjutan dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan, daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan terdiri dari 65 isu pembangunan berkelanjutan. Hasil telaah isu pembangunan berkelanjutan dijelaskan pada Bab 4 terkait dengan penentuan isu strategis daerah. KLHS RPJMD juga telah merumuskan skenario pembangunan yang dijalankan dalam RPJMD, yaitu:

1. **Indikator yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional, namun daya tampung dan daya dukung lingkungan sudah terlampaui**, maka indikator tetap dapat dilaksanakan dalam RPJMD 2021-2026, namun perlu kehati-hatian dalam menjalankan program agar daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak semakin menurun kemampuannya;
2. **Indikator yang telah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional**, maka indikator tersebut tetap dapat dilaksanakan dalam RPJMD 2021-2026 dengan berbagai upaya tambahan. Upaya tambahan diperlukan agar target nasional dapat tercapai di akhir periode, namun tetap harus memperhatikan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
3. **Indikator yang menjadi isu utama pembangunan berkelanjutan berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan dalam uji publik 1**, maka indikator tersebut dapat dilaksanakan dalam RPJMD 2021-2026 dengan upaya tambahan dan tetap harus

memperhatikan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

4. **Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) jasa ekosistem serta 6 muatan kajian KLHS yang terkait dengan TPB**. Indikator yang terkait dengan kondisi DDDTLH difokuskan pada kriteria DDDTLH yang sudah melampaui kemampuannya serta mempunyai keterkaitan dengan 6 muatan KLHS. Tujuannya supaya kemampuan DDDTLH menjadi lebih baik pada akhir masa perencanaan.

1.3.6. Keselarasan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan RPJMD

RPJMD merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah. Berbagai isu dan permasalahan sektoral yang berasal dari masing-masing perangkat daerah juga menjadi bahan penyusunan RPJMD. Sinergi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah akan menopang efektivitas pencapaian indikator kinerja kepala daerah yang ditopang oleh capaian kinerja Kepala Perangkat Daerah Bersama unit kerja di bawahnya.

1.3.7. Keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan RPJMD

Rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam setiap tahun dijabarkan oleh dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD, terutama berupa prioritas pembangunan tahunan berpedoman kepada arah kebijakan atau tema pembangunan tahunan. RKPD juga memiliki peran strategis untuk mensinkronkan RPJMD dengan penganggaran, karena RKPD menjadi pedomana dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3.8. Keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan RPJMD

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota, sehingga perencanaan pembangunan desa harus sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. RPJMD dalam hal ini berperan sebagai instrument penyelarasan RPJM Desa dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.

1.4. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2021-2026 adalah menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Ngada sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan Ngada 2021-2026. Sesuai dari maksud tersebut, maka tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra);
2. Memberikan pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Tahun 2021-2026;
3. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Ngada dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan

5. Membangun integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2021-2026 disusun menurut sistematika sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 86 tahun 2017 yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Ngada yang meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing. Gambaran umum kondisi Kabupaten Ngada saat ini akan menjadi dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah serta perumusan rencana pembangunan dalam tiga tahun mendatang.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan periode 2021-2026.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Pada bab ini diuraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta berbagai isu strategis global, nasional, provinsi, rencana tata ruang

wilayah, kajian lingkungan hidup strategis dan tujuan pembangunan berkelanjutan, hingga penetapan isu strategis Kabupaten Ngada.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bab ini menguraikan visi dan misi Kabupaten Ngada yang ditopang oleh tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menguraikan pilihan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan untuk setiap strategi. Bab VI juga memuat tentang arah kebijakan kewilayahan dan program pembangunan daerah sebagai program prioritas berbasis pencapaian visi dan misi.

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat tentang kerangka pendanaan dan rumusan program perangkat daerah di seluruh urusan pemerintah daerah.

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini memuat tentang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB IX Penutup

Bagian penutup memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pedoman masa transisi.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi daerah berkaitan dengan letak geografi suatu wilayah. Letak geografi merupakan letak suatu wilayah yang dilihat dari keberadaan nyatanya di permukaan bumi. Analisis pada aspek geografi kabupaten perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Aspek geografi ini lebih kepada fisik bumi seperti lokasi suatu wilayah, bentuk permukaan bumi, unsur – unsur di permukaan bumi sehingga dapat diketahui batas – batas wilayah dengan ciri – ciri tertentu. Fisik bumi dapat dilihat dari unsur di kulit bumi, tanah, air, cuaca / iklim, flora dan fauna. Sedangkan Aspek Kependudukanataudemografi suatu daerah diukur berdasarkan dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria sepertipendidikan, kewarganegaraan, agama atau etnisitas tertentu. Dalam pembangunan suatu daerah, penduduk merupakan modal atau aset penting dalam menggerakan pembangunan. Diharapkan bukan hanya saja jumlah yang besar tetapi juga kualitas penduduknya.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas Wilayah Kabupaten Ngada dapat digambarkan sebagai berikut : luas daratan 1.620,92 Km² dan luas perairan 708,64 Km² dengan panjang pantai 102,318 Km.Kabupaten Ngada terdiri dari 12 kecamatan dengan luas

daratan terbesar ada di Kecamatan Riung yang mencapai 327,94 Km^2 atau 20,23% dari keseluruhan luas wilayah daratan Kabupaten Ngada dan luas daratan terkecil ada di wilayah Kecamatan Jerebuu yakni seluas 64,90 km^2 atau hanya 4%.

Tabel 2. 1. Topografi Kabupaten Ngada Menurut Kecamatan dan Ketinggian

No	Kecamatan	Ketinggian (meter)				
		< 250	251 – 500	501 – 750	751 – 1000	>1000
1.	Aimere	41,76	45,79	32,56	18,40	16,67
2.	Jerebuu	0,21	8,35	13,69	9,33	19,65
3.	Inerie	27,53	23,98	13,95	6,51	7,86
4.	Bajawa	-	0,13	3,76	15,62	73,54
5.	Golewa Barat	-	7,65	11,42	10,22	38,93
6.	Golewa Selatan	23,23	24,23	25,80	15,66	4,02
7.	Golewa	-	8,45	20,36	30,60	27,43
8.	Bajawa Utara		21,20	61,53	28,31	38,09
9.	Soa	6,24	62,67	16,39	-	-
10.	Riung	159,42	108,23	56,40	78,29	3,37
11.	Riung Barat	3,57	31,66	83,99	128,53	30,23
12.	Wolomeze	1,20	83,88	83,21	38,83	15,38

Sumber: RTRW Kabupaten Ngada Tahun 2020-2040

Sedangkan untuk perairan terbagi atas perairan sebelah Utara dan Selatan dengan rincian : luas perairan pantai Utara 381,58 Km2 dengan panjang pantai 58,17 Km, sedangkan luas perairan pantai Selatan 327,06 Km2 dengan panjang pantai 44,15 Km.Secara administratif Kabupaten Ngada berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Nagekeo; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Timur.

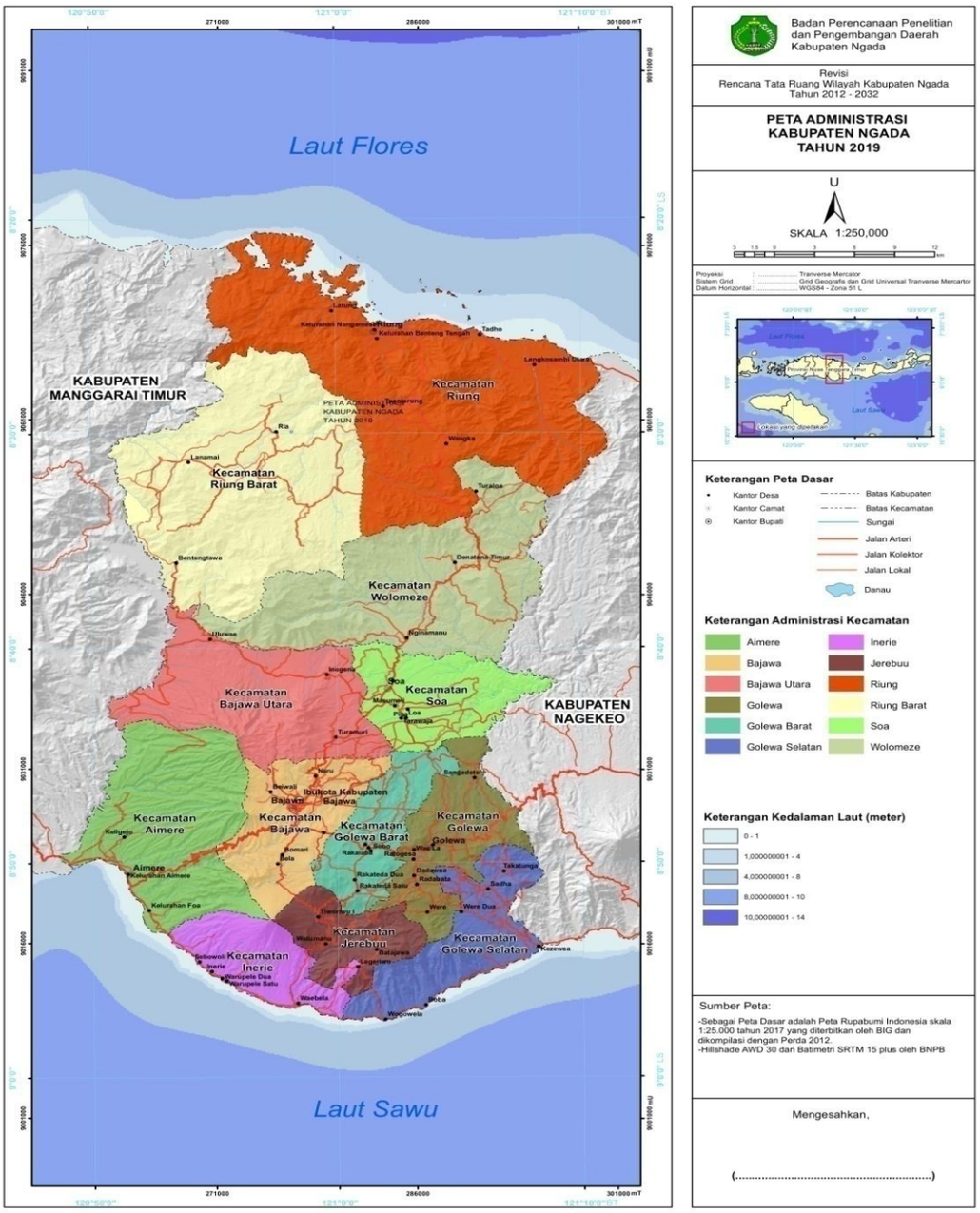

Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kabupaten Ngada

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kabupaten Ngada terletak diantara 8° 20′ 24.28″ – 8° 57′ 28.39″ Lintang Selatan dan 120° 48′ 29.26″ – 121° 11′ 8.57″Bujur Timur. Secara Geostrategik posisi Kabupaten Ngada yang berada di tengah – tengah Pulau Flores serta terletak diantara dua lautan yakni Laut Sawu dan Laut Flores ini memungkinkan Ngada dilimpahi dengan potensi laut yang banyak yang memungkinkan untuk menjadi potensi pengembangan bidang pariwisata dan ekonomi sedangkan dalam bidang transportasi Ngada menjadi jalur lalu lintas yang menghubungkan wilayah di Flores Bagian Barat dengan Flores Bagian Timur, Pulau Timor, Pulau Sumba serta wilayah lain di Indonesia.

2.1.1.3. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Ngada merupakan daerah berbukit dengan tingkat kemiringan lahan yang relatif tinggi. Komposisi kemiringan lereng mayoritas pada kemiringan 26-40% yaitu sebanyak 21,5% dari total luas lahan di Kabupaten Ngada. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Ngada merupakan daerah dengan gunungapi aktif maupun sisa gunungapi yang yang usianya masih tergolong muda sehingga terbentuk kontur atau relief bergunung dan berbukit. Kondisi topografi perbukitan dan pegunungan ini menjadikan banyak daerah-daerah rawan bencana alam seperti longsor terutama di wilayah Kabupaten Ngada bagian selatan. Wilayah Kabupaten Ngada didominasi oleh wilayah dengan ketinggian 0-250 mdpl, tetapi sebagian besar wilayah permukiman terdapat pada ketinggian lebih dari 250 mdpl. Jabaran

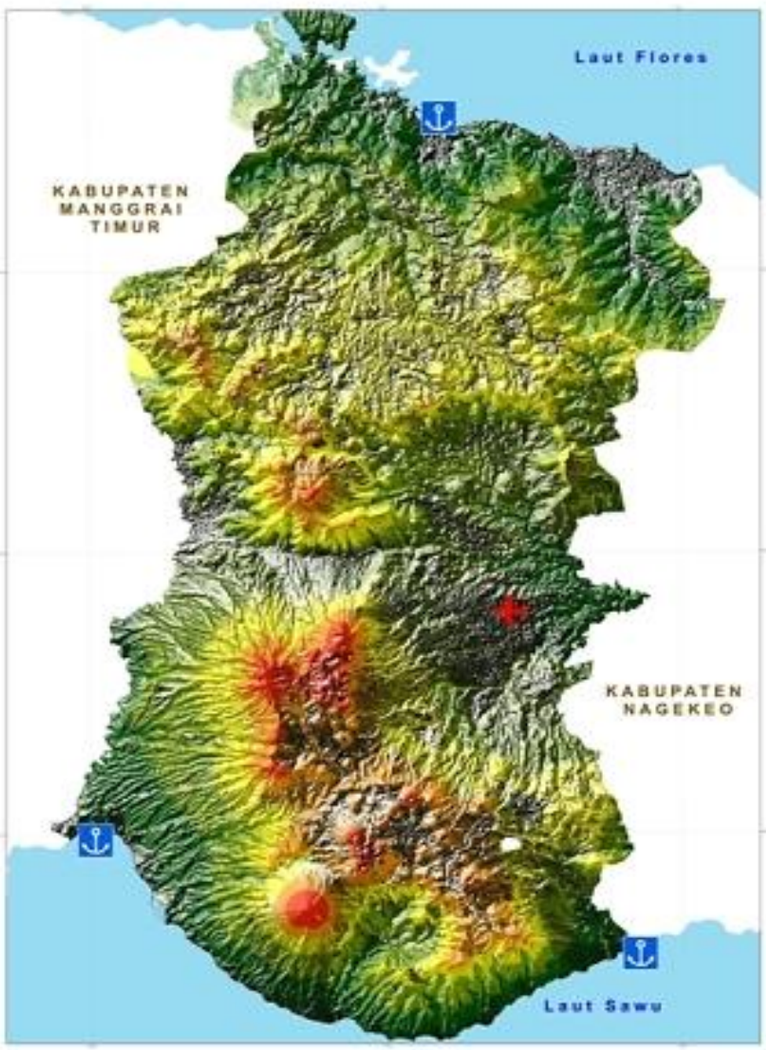

lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2. 2. Peta Kondisi Topografi Kabupaten Ngada

Sumber : RTRW Kabupaten Ngada Tahun 2020-2040

Secara umum kondisi topografi di Kabupaten Ngada dapat dikelompokkan menjadi 5 kelas berdasarkan klasifikasi kemiringan lereng dari Van Zuidam yaitu, datar, landai, miring, terjal, dan sangat terjal. Kelas datar terdapat pada sisi Utara dan berhadapan langsung dengan Laut Flores. Kondisi topografi dengan kelerangan datar lebih tepatnya terdapat pada bentang alam dataran aluvial yang merupakan hasil endapan aluvial yang terbawa melalui sungai. Kondisi kelerangan datar hanya terdapat disebagian kecil wilayah Kecamatan Riung. Kondisi topografi dengan kelerengan landai terdapat pada sisi Timur dari Kabupaten Ngada dan terletak diantara perbukitan dan pegunungan yang ada di sisi Barat, Utara dan Selatan. Sebagian besar wilayah Kecamatan Soa dan sebagian wilayah Kecamatan Wolomeze merupakan wilayah dengan topografi yang memiliki kondisi kelerengan landai. Topografi dengan kondisi kelerengan miring dan terjal meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Ngada. Terdapat banyak kecamatan yang termasuk ke dalam kondisi kelerengan miring dan terjal. Kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Inerie, Kecamatan Aimere, Kecamatan Riung dan Kecamatan Riung Barat. Topografi dengan kondisi kelerengan sangat terjal terdapat di bagian Tengah dan Selatan dari Kabupaten Ngada, pada umumnya merupakan igir perbukitan dan pegunungan serta kerucut dari gunungapi.

Tabel 2. 2. Kluster Kondisi Topografi di Kabupaten Ngada

No.	Kluster Kondisi Topografi	Kecamatan
1.	Dataran rendah pesisir	Kecamatan Aimere, Kecamatan Inerie, Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Riung
2.	Perbukitan rendah	Kecamatan Wolomeze dan Kecamatan Soa
3.	Pegunungan	Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Jerebuu, dan Kecamatan Riung Barat.

Sumber : RTRW Kabupaten Ngada, 2020-2040

2.1.1.4. Kondisi Geologi

Pembahasan tentang geologi Kabupaten Ngada meliputi geomorfologi, stratigrafi, struktur geologi, potensi sumber daya geologi, potensi kebencanaan geologi, potensi kawasan lindung geologi dan potensi kawasan strategis panas bumi. Pembahasan geologi didasarkan atas *Peta Geologi lembar Ruteng berskala 1: 250.000* (Koesoemadinata, Noya dan Kadarisman,1994), dan penelitian berjudul *Pleistocene Geology, Palaeontology and* Archaeology *of The Soa Basin,Central Flores, Indonesia* (Aziz, Morwood, and van den Bergh, 2008), *Tectonic of the Indonesian Region,* (Hamilton,1979) dan beberapa *peta tematik* dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (2015).

Geomorfologi Kabupaten Ngada hampir sebagian besar (2/3 bagian) di bagian Selatan berupa bentang alam pegununganvulkanik Kwarter (gunung api Kwarter), dengan morfologinya berupa pegunungan dengan beberapa kawah seperti di Gunung Inerie (2130 m), Gunung Wolomeze (1494 m) dan beberapa bekas kawah diantaranya di Menge. Bentang alam pegunungan vulkanik Kwarter ini banyak dipengaruhi oleh letak kawah gunung api sebagai pusat erupsi yang menghasilkan endapan gunung api yang bersifat stratovulkanik yang pola penyebarannya radier dan pola penyaluran sungainya juga bersifat radier. Diantara pegunungan vulkanik tersebut terdapat cekungan yang merupakan cekungan air tanah Bajawa. Di bagian Utara (1/3 bagian) merupakan bentang alam sedimen Tersier yang morfologinya berupa perbukitan dengan beberapa bukitnya antara lain G.Kebedaring (1070 m) dan G.Sawe (561 m). Bentang alam perbukitan

sedimenTersier ini sangat dikontrol oleh persebaran batuan Tersier dan kontrol struktur geologi yang berupa lipatan dan beberapa sesar geser. Pola penyaluran sungai di daerah bentang alam perbukitan sedimen Tersier ini adalah trelis, dimana terlihat adanya arah aliran sungai yang searah dengan kemiringan lapisan batuan (*konsekwen*), dan arah aliran sungai yang searah dengan jurus lapisan batuan (*subsekwen*). Disamping itu terdapat bentang alam dataran aluvial yang mempunyai kelerengan 0-< 2% yang penyebarannya disekitar pesisir dan muara sungai.

Sebagian besar wilayah Ngada ditempati oleh batuan vulkanik yang berumur Miosen Bawah hingga Miosen Atas yang berassosiasi dengan terbentuknya busur dalam Banda, sebagian besar terdiri dari lava andesit dan breksi dari Formasi Kiro dan sedikit batuan vulkanik muda.Satuan batuan di atas ditutupi oleh suatu paket batuan sedimen berumur Miosen Tengah yang terbentuk pada cekungan busur belakang, terdiri dari batupasir, batugamping, batuan vulkanik dan breksi atau tufa dari Formasi-Formasi Nangapanda dan Bari.Tanda-tanda adanya mineralisasi juga dijumpai pada satuan ini, yaitu pada batuan induk volkanik klastik (contoh mineralisasi pada daerah Rawangkalo dan Wangka).

Tabel 2. 3. Karakteristik Geologi Wilayah Kabupaten Ngada Dirinci Per Kecamatan

No	Kecamatan	Karakteristik Geologi										
		Qal	Qct	Qhv	Qtv	Tmb	Tmd	Tmk	Tmn	Tmpl	Tmt	Total (km2)
1	Aimere	0	1054	1546	1265,0	0	0	0	0	0	0	1525,0
2	Jerebuu	0	0	1963	6263	0	0	0	0	0	0	8226
3	Bajawa	0	0	1164	1557,4	0	0	0	0	0	0	1673,8
4	Golewa	0	0	977	2409,5	0	0	0	0	0	0	2507,2
5	Bajawa Utara	0	0	3039	1029,1	0	0	0	0	0	0	1333,0
6	Soa	0	0	0	9114	0	0	0	0	0	0	9114
7	Riung	1302	0	0	0	7256	718	1134,2	5687	1239	5249	3279,3
8	Riung Barat	0	0	1187,2	0	5643	0	0	19	1223	8833	3125,0
9	Wolomeze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		**1302**	**1054**	**3454,0**	**7798,7**	**1289,9**	**718**	**1134,2**	**5706**	**2462**	**1408,2**	**1620,92**

Sumber: Peta Geologi Lembar Ruteng, Nusa tenggara Skala 1; 250.000

Keterangan:

Qal: Alluvium
Qct: Undak Pantai
Qhv: Batuan Gunungapi Muda
Tmd: Intrusi Diorit
Tmk: Formasi Kiro
Tmn: formasi Nangapanda

Qtv: Batuan Gunungapi Tua *Tmpl: Formasi Laka*
Tmd: Intrusi Diorit Kuarsa *Tmt: Formasi Tanahau*

Sedangkan secara Stratigrafi Kabupaten Ngada tersusun atas beberapa formasi yang berumur Tersier dan berumur Kwarter. Formasi yang berumur Tersier (Miosen Bawah) antara lain Formasi Kiro (Tmk) dan yang berumur Miosen Tengah antara lain Formasi Tanahau (Tmt), Formasi Nangapanda (Tmn) dan Formasi Bari (Tmb), sedangkan formasi yang berumur Mio-Pliosen antara lain Formasi Laka (Tmpl) dan intrusi diorit kwarsa (Tmd). Formasi yang berumur Kwarter antara lain Endapan gunung api tua (Qtv), endapan gunung api muda (Qhv), Batu gamping koral (Ql), Aluvium (Qal) dan Undak Pantai (Qct).

Formasi Kiro (Tmk) terdiri dari breksi, lava dan tuf dengan sisipan batu pasir tufan. Breksinya dengan fragmen andesit dan basalt dengan matrik tuf kasar, terkersikkan dan termineralkan berujud magnetit dan mangan. Lavanya bersusunan andesit, basalt, latit dan trakhit, abu abu kehijauan sampai kehitaman. Lava andesit dan basalt, bertekstur porfir, sebagian terkersikkan dan terkalsitkan. Latit abu abu kecoklatan, porfiritik, matriknya gelas, banyak mengandung serisit. Trakhit berwarna putih abu abu, padu, berongga, porfiritik dengan sanidin sebagai fenokris, matriknya serisit dan gelas terkersikkan. Tuf pasiran dan batu pasir tufan, berupa sisipan berwarna kecoklatan, terkersikkan dan berlapis baik dengan kemiringan 10-25 derajad, mempunyai hubungan stratigrafi menjari dengan Formasi Nangapanda (Tmn) dan Formasi Bari (Tmb) dan tidak selaras dengan Formasi Waihekang (Tmpw) dan tebalnya mencapai 1000-1500 m. Formasi Tanahau (Tmt) terdiri dari lava breksi dan tuf. Lava, kelabu kehijauan bersusunan dasit; setempat struktur bantal. Braksi, kelabu kehitaman; komponen dasit; berukuran 0,5-3 cm: menyudut tanggung-menyudut; perekat tuf pasiran terkersikkan. Tuf, putih kelabu, bersusunan dasit; berbutir halus-menengah, pejal, terkersikkan, pemineralan. Satuan ini menjemari dengan Formasi Bari dan menindih selaras Formasi Kiro.

Berikutnya Formasi Nangapanda (Tmn) terdiri dari batu pasir dan batu gamping, setempat terdapat lensa dan sisipan napal dan sisipan breksi. Batu

pasirnya berukuran pasir halus–pasir kasar, konglomeratan, terdapat fragmen andesit dan basalt berukuran 0,5-2 cm, subangular–rounded, matrik berupa batupasir, padu, berlapis, setempat berselingan dengan batu pasir gampingan. Batu gampingnya berwarna abu abu, keras dan padu, sedangkan napalnya berwarna putih kotor, kemiringan lapisan 25-30 derajad. Tebal formasi ini diperkirakan 2000 m dan diendapkan dalam lingkungan neritik. Selanjutnya Formasi Bari (Tmb) tersusun dari batu gamping (*packestone*) berselingan dengan batu gamping pasiran (*grainstone*). *Packestone* berwarna putih kelabu, kurang padat –padat, banyak mengandung foraminefera kecil plangtonik dan bentonik yang menunjukkan umur Miosen Tengah dan lingkungan litoral. Tebal formasi ini mencapai 1200 m dan tertindih secara selaras dengan Formasi Waihekang (Tmpw) dan Formasi Laka (Tmpl). *Grainstone* berwarna abu abu, padat, padu, banyak mengandung foraminifera kecil plangtonik dan bentonik, didominasi komponen butiran karbonat. Batupasir gampingan berwarna abu-abu, berukuran pasir halus–kasar, berlapis dan padu sebagai sisipan. Setelah keempat formasi tersebut terjadi, maka diikuti kegiatan magmatik yang berupa intrusi Diorit Kwarsa (Tmd),yang berwarna abu abu kehijauan, holokristalin, berukuran butir sedang-kasar, padat, terkersikkan, plagioklas berupa andesin dan oligoklas yang telah terubah menjadi serisit dan kalsit, serta ubahan dari piroksin menjadi klorit. Diorit kwarsa ini menerobos breksi dasit dari Formasi Tanahau (Tmt) yang terjadi setelah Miosen Tengah.

Berikutnya beberapa formasi yang berumur Mio-Pliosen antara lain Formasi Laka (Tmpl) tersusun dari tuf dengan beberapa sisipan batu pasir tufan atau sisipan batu pasir gampingan. Tufnya berwarna putih kehijauan, berukuran halus sampai kasar, bentuk butir angular sampai subangular, padat. Batu pasir gampingan berwarna putih kecoklatan, keras dan banyak mengandung foraminifera kecil plangtonik dan bentonik yang menunjukkan umur Miosen Akhir-Pliosen dan lingkungan pengendapan sublitoral, dengan ketebalan mencapai 750-1000 m. Formasi ini mempunyai hubungan menjari dengan Formasi Waihekang (Tmpw) dan tertindih secara tidak selaras dengan Endapan gunung api tua (Qtv).

Kemudian beberapa endapan yang terjadi selama Kwarter antara lain Endapan gunung api tua (Qtv) yang terdiri dari lava yang berupa andesit piroksin, terdapat struktur kekar berlembar dan kekar tiang (*sheeting and collumnar joint*), breksi atau aglomerat dengan fragmen andesit dan basalt, kemas terbuka dan mudah lepas, terdapat sisipan tuf, tuf lapili, tuf batu apung, lanau hitam dan batu gamping koral, di beberapa tempat terdapat struktur silang siur, temuan fosil gajah purba yang diendapkan dalam lingkungan sungai. Endapan gunung api tua (Qtv) dapat terbagi lagi berdasarkan asal usul geografi pusat erupsinya antara lain (d,k,t,s,l,w,g,b,a,h,o,p), yang artinya (d: Poco Dedeng, k: Poco Kuwus, t: Gunung Todo, s: Poco Manda Sewu, l : Poco Laka, w: Gunung Watuweri, g: Kelli Nggedo, b: Gunung Manggumua, a: Keli Lambo, h: Keli Kato, o: Wolo Beo, p : Wolo Pago). Tipe Wolo Beo (o) ditemukan tiga mata air panas yang merupakan manifestasi adanya panas bumi di daerah Endapan gunung api tua. Berikutnya Endapan gunung api muda (Qhv) yang terdiri dari lava, breksi dan aglomerat. Lavanya berupa andesit-basalt, berstruktur kekar lembaran, tuf kasar dan pasir lepas, berasal dari kegiatan gunung api strato muda seperti G. Waisano (w), G. Inerie (i), G. Ebulobo (a), dan G. Poco Ranaka (r).

Endapan Kwarter yang lain adalah Endapan Batu gamping Koral (Ql) berupa batu gamping coralyang mengandung ganggang, pejal dengan ketinggian mencapai 200 m di atas permukaan laut, Endapan Aluvium (Qal) yang berupa kerakal dan kerikil andesit, dasit, basalt, pasir, lumpur dan lanau yang terendapkan dalam lingkungan sungai dan pantai, Endapan Undak Pantai (Qct) yang merupakan perselingan konglomerat dan batu pasir, sedikit gampingan, mudah lepas, hampir mendatar, struktur silangsiur, mencapai ketinggian 10-50m di atas permukaan laut.

Secara struktur geologi, Kabupaten Ngada memiliki struktur geologi berupa lipatan antiklin, sesar geser, sesar turun, kelurusan struktur geologi (*lineament*), dan kekar. Lipatan antiklin yang sumbunya memanjang arah Barat-Timur ini melibatkan Formasi Nangapanda (Tmn) dan Formasi Bari (Tmb) yang kebetulan berhubungan menjari. Lipatan antiklin ini disebabkan oleh gaya kompresi berarah Utara-Selatan yang terjadi pada post Miosen Tengah.

Dampak dari gaya kompresi juga akan mengakibatkan terjadinya sesar geser yang berarah Barat Daya-Timur laut dan Barat Laut-Tenggara. Setelah itu bekerja gaya ektension atau gaya tarik sehingga menyebabkan terjadinya sesar turun di daerah penelitian dan mungkin *lineament* struktur geologi yang berarah barat daya-timur laut. Arah *lineament* struktur geologi dan sesar geser maupun sesar turun akan menjadikan peluang untuk keluarnya magma menjadi aktifitas vulkanisme pada saat Tersier (Miosen Tengah) dan Kwarter, maupun kegiatan intrusi diorit kwarsa yang terjadi pada post Miosen Tengah, hal ini terkait dengan sistem konvergen antara lempeng Australia dengan lempeng Asia, yakni akan muncul kegiatan magmatik yang sifatnya intrusi maupun vulkanisme.

Dengan demikian sejarah geologi Kabupaten Ngada dapat diuraikan bahwa pada saat Miosen Bawah kondisi daerah penelitian berupa pulau gunung api yang berhubungan dengan kondisi laut sehingga menghasilkan pembentukan batuan vulkanik Formasi Kiro (Tmk) dan pada periode Miosen Tengah disusul pembentukan ketiga formasi yaitu Formasi Nangapanda (Tmn), Formasi Bari (Tmb) dan Formasi Tanahau (Tmt) secara bersama-sama sehingga hubungannya saling menjari. Periode selanjutnya terjadi tektonik (ekstension) sehingga terjadi pembukaan kerak dan terjadi kegiatan intrusi magmatik yang diduga terjadi pada post Miosen Tengah.

Periode selanjutnya pada saat Mio-Pliosen daerah penelitian terjadi penurunan kegiatan vulkanik dan tejadilah pengendapan karbonat dan silisiklastik vulkanik di cekungan yang berupa Formasi Waihekang (Tmpw) dan Formasi Laka (Tmpl). Periode post Mio-Pliosen terjadi tektonik kompresi sehingga terbentuk struktur geologi lipatan antiklin, sesar naik, sesar geser, sesar turun, *lineament* dan kekar. Arah dari sesar geser, sesar turun, *lineament* dan kekar akan membuka peluang keluarnya magma ke permukaan menjadi aktifitas vulkanisme pada saat Kwarter sehingga menghasilkan strato vulkanik sebagai Endapan gunung api tua dan Endapan gunung api muda. Endapan gunung api muda ini berlangsung kegiatannya hingga saat ini, sehingga harus diwaspadai wilayah wilayah yang potensi, rentan, dan mitigasi bencana gunung api. Sesar naik yang dihasilkan pada periode post Mio-Pliosen yang

berlanjut hingga sekarang adalah **sesar naik Flores** yang terdapat di dasar laut Flores (Hamilton,1979) terekam dalam penampang seismik. Aktifnya Sesar naik Flores dapat menyebabkan terjadinya episentrum gempa tektonik di utara Flores. Dampak ikutan dari gempa bumi tektonik adalah kemungkinan terjadinya tsunami.

Terdapatnya beberapa mata air panas di daerah ini menunjukkan adanya indikasi panas bumi yang hingga saat ini sudah digunakan untuk pembangkit tenaga listrik panas bumi. Akibat banyaknya kegiatan magmatik yang berlangsung dari Miosen Awal hingga Kwarter menyebabkan batuan yang lebih dahulu terbentuk akan mengalami mineralisasi atau alterasi (terkersikkan) akibat pengaruh larutan hidrotermal yang dapat berasal dari air kondensatdan air meteorik. Oleh karenanya dampak mineralisasi adalah terbentuknya mineral logam dan dampak dari alterasi adalah terbentuknya mineral lempung yang merupakan unsur utama pembentuk tanah, sehingga mempunyai potensi terjadinya longsor di Kawasan tersebut. Selain itu pada endapan Kwarter-Plistosen di cekungan Soa banyak ditemukan fosil makro seperti *Stegodon* dan batuan artefak (alat dari batu), tengkorak *Homo floriensis* di Liang Bua dan fosil makro yang lain seperti fosil vertebrata dan fosil invertebrata.

2.1.1.5. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Ngada dapat dijelaskan berupa air sungai dengan sungai-sungai yang bermuara baik di pantai bagian Utara maupun pantai bagian Selatan. Kabupaten Ngada juga merupakan hulu dari DAS Aesesa yang meliputi Sub Das Wulabhara dan Wae Woki. Keberadaan sungai-sungai besar seperti Wae Woki, Wulabhara, Waemokel, Waewaru, Waesoa, Waebela, Waekoe dan Alomemak ini telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum penduduk yang pengelolaannya berupa leding, pompa, sumur terlindungi, sumur tak terlindungi, mata air terlindungi, mata air tak terlindungi dan air kemasan.

Selain itu, potensi air permukaan dan airtanah di wilayah Kabupaten Ngada cukup besar untuk kebutuhan penduduk dalam memenuhi kebutuhan

sehari-hari.Pusat perkotaan dari Kecamatan Bajawa merupakan wilayah yang termasuk ke dalam cekungan airtanah Bajawa. Cekungan airtanah ini menyimpan cadangan airtanah yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan air di atasnya. Sebagai pusat perkotaan, penggunaan air tanah menjadi cukup intensif, sehingga perlu adanya upaya untuk menjaga kondisi cadangan airtanah tetap baik.

Hal tersebut termasuk juga untuk seluruh kondisi di Kabupaten Ngadayang perlu diupayakan konservasi dan perlindungan antara lain dengan menetapkan daerah imbuhan air bawah tanah yang terletak pada ketinggian di atas 2000 mdpl sebagai kawasan lindung air bawah tanah serta agar dipergunakan sehemat mungkin dan dilindungi dari dampak pencemaran lingkungan. Pusat perkotaan dari Kecamatan Bajawa merupakan wilayah yang termasuk ke dalam cekungan airtanah Bajawa. Cekungan airtanah ini menyimpan cadangan airtanah yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan air di atasnya. Sebagai pusat perkotaan, penggunaan airtanah menjadi cukup intensif, sehingga perlu adanya upaya untuk menjaga kondisi cadangan airtanah tetap baik.

Kondisi hidrologis juga menggambarkan bahwa pada umumnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai belum memadai, sehingga proses pengikisan terus berlangsung. Akumulasi dari proses pengikisan tersebut akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan mengancam lahan pertanian serta permukiman. Oleh karena itu pengelolaan dan penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) perlu menjadi perhatian pemerintah.

Tabel 2. 4. Data nama sungai di Kabupaten Ngada

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Lebar (m)	Kedalaman (m)	Debit (m3/dt)	
					Maks	Min
1.	Waewoki	246,1	2,75	0,3	0,25	0,22
2.	Waewira	-	16,1	0,29	0,73	0,45
3.	Wirase	-	1,3	1	0,55	0,41
4.	Mataloko	-	1,6	0,19	0,63	0,29
5.	Waeroa	-	2,7	0,11	0,60	0,28
6.	Waebela	-	8,8	0,15	2,26	1,32
7.	Waemokel	-	38	2	2,90	2,60
8.	Waebua	-	5	0,12	0,26	0,23
9.	Tiwubala	-	6,9	0,49	1,99	1,87

10.	Waeroa Golbar	-	12,7	0,2	0,52	1,78
11.	Sangankongkong	-	5,5	0,04	0,40	0,52
12.	Alolasi	-	3,5	0,23	0,44	0,49
13.	Wulabhara	249,5	19,5	2,6	1,35	1,55

Sumber: SLHD Kabupaten Ngada 2016

2.1.1.6. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Ngada seperti halnya kabupaten-kabupaten di wilayah Indonesia pada umumnya hanya mengenal dua musim saja yaitu musim kemarau dan musim hujan. Secara umum Kabupaten Ngada memiliki iklim yang panas, sedang sampai sejuk, dengan 5 bulan basah yaitu pada bulan Oktober hingga bulan Februari dan 7 bulan kering yaitu pada bulan Maret hingga bulan September. Menurut Schmit Ferguson, iklim Kabupaten Ngada terbagi sebagai berikut:

Tabel 2. 5. Sebaran Iklim Kabupaten Ngada

Tipe	Luas
Tipe C3	2627,38 Ha
Tipe D3	56732,20 Ha
Tipe D4	58353,12 Ha
Tipe E4	30781,27 Ha

Sumber: Stasiun Klimatologi Lasiana Kupang, 2019

Berikut adalah rincian curah hujan dan hari hujan tiap bulan di Kabupaten Ngada.

Tabel 2. 6. Curah Hujan di Kabupaten Ngada

Bulan	Curah Hujan	Hari Hujan
Januari	246	7
Feburari	07	8
Maret	81	6
April	27	3
Mei	51	3
Juni	62	6
Juli	0	9
Agustus	2	1
September	20	1
Oktober	80	7
November	302	11
Desember	-	-

Sumber : Stasiun Klimatologi Lasiana Kupang, 2019

Secara umum, curah hujan di Kabupaten Ngada termasuk tinggi dengan interval curah hujan 1500 – 2000 mm/tahun. Hal tersebut dapat dikarenakan wilayah Kabupaten Ngada dikelilingi lautan dan sebagian besar topografi Kabupaten Ngada berupa pegunungan sehingga perbedaan tekanan dan suhu udara membuat curah hujan cenderung tinggi. Wilayah yang meliputi curah hujan tinggi ialah Kecamatan Bajawa, Kecamatan Inerie, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, dan Kecamatan Golewa Selatan.

Curah hujan sangat tinggi menurut hasil interpolasi hanya meliputi sebagian kecil dari Kecamatan Bajawa Utara sisi Barat. Intensitas curah hujan sedang hingga cukup rendah dengan interval antara 1500 – 1000 mm/tahun terdapat di sebagian Kecamatan Riung Barat dan Kecamatan Riung. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Ngada sisi Utara memiliki ketinggian wilayah yang cenderung lebih rendah dari ketinggian wilayah di Kabupaten Ngada pada sisi Selatan. Berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Ngada sisi Selatan dengan curah hujan yang cukup tinggi hingga tinggi berpotensi terhadap ancaman bencana alam seperti cuaca ekstrim, tanah longsor dan juga banjir, di sisi lain dengan curah hujan yang tinggi tersebut dapat memberikan ketersediaan air yang cukup untuk lahan pertanian dan perkebunan.

2.1.1.7. Jenis dan Kemampuan Lahan

Jenis dan kemampuan lahan merupakan hasil suatu proses alamiah yang terjadi akibat adanya perbedaan iklim, cuaca, geologi dan lain-lain. Unsur jenis dan kemampuan lahan terbagi atas 1). jenis tanah, 2). kemiringan tanah, 3).tekstur tanah, 4). drainase tanah dan 5). tingkat erosi tanah. Wilayah Kabupaten Ngada pada umumnya terdiri dari 3 jenis tanah yakni Grumosol, Latosol dan Mediteran. Jika dihitung, tanah mediteran mempunyai luasan terbesar sekitar 69.549 ha pada seluruh wilayah kabupaten. Tanah ini mempunyai lapisan solum yang tebal, kadar unsur basa yang dikandung umumnya tinggi, daya menahan airnya sedang dan sifat-sifat fisik dan

kimianya baik sehingga nilai produksinya cukup tinggi dan apabila persediaan air cukup untuk pengolahan/tumbuh tanam, maka jenis tanah ini dapat dimanfaatkan untuk persawahan.

Tabel 2. 7. Jenis Tanah Wilayah Kabupaten Ngada Dirinci Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jenis Tanah (ha)			
		Grumosol	Latosol	Mediteran	Jumlah
1	Aimere	4.842	0	10.408	15.25
2	Jerebuu	0	0	8.226	8.226
3	Bajawa	16.738	0	0	16.738
4	Golewa	5.935	0	19.137	25.072
5	Bajawa Utara	13.33	0	0	13.33
6	Soa	9.114	0	0	9.114
7	Riung	0	28.725	4.069	32.794
8	Riung Barat	2.228	11.634	27.706	41.568
9	Wolomeze	0	0	0	0
Jumlah		**52.187**	**40.359**	**69.546**	**162.092**

Sumber: Peta Hidrogeologi Lembar Ruteng Nusa Tenggara skala 1 : 250.000

Selain jenis tanah, faktor yang mempengaruhi kemampuan tanah adalah tekstur tanah. Tekstur tanah adalah halusnya tanah yang ditentukan/dinilai berdasarkan perbandingan fraksi-fraksi pasir, debu dan liat. Berdasarkan kandungan masing-masing fraksi tersebut dapat dibuat klasifikasi tekstur tanah yang akan berpengaruh terhadap pengolahan dan pertumbuhan tanaman, terutama dalam hal mengatur kandungan udara dalam rongga tanah dan persediaan serta kecepatan peresapan air di daerah tersebut. Tekstur tanah juga berpengaruh terhadap mudah atau tidaknya lapisan tanah tersebut meloloskan air. Faktor terakhir yang berpengaruh terhadap kemampuan tanah adalah kedalaman efektif tanah. Kedalaman efektif tanah merupakan suatu ukuran media tanah yang dapat ditanami/ditembus oleh akar tanaman. Klasifikasi kedalaman efektif tanah tersebut dangkal (< 30 cm), sedang (30 – 60 cm), agak dalam (60-90 cm) dan dalam (> 90 cm).

Kondisi yang digambarkan dari masing-masing jenis dan kemampuan lahan tersebut yang terdapat di wilayah Kabupaten Ngada akan menjadi bahan (masukan) bagi kepentingan analisis potensi suatu lahan yang bisa atau tidak bisa dikembangkan yaitu analisis kesesuaian lahan terutama untuk lahan budidaya. Unsur-unsur tadi sangat berpengaruh terhadap jenis kesesuaian

lahan yang dihasilkan seperti untuk tanaman pertanian lahan basah, tanaman pertanian lahan kering, tanaman perkebunan/tanaman tahunan, kehutanan (hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas/konversi, hutan lindung) dan keseuaian untuk jenis lahan budidaya lainnya.

2.1.1.8. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kabupaten Ngada terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian kemampuan lingkungan hidup mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. Adapun kawasan lindung yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada meliputi :

a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana alam;
f. kawasan lindung geologi; dan
g. kawasan lindung lainnya.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk membudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan yang meliputi: kawasan hutan, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan perindustrian, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pesisir. Kawasan budidaya di Kabupaten Ngada terdiri dari:

a. kawasan peruntukkan hutan produksi;

b. kawasan peruntukkan pertanian;

c. kawasan peruntukkan perikanan;

d. kawasan peruntukkan pertambangan;

e. kawasan peruntukkan industri;

f. kawasan peruntukkan pariwisata;

g. kawasan peruntukkan permukiman;

h. kawasan peruntukkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

i. kawasan peruntukkan lainnya

Secara lebih rinci prosentase pemanfaatan kawasan di Kabupaten Ngada tergambar dalam grafik berikut.

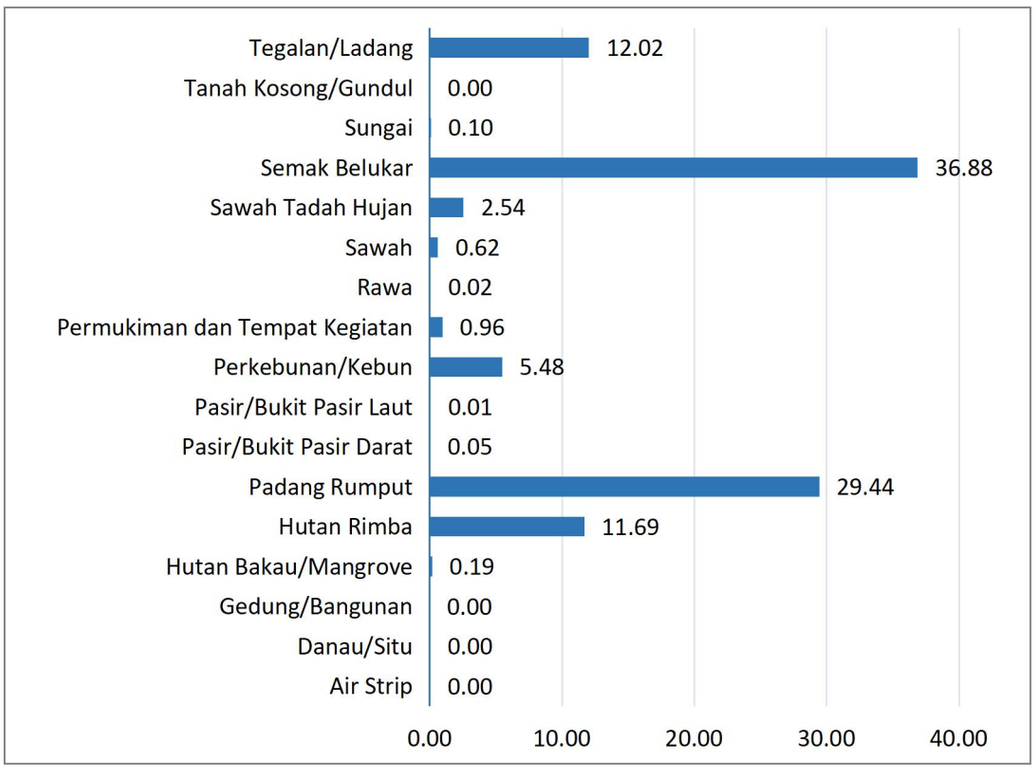

Grafik 2. 1. Persentase Rincian Pemanfaatan Kawasan Budidaya Kabupaten Ngada

Sumber : Revisi RTRW Ngada Tahun 2020-2040

Sebagian besar penggunaan lahan di Kabupaten Ngada berdasarkan data penggunaan lahan oleh Badan Informasi Geospasial tahun 2017 merupakan semak belukar dengan luas 62.268,6 Ha atau 36,88% dari total luas wilayah Kabupaten Ngada dan padang rumput dengan luas 49.699,20 Ha atau 29,44%

dari total luas wilayah Kabupaten Ngada. Penggunaan lahan hutan rimba di Kabupaten Ngada seluas 19.733 Ha atau 11,69 % dari total luas wilayahnya, sedangkan penggunaan lahan tegalan/ladang memiliki luas 20.293,6 Ha atau 12,02% dari total luas wilayahnya. Penggunaan lahan lain seperti perkebunan memiliki luas 9.243,62 Ha atau 5,48% dari total luas wilayah Kabupaten Ngada dan sawah tadah hujan memiliki luas 2.383,26 atau 2,54% dari total luas wilayah Kabupaten Ngada. Selain itu, penggunaan lahan lain seperti danau, hutan bakau, sawah, rawa, dan pasir memiliki luas di bawah 1% dari total luas wilayah Kabupaten Ngada.

2.1.2. Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan adalah kapasitas atau kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan organisme secara sehat sekaligus mempertahankan produktivitas, kemampuan adaptasi, dan kemampuan memperbarui diri. Daya dukung lingkungan diartikan sebagai kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia. Pelestarian daya dukung lingkungan adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia atau penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai. Dalam menentukan daya dukung Kabupaten Ngada, terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini. Kajian tersebut berkaitan dengan ketersediaan lahan pertanian, ketersediaan air, ketersediaan bahan makanan, maupun ketersediaan lahan. Analisis secara lengkap dijelaskan rinci sebagai berikut.

2.1.2.1. Daya Dukung Lahan Bangunan

Daya dukung lahan dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu permukiman (bangunan) untuk perkotaan dan pertanin untuk perdesaan. Perhitungan daya dukung lahan dengan pendekatan untuk bangunan menggunakan formula:

$$\boldsymbol{DDLB = \frac{\alpha \times Lw}{LTb}}$$

$$\mathbf{LTb = LB + LTp}$$

Keterangan:

DDLB : daya dukung lahan untuk bangunan

LW : Luas Wilayah (Ha)

$\boldsymbol{\alpha}$: Koefisien luas lahan terbangun maksimal:

Untuk perkotaan menggunakan 70% sesuai amanat UU No 26 Tahun 2007, yaitu 30% wajib untuk RTH. Untuk Perdesaan menggunakan asumsi 50% (untuk kepentingan lahan pertanian dan fungsi lindung)

LTb : Luas lahan terbangun (Ha)

LB : Luas lahan bangunan (Ha)

LTp : Luas lahan untuk infrastruktur, seperti jalan, sungai, drainase, dan lainnya (Ha).

Hasil perhitungan dianalisis dengan kategori berikut:

DDLB <1 = Daya dukung lahan permukiman terlampui atau defisit

DDLB >1 = Daya dukung lahan permukiman surplus

Berdasarkan hasil analisis, luas lahan terbangun di Kabupaten Ngada adalah 3092 Ha, dengan asumsi 50% koefisien luas lahan terbangun maksimal pada pedesaan, maka hasil perhitungan DDLB bernilai 28,65. Nilai ini melebihi 1 sehingga daya dukung lahan permukiman di Kabupaten Ngada tergolong masih baik.

2.1.2.2. Daya Dukung Lahan Pertanian

Perhitungan daya dukung lahan pertanian (DDLp) dihitung dari ketersediaan lahan, kebutuhan lahan, dan daya dukung lahan. Ketersediaan lahan pertanian dihitung sebagai berikut:

$$Sl = \sum_{k=0}^{n} (Pi\ x\ Hi) x \frac{1}{Hb\ \ x\ Ptvb}$$

Keterangan:

Sl Ketersediaan Lahan (ha)

Pi Produksi actual tiap jenis komoditi (satuan tergantung kepada jenis komoditas)

Komoditas yang diperhitungkan meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan

Hi Harga satuan tiap jenis komoditas (Rp/satuan) di tingkat produsen

Hb Harga satuan beras (Rp/kg) di tingkat produsen

Ptvb Produktivitas beras (kg/ha)

Catatan, Daerah yang tidak memiliki data produktivitas beras lokal, dapat menggunaan data rata-rata produktivitas beras nasional sebesar 2400 kg/ha/tahun.

Untuk mempermudah penghitungan di atas digunakan matrik untuk masing-masing jenis komoditas daerah.

1. Komoditi Pertanian dan Perkebunan

Total nilai produksi sektor pertanian dan perkebunan didapatkan dari jumlah produksi komoditi dalam satu tahun produksi dikalikan dengan harga satuan produksi pada tingkat produsen, sehingga didapatkan nilai produksi sebesar 4.5 triliun rupiah. Hal tersebut dapat optimal jika pemerintah ataupun masyarakat mampu menyerap hasil produksi pertaniannya.

Catatan bahwa harga satuan didapatkan dari standar harga satuan produsen yang dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian pada tahun 2018. Penggunaan tersebut digunakan karena di daerah Kabupaten Ngada tidak didapatkan standar harga produsen yang dikeluarkan oleh pemda, yang dimana produk tersebut merupakan bentuk kepedulian pemda dalam menjamin kelangsungan produsen.

Tabel 2. 8. Total Produksi Komoditi Pertanian dan Perkebunan

Komoditas Pertanian Perkebunan			
Komoditas	**Produksi (ton)**	**Harga Satuan (kg)**	**Nilai Produksi (PiHi)**
Kelapa	1.664,8	6.000	9.988.800.000

Komoditas Pertanian Perkebunan			
Komoditas	**Produksi (ton)**	**Harga Satuan (kg)**	**Nilai Produksi (PiHi)**
Kopi	1.406,5	22.000	30.943.000.000
Kakao	199	25.000	4.975.000.000
Lada	15	55.000	825.000.000
Jagung	97.448	4.500	438.516.000.000
Kedelai	5.586	6.200	34.633.200.000
Kacang tanah			0
Kacang hijau			0
Ubi kayu	8.963	2.000	17.926.000.000
Ubi jalar	610	3.500	2.135.000.000
Padi sawah	121.606	5.500	668.833.000.000
Padi ladang	4.800	5.500	26.400.000.000
Bawang merah	1	11.000	11.000.000
Lobak	19	42.000	798.000.000
Kol	3	5.000	15.000.000
Petsai	1.5	5.000	7.500.000
Kentang	30	10.000	300.000.000
Mangga	174	15.000	2.610.000.000
Jeruk	68	8.000	544.000.000
Pisang	1.310	5.000	6.550.000.000
Pepaya	361	5.000	1.805.000.000
Nanas	12	5.000	60.000.000
Jambu mete	6.232	100.000	623.200.000.000
Kemiri	2.512	22.000	55.264.000.000
Cengkeh	627	70.000	43.890.000.000
Pinang	54	13.000	702.000.000
Vanili	427	6.000.000	2.562.000.000.000
Tembakau	34	40.000	1.360.000.000
Sirih	22	10.000	220.000.000
Lontar	79	200.000	15.800.000.000
Total			**4.550.310.000.000**

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2018

2. Komoditi Kehutanan Produksi

Total nilai produksi sektor kehutanan berupa komoditi kayu yang terdiri dari kayu bulat dan kayu olahan yang telah menjadi kayu gergaji adalah 1.5 miliar rupiah. Tingkat produksi komoditi kehutanan tergolong kecil dibandingkan total produksi komoditi pertanian dan perkebunan.

Tabel 2. 9. Total Produksi Komoditi Kehutanan

Komoditas Kehutanan

Komoditas	Produksi (m^3)	Harga Satuan	Nilai Produksi
Kayu bulat	280,17	3.000.000	840.510.000
Kayu gergaji	221,2	3.000.000	663.600.000
		Total	**1.504.110.000**

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2018

3. Komoditi Perikanan

Total nilai produksi sektor perikanan tangkap berupa komoditi perikanan laut adalah 22.6 miliar rupiah. Tingkat produksi komoditi perikanan tangkap belum optimal dikarenakan jumlah penduduk Kabupaten Ngada yang bermata pencaharian di sektor perikanan tergolong kecil. Padahal Kabupaten Ngada memiliki potensi laut yang besar dengan kedua wilayah Kabupaten Ngada yang terdiri atas wilayah laut pada bagian utara dan selatannya.

Tabel 2. 10. Total Produksi Komoditi Perikanan

Komoditas Perikanan			
Komoditas	**Produksi (ton)**	**Harga Satuan (kg)**	**Nilai Produksi**
Perikanan laut	1.511	15.000	22.665.000.000
Total			**22.665.000.000**

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2018

4. Komoditi Peternakan

Total nilai produksi sektor peternakan berupa komoditi sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi mencapai 1.2 triliun rupiah. Nilai produksi tersebut didapatkan apabila seluruh komoditi divaluasikan dengan nilai rupiah.

Tabel 2. 11. Total Produksi Komoditi Peternakan

Komoditas Peternakan			
Komoditas	**Produksi (ekor)**	**Harga Satuan**	**Nilai produksi**
Sapi potong	42.998	10.500.000	451.479.000.000
Kerbau	15.611	11.500.000	179.527.000.000
Kuda	12.245	7.000.000	85.715.000.000
Kambing	28.628	1.800.000	51.530.400.000
Domba	3.325	1.200.000	3.990.000.000
Babi	173.300	3.000.000	519.900.000.000
Total			**1.292.140.000.000**

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2018

Selanjutnya, total ketersediaan lahan di Kabupaten Ngada sebesar 16.4101.301 hektar yang didapatkan dari total produksi komoditi dibagi dengan harga satuan beras di tingkat produsen dan produktivitas besar di daerah. Bahwa tingkat produktivitas beras di Kabupaten Ngada mencapai 6.5 ton dalam setiap hektar.

Kedua, penghitungan kebutuhan lahan *(demand)* di Kabupaten Ngada pada periode tertentu. Penghitungan tersebut menggunakan metode kebutuhan hidup layak per penduduk, berdasarkan Peraturan Menteri bahwa standar kebutuhan hidup layak perpenduduk diasumsikan sebesar 1 ton beras/kapita/pertahun. Kebutuhan lahan di suatu kabupaten adalah kebutuhan total hidup layak seluruh penduduk di suatu kabupaten. Berikut penghitungan kebutuhan lahan di Kabupaten Ngada:

$$\boldsymbol{Dl = N\ x\ KHLl}$$

Keterangan:

Dl Total kebutuhan lahan setara beras (ha)

N Jumlah penduduk (orang) pada periode tertentu

KHLl Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk

Tabel 2. 12. Kebutuhan Luas Lahan Hidup Layak

Jumlah Penduduk			Kebutuhan Lahan	
No.	**Tahun**	**Pertumbuhan Penduduk**	**KHL(l)**	**DL (ha)**
1	2017	15.9081	0,153846	24.474
2	2018	16.1176	0,153846	24.796,31
3	2019	16.358	0,153846	25.166,15

Sumber: Hasil analisis 2019

Total kebutuhan lahan hidup layak di Kabupaten Ngada untuk mendukung kegiatan penduduknya pada tahun 2019 adalah 25.166,15 ha. Berdasarkan hasil perhitungan, dianalisis dengan kategori berikut:

DDLp <1 = Daya dukung lahan pertanian terlampui atau defisit

DDLp >1 = Daya dukung lahan surplus

$$DDLp = \frac{Si}{Di}$$

DDLp = Daya Dukung Lahan Pertanian
Si = Ketersediaan Lahan
Di = Kebutuhan Lahan

$$DDLP = \frac{164101}{25166} = 6,52$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Ngada memiliki daya dukung lahan pertanian yang >1 dan tergolong kategori surplus.

A. Status Daya Dukung Pangan (Beras) Kabupaten Ngada

Dari sudut pandangan lingkungan, ambang batas merupakan kondisi saat terjadi perubahan mendadak pada kualitas ekosistem (Groffman, P., et al., 2006). Ambang batas ini kemudian dapat dijadikan sebagai landasan dalam menentukan status daya dukung lingkungan suatau ekosistem. Dalam konteks pengembangan wilayah, konsep ambang batas pada DDLH digunakan untuk mempelajari dampak yang terjadi pada lingkungan akibat pengembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, ambang batas tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam membatasi pertumbuhan di suatu kawasan (Muta'ali, L., 2012). Dalam Soerjani, dkk. (1987), *Cloud* menggambarkan DDPb melalui perbandingan jumlah sumberdaya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk. Perbandingan ini menunjukkan bahwa DDPb berbanding lurus terhadap jumlah sumberdaya lingkungan dan terbalik denganjumlah konsumsi.Artinya, pertumbuhanjumlah penduduk tanpa peningkatan jumlah sumberdaya menyebabkan DDPb semakin mendekati ambang batasnya.

Proses olah data dalam menentukan status daya dukung lingkungan hidup khususnya bahan pangan digunakan pendekatan kuantitatif untuk memetakan DDLH berdasarkan jasa ekosistem pangan. Selain itu

digunakan juga sistem grid skala ragam sebagai pendekatan yang mampu merepresentasikan DDPb wilayah dalam bentuk informasi spasial tanpa harus menyamakan skala data yang tersedia. Sistem grid merupakan struktur dua dimensi yang membagi suatu wilayah menjadi rangkaian sel-sel unik dan berbeda yang bersebelahan. Setiap pengenal sel *(identifier* digunakan untuk pengindeksan secara spasial (Sahr, et al. 2003). Konsep skala ragam (*multiscale*) digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena dengan pola yang tidak berubah atau berubah secara monoton dalam skala dengan memanfaatkan informasi yang mengacu pada suatu rentang skala secara simultan (Riqqi, A. 2008 dalam Norvyani,D. dan Taradini, J., 2016).

Tahapan yang dilakukan untuk memetakan DDPb berbasis jasa ekosistem pangan terdiri dari tiga bagian, meliputi pendistribusian penduduk dalam sistem grid, perhitungan dan pendistribusian selisih ketersediaan energi bahan pangan, penentuan status DDPb berdasarkan ambang batas, dan visualisasi distribusi status DDPb di Kabupaten Ngada dalam bentuk peta. Hasil tersebut dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk mendeskripsikan persebaran DDPb (termasuk sebaran dan luasan) melalui angka dan grafis. **Tabel 2.13** adalah tabel yang menyajikan data hasil proses penentuan status daya dukung lingkungan hidup bahan pangan di Kabupaten Ngada. Secara umum nilai daya dukung lingkungan hidup bahan pangan Kabupaten Ngada adalah 0,18. nilai ini menandakan Kabupaten Ngada berada dibawah ambang batas sehingga dapat dikatakan defisit bahan pangan (beras). Jumlah penduduk Kabupaten Ngada pada Tahun 2018 adalah 161.196 jiwa dan kebutuhan pangan beras perkapita Kabupaten Ngada mencapai lebih dari 8 juta kg/tahun, dengan kondisi ekosistem penyedia bahan pangan (sawah) yang luas, Kabupaten Ngada memiliki ketersediaan pangan beras lebih dari 32 juta Kg/tahun.

Sementara itu, jika diamati lebih detil lagi. Meskipun status daya dukung pangan Kabupaten Ngada adalah surplus, namun tidak setiap kecamatan di Kabupaten Ngada memiliki status yang sama. Kecamatan yang memiliki status defisit adalah Kecamatan Aimere. Selain itu, jumlah

penduduk yang cukup banyak menyebabkan kecamatan ini memiliki nilai daya dukung pangan yang yang rendah (<1) sehingga di kategorikan sebagai Defisit bahan pangan. Kecamatan yang memiliki status defisit daya dukung pangannya menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pangan di kecamatan tersebut tidak mampu mendukung kebutuhan penduduknya atas bahan pangan. Artinya, lokasi yang direpresentasikan oleh grid tersebut mendapatkan bahan pangan dari daerah lain untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Untuk dapat mengamati disitribusi kebutuhan, ketersedian dan status daya dukung pangan Kabupaten Ngada, dapat dilihat pada **Gambar 2.3** s/d **Gambar 2.5.**

Tabel 2. 13. Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Pangan (Beras) Kabupaten Ngada

Kecamatan	Kebutuhan Bahan Pangan Kg/Th	Ketersediaan Bahan Pagan Kg/Th	Status Daya Dukung Pangan	Keterangan
Aimere	2,027,568	64,000	-1,963,568	Defisit
Bajawa	8,042,863	685,000	-7,357,863	Defisit
BajawaUtara	2,161,004	10,440,000	8,278,996	Surplus
Golewa	4,074,451	2,294,000	-1,780,451	Defisit
GolewaBarat	2,026,385	1,935,000	-91,385	Defisit
GolewaSelatan	1,932,566	6,534,000	4,601,434	Surplus
Inerie	1,379,503	-	-1,379,503	Defisit
Jerebuu	1,378,714	48,000	-1,330,714	Defisit
Riung	2,796,455	6,090,000	3,293,545	Surplus
RiungBarat	1,765,819	10,900,000	9,134,181	Surplus
Soa	2,796,455	34,182,000	31,385,545	Surplus
Wolomeze	1,284,304	11,615,000	10,330,696	Surplus
GrandTotal	31,666,086	84,787,000	53,120,914	Surplus

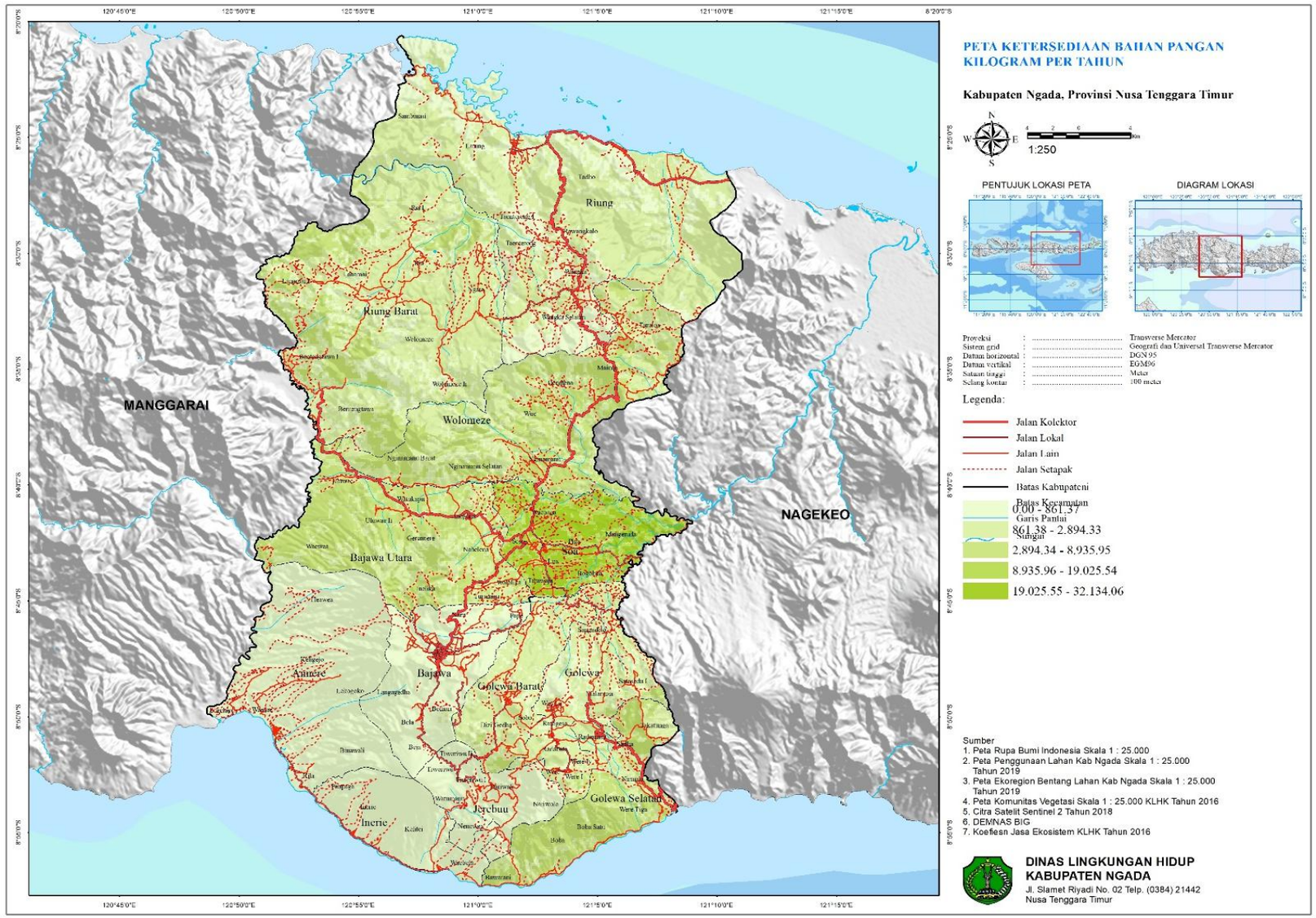

Gambar 2. 3.

Peta Ketersediaan

Pangan (Beras)

Kabupaten Ngada

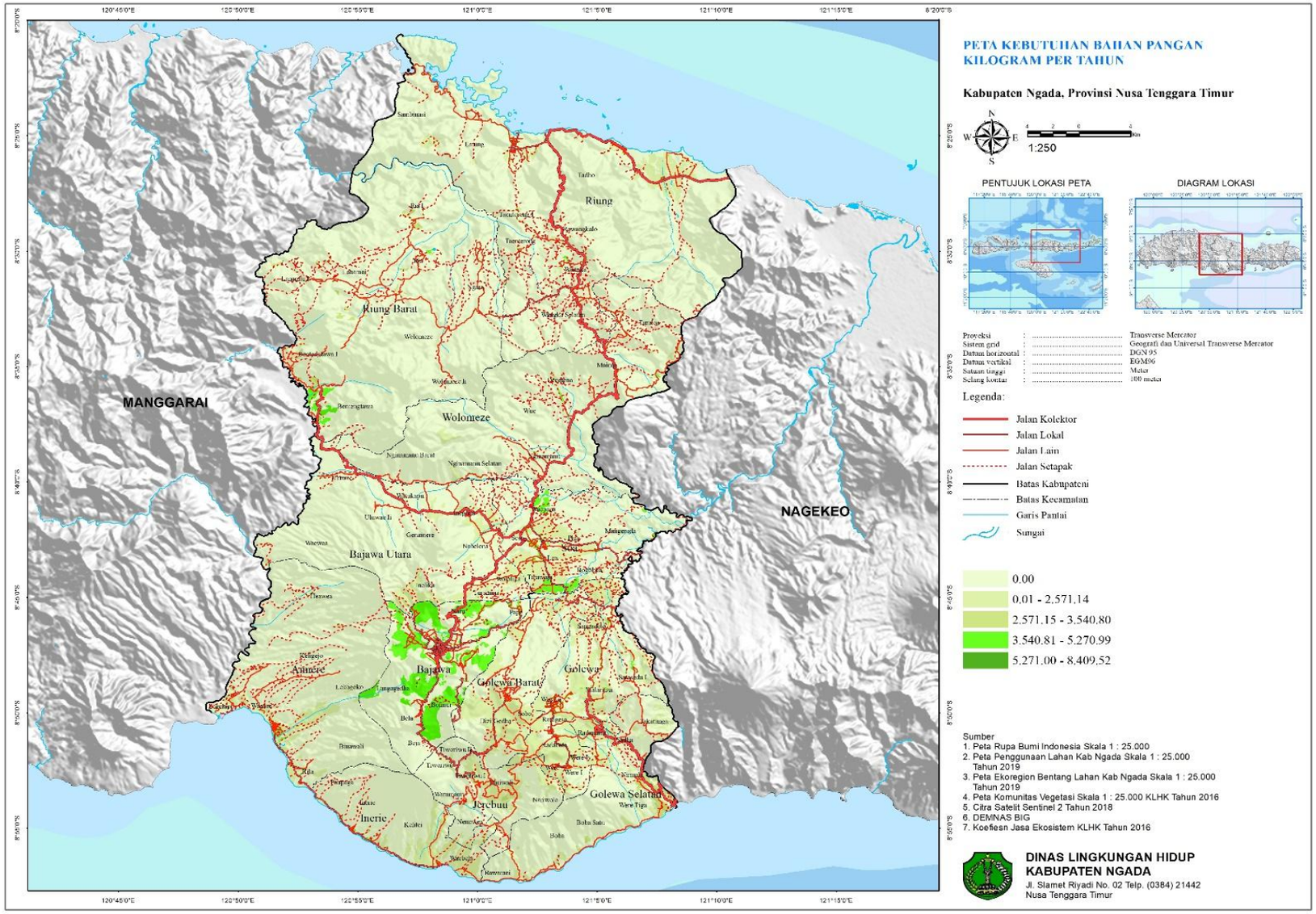

Gambar 2. 4. Peta Kebutuhan Pangan (Beras) Kabupaten Ngada

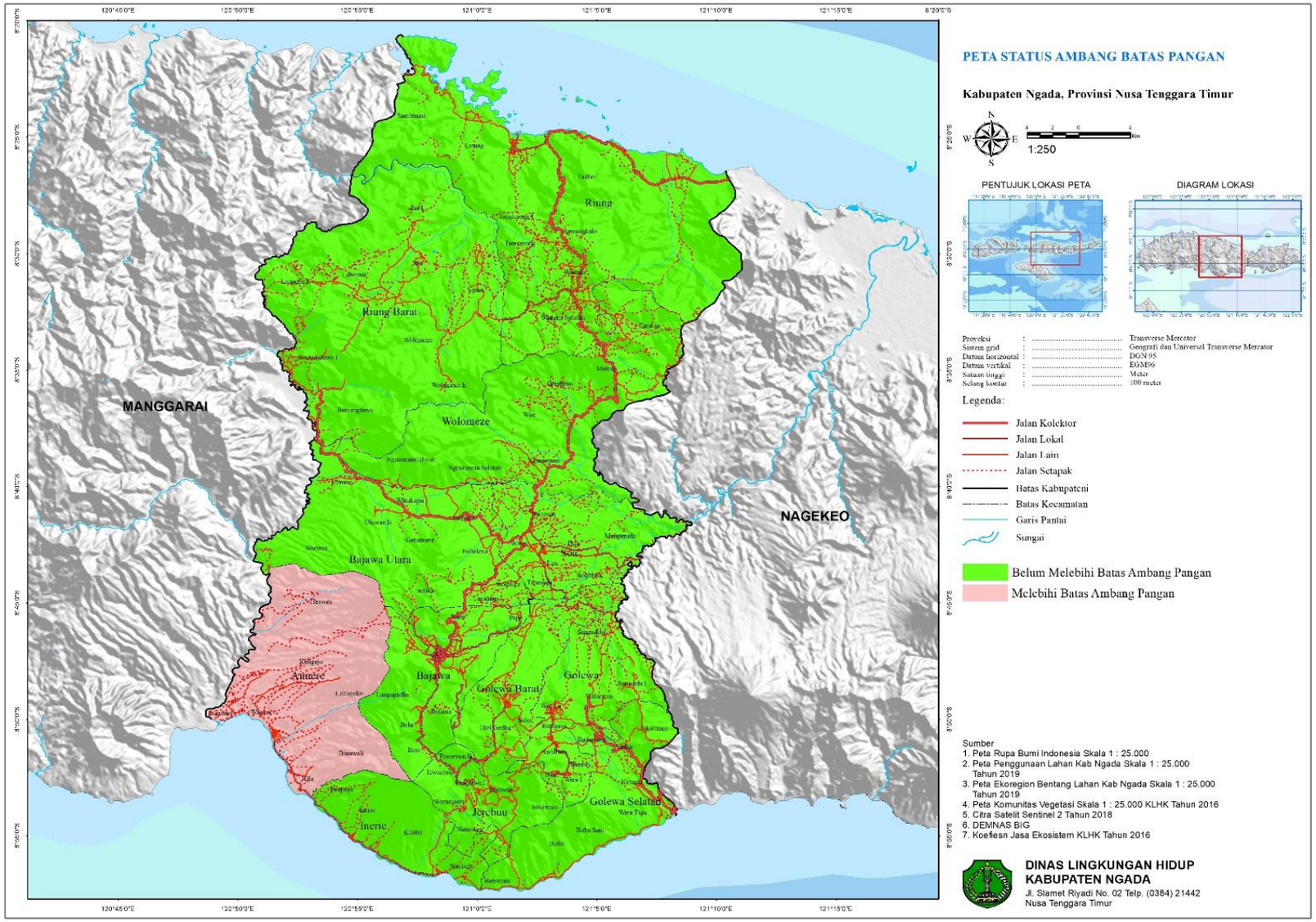

Gambar 2. 5.

Peta Status Daya Dukung Pangan (Beras) Kabupaten Ngada

B. Analisis Daya Dukung Air

Air termasuk dalam kategori sumber daya alam yang dapat diperbarui. Meskipun demikian kelestarian air perlu dijaga karena air adalah sumber daya yang sangat peka terhadap degradasi lingkungan. Berkurangnya kualitas dan kuantitas air yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan menjadi masalah yang dihadapi banyak wilayah. Menjaga kelestarian sumber daya air dapat dilakukan dengan menghemat pemakaian air, melakukan perhitungan mengenai cadangan air, serta memberikan air haknya untuk berada di alam. Air yang kehilangan haknya di alam akan menimbulkan banyak masalah dan bencana, misalnya kekeringan ketika musim kemarau, atau tanah longsor dan banjir ketika musim penghujan.

Hak-hak air di alam, contohnya adalah hak terhadap daerah resapannya. Air hujan yang jatuh di atas suatu wilayah sebagian akan mengalami infiltrasi dan sebagian lain akan menjadi air limpahan (run-off). Air yang mengalami infiltrasi akan mengisi kembali (recharge) cadangan air tanah, yang nantinya akan keluar berupa mata air yang mengisi kembali air permukaan. Sedangkan air limpahan akan mencari tempat yang lebih memungkinkan untuk meresap atau akan bergabung dengan air pemukaan. Semakin sempit daerah resapan, dengan asumsi curah hujan tetap, semakin banyak pula air limpahan yang masuk ke badan air permukaan. Padahal, untuk saat ini, secara kualitas air yang berada di badan air pemukaan tidak memenuhi kualitas layak konsumsi. Air tanahlah yang memenuhi syarat kualitas layak konsumsi. Namun, daerah resapan yang semakin menyempit, dalam jangka panjang akan mengurangi cadangan air tanah. Hak air terhadap daerah resapan inilah yang seringkali diabaikan manusia demi kepentingannya.

Secara umum kesesuaian guna lahan di dalam perencanaan ada tiga jenis, yaitu kawasan lindung, kawasan penyangga *(buffering)*, dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya dimanfaatkan sebagai tempat manusia beraktivitas, yang artinya mengubah tutupan lahan menjadi lahan terbangun, hal ini mengakibatkan kemampuan kawasan budidaya sebagai daerah resapan air jauh berkurang. Maka fungsi daerah resapan air bergeser pada kawasan penyangga dan kawasan lindung.

Kawasan penyangga (*buffering*) adalah kawasan peralihan antara kawawan lindung dan kawasan budidaya. Dengan lereng yang relatif curam dan struktur tanah yang kurang kokoh, kawasan buffering memiliki kemampuan meresapkan air yang lebih rendah dibandingkan kawasan budidaya. Hal ini dapat diatasi dengan tutupan lahan yang sesuai. Tutupan lahan yang sesuai untuk kawasan penyangga adalah tegakan yang berakar kuat dan masuk jauh ke dalam tanah. Namun, karena kepentingan ekonomi, tanaman tahunan, yang memiliki nilai jual, masih diperbolehkan dibudidayakan di kawasan penyangga.

Kawasan lindung adalah kawasan yang memiliki curah hujan tinggi, kelerengan yang sangat curam, dan struktur tanah yang tidak stabil. Karenanya, kawasan seperti ini tidak boleh dibudidayakan. Tutupan lahannyapun berupa pepohonan tinggi dengan akar yang kuat guna mempertahankan kestabilan tanah. Dikarenakan lerengnya yang curam, sebenarnya kawasan lindung memiliki kemampuan yang sangat kecil dalam meresapkan air. Namun, tutupan lahan berupa pepohonan tinggi dapat meningkatkan kemampuan meresapkan air hujan secara optimal. Daun-daun dari pepohonan tinggi ini menjadi hambatan bagi jatuhnya air hujan sehingga air lebih lama berada di Kawasan lindung. Hal ini menyebabkan peresapan air menjadi optimal.

Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah bahwa penghitungan sumber daya air dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya air bagi penduduk yang hidup di suatu wilayah. Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak. Perhitungan ketersediaan air (supply) menggunakan metode koefisien limpasan dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$C = \sum_{k=0}^{n} (ci\ x\ Ai) x \frac{1}{\sum_{k=0}^{n} Ai}$$

$$R = \sum_{k=0}^{n} Ri/m$$

$$Sa = 10\ x\ C\ x\ R\ x\ A$$

Keterangan:

SA : Ketersediaan air (m3/tahun)

C : Koefisien limpasan tertimbang

Ci : Koefisien limpasan penggunaan lahan I

Ai : Luas penggunaan lahan I (ha) dari data BPS atau BPN

R : Rata-rata curah hujan tahunan wilayah (mm/tahun) dari data BPS atau BMKG

Ri : Curah Hujan tahunan pada stasiun i

m : Jumlah stasiun pengamatan curah hujan

A : Luas wilayah (ha)

10 : Faktor konversi dari mm.ha menjadi m^3

Berikut koefisien limpasan berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup:

Tabel 2. 14. Koefisien Limpasan Air Tanah

No	Deskripsi permukaan	Ci
1	Kota, jalan aspal, atap genteng	0.7 – 0.9
2	Kawasan industry	0.5 – 0.9
3	Permukiman multi unit, pertokoan	0.6 – 0.7
4	Kompleks perumahan	0.4 – 0.6
5	Villa	0.3 – 0.5
6	Taman, pemakaman	0.1 – 0.3
7	Lahan berat	0.4
8	Padang rumput	0.35
9	Lahan budidaya pertanian	0.3
10	Hutan produksi	0.18

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009

Berdasarkan nilai koefisien di atas dapat dihitung besaran kemampuan lahan dalam menampung ketersediaan air di Kabupaten Ngada. Tutupan lahan atau penggunaan lahan di Kabupaten Ngada pada tahun 2017 terdiri dari:

Tabel 2. 15. Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Ngada 2017

No	Fungsi Penggunaan Lahan	Luas (ha)
1	Air Strip	6.01015
2	Danau/Situ	6.15617
3	Gedung/Bangunan	5.58337
4	Hutan Bakau/Mangrove	319.818
5	Hutan Rimba	19733.6
6	Padang Rumput	49699.2
7	Pasir/Bukit Pasir Darat	80.446
8	Pasir/Bukit Pasir Laut	17.1791
9	Perkebunan/Kebun	9243.62
10	Permukiman dan Tempat Kegiatan	1623.15
11	Rawa	34.4077
12	Sawah	1046.59
13	Sawah Tadah Hujan	4283.26
14	Semak Belukar	62268.6
15	Sungai	160.892
16	Tanah Kosong/Gundul	7.89833
17	Tegalan/Ladang	20293.6

Tabel 2. 16. Luas Limpasan Air di Kabupaten Ngada

No	Fungsi Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Koefisien (Ci)	Ci x A
1	Air Strip	6.01015	0.35	2.103553
2	Danau/Situ	6.15617	-	
3	Gedung/Bangunan	5.58337	0.5	2.791685
4	Hutan Bakau/Mangrove	319.818	-	
5	Hutan Rimba	19733.6	0.18	3552.048
6	Padang Rumput	49699.2	0.35	17394.72
7	Pasir/Bukit Pasir Darat	80.446	0.25	20.1115
8	Pasir/Bukit Pasir Laut	17.1791	0.15	2.576865
9	Perkebunan/Kebun	9243.62	0.3	2773.086
10	Permukiman dan Tempat Kegiatan	1623.15	0.4	649.26
11	Rawa	34.4077	-	
12	Sawah	1046.59	0.3	313.977
13	Sawah Tadah Hujan	4283.26	0.3	1284.978
14	Semak Belukar	62268.6	0.35	21794.01
15	Sungai	160.892	-	
16	Tanah Kosong/Gundul	7.89833	0.1	0.789833
17	Tegalan/Ladang	20293.6	0.3	6088.08

Sumber: Hasil Analisis 2019

Sehingga potensi ketersediaan air di Kabupaten Ngada yaitu:

SA = 10 x C x R x A

= 10 x 0.32 x 1.575,20 x 168.830

= 851.011.251,2 m^3/tahun

Nilai perhitungan potensi di atas didapatkan berdasarkan penggunaan data curah hujan tahunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1.575,20 mm/tahun, sehingga total potensi ketersediaan atau cadangan air di Kabupaten Ngada sebesar 851.011.251,2 m^3/tahun.

Kedua, dilakukan penghitungan demand kebutuhan air di Kabupaten Ngada untuk semua jenis kegiatan kabupaten. Menurut WHO kebutuhan air perorang dalam satu tahun ialah 1000-2000 m^3/orang/tahun. Selanjutnya, dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\boldsymbol{Da = N\ x\ KHLa}$$

Keterangan:

Da : Total kebutuhan air (m^3/tahun)

N : Jumlah penduduk

KLHa : Kebutuhan air untuk hidup layak

Total kebutuhan air di Kabupaten Ngada untuk mendukung kegiatan penduduknya pada tahun 2019 yakni 245,37 juta m^3/tahun. Berdasarkan hal tersebut, daya dukung air Kabupaten Ngada dapat dihitung dengan cara:

$$\textbf{Daya Dukung Air} = \frac{\textit{Ketersediaan Air (SA)}}{\textit{Kebutuhan Air (DA)}} = \frac{851011251}{245370000} = \mathbf{3{,}4}$$

Berdasarkan hasil perhitungan, dianalisis dengan kategori berikut:

DDA <1 = Daya dukung air defisit

DDA >1 = Daya dukung air surplus atau baik

Daya dukung air Kabupaten Ngada memiliki nilai 3,4 sehingga masuk dalam kategori baik/surplus. Selain itu, dengan menggunakan proyeksi pertumbuhan penduduk dapat diketahui kebutuhan air di masa mendatang. Kebutuhan air pada tahun mendatang dapat dilihat pada **Tabel 2.17.**

Tabel 2. 17. Total Kebutuhan Air Pada Tahun 2037

Jumlah Penduduk	Kebutuhan Lahan

No.	Tahun	Proyeksi Penduduk	KHL(a)	Da (m3/tahun)
1	2017	159.081	1.500	238.621.500
2	2018	161.176	1.500	241.764.000
3	2019	163.580	1.500	245.370.000
4	2020	165.985	1.500	248.977.500
5	2021	168.390	1.500	252.585.000
6	2022	170.794	1.500	256.191.000
7	2023	173.199	1.500	259.798.500
8	2024	175.603	1.500	263.404.500
9	2025	178.008	1.500	267.012.000
10	2026	180.413	1.500	270.619.500
11	2027	182.817	1.500	274.225.500
12	2028	185.222	1.500	277.833.000
13	2029	187.626	1.500	281.439.000
14	2030	190.031	1.500	285.046.500
15	2031	192.436	1.500	288.654.000
16	2032	194.840	1.500	292.260.000
17	2033	197.245	1.500	295.867.500
18	2034	199.649	1.500	299.473.500
19	2035	202.054	1.500	303.081.000
20	2036	204.459	1.500	306.688.500
21	2037	206.863	1.500	310.294.500
22	2038	209.268	1.500	313.902.000
23	2039	211.672	1.500	317.508.000
24	2040	214.077	1.500	321.115.500

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026

Total kebutuhan air di Kabupaten Ngada untuk mendukung kegiatan penduduknya pada tahun 2040 yakni 321 juta m^3/tahun. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa daya dukung air di Kabupaten Ngada sampai pada tahun 2040 masih mampu mendukung kegiatan penduduknya dikarenakan ketersediaan air lebih besar dari kebutuhan airnya. Akan tetapi penggunaan sumber daya air tersebut harus bijak dan keberlanjutan. Jadi berdasarkan analisis daya dukung dan daya tampung, bahwa Kabupaten Ngada masih mampu mendukung kegiatan wilayah dan penduduknya hingga pada tahun 2040 dan setelahnya. Hal tersebut berdasarkan permintaan akan lahan dan air di Kabupaten Ngada masih dapat didukung oleh wilayah geografis Kabupaten Ngada.

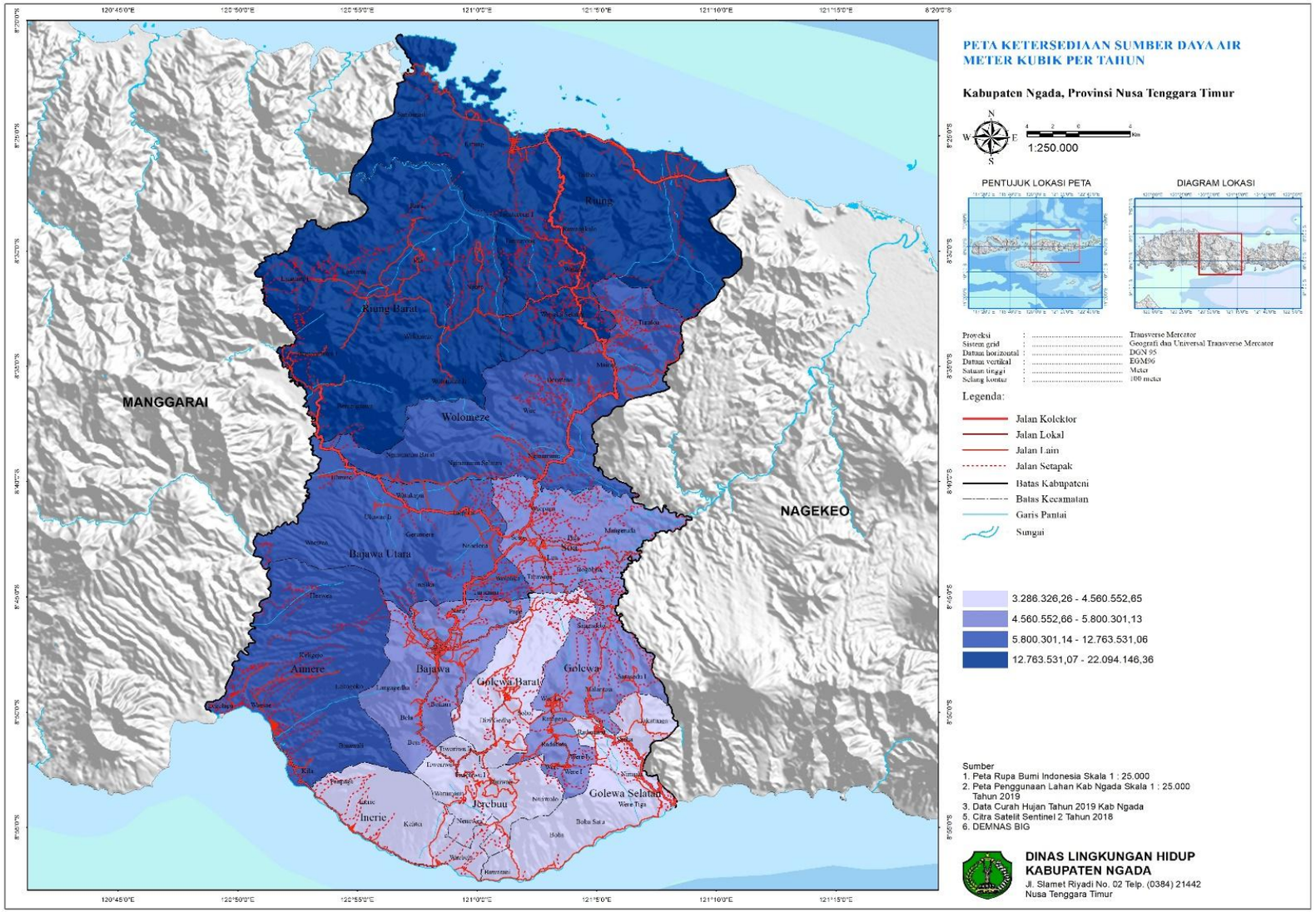

Gambar 2. 6.

Peta Ketersediaan Air

Kabupaten Ngada

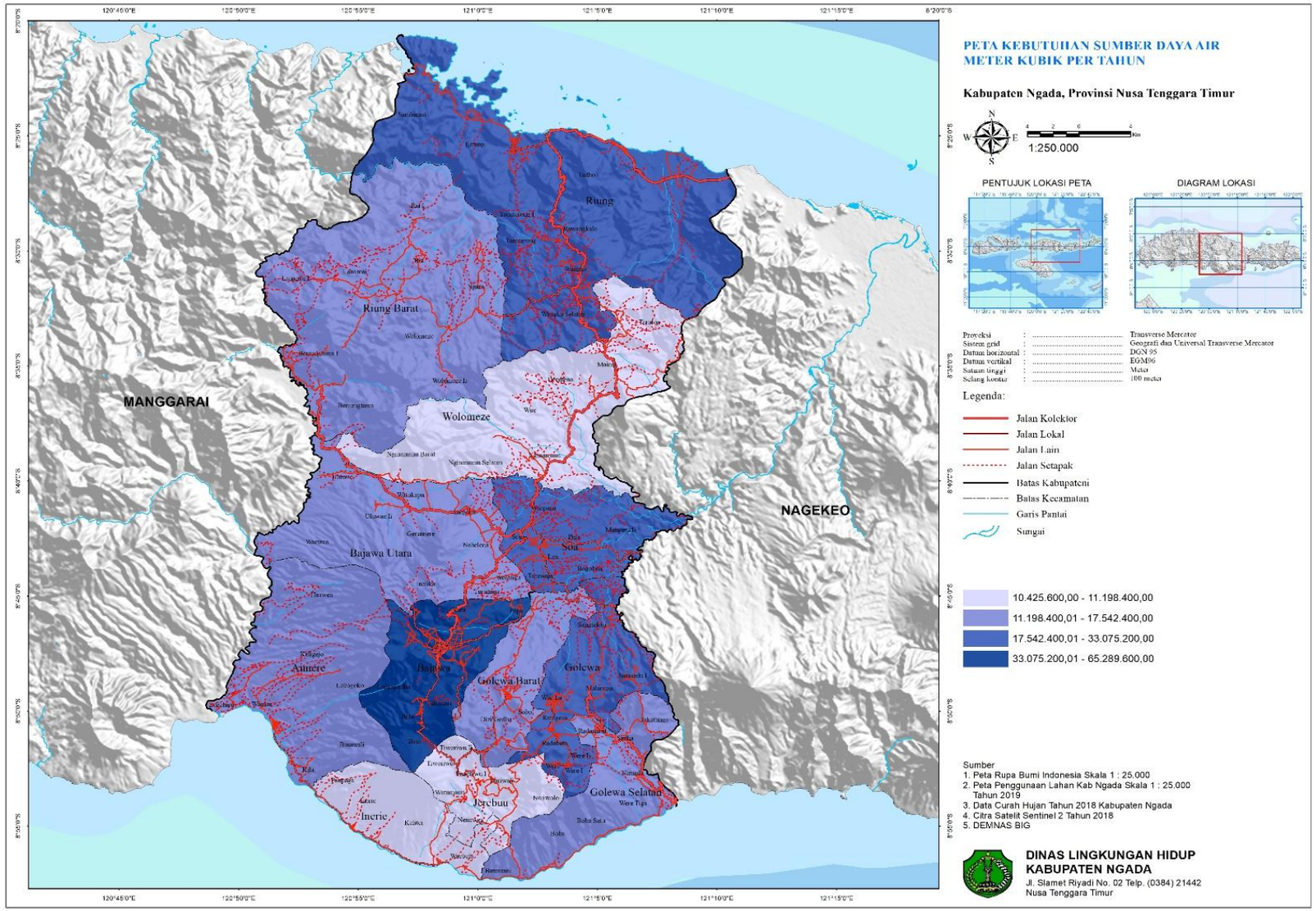

Gambar 2. 7.

Peta Kebutuhan Air

Kabupaten Ngada

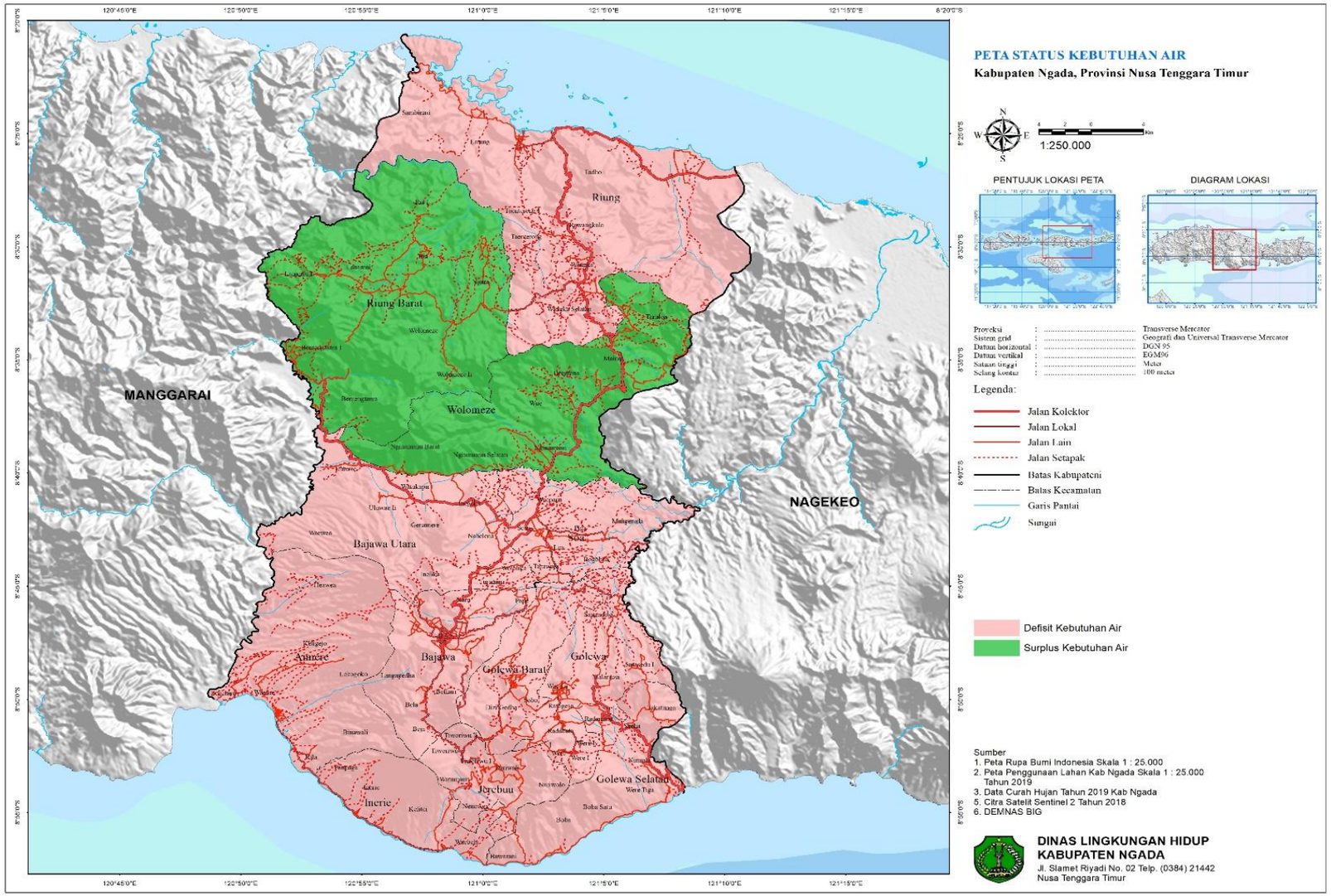

Gambar 2. 8.

Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Ngada

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Struktur pemanfaatan ruang wilayah memberi gambaran mengenai rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem perwilayahan di Kabupaten Ngada. Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah membentuk sistem pelayanan yang berhirarki di seluruh wilayah Kabupaten Ngada, sehingga terjadi pemerataan pelayanan, mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan maupun perkotaan. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, terutama jaringan transportasi.

Pada dasarnya, fungsi kawasan dapat dibagi menjadi dua, yakni kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Rencana kawasan perkotaan dan perdesaan bertujuan untuk mengetahui dan menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan karakter kawasan fungsi yang harus diperankan. Pengembangan sistem perkotaaan dan perdesaan didasari untuk menentukan secara administrasi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Adapun administrasi kawasan perkotaan ditetapkan untuk pengembangan sistem perdesaan dan perkotaan di wilayah Kabupaten Ngada.

Tabel 2. 18. Kawasan Perkotaan di Kabupaten Ngada

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan
1.	**Bajawa**	Bajawa
		Faobata
		Susu
		Beja
		Bomari
		Ubedolumolo
		Beiwali
		Wawowae
		Naru
		Borani
		Langagedha
		Tanalodu
		Kisanata
		Jawameze

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan
		Trikora
		Lebijaga
		Pape
		Bowali
		Ngoranale
		Bela
		Ubedolumolo I
2.	**Soa**	Loa
		Masumeli
		Mageruda
		Piga
		Seso
		Tarawaja
		Waepena
3.	**Riung**	Latung
		Lengkosambi
		Lengkosambi Barat
		Lengkosambi Timur
		Rawangkalo
		Sambinasi
		Tadho
		Taen Terong
		Wangka
		Wangka Selatan
		Benteng Tengah
		Nangamese
4.	**Golewa**	Dadawea
		Ekoroka
		Malanuza
		Mataloko
		Radabata
		Ratogesa
		Sangadeto
		Sarasedu
		Sarasedu I
		Todabelu
		Ulu Belu
		Wae La
		Were
		Were I
		Were IV

Sumber : RTRW Ngada 2020-2040

Setiap kawasan perkotaan memiliki jangkauan pelayanan tertentu sesuai dengan fungsi pelayanan kawasan perkotaan masing-masing. Penentuan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dan Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) ini dibuat sesuai dengan tingkat pelayanan perkotaan masing-masing dan fungsi yang harus diemban bagi setiap kawasan perkotaan secara hirarki dibawahnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut rencana pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Ngada antara lain meliputi :

1) Terdapat 1 (satu) PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah Promosi) yaitu Kecamatan Bajawa yang merupakan ibukota Kabupaten Ngada;
2) Terdapat 3 (tiga) PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) yaitu Kecamatan Soa, Kecamatan Riung, dan Kecamatan Golewa;
3) Terdapat 8 (delapan) PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 19. Sistem Pusat Perkotaan di Kabupaten Ngada

Sistem Pusat Perkotaan	Kecamatan	Lokasi
PKWp	Perkotaan Bajawa	Perkotaan Bajawa
PKLp	Riung	Perkotaan Riung
	Soa	Perkotaan Soa
	Golewa	Perkotaan Golewa Selatan
PPK	Aimere	Aimere
	Jerebuu	Watumanu
	Inerie	Waebela
	Bajawa	Surusina
	Golewa	Mataloko
	Golewa Selatan	Waturoka
	Golewa Barat	Rakalaba
	Bajawa Utara	Watukapu
	Soa	Warpana
	Riung	Riung
	Riung Barat	Maranggela
	Wolomeze	Wangawelu

Sumber : RTRW Ngada Tahun 2020-2040

Secara umum kondisi perkerasan jalan di Kabupaten Ngada dapat dikatakan cukup baik walaupun di jalan Provinsi kondisi jalannya sulit untuk dilalui. Perkerasan jalan menuju tempat-tempat penting dan daerah tujuan utama di Kabupaten Ngada, panjang jalan di Kabupaten Ngada mencapai

1041,60 Km yang terdiri dari jenis permukaan aspal sepanjang 429,94 km, kerikil sepanjang 218,70 km, dan tanah sepanjang 392,87 km

Pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Ngada terdiri atas:

a) Jaringan jalan arteri primer meliputi:
    1. ruas jalan batas Kabupaten Manggarai Timur – Simpang Bajawa;
    2. ruas jalan Bajawa – Malanuza;
    3. ruas jalan Panglima Besar Sudirman;
    4. ruas jalan Achmad Yani;
    5. ruas jalan Soekarno-Hatta;
    6. ruas jalan S. Parman;
    7. ruas jalan Yos Soedarso; dan
    8. ruas jalan Sugiopranoto.
b) Jaringan jalan kolektor primer meliputi ruas jalan:
    1. ruas jalan Malanuza – Maumbawa;
    2. ruas jalan Bajawa – Poma;
    3. ruas jalan Poma – Mbongras;
    4. ruas jalan Mbongras – batas Kabupaten Manggarai Timur;
    5. ruas jalan Mbongras – Danga; dan
    6. ruas jalan Waepana – Mbazang.
c) Jaringan jalan lokal primer meliputi seluruh jaringan jalan selain jalan nasional dan provinsi di dalam wilayah Daerah, meliputi:
    1. Bajawa – Ngoranale;
    2. Watujaji – Bena;
    3. Waebetu – Tarawaja;
    4. Bajawa – Ekoheto;
    5. Bajawa – Radawea;
    6. Bosiko – Surisina;
    7. Boua – Langa;
    8. Sagalaka – Waenai;
    9. Ogi – Dorarapu;
    10. Tanawau – Tarawaja;
    11. Nunuredobei – Tarawaja;
    12. Bejo – Maladhena;
    13. Bunganusa – Dizi;
    14. Dalam Kota Bajawa;
    15. Fui – Wolobaja;
    16. Watuneba – Pausiu;
    17. Pape – Watutoda;
    18. Waewako – Mamarea;
    19. Pape – Late;

20. Ikulewa – Tanawau;
21. Ikulewa – Ngoranale;
22. Waepana – Waebia;
23. Turetoro – Kisaraghe;
24. Piga – Kakasebulu;
25. Piga – Lowobia;
26. Mengeruda – Kakasebulu;
27. Loa – Mengeruda;
28. Masu – Loa;
29. Turetura – Boamuzi;
30. Buere'e – Turetoro;
31. Piga – Bandara Soa;
32. Jalan dalam IKK. Soa;
33. Mataloko – Were;
34. Mataloko – Nikisie;
35. Malanuza – Zepe;
36. Wogo – Reko;
37. Doka – Wajamala;
38. Mataloko – Dorarapu;
39. Toda – Kuwujawa;
40. Wolorowa – Zepe;
41. Hobosara – Lelo;
42. Were – Waturoka;
43. Waelebo – Zaa;
44. Sarasedu – Laja;
45. Dadawea – Pomamana;
46. Waelengi – Dorarapu;
47. Woewali – Wajamala;
48. Jalan dalam IKK Golewa;
49. Waeluja – Wogowela;
50. Wogowela – Waebela;
51. Reko – Zaa;
52. Ngorabolo – Malamako;
53. Ngorabolo – Hedhapoma;
54. Pomajoe – Tiwutoda;
55. Nirmala – Hedhapoma;
56. Waturoka – Waesoa;
57. Jalan dlm IKK Golewa Selatan;
58. Mangulewa – Dorarapu;
59. Rakalaba – Were;
60. Rakalaba – Moromoto;
61. Turekisa – Late;
62. Mangulewa – Jerebuu;

63. Para – Zeu;
64. Bhetopadhi – Nage;
65. Nuamuzi – Wajamala;
66. Bea – Nage;
67. Jalan dalam IKK Golewa Barat;
68. Riung – Marolidhong;
69. Nangarembo – Mboras;
70. Jalan Lingkar Kota Riung;
71. Rawangkalo – Miris;
72. Riung – Rawuk;
73. Alopering – Kuwuk;
74. Jalan dalam IKK Riung;
75. Aimere – Paukate;
76. Bojawa – Maghiana;
77. Aimere – Waebela;
78. Welujara – Waepara;
79. Waemokel – Teni;
80. Jalan dalam IKK Aimere;
81. Sebowuli – Ruto;
82. Burusi – Liasewa;
83. Jalan dalam IKK Inerie;
84. Tadha – Waebela;
85. Jerebuu – Nikisie;
86. Nikisie – Wogowela;
87. Rutojawa – Waebela;
88. Mengi – Rateawe;
89. Gurusina – Tololela;
90. Bena – Tololela;
91. Jalan dalam IKK Jerebuu;
92. Mulu – Tanalain;
93. Kurubhoko – Mawu;
94. Kurubhoko – Tajo;
95. Wolokuku – Sekojawa;
96. Ndekundenu – Ramba;
97. Welas – Namut;
98. Poma – Sekojawa;
99. Jalan dalam IKK Wolomeze;
100. Ranamoe – Teni;
101. Watudoy – Malafai;
102. Reke – Malafai;
103. Lokangeo – Kisaraghe;
104. Gou – Wolomeli;
105. Jalan dalam IKK Bajawa Utara;

106. Maroterong – Ria;
107. Ngoton – Kurubhoko;
108. Maronggela – Rio;
109. Ria – Lanamai;
110. Maronggela – Ria;
111. Nampe – Mbazang;
112. Nanggozat – Kazukerok;
113. Sangankonkon – Ria;
114. Ria – Mbarungkeli;
115. Jalan dalam IKK Riung Barat.

d) Jaringan jalan lokal sekunder dan lingkungan lebih lanjut akan dirinci dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Tatanan kepelabuhanan sebagai pelabuhan pengumpan Aimere di Kecamatan Aimere dan pelabuhan pengumpan Maumbawa di Kecamatan Golewa Selatan sebagai berikut :

a) Dermaga ikan Gemo di Desa Legelapu, Kecamatan Aimere seluas 2500 m^2;
b) Dermaga bongkar muat BBM/Kilang Minyak di Desa Waesae, Kecamatan Aimere seluas 5000 m^2;
c) Dermaga ikan Waebua di Kelurahan Foa, Kecamatan Aimere seluas 400 m^2;
d) Dermaga ikan Paupaga di Desa Paupaga, Kecamatan Aimere seluas 750 m^2;
e) Dermaga ikan Malapedho di Desa Inerie, Kecamatan Aimere seluas 750 m^2;
f) Dermaga ikan Wae Gongo di Desa Waru Pele II, Kecamatan Inerie seluas 750 m^2;
g) Dermaga ikan Lekoena di Desa Ruto I, Kecamatan Inerie seluas 3000m^2;
h) Dermaga laut Waebela di Desa Waebela, Kecamatan Inerie seluas 1,5 Ha;
i) Dermaga ikan Nangarodo di Desa Waebela, Kecamatan Inerie seluas 750 m^2;
j) Dermaga ikan Enabhara di Desa Were III, Kecamatan Golewa Selatan seluas 750 m^2;
k) Pelabuhan bongkar muat Lengkosambi Utara - Riung di Desa Lengkosambi Utara, Kecamatan Riung seluas 3 Ha;
l) Dermaga ikan Nangaular di Desa Latung, Kecamatan Riung seluas 2800 m^2;
m) Dermaga ikan Damu di Desa Sambinasi, Kecamatan Riung seluas 5000 m^2;

n) Dermaga ikan Nangalok di Desa Sambinasi Barat, Kecamatan Riung seluas 1500 m^2.

Alur pelayaran sebagaimana dimaksud adalah rencana pengembangan jalur Ngada–Kupang dan Ngada–Waingapu.

Wilayah Sungai (WS) merupakan kawasan yang perlu dikelola sebagai sumber daya air yang dapat bermanfaat untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, perlu perencanaan jaringan prasarana sumber daya Wilayah Sungai yang meliputi :

a) Wilayah sungai Flores yang melintasi Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka dan Flores Timur.
b) Wilayah sungai dalam Kabupaten yang meliputi Waewaru, Waepua, Aesemi, Bozoa, Leko Boba, Waebela, Lekoena, Waebua, Waemokel, Kali Mbuntal, Alolonggo, Alolasi, Toring, Mulabhara, Kolopenu, Waewoki, Dorarapu, Waebia, Padhagala, Waesao, Lekolanga, Waemeze, Bari, Sangankonkon, dan Kekonzuan.

Cekungan Air Tanah (CAT) merupakan kawasan sumber daya air tanah yang banyak tersimpan di wilayah Kabupaten Ngada. Salah satu CAT yang terdapat di wilayah ini adalah CAT Ruteng. CAT Ruteng merupakan CAT lintas kabupaten yang merupakan potensi air tanah yang pemanfaatannya harus efisien dan diatur dengan mengutamakan air permukaan serta pemantauan dengan jaringan monitoring muka air tanah.

Mengingat Kabupaten Ngada yang berbukit-bukit dengan intensitas curah hujan sedang - tinggi menjadikan wilayah ini memiliki sumber daya air yang melimpah. Beberapa lahan cukup potensial untuk pengembangan pertanian yang perlu didukung dengan pembangunan prasarana irigasi. Daerah-daerah irigasi (DI) di wilayah Kabupaten Ngada perlu dikelola dengan baik agar sumber air untuk kegiatan pertanian dapat berjalan secara optimal. Berikut merupakan beberapa daerah irigasi (DI) yang berada di Kabupaten Ngada :

a) Daerah Irigasi (DI) dalam wilayah daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan luas areal kurang dari 1.000 Ha, meliputi:
   1. DI. Rio Kelurahan Benteng Tawa/Riung Barat;

2. DI. Kamarero Kelurahan Benteng Tawa/Riung Barat;
3. DI. Bakit Kelurahan Benteng Tawa/Riung Barat;
4. DI. Blaswanging Desa Lanamai/Riung Barat;
5. DI. Pakupapan Desa Ria/Riung Barat;
6. DI. Watupirong Desa Ria/Riung Barat;
7. DI. Warukia Desa Wolomeze/Riung Barat;
8. DI. Waesaok Desa Benteng Tawa/Riung Barat;
9. DI. Marobhatong Desa Lanamai/Riung Barat;
10. DI. Lewurkue Desa Ngara/Riung Barat;
11. DI. Ije/Wae Beo Desa Nginamanu Barat/Wolomeze;
12. DI. Ije/Belale Desa Nginamanu Barat/Wolomeze;
13. DI. Waerama Desa Nginamanu Barat/Wolomeze;
14. DI. Tiwubele Desa Nginamanu/Wolomeze;
15. DI. Tiwukoe Desa Nginamanu/Wolomeze;
16. DI. Riwu Lena Desa Nginamanu Selatan/Wolomeze;
17. DI. Dhake Rua Desa Nginamanu Selatan/Wolomeze;
18. DI. Waerama Desa Nginamanu Selatan/Wolomeze;
19. DI. Malanaru Desa Denatana/Wolomeze;
20. DI. Welas Desa Denatana/Wolomeze;
21. DI. Wuju Desa Denatana/Wolomeze;
22. DI. Lewur Flu Desa Denatana/Wolomeze;
23. DI. Lewor Mendar Desa Denatana/Wolomeze;
24. DI. Maladaro Desa Denatana/Wolomeze;
25. DI. Nua Kua Desa Denatana/Wolomeze;
26. DI. Malanda Desa Denatana/Wolomeze;
27. DI. Maladanga Desa Mainai/Wolomeze;
28. DI. Maladhoro Desa Mainai/Wolomeze;
29. DI. Ramba Desa Turaloa/Wolomeze;
30. DI. Kojadhedhe Desa Turaloa/Wolomeze;
31. DI. Lewungusa Desa Waewea/Bajawa Utara;
32. DI. Ranolasa Desa Waewea/Bajawa Utara;
33. DI. Malateme/Puumbo Desa Uluwae/Bajawa Utara;
34. DI. Bhetomela Desa Uluwae I/Bajawa Utara;
35. DI. Tiwumolo Desa Watukapu/Bajawa Utara;
36. DI. Umalelu Desa Watukapu/Bajawa Utara;
37. DI. Wae Rea Desa Watukapu/Bajawa Utara;
38. DI. Watulewa Desa Watukapu/Bajawa Utara;
39. DI. Umalonga Desa Genamere/Bajawa Utara;
40. DI. Malapau Desa Genamere/Bajawa Utara;
41. DI. Waeneta Desa Genamere/Bajawa Utara;
42. DI. Riwu Lena Desa Genamere/Bajawa Utara;
43. DI. Wae Molu Desa Inegena/Bajawa Utara;
44. DI. Malabeso Desa Inegena/Bajawa Utara;

45. DI. Wawonaru/Dalughara Desa Nabelena/Bajawa Utara;
46. DI. Malanaru Desa Nabelena/Bajawa Utara;
47. DI. Wae Hoo Desa Nabelena/Bajawa Utara;
48. DI. Waebana Desa Wololika/Bajawa Utara;
49. DI. Waemanu Desa Uluwae I/Bajawa Utara;
50. DI. Waewelu Desa Inegena/Bajawa Utara;
51. DI. Wae Rea Desa Watukapu/Bajawa Utara;
52. DI. Soafuti Desa Pape/Bajawa;
53. DI. Hobomaro Desa Pape/Bajawa;
54. DI. Sudok Desa Wangka Selatan/Riung;
55. DI. Dupa Desa Sambinasi/Riung
56. DI. Alopering Desa Wangka Selatan/Riung;
57. DI. Rawangkalo Desa Wangka/Riung;
58. DI. Alokolang Desa Benteng Tengah/Riung;
59. DI. Tasik Desa Sambinasi/Riung;
60. DI. Liro Desa Wangka Selatan/Riung;
61. DI. Alolonggo Desa Benteng Tengah/Riung;
62. DI. Kasa Desa Wangka Selatan/Riung;
63. DI. Katolo Desa Wangka/Riung;
64. DI. Genggong Desa Wangka/Riung;
65. DI. Boti Kelurahan Mataloko/Golewa;
66. DI. Loba Desa Takatunga/Golewa Selatan;
67. DI. Tiwukela Desa Wogowela/Golewa Selatan;
68. DI. Waku Desa Malanuza/Golewa;
69. DI. Waia Desa Todabelu/Golewa;
70. DI. Maerera Desa Were III/Golewa Selatan;
71. DI. Malaki Desa Boba/Golewa Selatan;
72. DI. Waekusi Desa Sadha/Golewa Selatan;
73. DI. Tabasigho Desa Sarasedu/Golewa;
74. DI. Tiwuleke Desa Sarasedu/Golewa;
75. DI. Waelowe Desa Ratogesa/Golewa;
76. DI. Waebeli Desa Ratogesa/Golewa;
77. DI. Aesemi Desa Kezewea/Golewa Selatan;
78. DI. Soahea Desa Were III/Golewa Selatan;
79. DI. Gudu Desa Takatunga/Golewa Selatan;
80. DI. Lekosere Desa Nirmala/Golewa Selatan;
81. DI. Paurowa Desa Nirmala/Golewa Selatan;
82. DI. Kurusoka Desa Boba I/Golewa Selatan;
83. DI. Lekorajo Desa Boba I/Golewa Selatan;
84. DI. Hadonara Desa Boba I/Golewa Selatan;
85. DI. Tiwukela Desa Wogowela/Golewa Selatan;
86. DI. Waeroa Desa Dariwali/Jerebuu;
87. DI. Waekedhi Desa Dariwali/Jerebuu;

88. DI. Waenanga Desa Naruwolo/Jerebuu;
89. DI. Matameo Desa Naruwolo/Jerebuu;
90. DI. Ngorakego A, B, C Desa Aimere Timur/Aimere;
91. DI. Waebua Desa Foa/Aimere;
92. DI. Kinde Desa Keligejo/Aimere;
93. DI. Tutekupe Desa Masu/Soa; dan
94. DI. Lobara Desa Waepana/Soa.

b. Daerah Irigasi (DI) dalam wilayah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dengan luas areal antara 1.000 Ha sampai 3.000 Ha, meliputi:
    1. DI. Malatawa Desa Uluwae/Bajawa Utara;
    2. DI. Panondiwal Desa Uluwae/Bajawa Utara;
    3. DI. Zaa Desa Were III/Golewa Selatan;
    4. DI. Zeu Desa Sobo I/Golewa Barat; dan
    5. DI. Kurubhoko Desa Nginamanu/Wolomeze.

c. Daerah Irigasi (DI) dalam wilayah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dengan luas areal lebih dari 3.000 Ha, meliputi:
    1. DI. Soa I di Kecamatan Soa;
    2. DI. Soa II di Kecamatan Soa;
    3. DI. Soa III di Kecamatan Soa;
    4. DI. Soa IV di Kecamatan Soa;
    5. DI. Soa V di Kecamatan Soa; dan
    6. DI. Hobotopo di Kecamatan Soa.

Kebutuhan akan air bersih untuk wilayah perkotaan/ ibu kota kabupaten maupun ibu kota kecamatan bbelum seluruhnya terlayani oleh PDAM. Sumur gali, sumur bor dan mata air merupakan alternatif dalam pemenuhan kebutuhan air setiap harinya sehingga pemenuhan pelayanan air minum saat ini masih sangat terbatas. Banyaknya potensi sumber daya air dan mata air diwilayah ini perlu dikelola secara optimal mengingat tingkat pengguna air minum terus meningkat. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat persediaan air minum yang ada. Oleh karena itu, penyediaan air minum dimasa yang akan datang perlu adanya pengelolaan sumber-sumber air baru secara optimal dan mengefisienkan ketersediaan sumber air minum yang telah ada serta rencana penyediaan prasarana/jaringan air baku dalam hal ini pembangunan waduk dan embung. Potensi air baku untuk air minum, pertanian dan listrik di Kabupaten Ngada adalah sebagai berikut :

1) Pembangunan Waduk Mukufoka di Kecamatan Bajawa, Waduk Waemeze di Kecamatan Golewa, Waduk Waekoe di Kecamatan Aimere, Waduk Warukia dan Waduk Nampe di Kecamatan Riung Barat;
2) Pembangunan Embung Waetale, Embung Waekeo, Embung Mbundai, Embung Waepare, Embung Uluwae I, dan Embung Uluwae II di Kecamatan Bajawa Utara, Embung Waekabe, Embung Alodube, Embung Waekobe II, Embung Pore, Embung Malawatulang, Embung Wongkomunthe dan Embung Podang Kao di Kecamatan Riung Barat, Embung Wulabhara, Embung Mulu, Embung Keja, Embung Poma, Embung Nginamanu dan Embung Nggurun Dala di Kecamatan Wolomeze, Embung Tasik Terong, Embung Natar Tuak, Embung Lekoleru, Embung Tanalain di Kecamatan Riung, Embung Nunumeo dan Embung Umalelu di Kecamatan Aimere, Embung Waeloga di Kecamatan Bajawa.

Potensi energi listrik di Kabupaten Ngada masih menggunakan PLTD Faobata, PLTP Mataloko dan PLMTH Waeroa dan PLTPb Nage. Kemudian dalam rangka pemerataan pembangunan, maka penerangan ke wilayah terisolasi atau wilayah yang belum terjangkau kebutuhan akan listrik harus dilakukan melalui pengembangan pembangkit tenaga listrik dan jaringan prasarana baru. Untuk mengoptimalkan pelayanan energi listrik pada masa depan, diperlukan adanya peningkatan pelayanan utamanya pada daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah dan wilayah yang menjadi target pengembangan. Pengembangan pembangkit tenaga dan prasarana listrik Kabupaten Ngada meliputi :

1) Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik :
   - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPb) Mataloko dengan kapasitas terpakai 1 x1,8 MW terdapat di Kecamatan Golewa; dan saat ini sudah memasuki tahap II dokumen ANDAL dan RKL-RPL yaitu untuk Rencana Pembangunan PLTB Mataloko II dengan kapasitas 2x10 MW atau setara 20 MW.
   - Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Waeroa kapasitas 60 KW, terdapat di Kecamatan Jerebuu.
   - PLTPb Nage dengan luas wilayah 10.410 ha dan Kapasitas diperkirakan sekitar 35 Mega Watt pada kelas cadangan.
2) Rencana jaringan prasarana energi:
   - Gardu Induk Bajawa dengan kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV di Kecamatan Bajawa;

- Jaringan Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUT) dengan tegangan 150 KV yaitu menghubungkan kota Bajawa – Ruteng – Labuan Bajo; dan
- Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 70 KV yang menghubungkan PLTU Ulumbu Ruteng ke Bajawa, Bajawa ke Ende.

3) Pengembangan jaringan listrik energi terbarukan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan pembangkit Listrik Tenaga Microhidro pada lokasi - lokasi yang sulit dijangkau namum memiliki potensi pengembangannya

Jumlah penduduk yang setiap tahunnya meningkat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kebutuhan air minum yang perlu dipenuhi.Kabupaten Ngada memiliki potensi sumber daya air yang cukup melimpah, mulai dari air tanah maupun air permukaan. Salah satu yang sangat berpotensi untuk pengembangan sumber air minum masyarakat Kabupaten Ngada adalah mata air.

Sumber mata air di Kabupaten Ngada tersebar di semua kecamatan. Sumber ini dapat dimanfaatkan dengan secara langsung maupun dengan pembuatan jaringan perpipaan yang kemudian dialirkan kepada masyarakat. Adanya perencanaan pendistribusian air minum ini, kebutuhan air minum masyarakat di wilayah-wilayah dapat terjangkau dan bisa memenuhi kebutuhannya. Namun, penyediaan air minum perpipaan maupun non perpipaan tersebut juga harus direncanakan terkait stakeholder yang mengelola. Pihak Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat harus menjadi pihak-pihak yang ikut terlibat dalam pengelolaan air minum tersebut.

2.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Terdapat 10 jenis bencana yang ada di Kabupaten Ngada yang mana terdapat 3 gunung api aktif sehingga total terdapat 12 potensi ancaman bencana, hal tersebut sesuai dengan Peta Indeks Rawan Bencana yang telah dirilis oleh BNPB yang menyatakan wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk ke dalam kategori kerawanan tinggi.

Tabel 2. 20. Potensi Bencana di Kabupaten Ngada

Potensi Bencana Dikabupaten Ngada	
1. banjir	6. kebakaran hutan dan lahan
2. banjir bandang	7. cuaca ekstrim
3. gempa bumi	8. letusan gunung api (terdapat 3 gunung api aktif)
4. kekeringan	9. tsunami
5. tanah longsor	10. gelombang ekstrim dan abrasi

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia dan Hasil Analisa 2017

Kondisi kebencanaan di Kabupaten Ngada dapat ditinjau melalui gambaran umum wilayah dari Kabupaten Ngada. Posisi Kabupaten Ngada yang berhadapan langsung dengan dua perairan laut dan berdekatan dengan lempeng tektonik aktif membuat Kabupaten Ngada rentan terhadap bencana alam tsunami, gempa bumi serta abrasi laut akibat pasang surut air laut. Secara umum topografi dari Kabupaten Ngada merupakan pegunungan dan perbukitan, sehingga dengan topografi yang sangat bervariasi ketinggiannya dapat mempengaruhi karakterisatik bencana yang ada di Kabupaten Ngada terutama pada kondisi lahan dan kondisi cuaca.

Terdapat 3 gunung api aktif yang memberikan kesuburan tanah tetapi juga memberikan potensi ancaman bencana letusan gunung api. Iklim di Kabupaten Ngada cenderung kering pada tempat yang relatif datar sehingga memunculkan potensi ancaman bencana kekeringan dan kebakaran lahan, sedangkan pada tempat yang relatif tinggi memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan berpotensi terjadinya bencana banjir. Sebagai gambaran umum, jumlah penduduk Kabupaten Ngada mencapai 163.217 jiwa dan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak.

2.1.4.1. Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Ngada

Informasi tentang kejadian bencana yang pernah terjadi pada beberapa tahun sebelumnya merupakan informasi penting untuk analisis potensi ancaman bencana. Catatan kejadian bencana sebelumnya dapat memberikan gambaran seberapa besar ancaman dan dampak dari bencana. Sejarah kejadian bencana dapat diakses informasinya melalui Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dirilis oleh BNPB, dan menurut Dokumen Kajian Risiko Kabupaten Ngada Tahun 2018 – 2022 oleh BPBD Kabupaten Ngada, DIBI yang diperoleh merupakan kerangka acuan kerja tahun 2016 dari BNPB. Catatan kejadian bencana berdasarkan DIBI adalah 4 (empat) jenis bencana dalam rentang tahun 2000 – 2016, yaitu banjir, tanah longsor, gelombang pasang/abrasi, dan puting beliung. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. Beberapa kejadian bencana di Kabupaten Ngada tahun 2016 – 2020 yang dihimpun oleh BPBD Kabupaten Ngada dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. 21. Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Ngada Tahun 2016 – 2020

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian
Banjir	34
Tanah Longsor	61
Gelombang Pasang / Abrasi	3
Puting Beliung	103
Kebakaran	183
Abrasi Pantai	1
Disambar Petir	1
Kekeringan	4
Total Kejadian	391

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia 2020 dan
Data bencana daerah Kabupaten Ngada

Tabel tersebut menunjukkan terdapat 8 kejadian bencana yang terjadi antara tahun 2016 – 2020 dan dapat diketahui terdapat korban meninggal, cedera dan yang harus mengungsi, mencapai 362 jiwa. Hal tersebut belum termasuk data kerugian fisik dan ekonomi yang aktual ketika bencana terjadi.

Berbeda dengan data sejarah kejadian bencana yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Ngada dari periode waktu Januari – September 2020 terdapat 7

bencana yang terjadi di Kabupaten Ngada. Bencana tersebut meliputi Kebakaran Rumah Penduduk, Angin Puting Beliung, Tanah Longsor, Banjir, Kebakaran Lahan, Disambar Petir dan Gelombang Pasang. Kejadian bencana periode waktu Januari – September 2020 dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2. 22. Sejarah Kejadian Bencana periode waktu Januari – September 2020 di Kabupaten Ngada

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban (Jiwa)	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan	Lokasi Kejadian
Kebakaran Rumah Penduduk	4	-	2	3	Kec. Riung, Kec. Golewa dan Kec. Wolomeze
Tanah Longsor	14	-	3	5	Kec. Bajawa, Kec. Jerebuu, Kec. Golewa Barat, Kec. Golewa, Kec. Wolomeze. Kec. Golewa Selatan dan Kec. Inerie.
Angin Kencang	11	-	5	4	Kec. Bajawa, Golewa Barat, Riung, Golewa, Soa, Golewa Selatan dan Riung Barat.
Banjir	4	-	-	3	Kec. Bajawa, Kec. Riung dan Kec. Bajawa Utara
Kebakaran	5	-	1	4	Kec. Riung
Gelombang Pasang	2	-	-	-	Kec. Golewa Selatan dan Kec. Aimere
Disambar Petir	1	1	-	-	Kec. Wolomeze
Total Kejadian	**41**	**1**	**11**	**19**	

Sumber: Data Kejadian Bencana Periode Waktu Januari – Desember 2019 oleh BPBD Kabupaten Ngada

Berdasarkan Tabel tersebut diketahui terdapat 41 kejadian bencana yang terjadi di periode waktu antara Januari – September 2020. Kejadian bencana yang sering terjadi ialah bencana tanah longsor yang terjadi dibeberapa kecamatan. Jika diamati lebih lanjut kecamatan yang terjadi tanah longsor merupakan kecamatan dengan topografi perbukitan dan pegunungan dengan korban jiwa dari semua kejadian sebanyak 1 (satu)jiwa. Data tersebut dapat dijadikan acuan untuk menentukan prioritas penanganan bencana

sehingga persiapan penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak bencana di masa mendatang.

2.1.4.2. Kajian Bahaya untuk Bencana di Kabupaten Ngada

Dilihat dari sejarah kejadian bencananya baik dari DIBI maupun dari data BPBD Kabupaten Ngada diperoleh bahaya dengan dampak tertinggi adalah tanah longsor. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan kelas bahaya pada setiap jenis bahaya dan luasannya.

Tabel 2. 23. Potensi Bahaya di Kabupaten Ngada

No.	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	banjir	16.887	Tinggi
2	banjir bandang	1.503	Tinggi
3	cuaca ekstrim	47.182	Tinggi
4	gelombang ekstrim dan abrasi	2.323	Tinggi
5	Gempa bumi	166.517	Tinggi
6	kekeringan	166.517	Tinggi
7	kebakaran hutan dan lahan	105.813	Tinggi
8	letusan gunung api ebulobo	794	rendah
9	letusan gunung api inelika	5.424	sedang
10	letusan gunung api inerie	14.137	Tinggi
11	tanah longsor	11.1894	Tinggi
12	Tsunami	2.363	Tinggi

Sumber: RTRW Ngada 2020-2040

Tabel di atas menunjukkan hampir seluruh jenis bahaya yang ada di Kabupaten Ngada memiliki kelas tinggi dengan luas wilayah bahaya yang bervariasi, sehingga dapat dikatakan Kabupaten Ngada memiliki potensi bahaya terhadap bencana sangat tinggi. Hasil kajian bahaya setiap jenis bahaya lebih rinci sebagai berikut.

1. Banjir

Bahaya banjir disusun atas parameter daerah rawan banjir, kemiringan lereng, jarak dari sungai dan curah hujan. Hasil pengolahan dari beberapa parameter tersebut didapatkan hasil luasan wilayah bahaya dan kelas bahaya yang dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2. 24. Potensi Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kabupaten Ngada

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Aimere	1.057	Rendah
Bajawa	2.576	Tinggi
Bajawa Utara	5.624	Tinggi
Golewa	311	Sedang
Golewa Barat	1.199	Tinggi
Inerie	173	Tinggi
Jerebuu	30	Rendah
Riung	7.311	Tinggi
Riung Barat	3.689	Rendah
Soa	5.828	Rendah
Wolomeze	1.005	Rendah
Kabupaten Ngada	**28.801**	**Tinggi**

Sumber: RTRW Ngada 2020-2040

Tabel di atas menunjukkan terdapat 5 kecamatan memiliki kelas tinggi, 1 kecamatan dengan kelas sedang, dan 5 kecamatan dengan kelas rendah. Berdasarkan luasannya kelas tinggi lebih mendominasi dibandingkan dengan kelas lainnya sehingga kelas bahaya mayoritas untuk bahaya banjir di Kabupaten Ngada ialah kelas Tinggi dengan total luas wilayah bahaya 28.801 Ha.

2. Banjir Bandang

Parameter yang digunakan untuk menyusun bahaya banjir bandang ialah sungai utama, topografi, dan potensi longsor di hulu sungai (longsoran yang memiliki kelas tinggi dan kelas sedang). Hasil pengolahan dari beberapa parameter tersebut menghasilkan luasan wilayah bahaya dan kelas bahaya pada setiap kecamatan yang dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2. 25. Potensi Bahaya Banjir Bandang Per Kecamatan di Kabupaten Ngada

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Aimere	392	Tinggi
Bajawa	512	Tinggi
Bajawa Utara	2.529	Tinggi
Golewa	55	Tinggi

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Golewa Barat	368	Tinggi
Inerie	123	Tinggi
Jerebu'u	226	Tinggi
Riung	627	Tinggi
Riung Barat	830	Tinggi
Soa	139	Tinggi
Wolomeze	324	Tinggi
Kabupaten Ngada	**6.125**	**Tinggi**

Sumber: RTRW Ngada 2020-2040

Tabel di atas menunjukkan seluruh kecamatan di Kabupaten Ngada kecuali Kecamatan Golewa Selatan memiliki kelas bahaya tinggi untuk bahaya banjir bandang. Kecamatan Bajawa Utara merupakan kecamatan dengan wilayah bahaya terluas dengan luas 2.529 Ha. Berdasarkan kelas bahaya mayoritas, maka bahaya banjir bandang di Kabupaten Ngada termasuk ke dalam kelas bahaya Tinggi dengan luas wilayah bahaya 6.125 Ha.

3. Gempa bumi

Bahaya gempa bumi disusun atas beberapa parameter fisik yang memiliki pengaruh terhadap dampak dari gempa bumi. Parameter yang digunakan yaitu kelas topografi, intensitas guncangan di batuan dasar dan intensitas guncangan di permukaan. Parameter tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan informasi luasan wilayah bahaya dan kelas bahaya pada setiap kecamatan yang dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2. 26. Potensi Bahaya Gempabumi Per Kecamatan di Kabupaten Ngada

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Aimere	9.240	Tinggi
Bajawa	13.736	Tinggi
Bajawa Utara	16.738	Tinggi
Golewa	7.407	Tinggi
Golewa Barat	9.421	Tinggi
Golewa Selatan	10.206	Sedang
Inerie	8.080	Sedang
Jerebu'u	8.213	Sedang
Riung	32.794	Sedang
Riung Barat	31.249	Tinggi
Soa	9.114	Tinggi
Wolomeze	10.319	Tinggi

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Kabupaten Ngada	**166.517**	**Tinggi**

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Hasil analisa menunjukkan terdapat 8 kecamatan yang termasuk ke dalam kelas tinggi dan 4 kecamatan yang termasuk ke dalam kelas sedang. Kecamatan dengan luas wilayah bahaya terluas yaitu Riung dan Riung Barat. Kelas bahaya mayoritas untuk bahaya gempa bumi di Kabupaten Ngada termasuk ke dalam kelas Tinggi dengan luas wilayah bahaya 166.517 Ha.

4. Kekeringan

Penyusunan bahaya kekeringan menggunakan parameter iklim dengan data curah hujan bulanan yang didapatkan melalui *Climate Hazard Group* tahun 1981 – 2016. Hasil analisa dari pengolahan parameter tersebut dihasilkan luas wilayah bahaya dan kelas bahaya yang dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2. 27. Potensi Bahaya Kekeringan PerKecematan di Kabupaten Ngada

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Aimere	9.240	Tinggi
Bajawa	13.736	Tinggi
Bajawa Utara	16.738	Tinggi
Golewa	7.407	Tinggi
Golewa Barat	9.421	Tinggi
Golewa Selatan	10.206	Tinggi
Inerie	8.080	Tinggi
Jerebuu	8.213	Tinggi
Riung	32.794	Tinggi
Riung Barat	31.249	Tinggi
Soa	9.114	Sedang
Wolomeze	10.319	Sedang
Kabupaten Ngada	**166.517**	**Tinggi**

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas terdapat 10 kecamatan yang termasuk ke dalam kelas tinggi dan hanya terdapat 2 kecamatan yang termasuk ke dalam kelas sedang. Sama seperti bahaya gempa bumi, Kecamatan Riung dan Kecamatan Riung Barat memiliki luas wilayah bahaya terluas dengan kelas tinggi. Hasil

tersebut menunjukkan kelas bahaya mayoritas untuk bahaya kekeringan termasuk ke dalam kelas Tinggi dengan luas wilayah bahaya 166.517 Ha.

5. Cuaca Ekstrim

Bahaya cuaca ekstrim disusun atas beberapa paramater yang memiliki pengaruh terhadap dampak bahaya tersebut. Parameter yang digunakan meliputi keterbukaan lahan, kemiringan lereng dan curah hujan tahunan. Parameter tersebut kemudian diolah dan dianalisa untuk mendapatkan luas wilayah bahaya dan kelas bahaya. Hasil analisa tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2. 28. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kabupaten Ngada

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Aimere	1.834	Tinggi
Bajawa	3.904	Tinggi
Bajawa Utara	10.011	Tinggi
Golewa	2.359	Tinggi
Golewa Barat	2.453	Tinggi
Golewa Selatan	481	Tinggi
Inerie	262	Tinggi
Jerebu'u	119	Tinggi
Riung	9.270	Tinggi
Riung Barat	7.232	Tinggi
Soa	7.772	Tinggi
Wolomeze	1.585	Tinggi
Kabupaten Ngada	**47.182**	**Tinggi**

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Hasil analisa tersebut menunjukkan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ngada memiliki kelas bahaya cuaca ekstrim tinggi. Kecamatan Bajawa Utara memiliki luas wilayah bahaya 10.011 Ha dan hal tersebut menjadikan kecamatan terluas disusul oleh Kecamatan Riung dengan potensi tinggi. Kelas bahaya mayoritas untuk bahaya cuaca ekstrim termasuk ke dalam kelas Tinggi dengan luas wilayah bahaya 47.182 Ha.

6. Tanah Longsor

Bahaya tanah longsor disusun atas beberapa parameter fisik yang berkaitan dengan topografi dan karakteristik tanah. Parameter tersebut

meliputi kemiringan lereng dan zona kerentanan gerakan tanah yang dijabarkan menjadi beberapa data fisik seperti arah lereng, panjang/bentuk lereng, kelas topografi, tipe tanah, kedalaman tanah dan juga data curah hujan. Parameter tersebut kemudian diolah dan menghasilkan hasil analisa yang berupa luas wilayah bahaya dan kelas bahaya yang dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. 29. Potensi Bahaya Tanah Longsor Per Kecamatan di Kabupaten Ngada

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Aimere	7.069	Sedang
Bajawa	9.224	Tinggi
Bajawa Utara	6.461	Sedang
Golewa	4.439	Tinggi
Golewa Barat	6.287	Tinggi
Golewa Selatan	8.453	Tinggi
Inerie	7.389	Tinggi
Jerebu'u	7.689	Tinggi
Riung	22.983	Sedang
Riung Barat	22.456	Sedang
Soa	1.247	Sedang
Wolomeze	8.196	Sedang
Kabupaten Ngada	**111.894**	**Tinggi**

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Hasil analisa menunjukkan terdapat 6 kecamatan yang termasuk ke dalam kelas tinggi dan 6 kecamatan yang termasuk ke dalam kelas sedang. Kecamatan Riung dan Kecamatan Riung Barat memiliki wilayah bahaya terluas dengan kelas sedang, sedangkan untuk kelas tinggi dengan wilayah terluas pada Kecamatan Golewa Selatan. Kelas bahaya mayoritas untuk bahaya tanah longsor termasuk ke dalam kelas Tinggi dengan luas wilayah bahaya 111.894 Ha.

7. Letusan Gunung Api

Gunung api aktif yang ada di Kabupaten Ngada meliputi Gunung Inerie, Inielika dan Ebulobo yang tentu memiliki potensi bahaya yang berbeda-beda tergantung dari karakteristik parameter di setiap gunung tersebut. Parameter yang digunakan untuk menyusun bahaya letusan gunung api ialah zona aliran

dan zona jatuhan. Hasil analisa dari pengolahan parameter tersebut yang berupa luas wilayah bahaya dan kelas bahaya dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2. 30. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Ebulobo

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Golewa	101	Rendah
Golewa Selatan	691	Rendah
Soa	2	Rendah
Kabupaten Ngada	794	Rendah

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 2. 31. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Inelika

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Bajawa	2.704	Rendah
Bajawa Utara	2.133	Sedang
Golewa Barat	21	Rendah
Soa	562	Sedang
Wolomeze	5	Rendah
Kabupaten Ngada	5.425	Sedang

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 2. 32. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Inerie

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Aimere	787	Rendah
Bajawa	3.355	Tinggi
Golewa Barat	1.613	Rendah
Inerie	5.597	Rendah
Jerebu'u	2.785	Tinggi
Kabupaten Ngada	14.137	Tinggi

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, terlihat besaran luas bahaya letusan Gunung api Inerie, Inelika dan Ebulobo per kecamatan terdampak. Besarnya luas bahaya dipengaruhi kondisi wilayah yang rentan dilihat dari parameter kajian. Untuk

kecamatan Bajawa dan Jerebu'u potensi bahaya yang di akibatkan oleh 3 gunung api ini masuk kelas Tinggi ini disebabkan masyarakatnya cukup dinamis dan banyak yang beraktivitas di sekitar kecamatan tersebut, khususnya Bajawa yang merupakan ibukota dari Kabupaten Ngada ini yang memiliki aktivitas ekonomi yang sangat ramai dan berpopulasi cukup padat di banding dengan kecamatan lainnya. Rekapitulasi kajian bahaya per kecamatan menentukan total luas bahaya untuk Kabupaten Ngada. Secara keseluruhan bencana letusan Gunung api Ebulobo memiliki potensi luas bahaya dengan total 794 Ha yang berada pada kelas Rendah. Gunung api Inelika memiliki potensi luas bahaya dengan total 5.425 Ha yang berada pada kelas Sedang. dan Gunung api Inerie memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Ngada dengan total 14.137 Ha yang berada pada kelas Tinggi.

8. Kebakaran Hutan dan Lahan

Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan diketahui dengan memanfaatkan parameter yang berpengaruh. Parameter tersebut meliputi jenis hutan dan lahan, iklim dan jenis tanah. Hasil analisa yang didapatkan dari pengolahan data parameter menghasilkan luasan wilayah bahaya dan kelas bahaya yang dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2. 33. Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Aimere	4.982	Sedang
Bajawa	2.873	Sedang
Bajawa Utara	7.442	Sedang
Golewa	1.908	Sedang
Golewa Barat	4.020	Sedang
Golewa Selatan	5.204	Sedang
Inerie	4.534	Sedang
Jerebu'u	5.036	Sedang
Riung	28.985	Sedang
Riung Barat	30.370	Tinggi
Soa	650	Sedang
Wolomeze	9.810	Sedang
Kabupaten Ngada	105.814	Tinggi

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Berdasarkan hasil analisa pada tabel di atas, diketahui hampir seluruh kecamatan termasuk ke dalam kelas bahaya sedang, kecuali untuk Kecamatan

Riung Barat yang termasuk ke dalam kelas tinggi. Kecamatan Riung Barat yang termasuk ke dalam kelas tinggi memiliki luas wilayah bahaya 30.370 Ha, sehingga meskipun hampir seluruh kecamatan termasuk kelas sedang, kelas bahaya mayoritas tetap masuk ke dalam kelas Tinggi dengan luas wilayah bahaya 105.814 Ha.

9. Tsunami

Bahaya Tsunami ditinjau melalui beberapa parameter fisik yang berpengaruh terhadap dampak bahaya. Parameter tersebut meliputi penggunaan lahan, kemiringan lereng dan garis pantai. Hasil analisa yang diperoleh dari pengolahan menghasilkan informasi luas wilayah bahaya dan kelas bahaya yang dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2. 34. Bahaya Tsunami Per Kecamatan di Kabupaten Ngada

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Aimere	364	Tinggi
Golewa Selatan	168	Tinggi
Inerie	117	Tinggi
Riung	1.714	Tinggi
Kabupaten Ngada	2.363	Tinggi

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Hasil analisa pada tabel di atas menunjukkan hanya 4 kecamatan yang termasuk ke dalam kelas bahaya tinggi, sedangkan kecamatan lain tidak muncul dalam analisa karena hanya 4 kecamatan tersebut yang berada di pesisir laut. Keempat kecamatan tersebut termasuk ke dalam kelas tinggi, sehingga kelas bahaya mayoritas termasuk ke dalam kelas Tinggi dengan total luas wilayah bahaya 2.363 Ha.

10. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Analisa bahaya gelombang ekstrim dan abrasi menggunakan beberapa parameter yang terkait dengan informasi fisik lahan pesisir dan kelautan. Parameter tersebut meliputi penggunaan lahan, tinggi gelombang, arus dan garis pantai. Hasil analisa yang diperoleh dari pengolahan data parameter menunjukkan luas wilayah bahaya dan kelas bahaya yang dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2. 35. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Aimere	383	Sedang
Golewa Selatan	429	Sedang
Inerie	426	Sedang
Riung	1.085	Tinggi
Kabupaten Ngada	2.323	Tinggi

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Hasil analisa pada tabel di atas menunjukkan 3 kecamatan yang termasuk ke dalam kelas bahaya sedang, dan 1 kecamatan yang termasuk ke dalam kelas bahaya tinggi, sedangkan kecamatan lain tidak muncul dalam analisa karena hanya 4 kecamatan tersebut yang berada di pesisir laut. Ketiga kecamatan tersebut termasuk ke dalam kelas sedang, tetapi Kecamatan Riung termasuk ke dalam kelas tinggi dengan luas bahaya yang cukup luas, sehingga kelas bahaya mayoritas termasuk ke dalam kelas Tinggi dengan total luas wilayah bahaya 2.323 Ha.

2.1.5. Demografi

Perubahan demografis merupakan salah satu tantangan utama pembangunan daerah saat ini. Penduduk atau sumber daya manusia (SDM) merupakan Salah satu modal pembangunan, selain sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, penduduk merupakan modal dasar yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Hanya dengan adanya penduduk yang berkualitas, keberadaan potensi sumber daya yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan secara tepat, efisien dan berkesinambungan. Keberadaan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan bermoral adalah jaminan masa depan suatu daerah.

Penduduk atau masyarakat merupakan titik sentral dalam pembangunan (*people-centered development*). Hal tersebut menjadi penting karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan. Besaran, komposisi, kualitas dan distribusi penduduk akan mempengaruhi

struktur ruang dan kegiatan sosial serta kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, akan tetapi memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Oleh karena itu analisis kependudukan sangat dibutuhkan agar efesiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan dapat berhasil sebagaimana diharapkan.

No	Kecamatan	2015			2016			2017			2018			2019		
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Aimere	4.647	4.937	9.584	4.764	5.128	9.892	4.900	5.217	10.117	4.979	5.308	10.287	5.055	5.397	10.452
2	Jerebuu	3.127	3.656	6.783	3.119	3.691	6.810	3.178	3.722	6.900	3.202	3.753	6.955	3.221	3.782	7.003
3	Inerie	3.583	4.054	7.637	3.243	3.716	6.959	3.280	3.718	6.998	3.277	3.722	6.999	3.273	3.721	6.994
4	Bajawa	19.328	19.870	39.198	19.365	20.171	39.536	19.840	20.443	40.283	20.084	20.722	40.806	20.316	20.989	41.305
5	Golewa	8.948	9.403	18.351	9.570	10.203	19.773	9.867	10.408	20.275	10.053	10.619	20.672	10.234	10.824	21.058
6	Golewa Selatan	5.171	5.526	10.697	4.658	5.031	9.689	4.725	5.049	9.774	4.737	5.068	9.805	4.745	5.083	9.828
7	Golewa Barat	4.900	5.174	10.074	4.836	5.175	10.011	4.943	5.232	10.175	4.991	5.290	10.281	5.036	5.344	10.380
8	Bajawa Utara	4.532	4.690	9.222	5.018	5.261	10.279	5.226	5.421	10.647	5.378	5.586	10.964	5.530	5.751	11.281
9	Soa	6.748	7.098	13.846	6.682	7.120	13.802	6.832	7.202	14.034	6.902	7.286	14.188	6.968	7.365	14.333
10	Riung	7.450	7.623	15.073	7.130	7.391	14.521	7.250	7.435	14.685	7.285	7.479	14.764	7.313	7.519	14.832
11	Riung Barat	4.292	4.137	8.429	4.368	4.265	8.633	4.487	4.334	8.821	4.554	4.405	8.959	4.618	4.474	9.092
12	Wolomeze	2.891	2.908	5.799	3.070	3.126	6.196	3.173	3.199	6.372	3.243	3.273	6.516	3.313	3.346	6.659
Total		75.617	79.076	154.693	75.823	80.278	156.101	77.701	81.380	159.081	78.685	82.511	161.196	79.622	83.595	163.217

Tabel 2. 36. Jumlah Penduduk Per Kecamatan

Sumber : BPS 2016-2020

Jumlah penduduk Kabupaten NgadaTahun 2019 berdasarkan Publikasi BPS Tahun 2020 berjumlah 163.217 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 101 jiwa/km. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bajawa dengan proporsi sebesar 25,31%, menyusul Golewa 12,90%. Sedangkan kecamatan dengan proporsi jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Wolomeze sebesar 4,08% dari total penduduk Ngada.Secara umum jumlah penduduk Kabupaten Ngada pada Tahun 2019, penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki; dengan prosentase 51,22% perempuan dan 48,78% laki-laki.

Grafik 2. 2. Piramida Penduduk Kabupaten Ngada Tahun 2019

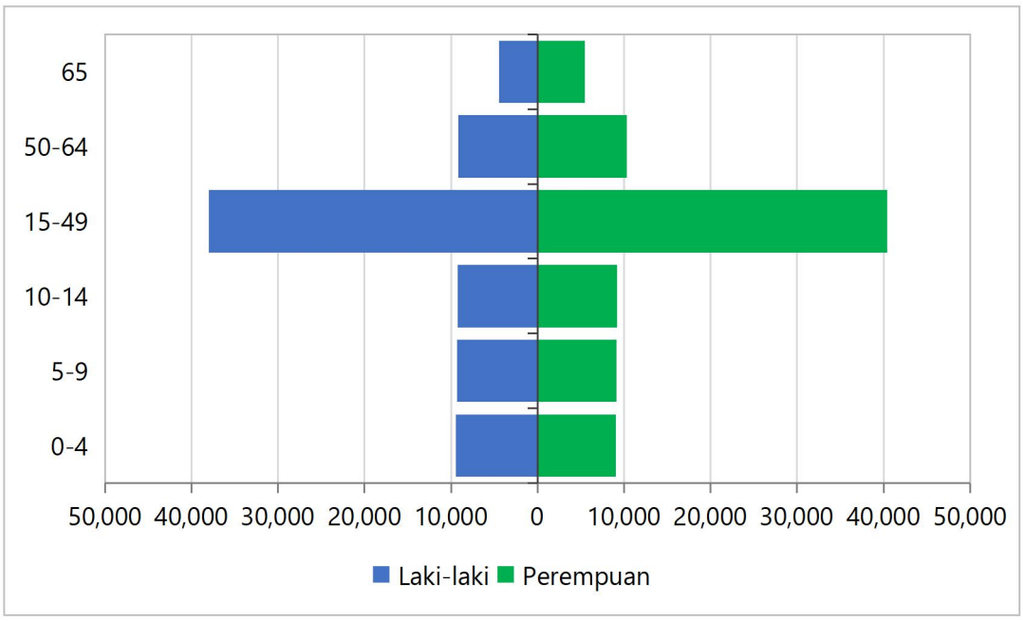

Sumber : BPS Ngada, 2020

Selanjutnya jika dianalisis menurut komposisi penduduk berdasarkan struktur usia, tahun 2019, didominasi oleh struktur usia 15-65 tahun atau usia produktif. Angka kebergantungan penduduk usia non produktif terhadap usia produktif dalam kurun 5 tahun terakhir berkisar antara 69,30% pada tahun 2015, Tahun 2016 sebesar 68,59%, Tahun 2017 sebesar 67,92%, pada Tahun 2018 sebesar 67,34% dan pada Tahun 2019 sebesar 66,79% yang berarti rata-rata dalam setiap 100 penduduk produktif harus menanggung 67 orang penduduk non produktif. Bila dilihat perkembangan tersebut, maka kondisi ini merupakan potensi yang sangat besar berkaitan dengan sumber daya manusia Kabupaten Ngada; dengan catatan jumlah penduduk produktif yang semakin besar tersebut memiliki kualitas yang baik sehingga memiliki produktivitas yang baik.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator variabel dari 3 (tiga) aspek yaitu Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Sosial, serta Fokus Seni Budaya dan Olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi antara pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, PDRB per kapita dan kemiskinan.

2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan 17 sektor strategis dan diterbitkan setiap tahun. PDRB diyakini masih merupakan indikator penting dalam menentukan arah dan capaian keberhasilan pembangunan, baik secara nasional maupun daerah. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Ngada dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2016 PDRB ADHB Kabupaten Ngada sebesar Rp 2.788,92 miliar rupiah dan terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi sebesar Rp 3.494,28 miliar rupiah meskipun peningkatannya cenderung melambat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2. 3. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ngada Tahun 2016 -2020

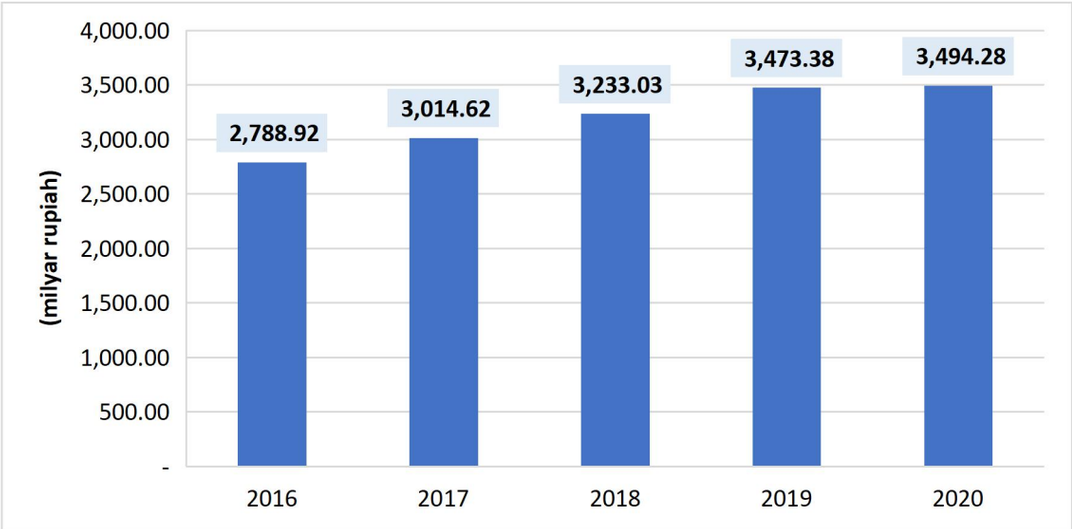

Sumber : BPS Kabupaten Ngada, 2021

Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari lapangan usaha tersebut. Selama periode 2016-2020, struktur perekonomian Kabupaten Ngada didominasi oleh lima kategori lapangan usaha yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; kontruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta jasa keuangan dan asuransi dengan rata-rata kontribusi di atas 6 persen. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Ngada.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ngada pada Tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 34,28 persen yang meningkat 0,13 persen dibandingkan tahun 2019. Selanjutnya, kontribusi lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib sebesar 20,69 persen meningkat 0,81 persen, dan disusul oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 12,15 persen yang turun sebesar 1,12 persen dibandingkan tahun 2019. Penurunan kontribusi lapangan usaha konstruksi pada tahun 2020 disebabkan oleh kebijakan realokasi dan refokusing anggaran untuk penanganan dampak

pandemi COVID-19 sehingga kegiatan produksi di lapangan usaha konstruksi mengalami penurunan.

Tabel 2. 37. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ngada (Milyar Rupiah), Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	996,52	35,73	1.052,07	34,90	1.124,26	34,77	1.186,30	34,15	1.197,85	34,28
B - Pertambangan dan Penggalian	50,98	1,83	53,52	1,78	56,47	1,75	59,19	1,70	61,17	1,75
C - Industri Pengolahan	40,11	1,44	43,81	1,45	47,15	1,46	50,92	1,47	50,05	1,43
D - Pengadaan Listrik dan Gas	1,05	0,04	1,17	0,04	1,36	0,04	1,37	0,04	1,61	0,05
E - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,91	0,10	3,05	0,10	3,18	0,10	3,30	0,09	3,41	0,10
F – Konstruksi	342,89	12,29	377,24	12,51	416,93	12,90	460,99	13,27	424,70	12,15
G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	217,74	7,81	232,08	7,70	248,83	7,70	274,94	7,92	265,32	7,59
H - Transportasi dan Pergudangan	128,29	4,60	140,07	4,65	149,49	4,62	160,46	4,62	152,11	4,35
I - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,91	0,50	15,54	0,52	17,02	0,53	18,35	0,53	14,69	0,42
J - Informasi dan Komunikasi	121,61	4,36	128,89	4,28	136,39	4,22	145,73	4,20	162,01	4,64
K - Jasa Keuangan dan Asuransi	173,06	6,21	193,90	6,43	206,74	6,39	219,26	6,31	233,47	6,68
L - Real Estate	55,47	1,99	59,96	1,99	63,53	1,97	63,80	1,84	62,93	1,80
M,N - Jasa Perusahaan	1,29	0,05	1,35	0,04	1,48	0,05	1,60	0,05	1,16	0,03
O - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	538,63	19,31	597,66	19,83	634,28	19,62	690,65	19,88	723,14	20,69
P - Jasa Pendidikan	46,98	1,68	52,50	1,74	58,52	1,81	63,73	1,83	66,68	1,91
Q - Jasa Kesehatan dan	36,62	1,31	38,94	1,29	42,28	1,31	45,40	1,31	50,00	1,43

Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Kegiatan Sosial										
R,S,T,U - Jasa lainnya	20,85	0,75	22,85	0,76	25,12	0,78	27,39	0,79	23,99	0,69
PDRB Ngada	2.788,92	100,00	3.014,62	100,00	3.233,03	100,00	3.473,38	100,00	3.494,28	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Ngada, 2021

Tabel 2.37 menunjukkan rata-rata kontribusi ketiga lapangan usaha tersebut tergolong tinggi dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya selama periode 2016-2020. Namun, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami kecenderungan penurunan kontribusi setiap tahunnya. Kondisi ini disebabkan oleh berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha pertanian dan lambatnya kenaikan nilai produksi dibandingkan dengan produk lapangan usaha lainnya.

Grafik 2. 4. Perkembangan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier terhadap PDRB ADHB Kabupaten Ngada, Tahun 2016 – 2019

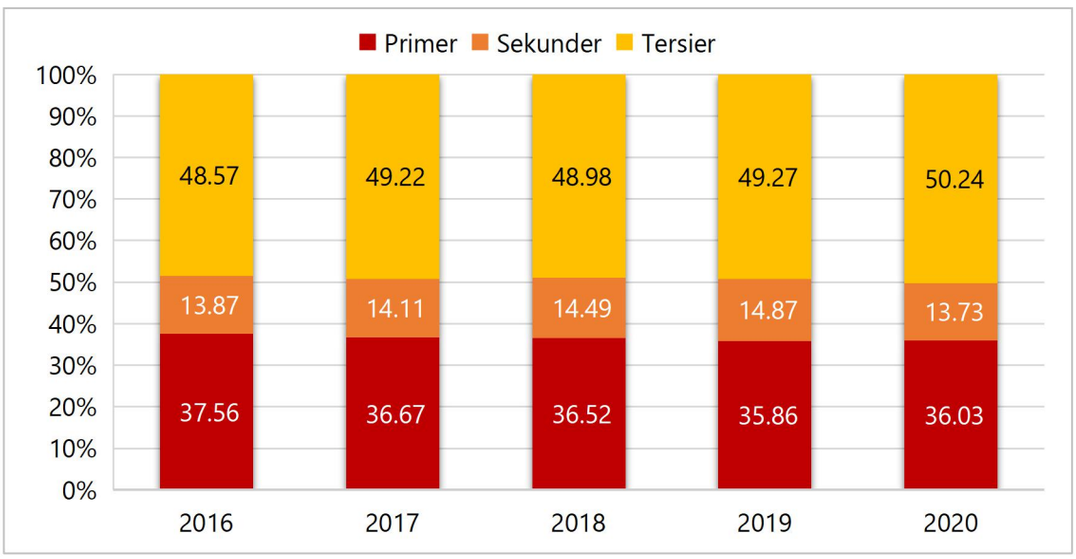

Sumber : BPS Kabupaten Ngada 2021

Sektor primer, khususnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, masih memberi dukungan yang cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Ngada meskipun pertumbuhannya cenderung melambat dan mulai digeser oleh sektor tersier. Rata-rata kontribusi lapangan usaha primer terhadap PDRB Kabupaten Ngada sebesar 36,53 persen, kontribusi usaha sekunder sebesar 14,22 persen dan sektor tersier sebesar 49,26 persen selama periode 2016-2020. Peranan sektor sekunder didorong oleh sektor konstruksi dengan rata-rata kontribusi mencapai 12,63 persen sedangkan peranan sektor tersier didorong oleh kontribusi sektor administrasi pemerintahan,

pertahanan dan jaminan sosial wajib dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan rata-rata kontribusi masing-masing sebesar 19,87 persen dan 7,74 persen. Kondisi tersebut menggambarkan perekonomian masyarakat Kabupaten Ngada saat ini masih bergantung pada lapangan usaha pertanian kehutanan, dan perikanan.

2.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang dari 17 kategori lapangan usaha pada PDRB atas dasar harga konstan. Apabila sebuah lapangan usaha memiliki peranan penting namun pertumbuhannya rendah maka dapat berdampak pada terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah lapangan usaha memiliki perananan penting dan pertumbuhannya tinggi maka lapangan usaha tersebut dapat menjadi roda penggerak dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomidapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkanoleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang dari 17 kategori lapangan usaha pada PDRB atas dasar harga konstan. Apabila sebuah lapangan usaha memiliki peranan penting namun pertumbuhannya rendah maka dapat berdampak pada terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah lapangan usaha memiliki perananan penting dan

pertumbuhannya tinggi maka lapangan usaha tersebut dapat menjadi roda penggerak dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Grafik 2. 5. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngada, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)

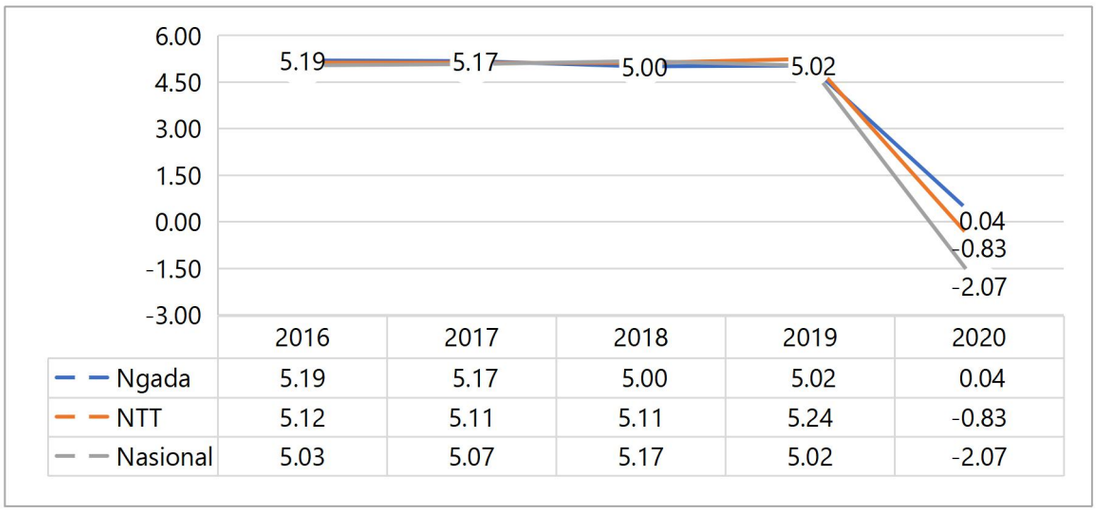

Sumber : BPS dan BPS Kabupaten Ngada, 2021

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada berada pada kisaran angka pertumbuhan Provinsi NTT maupun nasional pada tahun 2016-2019. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada bahkan lebih tinggi dan masih berada pada angka yang positif jika dibandingkan dengan Provinsi NTT dan nasional pada tahun 2020. Kondisi tersebut disebabkan oleh pertumbuhan beberapa sektor perekonomian yang tetap tumbuh positif dan cenderung meningkat seperti sektor informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Grafik 2. 6. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Ngada Tahun 2016 -2019

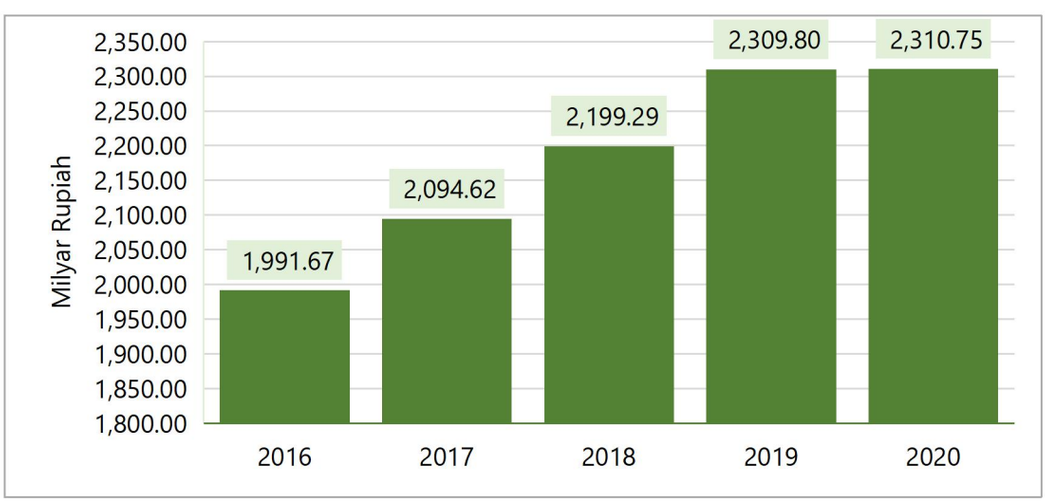

Sumber : BPS Kabupaten Ngada, 2021

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Ngada dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun ketahun, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp 1.991,67 miliar terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi sebesar Rp 2.310,75 miliar. Namun, pertumbuhan PDRB ADHK yang juga mencerminkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada cenderung melambat khususnya di sektor primer. Pengaruh pandemi COVID-19 pada tahun 2020 turut memperburuk kondisi perekonomian masyarakat terutama di sektor akomodasi makan minum, jasa perusahaan, dan beberapa sektor lainnya yang sebelumnya mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada.

Tabel 2. 38. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020 (dalam Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	699,20	3,3	720,39	3,03	746,73	3,66	769,43	3,04	769,64	0,03
B - Pertambangan dan Penggalian	31,80	4,56	33,36	4,92	34,81	4,35	36,27	4,20	37,27	2,76
C - Industri Pengolahan	27,38	4,1	28,63	4,56	29,84	4,22	31,46	5,44	30,26	(3,81)
D - Pengadaan Listrik dan Gas	0,83	13,4	0,84	0,85	0,94	12,67	0,95	0,44	1,11	17,06
E - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,41	0,73	2,48	2,92	2,54	2,57	2,61	2,73	2,68	2,71
F – Konstruksi	259,06	5,37	283,29	9,35	308,73	8,98	328,77	6,49	303,27	(7,76)
G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	169,54	6,27	174,71	3,05	183,98	5,30	197,18	7,17	185,48	(5,93)
H - Transportasi dan Pergudangan	90,25	4,61	95,70	6,03	100,14	4,64	105,23	5,09	99,90	(5,07)
I - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,04	6,39	9,73	7,67	10,56	8,52	11,31	7,15	9,01	(20,33)
J - Informasi dan Komunikasi	111,24	6,54	116,68	4,89	123,15	5,54	130,19	5,72	145,19	11,52
K - Jasa Keuangan dan Asuransi	116,23	10,07	125,16	7,68	130,07	3,92	134,39	3,32	143,59	6,85
L - Real Estate	38,94	5,07	41,13	5,63	42,95	4,40	43,05	0,25	42,75	(0,70)
M,N - Jasa Perusahaan	1,00	3,98	1,05	4,50	1,12	6,45	1,19	6,48	0,84	(29,46)

Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
O - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	363,95	6,74	386,99	6,33	405,03	4,66	434,24	7,21	456,24	5,07
P - Jasa Pendidikan	29,81	5,54	31,68	6,26	33,52	5,82	35,69	6,46	36,59	2,52
Q - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	26,55	3,22	27,42	3,26	28,67	4,56	30,16	5,20	31,66	4,97
R,S,T,U - Jasa lainnya	14,43	5,95	15,40	6,69	16,53	7,36	17,68	6,95	15,28	(13,57)
PDRB Ngada	1.991,67	5,19	2.094,62	5,17	2.199,29	5,00	2.309,80	5,02	2.310,75	0,04

Sumber : BPS Kabupaten Ngada, 2021

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Ngada pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp 956,3 juta. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngada mengalami perlambatan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 4,98 persen. Pandemi COVID – 19 berdampak sangat besar bagi perekonomian Kabupaten Ngada karena 8 sektor yang sebelumnya turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan sektor yang cukup tinggi mengalami kontraksi.

Sektor-sektor yang mengalami kontraksi cukup dalam di antaranya adalah sektor jasa perusahaan yang turun sebesar 35,94 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 27,48 persen, jasa lainnya sebesar 20,53 persen, konstruksi sebesar 14,25 persen, perdagangan besar dan eceran sebesar 13,11 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 10,16 persen, dan industri pengolahan sebesar 9,25 persen. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada pada tahun 2016-2019 sekaligus menjadi sektor-sektor yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada turun mencapai 0,04 persen pada tahun 2020.

2.2.1.3. Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Dengan demikian tingginya inflasi memberikan

dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Inflasi dapat disebabkan dari sisi permintaan (*demand side*) yaitu terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi penawaran (*supply side*) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi.

Indeks Harga Konsumen atau yang disingkat IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dapat dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan yang dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS), IHK menjadi suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat dari inflasi. IHK adalah hal yang paling sering dikaitkan apabila terjadi suatu inflasi, dimana semakin tinggi nilai IHK maka akan semakin cepat juga laju inflasinya. Perhitungan laju inflasi Kabupaten Ngada diwakili oleh Kota Maumere sebagai pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa.

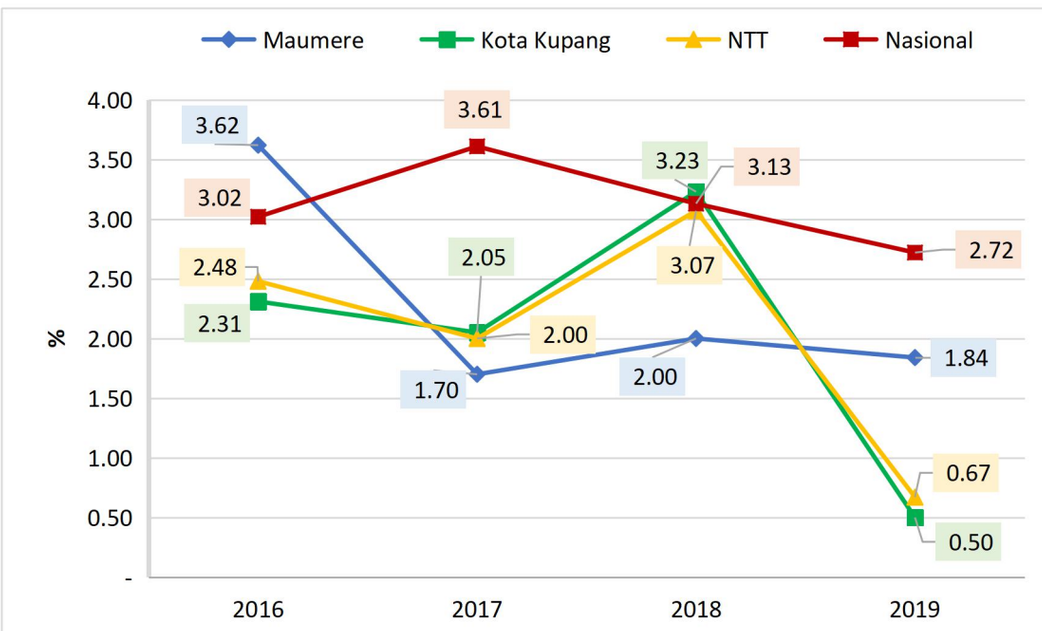

Grafik 2. 7. Inflasi Maumere, Kota Kupang, NTT dan Nasional Tahun 2016 - 2019

Sumber : BPS, BPS Prov. NTT

Tingkat inflasi Maumere menunjukkan tren yang fluktuatif tetapi cenderung menurun selama periode 2016-2019. Inflasi Maumere yang menjadi referensi Kota Bajawa pada tahun 2019 berada diatas inflasi Kota

Kupang dan NTT, serta di bawah inflasi Nasional. Kondisi yang berbeda ditunjukkan pada tahun 2017-2018 dimana inflasi Maumere berada lebih rendah jika dibandingkan dengan Kota Kupang, NTT dan Nasional.

Tabel 2. 39. Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Maumere Tahun 2016 – 2019 Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2016	IHK Desember 2017	IHK Desember 2018	IHK Desember 2019	Inflasi 2016 (%)	Inflasi 2017 (%)	Inflasi 2018 (%)	Inflasi 2019 (%)
Bahan Makanan	113,72	111,6	112,96	115,74	3,7	-1,86	1,22	2,46
Makanan Jadi,dll	146	149,96	154,75	158,83	7,14	2,71	3,19	2,64
Perumahan,dll	120,1	124,47	127,37	127,50	5,55	3,64	2,33	0,10
Sandang	113,04	119,32	121,83	125,23	3,7	5,56	2,1	2,79
Kesehatan	114,96	120,37	124,95	128,16	3,34	4,71	3,8	2,57
Pendidikan,dll	142,65	144,24	146,74	149,12	1,57	1,11	1,73	1,62
Traspor,dll	113,8	118	119,18	121,72	-3,44	3,69	1	2,13
Maumere	**121,86**	**123,93**	**126,41**	**128,73**	**3,62**	**1,7**	**2**	**1,84**
Kota Kupang	**129,07**	**129,96**	**135,96**	**136,64**	**2,31**	**2,05**	**3,23**	**0,50**
NTT	**128,12**	**130,68**	**134,7**	**135,59**	**2,48**	**2**	**3,07**	**0,67**
Nasional	**126,71**	**131,28**	**135,39**	**139,07**	**3,02**	**3,61**	**3,13**	**2,72**

Sumber : BPS, BPS Prov. NTT

Tahun 2019 Kota Maumere mengalami inflasi sebesar 1,8 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 2,0 persen. Hal ini dipicu oleh naiknya harga semua kelompok komoditas pengeluaran. Menurut kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi di tahun 2019 terjadi pada kelompok pengeluaran sandang sebesar 2,79 persen, diikuti kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yang naik sebesar 2,64 persen dan kelompok kesehatan sebesar 2,57 persen.

2.2.1.4. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mencerminkan nilai PDRB per penduduk secara nominal. PDRB per kapita atas dasar harga konstan dapat mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan per kapita penduduk di wilayah bersangkutan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan per kapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula

tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (*transfer out*) sama dengan yang masuk (*transfer in*), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita. Namun, PDRB per kapita tidak dapat menunjukkan kapasitas ekonomi suatu daerah karena hasilnya sangat bergantung pada jumlah penduduk sebagai pembagi dalam perhitungan tersebut. PDRB per kapita juga tidak mampu menggambarkan kesenjangan yang terjadi di antara penduduk karena PDRB yang dihasilkan oleh tiap penduduk diasumsikan sama.

Tabel 2. 40. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB *(Juta Rp)*					
ADHB	2.788.919,74	3.014.618,68	3.233.025,30	3.473.377,16	3.494.275,32
ADHK 2010	1.991.670,73	2.094.624,40	2.199.287,59	2.309.797,58	2.310.753,88
PDRB perkapita *(Ribu Rp)*					
ADHB	17.866,12	18.864,83	20.056,49	21.280,73	21.144,88
ADHK 2010	12.758,86	13.107,71	13.643,56	14.151,70	13.983,04
Jumlah penduduk (jiwa)	156.101	159.801	161.196	163.217	165.254
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)	0,91	1,91	1,33	1,25	1,25

Sumber: BPS Kabupaten Ngada, BPS Provinsi NTT, 2021

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Ngada atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. PDRB per kapita tercatat meningkat hingga Rp 3,27 juta selama periode 2016-2020. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Oleh karena itu, untuk mengukur pertumbuhan PDRB secara riil menggunakan PDRB per kapita atas dasar harga konstan.

Rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Ngada sebesar 2,34 persen pada tahun 2016-2020. Nilai PDRB per kapita rill Kabupaten Ngada

pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 168,65 ribu dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 yang lebih besar daripada pertumbuhan PDRB menyebabkan penurunan nilai PDRB per kapita, baik secara nominal maupun riil. Kondisi tersebut disebabkan oleh Pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB di sektor-sektor unggulan dan potensial di Kabupaten Ngada. Penurunan PDRB per kapita tersebut menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Ngada secara umum mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020.

2.2.1.5. Kemiskinan

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya kemiskinan di Kabupaten Ngada adalah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Garis kemiskinan Kabupaten Ngada selama periode 2017 - 2020 mengalami peningkatan diikuti dengan pertambahan jumlah penduduk miskin.

Garis kemiskinan tahun 2017 sebesar Rp 315.778,00 per kapita per bulan dan penduduk miskin bertambah sebesar 450 jiwa dari tahun 2016. Garis kemiskinan tahun 2018 sebesar Rp 331.266,00 per kapita per bulan dan jumlah penduduk miskin bertambah 580 jiwa. Garis kemiskinan tahun 2019 sebesar Rp 336.600,00 per kapita per bulan dan jumlah penduduk miskin berkurang 480 jiwa. Garis kemiskinan tahun 2020 sebesar Rp 363.531,00 per kapita per bulan dan jumlah penduduk miskin bertambah 310 jiwa. Apabila pengeluaran penduduk per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan, maka penduduk tersebut merupakan penduduk miskin.

Tabel 2. 41. Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (.000)	Persentase Penduduk Miskin
2016	291.602	19,76	12,69

2017	315.778	20,21	12,77
2018	331.266	20,79	12,94
2019	336.600	20,31	12,48
2020	363.531	20,62	12,51

Sumber : BPS Kabupaten Ngada, 2021

Terdapat dua metode untuk menghitung garis kemiskinan yakni Garis kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan bukan makanan. Garis Kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah kebutuhan untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Data kemiskinan Ngada menunjukkan bahwa garis kemiskinan cenderung meningkat, salah satu faktornya karena adanya inflasi, sehingga mempengaruhi nilai uang untuk memenuhi kebutuhan makanan setara 2.100 kilo kalori.

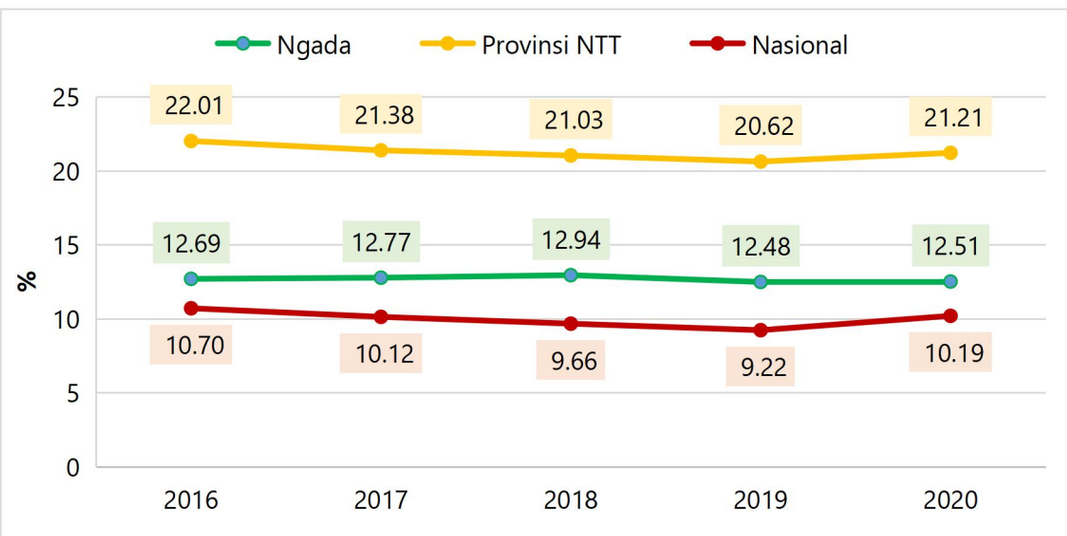

Grafik 2. 8. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ngada 2016-2020

Sumber : BPS, BPS Kabupaten Ngada, 2021

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Ngada menunjukkan tren yang cukup fluktuatif dan cenderung menurun. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Ngada berada di bawah persentase penduduk miskin di Provinsi NTT tetapi masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka nasional. Rata-rata penurunan persentase penduduk miskin Kabupaten Ngada mencapai 0,34 persen pada periode 2016-2020. Persentase penduduk miskin tahun 2019 menjadi yang terendah dibandingkan dengan tahun lainnya

selama periode 2016-2020 yang berhasil turun sebesar 3,55 persen dibanding tahun 2018. Namun, pandemi COVID-19 menyebabkan persentase penduduk miskin kembali meningkat sebesar 0,24 persen. Perlambatan laju produksi di berbagai sektor menyebabkan tingkat pengangguran meningkat sehingga mendorong kenaikan jumlah penduduk miskin.

Penurunan angka kemiskinan ini juga dilihat dari pola pengeluaran perkapita perbulan untuk makanan dan non makanan. Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan, menggambarkan semakin rendah tingkat kesejahteraan atau semakin miskin rumah tangga tersebut. Sebaliknya bila pengeluaran untuk non makanan seperti pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, semakin tinggi, maka rumah tangga tersebut semakin sejahtera.

Grafik 2. 9. Persentase Pola Pengeluaran Perkapita Perbulan Kab. Ngada

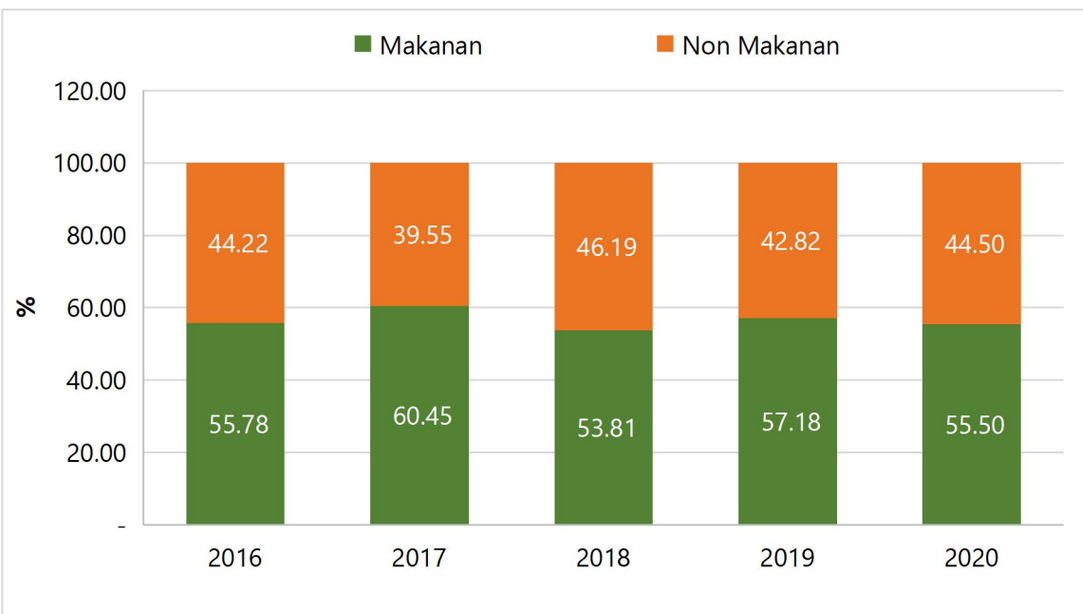

untuk Makanan dan Non Makanan 2016-2020

Sumber : BPS Kabupaten Ngada, 2021

Pola pengeluaran per kapita per bulan masyarakat Kabupaten Ngada masih didominasi oleh pengeluaran untuk makanan dengan rata-rata mencapai 56,54 persen pada tahun 2016-2020. Pergeseran pola pengeluaran per kapita per bulan cenderung fluktuatif. Dominasi pengeluaran untuk makanan menunjukkan bahwa standar kehidupan masyarakat Kabupaten Ngada belum sejahtera. Batasan untuk mencapai tingkat kesejahtetraan

masyarakat ini adalah jika pengeluaran per kapita untuk konsumsi makanan berada di bawah 50 persen.

Selain garis kemiskinan, terdapat indikator yang perlu juga dilihat yakni Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap batas miskin (garis kemiskinan). Semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan yang mencerminkan semakin seriusnya persoalan kemiskinan di wilayah tersebut. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Grafik 2. 10. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

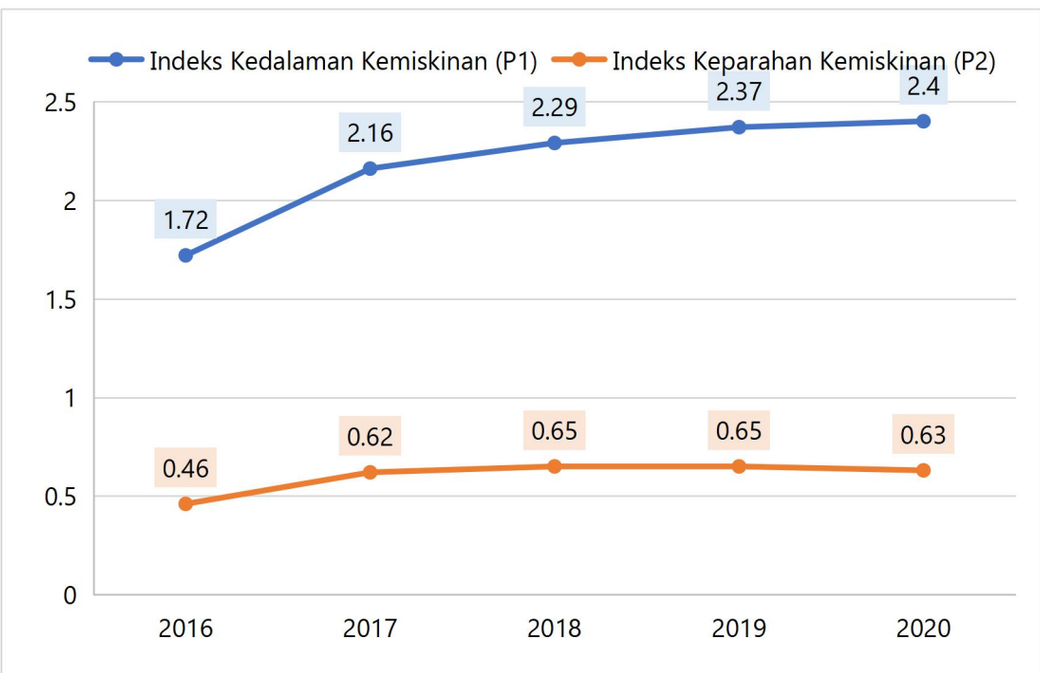

Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Kabupaten Ngada, 2021

Indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan Kabupaten Ngada mengalami tren yang cenderung meningkat selama periode 2016-2020. Indeks kedalaman kemiskinan Ngada meningkat secara signifikan dari 1,72 ditahun 2016 menjadi 2,4 di tahun 2020. Indeks Keparahan Kemiskinan

Kabupaten Ngada yang mulanya pada tahun 2016 sebesar 0,46 naik menjadi 0,63 pada tahun 2020.

Tabel 2. 42. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan

Indeks Keparahan Kemiskinan Ngada dan NTT tahun 2016-2020

Uraian	Indeks Kedalaman Kemiskinan					Indeks Keparahan Kemiskinan				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Ngada	1,72	2,16	2,29	2,37	2,4	0,46	0,62	0,65	0,65	0,63
NTT	4,62	3,83	4,16	4,13	4,02	1,44	0,96	1,17	1,12	1,05

Sumber: NTT dalam Angka 2020

Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Ngada secara umum menunjukkan angka yang lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi NTT. Rata-rata kedalaman kemiskinan Kabupaten Ngada sebesar 2,19 lebih rendah 1,96 poin dibanding rata-rata Provinsi NTT. Rata-rata keparahan kemiskinan Kabupaten Ngada sebesar 0,60 lebih rendah 0,55 poin dibanding rata-rata Provinsi NTT. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat kesejahteraan Penduduk Ngada lebih baik dari penduduk NTT secara umum. Keadaan ini menunjukkan ketimpangan antar penduduk miskin di Kabupaten Ngada lebih kecil jika dibandingkan dengan Provinsi NTT pada periode 2016-2020.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy* life); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

Grafik 2. 11. Perkembangan IPM Kabupaten Ngada, Kota Kupang, Prov. NTT dan Nasional Tahun 2016-2020

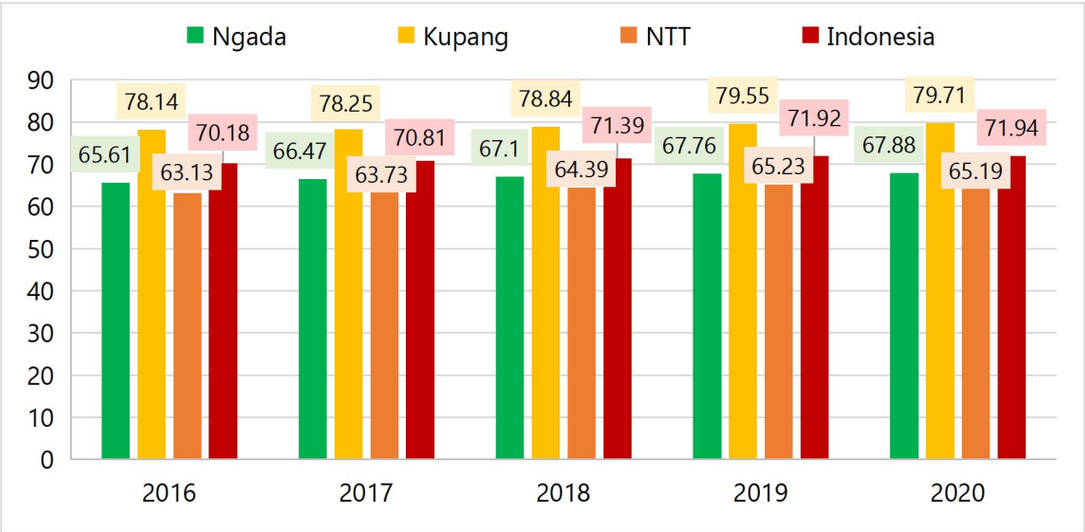

Sumber : BPS, BPS Prov. NTT 2020

Perkembangan IPM Kabupaten Ngada dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 capaian IPM Kabupaten Ngada sebesar 65,61 meningkat menjadi 67,88 pada tahun 2020. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi NTT dan Nasional yang juga sama sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. IPM Kabupaten Ngada sejak tahun 2017 menduduki peringkat 2 (dua) untuk Provinsi NTT setelah Kota Kupang serta lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi NTT, Seperti terlihat pada Grafik 2.11

Dengan nilai 67,85 berdasarkan konsepsi tersebut maka status pembangunan manusia di Kabupaten Ngada termasuk kategori sedang artinya kinerja pencapaian pembangunan relatif cukup baik. Meningkatnya pencapaian IPM bisa diartikan secara sederhana yaitu meningkatnya satu atau lebih komponen IPM itu sendiri, yakni Angka Harapan Hidup, angka Harapan Lama Sekolah dan angka Rata-rata Lama Sekolah, serta pengeluaran per kapita.

Tabel 2. 43. Komponen Pembentuk IPM Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
AHH (Thn)	67,34	67,36	67,59	67,96	68,04
AHLS (Thn)	12,66	12,67	12,68	12,69	12,70
RLS (Thn)	7,61	7,85	8,07	8,37	8,52
Daya Beli (000)	8.195	8.649	8.857	8.961	8.865

Sumber : BPS Provinsi NTT

Perkembangan komponen pembentuk IPM Kabupaten Ngada diuraikan sebagai berikut:

1. **Angka Harapan Hidup (AHH)**

Angka Harapan Hidup atau disingkat AHH, merupakan angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang dihitung sejak dilahirkan. Perkembangan AHH Kabupaten Ngada dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 67,34 tahun meningkat menjadi 68,04 tahun pada tahun 2020. perkembangan tersebut relevan dengan Provinsi NTT dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Grafik 2. 12. Perkembangan Angka Harapan Hidup Ngada, NTT dan Indonesia Tahun 2016-2020

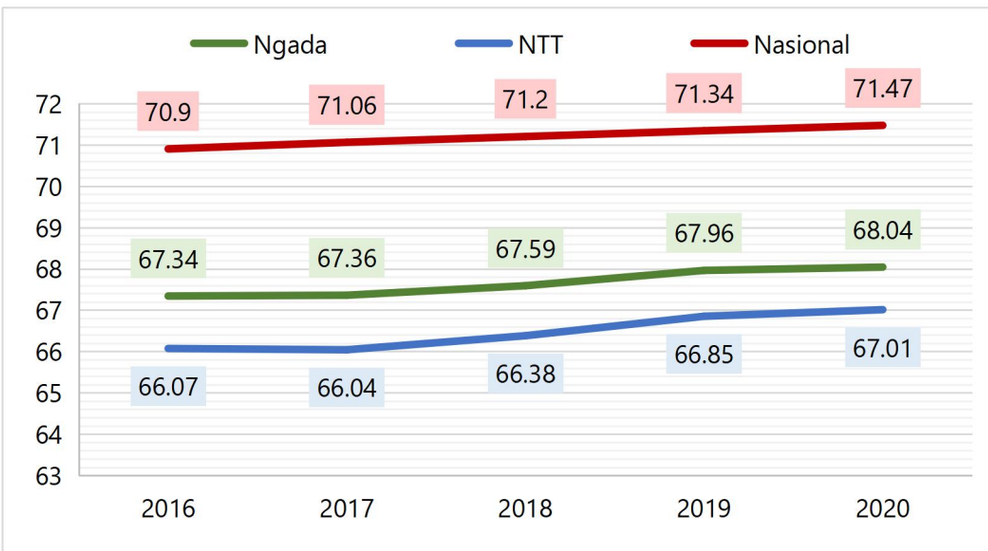

Sumber : BPS, BPS Provinsi NTT 2020

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Ngada pada tahun 2016 adalah sebesar 67,34. Angka ini menunjukkan bahwa anak yang lahir pada tahun 2016 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 67,34 tahun, mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 68,04 tahun. Hal ini berarti bahwa, anak yang lahir pada tahun 2020 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 68,04 tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan NTT yang mencapai 67,01 tahun pada tahun 2020 dan lebih rendah dari AHH Nasional yang sudah mencapai 71,47 tahun pada tahun 2020

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Perkembangan Angka HLS Kabupaten Ngada sampai tahun 2020 tergambar dalam grafik berikut.

Grafik 2. 13. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kabupaten Ngada,

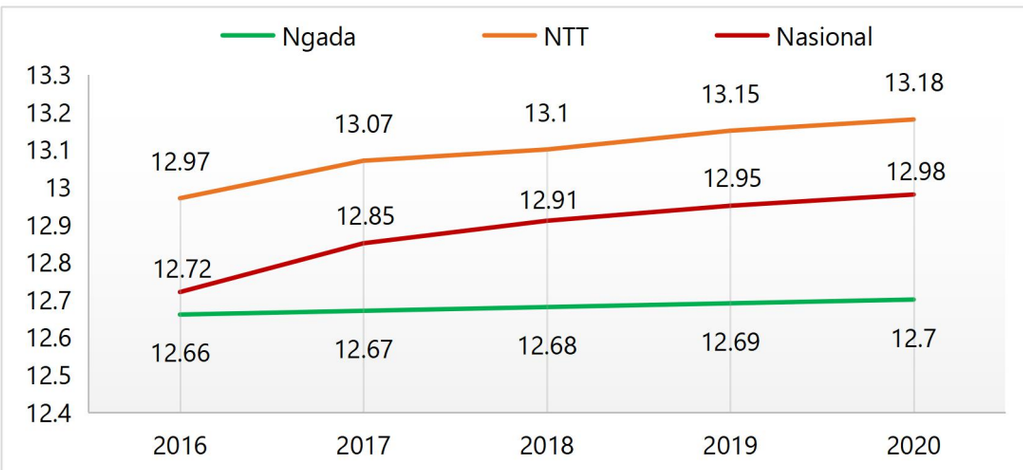

NTT dan Indonesia Tahun 2016-2020

Sumber : BPS, BPS Provinsi NTT 2020

Angka Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas Kabupaten Ngada selama periode 2016 sampai 2020 menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Selama 5 tahun HLS secara absolut meningkat 0,04 poin, yaitu dari 12,66 tahun pada tahun 2016 menjadi 12,70 tahun pada tahun 2020. HLS sebesar 12,70 tahun mengandung pengertian bahwa setiap anak usia 7 tahun di Kabupaten Ngada mempunyai harapan lamanya mengenyam pendidikan sekitar 12,70 tahun atau hingga tamat SLTA.

3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan

turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP. Perkembangan Rata –rata Lama Sekolah di Kabupaten Ngada periode 2016 sampai 20120 (dalam tahun) tergambar dalam grafik berikut :

Grafik 2. 14. Perkembangan Rata – rata Lama Sekolah Kabupaten Ngada, NTT dan Nasional 2016-2020

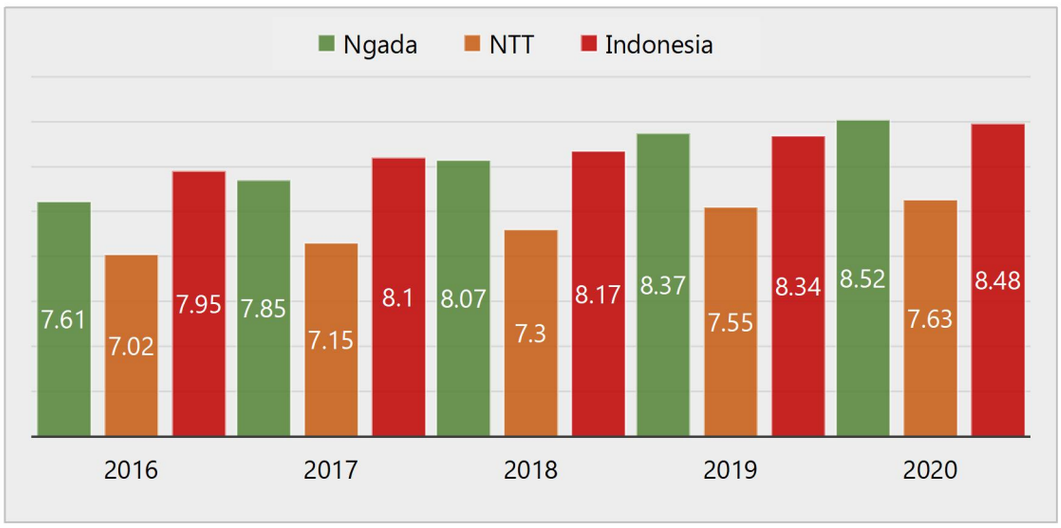

Sumber : BPS, BPS Provinsi NTT 2020

Pada Periode 2016 sampai 2020 pencapaian rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Ngada mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,91 poin yaitu dari 7,61 tahun pada tahun 2016 menjadi 8,52 tahun pada tahun 2020. Angka rata-rata lama sekolah ini masih belum mencapai program wajar pendidikan 9 tahun yakni diharapkan penduduk Indonesia minimal dapat menamatkan pendidikan sampai tingkat SLTP sehingga dengan melihat angka 8,52 tahun berarti masyarakat di Kabupaten Ngada rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan kelas 2 SMP. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Ngada untuk lebih meningkatkan jenjang pendidikan masyarakat paling kurang sampai pada jenjang kelas 3 SMP.

4. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari

Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas yakni 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Kecenderungan perkembangan tingkat daya beli di Kabupaten Ngada periode 2016 sampai 2020 tergambar dalam grafik berikut :

Grafik 2. 15. Perkembangan Daya Beli Kabupaten Ngada, NTT

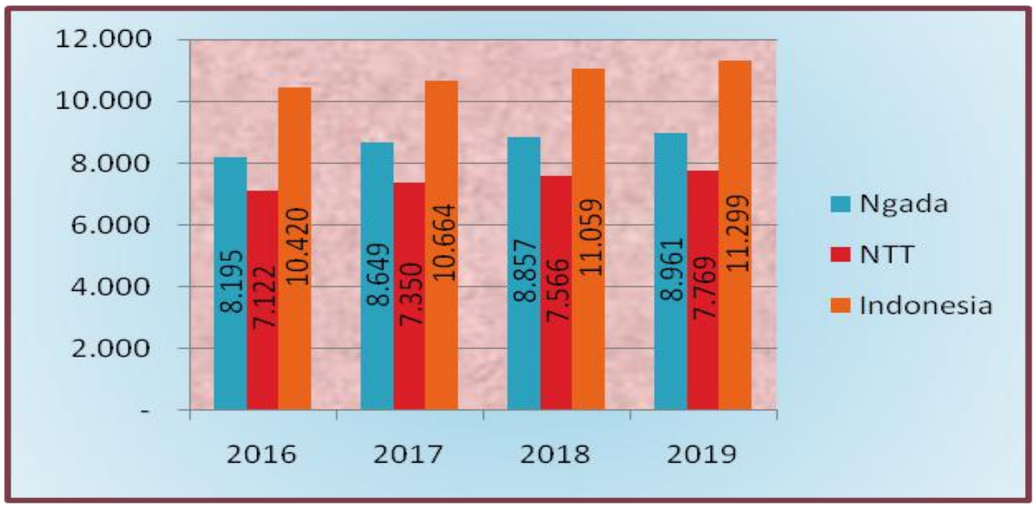

dan Nasional Tahun 2016-2019

Sumber : BPS, BPS Provinsi NTT 2020

Dari sisi komponen daya beli, rata-rata pengeluaran konsumsi riil per kapita penduduk Kabupaten Ngada juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat yang didekati dengan kebutuhan standar minimal untuk dapat hidup layak (Purchasing *Power Parity* /PPP dalam rupiah). Kebutuhan standar minimal untuk dapat hidup layak di Kabupaten Ngada pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 8,195 juta per kapita meningkat menjadi Rp 8,961 juta per kapita pada tahun 2019, atau naik sebesar 766 poin selama kurun waktu 4 (empat) tahun.

2.2.2.2. Ketenagakerjaan

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berikut adalah data Tingkat

Pengangguran Terbuka Kabupaten Ngada dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional.

Grafik 2. 16. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Ngada,

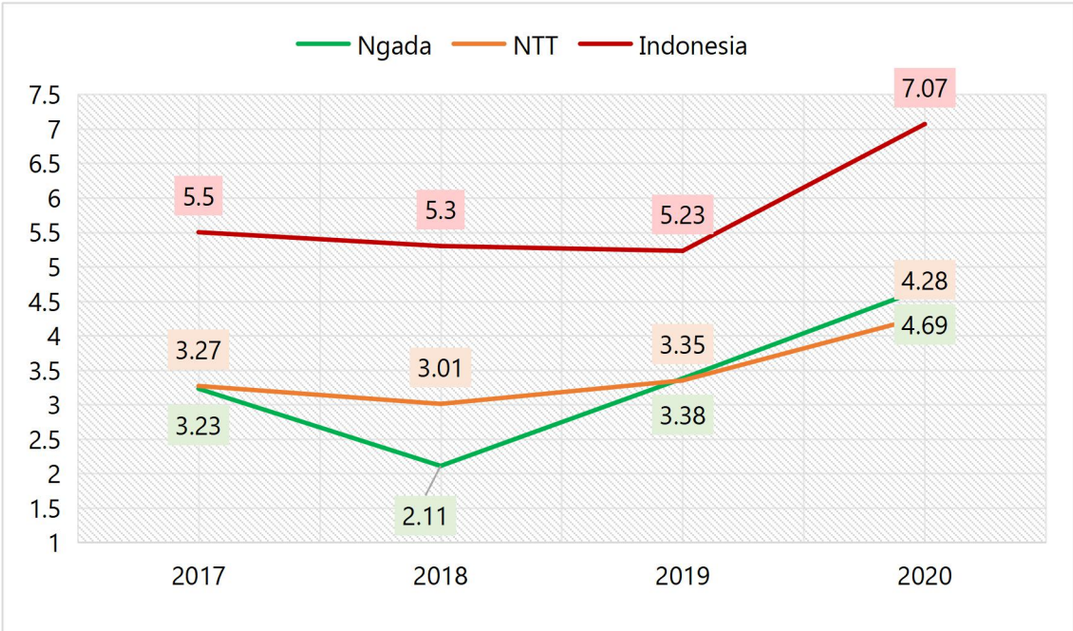

Provinsi NTT, dan Nasional tahun2017-2020

Sumber : BPS, 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Ngada sempat mengalami penurunan di tahun 2018 kemudian hingga tahun 2020 cenderung meningkat. Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2020 sebesar 4,69% atau meningkat 2,58% sejak tahun 2018.

Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Ngada berada di atas rata-rata Provinsi NTT terpaut 0,41% tetapi masih jauh di bawah rata-rata nasional. Salah satu faktor yang mempengaruhi menurunnya angka pengangguran adalah meningkatnya jumlah orang yang bekerja sebagai akibat peningkatan lapangan kerja atau pembukaan lapangan kerja baru, sedangkan meningkatnya angka pengangguran dapat disebabkan oleh jumlah lapangan kerja dan tenaga kerja yang kurang seimbang.

Dari total angkatan kerja yang bekerja, mayoritas penduduk Kabupaten Ngada masih bekerja di sektor primer, kemudian tersier dan sekunder.

Walaupun menyerap tenaga kerja terbanyak, namun pertumbuhan ekonomi di sektor Pertanian tidak terlalu berdampak pada penambahan tenaga kerja.

Grafik 2. 17. Penduduk 15 tahun keatas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2020

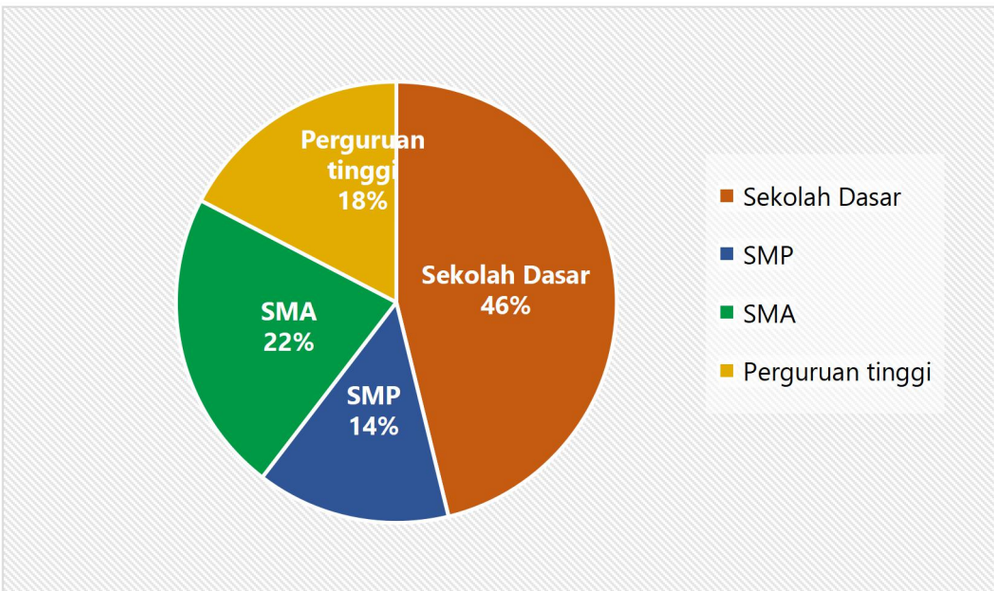

Sumber : Ngada Dalam Angka 2021

Proporsi pendidikan tertinggi yang ditamatkan untuk tenaga kerja yang bekerja tahun 2020, terlihat pada grafik 2.18 masih didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan setingkat SD (46%). Kondisi ini menjadi salah satu faktor rendahnya produktifitas sektor primer terhadap PDRB Kabupaten Ngada, serta belum berkembangnya sektor sekunder yang berbasis pertanian.

Grafik 2. 18. Penduduk 15 tahun keatas yang menganggur menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2020

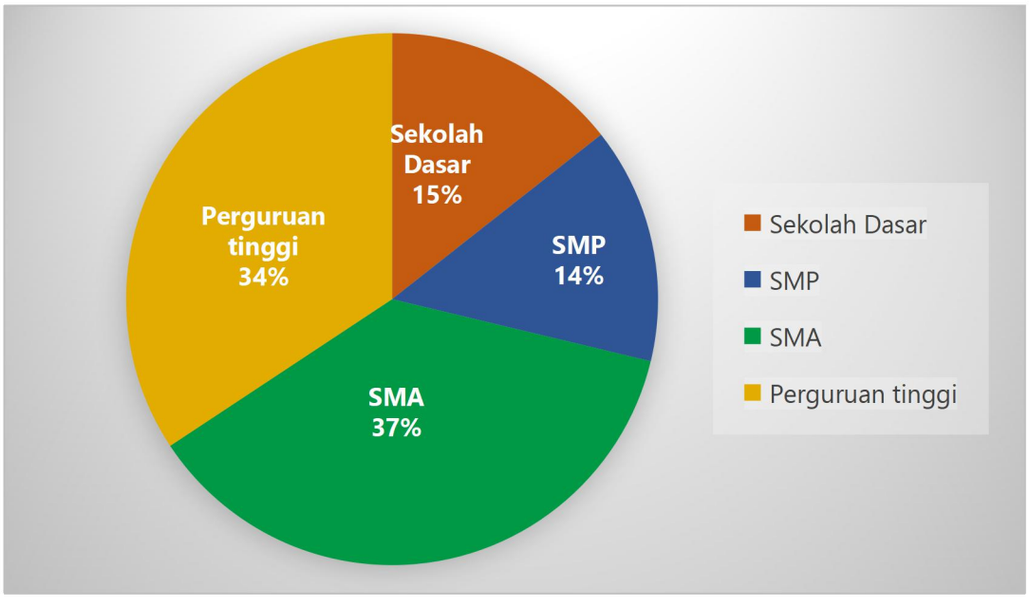

Sumber : Ngada Dalam Angka 2021

Dari total penduduk 15 tahun ke atas yang menganggur menurut pendidikan tertinggi di Kabupaten Ngada justru lebih didominasi oleh lulusan SMA (37%) dan Perguruan Tinggi (34%) dibandingkan lulusan SMP (14%) dan Sekolah Dasar (15%). Hal tersebut menunjukan bahwa banyaknya tenaga kerja potensial yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang masih belum terserap pasar kerja. Sedangkan proporsi lulusan SD yang menganggur lebih sedikit karena banyak penduduk yang merupakan lulusan SD bekerja sebagai petani yang membuat mereka tidak menganggur.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Kegunaan TPAK adalah untuk mengidentifikasi besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah. TPAK merupakan indikator untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga kerja aktif dalam kegiatan ekonomi.

Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2. 19. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Ngada dan Provinsi NTT Tahun 2017-2020

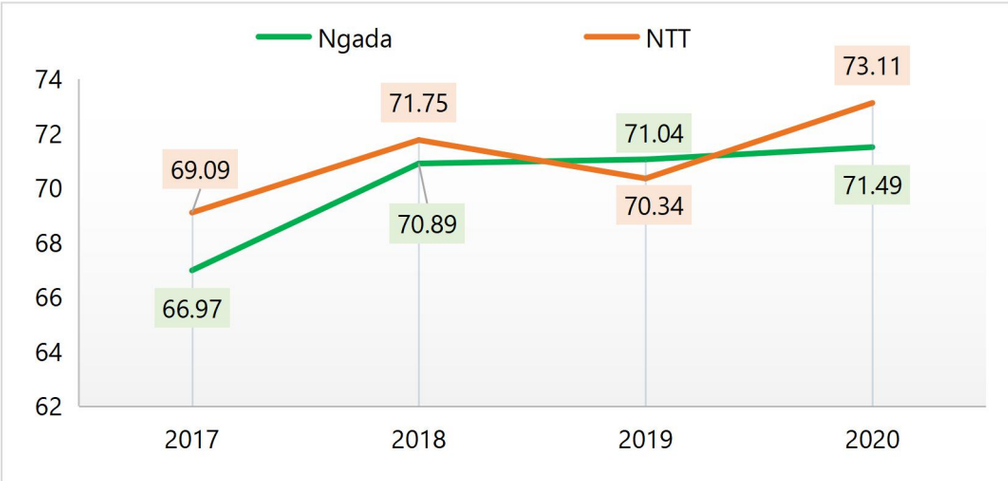

Sumber : Provinsi NTT Dalam Angka, 2021

TPAK Kabupaten Ngada dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami kenaikan dengan total kenaikan sebesar 4,52. Kondisi tersebut berbeda dengan Provinsi NTT yang mengalami perkembangan fluktuatif. Meskipun demikian, tahun 2020 menunjukan TPAK Provinsi NTT lebih tinggi dibandingkan TPAK Kabupaten Ngada dengan selisih sebesar 1,62.

3. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dengan angkatan kerja. Data selengkapnya terdapat pada tabel berikut

Tabel 2. 44. Jumlah Penduduk >15 tahun menurut Kegiatan Utama

Kegiatan seminggu lalu	2017	2018	2019	2020
Angkatan kerja	70.081	75.407	76.849	83.865
Bekerja	67.819	73.815	74.252	79.931
Menganggur	2.262	1.592	2.597	3.934
Bukan Angkatan Kerja	34.565	30.959	31.321	33.451
Sekolah	13.220	12.315	9.929	8.385
Mengurus RT	14923	11.895	15.157	18.566
Lainnya	6.422	6.749	6.235	6.500
Total	209.292	212.732	216.340	234.632

Sumber : Ngada Dalam Angka 2018-2021

Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Ngada pada tahun 2020 sebesar 95,30%. Dengan kata lain pada tahun 2020 terdapat 95,30% dari

angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja, sedangkan sisanya sebesar 4,7% masih mencari pekerjaan atau pengangguran.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan seni di Kabupaten Ngada saat ini telah mengalami kemajuan yang lebih baik dan sudah bisa bersaing dengan daerah lain di NTT dan di Indonesia. Perkembangan seni yang ada di Ngada tidak terlepas dari pengaruh budaya masyarakat. Seni tradisional berupa tarian, kerajinan dan musik mendominasi perkembangan seni di Ngada. Saat ini terdapat beberapa kelompok seni tradisional maupun modern yang berkembang di Ngada seperti kelompok musik suling, kelompok kerajinan bambu, tempurung, kelompok tenun ikat dan aksesoris / pernak pernik dari kain tenun, kerajinan anyaman dari daun lontar dan pandan. Dalam hal pemasaran masih sangat membutuhkan perhatian dan kerjasama lintas sektor khususnya promosi dan tempat jualan. Peningkatan kapasitas anggota kelompok dan pendampingan kelompok masih harus ditingkatkan.

Etnis Bajawa atau Bhajawa adalah satu dari dua etnis yang mendiami Kabupaten Ngada di Pulau Flores bagian Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Etnis lainnya adalah etnis Riung. Kedua etnis ini memiliki latar belakang soaial budaya yang berbeda. Adat istiadat, kebiasaan dan bahasa sangat berlainan. Dalam kalangan masyarakat etnis Bajawa hingga kini masih dijalankan sejumlah upacara tradisional yang berkaitan dengan siklus kehidupan manusia sejak lahir sampai meninggal. Masyarakat Ngada merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang telah diturunkan dan diwariskan secara turun temurun.

2.2.3.1. Upacara Kematian

Masyarakat Bajawa memandang kematian sebagai “dewa da enga atau Nitu da niu” Dewa adalah kekuatan diatas yang baik (Dewa Zeta) yang

memberi kehidupan dan Kematian. Nitu adalah kekuatan dibawah yang jahat (nitu zale) yang bisa mencabut nyawa manusia secara paksa, karena itu dikalangan masyarakat Bajawa ada dua jenis kematian : a) Mata Ade : Mati yang wajar karena penyakit medis. Upacara penguburan melaui tahap : Roko (memandikan dan memberi pakaian), Basa Peti (membuat peti mati), Koe Gemo (menggali kubur), Gai Boko (melepaspergikan jenasah), Pa'i (menghibur keluarga selama tiga malam) dan Ngeku (Kenduri) ditandai dengan penyembelihan hewan babi,kuda atau kerbau. b). Mata Golo : mati yang tidak wajar akibat kecelakaan, bunuh diri atau dibunuh. Upacara penguburan melalui proses: Pa'i Api (menjaga mayat), Tau Tibo (Upacara mencari penyebab kematian), Keo Rado (Upacara pembersihan), Tane (menguburkan mayat), dan Se Lau Kora (membuang seluruh peralatan yang dipakai ke arah matahari terbenam).

2.2.3.2. Upacara Dewasa

Bagi masyarakat Bajawa, kedewasaan ditandai dengan perkawinan, untuk sampai pada jenjang perkawinan, ada beberapa tahap yang dilewati.

a) Beti tei tewe dan moni neni, tahap perkenalan antara pria dan wanita biasanya pada saat pesta adat Reba (pesta syukur)
b) Beku mebhu tana tigi, pihak laki-laki mengadaptasi diri dengan keluarga gadis.
c) Beret ere oka pale : pihak laki-laki datang meminang anak gadis.
d) Idi nio manu : keluarga laki-laki beriringan menuju rumah calon besan membawa sejumlah barang.
e) Zeza atau Sui tutu maki Rene : Zeza adalah tahap puncak dalam mengesahkan pasangan wanita dan laki-laki untuk hidup berdampingan sebagai suami dan istri, dalam bahasa adat disebut Lani seli'e , Te'e setoko (tidur beralaskan satu bantal dan satu tikar).

2.2.3.3. Upacara membangun dan masuk rumah adat

Bagi masyarakat Bajawa, rumah adat adalah lambang kekuatan antara laki-laki dan perempuan, Laki-laki dilambangkan dengan "Lasu Wisu" dan

Perempuan dilambangkan dengan " Lia Loki". Pertemuan antara lasu wisu dan lia loki membuat rumah adat menjadi kuat.

Ada tiga jenis rumah adat (Sa'o Meze) yakni saka pu'u (rumah pokok), Sa'o Saka Lobo (rumah pendamping rumah pokok), dan sejumlah sa'o pibe atau dai (rumah adat lainnya anggota suku).Ada banyak tahapan atau proses membangun dan pemeliharaan rumah adat yang harus selalu dijalankan oleh masing-masing suku yang berkontribusi besar terhadap kehidupan perekonomian masyarakat.

2.2.3.4. Reba

Reba merupakan perayaan tahun baru adat yang dirayakan oleh masing-masing Kampung disekitar Ibukota Kabupaten Ngada Bajawa. Festival ini merupakan festival yang dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk ucapan syukur terhadap hasil pertanian yang bisa dipanen setiap tahun.

Selain itu di Kabupaten Ngada terdapat 14 situs budaya bersejarah yakni : 1) Kampung Lama Langagedha, 2) Kampung Wogo Lama, 3) Kampung Gizi Lama, 4) Kampung Belu Lama, 5) Kampung Tradisional Maghilewa, 6) Situs Masjid Tua Riung, 7) Situs Gereja Tua Riung, 8) Situs Gereja Tua Tadjo, 9) Situs Kampung Tradisional Gurusina, dan kampung ini terbakar pada tanggal 13 Agustus 2018 dan sekarang telah kembali direstorasi dan prosesnya sangat cepat. 10) Situs Kampung Tradisional Bena, 11) Kampung Trasional Wogo Baru, 12) Kampung Tradisional Tololela, 13) Situs Sejarah Matamenge, 14) Kampung Tradisional Belaraghi.

Berkaitan dengan pelestarian budaya Ngada, terdapat potensi seni dan budaya yang sangat mendukung pembangunan yakni:

1. Tarian Ja'i yang merupakan tarian asli masyarakat Ngada dari etnis Bajawa menjadi tarian yang mulai digemari seluruh lapisan masyarakat Ngada dan Provinsi NTT
2. Alat Musik tiup tradisional Bomberdom
3. Situs Matamenge desa Mengeruda yang telah menarik minat para peneliti arkeologi dan antropologi dari seluruh penjuru dunia untuk melakukan penelitian. Tim pusat Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) bersama tim geologi Bandung serta peneliti dari Australia menemukan beberapa fosil gajah di situs Matamenge, desa Mengeruda Kecamatan Soa Kabupaten Ngada. Fosil-fosil purbakala seperti scapula (tulang belikar) fosil RIB (tulang rusuk) fosil gading, fosil pelvis (tulang pinggul), fosil fertabrae (tulang belakang), serta beberapa temuan penting lainnya yang mengarah kepada jejak adanya kehidupan manusia. Temuan-temuan ini menjadi penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan perihal jaman pra sejarah di Flores.

Perkembangan Kepemudaan dan olahraga yang dimenati generasi pemuda kedepan harus memiliki kepribadian dan karakter yang kuat. Pemikiran dan semangat untuk terus membangun diri dengan berkompetisi secara sehat harus terus digemakan. Dalam membangun pemuda-pemuda

harus dibekali dengan pengetahun dan pengalaman yang baik untuk mampu berdiri sebagai pemuda yang visioner kedepan(mampu melahirkan pemikiran-pemikiran cerdas) untuk mengangkat harga diri, kehormatan dan kedaulatan bangsa di tingkat Internasional.

Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan memberikan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian melalui sentra-sentra pemberdayaan pemuda. Pengembangan kepemudaan juga dilakukan dipedesaan untuk memberikan semangat agar para pemuda dapat menjadi penggerak roda pembangunan. Dalam usaha untuk memberikan bekal kewirausahaan, maka dilakukan peltihan-pelatihan ketrampilan serta upaya menumbuhkan semangat melakukan inovasi bisnis. Diharapkan kelak para pemuda tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal sebagai pekerja atau pegawai namun sanggup mengembangkan usaha mandiri yang dapat bertahan terhadap goncangan dan persaingan.

Dalam bidang olahraga, terdapat bakat olahraga sepak bola, Atletik dan Pencak Silat yang telah berprestasi di tingkat regional yakni sebagai runner up Eltari Memorial Cup Tahun 2017 dan pernah mengharumkan nama Ngada pada Liga Nusantara pada tahun 2016 dan keluar sebagai runner up serta mengikuti Kompetisi Liga 3 Nasional Tahun 2019.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Kondisi umum pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu yang mencakup layanan urusan wajib dan pilihan.

2.3.1. Fokus Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

Gambaran kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Ngada mencakup jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar 9 tahun, aspek tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta aspek sarana prasarana seperti dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini

PAUD merupakan tempat membina usia dini bagi anak-anak sampai enam tahun.Tujuan PAUD adalah memberi rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki kejenjang pendidikan selanjutnya. Capaian kinerja partisipasi peserta didik PAUD di Kabupaten Ngada dari tahun 2016-2019 fluktuatif. Namun demikian, secara umummengalami peningkatan seperti tersaji pada tabel berikut:

Grafik 2. 20. Capaian Indikator Pendidikan Anak Usia Dini /TK

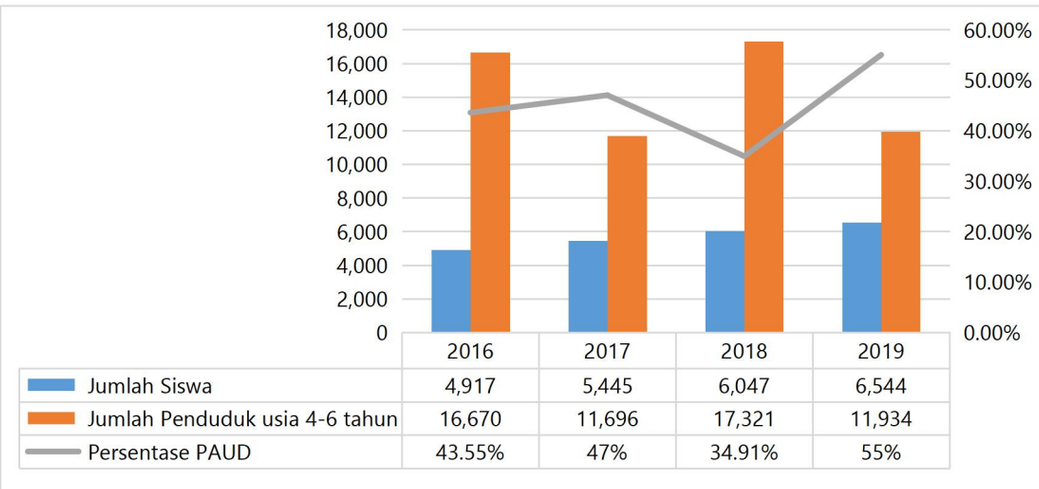

Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab.Ngada Tahun 2016-2020 (data diolah)

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk usia 4-6 tahun fluktuatif, tapi jumlah siswa PAUD terus meningkat. Demikian halnya dengan persentase PAUD yang terus meningkat hingga 55% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penduduk dan aksesibilitas layanan PAUD semakin membaik

2. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pada jenjang pendidikan dasar sembilan tahun, beberapa indikator seperti APK, APM, dan APS dapat digunakan untuk melihat kinerja pendidikan terutama dari dimensi aksesibilitas. Capaian indikator tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Grafik 2. 21. Capaian Indikator APK,APM,APS Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020

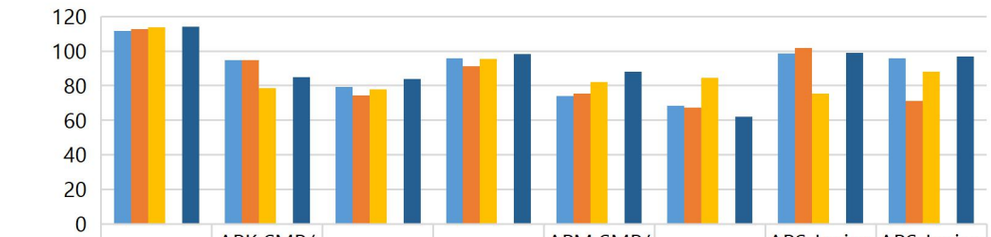

	APK SD/MI /Paket A	APK SMP/ MTs/Paket B	APK SMA/ MA	APM SD/MI/Paket A	APM SMP/ MTs/Paket B	APM SMA/ MA	APS Jenjang SD/Sederajat*	APS Jenjang SMP/Sederajat *
2016	111.75	94.88	79.19	95.7	74.1	68.2	98.55	95.71
2017	112.86	94.91	74.3	91.4	75.57	67.14	101.89	71.23
2018	113.61	78.69	77.74	95.4	82.2	84.5	75.52	88
Series5								
2020	114.13	85.03	83.75	98.42	88.23	61.97	98.97	96.75

Sumber : BPS Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2020

Capaian kinerja Pendidikan Dasar dari tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan dimana APK SD/MI tahun 2016 sebesar 103,2% kemudian meningkat menjadi 105,1% pada tahun 2019. Peningkatan ini didorong oleh banyaknya anak berusia di luar batas usia pada jenjang SD/MI yang bersekolah di SD/MI. Sebagai contoh, anak di atas 12 tahun tapi masih sekolah di tingkat SD/MI atau juga yang belum berusia 7 tahun tapi telah masuk SD/MI. Sama halnya dengan APK SMP/MTs/Paket B terus mengalami peningkatan yakni 79,74% tahun 2016 meningkat menjadi 106,4% (lebih dari 100%) di tahun 2019. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya siswa yang duduk di setiap jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan tingkat usia yang ditentukan sebagai akibat dari usia yang belum memenuhi syarat untuk masuk pada jenjang pendidikan tersebut dan juga adanya keterlambatan menyelesaikan masa belajar di jenjang pendidikan tertentu akibat tinggal kelas atau putus sekolah.

Pada periode yang sama, capaian Angka Partisipasi Murni (APM) secara umum cenderung berfluktuatif untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTS.Tahun 2019 APM SD mencapai 92,37% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 95,7% yang berarti masih ada 4,3% penduduk yang berusia 7-12 tahun yang belum bersekolah di SD/MI. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTS/Paket B kondisi APM tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan, namun baik SD/MI maupun SMP/MTs APM belum mencapai 100%. Keadaan ini masih membutuhkan

perhatian pemerintah melalui program yang mampu mendorong penuntasanwajib belajar pendidikan dasar.

Selanjutnya, capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2016-2019 pada jenjang SD/MI cenderung meningkat dari 98,55% menjadi 102,9%. Sebaliknya, capaian APS jenjang SMP/MTs cenderung menurun dari 95,71% menjadi 86,8% pada periode yang sama. Menurunnya angka APS pada jenjang pendidikan menengah usia 13-15 tahun disebabkan oleh beberapa faktor seperti migrasi penduduk, ada siswa yang melanjutkan sekolah di luar wilayah Kabupaten Ngada namun secara data kependudukan masih tercatat dan berdomisili di Kabupaten Ngada.

- **Angka Kelulusan**

Salah satu indikator pendidikan yang menunjukkan kualitas proses belajar mengajar adalah Angka Kelulusan. Angka Kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MA Kabupaten Ngada Tahun 2016–2019 menunjukkan capaian yang optimal. Artinya, seperti tergambarkan pada grafik di bawah, tingkat kelulusan mencapai 100%. Data angka kelulusan untuk semua tingkat pendidikan selama kurun waktu 2016 sampai 2019 disajikan pada tabel berikut:

Grafik 2. 22. Persentase Capaian Indikator Angka Kelulusan

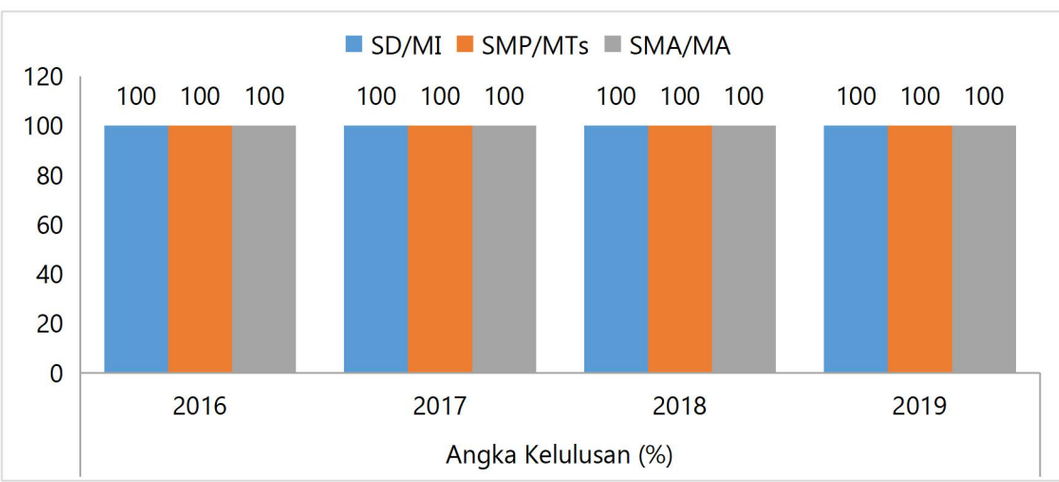

di Kabupaten Ngada Tahun 2016 – 2019

Sumber: SIPD Dinas Pendidikan dan BPS Kabupaten Ngada, Tahun 2016- 2019

Tingginya angka kelulusan siswa di semua jenjang pendidikan digunakan sebagai bahan kebijakan untuk mempertahankan capaian tersebut periode berikutnya.

Meskipun demikian, tingginya angka kelulusan ini juga harus dibandingkan dengan nilai rata-rata kelulusan sebagai indikator yang menunjukkan prestasi siswa-siswi

- **Angka Melanjutkan**

Angka Melanjutkan Sekolah dari jenjang SD/MI ke jenjang SMP/MTS dari tahun 2016- 2019 terus mengalami peningkatan. Sebaliknya, Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA terus mengalami penurunan yakni tahun 2016 mencapai 100% di lihat dari jumlah siswa baru tingkat SMP/MTs dengan jumlah siswa yang lulus pada jenjang SD/MI sebanyak 3333 siswa. Sementara itu, Angka Melanjutkan pada jenjang yang sama pada tahun 2019 hanya sebesar 91,12% dilihat dari 3.712 siswa baru tingkat SMP/MTs dan jumlah siswa yang lulus pada jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2019 sebesar 84,88%. Jika dibandingkan dengan Angka Melanjutkan sekolah dari jenjang SD/MI ke jenjang SMP/MTs tahun 2019 lebih rendah dari tahun 2016.

Grafik 2. 23. Capaian Indikator Jumlah Siswa Melanjutkan Sekolah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019

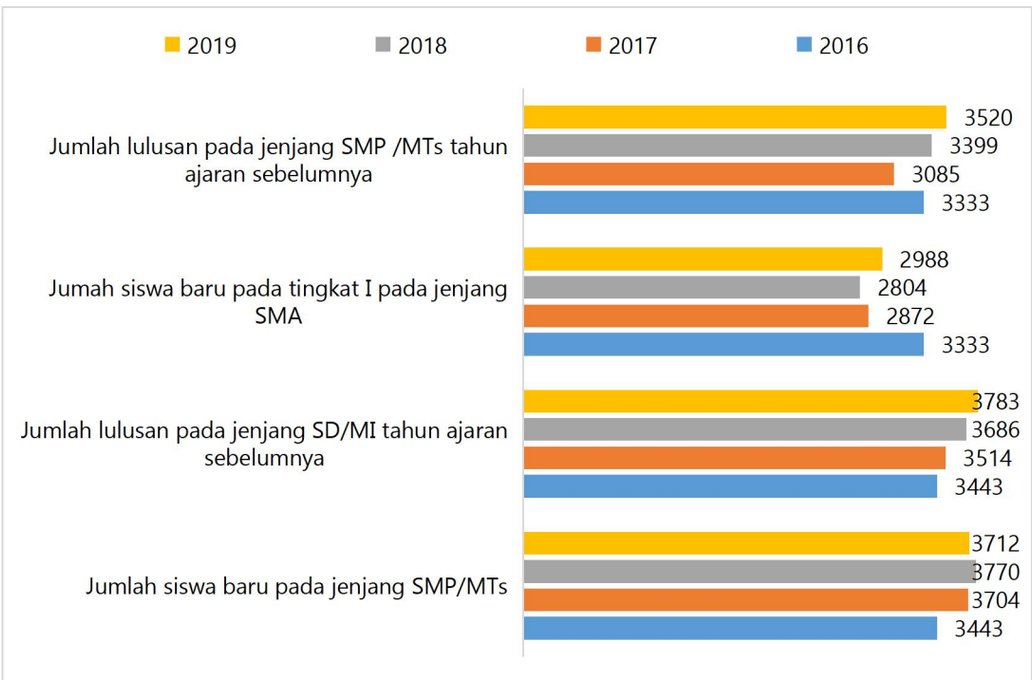

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada, BPS Kab.Ngada Tahun 2016-2019

Grafik 2. 24. Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019

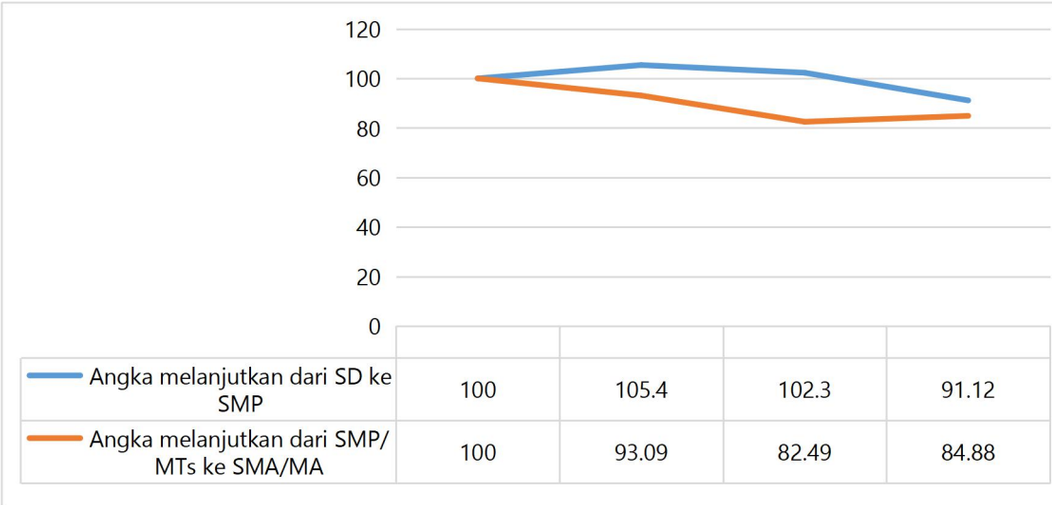

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada, BPS Kab.Ngada Tahun 2016-2019

Menurunnya angka melanjutkan disebabkan oleh beberapa hal seperti rendahnya minat sekolah, kondisi perekonomian keluarga yang kurang memadai, serta rendahnya upaya sekolah untuk mendorong minat belajar siswa. Di sisi lain banyaknya siswa-siswi dari Kabupaten Ngada yang melanjutkan pendidikan ke Kabupaten lain atau bahkan ke Provinsi lain juga menjadi faktor yang menyebabkan angka melanjutkan menurun. Penurunan Angka Melanjutkan menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dengan menempatkan guru yang memiliki kualifikasi pendidikan dan tetap memberikan bantuan kepada keluarga yang kurang mampu berupa beasiswa pendidikan.

3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Capaian pendidikan dari aspek tenaga pendidikan dan kependidikan dapat dilihat dari dimensi kuantitas dan kualifikasi berdasarkan pendidikan terakhir. Dari sisi kuantitas, capaian tersebut dapat dilihat dari rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.Gambaran rasio guru-murid di Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 45. Rasio Guru Murid, Rata-rata Murid Guru dan Rata-rata Murid Sekolah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019

No	Tahun	SD/MI			SMP/MTs			Rasio Guru/Murid		Rata-rata Guru/Murid		Rata-rata murid/sekolah	
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid	SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs

1	2016	179	1.702	22.718	58	938	10.816	749	867	13	12	127	186
2	2017	173	1.631	21.941	58	779	8.516	743	915	13	11	127	147
3	2018	172	1.427	20.867	60	741	8.677	684	854	15	12	121	145
4	2019	164	1.452	19.463	63	794	8.403	746	945	13	11	119	133

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Ngada tahun 2016-2020 dan Profil Kabupaten Ngada Tahun 2019 dan Ngada dalam Angka (2016-2018).

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa Rasio Guru-Murid SD/MI sebesar 749 dengan rata-rata Guru-Murid sebanyak 13 untuk jenjang SD dan 11 untuk jenjang SMP pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, serta rata-rata sekolah menampung 119 dan 133 murid untuk SD dan SMP. Dalam perhitungan rasio ini yang dilihat adalah jumlah guru dan jumlah siswa usia sekolah (7-12 tahun dan usia 13-15 tahun). Pada tahun 2016, pada jenjang sekolah dasar setiap 10.000 siswa didik diampu oleh 749 guru, tahun 2017 diampu oleh 743 guru, tahun 2018 diampu oleh 684 guru dan tahun 2019 diampuh oleh 746 guru. Sedangkan dijenjang Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2016 setiap 10.000 siswa diampu oleh 867 guru, 2017 sebanyak 915 guru, tahun 2018 sebanyak 854 guru dan 2019 diampu oleh 945 guru.

Perbedaan jumlah guru jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dipengaruhi karena Jumlah sekolah SD dan murid SD lebih banyak dari jumlah SMP. Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Pasal (24) bahwa jumlah peserta didik ideal dalam satu rombel untuk SD paling sedikit 20 orang paling banyak 28 orang, sedangkan peserta didik ideal untuk SMP paling sedikit 20 paling banyak 32 orang. Melihat perbandingan guru dan siswa baik SD maupun SMP di Kabupaten Ngada yang masih di bawah standar yakni 1:13 untuk SD dan 1:12 untuk SMP, maka kedepan penerimaan tenaga guru dibatasi sehingga yang perlu dilakukan adalah peningkatan kualitas akademik guru melalui program pendidikan yang relevan dengan tugas guru yang bersangkutan. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dilarang untuk menambah jumlah rombongan belajar dan menambah ruangan kelas baru.

Selain indikator perbandingan di atas, kompetensi guru telah menjadi salah satu perhatian utama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Dari data pada tabel di bawah, terlihat bahwa guru yang memenuhi kulifikasi S1/D-IV

baik guru SD/MI maupun guru SMP/MTs terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2016-2019, terdapat penurunan angka pada 2018 padahal tahun sebelumnya naik dua kali lipat. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya guru-guru dengan kualifikasi S1/DIV menjalani masa pensiun atau pindah tugas.

Grafik 2. 25. Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi SI/D-IV Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019

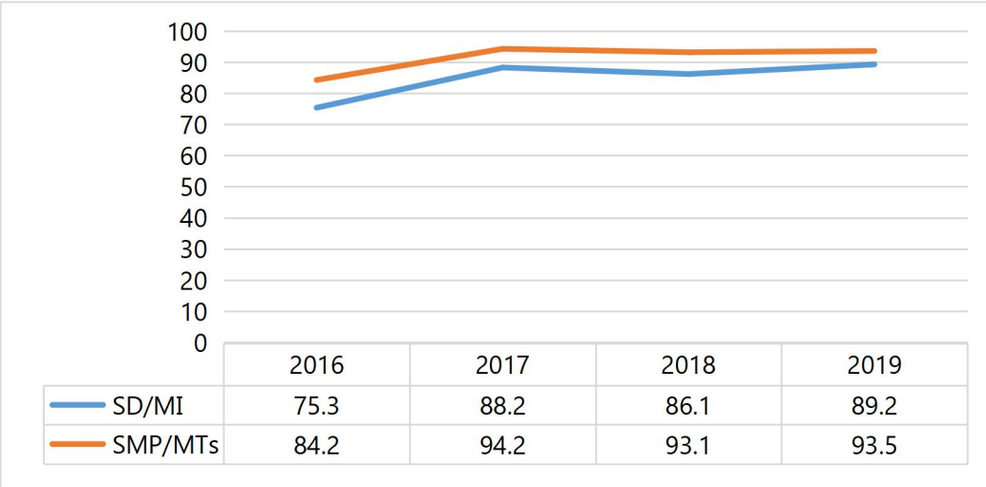

	2016	2017	2018	2019
SD/MI	75.3	88.2	86.1	89.2
SMP/MTs	84.2	94.2	93.1	93.5

Sumber : Neraca Pendidikan Tahun 2016-2019

Meskipun mengalami peningkatan, kualifikasi guru pada jenjang SD dan SMP masih di bawah 95% sehingga perlu mendapatkan perhatian serius agar bisa dinaikan. Hal ini penting untuk sebagai pra-syarat bagi dalam rangkan meningkatkan kualitas pengajaran.

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan baik dasar per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauhmana sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Gambaran Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah pada tahun 2016-2019 disajikan pada tabel berikut:

Grafik 2. 26. Capaian Indikator Rasio Ketersediaan Sekolah

	2016	2017	2018	2019
Rasio jumlah sekolah terhadap j umlah penduduk kelompok um ur 7 – 12 tahun	0.129166667	0.126388889	0.181944444	0.116666667
Rasio jumlah sekolah terhadap j umlah penduduk kelompok um ur 13 – 15 tahun	0.180555556	0.176388889	0.167361111	0.157638889

Terhadap Penduduk Usia Sekolah Tahun 2016-2019

Sumber data: Dinas Pendidikan 2016-2019 (data diolah)

Selama kurun waktu 2016-2019 Jumlah sekolah SD terus mengalami peningkatan namun jumlah usia sekolah 7-12 tahun di tahun 2019 mengalami penurunan yakni menjadi19.855, namun jumlah sekolah bertambah menjadi 183. Sedangkan jumlah SMP/MTs di Kabupaten Ngada dari tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan baik jumlah sekolah maupun jumlah siswa usia 13-15 tahun.

2.3.1.2. Urusan Kesehatan

Kinerja pelaksanaan urusan kesehatan dapat diukur oleh beberapa indikator yang sifatnya proses seperti ketersediaan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia kesehatan serta capaian pada indikator-indikator yang sifatnya *outcome.*

1. Kondisi Sarana dan Prasarana Kesehatan

Beberapa indikator yang bisa dilihat dari aspek sarana dan prasarana antara lain rasio Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.

- **Rasio Puskesmas, Pustu dan sarana kesehatan desa per satuan Penduduk**

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.Jumlah Puskesmas di Kabupaten Ngada dari terus mengalami penambahan dari 10 unit menjadi 19 unit Puskesmas di tahun 2019. Jumlah tersebut terdiri dari 5 Puskesmas Rawat Inap dan 14 Puskesmas Rawat Jalan yang tersebar di 12 kecamatan dengan cakupan Puskesmas dibandingkan Kecamatan adalah 158%. Cakupan ini menunjukkan bahwa ada 6 kecamatan memiliki 1 Puskesmas, 1 Kecamatan yang merupakan Ibukota Kabupaten tersedia 3 Puskesmas, dan 5 Kecamatan masing-masing memiliki 2 Puskesmas.

Grafik 2. 27. Jumlah Penambahan Sarana Puskesmas di Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2011-2019

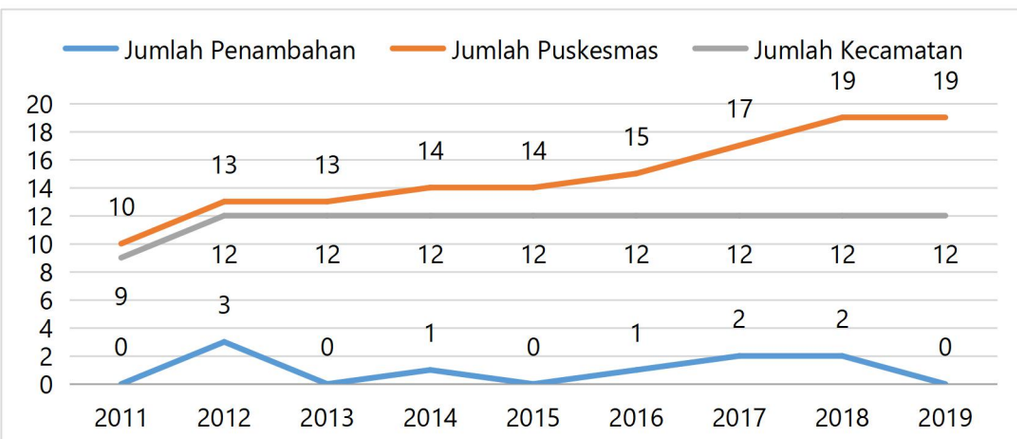

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada 2011-2019

Peningkatan jumlah puskesmas dilakukan sesuai dengan analisa kebutuhan pelayanan kesehatan, seperti letak topografi pemukiman penduduk, jumlah penduduk, dan luas wilayah kecamatan. Kecamatan Riung contohnya saat ini memiliki 2 Puskesmas yaitu Puskesmas Riung dan Puskesmas Rawangkalo, pembagian wilayah kerja Puskesmas ditentukan berdasarkan letak topografi wilayah Kecamatan Riung, Puskesmas Rawangkalo melayani penduduk yang bermukim di daerah pegunungan, sedangkan Puskesmas Riung melayani penduduk di wilayah pesisir. Wilayah pantai dan pesisir dipisahkan oleh hutan lindung. Dalam perkembangan selanjutnya, di tahun 2020 ada pengembangan 1

Puskesmas lagi untuk melayani penduduk di wilayah pesisir Riung Bagian Timur.

Tabel 2. 46. Rasio Puskesmas dan Sarana Kesehatan Desa (Pustu, Polindes, Poskesdes) per penduduk masing-masing Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Jml Puskesmas (Unit)	Jml Penduduk Tahun 2019 (Jiwa)	Rasio Puskesmas per Penduduk	Jumlah Desa/ kel	Jumlah Sarkes di Desa (Pustu, Polindes, Poskesdes)	Rasio Sarkes Desa per penduduk
1	Aimere	1	10.452	1: 10.452	10	8	1: 1307
2	Jerebuu	2	7.003	1: 3.502	12	10	1: 700
3	Inerie	1	6.994	1: 6.994	10	9	1: 777
4	Bajawa	3	41.305	1: 13.768	22	17	1: 2430
5	Golewa	2	21.058	1: 10.529	16	10	1: 2106
6	Golewa Selatan	2	9.828	1: 4.914	12	11	1: 891
7	Golewa Barat	1	10.380	1: 10.380	10	8	1: 1229
8	Bajawa Utara	1	11.281	1: 11.281	11	12	1: 940
9	Soa	1	14.333	1: 14.333	14	6	1: 2389
10	Riung	2	14.832	1: 7.416	16	15	1: 989
11	Riung barat	2	9.092	1: 4.546	10	10	1: 909
12	Wolomeze	1	6.659	1: 6.659	8	5	1: 1332
	Kabupaten	19	163.217	1: 8.590	151	121	1: 1349

Sumber: Kabupaten Ngada Dalam Angka 2020; Profil Dinas Kesehatan 2019

Pada Tahun 2019 jumlah Puskesmas yang ada di Kabupaten Ngada sebanyak 19 buah untuk melayani 163.217 jiwa penduduk atau ratio sebesar 1: 8.590 jiwa. Sedangkan rasio pelayanan puskesmas per kecamatan bervariasi tiap kecamatan, rata-rata 1 Puskesmas melayani 4000 sampai 10000 penduduk, namun ada beberapa kecamatan yang perlu pengembangan Puskesmas, seperti Kecamatan Soa karena 1 Puskesmas melayani 14.333 penduduk.

Dari tabel diatas juga dapat dilihat rasio sarana kesehatan di desa berkisar antara 1 sarana melayani 700 penduduk di Kecamatan Inerie dan rasio terbesar adalah 1 sarana kesehatan desa melayani 2.400 penduduk di kecamatan Bajawa. Penyediaan sarana kesehatan di desa mempertimbangkan letak topografi desa, sehingga desa-desa yang terletak dekat pusat kecamatan/Puskesmas tidak tersedia sarana kesehatan desa.

- **Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu**

Sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyatakan bahwa Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama. Oleh karena itu, pelaksanaan pelayanan UKM dan UKP dibantu oleh jaringan Puskesmas yang ada di desa yaitu Pustu (Puskesmas Pembantu), Polindes dan Poskesdes. Pada tahun 2019, terdapat 121 sarana kesehatan desa yang terdiri dari 30 unit Pustu, 47 unit Polindes dan 44 unit Poskesdes yang terdapat di desa, sementara jumlah desa/kelurahan sebanyak 151 Desa/Kelurahan.

Tabel 2. 47. Jumlah Pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 2016-2019

No.	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Puskesmas	14	16	19	19
2.	Jumlah Kecamatan	12	12	12	12
3.	Jumlah kunjungan puskesmas	55.938	56.676	113.040	136.582
4.	Jumlah puskesmas Pembantu	33	33	27	30
5.	Jumlah Desa/Kelurahan	151	151	151	151

Sumber: E-database SIPD dan Profil Dinas Kesehatan Tahun 2020

Grafik 2. 28. Persentase Cakupan Pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Ngada 2016-2019

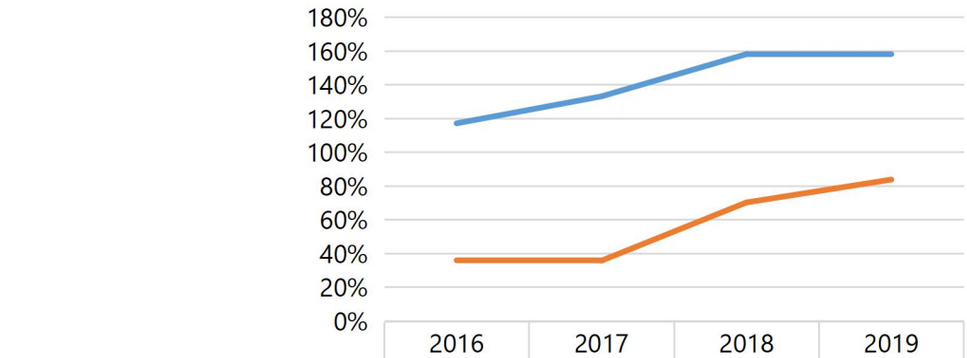

	2016	2017	2018	2019
Cakupan Puskesmas (per kecamatan)	117%	133%	158%	158%
Cakupan Kunjungan Puskesmas	35.83%	35.63%	70.11%	83.68%

Sumber : E-database SIPD dan Profil Dinas Kesehatan Tahun 2020

Sesuai dengan peruntukkannya sebagai fasilitas kesehatan primer, maka Puskesmas menyediakan layanan kesehatan dasar/tingkat pertama bagi penduduk di wilayah kerjanya, maupun penduduk dari wilayah lain yang datang berobat. Cakupan kunjungan Puskesmas yaitu semua kunjungan pasien ke Puskesmas baik dari poli umum, kesehatan, poli kesehatan ibu dan anak, laboratorium, UGD dan rawat inap juga kunjungan ke Pustu/Polindes/Poskesdes. Cakupan kunjungan Puskesmas daritahun 2016-2019 terus meningkat, bahkan terjadi peningkatan kesehatan selama 2 tahun terakhir (2018 dan 2019 seperti pada tabel 2.46). Jumlah Puskesmas Pembantu mengalami perbedaan pada tahun 2017 dan 2018 dikarenakan Pustu tersebut mengalami peningkatan status menjadi Puskesmas, atau menjadi lokasi Puskesmas sementara.

Selain sarana kesehatan terpusat, pemerintah juga menyediakan Puskesmas Keliling berupa sarana mobil sebanyak 21 unit di 19 Puskesmas.Sarana Puskesmas Keliling ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan dokter dan tenaga esehatan lainnya seperti tenaga gizi, sanitarian dan tenaga promosi esehatan ke desa-desa.

- **Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)**

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Posyandu di Kabupaten Ngada dimanfaatkan sebagai sarana pelayanan

kesehatan ibu hamil, bayi/balita dan usila. Kegiatan deteksi dini tumbuh kembang anak, vaksinasi bayi dan penyuluhan kesehatan juga sebagian besar dilakukan di Posyandu. Kader Posyandu adalah sukarelawan dari masyarakat desa/kelurahan.

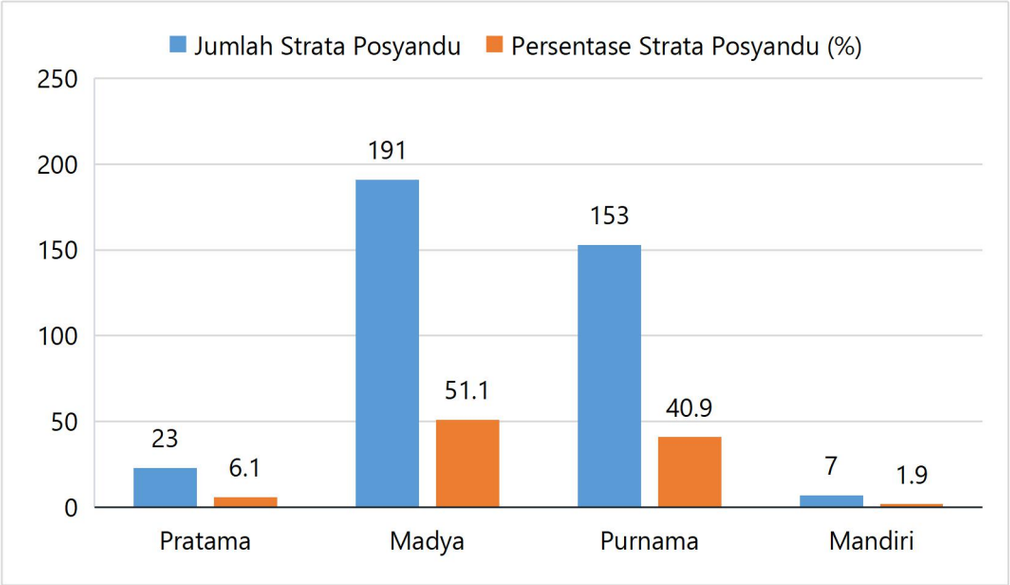

Grafik 2. 29. Strata Posyandu di Kabupaten Ngada Tahun 2019

Sumber data : Profil Kesehatan 2019

Pada tahun 2019, jumlah Posyandu di Kabupaten Ngada sebanyak 374 Posyandu. Sedangkan secara strata posyandu, jumlah Posyandu aktif sebanyak 161 Posyandu atau 42,8%. Posyandu aktif adalah Posyandu dengan strata purnama dan mandiri yaitu Posyandu yang bisa menjalankan kegiatan sendiri secara rutin dan mandiri, mempunyai 5 orang kader terlatih dan tersedia dana sehat.

- **Fasilitas Kesehatan Sekunder/ Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa**

Dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, selain menyediakan fasilitas kesehatan primer (Puskesmas dan jaringannya) untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama, Pemerintah Kabupaten Ngada juga menyediakan 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Bajawa. RSUD Bajawa adalah satu-satunya fasilitas kesehatan sekunder yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat kedua di Kabupaten Ngada dan menerima rujukan dari 19 fasilitas kesehatan primer yang ada. Pelayanan

kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik.

Fasilitas pelayanan di RSUD Bajawa ada 3 jenis yaitu Fasilitas Rawat Inap, Fasilitas Rawat Jalan dan Fasilitas Penunjang.

Pelayanan Rawat Jalan

Jenis pelayanan rawat jalan di RSUD Bajawa secara umum dapat dibedakan atas 4 macam yaitu:

1) Pelayanan gawat darurat (emergency services) yakni untuk menangani pasien yang butuh pertolongan segera dan mendadak.
2) Pelayanan rawat jalan paripurna (comprehensive hospital outpatient services) yakni yang memberikan pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan kebutuhan pasien. RSUD Bajawa menyediakan klinik sbb:
    - Klinik Spesialis Bedah
    - Klinik Spesialis Kebidanan dan kandungan
    - Klinik Spesialis Anak
    - Klinik Spesialis Penyakit bedah
    - Klinik Umum
    - Klinik Gigi
    - Klinik VCT
3) Pelayanan rujukan (referral services) yakni hanya melayani pasien-pasien rujukan oleh sarana kesehatan lain. Biasanya untuk diagnosis atau terapi, sedangkan perawatan selanjutnya tetap ditangani oleh sarana kesehatan yang merujuk.
4) Pelayanan bedah jalan (ambulatory surgery services) yakni memberikan pelayanan bedah yang dipulangkan pada hari yang sama.

Pelayanan Rawat Inap

Jumlah Tempat Tidur RS pada fasilitas rawat inap pada keadaan Desember 2019sebanyak101 TT.Distribusi tempat tidur berdasarkan kelas perawatan

yang digunakan untuk menghitung indikator pelayanan RSUD Bajawa sebanyak 101 TT, dapat diuraikan dengan tabel berikut ini:

Tabel 2. 48. Data Tempat Tidur Keadaan Desember 2019

NO	Ruangan	KELAS			TOTAL			
		III	II	I	VIP	ISOLASI	Kelas Khusus	
1	Ruang Rawat Inap (4 Ruangan)	61	10	5	3	8	0	87
2	Ruangan NICU/ Perinatal	0	0	0	0	0	10	10
3	ICU	0	0	0	0	0	4	4
TOTAL		**61**	**10**	**5**	**3**	**8**	**14**	**101**

Sumber: Profil RSUD Bajawa, 2019

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pemanfaatan tempat tidur di RSUD Bajawa meningkat setiap tahun. Hingga saat ini, jumlah tempat tidur lebih banyak di kelas 3, sehingga perlu penambahan ruang rawat inap dan tempat tidur untuk melayani masyarakat Kabupaten Ngada dan pasien yang dirujuk dari kabupaten sekitar.

Grafik 2. 30. Persentase Pemanfaatan RSUD Bajawa Lima Tahunan dari 2015-2019

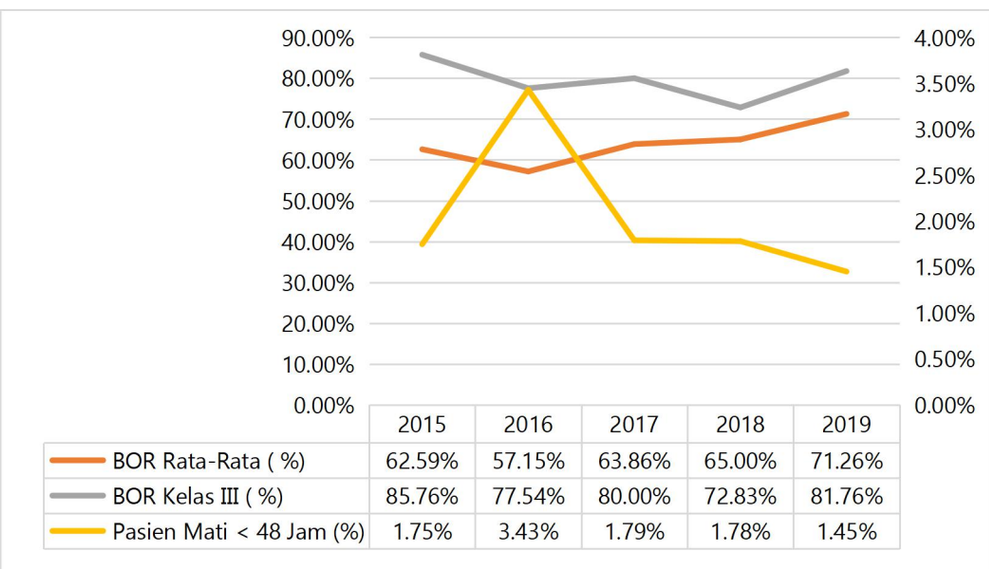

Sumber: Profil RSUD Bajawa 2019

Pemanfaatan rumah sakit dapat dilihat dari indikator BOR. BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Persentase ini menunjukkan sampai berapa jauh pemakaian tempat tidur yang tersedia di rumah sakit dalam jangka waktu tertentu. Dari tabel dapat diketahui bahwa persentase pemanfaatan tempat tidur meningkat tiap tahunnya, dengan rata-rata rawat inap 22 orang per hari. Persentase pemanfaatan tempat tidur

ini sangat tinggi pada ruang rawat kelas 3, sehingga penambahan ruangan dan tempat tidur sangat diperlukan.

Pelayanan Penunjang Medik

Pelayanan Penunjang Medik di RSUD Bajawa adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik dan paramedik untuk mendukung penegakan diagnosis dan terapi. Pelayanan Penunjang Medik di RSUD Bajawa terdiri dari beberapa pelayanan, diantaranya adalah :

- ✓Instalasi Gawat Darurat
- ✓Radiologi
- ✓Laboratorium
- ✓Unit Transfusi
- ✓Instalasi Gizi
- ✓Instalasi Bedah Sentral (IBS)
- ✓Instalasi Pemulasaraan Jenazah (IPJ)
- ✓Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS)
- ✓Central Sterile Supply Department (CSSD)
- ✓Laundry
- ✓Instalasi Penyehatan Lingkungan / Kesling, Incenerator
- ✓Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- ✓Pelayanan Ambulance

2. Kondisi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam Undang-Undang tersebut tenaga kesehatan dikelompokan menjadi 12 jenis yaitu:

1. Tenaga medis (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi spesialis)
2. Tenaga psikologi klinis (psikologi klinis)
3. Tenaga keperawatan (perawat dan perawat spesialis)

4. Tenaga kebidanan (bidan)
5. Tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknik kefarmasian)
6. Tenaga kesehatan masyarakat (epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga)
7. Tenaga kesehatan lingkungan (sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan)
8. Tenaga gizi (nutrisionis dan dietisien)
9. Tenaga keterapian fisik (fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara dan akupuntur)
10. Tenaga keteknisian medis (perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anastesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis)
11. tenaga teknik biomedika (rediografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis dan ortotik prostetik)
12. tenaga kesehatan tradisional (tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan).

- **Rasio Tenaga Kesehatan dengan Jumlah Penduduk**

Di level daerah, ketercukupan tenaga kesehatan dapat dilihat dari rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk. Di Kabupaten Ngada, rasio tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 49. Rasio Tenaga Kesehatan dibandingkan dengan Jumlah Penduduk tahun 2019

No	Jenis Tenaga	RSUD	Puskesmas	Total	Rasio per 1000 penduduk
1	Tenaga medis (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi spesialis)	24	26	50	0,31
2	Tenaga psikologi klinis	0	0	0	0

No	Jenis Tenaga	RSUD	Puskesmas	Total	Rasio per 1000 penduduk
	(psikologi klinis)				
3	Tenaga keperawatan (perawat dan perawat spesialis)	134	395	529	3,24
4	Tenaga kebidanan (bidan)	44	393	437	2,68
5	Tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknik kefarmasian)	17	34	51	0,31
6	Tenaga kesehatan masyarakat	15	52	67	0,41
7	Tenaga kesehatan lingkungan (sanitarian)	6	34	40	0,25
8	Tenaga gizi (nutrisionis)	8	28	36	0,22
9	Tenaga keterapian fisik (fisioterapis)	5	0	5	0,03
10	Tenaga keteknisian medis (perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi gigi, terapis gigi dan mulut)	16	30	46	0,28
11	Tenaga teknik biomedika (rediografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, radioterapis)	24	38	62	0,38
12	Tenaga kesehatan tradisional (tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan).	0	0	0	0

Sumber: Profil Kesehatan 2019, Profil RSUD 2019

Data di atas menunjukkan bahwa beberapa tenaga kesehatan masih belum tersedia atau memiliki rasio yang rendah sehingga penyediaan sangat diperlukan. Rasio tertinggi adalah etenaga perawat dan perawat spesialis serta bidan, sedangkan rasio ketersediaan SDM lainnya masih di bawah 1 per 1000 penduduk. Artinya, tiap 1000 penduduk tenaga kesehatan seperti dokter,

tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakatm, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, dan tenaga teknis medis masih di bawah 100 orang. Oleh karena itu, ukuran ini perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan tingkat kedua, tenaga medis yang tersedia di RSUD Bajawa adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 50. Jenis Ketersediaan Tenaga Medis Di RSUD Bajawa Keadaan Midterm 2020

No	Uraian Jenis Tenaga	Jumlah	Kebutuhan/Kekurangan
1	Dokter Spesialis Obgyn	1 orang	1 SPOG
2	Dokter Spesialis radiologi	1 orang	0
3	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1 orang	1 SPPD
4	Dokter Spesialis Penyakit Bedah	1 orang	1 SPB
5	Dokter Spesialis Patologi Klinik	0	1 SP.PK
6	Dokter Spesialis Anasthesy	0	1 SPAn
7	Dokter Spesialis Anak	1 orang	1 SPA
8	Dokter Umum	17 orang	0
9	Dokter Gigi	2 orang	1 Drg

Sumber: Profil RSUD Bajawa

Sembilan jenis tenaga medis tersebut di atas merupakan standar tenaga minimal sesuai Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Tenaga Dokter Spesialis tetap yang terdapat di RSUD Bajawa adalah Spesialis Bedah, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Radiologi, Spesialis Obgyn, dan Spesialis Anak. Sedangkan ketersediaan Spesialis Anesthesy dan patologi Klinik merupakan tenaga kontrak sementara melalui Nota Kesepahaman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Ngada tentang Penempatan Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis.

3. Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan

Beberapa indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Status Gizi Balita. Semakin rendah AKI, AKB dan prevalensi gizi buruk

maka semakin baik derajat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut, atau sebaliknya.

- **Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup.**

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup adalah jumlah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Hal itu diakibatkan oleh semua faktor yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera (WHO, 2014). Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 51. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	Satuan
1	Jumlah kematian ibu (hamil, melahirkan, dan nifas)	6	1	2	1	kasus
2	Jumlah kelahiran hidup	2.699	2.596	2.523	2.376	bayi
3	Angka kematian ibu (hamil, melahirkan, dan nifas) per 100.000 KH	222	38	79	42	ibu
4	AKI per 1000 Kelahiran Hidup	2,2	0,38	0,79	0,42	

Sumber data : E-database SIPD Dinas Kesehatan, Tahun 2020

Dari tabel di atas, diketahui bahwa kasus kematian ibu selama empat tahun terakhir mengalami penurunan signifikan, bahkan terjadi penurunan yang sangat drastis dari tahun 2016 ke tahun 2017, yaitu dari 6 menjadi hanya 1. Selama 3 tahun terakhir Kabupaten Ngada berhasil menekan jumlah kasus kematian ibu maternal. Jika dibandingkan dengan AKI provinsi NTT pada tahun 2019 (158 per 100.000 KH) dan AKI di Indonesia (306 per 100.000) kelahiran hidup, maka AKI Kabupaten Ngada jauh lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan ibu sudah cukup baik sehingga perlu dipertahankan dengan sebaik-baiknya.

- **Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup**

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup adalah Jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari satu tahun dalam tahun tertentu. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Grafik 2. 31. Capaian Indikator Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Ngada 2016-2019

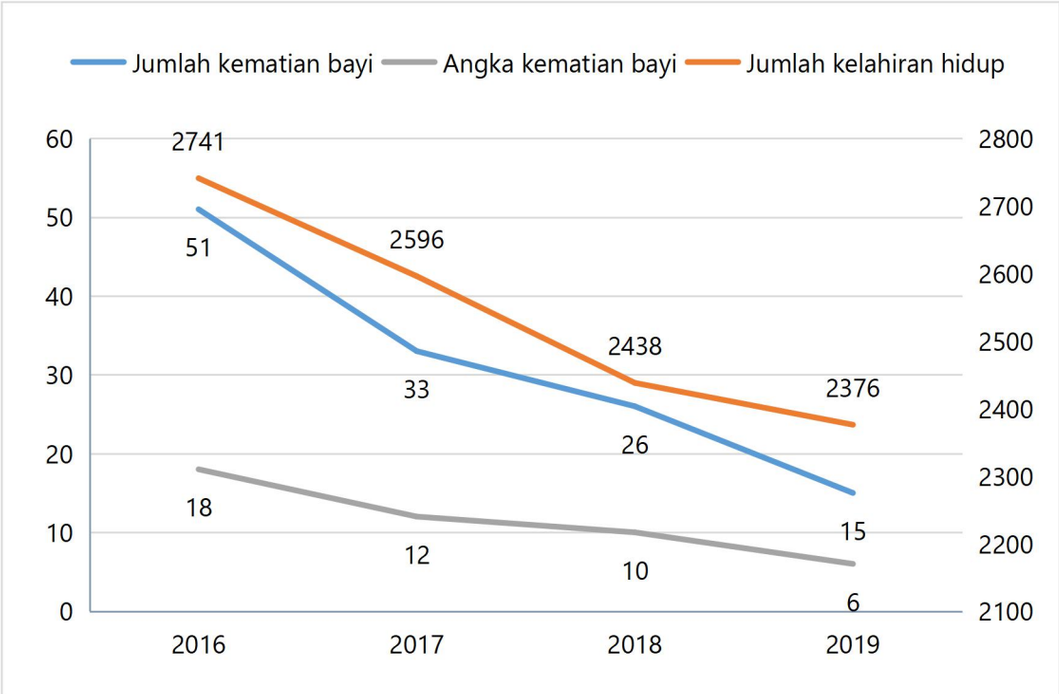

Sumber data : E-database SIPD dan Profil Dinas Kesehatan 2020

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa kematian bayi dari tahun 2016-2019 mengalami penurunan yang signifikan. Jika dikonversikan ke Angka Kematian Bayi, setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 6 kasus kematian bayi pada tahun 2019. Angka ini menurun drastis jika dibandingkan dengan AKB tahun 2016 yaitu 18 kematian bayi dari 1000 kelahiran hidup. Capaian Ini menunjukkan Kabupaten Ngada mampu melakukan percepatan penurunan AKB dalam kurun waktu 4 tahun dari 18 per 1000 KH menjadi 6 per 1000 KH.

- **Status Gizi Balita Menurut Berat Badan per Umur**

Penilaian status gizi balita yang selalu dipantau setiap bulan di Posyandu dengan cara Deteksi Dini Tumbuh Kembang anak menggunakan format KMS adalah Berat Badan dibandingkan umur (BB/U). Kategori penentuan status BB/U adalah Balita status gizi buruk, gizi kurang, gizi baik dan gizi lebih.

Tabel 2. 52. Kinerja Urusan Gizi Balita Tahun 2016 - 2019 Kabupaten Ngada

Variabel	2016	2017	2018	2019
Jumlah balita ditimbang	10.728	10.646	11.067	11.247
Balita Gizi Buruk (BB/U)	10	3	4	8
Prevalensi Gizi Buruk per 1000 balita	0,93	0,28	0,36	0,71
Persentase balita gizi buruk	0,09	0,03	0,04	0,07

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Ngada, 2016, 2017, 2018, 2019

Prevalensi status gizi buruk pada balita di Kabupaten Ngada selama 4 tahun terakhir mengalami fluktuasi, tahun 2016 prevalensi gizi buruk sebesar 0,93 per 1000 balita, atau setiap 1000 balita terdapat 1 kasus gizi buruk. Terjadi penurunan yang sangat drastis ditahun 2017 dan 2018, yaitu 0,28 per 1000 balita atau 0,03% balita mengalami gizi buruk ditahun 2017 dan 0,04% balita gizi buruk ditahun 2018. Pada tahun 2019 persentase gizi buruk adalah 0,07%.

4. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Dalam menjamin kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Ngada telah menyediakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang tertuang dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

a) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d) Pelayanan kesehatan balita;
e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
l) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan.

Pelayanan tersebut diatas bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif mencakup: peningkatan kesehatan; perlindungan

spesifik; diagnosis dini dan pengobatan tepat; pencegahan kecacatan; dan rehabilitasi.

a) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Setiap ibu hamil harus mendapatkan pelayanan antenatal (*antenatal care/ANC)* sesuai standar. Standar pelayanan pemeriksaan kesehatan ibu hamil adalah satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga atau pelayanan K4 ibu hamil. Cakupan ibu hamil dengan K4 tahun 2019sebesar 93,4% meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabelberikut :

Grafik 2. 32. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Tahun 2016 – 2019

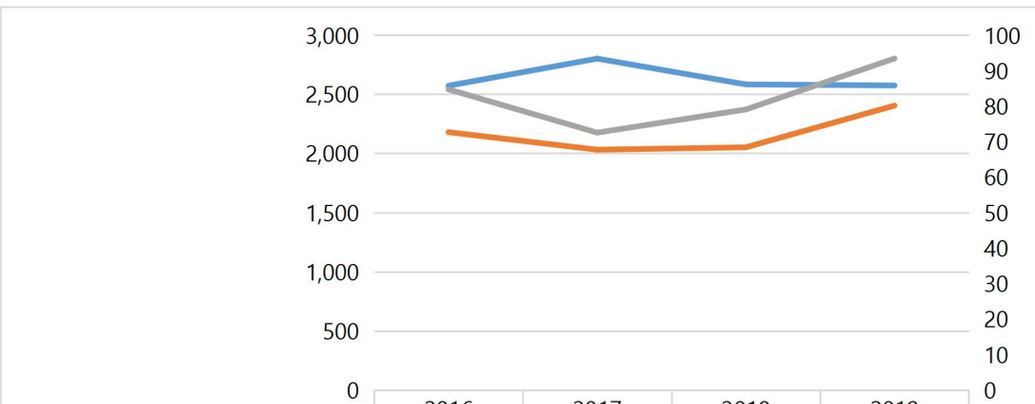

	2016	2017	2018	2019
Jumlah Ibu Hamil	2,572	2,801	2,583	2,574
Jumlah Ibu Hamil K4	2,179	2,031	2,051	2,404
Cakupan K4 ibu hamil (%)	84.7	72.5	79.04	93.4

Sumber : Profil Dinas Kesehatan 2016-2019

Cakupan K4 ibu hamil belum mencapai 100% sebagian besar disebabkan karena ibu hamil melakukan pemeriksaan kesehatan pertama kali setelah lewat trimester pertama kehamilan. Penjaringan ibu hamil oleh tenaga kesehatan desa dan kader posyandu terus dijalankan.

b) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Upaya percepatan penurunan Kematian Ibu dan Kematian Bayi di Kabupaten Ngada dan Provinsi NTT telah sangat serius dilakukan melalui Revolusi KIA sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 42 Tahun 2009 tentang Revolusi KIA. Peraturan Gubernur tersebut mengatur bahwa semua persalinan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan yang memadai. Pelayanan kesehatan ibu bersalin di Kabupaten Ngada harus

dilakukan di Puskesmas atau Rumah Sakit sebagai fasilitas kesehatan yang memadai. Dengan demikian, pelayanan persalinan tidak lagi dilakukan di sarana kesehatan desa (Pustu, Polindes, Poskesdes) maupun klinik bersalin.

Grafik 2. 33. Cakupan Pelayanan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019

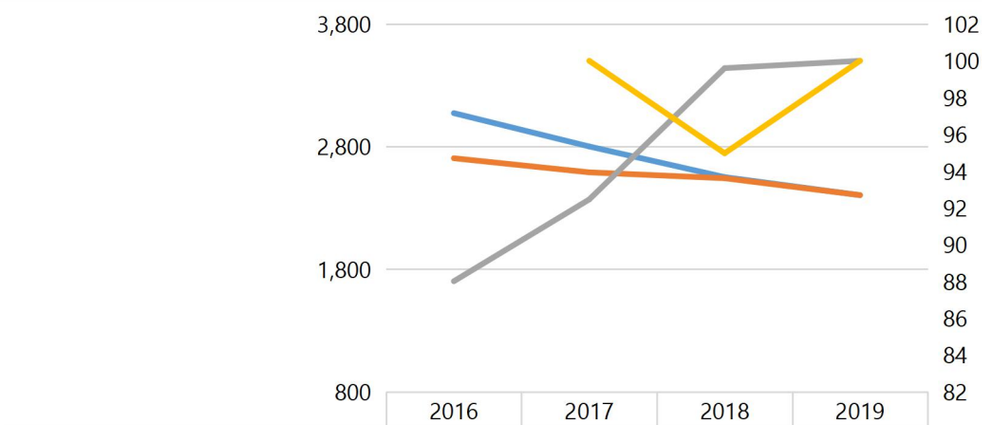

	2016	2017	2018	2019
Jumlah Ibu Bersalin	3,073	2,801	2,551	2,404
Jumlah Persalinan ditolong tenaga Kesehatan	2,705	2,590	2,542	2,404
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (%)	88.01	92.46	99.6	100
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)		100	94.97	100

Sumber : Profil Dinas Kesehatan 2016-2019; SIPD

Pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Ngada pada tahun 2019 mencapai 100%. Cakupan ini terus mengalami peningkatan dari 88% pada tahun 2016. Artinya, semua persalinan ditangani oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang memadai.

c) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Semua bayi baru lahir (neonatal usia 0-28 hari) wajib mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan tersebut berupa kunjungan neonatal oleh tenaga kesehatan minimal 3 kali untuk mendapatkan pelayanan esensial sesuai standar. Cakupan pelayanan kesehatan Neonatal di Kabupaten Ngada pada umumnya mencapai 90% dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang masih rendah adalah pada Inisiasi Menyusui Dini. Hal ini dikarenakan persalinan komplikasi saat ini belum memungkinan untuk dilakukan IMD.

Grafik 2. 34. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019

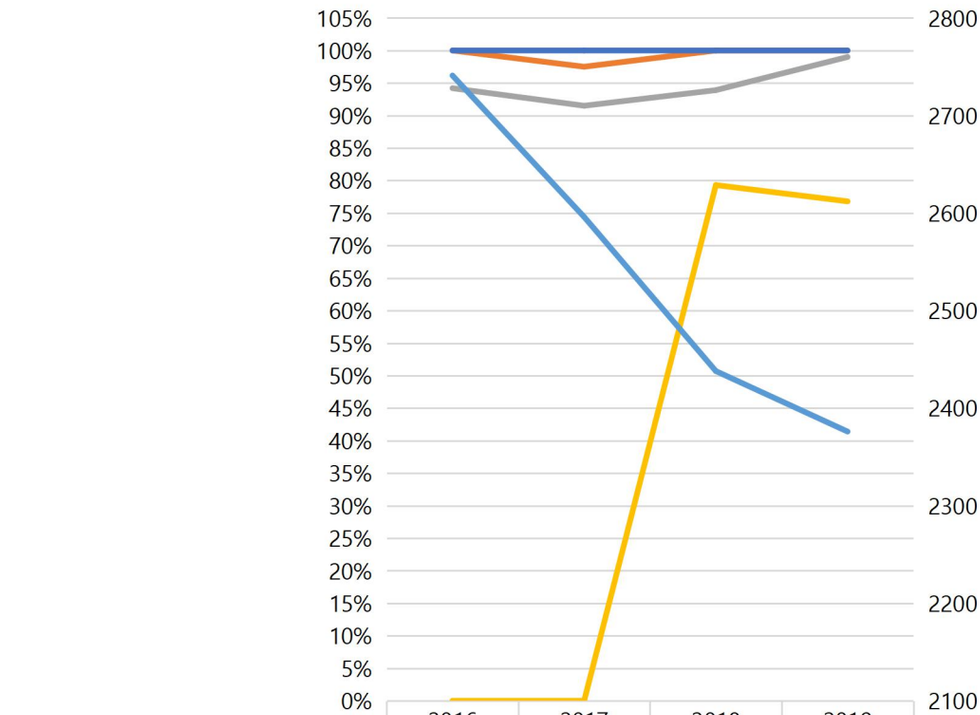

	2016	2017	2018	2019
Cakupan bayi baru lahir ditimbang	100%	97.50%	100%	100%
Cakupan bayi mendapatkan kunjungan Neonatus 3x (KN3)	94.20%	91.50%	93.90%	99%
Cakupan BBL mendapatkan IMD (Inisiasi Menyusui Dini)	0	0	79.30%	76.80%
Cakupan Komplikasi Neonatal yang ditangani	100%	100%	100%	100%
Jumlah Bayi Lahir Hidup	2741	2596	2438	2376

Sumber : Profil Dinas Kesehatan 2016-2019

d) Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan pada balita usia 0-59 bulan terdiri dari pelayanan kesehatan balita sehat dan pelayanan kesehatan balita sakit. Pelayanan kesehatan balita sehat sebagian besar dilakukan di Posyandu dengan imunisasi dan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK), sedangkan pelayanan kesehatan balita sakit di Puskesmas melalui poli MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) dan rujukan ke RSUD di poli anak oleh Dokter Spesialis Anak. Cakupan pelayanan kesehatan balita di Kabupaten Ngada dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 53. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019

No	Uraian	Capaian Kinerja Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Balita	12.958	12.703	12.315	11.948
2	Cakupan ASI Eksluif	95,36%	93,70%	96,90%	97,40%
3	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	89,07%	100%	100%	85,40%
4	Jumlah Desa Kelurahan UCI	136 ds	140 ds	148 ds	148 ds
5	Cakupan Balita (6-59 bulan) Mendapatkan Vitamin A	99,65%	90,59%	98,80%	99,20%
6	Cakupan balita ditimbang di Posyandu	82,79%	83,81%	93,50%	93,60%
7	Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah Pneuomina pada balita ditemukan	91 ks	91 ks	233 ks	116 ks
9	Cakupan penanganan balita pneumonia sesuai standar	100%	100%	100%	100%

Sumber : Profil Dinas Kesehatan 2016, 2017, 2018, 2019

Data di atas menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bayi sudah cukup bagus. Indikator yang masih jauh di bawah angka 100% adalah cakupan imunisasi dasar lengkap. Capaian pada indikator ini sangat menentukan kesehatan bayi selanjutnya sehingga ini menjadi faktor yang sangat menentukan. Oleh karena itu, capaian pada indikator ini perlu mendapatkan perhatian khusus.

e) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dilakukan melalui penjaringan kesehatan siswa SD/MI dan siswa SMP/MTS. Penjaringan kesehatan siswa dilakukan oleh Puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Kunjungan dilakukan oleh lintas program di Puskesmas meliputi penilaian status gizi siswa, pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indera, pelayanan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) dan penyuluhan/promosi kesehatan.

Grafik 2. 35. Cakupan Penjaringan Anak Usia Pendidikan Dasar

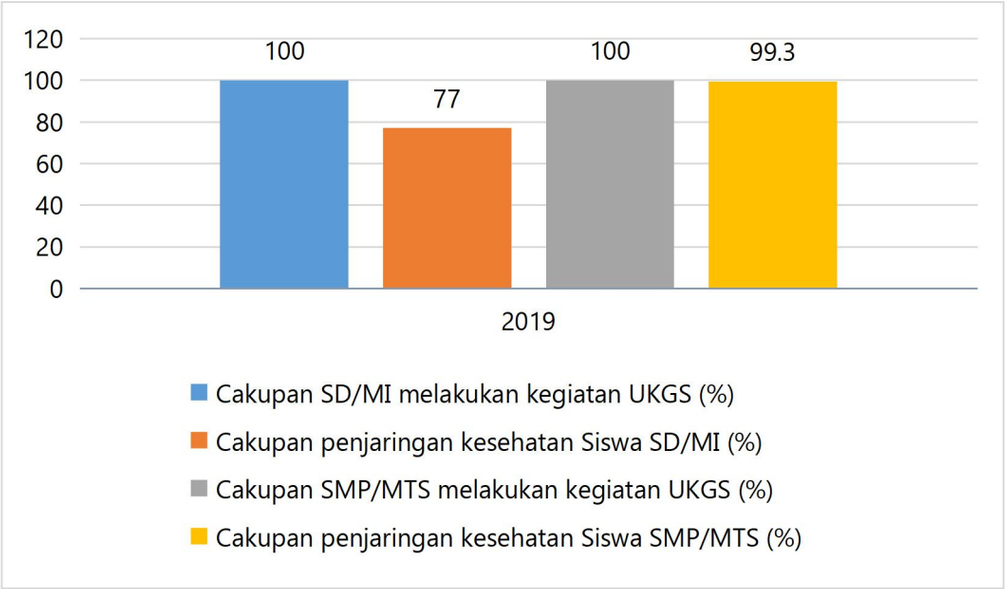

Sumber: Profil Kesehatan tahun 2016- 2019

Berdasarkan data di atas, cakupan penjaringan kesehatan anak masih timpang karena pada jenjang SD baru mencapai angka 77%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya tenaga kesehatan di Puskesmas atau akses yang sangat jauh dari pusat layanan kesehatan.

f) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Pelayanan kesehatan usia produktif difokuskan pada pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur, dan pelayanan skrining melalui kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan.

Tabel 2. 54. Capaian Kinerja Keluarga Berencana

No	Uraian	Capaian Kinerja Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PUS	19.891	19.943	18.726	18.787
2	PUS Peserta KB Aktif	10.409	10.118	10.518	11.088
3	Cakupan KB Aktif	52,33%	50,70%	56,20%	59%
4	Penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan	-	-	58,30%	70,09%

Sumber: Profil Kesehatan tahun 2016-2019

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan penggunaan KB aktif masih rendah. Artinya, jumlah pengguna KB masih cukup besar sehingga

masih banyak penduduk yang tidak ber-KB. Hal itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti layanan cakupan dan sosialisasi penggunaan KB yang belum komprehensif atau faktor lain seperti kesadaran masyarakat dalam penggunaan KB. Persoalan ini perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan karena sangat berpengaruh terhadap upaya pengendalian penduduk.

g) Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan usia lanjut dilaksanakan melalui posyandu lansia di beberapa desa/kelurahan, dan pelayanan kesehatan rutin di Puskesmas.

Grafik 2. 36. Capian Kinerja Pelayanan Penduduk Usia Lansia

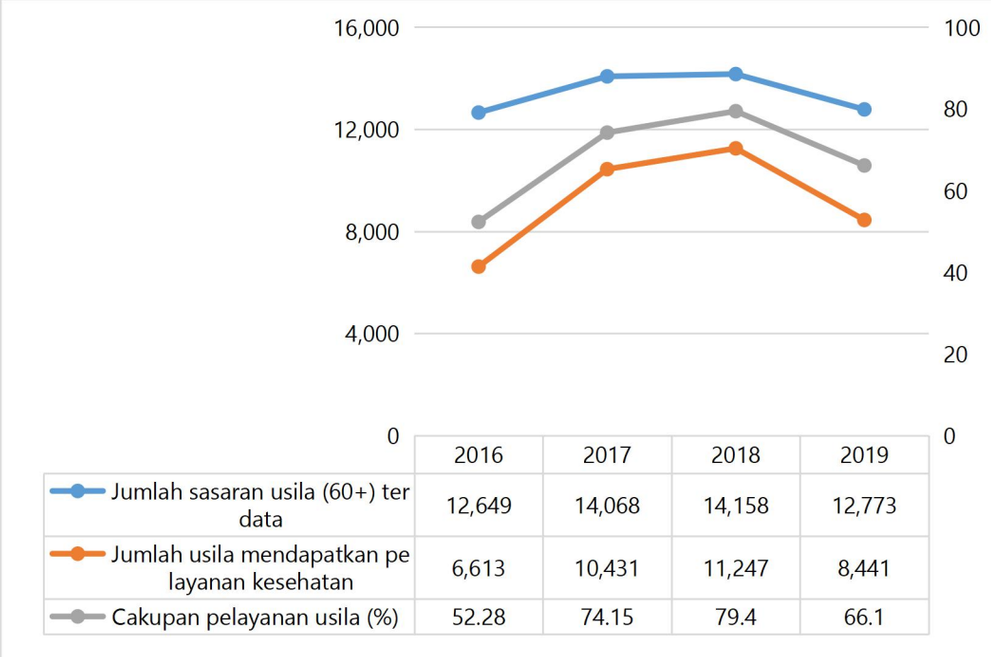

Sumber: Profil Kesehatan tahun 2016- 2019

Demikian halnya dengan capaian KB Aktif, cakupan pelayanan usia lanjut juga masih jauh dari angka 100%. Artinya, pelayanan lansia belum optimal dan belum mencapai standar pelayanan minimal sehingga masih banyak lansia yang belum terlayani. Hal ini tentu harus menjadi perhatian untuk diintervensi dalam periode perencanaan ke depan.

h) Pelayanan Penyakit Tidak Menular

Pelayanan kesehatan bagi penderita penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes mellitus dan kanker dilakukan di sarana kesehatan Puskesmas dan rujukan ke RSUD Bajawa. Pelayanan yang dilakukan adalah

pemeriksaan kesehatan rutin dan pengobatan rutin oleh dokter umum dan dokter spesialis.

Grafik 2. 37. Capaian Kinerja Pelayanan Penyakit Tidak Menular

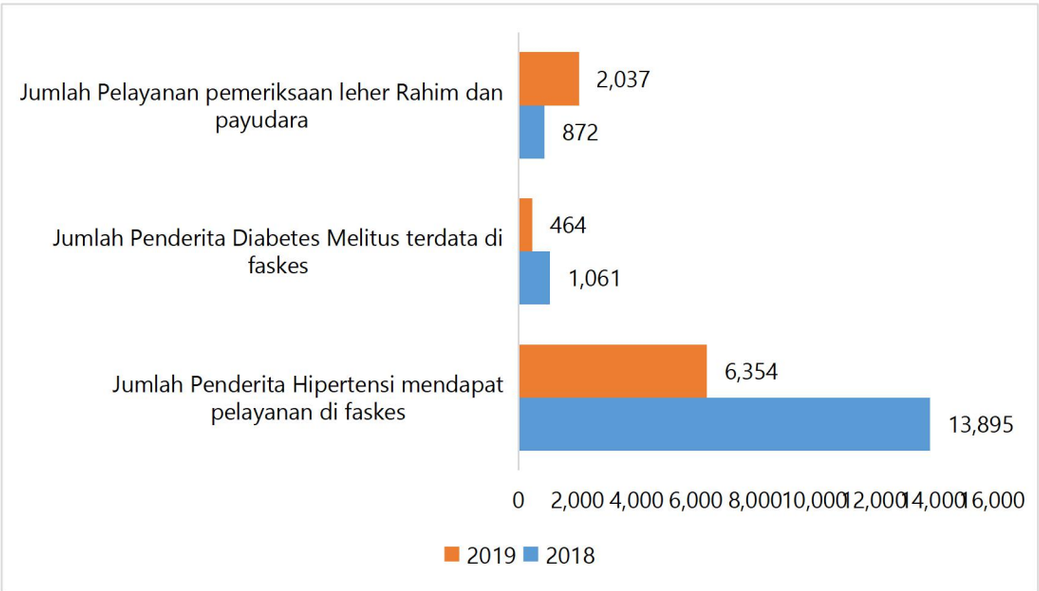

Sumber: Profil Kesehatan tahun 2016- 2019

Di Kabupaten Ngada, penderita penyakit tidak menular termasuk sangat tinggi sehingga pelayanan pada aspek ini sangat mendesak. Seperti ditunjukkan di atas, pelayanan untuk penderita penyakit tidak menular mengalami peningkatan setiap tahun meskipun tidak bisa dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk yang menderita PTM.

5. Penanganan Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Konvergensi pencegahan stunting adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama lintas sektor untuk percepatan penurunan*stunting*. Berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2013 prevalansi *stunting*(bayi/balita dengan status gizi pendek dan sangat pendek) di Kabupaten Ngada mencapai 62,3%. selanjutnya berdasarkan pendataan ePPGBM (Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik) tahun 2018 konvergensi *stunting* menurun mencapai 32,74% atau sebesar 29%.

Sejak awal tahun 2019 penanganan *stunting* dilakukan secara konvergensi melibatkan semua sektor terkait mulai dari pendataan status gizi balita di

posyandu oleh kader posyandu, tenaga kesehatan desa dan petugas gizi puskesmas; pembentukan kelompok tani, Kawasan Rawang Pangan Lestari (KRPL) untuk persiapan ketahanan pangan keluarga, sampai pada penyediaan akses air bersih di desa/keluarahan. Pada bulan Oktober 2019, hasil pengukuran ulang bayi balita didapatkan Balita stunting sebesar 15,48%, menurun secara drastis hampir setengahnya dibandingkan dengan persentase balita *stunting* tahun 2018.

Diakhir tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Ngada melalui Dinas Kesehatan juga telah mengadakan anthropometri kit (alat ukur panjang dan tinggi badan bayi/balita terstandar) untuk 19 Puskesmas dengan tujuan mengurangi *humaneror* pada saat pengukuran panjang badan dan tinggi badan bayi/balita. Pada Februari 2020 dilakukan pengukuran ulang panjang badan dan tinggi badan bayi dan balita dan didapatkan persentasi *stunting* di Kabupaten Ngada sebesar 18,96% atau sebanyak 2028 bayi/balita dengan status gizi pendek dan sangat pendek.

Upaya penurunan *stunting* dilakukan melalui 2 intervensi yaitu intervensi gizi *spesifik* dan intervensi *sensitif*. Intervensi spesifik dilakukan melalui program sektor kesehatan yang menyasar penyebab langsung seperti: asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular kekurangan nutrisi dan kesehatan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana serta SDM. Intervensi sensitif dilakukan melalui kegiatan diluar sektor kesehatan seperti akses air bersih, sanitasi, layanan keluarga berencana JKN, PAUD universal, ketahanan pangan dan perumahan yang sehat.

Beberapa Perangkat Daerah yang terlibat dalam aksi Konvergensi *stunting* yakni BPLitbang, Dinkes, Dinas PMD-P3A, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perumahan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas P2KB, Dinas sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dina PUPR dan PKK. Untuk memudahkan koordinasi telah dibentuk **Sekretariat Bersama Stunting** di bidang Sosial dan Budaya BP Litbang Kabupaten Ngada.

Tabel 2. 55. Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting 3 Tahun Terakhir Per Kecamatan di Kabupaten Ngada

No	Kecamatan	Jumlah Balita			Balita Stunting			Prevalensi stunting		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bajawa	1720	2076	2356	529	240	381	30.76	11.56	16.17
2	Golewa	738	1348	1249	241	136	127	32.66	10.09	10.17
3	Golewa Barat	418	762	828	153	206	250	36.60	27.03	30.19
4	Bajawa Utara	545	705	728	161	28	165	29.54	3.97	22.66
5	Jerebuu	485	459	478	156	87	77	32.16	18.95	16.11
6	Aimere	638	776	729	181	77	103	28.37	9.92	14.13
7	Soa	599	1078	907	109	139	180	18.20	12.89	19.85
8	Wolomeze	463	575	499	275	163	152	59.40	28.35	30.46
9	Riung	859	986	948	339	262	196	39.46	26.57	20.68
10	Riung Barat	586	806	751	216	140	223	36.86	17.37	29.69
11	Inerie	462	508	453	74	71	64	16.02	13.98	14.13
12	Golewa Selatan	702	812	772	256	137	110	36.47	16.87	14.25
TOTAL		**8215**	**10891**	**10698**	**2690**	**1686**	**2028**	**32.74**	**15.48**	**18.96**

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Ngada (EPPGBM) Tahun 2018, 2019 dan 2020 (data 2020 adalah keadaan Februari 2020).

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa Prevalensi Stunting mengalami penurunan di setiap kecamatan pada tahun 2019. Namun demikian, angka tersebut kembali mengalami kenaikan di tahun 2020 baik secara keseluruhan maupun per kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan stunting di tahun 2020 mengalami penurunan. Permasalahan ini tentu harus menjadi perhatian pada periode perencanaan berikutnya karena sifatnya sangat mendesak.

Percepatan penurunan kasus *stunting* di Kabupaten Ngada sejak tahun 2019 telah dilakukan melalui upaya terintegrasi. Selain intervensi sensitif dan spesifik yang menjadi tanggung jawab masing-masing sektor terkait, penanganan penurunan *stunting* juga dikontrol melalui 8 Aksi konvergensi sesuai Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stuting Terintegrasi di Kabupaten/Kota oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional tahun 2018.

Tabel 2. 56. Desa Lokasi Fokus Intervensi Stunting Di Kabupaten Ngada Tahun 2020 dan 2021.

No	Kecamatan	No	Desa/ Kelurahan Lokus	Prevalensi Stunting		Desa Lokus	
				2018	2020	2020	2021
1	Bajawa	1	Beiwali	19.84	33.33		√
		2	Faobata	65.56	8.33	√	
		3	Naru	59.17	10.92	√	
		4	Ubedolumolo I	45.71	16.05	√	
		5	Beja	3.85	25.64		√
		6	Bomari	55.36	23.33	√	
		7	Ubedolumolo	62.32	49.06	√	√
		8	Bela	50.91	32.08	√	√
		9	Boradho	14.89	26.83		√
		10	Langagedha	57.14	31.91	√	√
		11	Langagedha II		52.00		√
2	Golewa	12	Malanuza	60.61	7.81	√	
		13	Sarasedu I	68.09	8.33	√	
		14	Malanuza I	60.87	6.25	√	
		15	Dadawea	54.84	0.00	√	
		16	Were	52.38	0.00	√	
3	Golewa Barat	17	Bea Pawe	24.49	35.59		√
		18	Watunai	60.00	35.29	√	√
		19	Rakateda II	23.53	29.51		√
		20	Dizi Gedha	62.96	30.36	√	√
		21	Sobo	30.36	33.65		√
		22	Rakalaba	12.50	40.00		√
		23	Mangulewa	28.09	27.21		√
		24	Turekisa	39.47	27.41		√
4	Bajawa Utara	25	Waewea	21.62	27.66		√
		26	Inelika	16.00	29.51		√
		27	Nabelena	32.26	26.32		√
		28	Uluwae II	23.08	36.36		√
5	Jerebuu	29	Naruwolo I	51.35	13.95	√	
		30	Naruwolo	58.14	14.29	√	
6	Aimere	31	Legelapu	50.42	12.61	√	
7	Soa	32	Loa	10.00	38.10		√
		33	Masu Kedhi	24.49	25.00		√
8	Wolomeze	34	Turaloa	61.11	38.36	√	√
		35	Mainai	54.02	24.42	√	
		36	Denatana	64.71	34.62	√	√
		37	Nginamanu	61.48	31.01	√	√
		38	Nginamanu Selatan	52.00	36.36	√	√
		39	Nginamanu Barat	59.46	33.33	√	√
		40	Wue	80.95	20.97	√	
		41	Denatana Timur	55.00	28.95	√	√
9	Riung	42	Taenterong	48.48	57.14		√
		43	Rawangkalo	55.38	42.22	√	√
		44	Wangka	62.81	31.58	√	√
		45	Wangka Selatan	44.19	41.57		√
		46	Taenterong I	6.45	35.48		√

No	Kecamatan	No	Desa/ Kelurahan Lokus	Prevalensi Stunting		Desa Lokus	
				2018	2020	2020	2021
		47	Taenterong II	56.00	34.62	√	√
10	Riung Barat	48	Wolomeze	36.36	31.17		√
		49	Lanamai	24.44	27.27		√
		50	Ngara	35.59	28.57		√
		51	Ria I	27.66	26.92		√
		52	Wolomeze I	48.57	45.45		√
		53	Benteng Tawa	47.17	42.61		√
		54	Benteng Tawa I	64.86	29.89	√	√
11	Inerie	55	Tiwurana	35.29	26.32		√
		56	Legeriwu	0.00	25.00		√
12	Golewa Selatan	57	Bawarani	52.17	9.52	√	
		58	Wogowela	54.84	17.86	√	
		59	Watusipi	54.55	20.00	√	
		60	Boba	67.44	19.44	√	
		61	Boba I	20.93	27.27		√
		62	Radamasa	59.38	14.89	√	
	Jumlah					**34**	**43**

Dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, Tim Konvergensi telah menentukan desa lokasi fokus penurunan *stunting* di Kabupaten Ngada untuk tahun 2020 dan 2021. Penentuan desa lokasi fokus dilakukan pada aksi 1, 2 dan 3 konvergensi *stunting* dengan mengananalisa data *stunting* per desa. Kemudian, desa lokasi fokus (desa lokus) ini dituangkan ke dalam SK Bupati Ngada. Pada tahun 2020 disepakati ada 34 desa lokus intervensi *stunting*, yaitu desa-desa dengan prevalensi *stunting* di atas 50%. Sedangkan untuk perencaaan tahun 2021, sesuai data prevalensi *stunting* terakhir ditetapkan 43 desa lokus intervensi *stunting* yaitu desa dengan prevalensi *stunting* di atas 25%. Berbagai upaya tersebut merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam mengurangi prevalensi balita gizi buruk

2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rumpun urusan pemerintah daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Rumpun urusan ini terdiri dari beberapa urusan yang meliputi jalan dan jembatan, irigasi, serta drainase. Oleh karena itu, analisis capaian kinerja rumpun urusan bidang infrastruktur dapat dilihat dari ketersedian dan kualitas masing-masing aspek sub-bidang infrastruktur.

1. Jalan dan Jembatan

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai penghubung antar daerah. Jalan ini penting untuk meningkatkan perekonomian didaerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat serta orang/penumpang. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Total panjang jalan Kabupaten Ngada hingga tahun 2019 mencapai 1.042 km. Total panjang jalan Kabupaten Ngada mengalami stagnasi selama tahun 2016 hingga tahun 2019. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh kurang optimalnya perencanaan pembangunan jalan kabupaten. Selain itu, analisis kondisi jalan di Kabupaten Ngada dapat dilihat pada Tabel 2.65

Tabel 2. 57. Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi dan Jalan Kewenangan Kabupaten Tahun 2016 - 2019

Kondisi	2016		2017		2018		2019	
	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
Jalan Kewenangan Provinsi *)								
Baik	159.52	61.24%	166.81	64.04%	115.61	58.03%	104.34	52.37%
Sedang	22.97	8.82%	22.97	8.82%	3.80	1.91%	25.96	13.03%
Rusak	14.76	5.67%	14.53	5.58%	31.98	16.05%	27.63	13.87%
Rusak Berat	63.25	24.28%	56.18	21.57%	47.85	24.02%	41.31	20.73%
Total	**260.50**	**100.00%**	**260.49**	**100.00%**	**199.24**	**100.00%**	**199.24**	**100.00%**
Jalan Kewenangan Kabupaten **)								
Baik	337.72	32.41%	337.72	32.41%	449.62	43.15%	404.15	38.79%
Sedang	72.09	6.92%	72.09	6.92%	74.37	7.14%	93.27	8.95%
Rusak	87.46	8.39%	87.46	8.39%	89.51	8.59%	98.52	9.45%
Rusak Berat	544.73	52.28%	544.73	52.28%	428.51	41.12%	446.06	42.81%
Total	**1.042**	**100.00%**	**1.042**	**100.00%**	**1.042**	**100.00%**	**1.042**	**100.00%**

*Sumber: *) Provinsi NTT Dalam Angka**) Kabupaten Ngada Dalam Angka Tahun 2021 dan SIPD Tahun 2019*

Panjang jalan dengan kondisi baik terus mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga 2018. Namun mengalami penurunan sebesar 4,36 persen pada tahun 2019. Kondisi ini sejalan dengan panjang jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat yang mengalami peningkatan pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Pada tahun 2019, kondisi jalan mantap mencakup 47,74 persen

dari total panjang jalan di Kabupaten Ngada. Namun demikian, masih terdapat 52,26 persen jalan dengan kondisi rusak, yang terdiri dari 42,81 persen jalan dengan kondisi rusak berat dan 9,45 persen jalan dengan kondisi rusak. Data tersebut mengindikasikan bahwa kualitas jalan yang telah terbangun belum optimal. Salah satu penyebab masalah tersebut adalah upaya rehabilitasi dan pemeliharaan jalan yang belum optimal di setiap tahunnya. Selain itu, pengawasan penggunaan jalan juga belum dapat dilakukan dengan maksimal.

Tabel 2. 58. Panjang Jalan dan Jenis Permukaan Jalan Kewenangan Provinsi dan Jalan Kewenangan Kabupaten Tahun 2016 - 2019

Uraian	2016		2017		2018		2019	
	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
Panjang Jalan dan Jenis Permukaan Jalan Kewenangan Provinsi *)								
Aspal	225.18	86%	229.31	88%	191.14	96%	191.14	96%
Tidak diaspal	35.31	14%	31.18	12%	8.10	4%	8.10	4%
Total	**260.49**	**100%**	**260.49**	**100%**	**199.24**	**100%**	**199.24**	**100%**
Panjang Jalan dan Jenis Permukaan Jalan Kabupaten **)								
Aspal	370.02	35.52%	368.65	35.39%	466.99	44.82%	435.95	41.84%
Kerikil	218.97	21.02%	218.97	21.02%	192.90	18.51%	217.68	20.89%
Tanah	452.62	43.45%	452.62	43.45%	377.71	36.25%	384.89	36.94%
Lainnya	-	0.00%	1.37	0.13%	4.41	0.42%	3.48	0.33%
Total	**1.042**	**100%**	**1.042**	**100%**	**1.042**	**100%**	**1.042**	**100%**

*Sumber Data: *) Provinsi NTT Dalam Angka**) Kabupaten Ngada Dalam Angka Tahun 2021 dan SIPD Tahun 2019*

Berdasarkan jenis permukaan jalan, jalan kabupaten terjadi penurunan panjang jalan aspal dari 466,99 km ditahun 2018 menjadi 435,96 km ditahun 2019. Hal ini sejalan dengan data panjang jalan kondisi baik yang mengalami penurunan di tahun yang sama. Panjang jalan kerikil mengalami peningkatan dari 192,90 km ditahun 2018 menjadi 217,68 km ditahun 2019. Begitupun panjang jalan tanah dari 377,71 km ditahun 2018 menjadi 384,89 km ditahun 2019. Kondisi jalan rusak ringan maupun rusak berat membutuhkan penanganan yang serius mengingat kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus barang dan jasa yang mendorong stabilitas dan mengurangi disparitas harga antar daerah serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, kualitas jembatan merupakan indikator penting dalam menganalisis kinerja pekerjaan umum dan penataan ruang. Kondisi jembatan di Kabupaten Ngada juga merupakan indikator yang krusial dalam menentukan kualitas keterhubungan antar wilayah baik di dalam maupun keluar Kabupaten Ngada. Berikut ini merupakan perkembangan kondisi jembatan di Kabupaten Ngada.

Tabel 2. 59. Kondisi Jembatan di Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik (m)	948,60	1050,20	1143,00	1182,40	1265,60

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Ngada, 2021

Kondisi jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Ngada meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020), rata-rata peningkatan proporsi jembatan dalam kondisi baik tersebut mencapai 7,51 persen. Kondisi ini mengindikasikan kualitas keterhubungan antar daerah dalam Kabupaten Ngada sudah cukup baik. Faktor yang perlu ditingkatkan salah satunya adalah upaya rehabilitasi dan pemeliharaan jembatan terbangun.

2. Irigasi

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Sarana pertanian juga menjadi faktor utama dalam menciptakan ketahanan pangan. Salah satu sarana pertanian adalah irigasi yang berfungsi untuk menambah kekurangan air pada lahan pertanian dan juga dapat meningkatkan kesuburan tanah. Kinerja aspek pembangunan irigasi Kabupaten Ngada selama kurun waktu 2016-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.60.

Tabel 2. 60. Capaian Kinerja Pembangunan Irigasi Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	**Presentase saluran Irigasi dalam kondisi baik**	60,02%	70,84%	74,20%	71,51%	74,35%
a	Luas irigasi kabupaten dalam	2.581	2.757	2.922	3.075	3.197

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
	kondisi baik					
b	Luas irigasi kabupaten	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2	**Rasio jaringan irigasi**	1,6	2,1	2,7	3,3	3,0
a	Panjang saluran irigasi (m)	10.724	13.950	18.268	21.703	21.703
b	Luas lahan budidaya pertanian*(ha)	6.651	6.695	6.695	6.589	7.260
3	**Panjang saluran drainase (m)**	4.664	6.664	8.326	10.495	10.495

*Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Ngada dan *BPS Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020*

Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Ngada mengalami fluktuasi selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Namun jika dilihat dari indikator luas irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Rata-rata peningkatan tersebut mancapai 5,50 persen.Kondisi tersebut sejalan denganpanjang saluran irigasi terus meningkat seiring dengan bertambahnya luas lahan budidaya pertanian.

Panjang drainase di Kabupaten Ngada terus mengalami peningkatan pada tahun 2016 hingga 2019. Selain itu, dalam kurun waktu empat tahun panjang drainase meningkat lebih dari 50 persen. Hal ini mengindikasikan saluran pembuangan air di Kabupaten Ngada terus mengalami perbaikan. Di samping itu, kondisi ini mengindikasikan semakin meningkatnya ketersediaan infrastruktur pengendali bencana banjir di Kabupaten Ngada. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur, seperti sistem drainase tersebut dapat mencegah kelebihan air yang mengikis lapisan tanah dan memicu terjadinya banjir dan genangan. Salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian adalah upaya rehabilitasi dan pemeliharaan drainase terbangun, sehingga dapat berfungsi dengan optimal.

2.3.1.4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan dan permukiman akan mengikutsertakan banyak aspek karena harus dilakukan dalam suatu kerangka perencanaan pembangunan terpadu dengan sektor-sektor lain. Penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman dilaksanakan agar masyarakat dapat mempunyai tempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Capaian kinerja

urusan perumahan rakyat dan permukiman dapat dilihat dari beberapa indikator pada Tabel 2.69.

Tabel 2. 61. Capaian Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Cakupan ketersediaan rumah	na	73%	76%	78%
	Jumlah Rumah Layak huni	na	19.906	20.711	21.239
	Jumlah Rumah		27.198	27.198	27.198
2	Rasio Permukiman layak huni	na	73%	73%	81%
	Luas Permukiman layak huni	na	141	141,9	156,8
	luas wilayah permukiman	na	194	194	194
3	Luas Lingkungan permukiman kumuh	na	27	93	0
4	Pengguna Air				
	Rumah Tangga pengguna air bersih	46.953	48.999	51.820	56.465
5	Jumlah sambungan RT	8.021	8.683	9.178	10.057
	SPAM IKK	233	305	81	957
	PDAM	7.788	8.378	9.097	9.100
6	Rumah Tangga Pengguna Listrik (RT)	23.703	26.443	-	-
7	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	33,83	75,52	75,52	74,73
	Rumah Tangga bersanitasi (RT)	12.261	26.281	26.281	27.081
	Jumlah Rumah	36.235	36.235	36.235	36.235

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, PDAM Ngada Tahun 2016-2020

Rumah layak huni di Kabupaten Ngada dari tahun 2016 hingga tahun 2019 terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2017 rumah yang masuk dalam kategori rumah layak huni mencakup 73% dan meningkat pada tahun 2019 yang mencakup 78%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 22% (5.959 unit) yang perlu mendapat perhatian dan penanganan dari pemerintah. Begitu juga dengan Rasio permukiman layak huni tahun 2017 mencapai 73% meningkat ditahun 2019 mencapai 81 %. Disisi lain untuk persentase lingkungan permukiman kumuh sampai dengan tahun 2019 sudah 0 yang berarti luas lingkungan kumuh sudah tertangani dengan baik melalui program Kotaku yang diatur dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Selanjutnya untuk rumah tangga pengguna air bersih dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan pada sambungan PDAM. Sambungan PDAM terus mengalami peningkatan ditahun 2016 sebanyak 8021 SR meningkat tahun 2019 menjadi 10.057 SR. Namun sambungan rumah tangga yang terdiri dari SPAM IKK mengalami fluktuasi. Terkait dengan sanitasi, dengan adanya Program STBM, rumah tangga bersanitasi terus meningkat di tahun 2016 jumlah rumah bersanitasi 12.261 rumah atau 33%, dan meningkat di tahun 2019 menjadi 27.081 rumah bersanitasi atau 74,73% dari jumlah rumah 36.235 unit.

Terkait dengan kelistrikan, Rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2016 mencakup 68,15 persen meningkat ditahun 2017 menjadi 76,03 persen. Pada Tahun 2018 dan 2019 tidak dilakukan kerjasama dengan Pihak PLN karena kekurangan sumber daya listrik, diharapakan tahun 2021 dan seterusnya PLT Geothermal Daratei bisa mengatasi masalah kekurangan daya listrik di Kabupaten Ngada.

Energi listrik yang digunakan di Kabupaten Ngada bersumber dari pembangkit tenaga mikrohydro (PLTMH Waeroa dengan kapasitas 60 KW yang berlokasi di Kecamatan Jerebuu dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPb) Mataloko dengan kapasitas terpakai 1 X 1,8 MW yang berlokasi di Kecamatan Golewa serta PLTD Faobata dengan daya 5.500 KW yang berlokasi di Kecamatan Bajawa. Gardu Induk Bajawa memeliki kapasitas sebesar 20 MW dan tegangan 70/20 KV yang berlokasi di Kecamatan Bajawa. Energi listrik yang tersedia dihubungkan melalui jaringan Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUT) dengan tegangan sebesar 150 KV yang menghubungkan kota Bajawa- Ruteng-Labuan Bajo kemudian jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan sebesar 70 KV yang menghubungkan PLTU Ulumbu Ruteng- Bajawa dan Bajawa-Ende.

2.3.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja (PolPP). PolPP memiliki peran untuk menegakan aturan atau regulasi di daerah seperti

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Selain itu, instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri secara implisit mengatur juga tentang penanganan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah yang secara substansi perlu diperankan oleh Polisi Pamong Praja. Dalam hal tersebut tugasnya meliputi antisipasi menjelang diadakannya pemilihan, diarahkan pada operasi simpatik dan menghindarkan operasi yang dapat menimbulkan kontra produktif dalam penciptaan ketentraman dan ketertiban umum.

Keberadaan aparat Polisi Pamong Praja guna mendukung upaya penanganan sengketa penegakan Peraturan Daerah terutama Perda yang berlaku dan mengikat bagi semua masyarakat. Jumlah Aparat dan Petugas SatPolPP dan Linmas serta Jumlah Penyelesaian Kasus dari Tahun 2015-2019 dapat digambarkan berdasarkan beberapa indikator pada tabel berikut :

Tabel 2. 62. Capaian Kinerja Urusan Ketentraman,Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ngada Tahun 2015-2019

No	Uraian	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	**Aparat dan Petugas Keamanan,Ketertiban dan Ketentraman**					
a	Jumlah POLPP	124	119	117	111	109
	ASN	63	58	56	50	48
	Kontrak	61	61	61	61	61
b	Jumlah Aparat dan Petugas Linmas	498	498	498	498	1669
	Aparat Linmas	164	164	164	164	159
	Petugas Linmas	334	334	334	334	1510
2	**Penyelesaian Kasus Pelanggaran K3 dan PERDA**					
a	Jumlah Pelanggaran K3 yang diselesaikan	24	35	12	20	144
b	Jumlah kasus Pelanggaran Perda yang diselesaikan	10	12	8	10	7

Sumber : Dinas SatPol-PP dan Kebakaran Kabupaten Ngada, Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah personil SatPolPP dari tahun 2015-2019 cenderung menurun dengan total penurunan sebanyak 15 personil. Penurunan tersebut daikibatkan berkurangnya jumlah personil dari ASN. Sedangkan petugas Linmas Kabupaten Ngada dari tahun 2015-2018 tidak ada perekrutan namun berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Pasal (11) point (d) bahwa anggota Linmas di setiap Desa minimal sebanyak 10 orang sehingga

meningkat dari 498 orang menjadi 1669 orang yang bertugas membantu dalam penanggulangan bencana, membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu dan membantu upaya pertahanan negara.

Selain itu, capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang berkaitan dengan jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan meningkat secara drastis yaitu sebanyak 124 kasus pada 2019. Sedangkan jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan pada tahun 2019 jumlahnya cenderung fluktuatif dari tahun 2015 hingga tahun 2019 dan menurun sebanyak 3 kasus pada tahun 2019.

2.3.1.6. Urusan Sosial

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri,sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Capaian penyelenggaraan pelayanan sosial dapat digambarkan melalui analisis terhadap perkembangan jumlah Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berikut ini merupakan perkembangan jumlah PMKS di Kabupaten Ngada.

Tabel 2. 63. Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Ngada Tahun 2016 - 2019

No	Uraian	Capaian Kinerja tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Anak korban kekerasan seksual	0	21	0	13
2	Lanjut usia terlantar	106	1.911	1,936	1.735
3	Komunitas adat terpencil	50	250	250	425
4	Penyandang Cacat	257	228	-	666
	Tuna rungu		-	-	48
	Fisik	na	-	-	618
5	Sakit Jiwa	na	223	223	17
6	Tuna susila	-	-	-	0
7	Bekas Narapidana	0	149	149	149
8	Penderita HIV/AIDs	na	138	188	188
9	Pecandu Narkoba	na	0	0	0
10	Fakir miskin	na	56.613	63.148	64.743
11	Bayi telantar	na	394	-	405

No	Uraian	Capaian Kinerja tahun			
		2016	2017	2018	2019
12	Anak terlantar	12	506	585	585
13	Anak korban kekerasan Lingkungan Rumah	20	0	0	40
	Jumlah	**445**	**60.205**	**66.479**	**68.966**

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Ngada, Tahun 2016-2020

Secara umum jumlah PMKS Kabupaten Ngada mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Ngada didominasi oleh golongan fakir miskin dan lanjut usia terlantar. Peningkatan jumlah PMKS diakibatkan oleh belum optimalnya cakupan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Ngada. Permasalahan tersebut salah satunya disebabkan oleh ketersediaan data PMKS terpilah yang masih belum optimal.

2.3.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Urusan tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting untuk meingkatkan kompetensi dan sumber daya manusia dalam hal ketenagakerjaan maupun peran yang lebih luas sebagai katalisator pembangunan nasional. Pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Beberapa indikator urusan tenaga kerja Kabupaten Ngada dari tahun 2016-2019 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 38. Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019

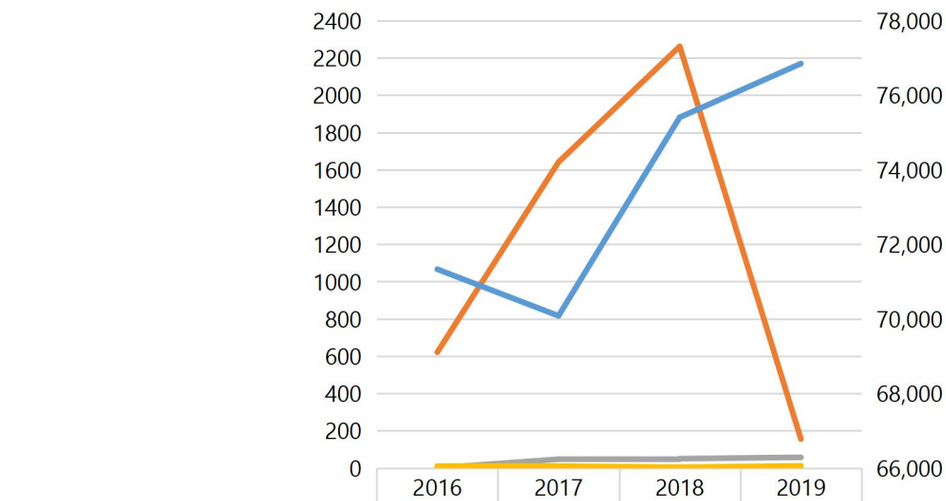

	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pencari kerja	621	1,641	2,262	155
Pencari Kerja yang ditempatkan*	0	47	50	57
Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja*	10	10	4	11
Jumlah Angkatan Kerja	71,331	70,081	75,407	76,849

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, BPS Ngada Tahun 2016-2019

Dari tabel di atas keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Ngada menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 6.768 orang sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Sementara jumlah pencari kerja terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2018 dan menurun secara signifikan sebanyak 2.107 orang pada tahun 2019. Hal ini terjadi karena menurunnya minat kerja yang diakibatkan sebagian masyarakat mulai memiliki kesadaran untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, lapangan pekerjaan satu-satunya yang diminati hanya PNS, sementara itu selama 5 tahun tidak ada penerimaan CPNS untuk seluruh Indonesia, serta faktor lain yang mempengaruhi adalah lemahnya kreatifitas para pencari kerja untuk membuka usaha sendiri.

Sementara itu, jumlah pencari kerja yang ditempatkan dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan dengan total peningkatan sebanyak 10 pencari kerja. Pada tahun 2019, terdapat 57 pencari kerja yang ditempatkan dengan rincian Koperasi Setyawan 6 orang, Sangosai 22 orang, Pintu air 5 orang, Handayani 16 orang dan Bank NTT 8 orang.

Indikator lain yang menunjukan capaian urusan di bidang ketenagakerjaan yaitu angka sengketa pengusaha dan pekerja yang cenderung fluktuatif dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Total terdapat 35 kasus sengketa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dengan kasus terbanyak pada tahun 2019 sebanyak 11 kasus. Mayoritas kasus sengketa diakibatkan oleh terkait keterlambatan pembayaran upah kerja karyawan dan kasus ini langsung ditangani oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan melakukan pertemuan Bipatrit yakni menghadirkan para pelapor dan terlapor, sehingga kasus tersebut tidak dilanjutkan karena hukum. Selain kasus yang berkaitan dengan upah tenaga kerja, masalah perdagangan orang *(human traficking)* di Kabupaten Ngada juga tidak lepas dari perhatian pemerintah yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan orang.

2.3.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Upaya pemberdayaan perempuan memiliki agenda pembangunan yang penting yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, dan meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan. Sedangkan upaya perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya. Gambaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Ngada dari tahun 2016 sampai tahun 2019 diuraikan pada grafik berikut:

Grafik 2. 39. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019

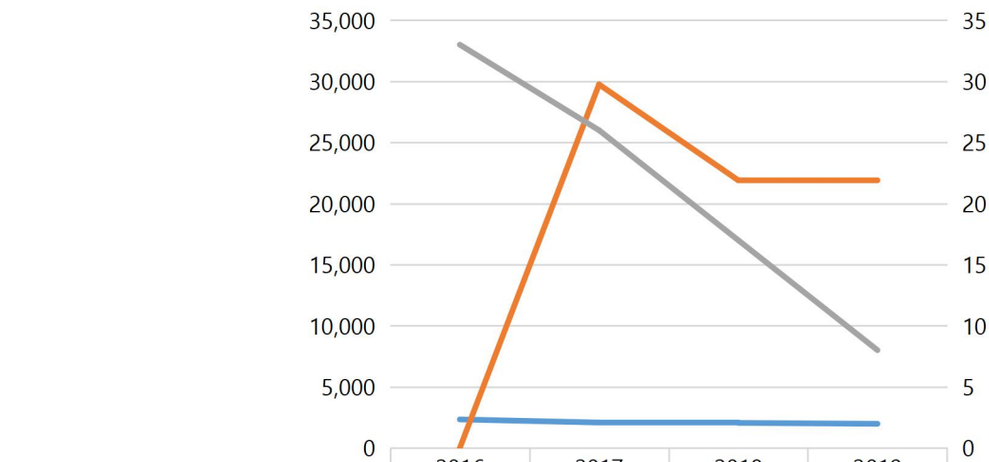

	2016	2017	2018	2019
Jumlah perempuan di lembaga pemerintah*	2,330	2,078	2,048	1,975
Jumlah perempuan di lembaga swasta	0	29,750	21,903	21,903
Kasus KDRT	33	26	17	8

*Sumber data : Dinas PMDP3A dan *BPS Kabupaten Ngada,Tahun 2016-2019*

Jumlah perempuan yang berada di lembaga pemerintah terus mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2019 dengan total penurunan sebanyak 355. Begitupun dengan jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta yang cenderung menurun drastis dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dengan total penurunan sebanyak 7.847. Penurunan ini menunjukan berkurangnya peran perempuan yang bekerja baik pada sektor publik maupun privat sehingga perlu kembali adanya akselarasi untuk meningkatkan jumlah dan peran perempuan yang bekerja untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan perempuan.

Sedangkan kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Ngada menunjukan kinerja yang cukup baik dengan tren yang terus menurun dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Kasus KDRT mengalami penurunan rata-rata per tahun sebanyak 6,25 kasus.

Grafik 2. 40. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019

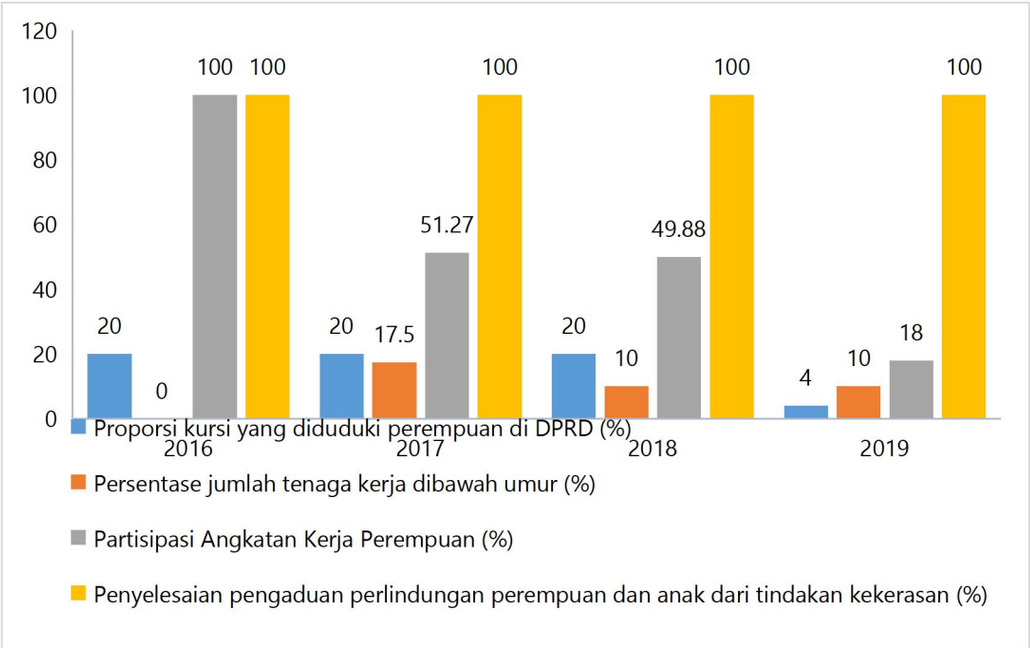

*Sumber data : Dinas PMDP3A dan *BPS Kabupaten Ngada,Tahun 2016-2019*

Proposi DPRD yang diduduki oleh perempuan cenderung stagnan selama tahun 2016 hingga tahun 2018 tetapi mengalami penurunan yang signifikan sebanyak 16% pada tahun 2019. Sedangkan partisipasi angkatan kerja perempuan dari tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung menurun signifikan dengan total penurunan sebanyak 82%. Hal tersebut harus menjadi perhatian berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah untuk meningkatkan peran perempuan dalam aktivitas perekonomian serta dalam aktivitas pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif.

Dari urusan perlindungan anak, kinerja capaian urusan tersebut bisa dilihat dari persentase tenaga kerja di bawah umur yang terus mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2018. Selama 3 tahun terakhir, terjadi penurunan sebanyak 7,5% tenaga kerja di bawah umur dengan data terakhir pada tahun 2019 menunjukan masih ada sebanyak 4% tenaga kerja di bawah umur dari total tenaga kerja yang ada di Kabupaten Ngada.

Selain itu, kekerasan yang terjadi baik terhadap perempuan maupun anak di Kabupaten Ngada pada tahun 2016 hingga tahun 2019 seluruhnya selalu bisa terselesaikan atau tertangani. Namun demikian, masih perlu ditinjau kembali melalui capaian jumlah kekerasan yang terjadi pada

perempuan maupun anak apakah jumlahnya setiap tahun meningkat atau cenderung menurun.

2.3.2.3. Urusan Pangan

Kinerja ketahanan pangan dilihat dari tiga aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar, yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan. Pemerintah Kabupaten Ngada, melalui Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan mengembangkan model Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Lumbung Tanah telah mendorong ketersediaan pangan Kabupaten Ngada yang membaik dari tahun ke tahun.

1. Ketersediaan Pangan

Kabupaten Ngada memiliki tanaman pangan utama berupa beras dan jenis tanaman pangan lain seperti jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Produksi beras dan jagung mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Namun hal tersebut berbeda dengan produksi ubi kayu dan ubi jalar yang mengalami penurunan. Kondisi capaian urusan pangan nabati Kabupaten Ngada dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 41. Capaian Kinerja Urusan Pangan Nabati Tahun 2016-2019

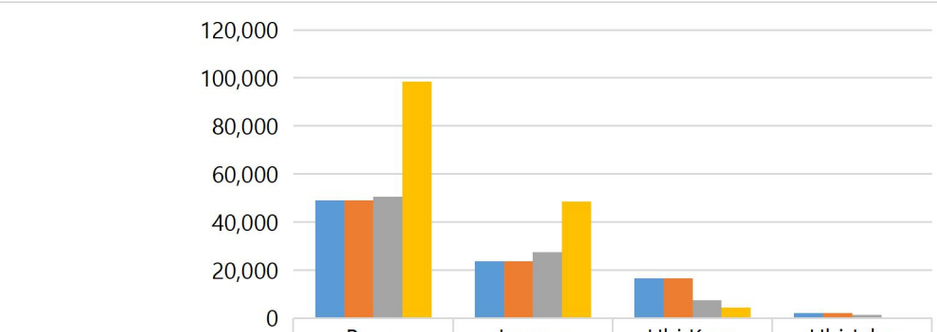

	Beras	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar
Tahun 2016 (Ton/liter/Kg)	48,982	23,670	16,569	2,270
Tahun 2017(Ton/liter/Kg)	48,982	23,670	16,569	2,270
Tahun 2018 (Ton/liter/Kg	50,669	27,638	7,638	1,559
Tahun 2019 (Ton/liter/Kg	98,564	48,593	4,635	237

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada , Tahun 2016- 2020

Sedangkan produksi komoditas pangan hewani pada tahun 2016 hingga tahun 2021 Kabupaten Ngada dapat dilihat pada grafik berikut. Komoditas daging ayam mengalami tren yang stabil, sedangkan komoditas ikan dan daging sapi dan kerbau mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2019.

Grafik 2. 42. Produksi Komoditas Pangan Hewani Tahun 2016-2019

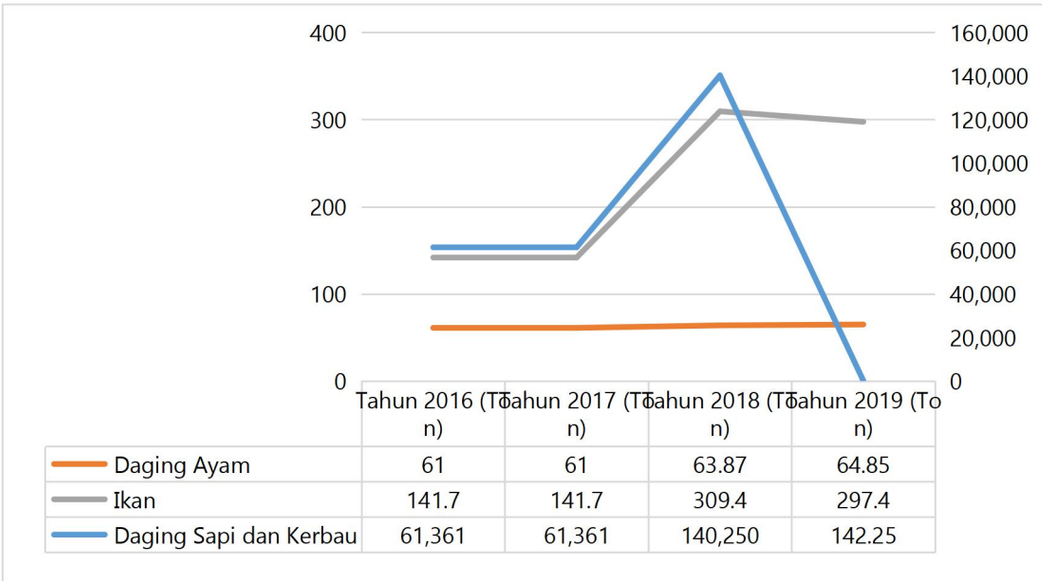

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabuaten Ngada Tahun 2016-2020

Persoalan ketersediaan pangan utama yang belum optimal disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah belum optimalnya stok cadangan pangan utama dan masih kurangnya lumbung pangan serta sarana pendukungnya. Stok cadangan pangan dan akses distribusi pangan juga perlu mendapat perhatian.

2. Konsumsi Pangan

Konsumsi pangan merupakan jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu. Energi konsumsi Kalori Kabupaten Ngada Tahun 2019 sebesar 5.308 Kkal/kapita/hari dan angka ini berada diatas Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 Kkal/kapita/hari. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada bahwa data yang ada hanya tahun 2019 karena ditahun-tahun sebelumnya tidak dilakukan analisa penyediaan data.

2.3.2.4. Urusan Pertanahan

Penataan pertanahan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang pembangunan Kabupaten Ngada.Gambaran kinerja Urusan Pertanahan dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 64. Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2016-2019

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
Pertanahan				
1	**Persentase Penyelesaian tanah negara**	**20**	**20**	**42,85**
	Jumlah kasus yang diselesaikan	2	1	3
	Jumlah kasus yang terdaftar	10	5	7
2	**Persentase Penyelesaian izin Lokasi**	**118,9**	**141,8**	**102,6**
	Jumlah ijin lokasi	132	268	277
	Permohonan Ijin Lokasi	111	189	270

Sumber : Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2016-2019.

Capaian kinerja pertanahan dari tahun 2016 -2019 terus mengalami peningkatan.Pada tahun 2019, indikator persentase penyelesaian tanah negara mengalami peningkatan sekitar dua kali lipat dari pada tahun 2018. Sementara itu, persentase penyelesaian izin lokasi juga telah mencapai target maksimal yaitu lebih dari 100% setiap tahunnya. Meskipun demikian, luas lahan bersertifikat mengalami penurunan.Pada tahun 2016 luas lahan bersertifikat mencapai 888,58 m menurun menjadi 382,94 m pada tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya minat masyarakat untuk mengurus proses pensertifikatan tanah.

2.3.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

Pembangunan infrastruktur perkotaan dan perdesaan harus selalu memperhitungkan dampak terhadap lingkungan sehingga tercipta pembangunan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus menimbulkan degradasi lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan berfokus pada upaya pengendalian pencemaran lingkungan baik sampah, air limbah, maupun polusi udara, serta peningkatan perlindungan terhadap kawasan lindung dan konservasi. Capaian kinerja

pada urusan lingkungan hidup dapat digambarkan melalui beberapa indikator berikut ini:

1. **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup antara lain:

- Memberikan informasi kepada pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerahsebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup .

IKLH merupakan indikator komposit yang terdiri dari tiga indikator pembentuk yaitu:

a) Indeks Kualitas /Pencemaran air
b) Indeks Kualitas /Pencemaran Udara
c) Indeks Tutupan Hutan /Lahan

Perhitungan IKLH dilakukan sejak tahun 2009 , namun hingga saat ini telah melakukan beberapa kali penyesuaian.Perbedaan terletak pada cara perhitungan dan parameter yang digunakan.Indeks Tutupan Hutan semula dihitung menggunakan data luas hutan primer, luas hutan sekunder, dan luas hutan menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan, tetapi sejak tahun 2012 perhitungan berubah menggunakan data luas hutandibagi luas wilayah administrasi yang dikonversi kedalam rumus yang tersedia. Perhitungan IKLH adalah 100% dengan pembagian pembobotan:30% Indeks Kualitas Air; 30% Indeks Kualitas Udara; dan40% Indeks Tutupan Hutan/Lahan.

Tabel 2. 65. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Ngada Tahun 2019

IKA	IKU	ITLH	IKLH
50,00	85,07	69,32	**68,25**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada, 2020

IKLH Kabupaten Ngada mencapai 68,25% pada tahun 2019, artinya IKLH Kabupaten Ngada masih dalam kategori "cukup" baik. Capaian tersebut dipengaruhi oleh status mutu kualitas air sungai yang sebagian besar termasuk dalam kategori tercemar ringan dan belum optimalnya nilai Indeks Tutupan Lahan.

2. Penanganan Persampahan

Kinerja penanganan persampahan salah satunya dapat dilihat melalui data persentase penanganan sampah. Data tersebut mengindikasikan berapa banyak sampah yang berhasil dikelola pemerintah daerah dari total timbulan sampah yang ada. Berikut ini merupakan data penanganan persampahan di Kabupaten Ngada:

Grafik 2. 43. Persentase Kinerja Penanganan Persampahan Tahun 2016-2019

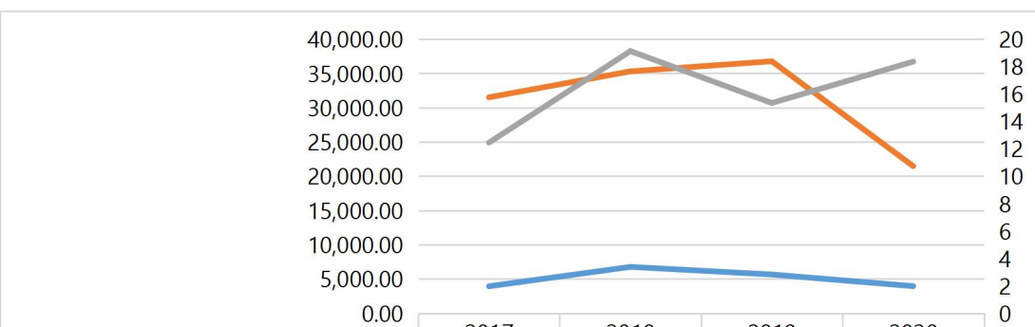

	2017	2018	2019	2020
Jumlah sampah yang tertanganani (ton)	3,923.75	6,752.50	5,642.50	3,940.50
Total Timbulan Sampah (ton/m3)	31,510.45	35,299.49	36,773.75	21,459.75
Prosentase Penanganan sampah (%)	12.45	19.13	15.34	18.36

Sumber : E-database SIPD Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2016-2020

Persentase penanganan sampah pada tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Penurunan capaian sempat terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai angka 15,34% kemudian mengalami peningkatan sebesar 19,6% atau mencapai 18,36% pada tahun 2020. Artinya, hanya sekitar 18,36% timbulan sampah yang dikelola. Belum optimalnya penanganan sampah disebabkan

oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan seperti terbatasnya ketersediaan alat berat dan belum optimalnya penyediaan infrastruktur pengelolaan persampahan seperti belum tersedianya TPST di tiap Kecamatan dan TPA hanya satu lokasi di Tanawau Kecamatan Bajawa. Di samping itu, kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah juga masih rendah. Hal ini ditandai dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan belum adanya kelompok masyarakat yang berupaya mendaur ulang sampah.

Gambar 2. 9. Kondisi Tempat Pembuangan Sampah sementara yang tidak layak

Upaya peningkatan kinerja pelayanan persampahan tidak hanya sekedar menambah ketersediaan prasarana dan sarana persampahan, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah

2.3.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasikependudukan merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah dalam melakukan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan publik dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap penduduk wajib memiliki identitas diri termasuk akte kelahiran dan KTP Nasional. Capaian kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dapat digambarkan dengan menganalisis beberapa indikator seperti tingkat kepemilikan KTP berbasis NIK, Kepemilikan Akte Kelahiran dan Akte Nikah, dan Ketersediaan Data Base

Kependudukan Skala Kabupaten. Berikut ini merupakan indikator kinerja urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama kurun waktu 2016-2020 Kabupaten Ngada

Tabel 2. 66. Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Jumlah penduduk ber KTP	96.160	100.539	103.927	103.600	104.608
2	Jumlah penduduk usia >17 tahun atau telah menikah	117.411	118.064	119.457	120.704	122.228
3	Jumlah bayi berakte kelahiran	27.800	33.500	35.760	56.447	58.551
4	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	4.400	9.231	11.305	15.172	15.940
5	Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, Tahun 2016-2020

Secara umum, kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Perkembangan data tersebut mengindikasikan peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan cakupan pelayanan serta peningkatan integrasi proses pada beberapa aspek pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan peningakatn Kerjasama antar institusi juga berperan dalam peningkatan kinerja pelayanan tersebut

2.3.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan desa fokus pada pemberdayaan masyarakat desa serta peningkatan kualitas pemerintahan desa. Kinerja pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat desa dapat digambarkan dengan menganalisis beberapa indikator salah satunya adalah Indeks Desa

Membangun dan tingkat partisipasi masyarakat desa. Berikut ini merupakan perkembangan beberapa indikator kinerja urusan pemberdayaan desa di Kabupaten Ngada.

Grafik 2. 44. Persentase IDM Kabupaten Ngada Tahun 2019 dan 2020

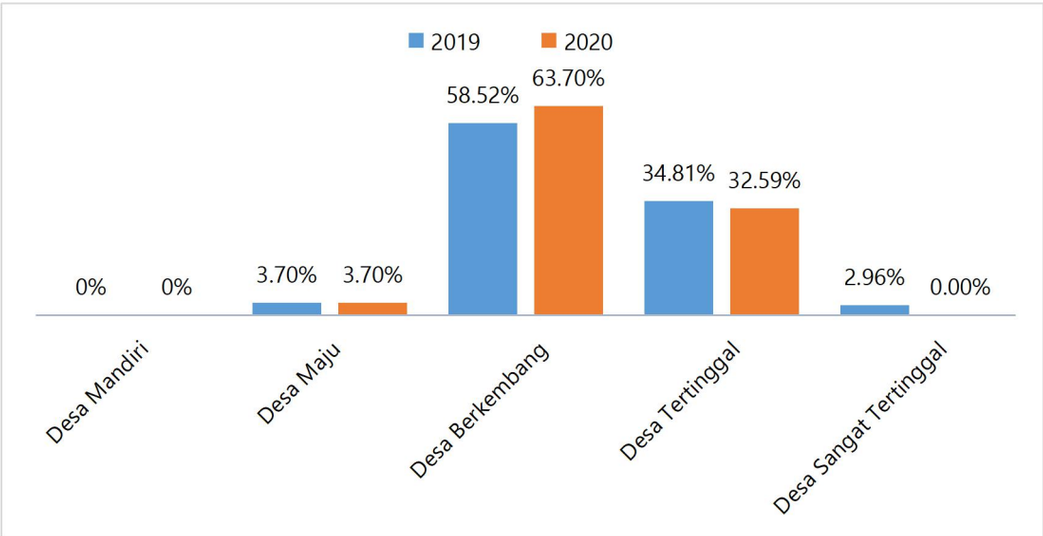

Sumber : IDM Dinas PMD-P3A Kabupaten Ngada Tahun 2019-2020

Secara umum, persentase desa berkembang di Kabupaten Ngada mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun 2019-2020. Sebaliknya persentase desa tertinggal berkurang. Meskipun persentase desa mandiri tetap namun, peningkatan persentase desa berkembang mengindikasikan peningkatan kualitas keberdayaan dan tata Kelola pemerintahan desa di Kabupaten Ngada. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan cakupan pendampingan dan kerjasama antar institusi pemerintah daerah kabupaten Ngada.

2.3.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu upaya untuk mewujudkan pengendalian penduduk dan KB adalah melalui pelaksanaan program dan kegiatan KB. Hal tersebut berkaitan dengan upaya untuk mengendalikan angka kelahiran serta membentuk keluarga yang berkualitas. Beberapa indikator yang dapat mengukur kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara lain Jumlah PUS, Jumlah Akseptor KB dan jumlah PUS yang ingin ber-KB dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Ngada per 100 pasangan usia subur dari tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 2. 45. Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur Kabupaten Ngada 2017-2019

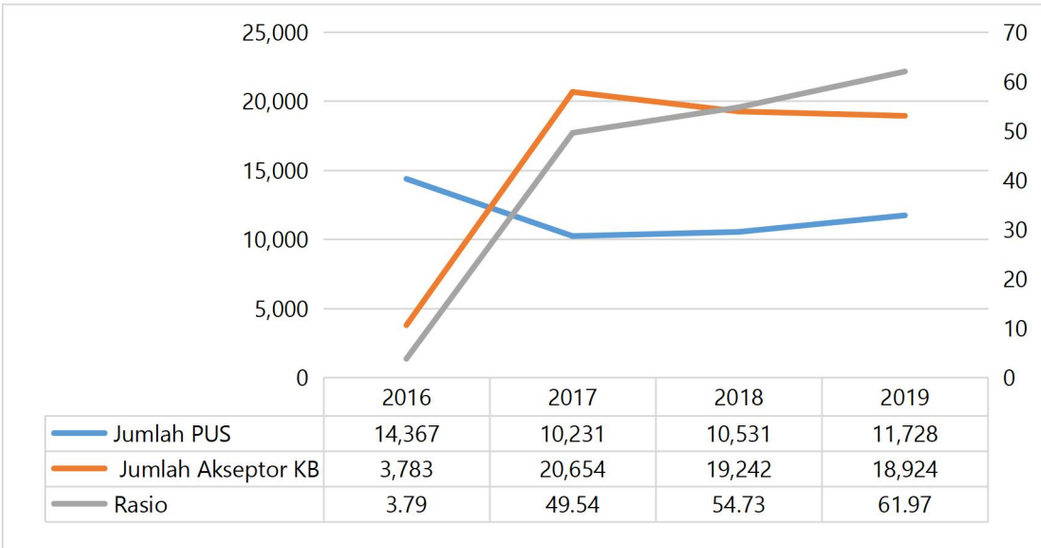

*Sumber data : E-database SIPD Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (data diolah) Tahun 2020 dan **BPS Ngada Tahun 2017.*

Dari tabel diatas, rasio akseptor KB mengalami peningkatan yang cukup siginifikan dari tahun ke tahun. Rasio peningkatan akseptor KB meingkat total sebanyak 58,18% dalam waktu empat tahun terakhir. Tetapi, jika dilihat dari jumlah aksekptor KB secara keseluruhan terus mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dengan total penurunan sebanyak 1.730. Maka dari itu masih diperlukan upaya serius untuk meningkatkan PUS yang menjadi akseptor KB, sehingga angka pertambahan penduduk dapat terkendali.

2. Cakupan PUS yang ingin berKB Tidak Terpenuhi (*unmetneed*)

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi adalah Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi jumlah PUS dikali 100 persen . Perkembangan cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi di Kabupaten Ngada dari tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 2. 46. Cakupan PUS yang ingin ber KB Tidak Terpenuhi (*unmetneed*)

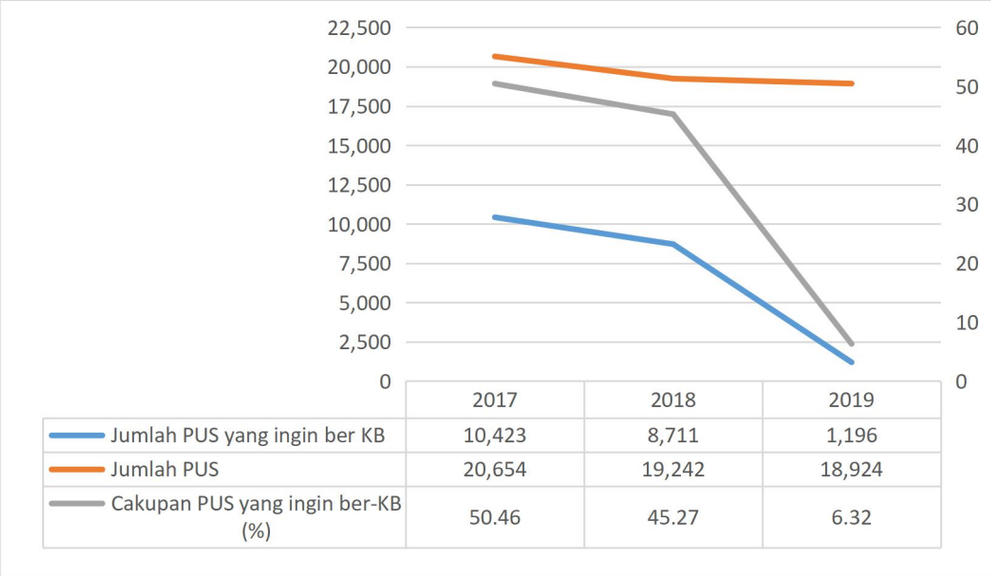

*Sumber Data: Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (data diolah) dan **BPS Ngada Tahun 2017.*

Dari tabel di atas, terlihat bahwa perkembangan jumlah PUS yang ingin ber KB dari tahun ke tahun semakin menurun dengan signifikan dengan total penurunan sebanyak 9.227 pasangan. Bahkan pada tahun 2019, hanya 6,32% PUS yang ingin ber KB dari total PUS yang ada sehinggaperan kader Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PLKB dan PPKBD) harus lebih aktif lagi dalam memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada PUS untuk mengikuti KB.

2.3.2.9. Urusan Perhubungan

Pembangunan urusan perhubungan mempunyai peran penting dalam mewujudkan infrastruktur transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomi. Kinerja Urusan Perhubungan dapat dijelaskan melalui uraian berikut ini:

1. Jumlah Perlengkapan Jalan dan Kendaraan Umum

Kondisi perhubungan di Kabupaten Ngada dapat dilihat melalui ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan. Adapun data mengenai jumlah perlengkapan jalan dan jumlah kendaraan umum adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 67. Data Jumlah Perlengkapan Jalan dan Kendaraan Umum di Kabupaten Ngada Tahun 2016 - 2020

Jenis Data		2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
Jumlah perlengkapan jalan		**757**	**277**	**279**	**188**	**181**	Unit
	APILL	7	7	7	7	0	unit
	Rambu-rambu	434	270	272	181	181	unit
	Guard rail	116	0	0	0	0	unit
	Deliniator	200	0	0	0	0	unit
Jumlah kendaraan umum		**658**	**816**	**849**	**815**	**815**	unit
	Jumlah Truk Barang Umum	406	479	506	553	553	unit
	Jumlah Mobil Tangki	12	13	13	13	13	unit
	Jumlah Bus	191	270	272	181	181	unit
	Jumlah Angkutan Kota	49	54	58	68	68	unit

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada, Tahun 2020 (data diolah)

Upaya penyediaan perlengkapan jalan yang hampir secara rutin dilakukan adalah pada jenis APILL dan rambu-rambu. Sementara itu, jumlah kendaraan umum paling tinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu mencapai 849 unit. Pada tahun 2019, terjadi penurunan sebesar 4%. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan jumlah bus yang beroperasi.

2. Angka Kecelakaan

Di samping berupaya menyediakan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, penyelenggaraan urusan perhubungan juga dimaksudkan untuk menciptakan keselamatan transportasi. Kondisi keselamatan transportasi di Kabupaten Ngada dapat diindikasikan melalui data angka kecelakaan:

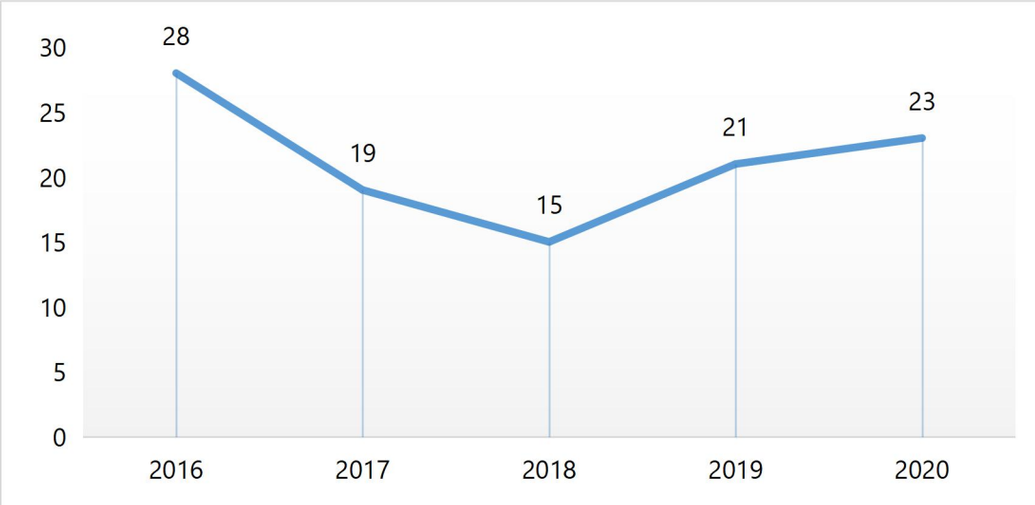

Grafik 2. 47. Angka Kecelakaan di Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada, Tahun 2020

Angka kecelakaan mengalami fluktuasi pada tahun 2016 hingga 2020. Jumlah kasus kecelakaan terkecil terjadi pada tahun 2018 yaitu hanya terjadi 15 kasus kecelakaan. Angka tersebut kembali meningkat pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 40% dan 9,5%. Di masa mendatang, untuk menekan angka kecelakaan perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalulintas dan upaya penegakan pelanggaran lalu lintas.

3. Arus Kedatangan dan Arus Keberangkatan

Arus kedatangan dan keberangkatan penumpang angkutan umum ke Kabupaten Ngada dapat dilihat dari tiga moda transportasi utama, yaitu: bus, kapal laut, dan pesawat udara. Berikut ini merupakan data arus kedatangan dan keberangkatan di Kabupaten Ngada tahun 2017-2019:

Tabel 2. 68. Arus Kedatangan dan Arus Keberangkatan Angkutan Umum Tahun 2017-2019

No	Uraian	Capaian Kinerja Tahun		
		2017	2018	2019
ANGKUTAN LAUT				
1	**Jumlah Penumpang melalui Dermaga**	**37.524**	**35.321**	**22.136**
	Masuk	22.601	21.796	14.308
	Keluar	14.923	13.525	7.828
2	**Jumlah Barang melalui Dermaga**	**4.845**	**45.139**	**4.207**
	Masuk	4.233	44.188	3.458
	Keluar	612	951	749,3
ANGKUTAN UDARA				

No	Uraian	Capaian Kinerja Tahun		
		2017	2018	2019
1	**Jumlah Penumpang angkutan udara**	**67.095**	**78.385**	**86.774**
	Masuk	31.668	36.971	41.462
	Keluar	35.427	41.414	45.312
2	**Jumlah barang menggunakan angkutan Udara**	**581**	**607**	**380**
ANGKUTAN DARAT				
1	Jumlah Penumpang angkutan darat	**95.760**	**95.110**	**92.199**
	Masuk	49.320	48.470	49.879
	Keluar	46.440	46.640	42.320
2	Jumlah barang menggunakan angkutan Darat	54.200	52.320	50.316

Sumber Data : E-database SIPD Dinas Perhubungan, Tahun 2020 (data diolah)

Arus keberangkatan penumpang melalui angkutan umum dari dan ke Kabupaten Ngada didominasi oleh angkutan umum jenis bus. Sementara itu arus penumpang yang menggunakan kapal laut sedikit menurun di tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018. Di sisi lain, arus penumpang pesawat udara mengalami tren peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019 dengan rata–rata peningkatan sebesar 13,75% per tahun.

4. Arus Orang dan Barang

Arus orang dan barang mencerminkan tingkat mobilitas orang dan barang di Kabupaten Ngada. Berikut ini merupakan data arus orang dan barang di Kabupaten Ngada tahun 2017 hingga 2019.

Tabel 2. 69. Jumlah Arus Orang dan Barang,Tahun 2017-2019

No.	Uraian	Capaian Kinerja Tahun		
		2017	2018	2019
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	**Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum**			
	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	267.360	362.470	317.239
	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	862.128	886.207	724.474
2.	**Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun**			
a	Jumlah orang melalui dermaga/ bandara/ terminal pertahun (Pelabuhan Aimere)	37.524	35.321	36.790

No.	Uraian	Capaian Kinerja Tahun		
		2017	2018	2019
b	Jumlah barang melalui dermaga/ bandara/ terminal pertahun (Pelabuhan Aimere)	4.845	5.369	3.145
c	Jumlah orang melalui dermaga/ bandara/ terminal pertahun (Bandara Soa)	88.713	96.056	88.774
d	Jumlah barang melalui dermaga/ bandara/ terminal pertahun (Bandara Soa)	581.086	607.400	455.250

Sumber Data :E-database SIPD Dinas Perhubungan, Tahun 2020 (data diolah)

Pada tahun 2019, jumlah orang dan barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Ngada mengalami penurunan masing-masing sebesar 12% dan 18%. Penurunan juga terjadi pada moda transportasi udara sebesar 7,6% dan 25%. Akan tetapi, pada moda transportasi kapal laut hanya arus barang yang mengalami penurunan sebesar 41%, sedangkan arus penumpang naik sebesar 4%.

2.3.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan yang sangat penting bagi pembangunan daerah. Urusan ini berkaitan dengan akses masyarakat terhadap infomasi publik. Gambaran kondisi komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Grafik 2. 48. Jumlah Pengguna HP, Internet dan Komputer Tahun 2017-2019

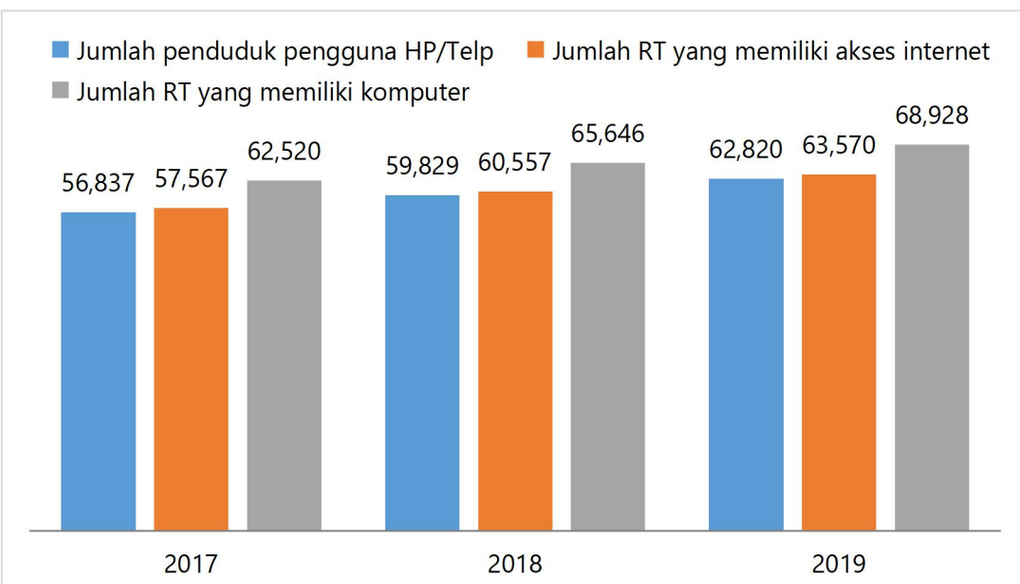

Sumber: E-database SIPD Dinas Kominfo Tahun 2020 (data diolah)

Data tersebut memperlihatkan bahwa dari tahun 2017 hingga 2019 rumah tangga pengguna HP terus mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga tahun 2019 dengan peningkatan rata-rata sebesar 5,13 persen. Seiring dengan kondisi tersebut, jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Dengan adanya peningkatan baikpada jumlah pengguna HP maupun akses internet maka akan memudahkan akses informasi dan komunikasi untuk semua sektor pemerintah maupun swasta.

Tabel 2. 70. Pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada

Uraian	2017	2018	2019	2020
Jumlah media	10	10	12	17
Persentase Informasi Pembangunan Daerah Yang dapat diakses masyarakat umum	70%	80%	85%	90%
Peresentase SKPD yang menggunakan layanan online	5,90%	9,80%	13,70%	39,22%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa informasi pembangunan daerah yang dapat diakses masyarakat umum terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada indikator SKPD yang menggunakan layanan online, dimana mengalami peningkatan sebesar 25,52 persen pada tahun 2019 hingga 2020. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik cukup berjalan baik di Kabupaten Ngada, dengan semakin bertambahnya jumlah media. Meskipun capaian kinerja tersebut mengalami peningkatan, namun pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektornik tetap menjadi perhatian. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya dokumen pendukung, seperti *masterplan* tentang TIK dan indikator SPBE yang sering berubah, dan belum optimalnya tata kelola TIK, serta terbatasnya infrastruktur TIK di Kabupaten Ngada.

2.3.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan urusan koperasi dan UMKM ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan UMKM dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Urusan ini memiliki peran strategis dalam kontribusinya bagi peningkatan perekonomian daerah dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Kondisi koperasi dan UMKM di Kabupaten Ngada dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Grafik 2. 49. Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Ngada Tahun 2017-2019

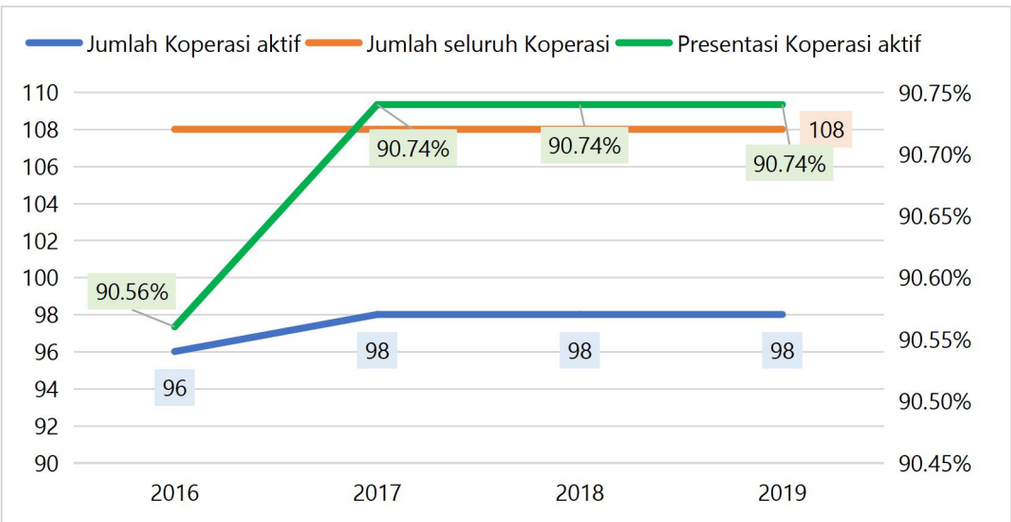

Sumber : Edatabase SIPD Dinas KoperUMKdag, Tahun 2020

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Ngada mengalami stagnasi pada tahun 2017-2019 di angka 90,74 persen. Kondisi tersebut menandakan selama tiga tahun terakhir kondisi perkoperasian di Kabupaten Ngada tidak mengalami perubahan, baik dari segi jumlah seluruh koperasi maupun jumlah koperasi aktif. Keadaan stagnasi ini disebabkan oleh tata kelola koperasi yang belum optimal.

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas dan menciptakan peluang serta lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Melalui peningkatan UMKM sangat dimungkinkan terwujudnya pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ngada.

Tabel 2. 71. Perkembangan UMKM Kabupaten Ngada, Tahun 2016-2019

Jenis Usaha	Jumlah UMKM 2016			Jumlah	Jumlah UMKM 2017			Jumlah	Jumlah UMKM 2018			Jumlah	Jumlah UMKM 2019			Jumlah
	Mikro	Kecil	Mene-ngah		Mikro	Kecil	Mene-ngah		Mikro	Kecil	Mene-ngah		Mikro	Kecil	Mene-ngah	
Pertanian, Peternakan, Kehuatanan dan perikanan	37	0	0	37	33	2		35	33	2		35	33	15	-	48
Industri Pengolahan	375	15		390	375	24		399	360	24		384	360	24	1	385
Industri Kreatif	6			6	6			6	6			12	6			6
Perdagangan,Perhotelan dan Restoran	1.487	88	3	1.578	1.496	93	5	1.594	1.232	72	7	1.311	1.233	72	9	1.314
Pengangkutan dan Komunikasi	39	19		58	59	19		78	59	19		78	59	19	2	80
keuangan,Persewaan,dan Jasa Perusahaan	73	26	1	100	73	27	1	101	69	27	5	101	69	27	5	101
Bangunan	4	0	0	4	4	0	0	4	15	3		18	16	3	2	21
Jasa-Jasa	321	11		332	332	321	12	665	321	311	9	641	321	311	9	641
Jumlah	**2.342**	**159**	**4**	***2.505***	**2.378**	**486**	**18**	***2.882***	**2095**	**458**	**21**	***2.580***	**2097**	**471**	**28**	**2.596**

Sumber: Dinas Koperasi, UMK dan Perdagangan,BPS Kab.Ngada , 2021

UMKM di Kabupaten Ngada didominasi oleh usaha di bidang perdagangan, perhotelan dan restoran dengan rata-rata kontribusi sebesar 54,93 persen pada tahun 2016-2019. Perkembangan UMKM dari tahun 2016-2019 bergerak turun dengan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 10,48 persen. Penurunan tersebut terjadi pada usaha perdagangan, perhotelan, dan resto serta jasa-jasa yang selama ini cukup mendominasi. Penurunan terjadi pada usaha skala mikro dan kecil yang disebabkan oleh menurunnya kapasitas produksi dan kualitas dari produk yang dihasilkan.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah diharapkan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas UMKM di Kabupaten Ngada. UMKM harus dikembangkan agar maju dan memiliki daya saing sehingga tetap menjadi jantung perekonomian Indonesia khususnya di Kabupaten Ngada. Hal ini bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi pelaku UMKM sendiri harus punya keinginan untuk maju dan berkembang. Pemerintah hendaknya dapat memecahkan masalah klasik yang kerap kali dialami oleh pelaku UMKM yakni akses ke pasar dan akses teknologi. Akses informasi, kualitas, kuantitas serta kontinuitas produk dan sumber daya manusia serta daya saing perlu untuk ditingkatkan guna mengembangkan UMKM di Kabupaten Ngada

2.3.2.12. Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi identik dengan berapa besar investasi yang masuk dan berapa banyak jumlah investor baik dari PMDN maupun PMA yang ikut menanamkam modalnya disuatu daerah serta serapan tenagakerja lokal dan asing. Untuk tingkat daerah, PMDN dan serapan Tenaga kerja lokal lebih diutamakan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun demikian, peran PMA dan tenaga kerja asing tetap diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi karena tingginya nilai investasi dan potensi innovasi teknologi.

Iklim investasi di Kabupaten Ngada sampai dengan tahun 2019 masih didominasi oleh investor dalam negeri. Beberapa investor dalam negeri yang

masuk antara lain di sektor perkebunan yaitu PT. BumiampoInvestama Sejahtera, dengan nilai investasi sebesar 40 Milyar dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 190orang. Di samping itu, juga ada investasi di bidang pengembangan bamboo oleh PT. Indo Bambu yang sudah membangun pabrik pengolahan bambu di Kecamatan Golewa. Masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Ngada menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk lebih mengoptimalkan peluang usaha bagi investor diantaranya pembebasan lahan, regulasi yang mendukung, menyiapkan infrastruktur yang memadai, dan iklim usaha yang kondusif.

2.3.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Perkembangan indikator yang digunakan untuk melihat kinerja urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 72. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Ngada Tahun 2016 - 2019

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	214	214	214	214
2	Jumlah seluruh wirausaha	151	151	151	151
3	Jumlah cabang olahraga	21	21	21	21
4	Jumlah cabang olahraga yang dibina	11	11	11	11
5	Jumlah seluruh pelatih	893	893	893	893
6	Jumlah pelatih yang bersertifikat	11	11	11	11
7	Jumlah atlet pelajar yang dibina	30.396	30.396	30.396	30.396
8	Jumlah prestasi olahraga (Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun)	3	3	6	3

Sumber data : E-database SIPD Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2016 -2020.

Dari tabel diatas semua indikator tidak mengalami perubahan, hanya jumlah prestasi olah raga yang perkembangannya bervariatif yakni tahun 2016 dan 2017 dengan 3 prestasi, tahun 2018 bertambah menjadi 6 prestasi, serta pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 3 prestasi. Hal tersebut diakibatkan oleh minimnya cabang olah raga yang diikuti yaitu hanya lari atletik 5.000 M, 3.000 M dan 1.500 M.

2.3.2.14. Urusan Statistik

Pengembangan data dan informasi daerah dilaksanakan guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan dengan hal ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun juga terkait validitas data, kecepatan penyampaian, serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang valid, akurat, *up to date* dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kinerja pembangunan pada urusan statistik dari Tahun 2016-2020 dapat diukur dengan 2 indikator yakni **Buku Ngada Dalam Angka** dan **Buku PDRB Kabupaten**Ngada. Selain Data yang dikeluarkan oleh BPS , pada Tahun 2014 Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang SIPD berbasis *website* sehingga dapat diakses melalui browser dan dukungan jaringan internet dengan alamat website **http://sipd.bangda.kemendagri.go.id.** Selanjutnya pada Tahun 2019 Kemendagri menggantikan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 dengan Permendagri Nomor 98 Tahun 2019 tentang SIPD dan terakhir dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD melalui website : http://sipd.kemendagri.go.id.

2.3.2.15. Urusan Persandian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan persandian merupakan urusan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota. Terwujudnya pengelolaan persandian dan informasi daerah serta meningkatkan pengumpulan,pengelolaan analisis data satatistik daerah merupakan salah satu sasaran strategis urusan persandian di Kabupaten Ngada.

Urusan persandian dalam perannya untuk menjalankan pemerintahan di Kabupaten Ngada masih belum optimal karena kurang memadainya kapasitas

SDM di bidang persandian serta sarana prasarana penunjang persandian. Hal tersebut menunjukkan perlunya pendidikan dan pelatihan tentang persandian bagi para OPD, sehingga dapat meningkatkan penggunaan persandian di Kabupaten Ngada

2.3.2.16. Urusan Kebudayaan

Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan negara harus memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Keberadaan festival sebagai wahana untuk melestarikan seni dan budaya yang ada di masyarakat Kabupaten Ngada mulai dikembangkan dengan berbagai kegiatan. Selain itu festival dilakukan untuk menarik perhatian warga dan wisatawan serta pemeliharaan benda, situs, dan cagar budaya. Dalam hal ini, pemerintah perlu lebih menghidupkan lagi festival–festival budaya untuk melestarikan adat istiadat lokal sehingga juga dapat memberi manfaat lain seperti mendongkrak pendapatan masyarakat. Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Ngada melaksanakan berbagai event budaya antara lain: workshop tenun ikat, bedah buku dan dialog kebudayaan, pagelaran dan dialog seni pertunjukkan daerah ,Temu Kopi , festival musik bambu di Kampung Wogo, ritual Ka Sao, karnaval, pagelaran musik dan tari, serta pertunjukan busana daerah. Festival tersebut sudah menjadi kegiatan rutin daerah yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Ngada dalam rangka melestarikan budaya serta menarik wisatawan.

2.3.2.17. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan Perpustakaan merupakan tempat untuk belajar, mencari dan mengembangkan informasi dan juga sebagai sarana edukatif dalam pendidikan. Perpustakaan berfungsi untuk menyimpan koleksi, menyajikan berbagai informasi, fungsi pendidikan, fungsi rekreasi dan fungsi kultural. Peran Perpustakaan Daerah di Kabupaten Ngada yaitu melaksanakan pelayanan peminjaman buku /bahan pustaka yang disiapkan baik di kantor perpustakaan ataupun perpustakaan keliling. Kinerja Urusan perpustakaan sampai tahun 2019 terdapat 419 perpustakaan di seluruh wilayah Kabupaten

Ngada dengan jumlah kunjungan masih sangat rendah yaitu 0,02% (2.928 pengunjung dari total 163.217 penduduk pada tahun 2019). Hingga saat ini peran perpustakaan di Kabupaten Ngada masih sangat minim dalam rangka menarik minat baca masyarakat agar berkeinginan untuk membaca di perpustakaan. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai.

2.3.2.18. Urusan Kearsipan

Pengelolaan kearsipan merupakan langkah awal dalam membangun sistem informasi untuk mendukung manajemen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi kerja.Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal (1) disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegitan atau pristiwa dalam berbagai bentuk dan mediasesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi Perangkat daerah menuntut pemberdayaan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi demi terselesaikan permasalahan dengan cepat dan tepat, tidak terkecuali pengelolaan arsip yang merekam segala informasi mengenai aktivitas organisasi.

Grafik 2. 50. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku di Kabupaten Ngada Tahun 2020

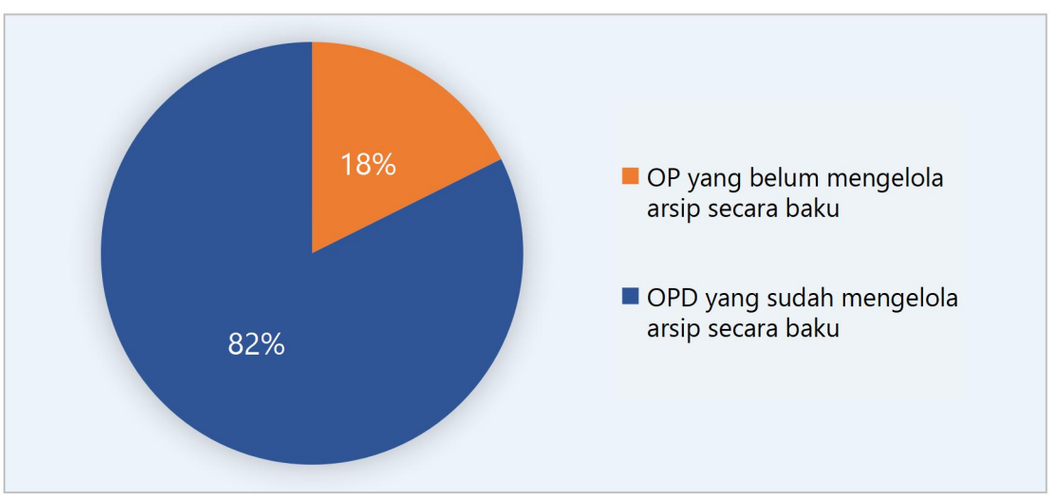

Sumber: Dinas Kearsipan Kabupaten Ngada, 2020

Pengelolaan arsip telah diterapkan di lingkungan PD secara baku. Sampai dengan tahun 2019terdapat 28 Perangkat Daerah yang telah menerapkan pengelolaan kearsipan secara baik dan benar atau sebesar 82,35 persen dari total 34 Perangkat Daerah. Diharapkan tahun-tahun selanjutnya semua Perangkat Daerah sudah menerapkan pengarsipan yang baku sehingga memudahkan dalam mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang berkaitan dengan kinerja pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

2.3.3. Fokus Urusan Layanan Pilihan

2.3.3.1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Pelayanan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya produksi perikanan dan kelautan, pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan bagi masyarakat. Peningkatan pelayanan tersebut meliputi pembinaan terhadap kelompok-kelompok nelayan, pembudidayaan dan pemasaran hasil perikanan dengan tujuan meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Ngada. Indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 73. Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan, Tahun 2016-2019

	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	**Produksi Perikanan**				
	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	1.427	1.507	1.586	2.088
	Target Daerah (Ton)	654	720	792,55	890,11
	Persentase Pencapaian Target Produksi Perikanan	218,26%	209,26%	200,11%	234,57%
2	**Konsumsi ikan**				
	Jumlah konsumsi ikan (Kg/ kapita/ tahun)	9	9,22	9,59	9,59
	Target Daerah	20	20	20	20
	Persentase Pencapaian Target Konsumsi Ikan	45,00%	46,10%	47,95%	47,95%

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan, Tahun 2016-2019

Data capaian indikator urusan kelautan dan perikanan menunjukkan bahwa jumlah produksi ikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus meningkat. Persentase pencapaian produksi perikanan yang melebihi target menunjukkan Kabupaten Ngada mampu mengelola produksi ikan dengan baik.Berdasarkan hasil kinerja tersebut Pemerintah Daerah dapat meningkatkan target pada periode selanjutnya dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan yang keberlanjutan.

Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh pencapaian target konsumsi ikan masyarakat Ngada. Pencapaian target yang berkisar pada angka 46,75 persen selama tahun 2016-2019 menunjukkan keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan masih belum sesuai harapan. Kondisi tersebut bisa disebabkan oleh berbagai hal di antaranya kurangnya kualitas produk perikanan yang disebabkan oleh kurangnya sarana prasarana yang memadai. Keterbatasan benih perikanan budidaya juga diduga turut menyebabkan rendahnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan karena pilihan yang kurang bervariasi

2.3.3.2. Urusan Pilihan Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada. Tujuan urusan pariwisata adalah melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Urusan pariwisata diharapkan dapat memberikan peningkatan bagi pendapatan daerah dan kesejehteraan masyarakat melalui pembangunan industri wisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan. Kepariwisataan di Kabupaten Ngada sudah mulai dikenal seiring dikenalnya Labuan Bajo sebagai destinasi wisata favorit para wisatawan mancanegara dan domestik. Tren wisata *overland* Flores baik dari Labuan Bajo ke Ende maupun sebaliknya telah memberi peluang bagi Kabupaten Ngada (Bajawa) untuk disinggahi oleh wisatawan sebagai tempat beristirahat. Peluang ini telah direspon oleh Pemerintah Ngada untuk menarik wisatawan yang datang mulai dari wisatawan domestik, hingga wisatawan asing, mulai dari anak-anak sampai dewasa.

Kabupaten Ngada memiliki pintu masuk jalur udara Bandara Soa, jalur laut melalui TWA 17 Pulau Riung maupun jalur darat Labuan Bajo ataupun Ende. Karena posisinya yang terletak di tengah pulau Flores, wisatawan yang melakukan perjalanan *overland* Flores tentunya akan melewati Kabupaten Ngada khususnya Bajawa. Tujuan utama wisatawan mengunjungi Pulau Flores adalah ke Pulau Komodo, Labuhan Bajo dan Kelimutu – Ende. Wisatawan juga terkadang melakukan perjalanan dari arah Ende, Bajawa, Ruteng – Labuan Bajo. Selain Pulau Komodo dan Danau Kelimutu wisatawan dapat singgah di beberapa daya tarik wisata lain seperti mengunjungi Kampung adat Bena. Perkembangan pariwisata Kabupaten Ngada didukung oleh ketersediaan variasi produk wisata alam dan budaya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisata baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing ke daya tarik wisata alam dan budaya selama kurun waktu 2016-2019 sesuai tabel berikut.

Tabel 2. 74. Data Objek Wisata Budaya dan Kunjungan Wisata Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020

No	Objek Wisata Budaya	Jenis Wisatawan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Perkampungan tradisioal Bena	Wisman	7.273	8.046	9.700	12.202	2.575
		Wisnus	6.840	11.659	10.757	13.411	478
		Jumlah	14.113	19.705	20.457	25.613	3.053
2	Perkampungan tradisional Tololela	Wisman	1.182	1.287	97	1.438	
		Wisnus	248	287	653	189	
		Jumlah	1.430	1.574	750	1.627	
3	Perkampungan tradisional Gurusina	Wisman	1.893	2.577	988	207	
		Wisnus	149	269	167	10	
		Jumlah	2.042	2.846	1.155	217	
4	Perkampungan tradisional Wogo	Wisman	274	3	153	73	
		Wisnus	36	73	60	27	
		Jumlah	310	76	213	100	
5	Perkampungan tradisional Bela	Wisman	75	371	139	514	
		Wisnus	-	20	-	7	
		Jumlah	75	391	139	521	
6	Desa Legelapu	Wisman	674	89	201	400	82
		Wisnus	-	74	91	112	6

No	Objek Wisata Budaya	Jenis Wisatawan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
		Jumlah	674	163	292	512	88
7	Perkampungan tradisional Belaraghi	Wisman	622	766	709	891	48
		Wisnus	40	57	142	220	7
		Jumlah	662	823	851	1.111	55
8	Perkampungan tradisional Tua Bea	Wisman	44	84	88	97	
		Wisnus	-	24	33	52	
		Jumlah	44	108	121	149	
9	Perkampungan Tradisional Luba (Jerebuu)	Wisman	0	0	5.116	6.168	
		Wisnus	-	0	400	1.879	
		Jumlah	0	0	5.516	8.047	
	Total	Wisman	12.037	13.223	17.191	21.990	2.705
		Wisnus	7.313	12.463	12.303	15.907	491
		Total	19.350	25.686	29.494	37.897	3.196

Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata budaya didominasi oleh wisatawan mancanegara dengan rata-rata proporsi mencapai 62,93 persen selama tahun 2016-2020. Pertumbuhan kunjungan wisatawan dari tiap objek wisata budaya cenderung fluktuatif. Perkampungan Tradisional Bena, misalkan, pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan kunjungan wisatawan mencapai 39,62 persen dari tahun sebelumnya lalu pertumbuhannya menurun drastis menjadi 3,82 persen pada tahun 2018, lalu naik kembali menjadi 25,02 persen pada tahun 2019.

Tabel 2. 75. Data Objek Wisata Alam dan Kunjungan Wisata KabupatenNgada Tahun 2016-2020

No	Objek Wisata Alam	Jenis Wisatawan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Sumber Air Panas Alam Soa	Wisman	3.498	2.347	7.342	12.202	191
		Wisnus	50.358	51.154	81.715	82.670	20.884
		Jumlah	53.856	53.501	89.057	94.872	21.075
2	Taman Laut 17 pulau	Wisman	2.551	3.060	3.216	5.875	
		Wisnus	5.314	5.362	4.907	6.795	
		Jumlah	7.865	8.422	8.123	12.670	
3	Danau Wawomudha	Wisman	236	278	132	-	
		Wisnus	56	82	-	-	
		Jumlah	292	360	132	-	
4	Sumber Air Panas Alam Malanage	Wisman	1.649	3.687	3.979	4.169	
		Wisnus	249	467	956	772	
		Jumlah	1.898	4.154	4.935	4.941	
5	Air Panas Boba Soka	Wisman	7.664	5.553	-	-	
		Wisnus	7.664	5.569	5.112	7.522	

No	Objek Wisata Alam	Jenis Wisatawan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
		Jumlah	15.328	11.122	5.112	7.522	
6	Desa Legelapu	Wisman	-	-	-	-	
		Wisnus	674	779	-	-	
		Jumlah	674	779	-	-	
7	Air terjun Ogi	Wisman	0	0	652	1.030	-
		Wisnus	0	0	4.858	7.620	-
		Jumlah	0	0	5.510	8.650	-
	Total	Wisman	15.598	14.925	15.321	23.276	191
		Wisnus	64.315	63.413	97.548	97.759	20.884
		Total	**79.913**	**78.338**	**112.869**	**121.035**	**21.075**

Kondisi yang sedikit berbeda ditunjukkan oleh kunjungan wisatawan di objek wisata alam Kabupaten Ngada. Kunjungan wisatawan di objek wisata alam lebih didominasi oleh wisatawan nusantara dengan rata-rata proporsi mencapai 85,54 persen pada periode 2016-2020. Namun, fluktuasi kunjungan wisatawan tetap terjadi pada objek wisata alam. Pertumbuhan kunjungan wisatawan di objek wisata Taman Laut 17 Pulau menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif dari yang mulanya tumbuh 7,08 persen pada tahun 2017 justru turun mencapai -3,55 persen pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019 pertumbuhan kunjungan wisatawan di Taman Laut 17 Pulau mencapai 55,98 persen. Fluktuasi kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun nusantara, menunjukkan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Ngada masih belum optimal. Pemasaran dan kerjasama pengembangan destinasi yang belum optimal juga diduga kuat menjadi penyebab fluktuasi kunjungan wisatawan

2.3.3.3. Urusan Pilihan Pertanian

Pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian di Kabupaten Ngada. Besarnya peran tersebut digambarkan melalui tingginya kontribusi PDRB meskipun mengalami penurunan secara signifikan. Kontribusi PDRB ADHB sektor pertanian terus menurun dari 35,73% pada tahun 2016 menjadi 34,15% pada tahun 2019. Penurunan ini dapat ditekan melalui peningkatan penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, menyerap tenaga kerja, sumber pendapatan serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan.

Sejalan dengan proses transformasi struktur perekonomian Kabupaten Ngada yang telah dan akan terus mengarah pada struktur yang lebih seimbang, sektor pertanian diharapkan akan terusmemegang peranan penting di masa yang akan datang,. Sektor ini merupakan sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Ngada. Luas lahan untuk pertanian seluruhnya 97.102 ha yang terdiri dari Lahan sawah 6.095 Ha dan Lahan Bukan Sawah 90.407 Ha. Terdapat 3 sub sektor yang menunjang sektor pertanian di Kabupaten Ngada yakni sub sektor pertanian tanaman pangan, sub sektor perkebunan, dan sub sektor perikanan

1. Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Lahan budidaya pertanian tanaman pangan tersebar di wilayah dengan ketinggian 0–1000 mdpal yaitu di 12 Kecamatan. Total luas tanam padi lahan basah dan lahan kering pada tahun seluas39.902 Ha dengan cakupan 7 jenis komoditi.

Tabel 2. 76. Luas Panen,Produksi, dan Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019

Komoditi	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/ha)
Padi Sawah	8.528	62.038	7.27	16.376	88.976	54	15.587	84.770	54	12.624	67.938	53,8
Jagung	6902	26595	3.85	15.611	54.035	35	18.418	48.593	26	15.207	39.367	26
Kedele	1.429,5	6.688,9	4.68	1.865	5.586	30	4.914	421	1	742	9	695
Kacang tanah	185	422,7	2.28	109	218	20	66	132	20	56	47	8
Kacang Hijau	109	228	2.80	52	104	20	32	64	20	8	7	9
Ubi Kayu	2606	17.282,7	6.63	1.954	8.138	42	915	4.635	51	450	2.034	45
Ubi Jalar	765	2.579.5	3.37	207	616	30	90	237	26	35	131	37

Sumber data : Dinas Pertanian dan Ngada Dalam Angka 2016-2020

Jika dilihat dari perkembangan tahun 2016-2019, semua komoditi mengalami penurunan di tahun 2019. Oleh karena itu, perlu upaya untuk mendorong pertanian dalam pembangunan dan pemenuhan kebutuhan pangan melalui Pemerintah Pusat dengan program Upsus maupun dukungan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa serta masyarakat lokal untuk mendorong peningkatan produksi.

2. Sub Sektor Perkebunan

Di Kabupaten Ngada juga terdapat berbagai komoditi perkebunan yang sangat potensial. Potensi tanaman perkebunan meliputi kelapa, cengkeh, kopi arabika dan robusta, jambu mete, vanili, kakao, kemiri, lada dan pala. Potensi areal pengembangan komoditi perkebunan dapat ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 77. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Potensial Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019

No	Komoditi	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Kelapa	4.819	2.212	4.298	1.664,8	4.290	1.305	4.290	1305
2	Jambu Mente	6.482	1.045	6.232	671	6.232	670	6.232	670
3	Kopi Arabika	5.889	3.258	5.923	1.256,5	6.032	2.194	5.436	2.995,40
4	Kopi Robusta	737	200	688	150	708	153	708	153
5	Kakao	943,5	214	955	199	960	206,04	960	206,04
6	Kemiri	2.513	986	2.512	996	2.512	1.002	2.512	1.002
7	Cengkeh	591	219	627	180	676	174	676	452
8	Vanili	447	170	427	122	424	126,94	159	28,47
9	Pala	102	9.5	101	15	111	16,67	111	16,67
10	Lada	69	13.3	68	15	68	15,74	68	15,74

Sumber Data : Dinas Pertanian dan BPS Ngada 2016-2019

Dari 10 komoditi di atas, dapat dilihat bahwa dari sisi luas lahan tergolong stabil karena tidak terjadi penurunan dan penambahan yang signifikan. Sebaliknya, dari sisi jumlah produksi terjadi penurunan di beberapa komoditi seperti kelapa, jambu mete, kopi arabika, kopi robusta, kakao, cengkeh, dan vanili. Artinya, komoditi tersebut harus diintervensi dari sisi produktivitasnya melalui berbagai program.

3. Sub Sektor Peternakan

Kabupaten Ngada juga memiliki sub sektor peternakan sebagai salahsatu unggulan daerah. Terdapat 8 jenis ternak yang memiliki jumlah yang besar seperti ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 78. Perkembangan Potensi Komoditas sektor Peternakan Kabupaten Ngada 2016 – 2020

No.	Ternak	Jumlah Ternak Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Sapi	33.081	42.998	47.123	4.125
2.	Kerbau	13.726	15.611	15.611	0
3.	Kuda	10.870	12.245	12.751	506
4.	Kambing	22.481	23.628	28.929	5.301
5.	Domba	2.198	3.325	4.093	768
6.	Babi	129.177	173.300	188.523	15.223
7.	Ayam	4.197.866	28.427.163	73.301.666	44.874.503
8.	Itik/Bebek	174.440	604.359	1.082.135	477.776
	Jumlah	**211.533**	**271.107**	**297.030**	**25.923**

Sumber : Dinas Peternakan Kab Ngada, BPS Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020

Populasi ternak dari tahun 2016 – 2019 untuk jenis ternak babi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya jika dibandingkan dengan ternak sapi, kerbau dan domba. Babi mempunyai nilai ekonomi dan budaya khususnya dalam urusan adat pernikahan maupun kematian atau urusan lainnya. Hal ini menyebabkan hampir sebagain besar masyarakat memiliki ternak tersebut. Sedangkan untuk jenis ternak unggas mengalami peningkatan yang signifikan terutama ayam karena semakin tinggi minat para petani untuk memelihara ayam guna meningkatkan perekonomian masyarakat petani dan juga semakin tinggi permintaan konsumen terutama untuk kebutuhan rumah makan dan perhotelan.

Dari sisi luasan, tabel dibawah menjelaskan bahwa luas kawasan penggembalaan umum mencapai 20.140 ha dengan luasan terbesar di Kecamatan Bajawa Utara, Inerie dan Riung.Sedangkan untuk luas lahan tanaman pakan ternak mencapai 38.615 ha dengan luasan terbesar di Bajawa utara 38.605 ha dan yang terkecil berada di Jerebuu yaitu hanya 5,01 ha.

Tabel 2. 79. Luas Kawasan Pengembangan Ternak Tahun 2016-2019

No.	Kecamatan	Luas Kawasan penggembalaan umum (Ha)				Luas Lahan tanaman pakan ternak (Ha)			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Bajawa	-		-		10	10	10	11
2	Bajawa Utara	7.721	7.721	7.721	7.721	38.605	38.605	38.605	3,61
3	Soa	2.321	2.321	2.321	2.321	11,62	11,63	11,64	11,62
4	Wolomeze	50	50	50	50	12,5	12,5	12,5	12,5
5	Aimere	596	596	596	596	11,92	11,92	11,92	11,92
6	Jerebuu	501	501	501	501	5,01	5,01	5,01	5,01

No.	Kecamatan	Luas Kawasan penggembalaan umum (Ha)				Luas Lahan tanaman pakan ternak (Ha)			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
7	Inerie	2.500	2.500	2.500	2.500				0
8	Golewa	909	909	909	909	45,45	45,45	45,45	50
9	Golbar	-	-	-	-	-	-	-	1
10	Golsel	385	385	385	385	-	-	-	0
11	Riung	2.907	2.907	2.907	2.907	29,07	29,07	29,07	29,07
12	Ribar	2.250	2.250	2.250	2.250	22,5	22,6	22,7	33,75
	Total	**20.140**	**20.140**	**20.140**	**20.140**	**38.615**	**38.605**	**38.605**	**51**

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019

Jika dilihat dari data ternak luar pada tabel berikut, Sapi jantan merupakan ternak yang paling banyak dijual ke luar daerah.

Tabel 2. 80. Data jumlah Ternak Keluar

Thn	No	Daerah Tujuan	Jenis Ternak						Jumlah
			Sapi		Kuda		Kerbau		
			Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	
2016	1	Jeneponto	660		200		120		980
	2	Kalimantan	230				30		260
	3	Bekasi Jawa Barat	310						310
Jumlah			**1.200**		**200**		**150**		**1.550**
2017	1	Jeneponto	605		280		650		1.535
	2	Kalimantan	522						522
	3	Subang Jawa Barat	296						296
	4	Bandung	60						60
	5	Palembang	170						170
	6	Situbondo	170						170
Jumlah			**1.823**		**280**		**650**		
2018	1	Jeneponto	837		200		650		1.687
	2	Banjarmasin	700						700
	3	Subang Jawa Barat	78						78
	4	Bandung	60						60
	5	Situbondo	165						165
	6	Bekasi	160						160
Jumlah			**2.000**		**200**		**650**		**2.850**
2019	1	Jeneponto	1.035	0	200	0	635	0	1.870
	2	Banjarmasin	250						250
	3	Subang Jawa Barat	119						119
	4	Bandung	25						25
	5	Surabaya	70						70

Thn	No	Daerah Tujuan	Jenis Ternak						Jumlah
			Sapi		Kuda		Kerbau		
			Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	
	6	Palembang	70						70
	7	Bekasi	52						52
Jumlah			**1.621**		**200**		**635**		**12.456**
Total			**6.644**		**880**		**2.080**		**19.609**

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Ngada, Tahun 2016-2019

Daerah tujuan terbanyak adalah Kabupaten Jeneponto di Sulawesi Selatan, kemudian disusul Banjarmasin. Hasil ternak juga sudah banyak dijual ke wilayah Jawa Timur (Surabaya), Jawa Barat (Bandung, Subang, dan Bekasi) serta wilayah lain di Pulau Sumatera. Artinya, hasil ternak dari Kabupaten Ngada juga sudah bisa memasuki pasar di nasional sehingga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan lebih lanjut

2.3.3.4. Urusan Pilihan Perdagangan

Peran perdagangan semakin penting dalam perekonomian baik secara kuantitas maupun kualitas. Perdagangan merupakan salah satu aspek pembangunan ekonomi yang memiliki peran strategis terutama dalam mendukung kelancarana penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, serta mendorong kestabilan harga. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Perdagangan juga mendukung stabiliras ekonomi khususnya dalam mengendalikan inflasi dan saling menunjang kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi pertanian, industri, dan pertambangan, keuangan, perhubungan dan telekomunikasi.

Grafik 2. 51. Capaian Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019

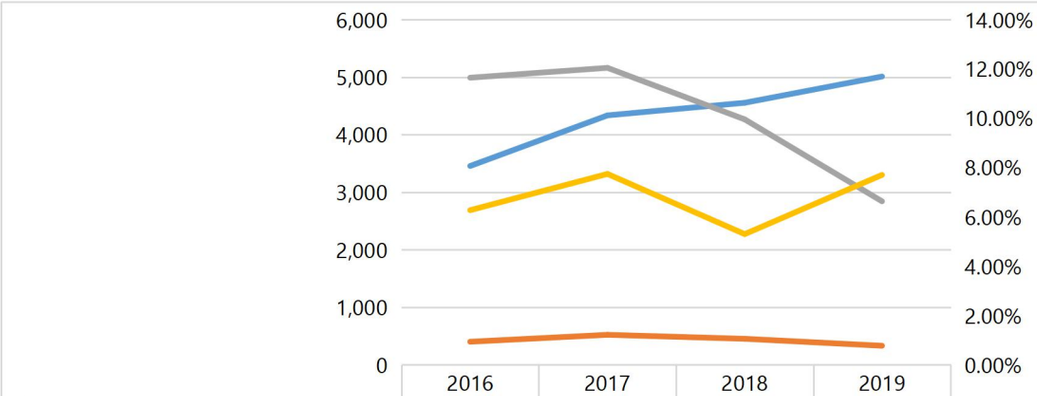

	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha informal	3,455	4,334	4,553	5,009
Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha informal yang mendapat bantuan binaan Pemda	402	522	453	332
Cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal (%)	11.64%	12.04%	9.95%	6.63%
*)Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	6.27%	7.74%	5.30%	7.70%

*Sumber : Dinas Koperasi,UMK dan Perdagangan dan *)BPS Kabupaten Ngada, Tahun 2016-2020*

Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian Kabupaten Ngada mengalami peningkatan meskipun cenderung fluktuatif selama tahun 2016-2019. Fluktuasi tersebut menandakan kinerja sektor perdagangan yang belum optimal. Tingkat kelancaran distribusi barang yang belum optimal disertai kapasitas pemasaran produk yang belum optimal diindikasikan menjadi penyebab fluktuasi kontribusi sektor perdagangan.

Indikator lain yang perlu diperhatikan dalam mengukur kinerja sektor perdagangan adalah cakupan binaan kelompok pedagang atau usaha informal. Keberadaan kelompok pegadang/usaha informal dapat mendorong kelancaran distribusi barang kepada masyarakat. Pembinaan kelompok pedagang/usaha informal yang dilakukan berupa kegiatan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok usaha masyarakat di bidang perdagangan melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta pemberian bantuan untuk mendukung pengembangan usahanya.

Kondisi cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Ngada menunjukkan tren yang menurun pada tahun 2016-2019. Rendahnya cakupan binaan kelompok tersebut menggambarkan bahwa masih terdapat 93,37 persen kelompok pedagang/usaha informal yang belum

mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Ngada pada tahun 2019. Besarnya kelompok pedagang/usaha informal yang belum mendapatkan pembinaan tersebut menunjukkan tingginya potensi yang dapat dikembangkan melalui pedagang/usaha informal dalam memajukan sektor perdagangan di Kabupaten Ngada.

Tabel 2. 81. Jumlah Pasar dan Pedagang di Kabupaten Ngada, Tahun 2016-2019

No	Lokasi Pasar	Jumlah Pedagang				Aktivitas (Mingguan/Harian)
		2016	2017	2018	2019	
1	Bajawa	175	426	706	706	Harian
2	Bobou	450	602	603	603	Harian
3	Bomari	40	36	-	-	Mingguan
4	Mataloko	220	-	-	-	Mingguan
5	Malanuza	1.171	1.016	1016	1016	Mingguan
6	Maumbawa	145	169	169	169	Mingguan
7	Aimere	548	847	717	717	Mingguan
8	Waebela	198	198	198	198	Mingguan
9	Soa	618	750	750	750	Mingguan
10	Malawaru	50	51	0	0	Mingguan
11	Watukapu	0	0	0	0	Mingguan
12	Riung	566	565	566	566	Mingguan
13	Bekek	60	40	0	0	Mingguan
14	Lengkosambi	55	32	0	0	Mingguan
15	Wangka	175	175	0	0	Mingguan
16	Wangka Selatan	60	43	175	175	Mingguan
17	Maronggela	320	320	320	320	Mingguan
18	Lindi	250	250	252	252	Mingguan
19	Wue	100	100	100	100	Mingguan
20	Jerebuu	260	260	260	260	Mingguan
21	Sobo	170	150	170	170	Mingguan (belum dibangun)
	Kabupaten	**5.631**	**6.030**	**6.002**	**6.002**	

Kelancaran distribusi barang di Kabupaten Ngada juga ditentukan oleh jumlah pasar dan jumlah kelompok dagang. Jumlah pedagang yang tercatat di Kabupaten Ngada cenderung meningkat meskipun sempat turun dan stagnan pada tahun 2018 dan 2019. Jumlah pedagang tersebut tersebar di 21 pasar di Kabupaten Ngada dengan aktivitas yang beragam. Jumlah kelompok pedagang terbanyak berada di Pasar Malanuza Kecamatan Golewa dengan rata-rata jumlah pedagang mencapai 1.055 orang selama tahun 2016-2019

2.3.3.5. Urusan Pilihan Perindustrian

Pengelolaan industri Kabupaten Ngada disusun dengan memperhatikan potensi sumberdaya industri daerah serta keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi. Kehadiran industri bagi daerah adalah untuk menambah penghasilan penduduk yang akan meningkatkan kemakmuran dan menghasilkan beraneka ragam barang yang diperlukan masyarakat. Industri juga dapat memperluas lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dan juga menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari bahan dasar yang diolah. Industri pengolahan diharapkan dapat memperluas kegiatan ekonomi sehingga tidak semata-mata tergantung pada alam.

Di Kabupaten Ngada, terdapat 5 jenis industri yakni pangan, sandang, kimia dan bahan bangunan, industri logam dan elektronik dan industri kerajinan yang selalu mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Data perkembangan industri tahun 2016-2019 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2. 82. Perkembangan Industri Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019

No	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Perusahaan	Naker	Perusahaan	Naker	Perusahaan	Naker	Perusahaan	Naker
1	Industri Pangan	612	1.435	696	1.659	768	1.797	800	1.872
2	Industri Sandang	350	678	375	774	392	808	399	826
3	Industri kimia dan bahan bangunan	146	372	179	179	209	452	219	479
4	Industri logam dan elektronik	49	255	78	317	102	309	114	393
5	Industri kerajinan	82	317	97	332	110	361	9	28
	Jumlah	**1.239**	**3.057**	**1.425**	**3.261**	**1.581**	**3.727**	**1.541**	**3.598**

Sumber : Dinas Perindustrian Kabupaten Ngada dan BPS Kab.Ngada Tahun 2016-2019.

Data industri menunjukkan bahwa semua jenis industri mengalami peningkatan dalam jumlah usaha maupun penyerapan tenaga kerja. Industri pangan merupakan industri yang paling banyak dikerjakan dan menyerap tenaga kerja jika dibandingkan dengan industri lainnya. Industri pangan mendominasi perindustrian di Kabupaten Ngada dengan rata-rata kontribusi

mencapai 49,68 persen pada tahun 2016-2019. Penyerapan tenaga kerja di industri pangan juga tercatat cukup tinggi dengan rata-rata mencapai 49,52 persen dari total tenaga kerja yang bekerja di sektor industri untuk periode yang sama.

Peranan industri lainnya tidak setinggi industri pangan. Industri kerajinan yang diharapkan dapat menjadi salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Ngada justru menjadi industri yang paling kecil dalam jumlah dan penyerapan tenaga kerja jika dibandingkan dengan industri lainnya. Jumlah industri kerajinan mengalami penurunan yang sangat tajam hingga 91,82 persen pada tahun 2019. Kontinuitas bahan baku produksi yang tidak terjamin, kurangnya akses bantuan permodalan, serta terbatasnya penggunaan teknologi tepat guna diduga menjadi beberapa penyebab menurunnya jumlah industri di bidang kerajinan maupun secara umum.

2.3.3.6. Urusan Pilihan Transmigrasi

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengembangkan daerah-daerah permukiman baru di daerah yang relatif jarang penduduknya;memindahkan penduduk supaya merata dan seimbangdi setiap wilayah; mendorong dan memperlancar proses pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup para transmigran. Sampai dengan tahun 2019 terdapat 3 lokasitransmigrasi di Kabupaten Ngada yakni: **a)** Satuan Pemukiman (SP) Maronggela dengan luasan 4.673ha dan jumlah penduduk 220KK. **b)** SP I Uluwae dengan luas wilayah 3200ha dan jumlah penduduk 250 KK. **c)** SP II Uluwae dengan luas lahan 600ha dan jumlah penduduk 50 KK. Sedangkan calon lokasi yang akan dikembangkan adalah Jeregheno dengan luasan potensial 246ha dan daya tampung 100 KK..

2.3.4. Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan

2.3.4.1. Urusan Perencanaan

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyrakat dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dan Nasional.

Sesuai dengan MOU antara Pemda Kabupaten Ngada dengan Pemda Kabupaten Batang Jawa Tengah tanggal 4 Mei 2017 Nomor 8/KB/2017-Nomor 019.5/0675/2017 tentang kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan dilanjutkan dengan pelatihan teknis bagi staf Pemda Ngada di Bappelitbang Batang. Pada Tahun 2018 Pemda Ngada mulai menggunakan aplikasi E-Planning dan E Budgeting .

Untuk menjamin terciptanya perencanaan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran Kabupaten Ngada telah mengembangkan E-Planning dan E-Budgeting. Kinerja penyelenggaraan penunjang urusan perencaan dapat digambarkan dengan menganalisis beberapa indikator salah satunya adalah indikator yang terkait dengan keselarasan antar dokumen perencanaan. Berikut ini merupakan capaian beberapa indikator kinerja penyelenggaraan penunjang urusan bidang perencanaan di Kabupaten Ngada.

Tabel 2. 83. Capaian Indikator Urusan Perencanaan 2016 - 2019

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	√	√	√	√
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	√	√	√	√
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	√	√	√	√
Tersedianya Dokumen Perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	√	√	√	√
Jumlah Program dalam APBD yang tidak dilaksanakan		-	-	-
Jumlah kegiatan dalam APBD		-	-	159
Jumlah Program APBD tahun berkenaan		160	201	109

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019
sesuai RKPD				
Jumlah program RKPD tahun berkenaan		169	201	109
Jumlah program RKPD yang dilaksanakan tahun berkenaan		169	201	109
Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan		183	201	147
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam APBD		92%	100%	74%
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		87.43%	100%	74.15%
Kesesuaian Rencana pembangunan dengan RTRW		32%	32%	32%

Sumber : SIPD BP-Litbang 2019

Secara umum, konsistensi program antar RKPD dan APBD mengalami penurunan pada tahun 2018-2019. Perkembangan data ini mengindikasikan belum optimalnya keselarasan perencanaan dengan dokumen penganggaran. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalinya sinergitas dan integrasi perencanaan pembangunan dan perencanaan keuangan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah

2.3.4.2. Urusan Keuangan Daerah

Urusan keuangan merupakan urusan yang sangat penting bagi penyelenggaraan pembangunan daerah. Salah satu indikator untuk melihat keberhasilan urusan ini adalah sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari Opini BPK. Berikut ini merupakan perkembangan beberapa indikator kinerja penunjang urusan keuangan di Kabupaten Ngada.

Tabel 2. 84. Capian Kinerja Urusan Keuangan

INDIKATOR	2017	2018	2019
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WTP	WTP
Total SILPA	42,650,753,006	38,676,068,638	60,578,001,528
Total APBD	883,783,607,781	821,148,883,166	908,603,055,786

INDIKATOR	2017	2018	2019
Presentase SILPA	5%	5%	7%
Presentase SILPA terhadap APBD	5%	5%	7%
Presentase program tidak terlaksana	-	-	-
Presentase kegiatan tidak terlaksana	-	-	1.46 %
Presentase belanja Pendidikan (20%)	80,859,218,737	94,252,932,700	105,489,044,986
Presentase belanja Kesehatan (10%)	71,473,916,239	73,124,680,447	83,615,207,635
Belanja Langsung	442,178,290,000	359,699,029,948	431,086,153,320
Belanja Tidak Langsung	441,605,317,780	461,449,853,217	477,516,902
Persentase belanja langsung	50%	44%	47%
Persentase belanja tidak langsung	50%	56%	0%
Bagi hasil kabupaten/ kota dan desa	42,650,753,006	38,676,068,638	60,578,001,528
Penetapan APBD	Tepat waktu		

Sumber :SIPD Badan Keuangan 2019

Secara umum, terdapat peningkatan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Kabupaten Ngada dari tahun 2017-2019. Perkembangan data tersebut mengindikasikan peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan penunjang keuangan di Kabupaten Ngada. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan koordinasi antar institusi pemerintah di Kabupaten Ngada.

2.3.4.3. Urusan Pengawas

Urusan pengawasan merupakan salah satu urusan yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Urusan ini berperan dalam memastikan tidak terjadinya pelanggaran dan penyelewengan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Penyelenggaraan penunjang urusan pengawasan di Kabupaten Ngada menghadapi beberapa permasalahan utama seperti belum optimalnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksanaan (TLHP) serta belum optimalnya penguatan integritas kelembagaan dan aparatur. Kondisi

tersebut disebabkan oleh beberapa persoalan seperti belum optimalnya SPIP, belum adanya pencanangan zona integritas dan penerapan WBK-WBBM, serta belum optimalnya sistem dan akses untuk memfasilitasi pengaduan masyarakat.

2.3.4.4. Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kapasitas SDM aparatur merupakan upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan publik, dilaksanakan melalui diklat formal, dengan mengirim tugas belajar dan pemberian ijin belajar,kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penilaian prestasi kerja, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan dan kesejahteraan bagi pegawai sesuai masa kerjanya, pemberhentian dan pensiun.Kinerja bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Pemerintah Kabupaten Ngada dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 85. Capain Kienerja Urusan Kepegawian dan Diklat

INDIKATOR	2017	2018	2019
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (PIM II)	112 hari	112 hari	112 hari
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (PIM III dan IV)	96 hari	96 hari	96 hari
Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fomal	-	10	9
Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural	16	3	8
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	169	201	109
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	169	201	109
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	183	201	147

Sumber : E database BKDIKLTAT, 2020

Secara umum, indikator kinerja penyelenggaraan penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan belum mengalami peningkatan yang berarti. Perkembangan data tersebut mengindikasikan belum optimalnya kualitas manajemen ASN di Kabupaten Ngada. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan utama seperti belum optimalnya sistem

pengembangan kompetensi pegawai, belum proporsionalnya jumlah pegawai sesuai kebutuhan, belum optimalnya pelayanan kepegawaian serta pengukuran kinerja pegawai yang belum optimal berkontribusi dalam permasalahan tersebut.

2.4. Aspek Daya Saing

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Aspek daya saing daerah Ngada terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Pengukuran tingkat daya saing terhadap 4 (empat) indikator variabel ini selanjutnya dilihat keterkaitannya dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dalam pengembangan kawasan cepat tumbuh, sektor uggulan, dan visi, serta misi Kepala Daerah. Keempat variabel dimaksud merupakan bagian dari pilar daya saing daerah disamping kesehatan, pendidikan dan ketersediaan tekhnologi serta pilar-pilar daya saing lainnya.

Hasil penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Ngada selama lima tahun dalam RPJMD 2016-2020 terhadap pelaksanaan aspek dan urusan pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 86. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal (2015)	Realisasi					Standar Provinsi NTT	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
I	**Aspek Kesejahteraan Rakyat**								
a	**Fokus Kesejahteraan & Pemerataan Ekonomi**								
1	**Urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**								
	Pertumbuhan PDRB (Harga Konstan)	4,80%	5,19%	5,17	5,00	5,03	5,03	-0,83	Pertumbuhan ekonomi baik karena melebihi standar provinsi
	Laju Inflasi	9,72%	3,62	1,70	2,00	1,84	1,84		
	PDRB perkapita (Harga Berlaku)	14.850.000	17.870.000	18.950.000	20.060.000	21.280.000	21.280.000		
	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	10,76%	12,69	12,77	12,94	12,48	12,51	21,09	Penduduk miskin di Kabupaten Ngada lebih sedikit dari persentase keseluruhan Provinsi NTT
b	**Fokus Kesejahteraan Sosial**								
1	**Urusan Pendidikan**								
	Rata - rata Lama Sekolah	7,51	7,61	7,85	8,07	8,37	8,52	7,63	Rata - rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Ngada berada diatas Provinsi NTT

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal (2015)	Realisasi					Standar Provinsi NTT	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
	Angka Harapan Lama Sekolah	11,99	12,66	12,67	12,68	12,69	12,70	13,18	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Ngada masih berada dibawah standar HLS Provinsi NTT
	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)								
	SD	42,33	48,68	42,21	42,21	42,21	42,21		
	SMP	13,97	14,37	17,13	17,13	17,13	17,13		
	Angka Partisipasi Kasar								
	PAUD	45,85	49,23	44,30	40,55	50,07	51,34	32,72	Angka partisipasi kasar PAUD di Kabupaten Ngada lebih baik dari Provinsi NTT
	SD	100,86	103,20	105,45	74,81	104,04	99,56	113,40	Angka partisipasi kasar SD di Kabupaten Ngada masih dibawah standar Provinsi NTT
	SMP	86,46	79,74	81,44	75,15	96,60	93,65	89,85	Angka partisipasi kasar SMP di Kabupaten Ngada berada diatas standar Provinsi NTT

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal (2015)	Realisasi					Standar Provinsi NTT	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
	Angka partisipasi murni								
	PAUD	43,55	43,46	55,38	40,61	47,31	47,65		
	SD	86,15	92,23	92,84	75,00	104,32	97,91	96,32	Angka partisipasi murni SD di Kabupaten Ngada berada diatas standar Provinsi NTT
	SMP	57,7	71,80	71,80	70,00	86,88	91,35	96,82	Angka partisipasi murni SMP di Kabupaten Ngada masih dibawah standar Provinsi NTT
	Kualifikasi Guru S1/D4	64,49	79,75	91,20	89,60	91,35	99,52		
	Persentase Penduduk dengan Ijazah Tertinggi Perguruan Tinggi	7,54%	7,54	5,25	5,25	8,04	8,04		
2	**Urusan Kesehatan**								
	Kasus Kematian Ibu	3	6	1	2	1	0		
	Kasus Kematian Bayi	51	51	33	26	15	23		
	Usia Harapan Hidup	67,32	67,34	67,36	67,59	67,96	68,04	67,01	Usia Harapan Hidup Kabupaten Ngada berada diatas standar Provinsi NTT

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal (2015)	Realisasi					Standar Provinsi NTT	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
	Angka Gizi Buruk (kasus)	**9**	**10**	**3**	**4**	**8**	**8**		
3	**Ketenagakerjaan**								
	Rasio Penduduk yang bekerja	96	96	97	98	97	95,31		
c	**Fokus Seni, Budaya, dan Olah Raga**								
	Jumlah Situs-Situ Budaya	14	24	24	24	24	24		
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
a	**Fokus Layanan Urusan Wajib**								
1	**Urusan Pendidikan**								
	Rasio Guru dan Murid (guru/murid *1000)								
	SD	0,80%	0,70	0,70	0,70	0,8	0,80		
	SMP	0,50%	0,70	0,70	0,70	0,80	0,80		
	SMA	0,20%	Kewenangan Pemerintah Provinsi						
2	**Urusan Kesehatan**								

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal (2015)	Realisasi					Standar Provinsi NTT	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk (Jumlah RS/ Jumlah Penduduk x1000)	**0,06**	**0,0064**	**0,0062**	**0,0062**	**0,0061**	**0,0061**		
	Jumlah Dokter (orang)	24	23	42	24	50	51		
	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	100%	100,00	100,00	94,97	100,00	100,00		
	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	95,10%	88,01	92,46	99,66	100,00	100,00		
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal (UCI)	86,01%	90,06	92,71	98,01	98,01	69,54		
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan Pasien masyarakat miskin	4,20%	1,80	3,37	0,79	2,20	0,18		
	Cakupan Kunjungan Bayi	94,10%	92,24	91,00	94,00	97,00	88,00		

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal (2015)	Realisasi					Standar Provinsi NTT	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
	Cakupan Puskesmas (%)	**0,09%**	**116,67**	**116,67**	**150,00**	**158,33**	**166,67**		
3	**Urusan Pekerjaan Umum**								
	Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan STBM	79	38	36	38	38	38		
	Persentase RT yang Ber PHBS	70,86%	75,00	64,46	63,64	64,00	24,29		
4	**Urusan Lingkungan Pemukiman**								
	Perumahan								
	Persentase KK yang telah terlayani Air Bersih (Rumah Tangga)	66,22%	70,18	73,88	78,18	80,05	83,23		
	Rumah Tangga yang Terlayani Listrik	72,03%	72,40	74,00	76,00	76,00	76,00		
	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	70,07%	34,00	75,52	75,52	74,73	76,26		
	Kawasan Kumuh (Ha)	27 Ha	0,93	0,63	0,53	0,43	0		
	Persentase Rumah Layak Huni	75,69%	75,69	73,00	73,00	81,00	74,69		
5	**Urusan Perencanaan Pembangunan**								

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal (2015)	Realisasi					Standar Provinsi NTT	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
	Tersedianya Dokumen RPJPD Yang Telah Ditetapkan dengan Perda	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Tersedianya Dokumen RPJMD Yang Telah Ditetapkan dengan Perda	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Tersedianya Dokumen RKPD Yang Telah Ditetapkan dengan Perbup	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD	92%	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00		
6	**Urusan Lingkungan Hidup**								
	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah	66,10%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Persentase sampah yang diolah pada TPST	0%	-	0,00	0,00	0,00	5,00		
7	**Urusan Pertanahan**								
	Total Lahan Bersertifikat Kabupaten	17.047	2.781	7.430	6.971	5.991	995		
	Total Lahan Pemerintah Kabupaten (Bidang)	483 Bidang	476	586	734	771	820		

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal (2015)	Realisasi					Standar Provinsi NTT	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
	Total Lahan Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	423 Bidang	395	501	451	496	544		
8	**Kependudukan dan Catatan Sipil**								
	Penduduk Ber KTP	95.703	95.703	96.160	100.539	103.600	104.608		
	Pasangan yang Berakte Nikah	14.307	14.307	9.231	11.305	15.172	15.940		
9	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
	Jumlah Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (Orang)	2.379	2.330	2.078	2.048	1.975	1.969		
	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (Orang)	35.557	35.557	29.750	21.903	21.903	21.903		
	Jumlah KDRT (Kasus)	28	33	26	17	8	19		
10	**Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera**								

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal (2015)	Realisasi					Standar Provinsi NTT	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	46,18%	52,33	49,64	54,73	64,08	65,14		
11	**Urusan Sosial**								
	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (KK)	787	121	90	93	155	0		
	Anak Terlantar (Orang)	1.036	12	506	585	585	148		
	Anak Korban Tindak Kekerasan (Orang)	**2**	**21**	**17**	**20**	**20**	**18**		
12	**Ketenagakerjaan**								
	Tingkat Penyelesaian Perselisihan hubungan Industri (PHI)	13	10	10	4	11	5		
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,80%	70,80	66,97	70,89	71,04	82,45		
	Pencari Kerja yang ditempatkan	30,96%	30,96	41,23	25,51	8,83	0,00		
	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,32%	1,32	3,23	2,11	3,38	4,69	4,28	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Ngada masih lebih tinggi dari Provinsi NTT

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal (2015)	Realisasi					Standar Provinsi NTT	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
									sehingga masih dibawah standar
13	**Urusan Koperasi UMKM**								
	Jumlah UMKM	2.146	2.507	2.532	2.574	2.608	2.705,00		
14	**Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**								
	Jumlah Lapangan Olah Raga	6	6	6	6	8	8		
15	**Urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**								
	Jumlah Pol PP (Orang)	121	119	117	111	109	108		
	Jumlah Linmas (Orang)	334	498	498	498	1510	1510		
16	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**								
	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	151	151	151	151	151	151		

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal (2015)	Realisasi					Standar Provinsi NTT	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
	Jumlah Kelompok Binaan PKK	151	151	151	151	151	151		
	Jumlah LSM	47	47	47	47	47	48		
17	**Urusan Statisik**								
	Buku Kabupaten Dalam Angka	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Buku PDRB Kabupaten	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
18	**Urusan Perpustakaan**								
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun (orang)	3.661	6.180	1.237	2.222	2.928	1.022		
	Koleksi Buku yang tersdia di Perpustakaan Daerah	24.437	700	700	700	17.783	17.783		
b	**Fokus Layanan Urusan Pilihan**								
1	**Urusan Pertanian**								
	Produksi Padi (Ton/Tahun)	4.589,00	67.488,00	77.414,00	73.259,00	67.938,00	50.763		
	Produksi Jagung (Ton/Tahun)	44.857,00	77.110,00	45.532,00	56.175,00	39.366,00	23.119,00		
	Produksi Kedelai (Ton/Tahun)	1.857,00	1.750,00	3.885,00	457,00	835,00	13,00		
	Produksi Kopi Beras (Ton/Tahun)	3.748,80	3.476,00	1.410,00	1.356,00	2.230,80	2.995,00		

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal (2015)	Realisasi					Standar Provinsi NTT	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
	Populasi Ternak Sapi (Ekor/Tahun)	28.186,00	19.835,00	40.193,00	44.843,00	42.071,00	46.594,00		
	Populasi Ternak Kambing (Ekor/Tahun)	21.581,00	22.897,00	27.713,00	27.976,00	29.260,00	30.894,00		
	Populasi Ternak Babi (Ekor/Tahun)	116.266,00	48.014,00	168.104,00	182.693,00	176.606,00	185.538,00		
2	**Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**								
	Rumah Tangga yang Terlayani Listrik (%)	72,03	72,40	74,00	76,00	76,00	82,61		
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
a	**Kemampuan Ekonomi**								
1	**Urusan Pariwisata**								
	Persentase Kunjungan Wisata (%)	3,34	14,17	9,98	30,74	20,65	0,00		
2	**Urusan Ketahanan Pangan**								
	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100%	100	100	90	100	100		
b	**Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**								

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal (2015)	Realisasi					Standar Provinsi NTT	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	**Urusan Perhubungan**								
	Jumlah Penumpang yang Melewati Pelabuhan Udara	25.089	25.089	67.095	78.385	86.774	44.373		
	Jumlah Barang yang Melewati Pelabuhan Udara (Kg)	219.561	225.649	581.000	607.400	380.300	182.761		
	Jumlah Penumpang yang Melewati Pelabuhan Laut	42.183	42.183	37.524	35.321	36.790	19.404		
	Volume Bongkat Muat Pelabuhan Laut (Ton)	5.043	5.043	4.845	5.369	3.144	874		
	Jumlah Hewan yang Melewati Pelabuhan Laut (ekor)	804	1.550	2.996	2.850	2.736	2.500		
2	**Urusan Pekerjaan Umum**								
	Persentase Panjang Jalan yang Menghubungkan Pusat Kegiatan dalam Wilayah Kabupaten	89,73%	90,98	93,46	95,73	100,00	1,00		

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal (2015)	Realisasi					Standar Provinsi NTT	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
	Panjang Jalan kabupaten dalam kondisi rusak menjadi baik (Km)	466,67	544,65	631,18	681,78	723,70	729,01		
3	**Urusan Lingkungan Pemukiman**								
	Penataan Ruang								
	Persentase Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah	38,80%	38,80	38,80	38,80	38,80	38,80		
4	**Urusan Kehutanan**								
	Luas Kawasan Hutan (Ha)	83.206,90	83.206,90	83.206,90	83.206,90	83.206,90	83.206,90		

Sumber: BPLITBANG Kabupaten Ngada, 2020

Kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang telah diolah dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi terkait dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah memiliki daya tarik (attactiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah ada di dalam dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah *(multiplier effect)* bagi peningkatan daya saing daerah.

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per kapita

Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi dalam peranannya sebagai pendorong daya saing suatu daerah adalah indikator pengeluaran konsumsi perkapita. Indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa besar tingkat pengeluaran rumah tangga.

Grafik 2. 52. Jumlah Rata- Rata Konsumsi per Kapita

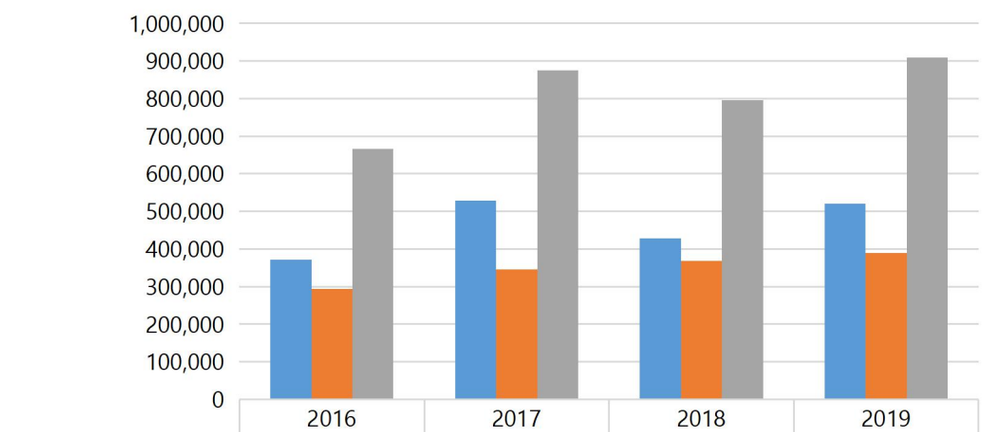

	2016	2017	2018	2019
Makanan	371,333	529,052	428,587	519,882
Non Makanan	294,700	346,133	367,888	389,385
Jumlah Pengeluaran	666,033	875,185	796,475	909,267

menurut Kelompok Konsumsi 2016 – 2019 (Rupiah per Bulan)

Sumber Data : NTT Dalam Angka Tahun 2020

Pengeluaran konsumsi perkapita di Kabupaten Ngada dari tahun 2016 -2019 cenderung mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami

penurunan pada tahun 2018. Rata-rata pertumbuhan pengeluaran per kapita masyarakat Ngada mencapai 12,19 persen yang didominasi oleh peningkatan pengeluaran konsumsi untuk makanan. Proporsi pengeluaran per kapita untuk makanan setiap tahunnya selalu lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk non makanan. Rata-rata proporsi pengeluaran per kapita untuk makanan mencapai 56,80 persen pada tahun 2016-2019 yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Pengeluaran per kapita untuk non makanan juga mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat Ngada. Rata-rata pertumbuhan pengeluaran per kapita untuk non makanan mencapai 9,86 persen.

Grafik 2. 53. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Makanan dan Non Makanan dalam Sebulan di Kabupaten Ngada dan Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

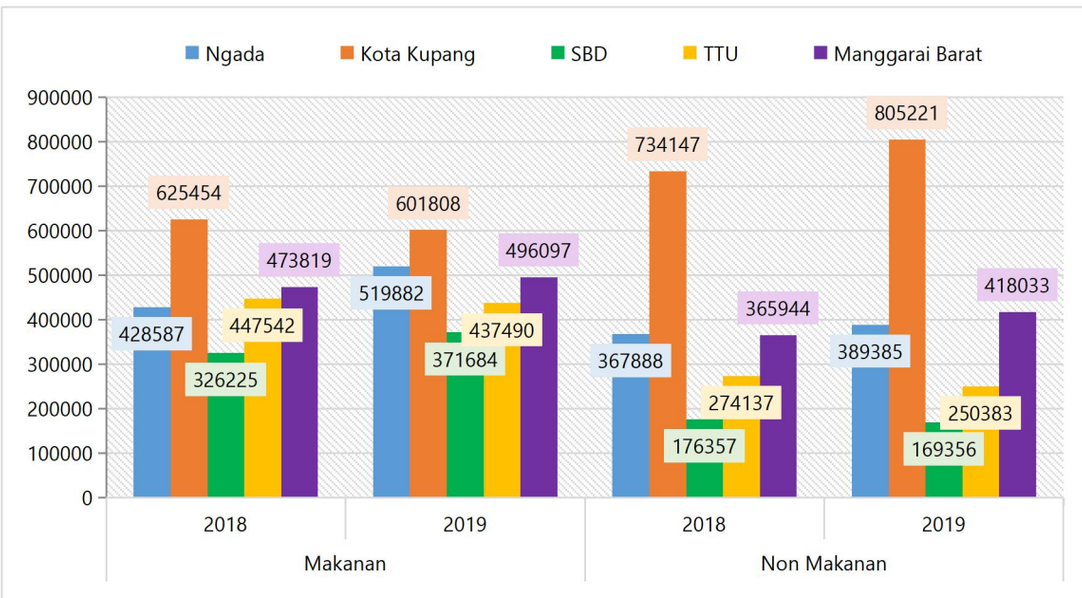

Tahun 2018-2019 (Rupiah)

Sumber Data : NTT Dalam Angka Tahun 2020

Tingkat rata-rata konsumsi per kapita untuk kelompok pengeluaran makanan paling tinggi adalah di Kota Kupang diikuti oleh Kabupaten Manggarai Barat lalu Kabupaten Ngada. Kondisi serupa juga terjadi pada konsumsi per kapita untuk kelompok pengeluaran non makanan.Tinggi rendahnya pengeluaran per kapita mencerminkan tingkat kesejahteraan di sebuah wilayah meskipun gambaran tersebut sifatnya masih sangat umum. Proporsi pengeluaran makanan dan non makanan juga umumnya digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dengan asumsi semakin

sejahtera sebuah rumah tangga maka semakin tinggi pengeluaran di luar kebutuhan makanan.

2.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio/perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. NTP dikelompokkan berdasarkan sub sektor tanaman pangan, hortilultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Adapun makna besaran NTP yaitu:

- ✓ NTP > 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik dan menjadi lebih besar dari pengeluarannya.
- ✓ NTP = 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu sama dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- ✓ NTP < 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu menurun dibandingkan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya.

Grafik 2. 54. Nilai Tukar Petani di Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020

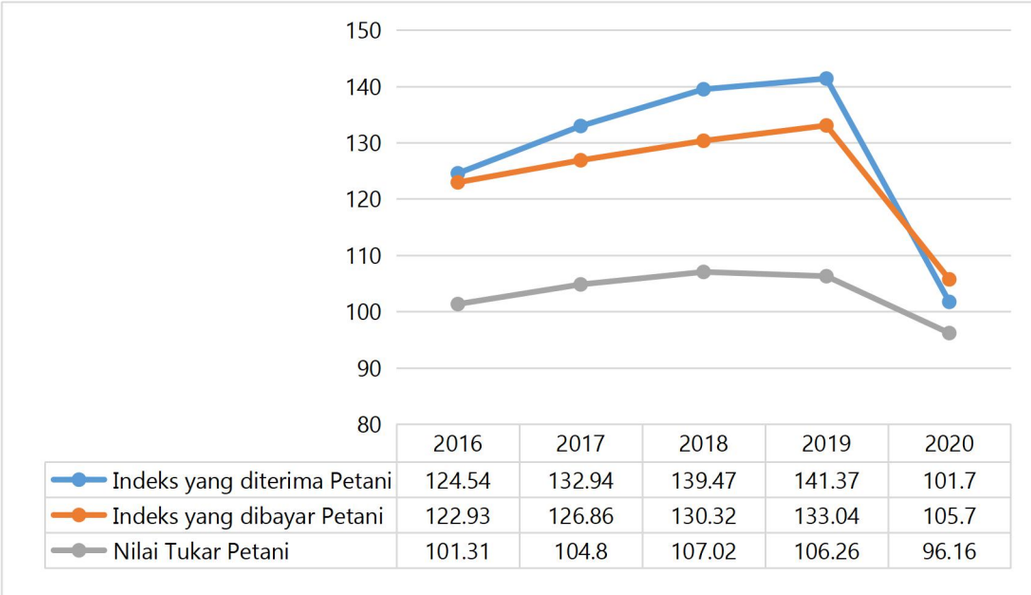

Sumber Data : BPS Ngada 2020

NTP di Kabupaten Ngada mengalami peningkatan pada tahun 2016-2018 lalu mulai menurun pada tahun 2019. Besaran NTP pada tahun 2016-2018 berada pada kisaran angka 104,37 yang menandakan petani mengalami surplus. Pada tahun tersebut pendapatan petani meningkat melebihi pengeluarannya. Peningkatan pada Nilai Tukar Petani (NTP) disebabkan oleh peningkatan indeks harga yang diterima dan indeks yang dibayarkan petani, sehingga terjadi peningkatan harga komoditas produksi sedangkan dari sisi konsumsi mengalami penurunan harga komoditas. Peningkatan NTP pada tahun 2016-2018 mencapai 2,78 persen meskipun setelahnya turun sebesar 0,71 persen pada tahun 2019 dan menurun tajam hingga 9,50 persen pada tahun 2020. NTP sebesar 96,16 pada tahun 2020 menggambarkan petani mengalami defisit karena kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya.

2.4.1.3. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan (presentase Konsumsi Rumah Tangga per kapita)

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga diluar pangan. Dari indikator ini dapat dilihat bagaimana kecenderungan masyarakat untuk membelanjakan pendapatannya selain makanan. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dapat diketahui dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan yaitu

proporsi totalpengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.

Tabel 2. 87. Rata- Rata Konsumsi per Kapita menurut Kelompok Konsumsi 2016 – 2019 (Rupiah per Bulan)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Total Pengeluaran RT Non Pangan	294.700	346.133	367.888	389.385
2	Total Pengeluaran	666.432	875.185	796.475	909.267
3	Rasio (1/2)	44,22%	39,55%	46,19%	42,82%

Sumber Data : NTT Dalam Angka Tahun 2020

Rata-rata pengeluaran penduduk untuk kelompok bukan makanan cenderung fluktuatif meskipun pada tahun 2018 sedikit meningkat yakni sebesar 46,19 persen dibanding tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menggambarkan masyarakat Ngada memiliki kecenderungan untuk mengalokasikan pendapatannya untuk konsumsi makanan meskipun pendapatannya meningkat. Semakin tinggi pendapatan/ kesejahteraan seseorang maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan akan semakin meningkat

2.4.1.4. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas angkatan kerja tiap sektor atau seberapa produktif setiap tenaga kerja dalam mendorong ekonomi daerah (9 sektor). Kesembilan sektor dimaksud dikelompokkan lagi menjadi 3 (tiga) sektor yakni:(1)sektor primer yang meliputi: pertanian;pertambangan dan penggalian; (2)sektor sekunder yang meliputi: industri pengolahan; listrik, gas, air bersih; dan bangunan/konstruksi; (3)sektor tersier yang meliputi: perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa.

Peningkatan produktivitas dalam pembangunan ekonomi perlu dilakukanmengingat harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang

memiliki kemampuan, keahlian, dan kompetensi untuk bekerja. Produktivitas angkatan kerja merupakan salah satu indikator kesejahteraan angkatan kerja dan tingkat efisiensi penggunaan angkatan kerja dalam menghasilkan barang dan jasa.

Tabel 2. 88. Jumlah PDRB dari Setiap Sektor dan Angkatan KerjaKabupaten Ngada Tahun 2016-2018

Sektor	2016		2017		2018	
	PDRB	Tenaga Kerja	PDRB	Tenaga Kerja	PDRB	Tenaga Kerja
Primer	699.200	43.940	720.390	40.821	746.580	41.100
Sekunder	321.480	5.653	348.600	7.552	376.860	13.659
Tersier	970.980	20.795	1.025,650	19.446	1.075,870	19.053

Sumber Data : BPS Ngada Tahun 2019

Produktivitas total daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 3(tiga) sektor tersebut.

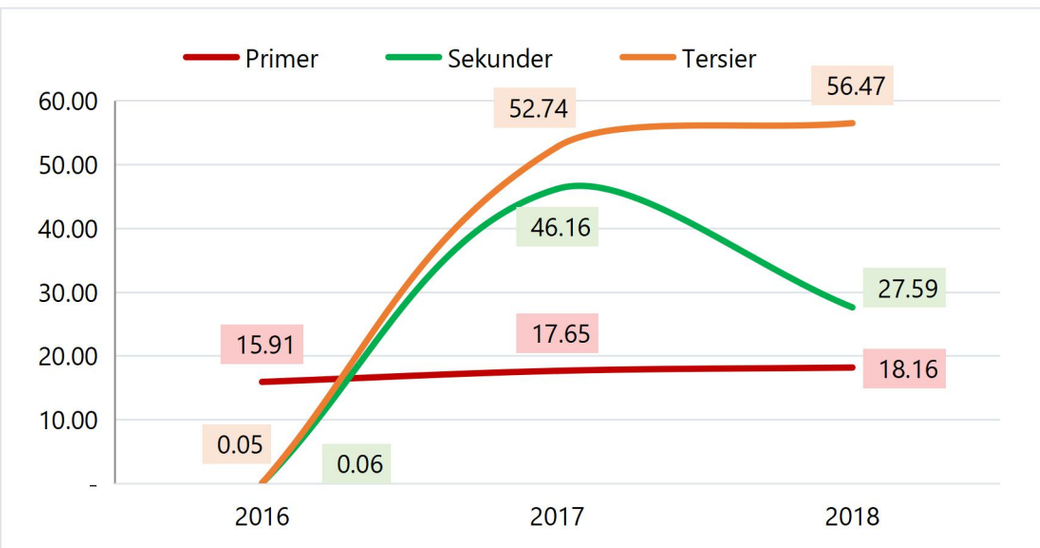

Grafik 2. 55. Produktivitas Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 -2018

Grafik produktivitas daerah di Kabupaten Ngada Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa sektor primer dan tersier mengalami peningkatan dibanding dengan sektor sekunder. Untuk sektor sekunder mengalami penurunan ditahun 2018 sebesar 27,59 persen. Secara makro,

sektor primer merupakan sektor yang menyerap angkatan kerja paling besar, yaitu sekitar 43,94 juta pada tahun 2016 atau sekitar 60 persen dari total angkatan kerja yang bekerja. Pada periode 2016-2018 terjadi kecenderungan kenaikan penyerapan angkatan kerja sektor pertanian sebesar 1,03 persen pertahun. Penurunan penyerapan angkatan kerja disektor pertanian merupakan konsekuensi logis dari arah pembangunan nasional yang mengarah kepada pembangunan industri dan jasa. Namun demikian, arah pembangunan tersebut mengakibatkan penurunan PDRB pertanian yang tidak diimbangi penurunan penyerapan angkatan kerja yang signifikan.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah diberbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Fasilitas wilayah atau infrastruktur yang dianalisis dalam dokumen ini:

Akesibilitas daerah, dengan menghitung rasio panjang jalan perjumlah kendaraan, dan jumlah orang/barang melalui dermaga dan bandara pertahun; danPenataan wilayah, dengan menghitung presentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas kawasan budidaya sesuai RTRW, menghitung rasio luas wilayah perkotaan terhadap luas wilayah budidaya sesuai RTRW, yang penjelasannya sebagaimana berikut.

2.4.2.1. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Salah satu aspek yang mendukung daya saing daerah adalah keberadaan infrastruktur perhubungan, yang akan memudahkan akses distribusi barang dan jasa. Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan.

Grafik 2. 56. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2016 – 2019

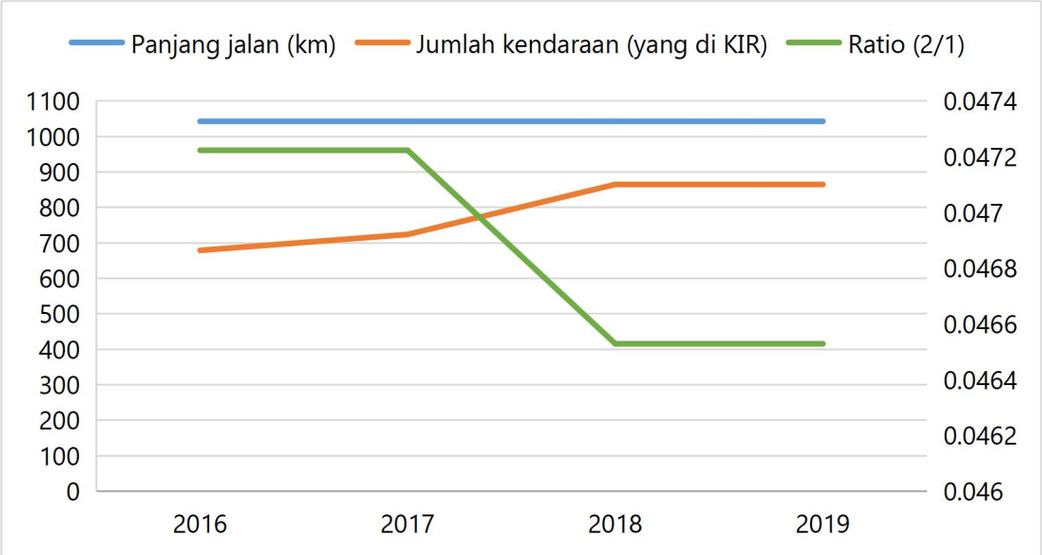

Sumber Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada, 2020

Berdasarkan data, panjang jalan di Kabupaten Ngada sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tidak mengalami peningkatan, namun jumlah kendaraan cenderung meningkat.Sedangkanrasio panjang jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan cenderung menurun dari 1:8 menjadi 1: 7. Pada tahun 2018-2019 jumlah kendaraan yang diKIR menjadi tetap karena tidak adanya pengujian KIR terhadap kendaraan roda empat yang disebabkan ketiadaan alat penguji.

2.4.2.2. Ketaatan terhadap RTRW

Ketaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada adalah perbandingan antara Rencana peruntukan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada dengan Realisasi Rencana Tata Ruang Wilayah yang tertuang dalam bentuk Program Kegiatan yang berhubungan dengan Perencanaan Tata Ruang.

Tabel 2. 89. Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2017 s.d 2019

No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Realisasi RTRW	44	44	44	44
2	Rencana peruntukan RTRW	139	139	139	139
3	Presentase	32%			

Sumber : Laporan Akhir Peninjauan Kembali RTRW Kab. Ngada 2012-2032

Dari tabel data di atas terlihat tidak ada perubahan sejak tahun 2016-2019, dengan rasio ketaatan RTRW yang diperoleh adalah 32 %.

2.4.2.3. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budi daya sesuai dengan RTRW. Rasio luas wilayah produktif sampai tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 90. Rasio Wilayah Produktif

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Luas Wilayah (Ha)	1620.92	1620,92	1620,92	1620,92
2	Luas Budi Daya (Ha)	22.63	22,63	22,63	22,63
3	Rasio	71.63	71.63	71.63	71.63

Sumber : RTRW Kabupaten Ngada

Luas wilayah budi daya dan rasionya dari tahun 2016 hingga tahun 2019 menunjukan tren yang stagnan. Kawasan budi daya tersebut meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

2.4.2.4. Perbankan

Perekonomian daerah sangat tergantung dari perbankan yang digunakan untuk transaksi ekonomi antar pelaku usaha. Jasa layanan dan produk-produk perbankan merupakan kegiatan penunjang untuk melancarkan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan keuntungan bagi bank semakin besar karena kelengkapan fasilitas dan pelayanan yang dimiliki membuat banyak calon nasabah yang mau menggunakan jasa layanan bank ini.

Perkembangan jumlah kantor Bank mengalami peningkatan yang cukup baik yakni terdapat 4 kantor Bank yang beroperasi di Kabupaten Ngada saat ini antara lain : Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank NTT. Secara umum perkembangan sektor perbankan di Kabupaten Ngada selama

periode 2016-2019 dan cenderung mengalami peningkatan. Bank BNI, dan Bank Mandiri hanya memiliki satu cabang saja dan bertempat di Bajawa. Bank NTT hanya memiliki 3 kantor yakni Cabang Bajawa dan Cabang Pembantu di Kecamatan Golewa dan Aimere. Sedangkan Bank BRI memiliki 6 kantor yang bertempat di Cabang Bajawa dan Unit Surisina, Cabang Pembantu di Kecamatan Aimere, Golewa, Soa dan Riung.

Tabel 2. 91. Jenis Simpanan Bank di Kabupaten Ngada per 31 Desember 2017-2019 (Rupiah)

Jenis Tabungan	2017	2018	2019
1. Tabungan / Saving	489,081,990	112,961,323	120,271,389
2. Simpanan Berjangka	97,923,390	45,266,227	35,735,051
Deposito	97,923,390	45,266,227	35,735,051
PKBB	-	-	-
Bank	-	-	-
Jumlah / Total	**587,005,380**	**158,227,550**	**156,006,440**

Sumber : Ngada dalam Angka 2020

Penggunaan jasa Perbankan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Ngada masih bersifat konsumtif, jasa bank digunakan untuk transaksi penarikan tunai dan transfer. Masyarakat juga belum memiliki kesadaran cukup untuk minat/ daya menabung di Bank. Perkembangan Perbankan di Kabupaten Ngada hampir tidak terlalu signifikan, hal ini dikarenakan pesatnya Koperasi Kredit yang berkembang di seluruh Kecamatan se Kabupaten Ngada dan masyarakat lebih banyak menabung atau melakukan pinjaman melalui Kopdit karena setiap akhir tahun masyarakat/konsumen akan mendapat jasa pinjaman ataupun jasa simpanan yang biasa di terima melalui SHU.

2.4.2.5. Fasilitas Penginapan dan Restaurant

Fasilitas penginapan dan restaurant merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang menggambarkan daya saing daerah. Adapun hotel yang memiliki fasilitas restaurant terlihat dari tabel berikut :

Tabel 2. 92. Jumlah Hotel dan Restoran di Kabupaten Ngada Tahun 2016 -2019

No.	Tahun	Hotel Berbintang	Hotel Non bintang	Jumlah
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	2016	-	33	33

No.	Tahun	Hotel Berbintang	Hotel Non bintang	Jumlah
2	2017	-	38	38
3	2018	-	44	44
4	2019	-	52	52

Sementara itu jumlah restoran/rumah makan berdasarkan jenis makanan yang disediakan kondisi tahun 2018 sebanyak 57 buah meningkat menjadi 60 di tahun 2019 dengan rincian *Chinnese Food* satu buah, *European food* enam buah, *Indonesian food* enam buah, *International food* enam buah, dan *Sea food* enam buah yang tersebar pada 12 kecamatan.

Tabel 2. 93. Fasilitas Hotel dan Penginapan di Kabupaten Ngada Tahun 2017 -2019

No	Kelas dan Fasilitas	2017			2018			2019		
		Jumlah hotel	Jumlah kamar	Jumlah tempat tidur	Jumlah hotel	Jumlah kamar	Jumlah tempat tidur	Jumlah hotel	Jumlah kamar	Jumlah tempat tidur
1	Hotel tidak berbintang	38	381	644	44	478	742	52	567	782
2	< 10 kamar	26	169	293	28	174	299	26	139	208
3	10 – 24 kamar	9	135	234	14	218	327	22	284	382
4	> 24 kamar	3	77	117	2	86	116	4	144	192
	Jumlah	38	381	644	44	478	742	52	567	782

Sumber : Ngada Dalam Angka, 2020

Keadaan dari tahun 2017 dan 2018 menunjukkan bahwa jumlah penginapan dan hotel di Kabupaten Ngada terus mengalami peningkatan. Untuk tahun 2019 ada penurunan jumlah hotel sebanyak 2 buah pada jenis penginapan <10 kamar). Total Penambahan hotel dari tahun 2017 hingga tahun 2019 sebanyak 14 hotel dengan total penambahan kamar sebanyak 186 kamar.

2.4.2.6. Air Bersih dan Listrik

Sumber air baku di Kabupaten Ngada diperoleh dari mata air yang diolah di instalasi Pengolahan air minum. Salah satu nya adalah PDAM. Berikut dapat dilihat cakupan Pelayanan Air Bersih yang telah dilayani oleh PDAM sejak tahun 2016 hingga tahun 2020.Pada tahun 2020 jumlah Rumah Tangga terlayani air bersih PDAM sebanyak 9.230 RT atau 28% dari total Rumah

Tangga sebanyak 32.594 RT dan yang belum terlayani air bersih berjumlah 72% Jika dibandingkan dengan tahun 2016 jumlah rumah tangga terlayani air bersih sebanyak 7.778 RT mengalami peningkatan sebanyak 1.452 RT atau 19%.

Tabel 2. 94. Cakupan Pelayanan Air Bersih PDAM Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kecamatan yang sudah terlayani air bersih	6	6	6	6	6
2	Jumlah Instansi yang sudah terlayani air bersih	108	110	106	105	110
3	Jumlah Rumah Tangga yang sudah terlayani air bersih	7.778	8.378	9.097	9.100	9.230
4	Presentasi Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih	25%	27%	29%	28%	28%
5	Proyeksi ketersediaan Air Bersih sampai dengan 2024	175 liter/detik				

Sumber : PDAM Kabupaten Ngada

Sementara itu, jika dilihat dari aspek pelayanan air bersih secara keseluruhan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 2. Berikut. Tahun 2019 jumlah KK yang terlayani air bersih baik dari PDAM maupun bukan PDAM adalah sebanyak 27.908 KK atau sekitar 79 % dari toatal KK di tahun 2015 sebesar 35.320 KK jumlah ini meningkat dari tahun awal RPJMD tahun 2015 yang hanya mencapai 66.22 % atau sebayak 23.389 KK yang terlayanai air bersih.

Grafik 2. 57. Capaian Pelayanan Air Bersih

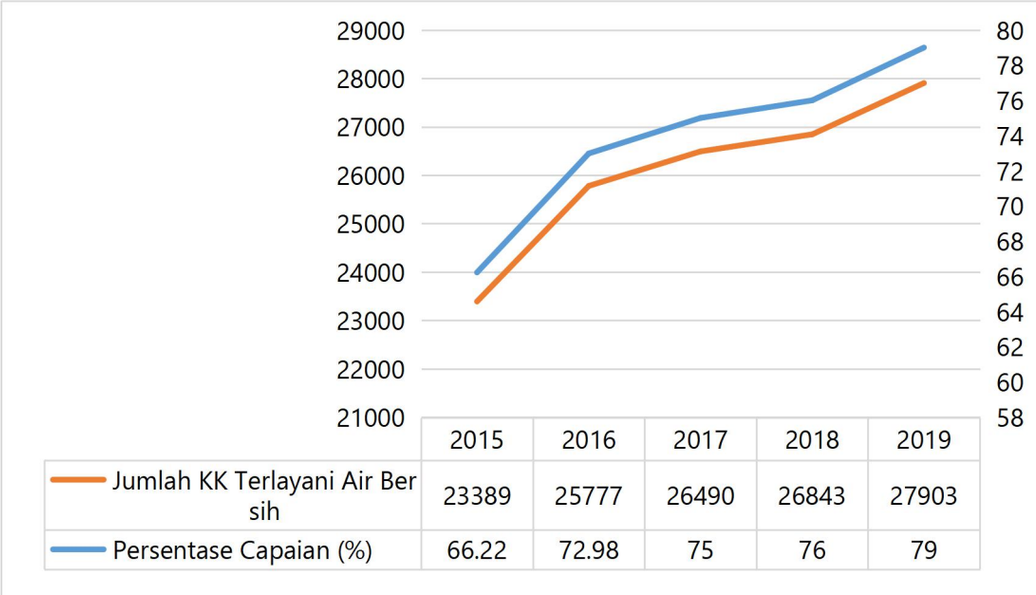

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah KK Terlayani Air Bersih	23389	25777	26490	26843	27903
Persentase Capaian (%)	66.22	72.98	75	76	79

Sumber : RKPD Kabupaten Ngada, 2020

Energi listrik yang digunakan di Kabupaten Ngada bersumber dari pembangkit tenaga mikrohydro (PLTMH Waeroa dengan kapasitas 60 KW yang berlokasi di Kecamatan Jerebuu dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPb) Mataloko dengan kapasitas terpakai 1 X 1,8 MW yang berlokasi di Kecamatan Golewa serta PLTD Faobata dengan daya 5.500 KW yang berlokasi di Kecamatan Bajawa.Gardu Induk Bajawa memeliki kapasitas sebesar 20 MW dan tegangan 70/20 KV yang berlokasi di Kecamatan Bajawa. Energi listrik yang tersedia dihubungkan melalui jaringan Saluran udara tegangan ultra tinggi (SUT) dengan tegangan sebesar 150 KV yang menghubungkan kota Bajawa- Ruteng-Labuan Bajo kemudian jaringan saluran udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan sebesar 70 KV yang menghubungkan PLTU Ulumbu Ruteng- Bajawa dan Bajawa-Ende.

Untuk akses terhadap listrik sampai tahun 2019persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik sebesar 77 % dari 34.778 rumah tahun 2015. Dari presentase jumlah RT yang menggunakan listrik masih terdapat 23 % dari total rumah tangga yang belum terlayani listrik .

2.4.2.7. Sarana Telekomunikasi

Sesuai dengan perkembangan teknologi alat komunikasi seperti telepon, telepon selular (handphone/HP), dan komputer menjadi salah satu fasilitas

perumahan yang sangat pesat pertumbuhannya. Untuk penggunaan/kepemilikan telepon selular (handphone/HP) bukan lagi dilihat perrumah tangga tetapi dari semua anggota rumah tangga yang berusia 5 tahun keatas. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat,akses masyarakat terhadap teknologi tersebut semakin luas dan mudah. Saat ini HP tidak hanya digunakan oleh orang dewasa saja, tetapi anak-anak pun sudah banyak yang menggunakan atau memiliki HP.

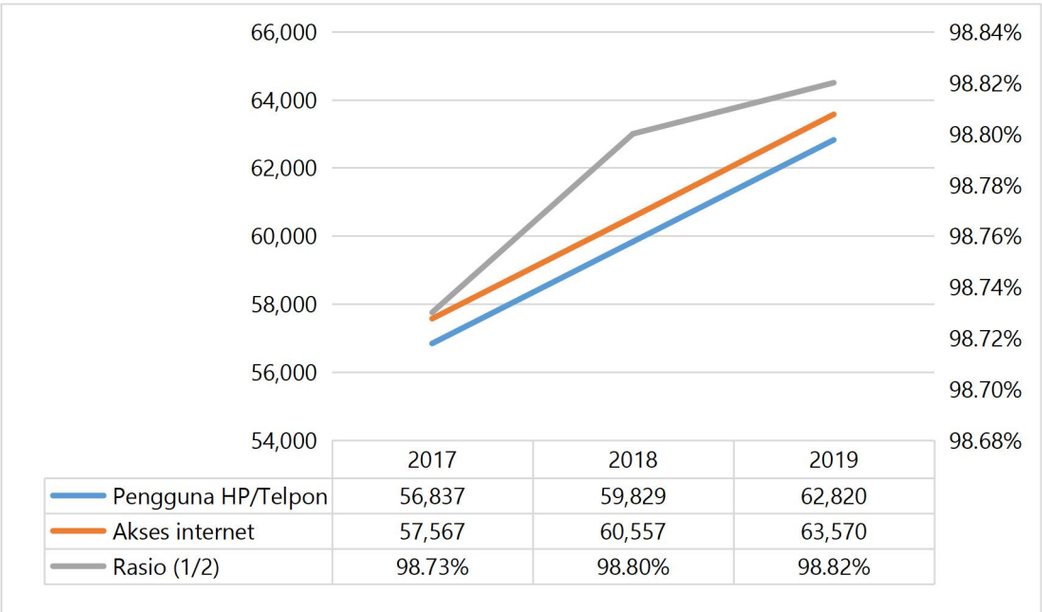

Grafik 2. 58. Pengguna HP dan Layanan internet Tahun 2017-2019

Perkembangan penggguna sarana telekomunikasi dari tahun 2017-2019 dilihat pada grafik 2.59 berikut :

Grafik 2. 59. Penggunaan Media Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada

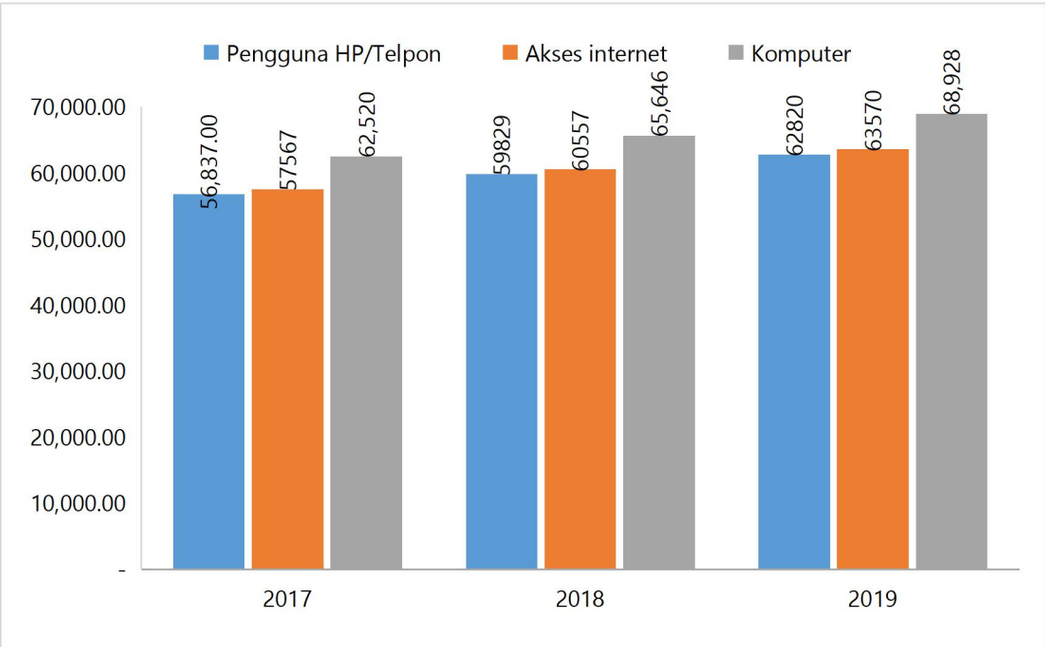

Sumber data : SIPD Dinas Kominfo, Tahun 2020 (data diolah)

Jumlah penduduk yang memliki HP dari tahun 2017-2019 terus mengalami peningkatan ditahun 2019 sebanyak 62.820 RT atau 38,65%. Demikian pun jumlah rumah tangga yang memiliki komputer mengalami peningkatan ditahun 2019 sebanyak 68.928 RT. Selain itu jumlah RT yang memiliki akses internet 63.570 atau 38,65% dari jumlah penduduk. Dengan adanya peningkatan baik jumlah pengguna HP maupun pengguna internet hal ini akan memudahkan akses informasi dan komunikasi secara online dalam semua aspek dan memberikan manfaat berkomunikasi lebih cepat,mempersingkat waktu dan menghemat biaya serta proses perdagangan dapat dilakukan secara online.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan jumlah suatu tindakan kejahatan yang dapat melanggar nilai dan norma hukum serta perilaku tersebut dapat meresahkan dan merugikan banyak pihak baik dirinya sendiri sebagai pelaku terlebih lagi orang lain yang menjadi korban dari tindakan tersebut. Kriminalitas dapat dilakukan oleh individu, kelompok maupun komunitas.Angka kriminalitas di Kabupaten Ngada cukup rendah jika dibandingkan dengan daerah/kabupaten lain. Sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2019 angka kriminalitas di Kabupaten Ngada berkisar antara 5.58 - 10.25.

Tabel 2. 95. Angka Kriminalitas di Kabupaten Ngada Tahun 2016 - 2020

No	Jenis Kriminal	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	-
2	Jumlah kasus pembunuhan	1	-	2	1
3	Jumlah kejahatan seksual	-	-	2	3
4	Jumlah kasus penganiyaaan	65	103	47	70
5	Jumlah kasus pencurian	48	60	39	39
6	Jumlah kasus penipuan	-	-	-	-
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	-	-	-	-

No	Jenis Kriminal	2016	2017	2018	2019
8	Jumlah tindak kriminal selam 1 tahun	114	163	90	113
9	Jumlah penduduk	156.101	159.081	161.191	163.217
10	Angka Kriminal (8/9)	7,30	10,25	5,58	6,92

Sumber data : BPS Ngada 2020

Data menunjukkan angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Ngada secara khusus belum mengancam iklim investasi sehingga keamanan terhadap investor tergolong cukup baik. Angka kriminalitas cenderung menurun selama periode 2016-2019 meskipun sedikit naik pada tahun 2019. Namun, kondisi riil menunjukkan jenis kejahatandan kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Ngada relatif umum dan dalam jumlah yang relatif kecil.

Tabel 2. 96. Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Ngada, Tahun 2016-2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bidang Politik	-	1	2	-	-
2	Bidang Ekonomi	1	1	-	1	-
3	Kasus Pemogokan Kerja	-	-	-	-	-
	Jumlah Unjuk Rasa	**1**	**2**	**2**	**1**	**-**

Sumber data : Badan Kesbang 2020

Jumlah demonstrasi/unjuk rasa damai yang terjadi pada pada kurun waktu 2016 sampai 2020 relatif kecilyakni hanya sebanyak 6 kali.Demonstrasi yang dilakukan mayoritasberkaitan dengan urusan politik dan lainnya. Rendahnya angka kriminalitas maupun demonstrasi menunjukkan bahwawilayah di Kabupaten Ngadacukupkondusif untuk berinvestasi.

2.4.3.2. Kemudahan Investasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014,penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah pelayanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Untuk memberikan kemudahan pelayanan perizinan bagi investor maupun masyarakat yang membutuhkannya telah dibentuk Dinas Penanaman Modal PelayananTerpadu Satu Pintu (PMPTSP). Jenis pelayanan perizinan yang

diberikan oleh PMPTSP berupa7 layanan perizinan dengan kisaran waktu layanan antara 2-5 hari. Pemberian dan perhitungan pajak perorangan/badan usaha/kantor dan retribusi juga mendukung iklim investasi.

Jumlah pajak yang dipungut sebanyak 10 jenis sedangkan retribusi daerah sebanyak 30 jenis. Jenis pajak yang dipungut antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan Bea Perolehan Hak AtasTanah dan Bangunan (BHTB). Sejak tahun 2013, sejalan dengan ketentuan daerah juga mempunyai kewenangan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sementara retribusi yang dikenakan meliputi 1).Retribusi Jasa Umumyangterdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahandan kebersihan, retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor. 2) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retibusi terminal, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penjualan produksi usaha daerah, dan 3).Retribusi Perizinan tertentu yang terdiri dari retribusi IMB, retribusi izin gangguan/keramaian, retribusi SIUP/TDP, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha konstruksi dan retribusi izin usaha perikanan.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1. Kualitas Angkatan Kerja

Kualitas angkatan kerja diukur oleh jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan. Berdasarkan data 2016-2019, ditemukan bahwa penduduk berumur 15 tahun ke atas atau penduduk usia produktif di Kabupaten Ngada masih didominasi oleh lulusan SD/Sederajat yaitu sebanyak 30.385 orang dari total 73.815 orang atau sebanyak 41,16%. Data ini dipengaruhi oleh kurangnya akses penduduk terhadap layanan pendidikan. Pada saat yang sama, jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan tergantung salahsatunya pada kebijakan pemerintah daerah dalam menyediakan beasiswa pendidikan.

Secara lebih spesifik, kualitas angkatan kerja juga dapat dilihat pada lingkup penduduk yang bekerja di lembaga pemerintahan/ASN. Berdasarkan tabel di bawah, terlihat bahwa ASN yang telah menyelesaikan pendidikan S1 cenderung meningkat dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Pada saat yang sama, jumlah ASN yang menyelesaikan pendidikan S2 cenderung fluktuatif. Jumlah tersebut juga bergantung pada kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan beasiswa S1 dan S2 bagi ASN.

Tabel 2. 97. Rasio Lulusan rasio lulusan S1/S2/S3 yang diperoleh dari PNS di Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020

Tahun	Laki- Laki			Perempuan		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3
2016	644	34	0	807	10	0
2017	466	38	0	661	14	0
2018	564	50	0	960	17	0
2019	596	48	1	1033	19	0
2020	596	48	0	1033	19	0

Dari sisi lapangan pekerjaan, mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dan perikanan, sedangkan tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, pekerjaan kasar, transportasi pada urutan kedua. Jika dilihat dari aspek gender, maka proporsi laki-laki masih dominan yang bekerja pada semua jenis pekerjaan utama.

2.4.4.2. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan merupakan perbandingan penduduk usia 0-14 tahun dan diatas 65 tahun atau usia non-produktif dibandingkan dengan penduduk usia 15-64 tahun atau usia produktif. Seperti ditampilkan dalam grafik, dalam kurun waktu tahun 2017-2019, rasio ketergantungan di Kabupaten Ngada terus mengalami penurunan meskipun sedikit fluktuatif.

Grafik 2. 60. Rasio Ketergantungan

Sumber Data: E database SIPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2020 (Data diolah).

Kecenderungan angka yang semakin menurun menandakan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif menjadi semakin sedikit. Semakin berkurangnya beban tersebut disebabkan oleh 1) berkurangnya jumlah usia non produktif; atau 2) bertambahnya jumlah penduduk usia produktif sehingga mampu menopang beban penduduk usia non produktif.

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengartikan Keuangan Daerah sebagai hak dan kewajiban Daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Keungan Daerah meliputi : a) hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b) kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c) Penerimaan Daerah; d) Pengeluaran Daerah; e) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau f) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Gambaran keuangan daerah Kabupaten Ngada menjadi informasi yang penting dalam perencanaan dan penganggaran, serta untuk melihat kemampuan daerah dalam merencanakan maupun melaksanakan program kegiatan lima tahun ke depan dengan tetap menekankan tiga prinsip Tata

Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, dan akuntabilitas.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.

Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Ngada masa lalu menggambarkan pola perencanaan dan penganggaran yang disesuaikan dengan penetapan prioritas RPJMD periode 2015-2020 serta tuntutan peraturan perundangan yang berlaku saat itu. Gambaran keuangan tersebut menjadi dasardalam meproyeksikan perencanaan pembangunan daerah dimasa mendatang, khususnya dalam memproyeksikan target kinerja keuangan periode mendatang.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan Kabupaten Ngada dalam kurun waktu tahun 2016-2020 sebesar 5,45 persen, sedangkan belanja sebesar 6,05 persen. Pada komponen pendapatan, rata-rata pertumbuhan tertinggi disumbang oleh komponen lain-lain PAD yang sah yakni 11,82 persen, serta pajak daerah dengan rata-rata pertumbuhan 11,58 persen per tahun.

Dari aspek kontribusi pendapatan, Kabupaten Ngada masih bergantung pada dana perimbangan yang menyumbang hingga 70 persen bagi APBD Ngada, menyusul lain-lain PAD yang sah 21 persen dan PAD sekitar 5-7 persen. Dari gambaran kemandirian pendapatan ini, terlihat bahwa potensi pendapatan daerah belum dimaksimalkan sepenuhnya. Kemandirian daerah tergambarkan dari besaran pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan sumber pendapatan yang tidak bersifat konstan, karena bersumber dari kommponen seperti jasa giro, pendapatan BLUD RSUD, Kapitasi JKN serta denda keterlambatan pekerjaan, dan lain-lain.

Pada sisi belanja, pertumbuhan tertinggi pada belanja hibah karena adanya hibah ke KPU/Bawaslu terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sedangkan belanja bantuan sosial mengalami penurunan terbesar sekitar 27 persen. Proporsi APBD masih didominasi belanja tidak langsung sebesar 55,8 persen, sedangkan belanja langsung sebesar 44,2 persen. Kontribusi terbesar belanja tidak langsung diperuntukan bagi belanja pegawai yakni gaji dan tunjangan sebesar 32 persen, menyusul belanja bantuan keuangan ke desa sebesar 17,8 persen. Sedangkan belanja modal sebesar 22,7 persen dari total APBD tahun 2020.

Untuk menghitung rata-rata pertumbuhan digunakan rumus rata-rata geometric sebagai berikut:

Rata-Rata Pertumbuhan $= \{(1+P_1)(1+P_2)(1+P_t)\}^{1/t} - 1$

Dimana:

P = Perubahan Nilai dari nilai tahun sebelumnya, yang dihitung dengan rumus:

$$P = \frac{pn-p(n-1)}{p(n-1)}$$

Dimana:

pn = nilai suatu periode

P(n-1) = nilai pada periode 1 tahun sebelumnya

t =periode pengamatan perubahan nilai

Tabel 3. 1. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ngada, Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	**PENDAPATAN**	**822,526,387,751**	**841,132,853,774**	**782,472,814,528**	**848,025,054,258**	**908,207,824,670**	5.45%
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**42,489,366,019**	**65,253,752,165**	**51,121,989,495**	**50,835,854,938**	**71,453,132,203**	10.91%
1.1.2	Pajak Daerah	5,200,685,855	6,311,969,467	6,709,390,243	7,373,244,843	9,881,067,563	11.58%
1.1.2	Retribusi Daerah	3,364,362,972	2,366,223,550	2,810,737,886	4,744,442,000	5,415,997,900	7.57%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Dipisahkan	3,302,822,332	3,302,822,332	1,953,487,481	1,834,234,089	4,040,000,000	4.11%
1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	30,621,494,860	53,272,736,816	39,648,373,885	36,883,934,006	52,116,066,740	11.82%
1.2	**Dana Perimbangan**	**650,695,938,637**	**658,390,274,844**	**598,668,651,000**	**644,942,046,671**	**643,940,958,000**	3.19%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10,348,615,737	15,400,060,844	9,457,155,000	8,619,577,671	9,046,013,000	(0.31%)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	473,589,249,000	468,961,498,000	470,536,836,000	487,971,775,000	493,775,402,000	2.60%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	166,758,073,900	174,028,716,000	118,674,660,000	148,350,694,000	141,119,543,000	5.70%
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**129,341,083,095**	**117,488,826,765**	**132,682,174,033**	**152,247,152,649**	**192,813,734,467**	13.26%
1.13.1	Hibah	1,250,000,000		20,887,223,537	23,676,589,421	22,475,457,889	3,73%
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	12,529,776,095	13,896,424,765	15,270,663,496	18,136,757,228	15,726,442,310	(20.76%)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Tunj Profesi Guru)	115,363,307,000	-	-	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	198,000,000	-	-	-	-	-
1.3.7	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	42,092,761,000	0.00%
1.3.8	Pendapatan Lainnya (Dana Desa)	-	103,592,402,000	96,524,287,000	110,433,806,000	112,519,073,268	2.79%

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
2	**Belanja**	**911,324,159,779**	**883,783,607,780**	**821,148,883,166**	**908,603,055,786**	**925,678,225,816**	6.05%
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**482,212,463,647**	**441,605,317,780**	**461,449,853,217**	**477,516,902,466**	**516,438,093,511**	5.32%
2.1.1	Belanja Pegawai	314,020,438,830	265,448,121,707	279,735,233,363	279,466,579,197	301,125,752,431	1.03%
2.1.4	Belanja Hibah	5,517,800,000	4,830,000,000	12,931,000,000	10,193,115,500	43,412,244,500	16.88%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17,922,308,565	17,348,358,417	18,896,500,000	24,820,850,010	3,900,000,000	(27.87%)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	810,000,000	810,000,000	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	143,251,916,252	152,778,837,656	146,472,757,117	160,329,235,413	164,440,096,580	17.98%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,500,000,000	1,200,000,000	3,414,362,737	1,897,122,346	2,750,000,000	34.29%
2.2	**Belanja Langsung**	**429,111,696,132**	**442,178,290,000**	**359,699,029,949**	**431,086,153,320**	**409,240,132,305**	7.00%
2.2.1	Belanja Pegawai	50,157,849,139	22,028,076,017	40,269,453,960	51,051,100,053	17,468,984,421	(13.20%)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	135,899,776,502	120,550,086,870	125,565,341,831	166,153,964,065	182,063,835,938	12.32%
2.2.3	Belanja Modal	243,054,070,491	299,600,127,113	193,864,234,158	213,881,089,202	209,707,311,946	6.31%
3	**Pembiayaan**	**88,797,772,028**	**42,650,753,007**	**38,676,068,638**	**60,578,001,528**	**17,470,401,146**	(29.33%)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	89,797,772,028	42,650,753,007	38,676,068,638	60,578,001,528	17,470,401,146	(29.33%)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	1,000,000,000	-	-	-	-	-

Sumber: LHP Tahun 2016-2019
**) APBD 2020*

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar yang dikelompokan menjadi kas atau aset lainnya yang dapat diuangkan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan mendatang serta aset non lancar yang terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek yakni kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan, serta kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Grafik 3. 1. Proporsi Aset Kabupaten Ngada Tahun 2019

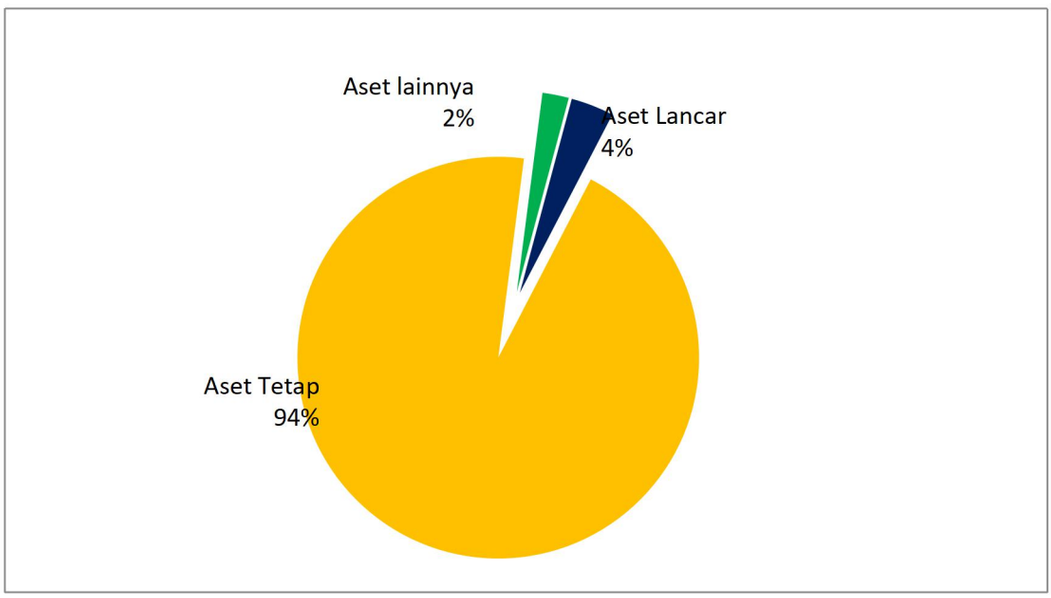

Nilai Aset Kabupaten Ngada keadaan akhir tahun 2019 sebesar Rp 2,521 triliun dengan rincian aset tetap Rp 2,381 triliun, aset lancar Rp 87,116 miliar dan aset lain-lain sebesar Rp 53,515 miliar. Komponen terbesar aset Kabupaten Ngada adalah jalan, irigasi dan jaringan yakni sebesar Rp 1,226 triliun, sedangkan jumlah kewajiban daerah sebesar Rp 7,325 miliar.

Dalam kurun waktu 3 tahun, aset Kabupaten Ngada secara akumulatif meningkat sebesar 30,2 persen, sedangkan kewajiban berkurang 6,7 persen. Pertumbuhan tertinggi pada aset tetap disumbangkan oleh komponen aset tanah yang meningkat 189 persen dari Rp 43,270 miliar tahun 2017 menjadi Rp 288,818 miliar tahun 2019. Peningkatan terjadi secara signifikan karena adanya tambahan nilai aset tanah berupa tanah ruang milik jalan kabupaten yang sebelumnya belum dicatat. Sejak tahun 2018 sudah dilakukan penataan dan dicatat sebagai aset daerah. Dari aspek rata-rata pertumbuhan selama dalam 3 tahun, maka sset lancar bertumbuh 9,03 persen, aset tetap 32 persen dan aset lainnya minus 8,7 persen. Rincian rata-rata pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Ngada data dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017-2019

No	Uraian	2017	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	**ASET**				
1.1	ASET LANCAR	66,894,888,754	79,090,265,173	87,116,705,750	9.03%
1.1.1	Kas	41,901,226,927	60,492,474,573	68,019,794,763	13.0%
1.2.3	Piutang	14,314,358,815	8,660,810,127	9,213,074,705	5.3%
1.1.3	Persediaan	10,679,303,012	9,936,980,473	9,883,836,281	-6.8%
1.2	ASET TETAP	1,179,365,733,112	1,488,986,813,331	2,381,282,965,358	32.7%
1.2.1	Tanah	43,270,345,821	284,615,090,906	288,818,042,519	106.3%
1.2.2	Peralatan dan Mesin	239,677,792,662	257,995,441,963	272,139,405,794	4.7%
1.2.3	Gedung dan Bangunan	431,572,058,301	458,026,514,232	482,785,012,263	6.7%
1.2.4	Jalan, Irigasi dan jaringan	1,033,064,049,578	1,152,061,321,234	1,226,675,138,939	13.0%
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	38,009,904,419	52,610,880,531	52,003,896,757	14.8%
1.2.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	43,804,912,633	31,827,055,127	58,861,469,086	28.2%
1.2.7	Akumulasi Penyusutan	(650,033,330,302)	(748,149,490,662)	-	-100.0%
1.3	ASET LAINNYA	75,893,304,534	36,152,726,727	53,515,453,551	-8.7%
	tagihan Jangka Panjang	425,961,343	413,044,676	379,138,825	-3.5%
1.3.4	Aset tak Berwujud	3,134,525,180	2,703,785,370	7,103,045,560	27.5%
1.3.5	Aset Lain - lain	72,332,818,011	33,035,896,681	46,033,269,166	-11.5%
	JUMLAH ASET DAERAH	1,322,153,926,400	1,604,229,805,232	2,521,915,124,658	29.7%
2	**KEWJIBAN**	**12,220,976,406**	**4,662,766,262**	**7,325,908,265**	**-11.8%**
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	12,220,976,406	4,662,766,262	7,325,908,265	-11.8%
2.1.1	Utang Perhitungan	3,063,046,990	-	400,346,667	9.5%

No	Uraian	2017	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Pihak Ketiga				
2.2.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	9,157,929,416	4,662,766,262	6,925,561,598	-6.0%
3	**EKUITAS LANCAR**	**1,369,404,224,318**	**1,654,874,079,604**	**1,720,862,336,169**	**13.0%**
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI				
	JUMLAH KEWAJIBAN DANA EKUITAS DANA	1,381,625,200,724	1,659,536,845,866	1,728,188,244,434	12.8%

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017-2019 (Diolah)

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran digunakan untuk melihat perbandingan penggunaan anggaran untuk kebutuhan aparatur dengan total anggaran yang ada. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur antara lain: belanja gaji dan tunjangan aparatur, belanja tambahan penghasilan, belanja penerimaan anggota dan Pimpinan DPR, serta operasinal Kepala Daerah. Selain itu yang termasuk dalam kategori belanja pemenuhan kebutuhan aparatur adalah belanja honorarium PNS, uang lembur, beasiswa pendidikan, belanja kursus, diklat, premi asuransi kesehatan, makan minum pegawai, belanja perjalanan dinas, dan belanja modal gedung kantor, mobil dinas, meubeler, kendaraan, peralatan dan perlengkapan.

Berdasarkan data yang ada, dalam tiga tahun terakhir, proporsi belanja untuk kebutuhan aparatur sebesar 45 s/d 48 persen. Komponen terbesar dari belanja tersebut adalah gaji dan tunjangan yang pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 237,537 miliar. Komponen terbesar kedua adalah belanja modal untuk gedung kantor, kendaraan, mebeler dan lain-lain sebesar Rp 48,7 miliar, menyusul belanja perjalanan dinas yang tahun 2020 dianggarkan Rp 47,01 miliar. Sedangkan komponen belanja-belanja lain berada pada kisaran dibawah Rp 5 miliar.

Tabel 3. 3. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ngada Tahun 2018 - 2020

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) Rp	Presentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	Tahun Anggaran 2018	381,316,052,937.40	821,148,883,166.22	46.44
2	Tahun Anggaran 2019	437,924,328,015.50	908,603,055,786.00	48.20
3	Tahun Anggaran 2020*	422,848,679,173.00	925,678,225,816.00	45.68

*Sumber: Laporan Realisasi APBD 2018-2019 *) APBD 2020*

3.2.2. Analisa Pembiayaan

Pembiayaan dimaknai sebagai transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Tabel 3. 4. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Ngada, Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)*
1	Realisasi Pendapatan Daerah	761,773,721,395.50	838,573,810,001.39	908,207,824,670
	Dikurangi Realisasi:			
2	Belanja Daerah	739,148,645,073.46	829,096,229,321.51	925,678,225,816
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
	Defisit/surplus Riil	22,625,076,322.04	9,477,580,679.88	(17,470,401,146)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2018-2019

**) APBD 2020*

Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2018 dan 2019, terlihat bahwa realisasi belanja lebih kecil dari realisasi pendapatan, atau terjadi selisih positif. Secara riil kondisi ini bukan karena terlampauinya target pendapatan. Realisasi pendapatan tahun 2018 hanya mencapai 97,3 persen dan tahun 2019 sebesar 100 persen. Kondisi selisih positif disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1) Adanya penghematan serta efisiensi pelaksanaan kegiatan, adanya sisa tender serta rencana satuan anggaran yang lebih tinggi dibanding harga satuan di lapangan.
2) Kegiatan fisik sudah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan namun tahun anggaran telah berakhir sehingga pembayaran dan atau pekerjaannya digeser ke tahun anggaran berikut, dan anggarannya menjadi SiLPA untuk dibayarkan pada tahun anggaran berikut
3) Kegiatan yang telah direncanakan dalam belanja, tidak jadi dilaksanakan, sehingga komponen pendapatan yang telah dialokasikan untuk belanja kegiatan dimaksud tidak terpakai.

Komponen terbesar penyebab adanya selisih positif antara pendapatan dan belanja adalah point dua (2) di atas. Hal ini bisa dilihat dari neraca berupa komponen Konstruksi dalam pengerjaan yang pada tahun 2019 sebesar Rp 58,8 miliar, tahun 2018 sebesar Rp 31,8 miliar, tahun 2017 sebesar Rp 43,8 miliar dan tahun 2016 sebesar Rp 27,9 miliar. Surplus tersebut sebenarnya lebih banyak merupakan kewajiban pemerintah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

Bila dibandingkan antara APBD tahun berkenan dengan realisasinya sebenarnya terdapat kesenjangan. Dari aspek belanja direncanakan secara maksimal dengan mengoptimalkan semua rencana pendapatan, ditambah rancangan SILPA untuk membiayai rencana belanja program dan kegiatan. Komponen terbesar penutupan defisit riil anggaran bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya. Dengan demikian maka rancangan belanja harus benar-benar terukur dan realistis sesuai kemampuan pendapatan daerah.

Tabel 3. 5. komposisi Penutupan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Ngada, Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ISiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	37,950,722,456	60,386,666,786	17,470,401,146
2	Pencairan Dana	-	-	-

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
	Cadangan			
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	2,202,750	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	1,350,000	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2018-2019
**) APBD 2020*

Realisasi SiLPA Kabupaten Ngada tahun 2019 sebesar Rp.60,3 miliar lebih, meningkat 59 persen dari tahun 2018. Komponen terbesar SiLPA tahun 2019, merupakan kegiatan lanjutan serta kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dalam bentuk konstruksi dalam pengerjaan yang menyumbang 97 persen. Sementara sumbangan dari aspek pendapatan justru negatif. Kondisi ini menggambarkan bahwa optimalisasi pendapatan harus terus dipacu sehingga bisa menjadi sumber untuk menutupi defisit.

Tabel 3. 6. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Ngada, Tahun 2018-2019

No	Uraian	2018 (Rp)		2019 (Rp)	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	37,950,722,456	100%	60,386,666,786	100%
2	Pelampauan Penerimaan PAD	(9,766,895,664)	-25.7%	422,568,871	0.7%
3	Pelampauan Penerimaan dana Perimbangan	(7,806,750,245)	-20.6%	(7,989,779,429)	-13.2%
4	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	(3,125,447,223)	-8.2%	(619,195,985)	-1.0%
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	6,123,667,329	16,1%	1,102,628,829	1,8%
6	Kegiatan Lanjutan	31,827,055,127	83.9%	58,861,469,086	97.5%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2018-2019

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Pendapatan Kabupaten Ngada diproyeksikan akan terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,90 persen pada tahun 2022-2026. Belanja daerah juga turut tumbuh sedikit lebih kecil dari pendapatan daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,77 persen untuk periode yang sama. Pada komponen pendapatan, pertumbuhan didorong oleh Pendapatan Asli Daerah khususnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada sisi belanja, pertumbuhan tertinggi disumbang oleh belanja modal dan belanja pegawai. Proyeksi pendapatan dan belanja kabupaten Ngada tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 7. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ngada (Rupiah), Tahun 2022 - 2026

Kode Akun	Uraian	APBD	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	**PENDAPATAN**	858.105.536.973,00	1.000.021.932.256,64	1.031.156.777.799,71	1.063.296.196.994,79	1.099.002.579.539,43	1.136.038.554.238,75	5,90
4.1	Pendapatan Asli Daerah	55.201.351.668,00	112.632.303.176,64	117.043.865.514,71	121.469.674.464,79	128.429.899.401,43	135.646.221.183,75	24,62
4.1.01	Pajak Daerah	7.619.601.150,00	9.524.501.437,50	10.476.951.581,25	11.524.646.739,38	13.253.343.750,28	15.241.345.312,82	15,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.906.482.300,00	5.887.778.760,00	6.795.640.537,95	7.412.114.890,77	8.426.054.100,60	9.100.138.428,65	13,23
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.138.109.192,00	49.452.290.099,24	49.615.153.871,62	49.868.987.334,56	50.136.781.637,96	50.444.988.536,23	849,42
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	41.537.159.026,00	47.767.732.879,90	50.156.119.523,90	52.663.925.500,09	56.613.719.912,60	60.859.748.906,04	8,00
4.2	Pendapatan Transfer	783.362.833.305,00	863.205.169.790,00	889.025.821.650,00	915.803.111.837,00	943.578.003.315,00	972.390.754.786,51	4,46
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	769.503.244.000,00	847.478.727.480,00	873.299.379.340,00	900.076.669.527,00	927.851.561.005,00	956.664.312.476,51	4,49
4.2.01.01	Dana Perimbangan	638.701.047.000,00	686.492.412.614,00	708.991.652.718,00	732.354.744.151,00	756.620.057.778,00	781.829.838.341,38	4,14
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	7.017.691.000,00	9.046.013.000,00	9.046.013.000,00	9.046.013.000,00	9.046.013.000,00	9.046.013.000,00	5,78
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	453.957.148.000,00	519.771.017.919,00	533.277.627.499,00	547.135.215.675,00	561.352.902.870,00	575.948.078.344,62	4,98
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus	177.726.208.000,00	157.675.381.695,00	166.668.012.219,00	176.173.515.476,00	186.221.141.908,00	196.835.746.996,76	2,31
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	20.041.970.000,00	42.092.761.000,00	42.092.761.000,00	42.092.761.000,00	42.092.761.000,00	42.092.761.000,00	22,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	110.760.227.000,00	118.893.553.866,00	122.214.965.622,00	125.629.164.376,00	129.138.742.227,00	132.741.713.135,13	4,46

Kode Akun	Uraian	APBD	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	13.859.589.305,00	15.726.442.310,00	15.726.442.310,00	15.726.442.310,00	15.726.442.310,00	15.726.442.310,00	2,69
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	13.859.589.305,00	15.726.442.310,00	15.726.442.310,00	15.726.442.310,00	15.726.442.310,00	15.726.442.310,00	2,69
4.2.02.02	Bantuan Keuangan.	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	19.541.352.000,00	24.184.459.290,00	25.087.090.635,00	26.023.410.693,00	26.994.676.823,00	28.001.578.268,50	7,74
4.3.01	Hibah	-	24.184.459.290,00	25.087.090.635,00	26.023.410.693,00	26.994.676.823,00	28.001.578.268,50	3,73
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.541.352.000,00	-	-	-	-	-	-
5	**Belanja**	847.933.995.967,00	985.021.932.256,64	1.016.156.777.799,71	1.048.296.196.994,79	1.084.002.579.539,43	1.116.038.554.238,75	5,77
5.1	Belanja Operasi	532.421.727.932,00	599.838.107.166,40	620.940.301.676,85	641.779.122.517,16	653.896.622.009,96	666.280.289.204,79	4,66
5.1.01	Belanja Pegawai	297.215.808.902,00	350.700.424.370,10	368.235.445.588,61	386.647.217.868,04	396.313.398.314,74	406.221.233.272,60	6,60
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.132.685.830,00	235.159.292.796,30	238.686.682.188,24	241.073.549.010,13	243.484.284.500,23	245.919.127.345,23	3,72
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	11.101.583.200,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.0070.000.000,00	(1,98)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.971.650.000,00	3.978.390.000,00	4.018.173.900,00	4.058.355.639,00	4.098.939.195,00	4.139.928.586,95	(14,77)
5.2	Belanja Modal	138.349.885.882,00	207.784.744.999,24	212.963.067.728,86	219.245.679.438,63	237.676.901.495,47	252.034.773.306,34	14,02

Kode Akun	Uraian	APBD	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5.3	Belanja Tidak Terduga	18.631.509.024,00	2.833.050.000,00	2.833.327.750,00	2.861.661.028,00	2.890.277.638,00	2.919.180.414,38	(16,36)
5.4	Belanja Transfer	158.530.873.129,00	174.566.030.091,00	179.420.080.644,00	184.409.734.011,00	189.538.778.396,00	194.804.311.313,25	4,25
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	815.508.829,00	810.000.000,00	810.000.000,00	810.000.000,00	810.000.000,00	810.000.000,00	(0,14)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	157.715.364.300,00	173.756.030.091,00	178.610.080.644,00	183.599.734.011,00	188.728.778.396,00	193.994.311.313,25	4,27
6	**Pembiayaan**	(10.171.541.006,00)	(15.000.000.000,00)	(15.000.000.000,00)	(15.000.000.000,00)	(15.000.000.000,00)	(20.000.000.000,00)	
	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-	-	-	
	Pengeluaran Pembiayaan	10.171.541.006,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	20.000.000.000,00	

Sumber: Hasil Proyeksi Pemerintah Kabupaten Ngada, 2021

Penghitungan APBD 2022-2026 didasarkan pada rata-rata pertumbuhan komponen pendapatan dan belanja pada periode sebelumnya yang kemudian disesuaikan menggunakan *expert judgement*. Pendapatan Kabupaten Ngada diproyeksikan masih bersumber pada pendapatan transfer dengan rata-rata kontribusi sebesar 86,02 persen. Pendapatan tersebut didominasi oleh pendapatan transfer Pemerintah Pusat dengan rata-rata kontribusi sebesar 84,54 persen dari total pendapatan daerah. Komponen dana perimbangan menjadi sumber pendapatan terbesar di antara komponen dana transfer lainnya dengan rata-rata sebesar 68,79 persen.

Belanja operasi di Kabupaten Ngada diproyeksikan menjadi sumber pengeluaran terbesar dengan rata-rata kontribusi mencapai 60,65 persen pada tahun 2022-2026. Belanja operasi didominasi oleh belanja pegawai serta barang dan jasa dengan rata-rata kontribusi sebesar 36,34 persen dan 22,97 persen. Pertumbuhan belanja operasi diperkirakan terus menurun dan digantikan oleh peningkatan pertumbuhan belanja modal guna mendukung program pembangunan daerah. Belanja modal diperkirakan akan menjadi sumber pengeluaran terbesar kedua setelah belanja operasi dengan rata-rata kontribusi sebesar 21,50 persen selama tahun 2022-2026.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Tahapan penghitungan kerangka pendanaan didahului dengan penghitungan kapasitas riil keuangan daerah. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangi oleh belanja dan pengeluaran pembiayaan yang sifatnya wajib dan mengikat. Belanja wajib dan mengikat yang diperhitungkan antara lain belanja pegawai, belanja transfer termasuk belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, serta pengeluaran pembiayaan yaitu penyertaaan modal BUMD.

Penghitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana

penggunaannya. Penghitungan Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2021-2026 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 8. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Ngada (Rupiah), Tahun 2021-2026

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	858.105.536.973,00	1.000.021.932.256,64	1.031.156.777.799,71	1.063.296.196.994,79	1.099.002.579.539,43	1.136.038.554.238,75
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-	-	-	-	-	-
	Total Penerimaan	858.105.536.973,00	1.000.021.932.256,64	1.031.156.777.799,71	1.063.296.196.994,79	1.099.002.579.539,43	1.136.038.554.238,75
	Dikurangi						
1	Jumlah Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	517.590.608.793,80	606.708.060.130,43	630.402.988.720,17	655.104.836.146,35	673.026.354.610,09	695.718.629.683,59
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	340.514.928.179,20	393.313.872.126,21	400.753.789.079,54	408.191.360.848,45	425.976.224.929,34	440.319.924.555,17

Sumber: Hasil Proyeksi Pemerintah Kabupaten Ngada, 2021

Kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Ngada diproyeksikan akan terus meningkat. Rata-rata pertumbuhan kapasitas riil keuangan daerah diperkirakan mencapai 5,40 persen selama periode 2021-2026. Komponen perhitungan kapasitas riil saat ini mengalami perubahan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sehingga tidak ada lagi komponen belanja tidak langsung sebagai pengurang total penerimaan. Oleh karena itu, komponen belanja wajib mengikat dan prioritas utama berupa belanja pegawai, belanja operasional rutin, dan belanja transfer menjadi pengurang total penerimaan bersama dengan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 3. 9. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada (Rupiah), Tahun 2021-2026

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	340.514.928.179	393.313.872.126	400.753.789.080	408.191.360.848	425.976.224.929	440.319.924.555
Prioritas I	238.360.449.725	275.319.710.488	280.527.652.356	285.733.952.594	298.183.357.451	308.223.947.189
Prioritas II	102.154.478.454	117.994.161.638	120.226.136.724	122.457.408.255	127.792.867.479	132.095.977.367

Sumber: Hasil Proyeksi Pemerintah Kabupaten Ngada, 2021

Hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selanjutnya dialokasikan ke dalam prioritas 1 dan 2. Anggaran pada prioritas 1 digunakan untuk program prioritas daerah dan pelayanan dasar, sedangkan anggaran prioritas 2 digunakan untuk mendanai pelaksanaan program di seluruh misi yang mencerminkan berfungsinya seluruh urusan pemerintahan yang menopang efektivitas pembangunan Kabupaten Ngada.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk membiayai prioritas pembangunan daerah, sangat ditentukan oleh basaran pendapatan daerah; baik dana Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Dana Transfer. Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan pendapatan antara lain:

1. Penataan dan optimalisai Semua aset Pemda untuk mendukung peningkatan PAD.
2. Mendorong Inovasi Perangkat untuk meningkatkan Pandapatan daerah, dengan prinsip kewirausahaan birokrasi.
3. Melakukan penyesuaian Perda tentang Pajak dan Retribus daerah untuk mendorong peningkatan Pajak Asli Daerah.
4. Menerapkan sistem pembayaran Non Tunai dalam pemungutan/pembayaran Pajak dan Retribusi
5. Memaksimalkan peran Perangkat Daerah yang memiliki obyek retribusi dan pajak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah.
6. Menerapkan system insentif dan disinsentif dalam pelayanan pajak dan retribusi.
7. Mendorong Kewirausahaan Birokrasi untuk mendukung Upaya Peningkatan Pendapatan Asli daerah melalui pengembangan komoditi unggulan.
8. Memaksimalkan peran UPT Perangkat Daerah sesuai tupoksi untuk pengembangan komoditi unggulan yang berdampak pada peningkatan PAD.
9. Pembentukan BUMD untuk melakukan usaha baik pada sisi produkasi unggulan daerah maupun pada jenis usaha jasa lainnya.

10. Membangun kerjasama kewirausahaan dengan Pihak Ketiga (Kelompok Petani, Koperasi, Kelompok Pemuda, BUMDesma atau Pengusaha) untuk pengembangan komoditi Unggulan dalam bentuk Pembiayaan dengan system perjanjian kerjasama.
11. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mendapatkan pembiayan kementerian dan lembaga
12. Membangun kemitraan dengan lembaga donor, LSM, sektor swasta, dan masyarakat dalam pembangunan masyarakat.
13. Mendorong investasi sektor swasta di Kabupaten Ngada.
14. Melakukan pinjaman daerah dan/atau reimburse dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab IV RPJMD mencakup identifikasi permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah. Penyusunan Bab IV dilakukan melalui analisis atas gambaran umum kondisi daerah yang berisi tentang capaian kinerja pembangunan pada Bab II. Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara target di dalam perencanaan dengan realisasi. Adanya permasalahan pembangunan kemudian dielaborasi dengan berbagai lingkungan strategis yang bersifat membawa potensi sekaligus tantangan bagi pembangunan daerah. Lingkungan strategis yang menjadi bahan pertimbangan antara lain isu internasional, nasional, provinsi maupun daerah sekitar Kabupaten Ngada. Elaborasi antara permasalahan pembangunan di setiap urusan dengan lingkungan strategis menjadi dasar bagi perumusan isu strategis Kabupaten Ngada yang harus diintervensi pada periode pembangunan 2021-2026. Selanjutnya, permasalahan dan isu strategis ini akan menjadi bahan perumusan

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Berbasis Kinerja Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara yang akan dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sebagaimana uraian di Bab II, kinerja pembangunan Kabupaten Ngada di satu sisi telah memunculkan *outcome* yang bermanfaat kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, serta memenuhi target kinerja, namun di sisi lain masih terdapat beberapa capaian pembangunan yang belum memenuhi target dan belum tercipta *outcome*

yang optimal bagi pemangku kepentingan. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga penyusunan permasalahan pembangunan daerah disusun menggunakan metode analisis pohon masalah. Dalam metode ini permasalahan diklasifikasikan ke dalam tiga level yang memiliki hubungan kausalitas atau sebab-akibat, yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Klasifikasi ini pada tahap selanjutnya akan membantu dalam perumusan intervensi pembangunan mulai dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan atau disebut metode *fold grand cascading*. Pemetaan permasalahan mennggunakan analisis pohon masalah ini berbasis capaian kinerja di setiap urusan pemerintah daerah yang terdapat di Bab II.

Tabel 4. 1. Permasalahan Pembangunan Daerah Berbasis Urusan Pemerintah

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
Pendidikan		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Belum optimalnya kualitas Pendidikan	Masih rendahnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Masih belum optimalnya sarana dan prasarana PAUD
		Masih rendahnya minat sekolah serta kesadaran pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini
		Terbatasnya kemampuan/sumber daya masyarakat untuk bersekolah
Belum optimalnya akses penddiikan	Belum optimalnya pelayanan pendidikan pada pendidikan tingkat dasar dan menengah pertama	Belum tersedianya sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar
		Penempatan guru sesuai kompetensi yang belum merata di seluruh sekolah/wilayah
		Belum optimalnya guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi
		Belum optimalnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan
Kesehatan		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Belum optimalnya pelayanan kesehatan Ibu, Bayi, dan Balita	Masih kurangnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi (AKI dan AKB);	Masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan (dokter spesialis di rumah sakkit dan dokter umum di puskesmas)
		Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

		Belum optimalnya pelayanan rujukan (yang menjadi masalah adalah biaya)
		Masih kurangnya pelayanan utk ibu hamil
	Belum optimalnya pelayanan kesehatan Balita (Angka Stunting)	Kegiatan deteksi gizi anak belum maksimal
		Masih rendahnya ASI eksklusif
		Belum optimalnya pelayanan dan partisipasi KB pasca salin
Masih tingginya angka kesakitan dan kematian	Belum terhindarnya masyarakat dari berbagai penyakit terutama Penyakit Tidak Menular	Promosi kesehatan belum terlaksana dengan komprehensif
		Kesadaran terhadap PHBS masih rendah
		Masih adanya masyarakat yang tidak tercover jaminan sosial
		Terbatasnya peralatan medis sehingga tidak mengakomodir semua kebutuhan penanganan penyakit
	Belum terhindarnya masyarakat dari penyakit menular	Kesadaran terhadap PHBS masih rendah
		Rendahnya kualitas lingkungan
		Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan penyakit menular
	Belum optimalnya pelayanan kesehatan Lansia	Belum adanya Poli Lansia di pusat layanan kesehatan
		Masih kurangnya prasarana pelayanan lansia (lansia kit)
		Belum optimalnya kompetensu dan kapasitas kader lansia dalam memberi pelayanan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Belum optimalnya akses dan kualitas jaringan jalan	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas jaringan jalan	Masih perlunya ketersediaan jalan yang menghubungan kawasan-kawasan prioritas kabupaten
		Belum optimalnya kualitas konstruksi jalan beserta utilitasnya
		Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi jalan beserta utilitasnya

Belum optimalnya pemanfaatan air baku	Masih kurangnya akses terhadap air minum aman	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan SPAM
		Belum optimalnya ketersediaan Sambungan Rumah (SR)
Masih adanya area persawahan yang belum memiliki jaringan irigasi memadai	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas jaringan irigasi	Masih adanya saluran irigasi yang belum berupa jaringan teknis
		Belum optimalnya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
Tingginya risiko bencana alam	Belum tercukupinya ketersediaan infrastruktur pengendali bencana	Belum optimalnya pengembangan sistem drainase perkotaan
		Ketersediaan bangunan pengendali bencana abrasi dan longsor belum mencukupi
Belum optimalnya kualitas tata ruang dan bangunan	Belum optimalnya ketersediaan bangunan	Belum optimalnya ketersediaan gedung dan prasarana lainnya
	Belum optimalnya kualitas bangunan	Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan
		Belum optimalnya pengawasan bangunan
	Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas dokumen perencanaan tata ruang (dokumen RDTR belum tersedia)
		Belum optimalnya tindak lanjut terhadap penyimpangan peraturan tata ruang
Perumahan Rakyat dan Permukiman		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Belum optimalnya akses pemukiman layak huni	Belum optimalnya akses rumah layak huni	Upaya rehabilitasi rumah tidak layak huni belum optimal
		Belum optimalnya ketersediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur lingkungan	Belum optimalnya ketersediaan jalan lingkungan
		Belum optimalnya ketersediaan drainase lingkungan
	Masih belum optimalnya ketersediaan sanitasi	Belum optimalnya pengembangan sanitasi komunal
		Belum optimalnya ketersediaan sanitasi masyarakat
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**

Belum optimalnya pelayanan keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat	Belum optimalnya penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	Sarana dan prasarana penunjang belum memadai
		Kegiatan patroli wilayah masih terbatas
		Belum optimalnya kapasitas anggota satpol-pp
		Belum berfungsinya PPNS
		Belum optimalnya fungsi linmas ditingkat desa dan kelurahan
		Rendahnya pemahaman masyarakat terkait dengan peraturan daerah
	Belum optimalnya pemerataan penanganan kebakaran	Pemetaan pemukiman rawan kebakaran belum optimal
		Kurangnya sarana dan prasarana penanganan kebakaran
		Belum optimalnya kapasitas pemadam kebakaran
		Belum terbentuknya relawan pemadam kebakaran tingkat kecamatan dan desa/kelurahan
Belum optimalnya mitigasi dan penanggulangan bencana	Masih rendahnya ketahanan masyarakat terhadap bencana	Masih kurangnya ketersediaan dan kapasitas SDM fasilitator desa Tangguh
		Belum optimalnya kapasitas masyarakat terhadap kebencanaan
		Belum optimalnya jaringan informasi dan komunikasi kebencanaan
		Belum tersedianya sarpras kebencanaan (jalur evakuasi, rambu2)
	Belum optimalnya tanggap darurat bencana	Masih kurangnya ketersediaan dokumen rencana kontigensi (yang tersedia baru bencana Tsunami)
		Belum optimalnya koordinasi lintas sektor
		Masih kurangnya sarpras tanggap darurat kebencanaan (excavator, loader)
		Masih kurangnya alat pelindung petugas kebencanaan
		Rendahnya kapasitas kelembagaan bencana (Pusdalops dan TRC)
		Belum optimalnya sinkronisasi dan integrasi data kebencanaan
Sosial		

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih Banyaknya PMKS	Belum optimalnya pelayanan bagi PMKS	Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan PMKS
		Belum optimalnya kualifikasi dan kompetensi SDM untuk mengatasi permasalahan sosial
		Masih banyaknya ODGJ yang tidak tertampung
		Masih Banyak Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia yang belum menerima Jaminan Sosial
		Belum semua PMKS memperoleh Bantuan karena keterbatasan Sumber Daya
Masih adanya kemiskinan	Belum optimalnya program pengentasan kemiskinan	Masih Banyak PMKS di Kabupaten yang belum mendapat bantuan Pemberdayaan melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya
		Belum efektifnya program PKH
		Rendahnya tenaga pendukung di tingkat kecamatan
		Belum optimalnya pendataan
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
Tenaga Kerja		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Meningkatnya pengangguran	Menurunnya kesempatan kerja	Kurangnya kesesuaian keterampilan dan kualifikasi pencari kerja dengan permintaan pasar tenaga kerja
		Rendahnya kompetensi/skill tenaga kerja
		Belum optimalnya fungsi sistem informasi bursa kerja online
		Belum adanya Balai Latihan Kerja
		Belum optimalnya penyaluran tenaga kerja oleh pemerintah
	Belum optimalnya pengawasan ketenagakerjaan	Masih adanya penyaluran tenaga kerja ilegal
		Masih adanya tenaga kerja di bawah umur

	Kurang berkembangnya kewirausahaan sosial	Kurangnya kapasitas SDM wirausahawan pemula
		Kurangnya akses terhadap bantuan permodalan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Belum optimalnya pelayanan bagi korban kekerasan terhadap anak dan perempuan	Belum tersedianya rumah aman bagi korban kekerasan
		Masih adanya laporan kekerasan yang belum tertangani
		Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM/psikolog untuk pemulihan
Pangan		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Belum optimalnya ketahanan pangan	Ketersediaan pangan utama masih perlu ditingkatkan	Menjaga stok cadangan pangan
		Kurangnya peran dan fungsi lumbung pangan, kelembagaan dan sarana pendukungnya
	Belum optimalnya akses / keterjangkauan pangan	Belum optimalnya pengembangan kelembagaan distribusi pangan (lumbung pangan dan toko tani)
	Belum optimalnya pemanfaatan pangan yang berkualitas	Belum optimalnya diversifikasi dan pengolahan pangan
	Keamanan pangan belum optimal	Perilaku produsen pangan menggunakan obat kimia di luar ambang batas
Pertanahan		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Masih adanya kasus pertanahan	Belum optimalnya penyelesaian kasus pertanahan	Belum optimalnya fasilitasi legalitas kepemilikan lahan
		Belum optimalnya koordinasi penggunaan tanah dan pencatatan aset pemerintah
Lingkungan Hidup		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Belum optimalnya konservasi sumber daya alam	kepemilikan lahan mata air oleh masyarakat/suku
	Adanya potensi pencemaran udara	Masih perlunya upaya pengawasan kualitas udara

	Belum optimalnya pengelolaan persampahan, terutama di kawasan perkotaan dan destinasi wisata	Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana persampahan
		Belum optimalnya pengelolaan TPA
		Belum terlaksananya pengelolaan sampah 3R
		Belum adanya kelompok masyarakat pengelola persampahan
		Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah
		Belum adanya regulasi tentang penanganan sampah
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan	Belum optimalnya pelayanan kependudukan	Belum memadainya sarana dan prasarana
		SOP belum berjalan
		Belum optimalnya fasilitasi operator perekaman
		Belum optimalnya pemutakhiran status Kartu Keluarga
		Belum optimalnya pendataan mobilitas penduduk
		Belum optimalnya pengelolaan arsip kependudukan
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan	Belum adanya mobil unit pelayanan lapangan
		Belum adanya operator SIAK di kecamatan
		Mesin anjungan dukcapil mandiri (ADM) belum tersedia
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Belum optimalnya pemberdayaan dan pemerintahan desa	Belum optimalnya penguatan kelembagaan masyarakat yang ada di desa	Belum adanya penguatan kapasitas untuk penguatan kelembagaan
		Belum optimalnya pendampingan dan manajemen BUMDes dan BUMDesma
		Belum adanya kerjasama antara pemerintah desa dengan desa dan pemerintah desa dengan kabupaten

		Belum optimalnya peran lembaga adat
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Belum optimalnya pengendalian penduduk	Belum optimalnya penyelenggaraan program KB	Masih rendahnya cakupan peserta KB aktif
		Belum optimalnya KIE
		Masih rendahnya kompetensi dan ketersediaan PKB dan PLKB dalam melaksanakan pendampingan kepada sasaran KB
		Belum optimalnya pelayanan KB terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB (*unmeetneed)*
Perhubungan		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Belum tersedianya terminal memadai	Belum adanya ketersediaan terminal
		Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi terminal
	Belum optimalnya ketersediaan perlengkapan jalan memadai	Masih terbatasnya ketersediaan perlengkapan jalan
		Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi perlengkapan jalan
Belum optimalnya kenyamanan dan keselamatan transportasi umum	Belum optimalnya ketersediaan moda transportasi darat memadai	Belum optimalnya ketersediaan jalur trayek angkutan umum
		Belum adanya penetapan standar tarif angkutan umum
	Belum optimalnya pengembangan sistem manajemen pelayanan perhubungan	Belum optimanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana uji KIR
		Akreditasi unit pelaksana uji KIR belum terlaksana
		Belum optimalnya kelaikan angkutan barang dan orang
Komunikasi dan Informatika		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Belum optimalnya akses komunikasi dan informasi	Ketersediaan jaringan telekomunikasi dan internet belum memadai	Rendahnya ketersediaan jaringan internet
		Rendahnya kapasitas jaringan internet

Belum optimalnya keterbukaan informasi public	Belum optimalnya diseminasi informasi	Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
		Belum tersedianya kelompok informasi masyarakat
		Belum optimalnya pemberdayaan media
		Belum optimalnya integrasi informasi (PPID)
	Belum optimalnya penyelenggaraan e-gov	Belum optimalnya integrasi aplikasi
		Masih kurangnya ketersediaan aplikasi yang dibutuhkan
		Masih kurangnya kapasitas SDM tentang IT
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Belum optimalnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian	Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas koperasi produsen	Belum optimalnya kualitas tata kelola koperasi (koperasi produsen)
	Menurunnya omzet UKM (Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata)	Menurunnya kapasitas produksi UKM
		Belum optimalnya kualitas produk UKM
Penanaman Modal		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Menurunnya realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN)	Pendataan potensi investasi belum optimal	Dukungan data potensi desa dan kecamatan belum optimal
		Belum adanya kajian terkait potensi unggulan daerah
	Kurang optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Kesadaran perusahaan untuk melaporkan LKPM online secara berkala masih rendah
	Promosi secara langsung belum optimal	Masih terbatasnya media promosi investasi
	Belum optimalnya kondusifitas iklim investasi	Belum optimalnya pelaksanaan perbub rencana umum penanaman modal
		Belum optimalnya peran satgas percepatan pelaksanaan berusaha
		Belum adanya kesepahaman antara investor dengan masyarakat
Belum optimalnya kualitas pelayanan	Belum optimalnya penggunaan aplikasi	kemampuan masyarakat untuk menggunakan aplikasi masih

perijinan terpadu satu pintu	pelayanan	rendah
		Belum berjalannya mall pelayanan publik
Kepemudaan dan Olahraga		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Belum optimalnya prestasi dalam olahraga	Masih lemahnya SDM keolahragaan yang berkualitas	Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung olahraga
		Belum optimalnya pembinaan atlet muda/usia dini
		Masih rendahnya jumlah pelatih yang kompeten/berlisensi
Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan	Belum optimalnya pengembangan pemuda	Masih perlunya peningkatan pembinaan kelompok pemuda
		Masih perlunya peningkatan wirausaha pemuda
		Masih adanya potensi pemuda yang belum terwadahi/terfasilitasi
Statistik		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Belum optimalnya akses dan kualitas data statistik	Belum terintegrasinya data statistik	Belum adanya regulasi daerah tentang pemanfaatan data
		belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi data
Persandian		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Belum optimalnya jaminan keamanan data dan informasi	Belum optimalnya pelayanan persandian	Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung
		Masih kurangnya SDM persandian
Kebudayaan		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Belum optimalnya pemanfaatan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat	Belum optimalnya transformasi budaya daerah	Belum optimalnya pelestarian budaya benda dan tak benda
		Transformasi budaya belum memiliki payung hukum
Perpustakaan		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Rendahnya budaya baca di kalangan	Terbatasnya jangkauan dan	Belum optimalnya kapasitas SDM pengelola perpustakaan

pelajar dan masyarakat	kualitas pelayanan perpustakaan	Terbatasnya koleksi buku yang dibutuhkan masyarakat
		Belum memadainya sarana dan prasarana serta fasilitas perpustakaan (gedung, koleksi, rak buku, dsb)
		Belum optimalnya layanan perpustakaan keliling
		Belum tersedianya perpustakaan digital
		Belum optimalnya pembinaan perpustakaan dilingkungan sekolah dan desa
		Masih terbatasnya tenaga pustakawan
Kearsipan		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Belum optimalnya tata kelola kearsipan	Belum optimalnya pengembangan arsip secara baku	Masih terbatasnya kapasitas SDM dalam mengelola arsip daerah
		Belum optimalnya sarana dan prasarana arsip daerah
		Belum optimalnya penerapan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)
	Rendahnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Minimnya penangangan arsip aktif dan inaktif
		Belum tersedia arsiparis
Urusan Pemerintahan Pilihan		
Perikanan dan Kelautan		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Menurunnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian	Kurangnya produksi perikanan budidaya	Keterbatasan benih
		Keterbatasan media pengembangan benih
		Keterbatasan pakan
		Teknologi perikanan budidaya masih konvensional
		Metode budidaya masih konvensional
		Terbatasnya kualitas SDM pembudidaya ikan
		Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM penyuluh perikanan
		Luas lahan perikanan budidaya (kolam) masih belum memadai
	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap
		Terbatasnya kualitas SDM nelayan

		Akses terhadap bantuan permodalan masih belum optimal
		Metode penangkapan ikan masih konvensional
		Penggunaan racun ikan dan setrum di kawasan perikanan tangkap
	Kurangnya kualitas produk perikanan	Kurangnya sarana dan prasarana
		Penurunan produk perikanan yang mengandung zat kimia berbahaya
Perindustrian		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Menurunnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian	Fluktuasi nilai produksi IKM	Rendahnya kualitas SDM pelaku IKM
		Kontinuitas bahan dasar produksi belum terjaga dengan baik
		Kurangnya akses bantuan permodalan
		Penggunaan teknologi tepat guna masih sangat terbatas
		Metode produksi masih tradisional
Pariwisata		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Menurunnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian	Fluktuasi kunjungan wisatawan	Belum optimalnya pengembangan destinasi
		Belum optimalnya pemasaran berbasis daring
		Belum optimalnya kerjasama pengembangan destinasi
		Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif
Pertanian		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian	Fluktuasi produksi tanaman pangan dan hortikultura (komoditas unggulan)	Kapasitas SDM dan kelembagaan petani kurang memadai
		Kurangnya penyuluhan intensif kepada petani sawah
		Akses terhadap bantuan permodalan masih belum memadai
		Adopsi IPTEK pertanian yang spesifik wilayah masih kurang memadai
		Belum optimalnya pemeliharaan jaringan irigasi tersier dan pedesaan

		Terbatasnya akses sarana produksi pertanian
		Pengendalian hama penyakit belum optimal
		Metode pertanian yang masih tradisional
		Belum adanya zonasi lahan pangan berkelanjutan
		Belum optimalnya pemanfaatan lahan kritis
	Belum optimalnya produksi tanaman perkebunan (komoditas unggulan)	Kapasitas SDM dan kelembagaan petani kurang memadai
		Kurangnya ketersediaan benih unggul
		Pengendalian hama dan penyakit belum optimal
		Akses terhadap bantuan permodalan masih belum memadai
		Perluasan areal tanam baru komoditi perkebunan masih belum optimal
	Kualitas produk tanaman pangan dan hortikultura	Sarana dan prasarana pasca panen belum memadai
		Pembinaan dan pendampingan pasca panen belum berjalan secara berkesinambungan
	Kualitas produk perkebunan	Sarana dan prasarana pasca panen belum memadai
		Pembinaan dan pendampingan pasca panen belum berjalan secara berkesinambungan
	Produksi hasil ternak (daging, telur)	Rendahnya kapasitas SDM peternak
		Metode budidaya/ manajemen pemeliharaan ternak masih konvensional
		Kurangnya akses terhadap bantuan permodalan
		Kurangnya penerapan teknologi produksi
		Belum optimalnya standarisasi pengelolaan kelompok peternak
		Ketersediaan air dan pakan untuk ternak di beberapa wilayah kurang
		Kualitas bibit masih kurang memadai

	Fluktuasi populasi ternak	Tingkat kelahiran ternak masih kurang (estimasi 40% dari betina produktif)
		Belum optimalnya pencegahan penyakit menular (terutama di daerah luar kasus)
	Kualitas produk pertanian masih perlu ditingkatkan	Penanganan pasca panen belum berbasis teknologi tepat guna
	Kualitas produk peternakan masih kurang	Belum ada standarisasi mutu produk hasil peternakan yang berorientasi pasar (salah satunya ASUH)
Perdagangan		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Fluktuasi kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Belum optimalnya tingkat kelancaran distribusi barang	Ketersediaan barang pokok dan barang penting
		Stabilitas harga barang pokok dan barang penting
		Perlindungan konsumen belum optimal
	Kapasitas pemasaran produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan belum optimal	Belum optimalnya penerapan metode *marketing-mix*
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
Sekretariat Daerah		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Masih kurangnya orientasi perencanaan dan pengukuran kinerja berbasis *outcome*, tidak sekedar serapan anggaran	Masih kurangnya ketersediaan data dalam pengukuran kinerja di setiap OPD
		Masih kurangnya kapasitas OPD dalam penyusunan laporan kinerja
Belum optimalnya fungsi pengendalian kualitas pelayanan public	Belum optimalnya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bentuk akuntabilitas sosial	SKM masih sebagai instrumen pemenuhan administrasi
		SKM masih terbatas pada OPD tertentu
		Masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk pelayanan pimpinan dan tamu daerah
Belum optimalnya fungsi pengendalian	Masih adanya persoalan terkait	Kurangnya pemahaman batas administrasi antar daerah

kebijakan daerah	administrasi kewilayahan	Belum efektifnya fasilitasi tapal batas antar kecamatan
		Belum optimalnya penamaan rupa bumi
	Belum efektifnya fungsi pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan daerah	Belum adanya instrumen pengendali dan pengukur keberhasilan kebijakan
		Belum efektifnya koordinasi implementasi kebijakan
		Belum tersedianya pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa
		Masih adanya perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan paket pekerjaan yang tidak tepat waktu
		Belum optimalnya kapasitas manajerial perusahaan daerah/BUMD
		Masih kurangnya identifikasi resiko dan potensi sosial dalam pemberian bansos
		Belum optimalnya peran/fungsi desiminasi informasi pembangunan dan kebijakan daerah (media informasi belum tersedia)
		Belum optimalnya tindak lanjut kebijakan pusat maupun provinsi
		Belum optimalnya tindak lanjut kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga
		Belum optimalnya tindak lanjut hasil kesepakatan forkopimda
	Belum optimalnya fungsi pengendalian kinerja kecamatan	Belum berjalannya evaluasi kinerja camat dan PATEN
		Belum optimalnya pengendalian kebijakan dana kelurahan
Sekretariat DPRD		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Belum efektifnya kinerja pelayanan kesekretariatan dewan	Belum efektifnya fasilitasi administrasi dan anggaran untuk menopang kinerja DPRD	Kinerja kesekretariatan yang ditentukan oleh kinerja politik
		Masih adanya persoalan pada SOTK setwan
		Belum optimalnya penguatan kapasitas SDM DPRD
		Belum tersedianya tenaga ahli disetiap AKD
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		

Perencanaan		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Belum optimalnya kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan	Belum optimalnya sistem aplikasi perencanaan
		Masih rendahnya pemahaman OPD terkait dengan perencanaan strategis
		Belum selarasnya indikator kinerja utama kepala daerah dengan kepala perangkat daerah
		Masih rendahnya ketersediaan data yang akurat dan mutakhir
	Belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan	Pelaksanaan evaluasi yang masih manual
		Belum terbangunnya sistem pengendalian dan evaluasi ditingkat OPD
		Capaian kinerja belum berbasis pada indikator kinerja utama *(outcomes)*
	Belum optimalnya tindak lanjut aspirasi masyarakat dalam pembangunan	Adanya ketidaksamaan antara aspirasi masyarakat dengan tema/prioritas pembangunan
		Belum selarasnya Pokir DPRD dengan prioritas pembangunan daerah
	Belum optimalnya keselarasan antara perencanaan dengan penganggaran	Belum optimalnya sistem integrasi perencanaan dan penanggaran (SIPD)
		Belum optimalnya sistem pengajuan DAK
Keuangan		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Masih perlunya peningkatan tata kelola keuangan daerah	Belum terintegrasinya sistem penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan	Penggunaan SIMDA BPKP hanya pada pelaporan
		Belum optimalnya integrasi SIMDA BPKP dengan SIPD
		Pelaporan keuangan yang belum tepat waktu dan sesuai SAP
		Inventarisasi aset belum optimal
	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah	Pengelolaan aset disetiap OPD belum memadai
Belum optimalnya penerimaan pajak	Belum optimalnya pelayanan pajak	Data objek pajak dan subjek pajak belum di-*update*

daerah		Sarana dan prasarana pembayaran pajak belum optimal (penggunaan e-pendapatan)
		Belum berjalannya kerjasama terkait pelayanan perpajakan daerah
	Kesadaran wajib pajak rendah	Belum optimalnya penerapan *reward* dan *punishment*
		Belum optimalnya pengawasan terhadap wajib pajak
Belum optimalnya penerimaan retribusi daerah	Masih banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan	Sarana dan prasarana retribusi kurang memadai
		Belum optimalnya pendataan sumber-sumber retribusi
		Belum optimalnya koordinasi dengan OPD penghasil
Kepegawaian		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Belum optimalnya kualitas manajemen ASN	Belum optimalnya sistem pengembangan kompetensi pegawai	Masih adanya pejabat struktural yang belum mengikuti PKP dan PKA
		Belum terpenuhinya kebutuhan diklat fungsional
		Belum tersusunnya analisis kebutuhan diklat
		Penyelenggaraan diklat belum terintegrasi
		Pengukuran kompetensi pegawai belum berjalan
		Assessment center belum dikembangkan
	Belum proporsionalnya jumlah pegawai sesuai kebutuhan	Belum terpenuhinya formasi CPNS
		Belum terpenuhinya jabatan fungsional dan pelaksana
	Masih perlunya peningkatan kualitas layanan kepegawaian	Masih adanya sistem pelayanan kepegawaian berbasis aplikasi dan pemantauan proses layanan oleh pegawai langsung
		Belum optimalnya integrasi dan pemutakhiran sistem informasi kepegawaian
		Belum adanya standar pelayanan pegawai
	Pengukuran kinerja pegawai belum optimal	Penilaian SKP masih manual dan belum dapat dilaksanakan setiap bulan

		Belum terintegrasinya SKP dengan PK
Penelitian dan Pengembangan		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Belum berjalannya peran kelitbangan	Adanya persoalan kelembagaan	Belum terintegrasinya kegiatan riset (riset masih dijalankan bidang teknis)
		Belum adanya SDM Peneliti
		Belum adanya dukungan penganggaran
Pengawasan		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Belum optimalnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Belum optimalnya SPIP	Masih kurangnya koordinasi dengan pihak yang menjadi obyek pemeriksaan
		Masih kurangnya kapasitas obyek pemeriksaan (Perangkat daerah, desa, dan sekolah) terkait pengelolaan keuangan
		Belum proporsionalnya jumlah dan kualitas fungsional auditor dibanding obyek pemeriksaan
Belum optimalnya penguatan integritas kelembagaan dan aparatur	Belum adanya pencanangan zona integritas dan menerapkan WBK WBBM	Belum optimalnya pemahaman terkait WBK dan WBBM
	Belum optimalnya akses pengaduan masyarakat	Belum optimalnya sosialisasi terkait dengan peran lembaga dalam penanganan pengaduan masyarakat
	Belum optimalnya pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi	Belum optimalnya koordinasi dan pembagian peran antar OPD terkait rencana aksi
Kewilayahan-Kecamatan		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Belum optimalnya kualitas pelayanan masyarakat	Belum terselenggaranya PATEN	Masih belum memadainya syarat sarpras
		Belum berjalannya standar pelayanan
Belum optimalnya fungsi asistensi pembangunan desa	Belum optimalnya asistensi perencanaan,	Masih terdapat desa yang belum memenuhi persyaratan pengajuan DD/ADD dan pertanggungjawaban keuangan

	penganggaran dan pelaporan desa dan kelurahan	Belum optimalnya penguatan pemahaman terkait regulasi desa
		Belum optimalnya tindak lanjut hasil pendampingan desa
		Belum optimalnya perencanaan dana kelurahan
Belum efektifnya fungsi koordinasi kewilayahan	Adanya persoalan pendataan masyarakat miskin	Belum optimalnya koordinasi antara kecamatan dengan desa terkait dengan kesepakatan data
	Belum efektifnya peran kecamatan sebagai jembatan prioritas pembangunan daerah dan desa	Belum optimalnya fungsi koordinasi antara kecamatan dengan OPD terkait dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan
		Belum optimalnya pendampingan penyusunan profil potensi wilayah desa
Unsur Pemerintahan Umum		
Kesatuan Bangsa dan Politik		
Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
Masih perlunya penguatan kohesivitas sosial masyarakat	Masih perlunya penguatan nilai kebangsaan dan multikulturalisme	Belum optimalnya peran ormas
		Belum optimalnya kapasitas SDM dalam deteksi dini potensi konflik

4.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Pencapaian Misi di RPJMD sebelumnya

Permasalahan pencapaian misi RPJMD tahun sebelumnya merupakan permasalahan pembangunan masing-masing urusan sesuai misi prioritas daerah yang melibtkan beberapa PD. Identifikasi permasalahan ini menjelaskan yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Rancnagan RPJMD Tahun 2021 -2026.

4.2.1. Permasalahan Infrastruktur

a. Infrastruktur Jalan

Belum semua jalan Kabupaten dalam kondisi baik. Sampai keadaan tahun 2019 panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik baru

mencapai 723.71 Km dari total panjang jalan kabupaten 1.042 Km atau baru mencapai 69,45 %.

b. Infrastruktur Air Bersih

- Belum optimalnya konservasi, manajemen pengelolaan sumber mata air dan distribusi air bersih untuk kebutuhan masyarakat.
- Ketersediaan air baku yang cukup baik tetapi masih terdapat penduduk yang belum terlayani air bersih secara layak sampai pada sambungan rumah. Hal ini menunjukkan management pengelolaan air yang belum efisien dan effektif.
- Akses air bersih masih belum dapat memenuhi standar kelayakan. Pada tahun 2019 ada sekitar 55.862 jiwa atau 33,78 % penduduk yang belum memiliki akses terhadap air bersih.

c. Infrastruktur Kelistrikan

- Masih ada kecamatan yang belum sepenuhnya mendapatkan sambungan listrik dari PLN seperti kecamatan Riung Barat dan Kecamatan Bajawa Utara.
- Masih terdapat 23 % atau sekitar 7.998 RT yang belum terlayani listrik dari total RT 34.778 (Tahun 2015)

d. Infrastruktur Permukiman

- Masih terdapat 22,12 % Rumah Tangga yang belum layak huni sesuai standar kesehatan dari total 27.298 Unit Rumah yang ada di Kabupaten Ngada (Database Perumahan tahun 2017).
- Masih terdapat kawasan Kumuh perkotaan yang belum didata dan ditangani secara baik.

e. Penataan Ruang

- Belum ada kebijakan daerah terkait perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang kota sehingga menyulitkan dalam hal penegakkan aturan terkait Penataan Ruang.

4.2.2. Permasalahan Perekonomian Daerah

a. Pertanian

- ✓ Keterbatasan Sumberdaya Petani dalam pengembangan teknologi pertanian dan pengelolaan pasca panen untuk peningkatan nilai tambah, serta dalam mengakses dana dari kelembagaan keuangan yang ada.
- ✓ Masih terbatasnya sarana dan prasarana pertanian seperti sarana irigasi yang memadai untuk mengairi sawah, sarana produksi pertanian dan teknologi pasca panen.
- ✓ Kontribusi Sektor Pertanian masih dominan namun memiliki daya saing dan nilai tambah yang terbatas.
- ✓ Sektor sekunder/pengolahan berbasis pertanian masih belum berkembang baik sehingga perlu upaya untuk bisa menciptakan nilai tambah sektor pertanian.
- ✓ Masih sulitnya pemasaran komoditi pertanian yang disebabkan oleh minimnya informasi pasar produk pertanian.

b. Koperasi dan UMKM

- ✓ Masih rendahnya produktivitas UMKM yang ditandai dengan terbatasnya diversifikasi produk UMKM, akses pasar, akses permodalan, dan kapasitas kelembagaan UMKM serta sarana dan prasarana pendukung.
- ✓ Masih rendahnya kemampuan Sumberdaya Manusia bidang UMKM yang berdampak pada kurang kreatifnya UMKM dalam dunia usaha (*enterprenerships*).

c. Perindustrian dan Perdagangan

- ✓ Terbatasnya kapasitas industri skala kecil perumahan untuk memberi nilai tambah produk unggulan Kabupaten, secara khusus untuk komoditi sektor pertanian.
- ✓ Belum tertatanya Sistem Tata Niaga pasar dan sistem informasi pasar yang uptodate untuk mendukung pemasaran sektor industri dan perdagangan

d. Pariwisata

1. Keterbatasan penyediaan sarana prasarana pada destinasi wisata,
2. Terbatasnya SDM pelaku pariwisata
3. Manajemen pengelolaan sarana prasarana pariwisatayang belum optimal
4. Promosi Pariwisata yang belum optimal

4.2.3. Permasalahan Penataaan Perkotaan

a. Terbatasnya daya dukung lahan kota Bajawa dalam melakukan penataan kota sehingga perlu dilakukan pengembangan pusat pertumbuhan sesuai arah pengembangan yang termuat dalam Perencanaan Tata Ruang.
b. Belum tertatanya secara baik drainase dan bahu jalan sesuai peruntukannya.
c. Belum terkoordinasinya pembangunan utilitas dan fasilitas umum di Kabupaten Ngada.
d. Belum berkembangnya usaha-usaha jasa/sektor riil perkotaan yang berkelanjutan untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.

4.2.4. Permasalah Pendidikan

a. Masih terdapat anak usia sekolah yang belum tertampung baik di SD, SMP maupun SMA serta keterbatasan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi yang ditandai masih adanya siswa yang drop out, adanya anak usia sekolah yang bekerja di sektor informal (pekerja anak), Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Rata-Rata Harapan Sekolah yang belu mencapai standar yang diharapkan.
b. Masih rendahnya tata kelola pendidikan yang tergambar dari belum meratanya penempatan guru di sekolah-sekolah, belum meratanya kualitas profesional guru dan tenaga kependidikan serta masih terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan.

4.2.5. Permasalahan Kesehatan

a. Masih terbatasnya tenaga kesehatan yang yang ditandai dengan Rasio tenaga kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan.

b. Masih adanya kasus kematian ibu melahirkan dan kasus kematian bayi di Kabupaten Ngada.

c. Masih adanya Kasus balita Stunting.

d. Masih adanya prevalensi penyakit menular dan Terjadi perubahan pola penyakit ditunjukan dengan meningkatnya kasus-kasus Penyakit Tidak Menular.

e. Belum optimalnya upaya promotif yang lebih menyeluruh melibatkan sektor kesehatan, dan lintas sektor serta masyarakat sehingga perilaku hidup bersih dan sehat belum membudaya di dalam masyarakat.

f. Belum optimalnya partisipasi KB Aktif pasangan usia subur.

4.2.6. Permasalahan Sosial

a. Belum optimalnya program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan daerah yang ditandai dengan masih terdapat 20.310 jiwa penduduk miskin di Kabupaten Ngada yang perlu ditangani.

b. Belum optimalnya Managemen Pengelolaan Data Kemiskinan terintegrasi seperti belum adanya database KK miskin terintegrasi antar Perangkat Daerah yang uptodate.

c. Masih terdapat Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Lanjut Usia yang belum menerima Jaminan Sosial.

4.2.7. Permasalahan Tata kelola Pemerintahan

a. Kapasitas aparatur pemerintah belum optimal berdasarkan tingkat kompetensi, kemampuan teknis dan mekanisme birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Ngada.

b. Masih belum optimalnya sistem pelayanan birokrasi yang efisien dan efektif

c. Belum optimalnya peran pemerintah kelurahan dan kecamatan dalam pelayanan dan pelaksanaan pembangunan skala lingkungan atau ditingkat masyarakat.
d. Belum optimalnya sistem pelayanan publik yang efisien dan efektif.

4.3. Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis merupakan hasil analisis lingkungan eksternal dan internal Kabupaten Ngada.

4.3.1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rencana pemenuhan dalam 1 (satu) tahun harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat. Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain itu, hasil pelaporan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam :

1. penilaian kinerja perangkat daerah;

2. pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar;
3. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri 6 bidang dengan memuat pelayanan dasar yaitu:

1) SPM Bidang Pendidikan
2) SPM Bidang Kesehatan
3) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
5) SPM Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, dan
6) SPM Bidang Sosial

4.3.1.1. SPM Bidang Pendidikan

Terdapat 27 Pelayanan Dasar bidang pendidikan yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada. Dari ke 27 target pelayanan tersebut sekitar 19 target yang pencapaianya 100 % atau sekitar 70.37%. Alokasi anggaran kegiatan standar pelayanan minimal pada tahun 2019 sebesar Rp. 51.595.673.870,-. Masih terdapat 8 target atau permasalahan yang perlu untuk diselesaikan yakni :

1) Masih terdapat akses dari kelompok pemukiman ke SD/MI dan SMP/MTs dengan berjalan kaki lebih dari 3 km dan 6 km
2) Masih terdapat sekolah SMP/MTs yang tidak memiliki laboratorium IPA
3) Masih terdapat sekolah SD/MI,dan SMP/MTs yang tidak memiliki ruang guru dan ruang kepala sekolah secara terpisah
4) Masih terdapat guru mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKN pada jenjang SMP/MTs yang belum memiliki sertifikat pendidik

5) Masih terdapat Kepala Sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs yang belum memiliki sertifikat pendidik
6) Masih terdapat guru SD/MIdan SMP/MTs yang belum memiliki sertifikat pendidik

Untuk mengatasi persoalan ini terdapat beberapa solusi yang bisa ditawarkan dan diharapkan menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten dalam Perencanaan dimasa yang akan datang. Adpun solusi yang bisa dilakukan adalah :

1. Pembangunan unit sekolah baru atau kelas jauh jenjang SD/MI dan SMP/MTs
2. Mengalokasikan program dan kegiatan pembangunan ruang laboratorium IPA jenjang SMP/MTs
3. Mengalokasikan program dan kegiatan pembangunan ruang guru dan ruang kepala sekolah jenjang SD/MI dan SMP MTs
4. Penyelenggaraan pendidikan peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru jenjang SD/MI dan SMP/MTs

4.3.1.2. SPM Bidang Kesehatan

Untuk Bidang Kesehatan terdapat 12 Jenis urusan pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan minimal bidang kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupten/Kota. Pada tahun 2019 ke 12 SPM bidang Kesehatan ini sudah mencapai 100 %. Adapun total anggaran secara keseluruhan yang mendukung pelaksanaan SPM baik secara teknis maupun manajemen yang secara teknis dan langsung digunakan untuk pelaksanaan SPM di puskesmas di tahun 2019 sebesar Rp. 7.094.277.500,-. Meskipun sudah dilaksanakan 100 %, masih terdapat banyak persolan kesehatan yang perlu menjadi perhatian kedepan seperti :

1) Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil belum mencapai target karena belum semua ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar karena tidak semua ibu hamil memeriksakan kehamilannya pada trimester I kehamilan (usia 0 - 3 bulan) dengan

alasan malu karena kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan diluar nikah, kehamilan terlalu tua dan kehamilan yang sering.

2) Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir belum mencapai target karena masih ada kematian neonatus (bayi usia 0- 28 hari) sehingga tidak semua bayi baru lahir diberikan pelayanan kesehatan.
3) Cakupan pelayanan kesehatan balita belum mencapai target karena tidak semua balita diberikan pelayanan kesehatan (minimal 8 kali pelayanan) karena belum semua orangtua bayi/balita memiliki kesadaran untuk rutin memeriksakan tumbuh kembang anak ke posyandu.
4) Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar belum mencapai target karena belum semuanya mendapatkan pelayanan.
5) Cakupan pelayanan kesehatan usia reproduktif belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena keterbatasan alat/bahan medis untuk pemeriksaan seperti spekulum untuk pemeriksaan/deteksi dini kanker serviks, stick untuk pemeriksaan hipertensi dan diabetes mellitus sehingga belum semua sasaran dilakukan pemeriksaan/screening kesehatan.
6) Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus belum mencapai target karena keterbatasan bahan pemeriksa untuk screening penyakit tidak menular seperti Diabetes Melitus dan Hipertensi (stick pemeriksa kadar gula, asam urat, kolesterol, dsb) sehingga tidak semua sasaran usia produktif diberikan pelayanan kesehatan. Selain itu alat-alat pemeriksa (alat timbang BB, alat tensimeter,dsb) yang belum dikalibrasi sehingga menjadi kurang akurat dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan.
7) Cakupan pelayanan kesehatan orang lanjut usia belum mencapai target karena belum adanya poli lansia di puskesmas dan kurangnya posyandu lansia di semua wilayah kerja puskesmas sehingga kurangnya jangkauan layanan kesehatan bagi kelompok lanjut usia.
8) Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan orang terinfeksi HIV/AIDS belum mencapai target karena keterbatasan bahan medis (stick HIV) untuk pemeriksaan kelompok sasaran yang beresiko

terkena HIV/AIDS. Stick pemeriksaan HIV selain disediakan dari dana APBD Kabupaten Ngada juga mendapat bantuan dari dana APBD ProvinsiNTT di tahun 2019 sebanyak 800 stick dengan pembagian 600 stick untuk RSUD dan 200 stick untuk Puskesmas, sedangkan kelompok sasaran beresiko sebanyak 2514 orang.

Solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi persoalan ini adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kegiatan penjaringan ibu hamil K1 murni (kehamilan di usia 0-3 bulan) oleh puskesmas dengan melakukan berbagai kegiatan inovasi seperti pada puskesmas Watukapu dengan kegiatan pemeriksaan kehamilan "*callbumfas*" (calling/pemanggilan bumil dan nifas), dimaksudkan agar ibu hamil mendapatkan dukungan untuk dilakukan pemeriksaan kehamilan karena petugas aktif untuk mencari sasaran ibu hamil.
2. Kerjasama lintas sektor dengan Dinas terkait terkait untuk menggerakan masyarakat terutama sasaran orangtua bayi/balita untuk memeriksakan bayi/balita ke posyandu, seperti Dinas kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar setiap anak yang masuk kober,TK dan Paud harus dilampirkan dengan KMS.
3. Rencana pembangunan gedung sebagai pusat untuk kalibrasi alat-alat kesehatan sehingga alat-alat pemeriksaan kesehatan dapat digunakan kembali.
4. Penambahan anggaran untuk pembelian bahan/alat medis habis pakai untuk pemeriksaan kesehatan penyakit tidak menular (Hipertensi dan Diabetes Melitus) ataupun untuk deteksi dini kanker serviks.
5. Pembentukan poli lansia di puskesmas dan penambahan posyandu lansi di wilayah kerja puskesmas sehingga mendekatkan pelayanan kesehatan bagi kelompok lanjut usia.
6. Penambahan alokasi anggaran untuk pengadaan stick pemeriksaan HIV/AIDS.

4.3.1.3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelayanan dasar pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014. Terdapat 23 jenis pelayanan dasar yang perlu dipenuhi oleh Kabupaten/kota untuk bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dari 23 jenis pelayanan dasar yang mencapai 100 % hanya sebanyak 6 urusan saja atau sekitar 26 %. Dalam Pelaksanaan SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada, Program dan kegiatannya masih berpatokan pada RPJMD Kabupaten Ngada periode 2016-2021yang menggunakan dasar Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 sementara Permen terbaru sudah dikeluarkan. Sehingga terkesan Dinas PUPR Kabupaten Ngada tidak melaksanakan SPM sesuai peraturan Menteri. Anggaran tidak dialokasikan untuk semua indikator SPM dan ada sebagian indikator SPM yang dipindahkan ke Dinas atau Instansi terkait lainnya.Sampai dengan tahun 2019, dinas PUPR Kabupaten Ngada hanya menyelenggarakan 4 indikator SPM. Oleh karena itu solusi yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan kedepan adalah:

a. Penyusunan RPJMD periode berikutnya, harus disesuaikan dengan Permen PU Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
b. Program dan kegiatan di Dinas PUPR Kab. Ngada, selain mengarah kepada kebutuhan daerah dan Visi misi Kepala Daerah terpilih juga harus mengakomodir indikator SPM yang sudah ditetapkan.
c. Alokasi anggaran yang mendukung SPM bidang Pekerjaan Umum.

4.3.1.4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

Terdapat 4 jenis pelayanan dasar yang harus dipenuhi pada bidang urusan ini yakni :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
3. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

4. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Adapun realisasi dari keempat jenis urusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih 60 liter per orang perhari di tahun 2019 adalah 1,87% dengan jumlah KK terlayani 602 KK dari target 7%. Sehingga capaian tahun 2019 sebesar 76,09%.
2. Realisasi Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik dengan adanya Pembangunan Tangki Septic Skala Individual untuk 400 KK di 8 desa atau dengan jumlah penduduk yang terlayani 2000 orang dari 161.196 penduduk Kabupaten Ngada.
3. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota berupa bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 496 Unit dari target 540 Unit atau 90,18%.

Beberapa persoalan yang masih dialami dalam usaha pencapaian jenis urusan ini adalah sebagai berikut :

1. Cakupan pelayanan air bersih sebagai kebutuhan pokok sehari-hari belum mencapai target yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA, karena pekerjaan fisik diprioritaskan pada penambahan debit layanan kepada masyarakat yang sudah tersambung sambungan rumah (SR).
2. Cakupan pelayanan pengolahan air limbah domestik setempat lebih diutamakan pada pembangunan tanki septic skala individual pada desa-desa yang terlayani air bersih.
3. Cakupan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten berupa bantuan stimulan perumahan swadaya belum sesuai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan masyarakat penerima bantuan untuk melakukan swadaya, lahan atau lokasi yang tidak pasti dan ada beberapa penerima bantuan yang tidak memiliki kartu keluarga.

Sebagai solusi persoalan diatas dan perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sambungan rumah dengan fokus dibangun disekitar daerah yang menjadi target penambahan debit layanan.
2. Target pembangunan MCK ++ disesuaikan dengan target Kementerian PUPR, yang difokuskan kepada pembangunan tangki septik skala individual.
3. Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni berupa bantuan stimulan perumahan swadaya diutamakan pada masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah layak huni dan memenuhi kriteria atau persyaratan untuk menerima bantuan.
4. Koordinasi lintas sektor untuk penguatan pemberdayaan masyarakat serta pemenuhan administrasi kepenudukan calon penerima bantuan.

4.3.1.5. SPM Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat

Terdapat 5 jenis urusan yang harus dipenuhi oleh bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat yakni : a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum, b. Pelayanan informasi rawan bencana, c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Persoalan yang dihadapi dalam pencapain SPM bidang ini adalah sebagai berikut:

a) Kurangnya sarana parasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
b) Kurangnya koordinasi lintas sector dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum.
c) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang menyebabkan kurang optimalnya pelayanan penanganan kebencanaan.

Untuk memenuhi pencapain SPM ini, maka ada beberapa solusi yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kedepan seperti berikut:

1) Merencanakan Diklat Dasar anggota Satpol PP Kabupaten Ngada untuk mengikuti pendidikan dasar Pol PP.
2) Perlu membangun kemitraan yang intensif dengan penegak hukum lainya dan instansi terkait.
3) Penambahan sumber daya aparatur dan sarana prasarana.
4) Perlu dilakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat berkaitan dengan UU Lalu lintas sehingga tidak menimbulkan keterhambatan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4.3.1.6. SPM Bidang Sosial

Untuk Bidang sosial terdapat 5 urusan pelayanan yang harus dicapai sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal bidang sosial di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Untuk realisasinya baru mencapai 20 % dikarenakan berbagai persoalan seperti :

1) Cakupan rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti, belum mencapai target karena adanya pengurangan kuota bantuan dana APBN dari 180 orang menjadi 26 orang.
2) Cakupan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, belum mencapai target karena untuk penanganan terhadap Anak-anak terlantar masih fokus terhadap anak-anak terlantar yang di dalam panti sedangkan yang di luar panti hanya diberikan kepada mereka yang mengalami kekerasan terhadap anak.
3) Cakupan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti belum mencapai target karena adanya pengurangan kuota bantuan dana APBN dari 60 orang menjadi 51 orang.

4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 0 (nol), sehingga untuk SPM ini tidak ada pencapaian target.
5) Cakupan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota tidak ada masalah.

Untuk mengatasi persoalan - persoalan ditasa maka beberapa solusi dapat dipertimbangkan dalam perencanaan kedapan seperti :

a) Memaksimalkan peran Pendamping Orang Dengan Kecacatan untuk terus menerus menginput dan melengkapi data Penyandang Disabilitas yang tidak diakomodir.
b) Memprogramkan kegiatan penanganan terhadap Anak-anak terlantar di luar panti yang belum terakomodir melalui sumber pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK).
c) Pendamping terus menerus menginput data Lansia untuk diusulkan dalam Sistem Informasi Lanjut Usia (SILUI) sehingga dapat terakomodir melalui bantuan dana APBN. Di Kabupaten Ngada tidak ada gelandangan dan pengemis.
d) Setiap korban bencana yang melapor ke Dinas, semuanya diberikan bantuan, baik bantuan emergency maupun bantuan rehabilitasi rumah.

4.3.2. Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Kategori capaian indikator TPB Kabupaten Ngada berdasarkan hasil analisis data terbagi atas 4(empat) kategori yaitu: (1) sudah dilaksanakan dan sudah mencapai indikator nasional. (2) sudah dilaksanakan namun belum mencapai indikator nasional, (3) belum dilaksanakan dan belum mencapai indikator nasional, dan (4) belum ada data.Rincian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan pencapaian terhadap indikator nasional dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Grafik 4.1.

Tabel 4. 2. Persentase Pencapaian TPB di Kabupaten Ngada

No	Indikator	Jumlah	%

		Capaian	
1	Indikator Ekonomi	61	27%
2	Indikator Hukum & Tata Kelola	21	9%
3	Indikator Sosial	96	46%
4	Indikator Lingkungan	42	18%
Jumlah		220	100%

Sumber : KLHS RPJMD, 2021-2024

Grafik 4. 1. Persentase Capaian Indikator TPB

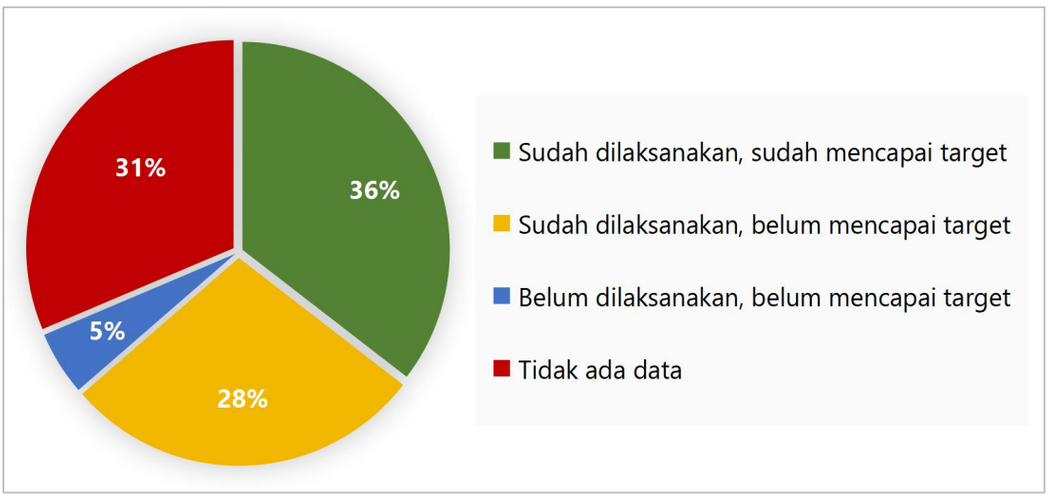

Secara umum Kabupaten Ngada belum cukup baik dalam pencapaian target TPB yaitu berdasarkan perhitungan untuk capaian sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target memiliki presentase sebanyak 36%, hal tersebut menandakan bahwa indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target belum cukup banyak. Tantangan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Ngada untuk tahun-tahun mendatang yaitu untuk indikator yang belum mencapai target, harapannya dalam kurun waktu 3 tahun ke depan 28% indikator tersebut sudah dapat mencapai target nasional.

4.3.2.1. Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Dari keseluruhan indikator TPB untuk Kabupaten yang berjumlah 220 indikator, indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional berjumlah 79 indikator (36%). Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional terbanyak adalah indikator pada TPB-3, TPB-1, dan TPB-8. Sedangkan TPB yang belum ada capaian sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target adalah TPB 7 dan TPB 12. Secara lengkap TPB yang sudah mencapai target dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3. Kategori TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Nomor Indikator TPB	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
TPB 1. Tanpa Kemiskinan	9
TPB 2. Tanpa Kelaparan	7
TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	14
TPB 4. Pendidikan Berkualitas	6
TPB 5. Kesetaraan Gender	7
TPB 6 Air Bersih	2
TPB 7. Akses Energi	0
TPB 8. Pertumbuhan Ekonomi	7
TPB 9. Inovasi Industri Infrastruktur	5
TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan	2
TPB 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	5
TPB 12. Produksi Berkelanjutan	0
TPB 13. Perubahan Iklim	1
TPB 15. Ekosistem Daratan	1
TPB 16. Perdamaian dan Keadilan	5
TPB 17. Kemitraan Berkelanjutan	8
Jumlah	**79**

Grafik 4. 2. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

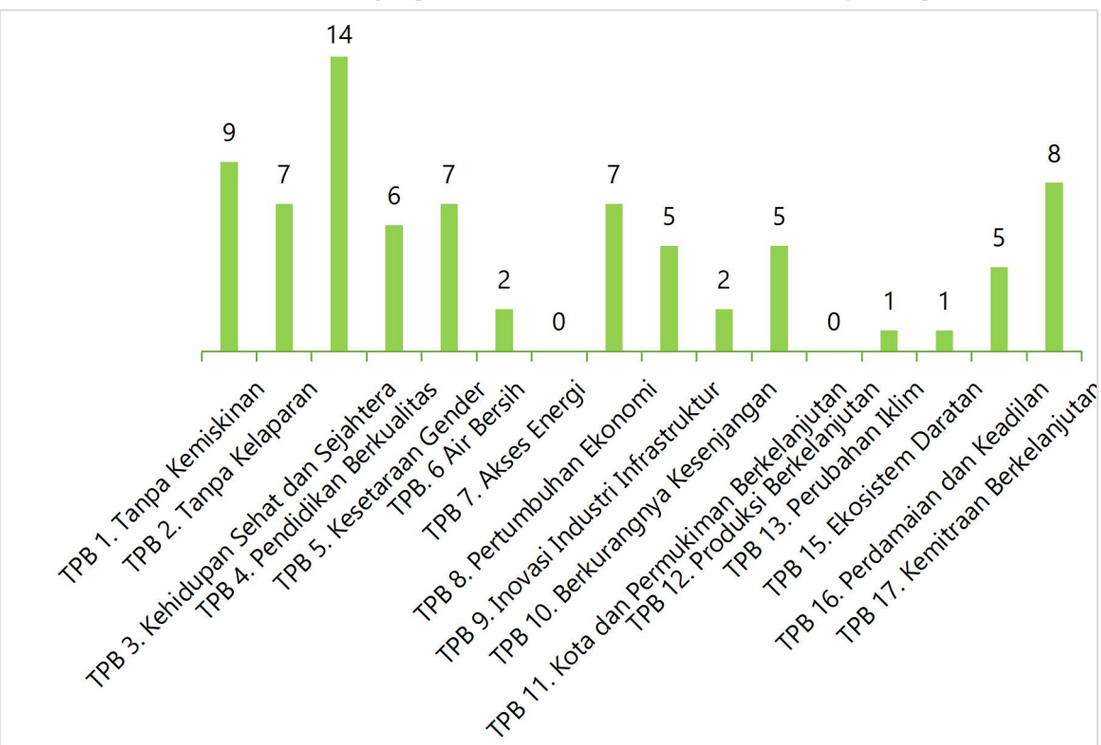

Rincian tujuan TPB, target dan indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 4. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(d)	1
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1*	1
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(b) 1.5.1.(c) 1.5.1.(e) 1.5.3*	4
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a) 1.4.1.(g) 1.4.1.(h)	3
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi,	2.1.1.(a) 2.1.2*	2

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
	Berkelanjutan	terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.		
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1* 2.2.1.(a) 2.2.2* 2.2.2.(a) 2.2.2.(b)	5
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a)	1
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	1
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber	3.3.1.(a) 3.3.2.(a) 3.3.3*	3

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
	Seluruh Penduduk Semua Usia	air, serta penyakit menular lainnya.		
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1* 3.2.2* 3.2.2.(a)	3
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(c)	1
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1* 3.1.2* 3.1.2.(a)	3
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(b) 3.7.2*	2
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	1
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik	4.4.1*	1

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
	Sepanjang Hayat untuk Semua	dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.		
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	1
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a) 4.6.1.(b)	2
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	1
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1* 5.2.1.(a) 5.2.2.(a)	3
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(b)	1
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	1

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1* 5.5.2*	2
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(d)	1
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2.(b)	1
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1* 8.10.1.(a)	2
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan	8.3.1*	1

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
	Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.		
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1* 8.5.2*	2
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(a) 8.9.1.(b)	2
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.(b) 9.1.2.(c)	2
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1* 9.c.1.(a) 9.c.1.(b)	3
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(b) 10.1.1.(c)	2

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.b.2*	1
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	1
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	1
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a)	1
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(c)	1

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	1
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	1
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a) 16.6.1.(b) 16.6.1.(d)	3
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a) 16.7.1.(b)	2
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada	17.1.2*	1

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
	Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.		
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1* 17.8.1.(a)	2
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(b) 17.18.1.(c)	2
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(b) 17.19.2.(c) 17.19.2.(d)	3

4.3.2.2. Indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target Nasional

Dari keseluruhan indikator TPB untuk Kabupaten Ngada yang berjumlah 220 indikator, indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional berjumlah 61 indikator (28 %). Indikator yang belum mencapai target banyak terdapat pada TPB-1, TPB-3, TPB-8 dan TPB-16.

Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional ini menjadi salah satu prioritas utama dalam menentukan skenario dalam pencapaian target nasional dalam kurun waktu perencanaan RPJMD ke depan.

Tabel 4. 5. Kategori TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional

Nomor Indikator	Indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
TPB 1. Tanpa Kemiskinan	11
TPB 2. Tanpa Kelaparan	1
TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	10
TPB 4. Pendidikan Berkualitas	5
TPB 5. Kesetaraan Gender	4
TPB. 6 Air Bersih	2
TPB 7. Akses Energi	0
TPB 8. Pertumbuhan Ekonomi	9
TPB 9. Inovasi Industri Infrastruktur	1
TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan	3
TPB 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	3
TPB 12. Produksi Berkelanjutan	0
TPB 13. Perubahan Iklim	1
TPB 15. Ekosistem Daratan	1
TPB 16. Perdamaian dan Keadilan	5
TPB 17. Kemitraan Berkelanjutan	5
Jumlah	**61**

Grafik 4. 3. Indikator yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional

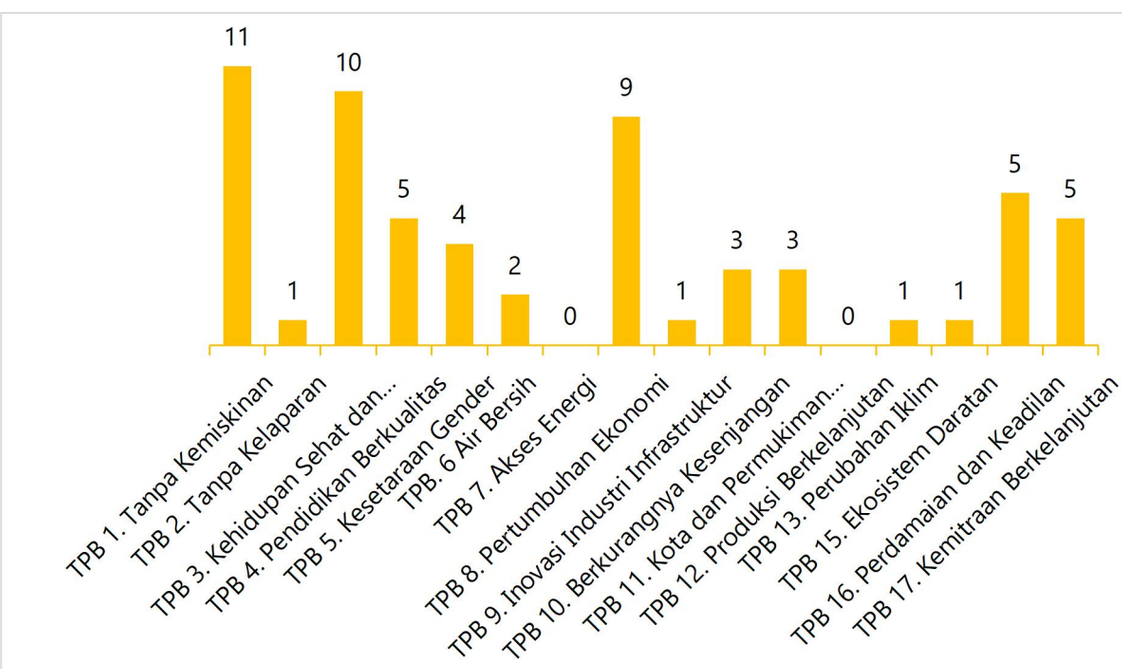

Rincian tujuan TPB, target dan indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4. 6. Tujuan, Target dan Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a) 1.3.1.(c)	2
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.2*	1
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1* 1.5.2.(a)	2
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	1

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(k)	1
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(c)	1
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	1
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2* 3.8.2.(a)	2
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	1

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5*	1
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(b)	1
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(b)	1
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1* 3.7.1.(a) 3.7.2.(a)	3
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	1
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a) 4.1.1.(b) 4.1.1.(d) 4.1.1.(e)	4

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	1
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2*	1
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(a) 5.6.1.(b)	2
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a)	1
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	1
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(b)	1

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1* 8.1.1.(a)	2
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(a) 8.3.1.(b) 8.3.1.(c)	3
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	1
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2.(a)	1
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.2*	1

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
	Layak untuk Semua			
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.2*	1
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	1
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(a) 10.1.1.(d)	2
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1* 11.5.1.(a) 11.5.2.(a)	3
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.2*	1
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban	15.1.1.(a)	1

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
	Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	berdasarkan perjanjian internasional.		
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(b) 16.2.3.(a)	2
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1* 16.9.1.(b)	2
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1* 17.1.1.(a)	2
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan	17.6.2.(b) 17.6.2.(c)	2

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
	Pembangunan Berkelanjutan	inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.		
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(a)	1

4.3.2.3. Indikator yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Dari keseluruhan indikator TPB untuk Kota yang berjumlah 220 indikator, indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional berjumlah 11 indikator (5%) dengan TPB-6 yang paling banyak.

Tabel 4. 7. Indikator yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Nomor Indikator TPB	Indikator yang belum dilaksanakan, belum mencapai target nasional
TPB 1. Tanpa Kemiskinan	0
TPB 2. Tanpa Kelaparan	0
TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	0
TPB 4. Pendidikan Berkualitas	0
TPB 5. Kesetaraan Gender	0
TPB. 6 Air Bersih	7
TPB 7. Akses Energi	0
TPB 8. Pertumbuhan Ekonomi	0

TPB 9. Inovasi Industri Infrastruktur	0
TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan	0
TPB 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	0
TPB 12. Produksi Berkelanjutan	0
TPB 13. Perubahan Iklim	0
TPB 15. Ekosistem Daratan	1
TPB 16. Perdamaian dan Keadilan	0
TPB 17. Kemitraan Berkelanjutan	3
Jumlah	**11**

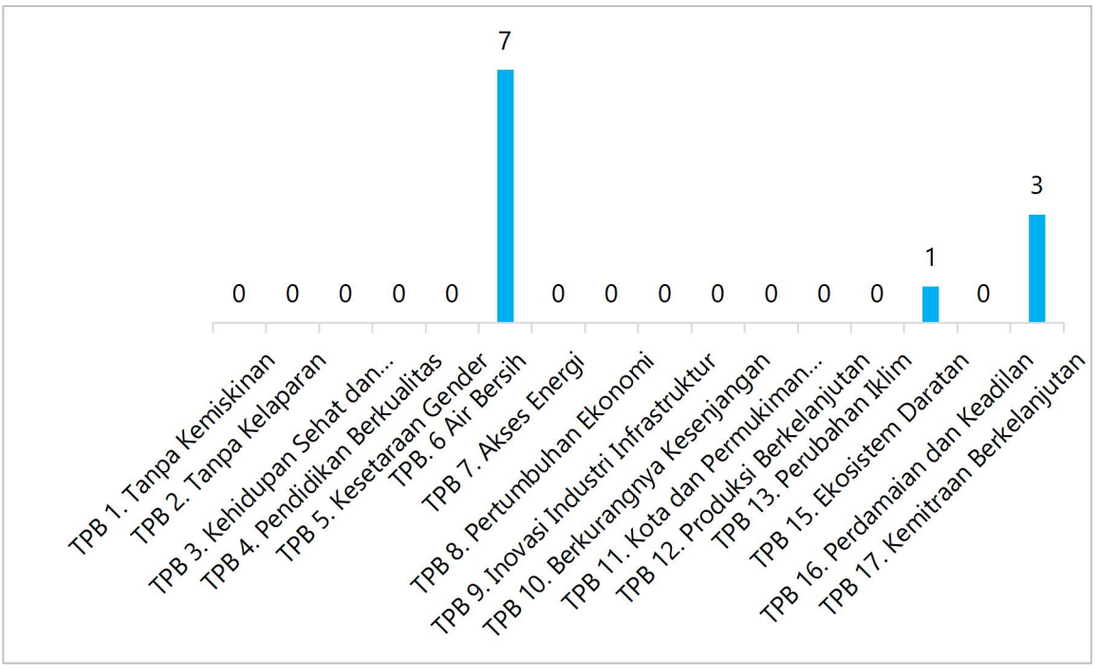

Grafik 4. 4. Indikator yang BelumDilaksanakan danBelum Mencapai Target Nasional

Rincian tujuan TPB, target dan indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4. 8. Indikator yang BelumDilaksanakan danBelum Mencapai Target Nasional

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta	6.2.1.(b) 6.2.1.(c) 6.2.1.(f)	3

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
		kelompok masyarakat rentan.		
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(b) 6.1.1.(c)	2
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a) 6.3.1.(b)	2
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	1

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a) 17.17.1.(b)	2
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(d)	1

4.3.2.4. Indikator yang belum mempunyai data

Dari keseluruhan indikator TPB untuk Kabupaten Ngada yang berjumlah 220 indikator, indikator yang belum mempunyai data berjumlah 69 indikator (31 %). Paling banyak adalah indikator TPB-16 sebanyak 11 indikator. Indikator TPB yang belum mempunyai data ini juga menjadi salah satu prioritas dalam menentukan skenario dalam pencapaian target nasional dalam kurun waktu perencanaan RPJMD lima tahun ke depan.

Grafik 4. 5. Indikator TPB yang Belum Mempunyai Data

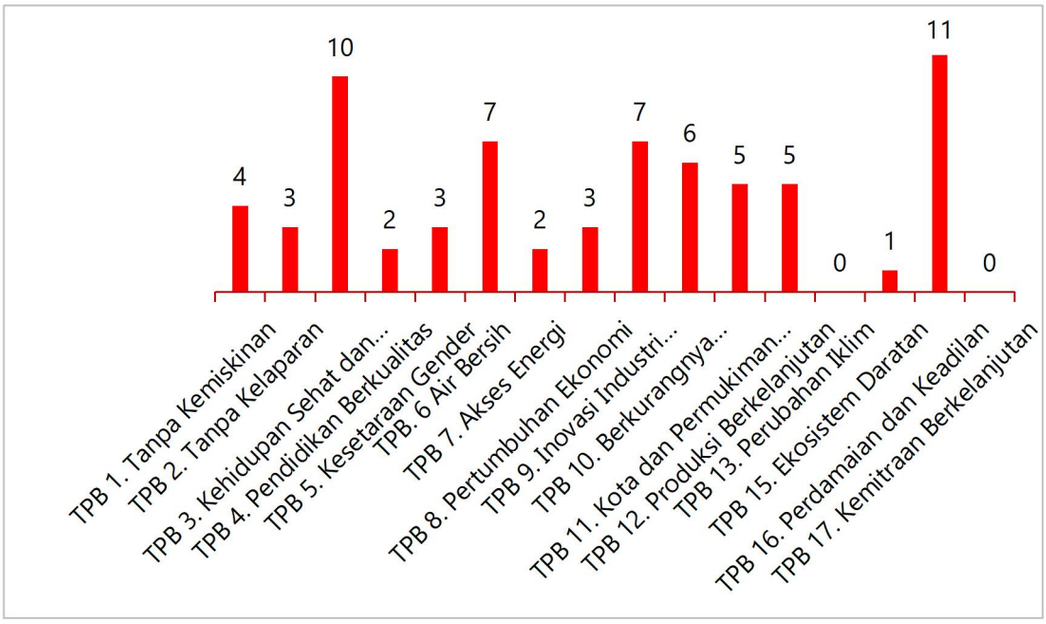

Rincian tujuan, target dan indikator TPB yang belum mempunyai data dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4. 9. Tujuan,Target dan Indikator TPB yang Belum Mempunyai Data

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b)	1
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(a) 1.5.1.(d)	2

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(c)	1
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	1
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1* 2.1.2.(a)	2
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(e) 3.5.2*	2
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit	3.3.3.(a) 3.3.4.(a) 3.3.5.(a) 3.3.5.(b)	4

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
		menular lainnya.		
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a) 3.4.2* 3.4.2.(a)	3
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a)	1
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	1
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(g)	1
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1* 5.3.1.(a)	2
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	1

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(e)	1
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a) 6.5.1.(c) 6.5.1.(f) 6.5.1.(g)	4
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2.(a)	1
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(b)	1
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	1
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	1
8	Meningkatkan	Mencapai tingkat	8.2.1*	1

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.		
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1* 8.9.1.(c)	2
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1*	1
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1* 9.2.1.(a) 9.2.2*	3
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia,	9.1.1.(b) 9.1.1.(c)	2

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
		dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.		
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	1
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a) 10.3.1.(d)	2
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	1
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1* 10.1.1.(e) 10.1.1.(f)	3
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a)	1
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1.(b) 11.3.2.(b)	2

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(b)	1
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(b)	1
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1.(a)	1
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.(a)	1
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a)	1
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a)	1

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
	Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati			
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	1
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1*	1
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel,	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1* 16.6.1.(c) 16.6.2.(a)	3

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
	dan Inklusif di Semua Tingkatan			
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a)	1
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	1
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c)	1
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a) 16.1.2.(a) 16.1.3.(a) 16.1.4*	4

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	No. Indikator	Jumlah
	Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan			
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	1

4.3.3. Telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngada 2012-2032

Kebijakanpenataan ruang merupakan jabaran dari tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan dirumuskan dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki, mampu menjawab isu strategis di wilayah kabupaten dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Ngada adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem pertanian dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah;
2. Meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana;
3. Pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan;
4. Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis dengan pengembangan pertanian, pariwisata dan tangguh bencana;
5. pengembangan sistem transportasi secara intermodal untuk meningkatkan daya saing dan tangguh bencana;

6. Pendayagunaan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku, sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian, dan layanan air bersih untuk penduduk;
7. Peningkatan pelayanan energi secara merata di seluruh wilayah;
8. Peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata di seluruh wilayah;
9. Pengoptimalan tingkat layanan persampahan dan limbah guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih;
10. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kualitas lingkungan, meminimalkan risiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global dengan prinsip partisipasi, dan penghargaan terhadap kearifan lokal;
11. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem pertanian unggulan dan pariwisata, dengan tetap mengembangkan sektor-sektor lain sebagai sektor pendukung pertumbuhan perekonomian wilayah;
12. Pengembangan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis budaya dan kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup
13. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan pesisir untuk meningkatkan kualitas lingkungan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil sebagai sektor pendukung wisata;
14. Pengendalian pemanfaatan ruang.

Strategi penataan ruang merupakan jabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah yang dapat dirinci dengan target pencapaian 5 (lima) tahunan. Strategi tersebut harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten. Strategi penataan ruang berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama 5 (lima) tahunan dalam RTRW Kabupaten dan berfungsi sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Selain dituntut adanya kejelasan, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan, strategi penataan

ruang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Strategi penataan ruang Kabupaten Ngada adalah sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan sistem pertanian dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing wilayah meliputi:
   b. mengembangkan kawasan pertanian lahan basah di kawasan yang cukup tersedia air bakunya;
   c. mengembangkan peternakan di kawasan sabana;
   d. mengembangkan perkebunan di kawasan perbukitan;
   e. mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya di daerah yang memiliki laut dan pantai; dan
   f. mengembangkan pariwisata alam, buatan, minat khusus dan wisata budaya.

2. Strategi peningkatan ketangguhan Daerah terhadap bencana meliputi:
   a. mengembangan *early warning system* terhadap bencana;
   b. mengembangkan mitigasi bencana; dan
   c. mengembangkan sistem penanganan bencana.

3. Strategi pendistribusian persebaran penduduk meliputi:
   a. membangun sarana-prasarana pada kawasan pusat pertumbuhan baru untuk menarik mobilitas penduduk;
   b. mengembangkan kegiatan perekonomian untuk menarik mobilitas penduduk;
   c. membangun aksesibilitas dan sarana-prasarana pada kawasan perdesaan atau kawasan kurang berkembang untuk menghindari urbanisasi; dan
   d. mengembangkan kegiatan perekomian pada kawasan perdesaan atau kawasan kurang berkembang untuk menghindari urbanisasi.

4. Strategi Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis dengan pengembangan pertanian unggulan, perikanan unggulan, pariwisata dan tangguh bencana meliputi:
   a. memantapkan pusat-pusat kegiatan secara hierarkis dengan membentuk PKW, PPK dan PPL;

b. meningkatkan interaksi desa-kota dalam meningkatkan efisiensi pengembangan kawasan pertanian dan perikanan unggulan;
c. meningkatkan atau memantapkan pusat-pusat layanan untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian dan perikanan unggulan;
d. meningkatkan interaksi antar daya tarik wisata dan pusat layanan untuk mendukung periwisata;
e. meningkatkan atau memantapkan pusat-pusat layanan untuk mendukung pariwisata; dan
f. meningkatkan atau memantapkan pusat-pusat layanan untuk mendukung ketangguhan daerah terhadap bencana.

5. Strategi pengembangan sistem transportasi secara intermoda untuk meningkatkan daya saing dan tangguh bencana meliputi:
   a. mengembangkan jalan untuk menghubungkan kawasan-kawasan strategis serta pengembangan jalan penghubung ke semua sentra produksi pertanian dan pusat pelayanan pariwisata unggulan di wilayah daerah;
   b. memantapkan fungsi terminal angkutan dalam dan luar wilayah serta pembangunan terminal penumpang dan barang sebagai upaya memperlancar pergerakan dan distribusi barang hasil pertanian dan industri ke luar wilayah daerah;
   c. mengembangkan sistem angkutan kota dan angkutan pedesaan yang baik, aman dan murah, terutama pada wilayah yang belum terlayani;
   d. meningkatkan kapasitas tingkat pelayanan penyeberangan antar wilayah pada pelabuhan Aimere dan Riung;
   e. mengembangkan sarana pendukung pelabuhan umum dan upaya komersialisasi Pelabuhan Aimere, Riung dan Pelabuhan Maumbawa untuk ekspor-impor hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; dan

f. mengembangan kawasan Bandar Udara Soa sebagai kawasan pendorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah Daerah sebagai pintu gerbang Daerah.

6. Strategi pendayagunaan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku, sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian, dan layanan air bersih untuk penduduk meliputi:
   a. melindungi terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air;
   b. meningkatkan daya resap air ke dalam tanah melalui upaya reboisasi;
   c. membatasi perkembangan permukiman pada kawasan-kawasan resapan air mengembangkan pelayanan air bersih pada wilayah yang belum terlayani;
   d. meningkatkan sarana dan prasarana sumber daya air sebagai pendukung pengembangan sentra-sentra pertanian;
   e. meningkatkan sarana dan prasarana sumber daya air sebagai pendukung pengembangan sentra-sentra perikanan;
   f. meningkatkan sarana dan prasarana sumber daya air sebagai pendukung pengembangan sentra-sentra pariwisata; dan
   g. mengurangi tingkat kebocoran pipa air bersih dan menambah jaringan pipa pada kawasan perumahan dan permukiman.

7. Strategi peningkatan pelayanan energi secara merata di seluruh willayah meliputi:
   a. mengoptimalkan kualitas pelayanan dengan penambahan dan perbaikan sistem jaringan, peningkatan infrastruktur pendukung, peningkatan kapasitas sumber energi listrik;
   b. mengoptimalkan pelayanan kelistrikan terutama untuk melayani pusat-pusat pertanian unggulan, perikanan unggulan dan pariwisata;
   c. memperluas jangkauan pelayanan kelistrikan sampai ke pelosok desa; dan

d. meningkatkan kapasitas penyediaan energi listrik melalui pengembangan PLTPB baru, pengembangan sistem penyediaan energi listrik setempat, misalnya mikrohidro dan pikohidro serta pengembangan sumber energi terbarukan.

8. Strategi peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata di seluruh wilayah meliputi:
   a. menerapkan teknologi telematika berbasis teknologi modern;
   b. menyediakan teknologi telematika pada wilayah-wilayah pusat pelayanan, pusat pertanian unggulan, perikanan unggulan dan ekowisata;
   c. membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan ibukota daerah;
   d. menyediakan tower BTS (Basic Transfer Station) yang digunakan secara bersama menjangkau ke pelosok perdesaan;
   e. meningkatkan sistem informasi telekomunikasi pembangunan Daerah berupa informasi berbasis teknologi internet;
   f. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi berbasis teknologi internet untuk pengembangan keterkaitan sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata; dan
   g. mengembangkan prasarana telekomunikasi meliputi telepon rumah tangga, telepon umum dan jaringan telepon selular.

9. Strategi pengoptimalan tingkat layanan persampahan dan limbah guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih meliputi:
   a. meminimalisir penggunaan sumber sampah yang sukar didaur ulang secara alamiah;
   b. mengelola lingkungan buatan yang ditekankan pada pengendalian pencemaran serta pemantapan kapasitas kelembagaan pengelola persampahan;
   c. meningkatkan kinerja operasi sistem pengangkutan sampah di perkotaan dan perdesaan hingga ke Tempat Penampungan Sementara di lokasi masing-masing;

d. meningkatkan teknologi pengolahan limbah melalui pengkomposan sampah organik, teknologi daur ulang sampah non organik, teknologi pembakaran sampah dengan incinerator serta teknologi sanitary landfill dengan prinsip-prinsip "3R" (reduse, reuse, recycle) serta prinsip pemulihan biaya (cost-recovery) dalam pengelolaan sampah; dan
e. membangun Tempat Pemrosesan Akhir pada wilayah yang jauh dari permukiman serta tidak mengganggu lingkungan sekitar;
f. menangani limbah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi per Kepala Keluarga juga sanitasi umum pada wilayah perkotaan dan perdesaan;
g. meningkatkan sanitasi lingkungan untuk permukiman, produksi, jasa, kawasan pertanian unggulan, perikanan unggulan, ekowisata dan kegiatan sosial ekonomi lainnya;
h. mewajibkan Instalasi Pengolahan Air Limbah bagi kawasan industri dan kegiatan strategis lainnya.

10. Strategi pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kualitas lingkungan, meminimalkan risiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global dengan prinsip partisipasi, dan penghargaan terhadap kearifan lokal, meliputi :
    a. memantapkan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup;
    b. memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup;
    c. memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar alam;
    d. memantapkan kawasan perlindungan geologi melalui penetapan kawasan geopark dan penetapan serta penegakan aturan daerah;
    e. menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan pengrusakan lingkungan terutama pada

kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana alam, serta pengendalian untuk kegiatan manusia secara langsung;

f. perlindungan terhadap kawasan cagar budaya; dan
g. perlindungan terhadap hutan bakau pada kawasan mangrove.

11. Strategi kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem pertanian unggulan, perikanan unggulan dan pariwisata, dengan tetap mengembangkan sektor-sektor lain sebagai sektor pendukung pertumbuhan perekonomian wilayah meliputi:
    a. mengembangkan kawasan hutan produksi yang terdapat di Wilayah untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan;
    b. mengembangkan hutan rakyat dengan tanaman produktif bernilai ekonomi tinggi;
    c. mengembangkan pertanian lahan basah dengan meningkatkan peran, efisiensi, produktivitas yang berkelanjutan, peluang ekstensifikasi, serta mempertahankan saluran irigasi teknis dan peningkatan irigasi sederhana dalam skala wilayah;
    d. mengembangkan pertanian holtikultura dan tanaman tahunan yang produktif pada kawasan pertanian lahan kering atau tegalan;
    e. Mengembangkan kawasan perkebunan dengan prioritas utama komoditas perkebunan berdasarkan kesesuaian lahannya (land suitability);
    f. mengembangkan peternakan melalui intensifikasi pada areal peternakan yang telah ada dan kawasan peternakan baru;
    g. mengembangkan perikanan dengan penyediaan sarana prasarana perikanan tangkap, pengembangan budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan;
    h. mengembangkan pertambangan berupa eksploitasi potensi secara berkelanjutan dengan mengutamakan segi pelestarian lingkungan;
    i. mengembangkan kawasan industri lebih difokuskan pada pengelolaan agroindustri sebagai sektor pendukung pengembangan perekonomian wilayah daerah;

j. menentukan wisata unggulan Daerah, pelestarian lingkungan, promosi, serta peningkatan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian daya tarik wisata dan daya jual atau daya saing;
k. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan kawasan transmigrasi;
l. pembatasan pengembangan permukiman perdesaan dan kawasan terbangun lainnya pada kawasan lindung; dan
m. mendukung pengembangan kawasan peruntukkan lainnya berupa fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan dengan turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan.

12. Strategi pengembangan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis budaya dan kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup meliputi:
    a. mengembangkan kawasan strategis ekonomi berupa pengembangan kawasan wisata pesisir, kawasan perbatasan, kawasan prioritas pedesaan, kawasan agrowisata dan kawasan transmigrasi;
    b. mengembangkan kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
    c. mengembangkan kawasan strategis sosial budaya; dan
    d. mengembangkan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

13. Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan pesisir untuk meningkatkan kualitas lingkungan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil meliputi:
    a. mengembangkan zona kawasan pesisir dan laut yang potensial di Daerah;
    b. melestarikan dan menyelamatkan ekosistem kawasan pesisir yang ada ataupun yang sudah mengalami alih fungsi dengan pembatasan pengembangan kawasan demi kelestarian ekosistem alam serta pemberian zona penyangga minimal selebar 500 (lima ratus) meter ke arah laut;

c. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung melalui pemanfaatan bakau dan terumbu karang sebagai sumber ekonomi perikanan dengan cara penangkapan yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan;
d. menghindari pembukaan areal tambak baru pada hutan bakau/mangrove; dan
e. membatasi pengembangan permukiman sesuai dengan skala pelayanan permukiman dan kegiatan dominan masing-masing.

14. Strategi pengendalian pemanfaatanruang meliputi:
    a. Membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagai badan koordinasi dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang kabupaten;
    b. peningkatan pengetahuan dan keterampulan aparatur penyelidik PNS;
    c. Penyusunan peraturan yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang;
    d. Penyusunan peninjauan kembali dan revisi dokumen rencana tata ruang sesuai ketentuan; dan
    e. Peningkatan pengetahuan dan paritisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Tabel 4. 10. Hasil Telaah Struktur Ruang

NO		PROGRAM UTAMA	KEGIATAN DAN LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							
				PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
I	**PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN**										
	A	**Pengembangan dan penataan ruang perkotaan yang direncanakan sebagai Pusat kegiatan Wilayah (PKW)**	a. Penyusunan rencana detail tata ruang Perkotaan Bajawa	X	X	X	X	X			
			b. Penyusunan masterplan dan rencana sektoral Perkotaan Bajawa: (Persampahan, Limbah, Drainase, SPAH, RTH, dsb)	X	X	X	X	X			
			c. Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana	X	X	X	X	X	X		

NO		PROGRAM UTAMA	KEGIATAN DAN LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							
				PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
			Perkotaan Bajawa yang mendukung fungsi perannya sebagai PKW								
			d. Pemeliharaan sarana prasarana Perkotaan Bajawa yang mendukung fungsi perannya sebagai PKW	X	X	X	X	X	X	X	X
	B	**Pengembangan dan penataan ruang ibukota kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan**	a. Penyusunan masterplan dan rencana sektoral Ibukota Kecamatan Aimere, Inerie, Jerebuu, Golewa selatan, Golewa, Golewa Barat, Soa, Bajawa Utara. Wolomeze, Riung, Riung Barat	X	X	X	X	X			
			b. Penyediaan sarana prasarana di Ibukota Kecamatan Aimere, Inerie, Jerebuu, Golewa selatan, Golewa, Golewa Barat, Soa, Bajawa Utara, Wolomeze, Riung, Riung Barat yang mendukung fungsi perannya sebagai PPK	X	X	X	X	X	X		
			c. Pemeliharaan sarana prasarana di Ibukota Kecamatan Aimere, Inerie, Jerebuu, Golewa selatan, Golewa Barat, Bajawa Utara. Wolomeze, Riung, Riung Barat yang mendukung fungsi perannya sebagai PPK	X	X	X	X	X	X	X	X
	C	**Pengembangan dan penataan ruang perkotaan baru sebagai Pusat Pelayanan Kawasan**	a. Penyusunan masterplan dan rencana sektoral Perkotaan Lengkosambi, Wangka selatan, dan Uluwae.	X	X	X	X	X			
			b. Penyediaan sarana prasarana	X	X	X	X	X	X		

NO		PROGRAM UTAMA	KEGIATAN DAN LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							
				PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
			Perkotaan Lengkosambi, Wangka selatan, dan Uluwae yang mendukung fungsi perannya sebagai PPK								
			c. Pemeliharaan sarana prasarana Perkotaan Lengkosambi, Wangka selatan, dan Uluwae yang mendukung fungsi perannya sebagai PPK	X	X	X	X	X	X	X	X
	D	**Pengembangan dan penataan ruang perkotaan yang direncanakan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan**	a. Penyusunan masterplan dan rencana sektoral semua pusat desa di luar PKW, PPK yang telah dapat melayani desa yang berdekatan	X	X	X	X	X			
			b. Peningkatan sarana prasarana di semua pusat desa di luar PKW, PPK yang telah dapat melayani desa yang berdekatan untuk mendukung fungsi perannya sebagai PPL	X	X	X	X	X	X		
			c. Pemeliharaan sarana prasarana di semua pusat desa selain di luar PKW, PPK yang telah dapat melayani desa yang berdekatan untuk mendukung fungsi perannya sebagai PPL	X	X	X	X	X	X	X	X
II	**PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA WILAYAH**										
	A	**Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi**									
		1. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat	a. Penyusunan Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Ngada	X	X	X	X	X			
			b. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan	X	X	X	X	X	X	X	X

NO		PROGRAM UTAMA	KEGIATAN DAN LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							
				PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
			arteri primer								
			c. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan strategis nasional	X	X	X	X	X	X	X	X
			d. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan kolektor primer JKP3	X	X	X	X	X	X	X	X
			e. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan lokal primer JLP dan jalan lingkungan JLing-P di seluruh wilayah Kabupaten Ngada	X	X	X	X	X	X	X	X
			f. Peningkatan status dan fungsi jalan sesuai dengan kebutuhan pembangunan	X	X	X	X	X	X	X	X
			g. Pembangunan jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas intra wilayah dan antar wilayah	X	X	X	X	X	X	X	X
			h. Pengembangan terminal type B di Perkotaan Bajawa	X	X	X	X	X			
			i. Pembangunan terminal Tipe C di ibukota kecamatan Inerie, Golewa Barat, Golewa Selatan, Golewa, Soa, Bajawa Utara, Wolomeze, Riung dan Riung Barat	X	X	X	X	X			
			j. Pengembangan angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan	X	X	X	X	X	X	X	X
			k. Pembuatan tanggul pengaman pada semua ruas jalan yang melewati kawasan rawan longsor	X	X	X	X	X			
			l. Pemasangan rambu dan marka	X	X	X	X	X			

NO		PROGRAM UTAMA	KEGIATAN DAN LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							
				PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
			jalan di semua ruas jalan								
			m. Penetapan rumija pada ruas jalan JLP dan JLing-P	X	X	X	X	X			
			n. Penetapan kelas jalan untuk menentukan tonase kendaraan yang diijinkan lewat di jalan	X	X	X	X	X			
			o. Pembuatan kajian kelayakan dan ijin lingkungan bagi pembuatan jalan baru	X	X	X	X	X	X	X	X
			p. Koordinasi dengan instansi terkait	X	X	X	X	X	X	X	X
		2. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut	a. Peningkatan fungsi & status Pelabuhan Aimere sebagai Pelabuhan pengumpan	X	X	X	X	X	X	X	X
			b. Pengembangan sarana Prasarana pelabuhan barang dan terminal petikemas di Kecamatan Aimere	X	X	X	X	X	X	X	X
			c. Pengembangan sarana-prasarana pelabuhan pariwisata di Kecamatan Riung	X	X	X	X	X	X	X	X
			d. Pemeliharaan sarana-prasarana kepelabuhanan	X	X	X	X	X	X	X	X
		3. **Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara**	a. Peningkatan status & fungsi Bandara Soa sebagai Bandara Pengumpan	X	X	X	X	X	X	X	X
			b. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Bandar Udara Soa	X	X	X	X	X	X	X	X
			c. Pengembangan sarana pasarana kebandarudaraan Bandara Soa	X	X	X	X	X	X	X	X
			d. Pemeliharaan sarana-prasarana kebandarudaraan	X	X	X	X	X	X	X	X
	B	**Pengembangan**	a. Penyusunan	X	X	X	X	X			

NO		PROGRAM UTAMA	KEGIATAN DAN LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							
				PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
		Sistem Jaringan Prasarana Energi	Masterplan Kelistrikan Kabupaten Ngada								
			b. Pengembangan Sarana-prasarana pelabuhan BBM di Aimere	X	X	X	X	X	X	X	X
			c. Pengembangan SPBU dan SPBE di seluruh perkotaan	X	X	X	X	X	X	X	X
			d. Pengembangan PLTP Mataloko di Kecamatan Golewa dan PLTP Nage di Kecamatan Golewa Barat	X	X	X	X	X	X	X	X
			e. Pengembangan PLTMH OGI di Kecamatan Bajawa	X	X	X	X	X	X	X	X
			f. Pengembangan Pembangkit listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah yang membutuhkan	X	X	X	X	X	X	X	X
			g. Pemantapan GI Bajawa	X	X	X	X	X	X		
			h. Pengembangan gardu 20KV di semua PPK	X	X	X	X	X	X		
			i. Pengembangan jaringan distribusi SUTM dari GI Bajawa ke Gardu 20 KV di semua PPK	X	X	X	X	X	X		
			j. Pengembangan jaringan distribusi SUTR dari Gardu 20 kV di tiap PPK ke PPL dan konsumen.	X	X	X	X	X	X		
			k. Pemeliharaan sarana-prasarana keenergian	X	X	X	X	X	X		
	C	**Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi**	a. Pengembangan sistem prasarana jaringan Kabel di PKW dan PPK	X	X	X	X	X			
			b. Pengembangan sistem prasarana Nirkabel yang	X	X	X	X	X	X	X	X

NO		PROGRAM UTAMA	KEGIATAN DAN LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							
				PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
			dapat menjangkau di seluruh wilayah Kabupaten Ngada								
			c. Pengadaan internet di seluruh Wilayah Kabupaten	X	X	X	X	X	X	X	X
			d. Pengembangan stasiun radio	X	X	X	X	X	X	X	X
			e. Pengembangan stasiun televisi daerah di Bajawa Utara	X	X	X	X	X	X	X	X
			f. Pemeliharaan sarana-prasarana telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X
	D	**Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air**	a. Penguatan Kawasan Tangkapan Air untuk mempertahankan debit aliran sungai dan sumber air baku lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
			b. Pencegahan pencemaran air baku/ penjaminan kualitas air baku	X	X	X	X	X	X	X	X
			c. Pengembangan prasarana pengairan di sawah yang telah ada dan sawah baru	X	X	X	X	X	X	X	X
			d. Studi kelayakan pembangunan waduk di Kabupaten Ngada	X	X	X	X	X	X	X	X
			e. Pembangunan waduk di Kabupaten Ngada						X	X	X
	E	**Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**	a. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Daerah	X	X	X	X	X			
		1. Pengembangan sistem jaringan air minum	a. Pengembangan sarana prasarana air bersih di seluruh wilayah	X	X	X	X	X	X	X	X
			b. Pemeliharaan sarana-prasarana air bersih di seluruh wilayah								

NO		PROGRAM UTAMA	KEGIATAN DAN LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							
				PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
		2. Pengembangan sistem jaringan air limbah	a. Pengembangan sarana-prasarana pengelolaan air limbah perkotaan dan perdesaan di seluruh wilayah	X	X	X	X	X	X	X	X
			b. Pemeliharaan sarana-prasarana air limbah seluruh wilayah	X	X	X	X	X	X	X	X
		3. Pengembangan sistem jaringan persampahan	a. Pengembangan sarana prasarana persampahan perkotaan di semua perkotaan	X	X	X	X	X	X	X	X
			b. Pengembangan TPA di semua PPK	X	X	X	X	X	X	X	X
			c. Pengembangan TPST di Bajawa	X	X	X	X	X	X	X	X
			d. Pemeliharaan sarana-prasarana persampahan di seluruh wilayah	X	X	X	X	X	X	X	X
		4. Pengembangan sistem jaringan drainase	a. Pengembangan sarana prasarana drainase perkotaan di semua perkotaan	X	X	X	X	X	X	X	X
			b. Pemeliharaan sarana-prasarana drainase di seluruh wilayah	X	X	X	X	X	X	X	X
		5. Pengembangan sistem jaringan mitigasi bencana	a. Pengembangan sarana prasarana mitigasi dan penanganan bencana	X	X	X	X	X	X	X	X
			b. Pemeliharaan sarana-prasarana mitigasi bencana di seluruh wilayah	X	X	X	X	X	X	X	X

Tabel 4. 11. Telaahan Pola Ruang Kabupaten Ngada

NO		PROGRAM UTAMA	KEGIATAN DAN LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							
				PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
I	**PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN LINDUNG**										
	A	**Perlindungan terhadap Kawasan Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**	a. Mempertahankan fungsi kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Bajawa, Golewa, Bajawa Utara, Wolomeze, Riung Barat, Riung, Aimere, Inerie, dan	X	X	X	X	X	X	X	X

NO		PROGRAM UTAMA	KEGIATAN DAN LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							
				PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
			Jerebuu.								
			b. Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung (Reboisasi Hutan) Kecamatan Bajawa, Golewa, Bajawa Utara, Wolomeze, Riung Barat, Riung, Aimere, Inerie, dan Jerebuu.	X	X	X	X	X	X	X	X
			c. Pemberdayaan masyarakat disekitar hutan lindung dalam rangka menjaga fungsi lindung..	X	X	X	X	X	X	X	X
			d. Perlindungan terhadap kawasan resapan air di seluruh wilayah Kabupaten Ngada	X	X	X	X	X	X	X	X
	B	**Perlindungan terhadap Kawasan Perlindungan Setempat**	a. Penetapan dan penegakan aturan garis sempadan pantai berjarak 100 meter dari titik pasang tertinggi ke darat di seluruh pantai yang ada di wilayah kabupaten Ngada	X	X	X	X	X	X	X	X
			b. Penetapan dan penegakan aturan daerah sempadan sungai berjarak tertentu sesuai aturan dari titik pasang tertinggi ke arah darat terhadap seluruh tepi sungai yang ada di wilayah Kabupaten Ngada	X	X	X	X	X	X	X	X
			c. Penetapan dan penegakan aturan daerah sempadan danau/waduk berjarak tertentu sesuai aturan dari titik pasang tertinggi ke arah darat terhadap seluruh tepi sungai yang ada di wilayah Kabupaten Ngada	X	X	X	X	X	X	X	X
			d. Perlindungan terhadap kawasan								

NO		PROGRAM UTAMA	KEGIATAN DAN LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							
				PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
			lindung spiritual di Wolowio, Kecamatan Bajawa dan kawasan lindung spiritual Lengkosambi, kecamatan Riung.								
	C	**Perlindungan terhadap Kawasan Konservasi**	a. Perlindungan terhadap Cagar Alam Watu Ata di Kecamatan Bajawa, Bajawa Utara, Aimere dan Cagar Alam Wolo Tadho di Riung .	X	X	X	X	X	X	X	X
			b. Perlindungan terhadap kawasan pelestarian alam Kebunraya Wolobobo di Kecamatan Bajawa Kawasan Taman Wisata Alam Laut di Kecamatan Riung	X	X	X	X	X	X	X	X
			c. Menjaga kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kecamatan Riung,Inerie, Golewa Selatan dan Aimere.	X	X	X	X	X	X	X	X
	D	**Perlindungan terhadap Kawasan Lindung Geologi**	a. Penetapan dan perlindungan kawasan geopark di Soa	X	X	X	X	X	X	X	X
			b. Perlindungan terhadap keberadaan mata Air Panas Mengeruda di Kecamatan Soa.	X	X	X	X	X	X	X	X
			c. Menjaga Kelestarian Air Tanah di Kecamatan Soa, Bajawa Utara, Riung, Inerie, Jerebuu, Riung Barat, Wolomeze, Bajawa, Golewa, Golewa Selatan, Golewa Barat dan Aimere.	X	X	X	X	X	X	X	X

NO		PROGRAM UTAMA	KEGIATAN DAN LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							
				PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
			d. Penetapan dan penegakan aturan daerah sempadan mata air berjarak tertentu sesuai aturan dari titik pasang tertinggi ke arah darat terhadap seluruh tepi sungai yang ada di wilayah Kab. Ngada	X	X	X	X	X	X	X	X
	E	**Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana**	a. Pengembangan Mitigasi Bencana bagi kawasan rawan bencana.	X	X	X	X	X	X	X	X
			b. Pengembangan kinerja kelembagaan instansi terkait penanggulangan bencana.	X	X	X	X	X	X	X	X
			c. Kerjasama dengan wilayah kabupaten tetangga terkait tanggap bencana.	X	X	X	X	X	X	X	X
	F	**Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya**	Perlindungan terhadap Cagar Budaya berupa desa adat di Kecamatan Bajawa, Jerebuu, Golewa, Aimere dan Inerie.	X	X	X	X	X	X	X	X
	G	**Pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove**	Perlindungan terhadap hutan bakau di Kecamatan Riung, Aimere, Inerie dan Golewa Selatan.	X	X	X	X	X	X	X	X
II		**PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA**									
	A	**Pengembangan Hutan Produksi**	Peningkatan produktivitas Hutan Produksi di Kecamatan Bajawa, Inerie, Jerebuu, Golewa Selatan, Golewa Barat, Golewa, Aimere, Bajawa Utara, Wolomeze, dan Riung Barat.	X	X	X	X	X	X	X	X
			Reboisasi Hutan.Produksi di Kecamatan Bajawa, Inerie, Jerebuu, Golewa Selatan, Golewa Barat, Golewa, Aimere, Bajawa Utara, Wolomeze, dan Riung Barat.	X	X	X	X	X	X	X	X

NO		PROGRAM UTAMA	KEGIATAN DAN LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							
				PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
			Pengendalian pemanfaatan kawasan hutan di Kecamatan Bajawa, Inerie, Jerebuu, Golewa Selatan, Golewa Barat, Golewa, Aimere, Bajawa Utara, Wolomeze, dan Riung Barat.	X	X	X	X	X	X	X	X
	B	**Pengembangan Hutan Rakyat**	a. Pengembangan lahan kurang produktif menjadi hutan rakyat								
			b. Pengembangan hutan rakyat yang sudah ada dengan tanaman bernilai ekonomi tinggi								
	C	**Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian**	a. Pengembangan budidaya Tanaman Pangan di lahan sawah di seluruh wilayah Kabupaten .	X	X	X	X	X	X	X	X
			b. Pencetakan sawah baru	X	X	X	X	X	X	X	X
			c. Pengembangan hortikultura pada lahan pertanian dan pekarangan di seluruh Wilayah Kabupaten.	X	X	X	X	X	X	X	X
			d. Pengembangan perkebunan berdasar kesesuaian lahan untuk komoditas di seluruh wilayah Kabupaten Ngada	X	X	X	X	X	X	X	X
			e. Pengembangan peternakan dengan mendayagunakan bibit unggul.di seluruh wilayah Kabupaten Ngada, terutama di Riung barat.	X	X	X	X	X	X	X	X
			f. Pengembangan pertanian unggulan di KPPN Soa	X	X	X	X	X	X	X	X
		.	g. Pengembangan perkebunan kopi robusta di Kecamatan Golewa, Goewa Barat, Golewa Selatan, Soa, Jerebuu, dan	X	X	X	X	X	X	X	X

NO		PROGRAM UTAMA	KEGIATAN DAN LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							
				PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
			Bajawa								
	D	**Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan**	a. Pengembangan sarana prasarana penangkapan ikan di Kecamatan Riung, Aimere, Inerie, dan Golewa Selatan.	X	X	X	X	X	X	X	X
			b. Pengembangan dermaga ikan di Kecamatan Aimere, Inerie, Golewa Selatan, dan Riung.	X	X	X	X	X	X	X	X
			c. Pengembangan kawasan pengolahan ikan di Kecamatan Riung, Aimere, Inerie, dan Golewa Selatan	X	X	X	X	X	X	X	X
	E	**Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan**	a. Program pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat galian C yang berpotensi merusak lingkungan.	X	X	X	X	X	X	X	X
			b. Penegakan aturan wajib reklamasi lahan paska kegiatan pertambangan	X	X	X	X	X	X	X	X
			c. Pengendalian pemanfaatan air tanah	X	X	X	X	X	X	X	X
	F	**Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri**	a. Pengintegrasian kegiatan industri kerajinan khas berskala rumah tangga dengan aktivitas pariwisata.di seluruh wilayah Kabupaten Ngada	X	X	X	X	X	X	X	X
			b. Pengembangan klaster industri pengolahan hasil pertanian.	X	X	X	X	X	X	X	X
			c. Pengembangan kawasan industry						X	X	X
	G	**Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata**	a. Penyediaan dan pemeliharaan sarana-prasarana pendukung wisata.sesuai	X	X	X	X	X	X	X	X

NO		PROGRAM UTAMA	KEGIATAN DAN LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							
				PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
			arahan rencana induk pengembangan pariwisata daerah								
			b. Pengembangan atraksi wisata di daya tarik wisata yang ada di seluruh wilayah Kab. Ngada	X	X	X	X	X	X	X	X
			c. Pengembangan sistem informasi kawasan wisata	X	X	X	X	X	X	X	X
			d. Pengembangan paket wisata	X	X	X	X	X	X	X	X
	H	**Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman**	a. Pengembangan pemukiman perkotaan di PKW, PPK dan PPL								
			b. Pengembangan permukiman perdesaan pada wilayah yang bukan merupakan wilayah pusat perkotaan	X	X	X	X	X	X	X	X
	I	**Kawasan Pertahanan Keamanan**	a. Pembatasan kegiatan budidaya pada zona pertahanan – keamanan dan sekitarnya yang ada di wilayah Kab. Ngada	X	X	X	X	X	X	X	X

Sumber: RTRW Kabupaten Ngada Tahun 2011-2031

4.3.4. Isu strategis Global

Isu stategisinternasional lain yang mewarnai dunia lainnya adalah terkait perekonomian global yang ditandai hal - hal sebagai berikut :

4.3.4.1. Pergeseran struktur ekonomi global.

Beberapa pergeseran struktural di perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir terus menguat pada 2019. Pergeseran dipicu empat hal yang saling terkait, yakni kebijakan banyak negara yang lebih berorientasi domestik (*inward looking orientation*), volatilitas arus modal

dunia yang meningkat, digitalisasi ekonomi yang naik pesat dan perilaku agen ekonomi yang berubah sebagai respons atas perkembangan digital tersebut. Perubahan digitalisasi ekonomi berimplikasi pada berubahnya efektivitas kebijakan yang sebelumnya pernah ditempuh.

Pergeseran dalam perekonomian global tersebut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dunia 2019 yang belum kuat. Pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 2,9% serta diikuti menurunnya pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas sejalan dengan menguatnya kebijakan yang berorientasi domestik.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat berdampak kepada kinerja ekspor Indonesia. Dengan karakter sebagai negara dengan perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat berdampak pada ekspor 2019 yang menurun. Namun demikian, permintaan domestik yang tetap kuat dapat menopang perekonomian Indonesia tetap baik, sehingga mampu mencatat pertumbuhan 5,02% pada 2019. Permintaan domestik yang kuat antara lain didorong oleh bauran kebijakan akomodatif Bank Indonesia dan stimulus kebijakan fiskal, serta dampak positif pelaksanaan Pemilihan Umum sampai dengan triwulan III 2019. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik berkontribusi pada aliran masuk modal asing yang meningkat pada 2019 dan menopang surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Kondisi ini kemudian berkontribusi pada nilai tukar yang menguat dan inflasi yang tetap berada dalam kisaran target 3,5+1%. Stabilitas sistem keuangan juga tetap terkendali, meskipun belum kuatnya pertumbuhan kredit perbankan yang dipengaruhi oleh sisi permintaan dan penawaran menjadi perhatian.

4.3.4.2. Krisis Ekonomi Global Akibat Pandemi Covid 19

COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) yang mulai merebak di Tiongkok pada Januari 2020 menahan prospek perbaikan ekonomi pada 2020. COVID-19 menurunkan permintaan agregat serta mengganggu proses produksi dan penawaran agregat yang kemudian menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia pada 2020. Pertumbuhan ekonomi dunia dan

Indonesia diprakirakan akan kembali pada lintasan meningkat pasca berakhirnya dampak tekanan dari penyebaran COVID-19.

Penyebaran COVID-19 yang meluas berisiko menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia menjadi lebih rendah dari pertumbuhan 2019 melalui beberapa jalur. Dampak pandemik COVID-19 menghambat aktivitas ekonomi global tersebut terutama terjadi melalui beberapa sektor, yakni jalur pariwisata, perdagangan dan investasi. Perlambatan aktivitas ekonomi juga disebabkan oleh strategi penanganan COVID-19 di berbagai negara yang terdampak berupa penutupan akses beberapa kota atau bahkan seluruh negara (lockdown).

4.3.5. Isu Strategis Nasional

4.3.5.1. Perlambatan Ekonomi Nasional akibat Pandemi Covid 19

Penyebaran COVID-19 menimbulkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi global yang lebih besar dari prakiraan sebelumnya. Pembatasan kunjungan pekerja atau wisatawan yang berasal dari negara terdampak, mengakibatkan penurunan kinerja pariwisata secara global. Aktivitas ekonomi yang terbatas akibat COVID-19, terutama pada negara mitra dagang, juga menghambat permintaan atas produk domestik dan menurunkan kinerja ekspor. Pembatasan kunjungan pekerja yang berasal dari negara terdampak dapat menurunkan realisasi investasi akibat terhentinya pengembangan industri baru yang membutuhkan tenaga kerja asing. Perkembangan yang kurang menguntungkan ini pada akhirnya akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia melalui permintaan, penawaran, dan juga keyakinan pelaku ekonomi. Dengan dinamika yang berubah cepat ini, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi dunia 2020 dapat menjadi lebih rendah lagi menjadi 2,5% disertai dengan risiko ke bawah yang tetap besar.

Merebakknya Covid 19 berdampak pada menurunkan kinerja pariwisata dan potensi tertahannya Penanaman Modal Asing (PMA) dari Tiongkok. Dari sektor pariwisata, penurunan kinerja pariwisata akan menurunkan penerimaan devisa akibat berkurangnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dari

Tiongkok yang tercatat sebagai pernyumbang devisa pariwisata Indonesia tertinggi, berada di atas Australia, Singapura, Malaysia.

4.3.5.2. Ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang Menjadi Modal Utama dalam Pembangunan Makin Berkurang

Berkurangnya SDA karena adanya peningkatan pemanfaatan SDA sebagai sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, sekaligus juga menjadi sumber devisa. Terkait sumber daya energi, salah satu tantangan yang dihadapi adalah menipisnya cadangan minyak dan gas. Penemuan cadangan minyak dan gas bumi baru belum signifikan. Pada lima tahun terakhir, *Reserve Replacement Ratio* (RRR) minyak dan gas bumi rata-rata hanya sebesar 70,4 persen. Di sisi lain, pemanfaatan sumber energi terbarukan dan efisiensi dalam penggunaan energi perlu ditingkatkan. Keberlanjutan sumber daya kemaritiman dan kelautan, termasuk di dalamnya perikanan, juga mengalami beberapa tantangan antara lain perlunya pemanfaatan perikanan tangkap dengan memperhatikan nilai tangkapan maksimum lestari (*maximum sustainable yield/* MSY), dan pemanfaatan lahan perikanan budidaya secara berkelanjutan. Keberlanjutan pembangunan juga menghadapi tantangan degradasi dan deplesi SDA lainnya seperti hutan, sumber daya air dan keanekaragaman hayati. Walaupun laju deforestasi telah berkurang secara signifikan dibandingkan sebelum tahun 2000, tutupan hutan diperkirakan tetap menurun dari 50 persen dari luas lahan total Indonesia (188 juta ha) pada tahun 2017 menjadi sekitar 38 persen pada tahun 2045. Hal ini akan berdampak pada kelangkaan air baku khususnya pada pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan sangat rendah seperti Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Risiko kelangkaan air baku juga meningkat di wilayah lainnya sebagai dampak perubahan iklim. Luas wilayah kritis air diperkirakan akan meningkat dari 6 persen pada tahun 2000 menjadi 9,6 persen pada tahun 2045.

4.3.5.3. Revolusi Industri dan Ekonomi Digital.

Pada tahun 2018, Pemerintah telah meluncurkan gerakan *Making Indonesia 4.0*. Gerakan ini sejalan dengan era digitalisasi yang memfasilitasi pengintegrasian informasi untuk tujuan peningkatan produktivitas, efisiensi,

dan kualitas layanan. Pemanfaatan ekonomi digital ke depan memiliki potensi yang besar untuk tujuan peningkatan nilai tambah ekonomi. Era digitalisasi membawa dampak pada perubahan pola bekerja dan berpotensi menghilangkan pekerjaan yang bersifat sederhana dan repetitif. Di sisi lain, pola perdagangan dan penyediaan layanan berbasis daring serta penggunaan pembayaran nontunai menjadikan banyak model usaha konvensional tidak lagi relevan. Kondisi ini mengharuskan adanya kebijakan dan pola adaptasi yang menyeluruh dalam pemanfaatan transformasi digital bagi keberlanjutan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan.

4.3.6. Isu Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur

4.3.6.1. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan yang Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, perkembangan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan memungkinkan terjadinya pemerataan pembangunan.

Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada. Sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Pembangunan ekonomi yang tidak memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan permasalahan pembangunan dikemudian hari. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekosistem pendukung kehidupannya.

4.3.6.2. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan

Pertanian menghadapi masalah di mana kontribusi pangsa sektor pertanian terhadap perekonomian terus mengalami penurunan dibarengi dengan penurunan tenaga kerja di sektor ini dengan persoalan produksi, distribusi dan fluktuasiharga komoditi pertanian. Walaupun sektor pertanian

sebagai penyumbang utama PDRB terbesar, namun fakta menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap PDRB NTT terus menurun dari angka 40% pada tahun 2000-an menjadi 29,65% pada tahun 2017.

Berdasarkan pengelolaan dan capaian sampai saat ini, maka potensi ekonomi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan pertanian baik lahan kering maupun lahan basah terkendala oleh terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan teknologi baik di sektor hulu maupun hilir, rendahnya indeks pertanaman (masa tanam yang pendek), rendahnya akses petani/nelayan ke sumber-sumber pembiayaan. Tenaga kerja produktif sektor pertanian diperkirakan akan semakin berkurang di masa yang akan datang karena dianggap kurang memberikan nilai tambah yang cukup atau kurang menjanjikan. Tingkat pengetahuan dan keterampilan teknis penyuluh dan petani, peternak dan nelayan juga masih sangat perlu ditingkatkan bukan hanya untuk memproduksi komoditi dalam jumlah dan kualitas yang lebih baik tetapi juga lebih bernilai komersial. Kapasitas SDM di bidang pertanian juga masih rendah dan terus menurun jumlahnya.

Pembangunan sektor pertanian menghadapi masalah belum tersedianya industri perbenihan/pembibitan untuk mempercepat kapasitas produksi. Produktivitas pertanian dan pendapatan petani akan dapat ditingkatkan, jika ada perbaikan penguatan kelembagaan pengelola dan pendukung pertanian. Pergeseran dan perbaikan sistem produksi pertanian dari subsistem dan intermedier/semi komersial atau komersial yang akan meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari sektor pertanian. Keamanan dan cadangan pangan melalui penanganan distribusi, keamanan, akses, dan cadangan yang belum optimal. Perlu ada penataan dan perbaikan rantai tata niaga produk sektor pertaniandengan menyederhanakan atau memperpendek rantai, memperkuat kelembagaan dan melalui kelompok posisi tawarnya. Kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan dalam bidang kewirausahaan perlu ditingkatkan.

4.3.6.3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial

Jumlah penduduk miskin di NTT adalah sebesar 1.134.74 ribu orang atau sebesar 21,38% yang menurun dibandingkan dengan dengan tahun 2015 yaitu 1.159.84 ribu orang atau sekitar 22,62%. Data ini menunjukkan penurunan yang masih sangat kecil dan lambat, yakni sebesar 1,24%. Persoalan kemiskinan yang dihadapi juga terkait dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Sehubungan dengan itu, penurunan jumlah penduduk miskin juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta kemampuan memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi. Sehubungan dengan kompleksnya masalah kemiskinan, maka upaya penurunan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, swasta, kelembagaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

4.3.6.4. Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

NTT adalah Provinsi dengan sebelas jenis bencana, baik bencana yang dipicu oleh kejadian alam, non-alam maupun bencana sosial. Selama 60 tahun terakhir, NTT sudah mengalami kurang lebih 651 kejadian bencana dengan korban jiwa lebih dari 6000 (DIBI 2017). Sebanyak 75% dari bencana-bencana tersebut adalah bencana hidrometeorologis, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin topan, gelombang ekstrim, dan sebagainya, yang dipicu oleh iklim. Dengan demikian, perubahan iklim akan mempengaruhi kekerapan dan keparahan bencana. Walaupun tidak menyebabkan korban jiwa sebanyak bencana geologis (gempa bumi, tsunami, letusan gunung api), tetapi bencana hidrometeorologis merusak aset-aset penghidupan masyarakat dan terjadi secara musiman. Jenis bencana akan memperburuk kemiskinan bila tidak diatasi dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka pembangunan yang dilaksanakan harus mengeliminasi dampak bencana akibat perubahan iklim.

4.3.6.5. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT

Peningkatan kualitas hidup masyarakat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pembangunan manusia di NTT terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT. Pada tahun 2017, IPM NTT telah mencapai 63,73. Angka ini meningkat sebesar 0,60 poin dibandingkan dengan IPM NTT pada tahun 2016 sebesar 63,13. Komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 66,07 tahun, meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,07 tahun, meningkat 0,10 tahun dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,15 tahun, meningkat 0,13 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp. 7,35 juta rupiah dan pada tahun 2017, meningkat Rp. 228 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Namun peningkatan IPM NTT masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional sebesar 70,81%.

4.3.6.6. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi,bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar

dan kode etik aparatur negara. Upaya mewujudkan reformasi dilakukan melalui berbagai penataan kelembagaan dan pembenahan sistemnya.

Penataan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal penting yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi, diantaranya: peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi, peniadaan tumpang-tindih kewenangan dan mempermudah koordinasi dalam struktur baru. Manfaat dari penataan kelembagaan yang right-sizing adalah tanggapan terhadap permasalahan terkait pekerjaan menjadi lebih cepat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan motivasi kerja dan perbaikan atau peningkatan hubungan kerja yang harmonis di antara pegawai, baik secara vertikal maupun horizontal.Akuntabilitas juga menjadi lebih baik terlebih karena kompetensi pegawai tepat sasaran dan menjamin kualitas kinerja yang sesuai harapan. Right-sizing organisasi bukan semata terkait pengurangan struktur tetapi juga melakukan revitalisasi dan penajaman tugas dan fungsi. Tinjauan atas analisis jabatan diperlukan agar pola penentuan dan penangkatan pejabat yang kurang tepat sasaran seperti yang selama ini telah dilakukan bisa diperbaiki. Pola perekrutan yang tidak memperhatikan relevansi keahlian, latar belakang pendidikan, serta karakter kerja calon pejabat dengan jabatan yang diemban harus segera dihentikan. Dampak buruk dari “kebiasaan lama” ini adalah peran dan kinerja pejabat atau pegawai pemerintahan menjadi tidak maksimal, di saat yang sama pengeluaran organisasi terkait para pejabat tersebut menjadi tidak efektif. Tinjauan analisis jabatan dan beban kerja diperlukan agar kinerja individu dan organisasi dapat dioptimalkan. Restrukturisasi menjadi langkah berikut yang wajib dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis jabatan dan beban kerja.

4.3.7. Kebijakan Perencanaan Daerah Sekitar

Dalam merumuskan isu strategis Pemerintah Kabupaten Ngada, selain melihat kebijakan pembangunan secara nasional, regional dan internasional, namun menjadi hal yang penting adalah menelaah kebijakan pembangunan daerah lainnya terutama yang berkaitan dengan isu strategis di Kabupaten tetangga sepertiKabupaten Nagekeo. Untuk melihat isu strategis kebijakan pembangunan daerah lain, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 12. Telaah Rencana Pembangunan Daerah Sekitar

Kabupaten Nagekeo	Keterkaitan Pembangunan Ngada
Pembangunan pendidikan yang berkualitas	Isu Strategis Peningkatan Kualitas Pendidikan ini sejalan dengan salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngada disektor pendidikan untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi anak usia sekolah, dan meningkatkan tata kelola pendidikan yang baik dan berkualitas.
Peningkatan pelayanan kesehatan	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngada disektor kesehatan pada lima tahun yang akan datang adalah meningkatkan rasio ketersediaan tenaga kesehatan terhadap masyarakat, menekan sekecil mungkin terjadinya kasus-kasus kematian bayi maupun ibu, menekan kasus-kasus kejadian Gizi Buruk Balita, mengoptimalisasi upaya promotif dan preventif untuk menekan kasus-kasus Penyakit Tidak Menular terutama penyakit degenratif, dan meningkatkan cakupan pelayanan KB kepada Pasangan Usia Subur.
Pengurangan Masyarakat Miskin dan Pengangguran	Salah satu kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Ngada yakni untuk mengurangi kemiskinan, kemiskinan di Kabupaten Ngada terus mengalami penurunan sebagai akibat dari implementasi berbagai kebijakan.
Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang berdaya Saing	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngada disektor Pertanian dan Perikanan kelautan adalah untuk memperkuat ketersediaan pangan bagi masyarakat
Pengembangan pariwisata	Disektor Pariwisata, pemerintah Kabupaten Ngada memfokuskan pada upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisata melalui penataan daya tarik wisata dan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya.
Pengurangan Risiko Bencana, Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dalam Hal Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kabupaten Ngada berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana serta

Kabupaten Nagekeo	Keterkaitan Pembangunan Ngada
	menyiapkan sumber daya aparatur dalam penanggulangan dan mitigasi bencana.
Tata kelola kebersihan dan keindahan fasilitas publik	Penataan Kota Bajawa menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Ngada lima tahun yang akan datang, walaupun dengan spirit membangun Ngada dari Desa, namun penataan kota menjadi prioritas untuk dilaksanakan.
Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah	Pemerintah Kabupaten Ngada berupaya untuk menghilangkan disparitas antar wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana jalan yang menghubungkan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya baik intra kabupaten maupun antar kabupaten. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kabupaten Ngada bertekad untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparaturnya melalui pendidikan formal maupun diklat-diklat teknis dan fungsional serta menata penyelenggaraan birokrasinya agar lebih efisien dan efektif, serta meningkatkan kinerja aparatur.

4.3.8. Isu Strategis Daerah Kabupaten Ngada

4.3.8.1. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor maupunkoordinasi lintas tingkatan pemerintahan dan koordinasi lintas sumber dana.Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, peran serta aktif masyarakat menjadi hal yang mutlak, tanpa dukungan peran serta aktif masyarakat untuk menolong dirinya sendiri, maka apapun upaya pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, tidak akan efektif. Pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan usahanya.Iklim usaha yang kondusif akan mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya

kegiatan-kegiatan ekonomi yang berorientasi pasar (berdaya saing) dengan tingkat pertumbuhan yang memadai, namun yang juga peka terhadap pemecahan masalah-masalah sosial dalam kerangka memadukan prinsip-prinsip pasar bebas dan persaingan yang efisien,serta jaminan kehidupan bermartabat bagi semua warga masyarakat termasuk kelompok masyarakat dengan kemampuan yang terbatas dan terpinggirkan; tersedianya kesempatan yang merata dan adil didalam mengakses sumberdaya demi peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga manfaat pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mengurangi ketimpangan antar wilayah, antar golongan dan antar gender.

4.3.8.2. Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Berbasis Desa

Masing-masing desa dalam prespektif ekonomi sebenarnya memiliki potensi sangat besar mengingat sumberdaya (sumberdaya alam dan sumberdaya manusia) dan kegiatan ekonomi daerah banyak berlokasi di desa. Bilamana potensi-potensi ekonomi tersebut dapat diberdayakan secara baik melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi, dan BUMDes, maka desa akan dapat menciptakan pendapatan desa sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan desa dan bukan lagi hanya sebagai sumber terjadinya arus urbanisasi ke kota yang seringkali menciptakan masalah besar di kota, baik dari aspek permukiman, lapangan kerja, keamanan ataupun penambahan kemiskinan kota. Bila ekonomi desa maju maka pemerataan kegiatan ekonomi akan menjadi lebih baik dan tidak tersentralisasi di kota saja. Apabila tercipta kemandirian ekonomi desa maka desa justru akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang produktif dan akan dapat menciptakan suplai dari usaha mikro, kecil dan menengah yang pada akhirnya dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Lembaga keuangan juga akan dapat tumbuh dan berkembang secara baik seiring tumbuhnya ekonomi desa. Koperasi ataupun lembaga keuangan lainnya akan menjadi kelengkapan kegiatan ekonomi produktif di desa tersebut.

Ngada memiliki sektor unggulan yang melimpah, terutama berupa pertanian, peternakan, kelautan-perikanan, dan pariwisata. Pengembangan

sektor unggulan daerah secara optimal dapat mendukung pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, memajukan kebudayaan dan melestarikan sumberdaya alam. Kabupaten Ngada di sektor pariwisata memiliki kekayaan sumber daya yang unik dan beragam antara lain, sumber mata air panas alam, taman wisata laut, perkampungan tradisional, situs kepurbakalaan, reptil purba Varanus Riungensis disamping kawasan pertanian dan hutan yang potensial untuk pengembangan agrowisata dan kebun raya. Pengembangan sektor pariwisata secara terintegrasi antara kebijakan Nasional, Provinsi dan regional yang dipadukan dengan kolaborasi kemitraan masyarakat desa dan kelembagaan eksternal dapat mendorong kemajuan sektor pariwisata. Selain itu penyediaan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat sehingga menciptakan kondisi yang kondusif terhadap wisatawan, menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam pembangunan sektor pariwisata.

Pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Ngada sangat terkait dengan pengembangan kawasan super prioritas Labuan Bajo dan Flores secara umum. Beberapa destinasi wisata yang menjadi perhatian utama untuk dikembangkan adalah Taman laut 17 Pulau Riung, Mata air panas Mengeruda dan Wolobobo. Selain itu Kabupaten Ngada salah satunya sebagai Kabupaten penyangga untuk pemenuhan kebutuhan hortikuktura dan daging bagi konsumsi wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung di wilayah KSPN Labuan Bajo dan juga sebagai alternatif tujuan wisata selanjutnya setelah Pulau Komodo.

4.3.8.3. Pengembangan Sumber daya Manusia

Pengembagan Sumber daya manusia diwujudkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas maka diperlukan penyelenggaraan sistem pendidikan yang bermutu dan berkarakter budaya. Partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi anak usia sekolah, wajib belajar 9 tahun dari tingkat SD sampai SMP dan pengembangan sekolah unggul. Hal ini tentunya didukung oleh peningkatan aksesibilitas menuju sarana pendidikan,peningkatan sarana pendidikan yang

representatif, pengembangan manajemen berbasis sekolah, penataan kurikulum pendidikan, dan peningkatan kualitas guru. Pendidikan merupakan kebutuhan pelayanan dasar dimana fasilitas, sarana dan prasarananya harus mampu disediakan oleh pemerintah. Selain itu partisipasi masyarakat, khususnya orang tua murid, sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kualitas anak didik. Permasalahan pendidikan tidak semata pada ketersediaan sarana dan prasarananya saja tetapi lebih dari pada itu adalah kualitas sarana dan prasarana dan ketersediaan tenaga pendidikyang berkualitas serta tata kelola pendidikan yang baik. Penyediaan dan pemerataan sarana prasarana Pendidikan pada hampir semua wilayah dan peningkatan kualitas manajemen diharapkan juga dapat menekan angka *drop-out* siswa usia sekolah.

Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk disegala usia merupakan tujuan yang ingin dicapai bersama. Untuk mewujudkan tujuan itu diperlukan partisipasi aktif dari semua pihak yaitu Pemerintah, Swasta (Organisasi non-pemerintah) dan Masyarakat. Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana kesehatan serta program-program inovatif dibidang kesehatan, pihak organisasi non-pemerintahan diperlukan untuk bersama-sama pemerintah memotivasi masyarakat agar berkontribusi dalam pembangunan kesehatan.Keaktifan masyarakat perlu ditingkatkan dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan, pemeriksaan kesehatan secara berkala, aktifitas fisik secara teratur, kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kehamilan, asupan gizi, dan deteksi tumbuh kembang anak, serta pemberantasan penyakit menular, dan ikut serta program pembangunan kesehatan yang ada. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa menjadi lebih representatif; peningkatan sarana prasarana kesehatan pada puskesmas dan jaringannya serta peningkatan jumlah dan kualitas tenaga dokter, doker spesialis, tenaga medis dan paramedis. Peningkatan kualitas Tenaga kesehatan baik melalui jenjang pendidikan formal maupun melalui diklat-diklat teknis dan fungsional, merupakan hal yang paling mendasar dalam upaya menyediakan tenaga kesehatan yang berkualitas.

4.3.8.4. Ketersediaan Pangan, Ketersediaan Air dan Energi Sumber Daya Mineral.

Kemandirian dan ketahanan pangan perlu dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianyainstrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga. Kemandirian dan ketahanan pangan juga harus didukung dengan kebijakan pengendalian penggunaan lahan. Untuk mendukung sektor pertanian, pengelolaan jaringan irigasi perlu ditingkatkan dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu. Ketersediaan air merupakan kondisi yang mutlak dibutuhkan oleh masyarakat karena merupakan kebutuhan dasar *(basic need).* Pemerintah bertekad untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat melalui manajemen pengelolaan air dari hulu sampai kehilir. Pola kemitraan menjadi hal yang harus dilakukan dalam konteks penyediaan air secara menyeluruh bagi masyarakat.Upaya mempertahankan kondisi kualitas air serta pemulihan air yang tercemar diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi. Demikian juga, akses terhadap air minum juga masih merupakan masalah penting di Kabupaten Ngada.

4.3.8.5. Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabelmerupakan prasyarat mutlak dalam Era Otonomi Daerah. Tata kelola Pemerintahan yang baik, bukan semata dalam hal memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah persoalan etika, sikap dan perilaku. Dalam *good governance*, tidak saja unsur pemerintah, tetapi juga sektor usaha/swasta dan masyarakat semestinya dapat berjalan secara efektif dan efisien melalui koordinasi yang sinergi dalam manajemen sektor publik, sektor swasta dan masyarakat.Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan lapangan kerja dan pendapatan, sementara masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah perlu dioptimalkan berdasarkan tingkat kompetensi, kemampuan teknis dan mekanisme birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Penguatan system pelayanan birokrasi yang cepat dan tepat dengan

memanfaatkan teknologi yang adaptif bisa mendorong menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

4.3.8.6. Penanggulangan bencana dan Pelestarian lingkungan

Tujuan pembangunan di samping membentuk manusia seutuhnya juga mengatasi dan menjaga agar sumber daya alam dan lingkungan tetap lestari, sehingga bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pembangunan harus tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemanfaatan sumber daya diarahkan menuju keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaannya. Pemanfaatan sumber daya yang seimbang, selain mendukung pembangunan berkelanjutan, juga mampu mencegah terjadinya bencana baik alam maupun non alam. Oleh karena itu upaya pelestarian lingkungan tetap diikuti dengan upaya mitigasi bencana, sehingga setiap hasil pembangunan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

4.3.9. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan/Isu Utama

Pasal 16 Permendagri 07 Tahun 2018 menyatakan bahwa laporan KLHS RPJMD yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen RPJMD digunakan untuk: a. gambaran umum kondisi daerah; b. permasalahan dan isu strategis daerah; c. tujuan; dan d. sasaran strategis. Pasal 18 Permendagri 07 Tahun 2018 menyatakan bahwa Permasalahan dan isu Strategis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan. Karena di dalam Permendagri 07 Tahun 2018 tidak dijelaskan tentang bagaimana melakukan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, maka identifikasi isu pembangunan berkelanjutan mengacu pada pasal 7 s/d 9 PP 46 tahun 2016.

Isu utama didapatkan dengan mengumpulkan isu pembangunan berkelanjutan dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan, daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan terdiri dari 168 isu pembangunan berkelanjutan.Daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan tersebut kemudian dilakukan pemusatan isu

dengan mencari kesamaan tema dari masing – masing isu. Tema yang sama kemudian disatukan menjadi satu kelompok isu.

Tabel 4. 13. Daftar Panjang Isu Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Ngada

No	Isu	Tema	Kategori
1	Alih fungsi lahan dan kebakaran	Alih Fungsi Lahan	A
2	Alih fungsi lahan atau lahan pertanian berkelanjutan	Alih Fungsi Lahan	A
3	Tingginya tingkat pengangguran	Kemiskinan dan Pengangguran	B
4	Rendahnya potensi lapangan kerja bagi tenaga kerja potensial	Kemiskinan dan Pengangguran	B
5	Kemiskinan yang diperparah lagi dengan covid 19	Kemiskinan dan Pengangguran	B
6	Lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran	Kemiskinan dan Pengangguran	B
7	Kelangkaan Balai pelatihan tenaga kerja untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan dan mengatasi pengangguran	Kemiskinan dan Pengangguran	B
8	Tuntutan budaya yang menyebabkan keadaan ekonomi rumah tangga menjadi miskin	Kemiskinan dan Pengangguran	B
9	Pengangguran	Kemiskinan dan Pengangguran	B
10	Akibat dampak covid-19 banyak pekerja sektor jasa yang di PHK dan kehilangan lapangan kerja	Kemiskinan dan Pengangguran	B
11	Angka pengangguran di ngada masih cukup tinggi	Kemiskinan dan Pengangguran	B
12	Angka pengangguran di Kabupaten Ngada sangat tinggi	Kemiskinan dan Pengangguran	B
13	Banyak tenaga kerja mencari kerja di luar negeri dan meninggalkan keluarga bertahun-tahun dan kemudian menikah di perantauan lagi sehingga anak atau istri miskin tidak ada yang menafkahi	Kemiskinan dan Pengangguran	B
14	Kemiskinan dan permasalahan sumber daya manusia	Kemiskinan dan Pengangguran	B
15	Kekeringan dan cuaca ekstrem	Kerawanan Bencana	C
16	Dukungan biaya untuk meminimalisir abrasi golewa Selatan dan Kecamatan Aimere	Kerawanan Bencana	C
17	Perlindungan penduduk rakyat	Kerawanan Bencana	C

No	Isu	Tema	Kategori
	miskin dari bencana		
18	Bencana alam	Kerawanan Bencana	C
19	Terjadinya ketimpangan sosial di tingkat masyarakat penerima bantuan disebabkan disebabkan data penerima Bansos menggunakan data statistik tahun 2015 karena itu menjadi perhatian untuk melakukan updating data sehingga memperoleh data terbaru	Ketimpangan Sosial	D
20	Legalitas kepemilikan lahan komunal dan penetapan kawasan hutan lindung tanah ulayat perlu diselesaikan	Ketimpangan Sosial	D
21	Perebutan lahan antar warga atau antarsuku alias konflik	Ketimpangan Sosial	D
22	Adanya persaingan ekonomi kerakyatan versus investasi besar tidak pintar	Ketimpangan Sosial	D
23	Perjudian di masyarakat	Ketimpangan Sosial	D
24	Minimnya skill dan teknologi tepat guna	Kualitas SDM Rendah	E
25	Penggunaannya pestisida yang berlebihan pada sektor pertanian	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	F
26	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	F
27	Kerusakan lingkungan hidup banyak terjadi karena ulah dari dunia usaha	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	F
28	Air bersih sumbernya yang makin berkurang debitnya	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	F
29	Ada kecenderungan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi yang yang mengakibatkan kerusakan kelestarian lingkungan 5 tahun ke depan akan meningkat	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	F
30	Kebakaran hutan dan lahan kering yang menyebabkan kesuburan tanah terganggu dan sumber daya air	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	F
31	Pencemaran dan kerusakan lingkungan	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	F

No	Isu	Tema	Kategori
32	Terjadi kerusakan hutan akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang membakar hutan perburuan adat yang tidak terpimpin atau terukur atau liar menebang pohon secara liar dll	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	F
33	Masalah perubahan iklim	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	F
34	Pengelolaan persampahan dari skala rumah tangga dengan pengolahan yang tidak tepat	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	F
35	Dukungan biaya dalam upayanya peraturan RT khusus dalam usaha penataan taman kota serta, upaya pengendalian sampah dengan menambah sarana dan prasarana	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	F
36	Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	F
37	Kurangnya sarana prasarana persampahan	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	F
38	Permasalahan penanggulangan sampah dan limbah B3	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	F
39	Masalah persampahan	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	F
40	Rendahnya PAD Daerah	Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	G
41	Rendahnya produktivitas pertanian	Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	G
42	Pemetaan kawasan (kawasan hutan Pertanian atau perkebunan) agar petani lebih fokus dalam mengolah lahan agar terjadi peningkatan pendapatan ekonomi keluarga	Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	G
43	Tingginya harga harga bahan kebutuhan pokok	Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	G
44	Rendahnya PAD	Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	G
45	Ketergantungan dengan pemerintah pusat atau kemampuan Otonomi Daerah hanya plus minus 6%	Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	G
46	keterbatasan fiskal untuk pembangunan	Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	G
47	inovasi perangkat daerah dalam	Rendahnya Pertumbuhan	G

No	Isu	Tema	Kategori
	menggali PAD potensi dan penerapan teknologi masih kurang	Ekonomi Daerah	
48	UMKM harus dibantu oleh pemerintah	Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	G
49	Aktivitas pertanian belum optimal hanya sekali setahun	Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	G
50	Pendapatan ekonomi sektor riil atau jasa menurun karena dampak covid 19	Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	G
51	Diperlukan rumusan baru indikator sensus ekonomi untuk kabupaten kota	Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	G
52	Apakah kebiasaan masyarakat yang ada dalam hal kebiasaan adat istiadat kebiasaan keseharian berpengaruh besar terhadap peningkatan sektor pertanian khususnya tanaman perkebunan	Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	G
53	Pengembangan budidaya perkebunan untuk meningkatkan ekonomi petani	Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	G
54	Data pengguna air bersih untuk tiap kepala keluarga serta prediksi kebutuhan air di tahun yang akan datang mungkin perlu dimasukkan	Sarpras yang belum memadahi	H
55	Kekurangan air terutama pada musim kemarau	Sarpras yang belum memadahi	H
56	Masih kurangnya sarana prasarana sektor pendidikan dan Kesehatan	Sarpras yang belum memadahi	H
57	Akses situs teknologi informasi dan komunikasi terutama dalam menghadapi pandemic	Sarpras yang belum memadahi	H
58	Pembangunan infrastruktur pendukung peningkat ekonomi	Sarpras yang belum memadahi	H
59	Sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Ngada masih terbatas	Sarpras yang belum memadahi	H
60	Minimnya pendidikan tinggi berikut fasilitas-fasilitas nya	Sarpras yang belum memadahi	H
61	Sarana dan prasarana kesehatan yang belum lengkap termasuk tenaga kesehatan yang minim	Sarpras yang belum memadahi	H
62	Validasi data secara elektronik pada masyarakat miskin dan tenaga kerja	Sarpras yang belum memadahi	H

No	Isu	Tema	Kategori
63	Data sensus ekonomi dari BPS membingungkan karena kebutuhan data untuk prediksi waktu 10 tahun	Sarpras yang belum memadahi	H
64	Ketersediaan air baku	Sarpras yang belum memadahi	H
65	Selama ini yang muncul adalah debit air menurun tapi belum ada kajian mengenai isu tersebut berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Ngada	Sarpras yang belum memadahi	H

Sumber: Uji Publik-1, 2020

Isu hasil pengelompokan berdasarkan kesamaan tema adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 14. Hasil Pengelompokan Isu PB Kabupaten Ngada

No	Tema	Kategori
1	Alih Fungsi Lahan	A
2	Kemiskinan dan Pengangguran	B
3	Kerawanan Bencana	C
4	Ketimpangan Sosial	D
5	Kualitas SDM Rendah	E
6	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	F
7	Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	G
8	Sarpras yang belum memadahi	H

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS, 2020

Hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan kemudian dilakukan penilaian silang dengan 10 kriteria sesuai dengan muatan pasal 9 ayat (2) PP 46/2016 yang memuat daftar paling sedikit berkaitan dengan:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
2. Prakiraan dampak dan resiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
5. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;

7. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
9. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau
10. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Berdasarkan penilaian dan kesepakatan seluruh peserta Uji Publik – 1, disepakati 8 prioritas utama isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Ngada menurut urutan penilian tertinggi. Isu pembangunan berkelanjutan prioritas tersebut adalah:

1. Rawan bencana (longsor, banjir, kekeringan, dll)
2. Alih Fungsi lahan
3. Pencemaran dan Kerusakan lingkungan
4. Kualitas SDM masih rendah
5. Ketimpangan sosial
6. Kemiskinan dan Pengangguran
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai
8. Rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah

Hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan prioritastersebut kemudian dirumuskan berdasarkan: a). Karakteristik wilayah, b) tingkat pentingnya potensi dampak, c) kondisi DDDTLH untuk menentukan isu utama. Penilaian untuk menentukan isu utama dilakukan oleh tim penyusun KLHS. Penentuan isu utama ini didasarkan pada penentuan isu strategis berdasarkan pasal 9 ayat (2) PP 46/2016 yang dimodifikasi sesuai dengan Permendagri 07/2018.

Berdasarkan analisis serta pelaksanaan Uji Publik-1 disepakati Isu **alih fungsi lahan** digabungkan dengan isu **pencemaran dan kerusakan lingkungan**. Dari hasil kesepakatan Uji Publik-1 Isu utama/Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Ngada adalah:

1. Rawan bencana (longsor, banjir, kekeringan, dll)
2. Pencemaran dan Kerusakan lingkungan
3. Kualitas SDM masih rendah
4. Ketimpangan sosial
5. Kemiskinan dan Pengangguran
6. Sarana dan prasarana yang belum memadai
7. Rendahnya pertumbuhan ekonomi wilayah

Berdasarkan identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan tersebut, tim Penyusun KLHS RPJMD dan pemangku kepentingan merumuskan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas. Isu Pembangunan berkelanjutan prioritas ditentukan melalui diskusi kelompok yang diikuti oleh penyusun KLHS dan para pemangku kepentingan. Isu pembangunan berkelanjutan yang termuat dalam dokumen KLHS memiliki keterkaitan dengan isu strategis RPJMD, sebagai berikut:

Tabel 4. 15. Keterkaitan Isu KLHS dengan Isu RPJMD

Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis RPJMD
Kemiskinan dan pengangguran	Penanggulangan kemiskinan
Ketimpangan sosial Rendahnya pertumbuhan ekonomi wilayah	Ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan daerah berbasis desa
Kualitas SDM masih rendah	Pengembangan sumber daya manusia
Sarana dan prasarana yang belum memadai Rawan bencana (longsor, banjir, kekeringan)	Ketersediaan pangan, ketersediaan air dan energi sumber daya mineral
Rawan bencana (longsor, banjir, kekeringan)	Penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan
Pencemaran dan kerusakan lingkungan	Penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan
	Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab 5 memuat tentang kondisi makro pembangunan daerah yang akan dicapai dalam bentuk rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah, sedangkan misi merupakan berbagai upaya makro untuk mencapai visi. Dalam pencapaian visi dan menjalankan misi, kemudian dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan capaian pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran sebagai gambaran kondisi memiliki indikator kinerja yang bersifat *impact* yang menandakan capaian pembangunan yang berorientasi hasil.

5.1. Visi

Visi RPJMD memiliki peran penting sebagai penjabaran visi kepala daerah terpilih, memberikan gambaran tentang arah pembangunan daerah, dan menjadi dasar dalam perumusan prioritas pembangunan daerah. Rumusan visi pembangunan terkait erat dengan nilai yang tertanam kuat dan menjadi ekspresi budaya masyarakat Ngada, yaitu filosofi ***Tuka, Tuku, Teka***, melalui kebiasaan ***wesi peni***. Filosofi tersebut menggambarkan cara masyarakat Ngada untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Budaya masyarakat Ngada bukan hanya sebatas subsisten, namun juga budaya produktif yang memiliki kemampuan untuk mengolah dan mengelola komoditas. Komoditas tersebut kemudian dijual dan menjadi sumber penghidupan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Selain itu ada sebagain komoditas yang disimpan/ditabung untuk menjadi input dalam proses produksi lebih lanjut, maupun untuk kebutuhan konsumsi dan investasi dalam jangka panjang. Pola budaya ini tertuang dalam ungkapan ***Toka se alu, resi se alu.***

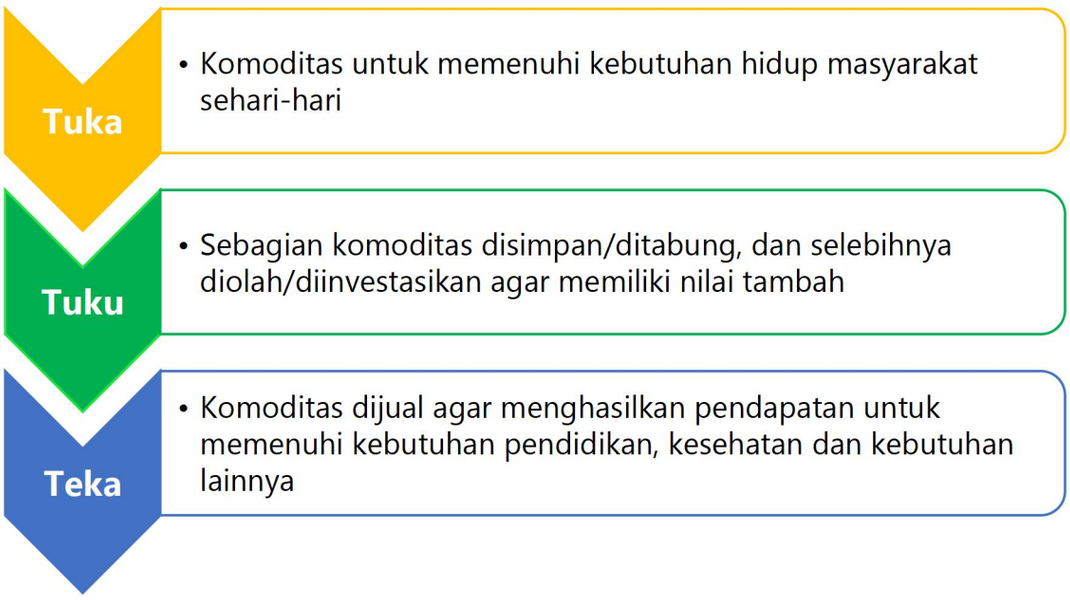

Gambar 5. 1. Filosofi Tuka, Tuku, Teka dalam Kehidupan Masyarakat Ngada

Sumber: Dokumen visi-misi Bupati-Wakil Bupati Ngada 2020

Rumusan Visi RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026 juga berpijak pada visi RPJPD Kabupaten Ngada 2006-2026. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk untuk menjaga sinkronisasi antara perencanaan jangka panjang dengan jangka menengah. Visi RPJPD Kabupaten Ngada 2005-2025, yaitu **"Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Ngada Berbasis Keunggulan dan Kemandirian"**. Periode RPJMD 2021-2026 merupakan periode terakhir RPJPD dengan tema pembangunan "Masyarakat Unggul dan Mandiri". Berpijak pada nilai budaya masyarakat Ngada dan upaya untuk meningkatkan sinkronisasi antar dokumen perencanaan serta menjalankan pembangunan berkelanjutan, maka dirumuskan visi RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026 sebagai berikut:

Visi:

"Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan"

Visi Kabupaten Ngada tersebut mengandung beberapa kata kunci yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Ngada pada akhir periode pembangunan jangka menengah 2021-2026. Kata kunci tersebut berupa kata makro yang disusun sesuai ketentuan peraturan yang

berlaku. Berikut adalah kata-kata kunci dalam visi RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026:

Tabel 5. 1. Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Ngada	Setiap orang yang lahir dan mendiami bumi Ngada. Masyarakat Ngada yang diharapkan berpartisipasi aktif membangun daerah melalui berbagai aktivitas dan saling berkolaborasi melalui ikatan sosial dan budaya yang erat.
	Unggul	Unggul sebagai representasi daya saing dibandingkan dengan daerah lain. **Unggul ekonomi masyarakatnya** ditandai dengan pertumbuhan ekonomi meningkat, tersedianya lapangan kerja dan bertambahnya penghasilan masyarakat. **Unggul sumber daya manusia** berupa masyarakat Ngada yang sehat, kuat, cerdas, terampil dan kreatif. **Unggul birokrasi** yang ditandai tata kelola profesional, cepat, melayani, cepat tanggap dan memberdayakan. **Unggul sarana dan prasarana** yang dapat digunakan sebagai penunjang masyarakat dalam bekerja, menghasilkan, mengolah, menabung, dan menjual berbagai komoditi.
	Mandiri	Masyarakat Ngada yang memiliki tanggung jawab untuk membangun dirinya, keluarga,

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		daerah dan bangsanya. Mandiri juga diartikan sebagai kemampuan daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhannya dengan mengoptimalkan berbagai potensi.
	Berbudaya	Pembangunan yang dilaksanakan akan membangun manusia Ngada yang berkarakter dan memiliki kepribadian bangsa sesuai dengan Pancasila, berakhlak mulia, dan memegang teguh Bhineka Tunggal Ika. Karakter masyarakat Ngada sebagai pekerja keras, kuat dalam kebersamaan *ulu-eko,* egaliter, demokratis, dan saling menghargai perbedaan. Membangun Ngada yang berbudaya bagian dari gerakan kebangsaan Revolusi Mental yang terus dilembagakan dan dinternalisasi dalam berbagai ruang dan kolaborasi antara pemerintah dengan tokoh agama, adat, pendidikan, maupun masyarakat secara umum.
	Pertanian	Mengangkat pertanian sebagai basis pembangunan tidak hanya berpijak kepada keberadaan pertanian sebagai sumber daya atau aset utama bagi masyarakat Ngada, sekaligus memiliki filosofi mendalam di tengah masyarakat. Pertanian disimbolkan dengan ***Ubi (Uwi)*** sebagai makanan utama dan awal mula yang menghidupi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		masyarakat, dan ***Su'a (Tofa)***yang dipakai pertama kali oleh nenek moyang untuk bekerja di lahan pertanian. Filosofi lain yang menggambarkan pertanian sebagai sumber penghidupan dan memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, yaitu ***Tuka, Tuku, Teka*** yang berarti masyarakat Ngada harus bisa menanam, mengolah, dan menjual komoditas pertanian dan perikanan.
	Pariwisata	Kabupaten Ngada yang kaya sumber daya alam, kebudayaan, dan hasil kreasi manusia menjadi daya tarik besar bagi pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata diarahkan dengan berbasis kepada masyarakat dan mengedepankan dampak multiganda yang melibatkan berbagai sektor dan membawa kesejahteraan masyarakat. Pertanian, pariwisata, bersama sumber daya utama Ngada lainnya, seperti peternakan dan perikanan menjadi basis utama dalam menggerakkan perekonomian daerah dalam pembangunan yang tertuang dalam *tagline* **TANTE NELA PARIS** (Tani, Ternak, Nelayan, dan Pelaku Pariwisata).
	Berwawasan	Pelaksanaan pembangunan harus

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Lingkungan	memperhatikan batas-batas kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung dan menampung aktivitas manusia, serta memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan pembangunan yang mampu menyediakan ruang, sumber daya alam, dan mampu melakukan perbaikan kualitas lingkungan apabila terdapat dampak yang mengganggu keseimbangan ekosistem.

Tante Nela Paris menjadi sektor utama yang diharapkan mampu menjadi pemimpin bagi sektor lainnya. Pengembangan pertanian, Peternakan, perikanan dan pariwisata menjadi perhatian utama dalam visi Kabupaten Ngada. Visi tersebut harus diturunkan ke dalam beberapa rumusan misi yang lebih operasional.

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kabupaten Ngada memiliki lima misi yang salin terkait. Rumusan misi tersebut disebut sebagai **Panca Cita Pembangunan Kabupaten Ngada 2021-2026**. Berikut adalah rumusan misi Kabupaten Ngada:

Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Misi 1 adalah bagian dari upaya menciptakan Ngada **Unggul** dan **Mandiri** dari sisi perekonomian masyarakat yang berpijak kepada potensi utama

Ngada, yaitu sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata (**TANTE NELA PARIS**), yang pengembangannya secara komprehensif dari huu sampai hilir, Dari aspek produksi, pengolahan dan pemasaran/perdagangan. Misi 1 berupaya mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, penurunan kesenjangan pendapatan antar masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Keempat kondisi tersebut diturunkan menjadi tujuan yang diukur dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks gini dan indeks kualitas lingkungan hidup.

Misi 2: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia bagian dari upaya mencapai visi **Unggul SDM** yangsehat, kuat, cerdas, terampil dan kreatif. Misi ini akan dioperasionalisasikan untuk mencapai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang ditopang oleh pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Misi 2 juga terkait dengan pembangunan kepemudaan untuk menyiapkan generasi penerus untuk mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa pada masa depan. Misi ini juga memberi perhatian pada upaya pengarusutamaan gender.

Misi 3: Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar

Misi 3 merupakan upaya mencapai **Unggul Sarana dan Prasarana** sebagai penopang pembangunan di berbagai bidang. Infrastruktur wilayah yang baik akan mempermudah dan mempercepat konektivitas antar pusat pertumbuhan, serta mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah. Infrastruktur yang berkualitas dengan dukungan tata kota dan tata wilayah yang baik dapat membawa dampak yang baik bagi kelayakhunian daerah, daya tarik dan daya saing daerah secara umum. Infrastruktur yang berkualitas juga akan mengurangi kendala akses terhadap pelayanan dasar, sehingga pelayanan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan penopang bagi efektivitas pembangunan di seluruh urusan pemerintahan, dan menjadi bagian dari upaya mencapai visi **Unggul Birokrasi**. Keunggulan birokrasi melalui reformasi birokrasi dapat tercapai ketika pemerintah daerah mampu akuntabel secara administratif maupun sosial, efektif dalam memberikan pelayanan, transparan, berintegritas dan profesional, serta mampu berkolaborasi dengan masyarakat dalam berbagai ruang pembangunan yang partisipatif.

Misi 5: Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Transformasi Institusi Budaya

Masyarakat Ngada yang tetap memegang teguh dan menjalankan nilai dan tradisi budaya lokal, serta terjaganya kohesivitas sosial merupakan modal penting dalam mewujudkan visi Ngada **Berbudaya**. Modal tersebut kemudian perlu dikelola dengan strategi transformasi budaya melalui revitalisasi dan reorientasi nilai budaya. Upaya ini adalah salah satu strategi untuk mengentaskan kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan lainnya. Transformasi budaya berupaya mengelola nilai dan tradisi agar mampu beradaptasi di tengah tuntutan zaman yang semakin dinamis tanpa menghilangkan nilai dan tradisi yang telah membentuk ikatan sosial kuat di tengah masyarakat Ngada. Oleh karena itu, transformasi budaya membutuhkan peran lintas sektor dan berbagai pemangku kepentingan, sehingga penting untuk dimulai dari level desa dengan peran aktif tokoh agama, adat, dan masyarakat.

Visi dan misi RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan rumusan visi dan misi RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Nusa Tengga Timur 2018-2023. Keterkaitan antar visi dan misi ini sangat penting untuk menjamin sinergitas perencanaan pembangunan pusat dengan daerah. Berikut adalah keterkaitan antara visi dan misi Kabupaten Ngada dengan Provinsi NTT dan Nasional:

Tabel 5. 2. Keterkaitan Antara Visi-Misi RPJMD Kabupaten Ngada dengan Visi-Misi RPJMN dan RPJMD Provinsi Nusa Tengga Timur

RPJMN 2020-2024	RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026	RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023
Visi: Terwujudnya Indonesia **Maju** yang **Berdaulat**, **Mandiri**, dan **Berkepribadian** Berlandaskan Gotong Royong	**Visi:** Terwujudnya Masyarakat Ngada yang **Unggul**, **Mandiri**, dan **Berbudaya** Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan	**Visi:** NTT **Bangkit** Mewujudkan Masyarakat **Sejahtera** dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
Misi 2: Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, Berdaya Saing **Misi 4:** Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	**Misi 1:** Mengembangkan Perekonomian Daerah berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup	**Misi 1:** Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri, dan Adil **Misi 2:** Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (*Ring of Beauty*)
Misi 1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	**Misi 2:** Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	**Misi 4:** Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Misi 3: Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	**Misi 3:** Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar	**Misi 3:** Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan
Misi 6: Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya **Misi 8:** Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya **Misi 9:** Sinergi Pemerintah Daerah	**Misi 4:** Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani	**Misi 5:** Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

RPJMN 2020-2024	RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026	RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023
dalam Kerangka Negara Kesatuan		
Misi 5: Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa **Misi 7:** Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Bagi pada Seluruh Warga	**Misi 5:** Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Transformasi Institusi Budaya	**Misi 1:** Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri, dan Adil

5.3. Tujuan Dan Sasaran

Perencanaan pembangunan daerah harus menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Setiap tujuan memiliki rumusan sasaran berupa rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Rumusan tujuan RPJMD harus berpedoman pada sasaran pokok periode 4 RPJPD Kabupaten Ngada yang berupaya untuk mewujudkan **"masyarakat unggul dan mandiri"**. Identifikasi keterkaitan tujuan RPJMD dengan sasaran pokok RPJPD sebagai berikut:

Tabel 5. 3. Keterkaitan Tujuan RPJMD dengan Sasaran Pokok RPJPD, dan Arah Kebijakan Tahap 4 RPJPD

Tujuan RPJMD	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Kebijakan Tahap 4 RPJPD
Misi 1 RPJMD: Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup		
Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Pengembangan ekonomi	• Pengembangan usaha pengolahan hasil dan berbahan baku dari produk yang tidak dimanfaatkan langsung • Pemantapan kinerja para pemangku kepentingan pariwisata Kabupaten Ngada

Tujuan RPJMD	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Kebijakan Tahap 4 RPJPD
		• Pengembangan kelembagaan pariwisata dan penataan destinasi pariwisata serta penciptaan daya tarik wisata • Pemantapan industri dan perdagangan dengan mengoptimalkan pendayagunaan potensi lokal serta perluasan jaringan perdagangan/pasar luar daerah
Meningkatnya pemerataan kesejahteraan		• Pengembangan jaringan Koperasi dan UMKM untuk mengatasi persaingan global • Pengembangan pola kemitraan Koperasi & UMKM yang tersinergi
Menurunnya kemiskinan		• Pengembangan jaringan dan relasi bisnis tingkat nasional dan internasional dalam upaya pemasaran hasil-hasil pertanian, perkebunan dan peternakan
Meningkatnya kualitas hidup	Pengembangan wilayah	• Pemantapan konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air • Semakin mantapnya sistem pemantauan, penilaian dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup
Misi 2 RPJMD: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		
Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Peningkatan daya saing masyarakat	• Penuntasan program Wajib Belajar Dua Belas tahun • Penigkatan kualitas siswa, guru dan sarana prasarana • Peningkatan akses pendidikan menengah di daerah-daerah terpencil • Tingkatkan bantuan beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu • Mulai merintis Wajib Belajar 15 Tahun dan peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi • Tertampungnya semua anak usia 0-6 tahun pada lembaga-lembaga PAUD baik yang formal maupun nonformal • Pembangunan pendidikan tinggi yang selaras dengan prioritas

Tujuan RPJMD	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Kebijakan Tahap 4 RPJPD
		pembangunan daerah • Peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular • Pengembangan dan penguatan sistem Kesehatan • Peningkatan jumlah, jenis dan mutu tenaga Kesehatan • Pemberdayaan profesi kesehatan (institusi) • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan dengan pemberian pengharagaan dan sangsi
	Pemberdayaan perempuan, pemuda, dan perlindungan anak	• Penguatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan Kesehatan • Penguatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak • Penguatan lembaga sosial masyarakat dalam penangan permasalahan perempuan dan anak • Pengarusutamaan peranserta dan kesetaraan jender dalam semua kebijakan pembangunan • Mempertahankan kemandirian pemuda dan mendorong daya saing pemuda Ngada di skala nasional maupun internasional baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya serta IPTEK
Menurunya kemiskinan	Peningkatan daya saing masyarakat	• Pengembangan pendidikan keterampilan dan multimedia bagi masyarakat pedesaan diarahkan untuk membantu meningkatkan kehidupan ekonomi melalui kegiatan kewirausahaan • Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja melalui pengembangan kurikulum pelatihan berbasis potensi lokal serta kewirausahaan

Tujuan RPJMD	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Kebijakan Tahap 4 RPJPD
Misi 3 RPJMD: Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar		
Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan transportasi	Pengembangan wilayah	• Pengembangan investasi daerah yang memiliki daya saing dengan berbasis ilmu dan teknologi • Pemantapan pengelolaan infrastruktur wilayah • Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur terbangun dengan meningkatkan kualitas kemitraan pemerintah dan swasta • Penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya • Pemanfaatan lahan budidaya secara optimal • Melalui koordinasi penataan ruang pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Ngada sudah sesuai dengan rencana tata ruang dan keseimbangan lingkungan dapat terjaga • Infrastruktur data spasial telah dapat digunakan dengan mantap dalam mendukung penataan ruang
Menurunnya risiko bencana		
Meningkatnya kelayakhunian	Pengembangan institusi kepemilikan tanah	• Penuntasan sertifikasi tanah • Pengembangan institusi pengelolaan konflik pertanahan
Misi 4 RPJMD:Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan	• Penguatan aparatur dalam fasilitasi dan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan • Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha • Pemantapan birokrasi pemerintah dari segi struktur dan budaya organisasi, penataan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan

Tujuan RPJMD	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Kebijakan Tahap 4 RPJPD
		• Pemantapan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel di semua bidang • Pemantapan kapasitas desa dalam rangka penguatan daya saing • Penguatan kapasitas aparatur, sistem pengelolaan keuangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik
	Penegakan hukum dan HAM	• Memantapkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) • Pemantapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta harmonisasi berbagai produk hukum dari segi substansi, pelaksanaan dan penegakan hukum • Pemantapan budaya hukum serta membangun kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan
Misi 5 RPJMD: Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Transformasi Institusi Budaya		
Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat	Penguatan kelembagaan sosial kemasyarakatan	• Pemantapan kelembagaan sosial kemasyarakatan sebagi pusat pembelajaran dan pengembangan berbagai ragam kegiatan masyarakat • Pemantapan kelembagaan lokal berbasis masyarakat dan Pengembangan wawasan kebangsaan • Pemantapan kemitraan dan pelestarian dan pengembangan kelembagaan adat berbasis masyarakat • Penguatan dan pemantapan partisipasi lembaga pemangku adat dalam penyelesaian konflik • Penguatan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerunkunan hidup baik inter umat beragama maupun antar

Tujuan RPJMD	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Kebijakan Tahap 4 RPJPD
		umat beragama • Penguatan fungsi dan peran berbagai lembaga sosial kemasyarakatan dalam mengaktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Ngada dalam berbagai aspek kehidupan • Pemantapan peran lembaga sosial kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat
	Peningkatan kapitalisasi perdesaan	• Pemantapan kelembagaan usaha mikro, kecil dan menegah serta koperasi di perdesaan sehingga dapat berdaya saing unggul • Pengembangan usaha permodalan di pedesaan

Tujuan maupun sasaran sebagai rumusan kondisi yang akan dicapai memiliki indikator sebagai alat ukur keberhasilan di tingkat dampak. Rumusan tujuan dan sasaran serta indikatornya untuk setiap misi RPJMD Kabupaten Ngada dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 5. 4. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja						Kondisi Akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup										
Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi		Indikator Tujuan: Laju Pertumbuhan Ekonomi	0,04	4,79	4,91	5,03	5,18	5,44	5,71	5,71
	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian	Indikator Sasaran: Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	34,28	34,62	34,97	35,32	35,85	36,39	36,93	36,93
	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian	Indikator Sasaran: Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	34,28	34,62	34,97	35,32	35,85	36,39	36,93	36,93
	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Indikator Sasaran: Persentase peningkatan realisasi PMDN	0,84	1,54	2,37	3,17	4,02	4,89	4,94	4,94
		Indikator Sasaran: Persentase peningkatan realisasi PMA	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,61	0,64	0,64
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap	Indikator Sasaran: Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,42	0,64	0,70	0,79	0,88	0,99	1,12	1,12

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja						Kondisi Akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	perekonomian									
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Indikator Sasaran: Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	7,59	7,86	7,90	7,95	8,12	8,18	8,44	8,44
	Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian	Indikator Sasaran: Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	1,43	1,47	1,51	1,55	1,59	1,63	1,71	1,71
		Indikator Tujuan: Laju Inflasi	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
	Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa	Indikator Sasaran: Indeks harga konsumen	106,28	108,24	110,23	112,26	114,32	116,42	118,57	118,57
	Meningkatnya ketahanan pangan	Indikator Sasaran: Indeks Ketahanan Pangan	78,24	78,74	79,24	79,74	80,24	80,74	81,55	81,55
Meningkatnya pemerataan kesejahteraan		Indikator Tujuan: Indeks Gini	0,326	0,321	0,316	0,312	0,305	0,299	0,292	0,292
	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan usaha kecil menengah	Indikator Sasaran: Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat	0	1,00	1,05	1,10	1,18	1,27	1,36	1,36

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja						Kondisi Akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	terhadap perekonomian	Indikator Sasaran: Persentase peningkatan kelas usaha kecil ke menengah	5,6	5,8	6,0	6,3	6,5	6,7	6,9	6,9
Menurunnya kemiskinan		Indikator Tujuan: Tingkat Kemiskinan	12,51	11,34	11,14	10,71	10,51	10,33	9,54	9,54
	Meningkatnya kesejahteraan petani	Indikator Sasaran: Nilai Tukar Petani	106,26	110,19	111,82	113,44	115,07	116,70	118,33	118,33
	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Indikator Sasaran: Nilai Tukar Nelayan	27,68	41,52	49,82	59,79	71,75	86,10	103,32	103,32
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indikator Tujuan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,25	68,25	68,29	68,30	68,36	68,38	68,41	68,41
	Meningkatnya kualitas udara	Indikator Sasaran: Indeks Kualitas Udara	85,07	85,07	84.65	84.25	83.95	83.50	83.10	83.10
	Meningkatnya kualitas air	Indikator Sasaran: Indeks Kualitas Air	50	50,50	51,00	51,50	52,00	52,50	53,00	53,00
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indikator Sasaran: Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69,320	69,320	69,321	69,322	69,323	69,324	69,325	69,325
	Menurunnya volume sampah	Indikator Sasaran: Persentase volume sampah yang tertangani	18,63	18,63	19	20	21	22	23	23

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja						Kondisi Akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 2: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia										
Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		Indikator Tujuan								
		Usia Harapan Hidup (UHH)	68,04	68,44	68,84	69,24	69,64	70,04	70,44	70,44
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,88	68,8	69,3	69,7	70,1	70,6	71,1	71,1
	Semakin Baiknya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indikator Sasaran Angka Kematian Ibu (AKI)	0	102/100.000 KH	102/100.000 KH	102/100.000 KH	102/100.000 KH	102/100.000 KH	102/100.000 KH	102/100.000 KH
		Agka Kematian Bayi (AKB)	10,69/1000 KH	34/1000KH	34/1000KH	34/1000KH	34/1000KH	34/1000KH	34/1000KH	34/1000KH
		Angka Kematian Balita (AKABA)	10,69/1000 KH	34/1000KH	34/1000KH	34/1000KH	34/1000KH	34/1000KH	34/1000KH	34/1000KH
		Angka Stunting	15,7	14,36	13,02	11,68	10,34	9,0	9,0	9,0
		Angka Kesakitan	7,23	6,78	6,33	5,88	5,43	5,0	5,0	5,0
	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	3,7	3,5	3,3	3,1	2,9	2,7	2,5	2,5

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja						Kondisi Akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Menurunnya Keluarga Pra Sejahtera	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	26.50	25,84	25,19	24,56	23,95	23,35	22,75	22,75
	Meningkatnya Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	18,50	30,60	32,17	33,23	35	40,11	41,77	41,77
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	92,37	93,45	94,20	94,45	95,30	95,40	95,48	96,48
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	83,14	83,15	84,20	85,30	86,30	87,21	88,12	88,12
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,7	12,9	13,1	13,3	13,5	13,7	13,9	13,9
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,52	8,73	8,94	9,15	9,36	9,57	9,78	9,78
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata nilai ujian siswa	58	60	62	65	68	70	72	72
		Nilai Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	65	68	69	70	73	75	77	77
		Persentase Akreditasi Lembaga Penyelenggaraan PAUD	91,15	93,19	94,57	95,91	97,27	100	100	100
	Meningkatnya kualitas dan layanan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	NA	60	62	64	66	68	70	70

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja						Kondisi Akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Daerah									
	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Peringkat pada event olahraga daerah (PORPROV)	3	3	3	3	2	2	2	2
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	NA	5%	10%	15%	20%	25%	30%	30%
	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Partisipasinya dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	59,22	70	70,57	71,14	71,71	72,28	72,85	72,85
	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Anak	Status Kabupaten Layak Anak	NA	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya
Menurunnya kemiskinan		Indikator Tujuan								
		Angka Kemiskinan	12,51	11,34	11,14	10,71	10,51	10,33	9,54	9,54
		Indikator Sasaran								
	Menurunnya tingkat	Tingkat Pengangguran	4,69	4,08	3,78	3,48	3,18	2,88	2,58	2,58

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja						Kondisi Akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	pengangguran	Terbuka (TPT)								
Misi 3: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar										
Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan transportasi		Indikator Tujuan: Rata-rata kecepatan tempuh antar kawasan-kawasan prioritas	27,78 km/jam	28,00	28,16	28,54	28,93	29,32	29,70	29,70
	Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan	Indikator Sasaran: Persentase panjang jalan pada ruas prioritas dalam kondisi baik	69,45%	70,41%	71,37%	72,33%	73,29%	74,25%	75,21%	75,21%
		Indikator Tujuan: Persentase penurunan angka kecelakaan	23 kasus	21,00%	21,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	Meningkatnya ketersediaan & kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Indikator Sasaran: Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	38,68%	46,68%	54,68%	62,68%	70,68%	78,68%	86,68%	86,68%
		Indikator Tujuan: Persentase kawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja						Kondisi Akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		pariwisata yang dapat diakses angkutan umum layak								
	Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan transportasi umum	Indikator Sasaran: Persentase peningkatan akses angkutan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kelayakhunian		Indikator Tujuan: Rasio pemukiman kumuh	13,4	12,13	10,6	7,9	5,1	2,4	0,0	0,0
	Meningkatnya akses pemukiman layak huni	Indikator Sasaran: Rasio rumah layak huni	78,00	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00	88,00	88,00
		Indikator Sasaran: Persentase kawasan permukiman dan perumahan dengan PSU layak	na	89,09%	90,91%	92,73%	94,55%	96,36%	98,18%	98,18%
		Indikator Sasaran: Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	76,09%	80%	84%	88%	92%	96%	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja						Kondisi Akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Indikator Sasaran: Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	67,58%	70,27%	72,96%	75,65%	78,34%	81,03%	83,72%	83,72%
	Meningkatnya kualitas tata ruang dan bangunan	Indikator Sasaran: Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan	62,71%	67,11%	71,51%	75,91%	80,31%	84,71%	89,11%	89,11%
		Indikator Sasaran: Persentase bangunan gedung sesuai dengan standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Menurunnya risiko bencana		Indikator Tujuan: Indeks Risiko Bencana	115,7	109,9	104,1	98,3	92,5	86,7	80,9	80,9
	Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	Indikator Sasaran: Angka korban bencana	170	150	100	70	40	30	0	0
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani										
Terwujudnya tata kelola		Indikator Tujuan: Indeks Reformasi	50,06 (CC)	51 (CC)	55 (CC)	59 (CC)	63 (B)	67 (B)	71 (BB)	71 (BB)

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja						Kondisi Akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
pemerintahan yang baik		Birokrasi								
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Indikator Sasaran: Nilai SAKIP	51,85 (CC)	54 (CC)	58 (CC)	62 (B)	57 (B)	73 (BB)	75 (BB)	75 (BB)
		Nilai EKPPD	2,7500	2,8000	2,8500	2,9000	2,9500	3,0000	3,0500	3,0500
	Meningkatnya integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah	Indeks manajemen resiko	Na	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
		Nilai Survei Penilian Integritas	Na	80	80,5	80,7	80,9	81	81,02	81,02
		Indeks Profesionalitas ASN	Na	55	60	65	70	75	81	81
	Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas keuangan pemerintah daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Na	50	60	65	70	75	80	80

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja						Kondisi Akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Na	50	55	62	75	78	82	82
	Meningkatnya transparansi pemerintah daerah berbasis teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,0
		Indeks keterbukaan informasi publik	Na	60	62	65	68	72	75	75
Misi 5: Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat Melalui Transformasi Institusi Budaya										
Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat		Indikator Tujuan: Angka Kemiskinan	12,51	11,34	11,14	10,71	10,51	10,33	9,54	9,54
		Angka konflik sosial	23	15	12	9	7	5	3	3
	Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa	Indikator Sasaran: Indeks Desa Membangun	0,6218	0,6342	0,6469	0,6599	0,6731	0,6865	0,6965	0,6965
	Meningkatnya keberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang berdaya	Na	10%	13%	18%	20%	23%	25%	25%

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja						Kondisi Akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya transformasi budaya	Persentase penurunan biaya sosial	Na	3%	5%	10%	15%	18%	20%	20%
		Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Na	30%	40%	55%	70%	85%	100%	100%
	Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	na	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab VI memuat tentang strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan pemetaan masalah dan akar masalah pembangunan. Strategi juga dirumuskan dengan memperhatikan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Ngada serta kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Ngada. Program pembangunan daerah yang termuat di bab VI merupakan program prioritas pembangunan yang terkait langsung dengan pencapaian visi dan misi daerah.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan serangkaian cara sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi merupakan panduan dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunan atau program perangkat daerah, sedangkan arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi secara terfokus. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan di dalam setiap misi Kabupaten Ngada dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 6. 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ngada 2021-2026

Visi: Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan			
Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian	Peningkatan produksi tanaman pangan	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan petani
			Pengembangan metode pertanian berorientasi agribisnis
			Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan
			Peningkatan pemeliharaan jaringan irigasi tersier dan pedesaan
			Pemanfaatan lahan tidur
			Pengembangan zonasi lahan pangan berkelanjutan (Zona Agro Ekologi)
			Peningkatan adopsi IPTEK pertanian yang spesifik wilayah
			Peningkatan sarana produksi pertanian (Salah satunya menghasilkan pupuk organik dari peternakan)
			Peningkatan pengendalian hama penyakit
		Peningkatan produksi tanaman perkebunan	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan petani
			Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan
			Perluasan areal tanam baru komoditi perkebunan
			Peningkatan ketersediaan benih unggul
			Optimalisasi pengendalian hama dan penyakit
		Peningkatan produksi hasil ternak (ternak besar dan unggas)	Peningkatan kapasitas SDM peternak
			Pengembangan metode budidaya/ manajemen pemeliharaan ternak berorientasi agribisnis
			Pengembangan standarisasi pengelolaan kelompok peternak
			Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan

Visi: Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan			
			Peningkatan ketersediaan air untuk ternak di beberapa wilayah
			Peningkatan penerapan IPTEK produksi
			Peningkatan ketersediaan pakan untuk ternak (Salah satunya fokus pada penyediaan pakan dari hasil pertanian)
			Peningkatan kualitas bibit
		Peningkatan populasi ternak (sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan Unggas)	Peningkatan kelahiran ternak
			Penurunan kematian ternak
		Peningkatan kualitas produk tanaman pangan dan hortikultura	Peningkatan sarana, prasarana dan teknologi pasca panen
			Peningkatan pembinaan dan pendampingan pasca panen
		Peningkatan kualitas produk perkebunan	Peningkatan sarana, prasarana dan teknologi pasca panen
			Peningkatan pembinaan dan pendampingan pasca panen
		Peningkatan kualitas produk hasil ternak	Peningkatan standarisasi mutu produk hasil peternakan yang berorientasi pasar (salah satunya ASUH)
	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Peningkatan ketersediaan benih
			Peningkatan media pengembangan benih
			Peningkatan ketersediaan pakan
			Peningkatan kualitas teknologi perikanan budidaya
			Pengembangan metode budidaya perikanan berorientasi bisnis
			Peningkatan kapasitas SDM pembudidaya ikan
			Peningkatan luas lahan perikanan budidaya (kolam)
		Peningkatan produksi perikanan tangkap	Peningkatan sarana perikanan tangkap
			Peningkatan kapasitas SDM nelayan
			Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan

Visi: Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan			
			Pengembangan metode penangkapan ikan berorientasi bisnis
			Penurunan penggunaan racun ikan dan setrum di kawasan perikanan tangkap
		Peningkatan kualitas produk perikanan	Peningkatan ketersediaan sarana penjaminan mutu
			Penurunan produk perikanan yang mengandung zat kimia berbahaya
	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Peningkatan minat investasi	Peningkatan identifikasi potensi investasi (Salah satu prioritas: potensi industri bambu - project bambu nasional)
			Peningkatan promosi investasi
			Peningkatan kondusifitas iklim investasi
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian	Peningkatan kunjungan wisatawan	Pengembangan daya tarik destinasi wisata alam, budaya dan buatan
			Pengembangan daya tarik wisata yang aman bencana
			Optimalisasi pemasaran destinasi wisata
			Optimalisasi kerjasama pengembangan wisata
		Peningkatan *spend of money* wisatawan	Pengembangan ekonomi kreatif
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Peningkatan kapasitas pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan	Peningkatan penerapan metode marketing mix (4Ps)
	Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian	Peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM)	Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM
			Peningkatan kontinuitas bahan dasar produksi
			Peningkatan akses bantuan permodalan
			Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna

Visi: Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan			
			Pengembangan metode pengolahan modern
	Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa	Peningkatan kelancaran distribusi barang perdagangan	Peningkatan ketersediaan barang pokok dan barang penting
			Peningkatan stabilitas harga barang pokok dan barang penting
			Peningkatan perlindungan konsumen
	Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan ketersediaan pangan	Peningkatan stok cadangan pangan
			Peningkatan peran dan fungsi lumbung pangan, kelembagaan dan sarana pendukungnya
		Peningkatan akses distribusi pangan	Optimalisasi pengembangan kelembagaan distribusi pangan (lumbung pangan dan toko tani)
			Pengembangan toko tani
			Penurunan daerah rawan pangan
		Peningkatan konsumsi terhadap pangan yang berkualitas	Peningkatan diversifikasi dan pengolahan pangan
		Peningkatan keamanan pangan	Penurunan penggunaan obat kimia di luar ambang batas
Meningkatnya pemerataan kesejahteraan	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap perekonomian	Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi produsen	Peningkatan kualitas tata kelola koperasi (koperasi produsen)
		Peningkatan omzet UKM	Peningkatan kapasitas produksi UKM (fokus pertanian dan pariwisata)
			Peningkatan kapasitas pemasaran produk UKM (fokus pada pertanian dan pariwisata)
Menurunnya kemiskinan	Meningkatnya kesejahteraan petani	Peningkatan nilai tambah produk pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)	Pengembangan produk olahan hasil pertanian
			Peningkatan kualitas produk olahan hasil pertanian
		Peningkatan kapasitas pemasaran produk olahan pertanian	Peningkatan penerapan metode marketing mix (4Ps)

Visi: Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan			
		(tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)	
	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Peningkatan nilai tambah produk perikanan	Pengembangan produk olahan hasil perikanan
			Peningkatan kualitas produk olahan hasil perikanan
		Peningkatan kapasitas pemasaran produk olahan perikanan	Peningkatan penerapan metode marketing mix (4Ps)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas udara	Penurunan pencemaran emisi udara	Penurunan emisi kendaraan bermotor
			Penurunan kebakaran lahan
	Meningkatnya kualitas air	Penurunan pencemaran limbah industri	Peningkatan kepatuhan perusahaan dalam pengelolaan limbah industri
		Peningkatan perlindungan konservasi sumber-sumber air	Peningkatan pengawasan di sumber-sumber air
			Peningkatan rehabilitasi sumber-sumber air
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Peningkatan luasan ruang terbuka hijau	Peningkatan ketersediaan RTH
			Rehabilitasi RTH
			Rehabilitasi lahan kritis
	Menurunnya volume sampah	Peningkatan pengelolaan persampahan	Peningkatan sarana persampahan
			Optimalisasi metode pengelolaan TPA
			Peningkatan penerapan pengelolaan sampah dengan metode 3R
			Peningkatan prasarana persampahan
Misi 2: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya kualitas	Semakin baiknya derajat	Optimalisasi pelayanan kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi

Visi: Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan			
dan daya saing sumber daya manusia	kesehatan masyarakat	ibu, bayi, dan balita	Peningkatan cakupan pelayanan balita
			Intensifikasi penanganan stunting
		Peningkatan pelayanan kesehatan anak, penduduk usia produktif dan lansia	Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan PTM dan PM terutama di kawasan kumuh
			Optimalisasi penanganan kesehatan lansia
			Peningkatan ketersediaan peralatan dan obat-obatan
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan PHBS
			Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan
	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Peningkatan penyelenggaraan program Keluarga Berencana (KB)	Peningkatan akseptor KB
			Peningkatan fasilitasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB
			Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait pentingnya KB
	Menurunnya Keluarga Pra Sejahtera	Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Peningkatan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga
	Meningkatnya akses pendidikan	Peningkatan pemerataan fasilitas pendidikan dasar	Peningkatan ketersediaan fasilitas pendidikan dan keterjangkauannya terutama di wilayah yang belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan
			Peningkatan cakupan bantuan bagi siswa melalui BOS dan BOSDIK
			Pendataan penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah/putus sekolah
			Pemerataan tenaga kependidikan berdasarkan kualifikasi
			Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan

Visi: Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan			
		Penataan Manajemen SDM pendidikan	
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Pengembangan manajemen sekolah	Perbaikan tata kelola sekolah
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD	Standarisasi penyelenggaraan PAUD
	Meningkatnya kualitas dan layanan Perpustakaan Daerah	Peningkatan cakupan layanan perpustakaan	Peningkatan jumlah dan judul buku
			Penyediaan SDM pengelola perpustakaan sesuai standar
			Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas perpustakaan
			Penyediaan layanan perpustakaan berbasis digital
			Optimalisasi layanan perpustakaan keliling
	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Peningkatan pengelolaan bidang olahraga	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
			Peningkatan pembinaan atlet muda
			Peningkatan kualifikasi pelatih cabang olahraga
			Peningkatan fasilitasi klub olahraga
		Peningkatan peran serta kelompok pemuda dalam pembangunan	Peningkatan jumlah organisasi kepemudaan yang aktif
			Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan
			Peningkatan kewirausahaan pemuda
	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan partisipasinya dalam pembangunan	Peningkatan pemberdayaan perempuan	Meningkatkan prioritas pemberdayaan usaha perempuan pada sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata
		Peningkatan kesetaraan gender di berbagai bidang	Mendorong perempuan untuk lebih aktif dalam berbagai organisasi dan komunitas

Visi: Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan			
	Meningkatnya kualitas kehidupan anak	Meningkatkan perlindungan terhadap anak	Peningkatan perlindungan anak
			Peningkatan sarana dan prasarana ramah anak
Menurunnya kemiskinan	Menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan kesempatan kerja	Peningkatan kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan permintaan pasar tenaga kerja
			Peningkatan sarana pelatihan tenaga kerja tingkat kabupaten
			Peningkatan layanan informasi bursa kerja *online* maupun *offline*
			Peningkatan jaringan kerjasama penyaluran tenaga kerja
			Optimalisasi pengawasan penyaluran tenaga kerja ilegal dan di bawah umur
Misi 3: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan transportasi	Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan	Peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan jalan	Peningkatan ketersediaan jalan yang menghubungan kawasan-kawasan prioritas kabupaten
			Peningkatan kualitas konstruksi jalan beserta utilitasnya
			Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi jalan beserta utilitasnya
		Peningkatan kualitas jasa konstruksi	Peningkatan kualitas tenaga terampil konstruksi
			Optimalisasi pemantauan konstruksi
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Peningkatan ketersediaan terminal memadai	Peningkatan ketersediaan terminal
			Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi terminal
		Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan memadai	Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan
			Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi perlengkapan jalan
	Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan transportasi umum	Peningkatan ketersediaan moda transportasi darat memadai	Peningkatan ketersediaan jalur trayek angkutan umum
			Penetapan standar tarif angkutan umum
		Pengembangan sistem manajemen pelayanan	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana uji KIR
			Akreditasi unit pelaksana uji KIR

Visi: Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan			
		perhubungan	Peningkatan kelaikan angkutan barang dan orang
Meningkatnya kelayakhunian	Meningkatnya akses pemukiman layak huni	Peningkatan akses rumah layak huni	Peningkatan kualitas rumah rusak/tidak layak huni
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban korban bencana
			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur lingkungan	Peningkatan ketersediaan jalan lingkungan
			Pengembangan sistem drainase lingkungan
			Peningkatan ketersediaan listrik bagi rumah tangga
		Peningkatan akses air minum aman	Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM
		Peningkatan ketersediaan sanitasi	Peningkatan ketersediaan sanitasi rumah tangga dan perbaikan sanitasi di kawasan kumuh
	Meningkatnya kualitas tata ruang dan bangunan	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan ketersediaan dan kualitas dokumen rencana tata ruang
			Peningkatan tindak lanjut terhadap penyimpangan peraturan tata ruang
		Peningkatan penataan kota	Peningkatan penataan taman kota
			Peningkatan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung tata kota
		Pengembangan kawasan	Optimalisasi perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi

Visi: Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan			
		transmigrasi	Peningkatan kapasitas warga transmigran
		Peningkatan ketersediaan bangunan	Peningkatan ketersediaan gedung dan prasarana lainnya
		Peningkatan kualitas bangunan	Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan
			Peningkatan pengawasan bangunan
		Optimalisasi penyelesaian kasus pertanahan	Fasilitasi legalitas kepemilikan lahan
			Peningkatan koordinasi penggunaan tanah dan pencatatan aset pemerintah
			Peningkatan penetapan tanah ulayat
			Optimalisasi pengelolaan tanah kosong
Menurunnya risiko bencana	Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	Peningkatan ketersediaan infrastruktur pengendali bencana	Peningkatan ketersediaan tembok penahan longsor/ bangunan perkuatan tebing
			Peningkatan ketersediaan bangunan penahan abrasi
			Pengembangan sistem drainase perkotaan
		Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana	Peningkatan ketersediaan dan kapasitas fasilitator desa tangguh
			Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan
			Peningkatan jaringan informasi dan komunikasi kebencanaan
			Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebencanaan untuk masyarakat
		Peningkatan tanggap darurat bencana	Peningkatan ketersediaan dokumen rencana kontigensi
			Peningkatan kapasitas kelembagaan bencana
			Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana
			Peningkatan sinkronisasi dan integrasi data kebencanaan
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan sinkronisasi antar dokumen perencanaan
			Peningkatan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan

Visi: Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan			
baik	pemerintah daerah		Peningkatan tindak lanjut partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
			Perencanaan pembangunan berbasis riset
			Pembangunan sistem data kinerja
		Penguatan pelembagaan dan implementasi reformasi birokrasi	Fasilitasi penerapan SAKIP di setiap perangkat daerah
			Fasilitasi penerapan 8 area perubahan di setiap perangkat daerah
		Peningkatan efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah	Peningkatan sinkronisasi dan penerapan instrumen pengendalian kebijakan
			Penataan regulasi pendukung program unggulan daerah
			Optimalisasi struktur kelembagaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah
			Penataan administrasi kewilayahan
			Peningkatan implementasi kerjasama pemerintah daerah
			Optimalisasi fungsi evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran
			Peningkatan kapasitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik
		Optimalisasi BUMD dalam mengelola potensi/aset daerah dan meningkatkan PAD	Pembentukan BUMD untuk mengelola sektor ekonomi unggulan daerah
			Peningkatan kapasitas bisnis BUMD (produksi, pembelian produk ekonomi masyarakat, distribusi, dan pemasaran), serta kerjasama dengan BUMDes dan BUMDesMa
		Peningkatan dukungan kinerja DPRD	Peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD
		Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa	Peningkatan kapasitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan desa
			Penguatan kapasitas aparatur desa
			Optimalisasi kewenangan lokal berskala desa

Visi: Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan			
		Percepatan pencapaian SDGs desa berbasis kewenangan lokal berskala desa	Peningkatan Kerjasama antar desa, perangkat daerah, dan masyarakat dalam pelaksanaan SDGs Desa
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Peningkatan fasilitasi kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan
		Peningkatan fungsi kearsipan sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Pengelolaan arsip secara baku
	Meningkatnya integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah	Peningkatan sistem pengawasan pemerintah daerah	Peningkatan sistem pengendalian intern di setiap perangkat daerah
			Peningkatan akses dan penyelesaian pengaduan masyarakat
		Percepatan implementasi rencana aksi pemberantasan korupsi	Pembangunan zona integritas menuju birkorasi bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani
		Peningkatan kualitas manajemen ASN berbasis sistem merit	Pemenuhan pegawai berbasis kebutuhan
			Peningkatan sistem pengendalian kinerja pegawai
			Peningkatan kualitas layanan kepegawaian
			Peningkatan sistem pengembangan kompetensi ASN
			Peningkatan keterlibatan ASN dalam transformasi budaya
	Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas keuangan pemerintah daerah	Peningkatan kualitas pelaporan keuangan	Peningkatan inventarisasi aset daerah
			Peningkatan kapasitas pelaporan keuangan sesuai Standar akuntasi Pemerintah
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah	Integrasi sistem penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan
		Peningkatan kapasitas PAD	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
	Meningkatnya pelayanan	Pembangunan sistem	Penerapan standar pelayanan dan standar operasional prosedur

Visi: Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan			
	publik yang berkualitas	pengendalian dan percepatan kualitas pelayanan publik	Penguatan koordinasi dan percepatan pencapaian SPM
			Pengembangan dan penerapan inovasi daerah
			Pemenuhan kebutuhan dan penerapan PATEN
		Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan akses layanan kepada masyarakat
			Pengelolaan dan pemutakhiran data kependudukan
	Meningkatnya transparansi pemerintah daerah berbasis teknologi informasi	Percepatan implementasi SPBE	Optimalisasi aplikasi *e-government* untuk pelayanan publik
			Integrasi aplikasi *e-government* untuk layanan internal pemerintah daerah
		Penguatan keterbukaan informasi publik	Optimalisasi peran PPID dan PPID pembantu
			Penguatan ruang/media interaksi masyarakat dengan pemerintah daerah
Misi 5: Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat Melalui Transformasi Institusi Budaya			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat	Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa	Optimalisasi lembaga kemasyarakatan desa	Penguatan peran lembaga masyarakat desa sebagai agen pemberdayaan masyarakat
			Peguatan peran lembaga adat yang ada di desa dalam menjalankan asas rekognisi desa

Visi: Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan			
		Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi ekonomi dan lingkungan desa	Fasilitasi pelatihan dan pendampingan kelembagaan perekonomian masyarakat desa, serta pemanfaatan teknologi tepat guna
			Peningkatan produktivitas desa untuk memperkuat Tante Nela Paris berbasis potensi desa
			Peningkatan konservasi air berbasis desa
		Peningkatan kapasitas BUMDes dan BUMDesMa dalam mengelola potensi/aset desa dan potensi wilayah perdesaan	Peningkatan kapasitas anggaran, manajerial, dan proses bisnis/pemasaran antara BUMDes, BUMdesMa, dan lembaga usaha lainnya
	Meningkatnya keberdayaan PMKS	Peningkatan cakupan pelayanan PMKS	Peningkatan cakupan Jaminan Sosial
			Peningkatan cakupan rehabilitasi dasar bagi penyandang disabiltas, anak

Visi: Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan			
			terlantar, tunas sosial, dan lansia
		Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan PMKS	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana panti
		Pemberdayaan PMKS	Pemberdayaan PMKS melalui pendampingan usaha bersama
	Meningkatnya transformasi budaya	Penguatan kelembagaan transformasi budaya daerah	Pelestarian budaya benda dan tak benda
			Penyusunan peraturan daerah tentang transformasi budaya
			Revitalisasi dan penguatan peran Lembaga Pemangku Adat dalam transformasi budaya dan penyelesaian konflik
			Penguatan revolusi mental untuk membangun budaya produktif
	Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung K3
			Peningkatan kapasitas Linmas
		Optimalisasi penanganan gangguan kenyamanan	Peningkatan kualitas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
		Peningkatan kewaspadaan dini dan kohesivitas sosial	Peningkatan kapasitas SDM untuk melakukan deteksi dini
			Peningkatan peran ormas
			Pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan multikulturalisme

6.2. Arah Kebijakan Tahunan

RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah harus diimplementasikan setiap tahun selama periode perencanaan. Oleh karena itu, perlu disusun arah kebijakan tahunan yang akan menjadi tema dan prioritas pembangunan dalam setiap tahun yang tertuang dalam dokumen RKPD. Arah kebijakan tahunan memandu sinkronisasi antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Perumusan arah kebijakan tahunan berbasis pada telaah urgensi isu pembangunan yang perlu direspon secara sistematis dan bertahap, serta dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD di akhir periode pembangunan. Berikut adalah arah kebijakan tahunan RPJMD

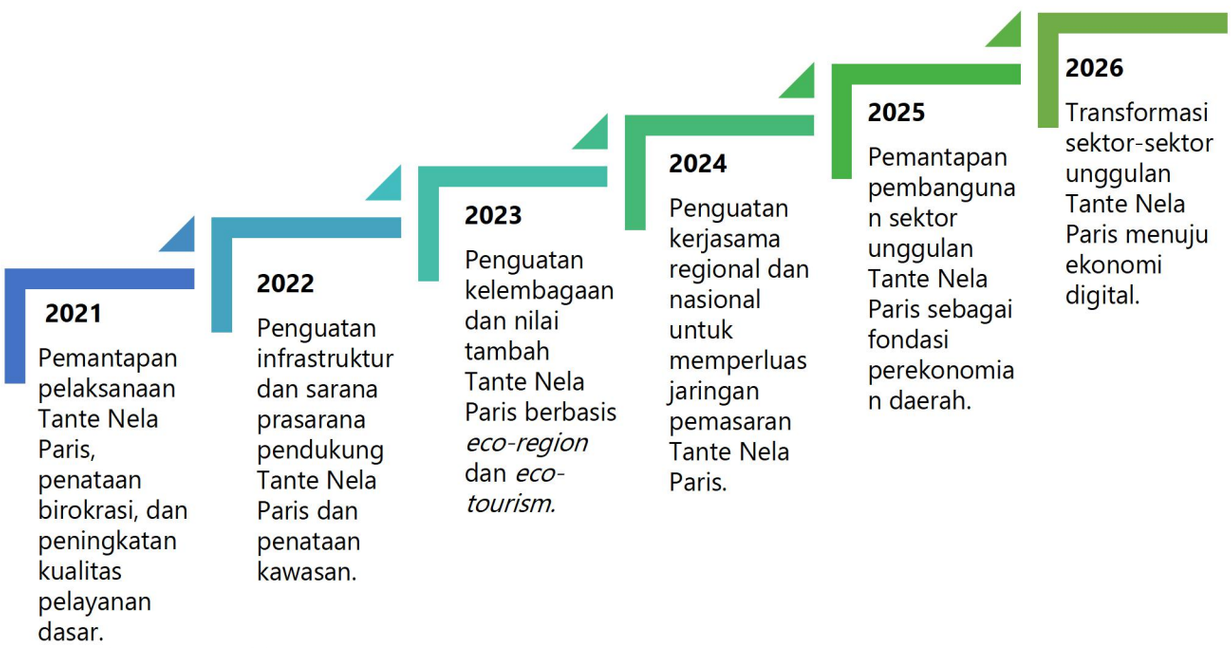

Kabupaten Ngada:

6.3. Arah Kebijakan Kewilayahan

Penentuan arah kebijakan kewilayahan didasarkan pada faktor sosial dan ekonomi pada suatu daerah, yang meliputi pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kewilayahan ini merupakan keterpaduan pembangunan antarsektor guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa aspek penting yang menjadi dasar dalam penyusunan

arah kebijakan kewilayahan di Kabupaten Ngada. Sektor pertanian dan pariwisata menjadi sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kegiatan perekonomian utama. Namun disisi lain, bencana alam menjadi ancaman yang sangat besar dan beragam di wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan kewilayahan Kabupaten Ngada yang dirumuskan diharapkan dapat mengakomodir beberapa kondisi tersebut yaitu konsep berdaya saing dan tangguh bencana dengan berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan

6.3.1. Pengembangan dan Kesesuaian Kebijakan Kewilayahan

Berbagai potensi wisata di Kabupaten Ngada telah terakomodasi ke dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Ngada. Selain itu, dalam PP 50 tahun 2011 Rencana Induk Pariwisata Nasional 2010-2025, Bajawa dan sekitarnya ditetapkan menjadi KPPN yang merupakan bagian dari DPPN Kelimutu-Maumere. Sementara itu, TWAL 17 Pulau juga merupakan prioritas pembangunan pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana termuat dalam RZWP3K Provinsi NTT. Adanya Bandara Soa serta adanya jalur pariwisata Labuan Bajo-Maumere membuat aksesibilitas keluar masuk wilayah Kabupaten Ngada menjadi lebih mudah. Penginapan dan restoran tersedia di beberapa objek wisata walaupun perlu adanya penambahan kuantitas dan kualitasnya guna melayani wisatawan yang semakin bertambah jumlah dan ragam karakteristiknya.

Dalam bidang pertanian, saat ini sumberdaya lahan di Kabupaten Ngada dimanfaatkan untuk pertanian lahan basah, hortikultura, palawija, pisang, jambu mete, cengkeh, kemiri, kemiri sunan, kopi, kakao, vanili, dan peternakan. Pengembangan komoditas pertanian, termasuk peternakan, sudah diarahkan dengan adanya Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/Rc.040/6/2018 Tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional.

Selain pengembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat juga dicapai dengan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana yang terjadi di Kabupaten Ngada, terutama kekeringan. Visi-Misi RPJP Kabupaten Ngada

2006-2026 belum secara eksplisit mencantumkan ketangguhan terhadap bencana. Akan tetapi, dalam RTRWP NTT 2010-2030 dicantumkan tujuannya adalah mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan maritim yang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya yang terpadu dan berkelanjutan, bertumpu pada masyarakat berkualitas, adil, dan sejahtera, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana. Agar penanganan bencana terakomodasi, selaras dengan tujuan yang ditetapkan dalam RTRWP NTT tersebut, ketangguhan terhadap bencana perlu dicantumkan dalam tujuan penataan ruang Kabupaten Ngada.

6.3.2. Konsep Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Ngada

Konsep berdaya saing dan tangguh bencana dengan berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan merupakan konsep yang dirumuskan dengan berprinsip untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam namun tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan ancaman beragam bencana. Bertolak dari konsep tersebut, arah pengembangan kewilayahan Kabupaten Ngada yang dirumuskan berupa alternatif pusat-pusat pertumbuhan yang diharapkan dapat memberikan pelayanan bagi wilayah-wilayah di sekitarnya.

Dalam rangka mendapatkan alternatif yang sesuai dengan tujuan penataan ruang Kabupaten Ngada, dilakukan analisis pemilihan dengan metode *Performance Matrix.* Metode ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar alternatif-alternatif yang ada dapat memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Berikut tabel kriteria-kriteria yang digunakan dalam *Performance Matrix* penentuan alternatif pengembangan wilayah di Kabupaten Ngada.

Tabel 6. 2. Aspek dan Kriteria *Performance Matrix* Pemilihan Alternatif Pengembangan Kabupaten Ngada

No.	Aspek	Kriteria
1	**Daya Saing**	Kemudahan mendapatkan fasilitas pendukung pengembangan komoditas unggulan kawasan
		Kemudahan mendapatkan fasilitas pemasaran komoditas

No.	Aspek	Kriteria
		unggulan kawasan
		Peningkatan pemerataan kesempatan usaha di berbagai bidang ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten
		Kedekatan antara pusat layanan sosial dengan wilayah yang dilayani dalam rangka peningkatan kapasitas SDM
		Kecepatan tumbuh kembangnya kawasan perkotaan
		Biaya pembangunan
2	**Tangguh Bencana**	Eksploitasi SDA
		Jalur Evakuasi
		Beban Penanganan Bencana

Sumber: Laporan Rencana Revisi RTRW Kabupaten Ngada 2012-2032 (RTRW Ngada 2020-2040)

Berdasarkan perhitungan *Performance Matrix,* diperoleh alternatif pengembangan perwilayahan dengan membagi wilayah Kabupaten Ngada menjadi empat bagian. Empat bagian tersebut meliputi bagian utara, tengah, barat daya dan tenggara. Tujuan pembagian wilayah ini dimaksudkan dapat mengoptimalkan sumberdaya alam dan pertimbangan penanganan bencana alam yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, alternatif ini diharapkan dapat lebih memberikan pemerataan pembangunan di Kabupaten Ngada.

Wilayah bagian utara terdiri dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Riung dan Riung Barat dengan pusat pertumbuhan di Perkotaan baru di Kecamatan Riung, yaitu di Desa Wangka Selatan. Pusat tersebut diharapkan dapat memberikan akses yang baik untuk kedua kecamatan tersebut. Selain itu, ancaman bencana alam seperti kebakaran lahan dan tsunami di bagian utara diharapkan dapat lebih cepat penanganannya jika pusat pertumbuhannya direncanakan di kokasi tersebut. Pusat pertumbuhan tersebut juga diharapkan dapat mengoptimalisasikan potensi sumberdaya alam yang ada. Alasan lain dari tidak dikembangkannya kawasan pesisir utara sebagai perkotaan pusat pelayanan adalah karena kawasan pesisir utara merupakan kawasan yang sangat berdekatan dengan kawasan lindung.

Wilayah bagian tengah terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Soa, Bajawa Utara dan Wolomeze. Pusat pertumbuhannya direncanakan berada di

Perkotaan Soa. Bagian tengah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perkebunan dan pertanian dan peternakan yang ada di wilayah ini. Selain itu, adanya Bandara Soa diharapkan bisa meningkatkan perkembangan Perkotaan Soa. Pertimbangan lain dalam pengelompokkan wilayah tengah adanya ancaman letusan Gunung Inielika dan tanah longsor yang perlu ditangani secara efektif dan efisien.

Wilayah bagian barat daya memiliki pusat pertumbuhan di Perkotaan Bajawa. Pusat pertumbuhan ini direncanakan melayani Kecamatan Bajawa, Aimere, Jerebuu, dan Inerie. Sedangkan untuk bagian tenggara memiliki pusat pertumbuhan di Perkotaan Golewa. yang melayani Kecamatan Golewa, Golewa Barat dan Golewa Selatan. Pertimbangan dalam penentuan lokasi pusat pertumbuhan tersebut dikarenakan lokasinya yang berada di tengah-tengah. Penanggulangan bencana alam di wilayah tersebut dirasa juga lebih efektif dan efisien jika pusat layanannya berada di perkotaan tersebut.

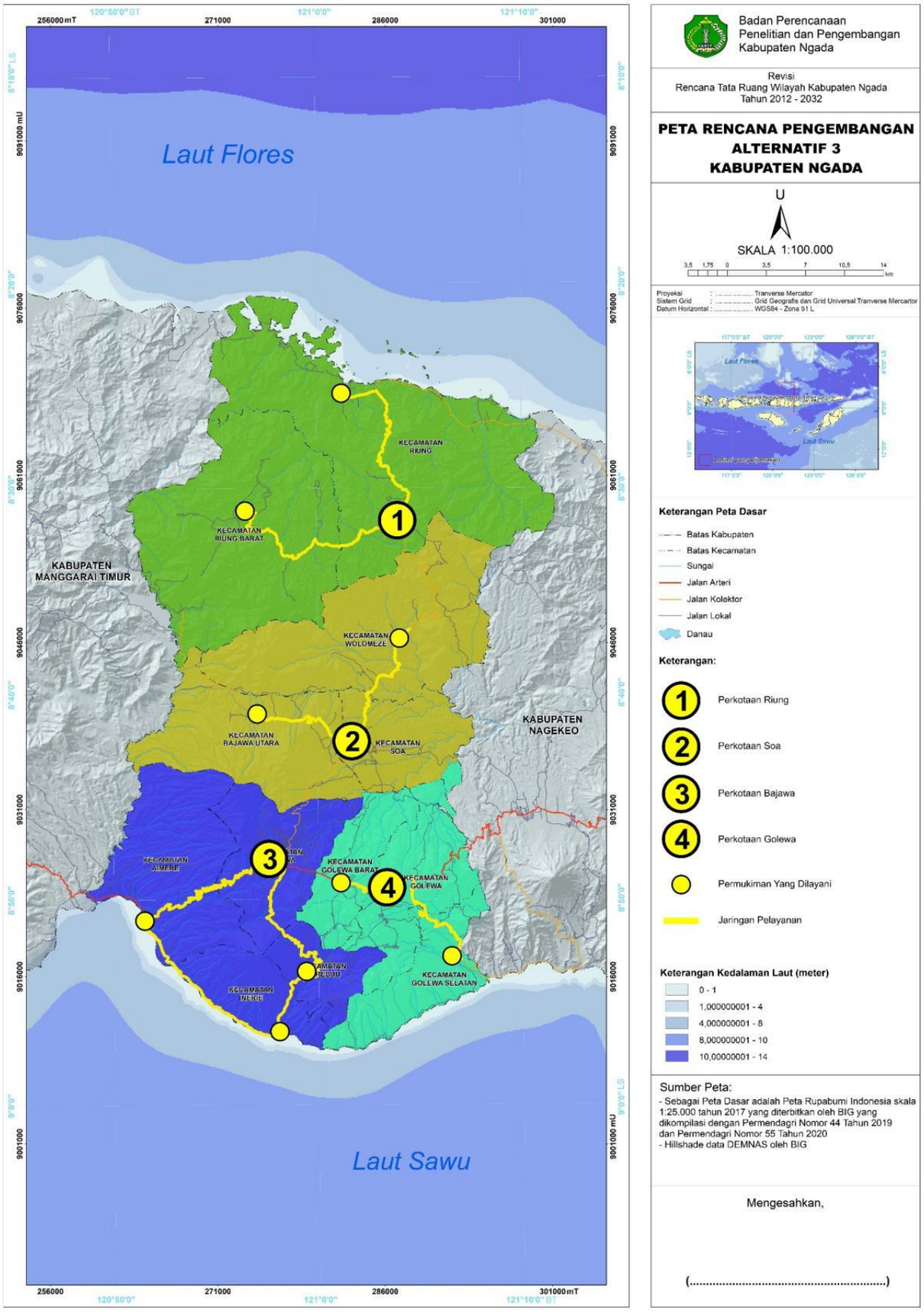

Gambar 6. 1. Peta Rencana Pengembangan Wilayah Kabupaten Ngada

Sumber: Laporan Rencana Revisi RTRW Kabupaten Ngada 2012-2032 (RTRW Ngada 2020-2040)

6.3.3. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kabupaten Ngada

Sistem perkotaan dibentuk dengan cara menata hierarki kota yang ada secara efisein, ada keterkaitan antara suatu kota dengan kota lainnya. Kota yang memiliki hierarki lebih tinggi akan lebih besar dan lebih luas pengaruh jangkauanya dari kota yang hierarkinya lebih rendah. Penentuan posisi hirarki dari suatu kota sebagai pusat-pusat kegiatan atau pusat layanan tidak terlepas dari kelengkapan dan kualitas fasilitas pelayanan yang dimilikinya, termasuk juga potensi strategis dan aksesibilitas lokasi yang dimiliki dibandingkan dengan kota lainnya di dalam kabupaten.

Setiap kawasan perkotaan memiliki jangkauan pelayanan tertentu sesuai dengan fungsi pelayanan kawasan perkotaan masing-masing. Penentuan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dibuat sesuai dengan tingkat pelayanan perkotaan masing-masing dan fungsi yang harus diemban bagi setiap kawasan perkotaan terhadap wilayah *hinterland*nya. Rencana sistem pusat pelayanan di Kabupaten Ngada ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 6. 3. Rencana Sistem Pusat Pelayanan di Kabupaten Ngada

Sistem Pusat Perkotaan	Nama Pusat Layanan	Batas lokasi	*Hinterland*
PKW	Perkotaan Bajawa	Seluruh desa di Kecamatan Bajawa dan sebagian kecamatan Golewa (Turekisa, Mangulewa, Sobo)	• Bajawa, Aimere, Inerie, Jerebuu • Seluruh Kabupaten Ngada • Kabupaten di sekitar Ngada
PPK	Perkotaan Golewa	Mataloko, Ekoroka, Malanuza, Todabelu, Waeia	Kecamatan Golewa, Golewa Selatan, Golewa Barat.
	Golewa Selatan	Were II	Kecamatan Golewa Selatan
	Golewa Barat	Rakalaba, Mangulewa, Turekisa	Kecamatan Golewa Barat
	Jerebuu	Watumanu	Kecamatan Jerebuu
	Aimere	Aimere, Aimere Timur, Foa	Kecamatan Aimere
	Inerie	Waebela, Legeriwu	Kecamatan Inerie
	Bajawa Utara	Watukapu	Kecamatan Bajawa Utara
	Wolomeze	Denatana, Denatana Timur, Wue	Kecamatan Wolomeze

Sistem Pusat Perkotaan	Nama Pusat Layanan	Batas lokasi	*Hinterland*
	Riung	Benteng Tengah, Nangamese	Kecamatan Riung
	Riung Barat	Wolomeze, Ria	Kecamatan Riung Barat
	Soa	Waepana, Seso, Libunio, Masu, Ngabheo, Piga, Piga I, Masukedhi, Tarawaja, Tarawali, Loa	Kecamatan Soa
	Perkotaan baru	Wangka Selatan	Kecamatan Riung dan Riung Barat
	Perkotaan baru	Lengkosambi, Lengkosami Utara	Kecamatan Riung bagian timur
	Perkotaan baru	Uluwae	Kecamatan Bajawa Utara dan Riung Barat bagian selatan
PPL		Semua pusat desa yang telah dapat melayani antar desa	Desa bersangkutan dan desa tetangga

Sumber: Laporan Rencana Revisi RTRW Kabupaten Ngada 2012-2032 (RTRW Ngada 2020-2040)

Dengan adanya pusat-pusat layanan yang disusun secara berhirarkhi tersebut, diharapkan dapat terwujud efisiensi dalam pelayanan terhadap masyarakat dan terhadap hasil produksi wilayah yang muaranya adalah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ngada. Rencana pengembangan wilayah dan sistem pusat pelayanan tersebut kemudian dibagi ke dalam empat tahap pembangunan sesuai dengan jangka waktu RTRW Kabupaten Ngada hingga tahun 2040. Setiap tahapan tersebut diturunkan ke dalam target pembangunan lima tahunan. Tahap pertama tahun 2021 – 2025 direncanakan mempunyai target sebagai berikut:

- Pemantapan fungsi peran Perkotaan Bajawa sebagai ibukota Kabupaten dan sebagai PKW
- Pemantapan semua ibukota kecamatan sebagai PPK yang berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah kecamatan
- Pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai PPK yang nantinya diarahkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah kecamatan apabila terjadi pemekaran kecamatan

- Pengembangan transportasi darat dan sarana-prasarana lainnya untuk mendukung pengembangan sistem kota-kota dalam memberikan pelayanan kepada wilayah belakangnya
- Peningkatan aksesibilitas bagi daerah terisolir dan tertinggal terutama yang memiliki potensi sebagai sentra produksi pertanian dan perikanan
- Mengkoordinasikan penanganan kawasan berfungsi lindung yakni hutan lindung, cagar alam dan lainnya yang berpengaruh pada ketersediaan air, dan kelestarian flora dan fauna
- Peningkatan penyediaan lahan pertanian beririgasi teknis
- Pembentukan kluster-kluster produk unggulan pertanian cikal bakal pertanian unggulan
- Pengembangan pariwisata unggulan
- Pengembangan sarana-prasarana tanggap bencana
- Pengembangan kawasan strategis

Adapun pengembangan kawasan Perkotaan Bajawa diarahkan dalam beberapa aspek berikut:

- Menjadikan Kota Bajawa sebagai etalase dan pusat aktivitas perekonomian di Kabupaten Ngada, melalui peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, penyediaan air bersih, optimalisasi Pasar Bobou dan Eks Pasar inpres, penataan terminal, penataan lingkungan, dan semua sarana prasarana umum.
- Pemberdayaan masyarakat perkotaan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat di Kota Bajawa.

6.3.4. Arah Pengembangan Wilayah dan Pemanfaatan Ruang

Arah pengembangan wilayah dan rencana pemanfaatan ruang yang terdapat dalam RTRW Kabupaten Ngada kemudian diturunkan ke dalam program strategis Bupati, yaitu Tante Nela Paris (Tani, Ternak, Nelayan, dan Pariwisata). Program Strategis Pembangunan ini terkait erat dengan nilai yang tertanam kuat dan menjadi ekspresi budaya masyarakat Ngada, yaitu filosofi ***Tuka, Tuku, Teka***. Filosofi tersebut menggambarkan cara masyarakat Ngada untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Budaya masyarakat Ngada

bukan hanya sebatas subsisten, namun juga budaya produktif yang memiliki kemampuan untuk mengolah dan mengelola komoditas/potensi daerah. Hal ini sesuai dengan visi Kabupaten Ngada Tahun 2021-2026 yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan".** Arahan terhadap hirarki dan pemanfaatan ruang masing-masing kecamatan di Kabupaten Ngada ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 6. 4. Arahan dan Pemanfaatan Kecamatan di Kabupaten Ngada

Kecamatan	Arahan	Pemanfaatan	Fungsi Lain	RDTR
Aimere	PPK	Sebagai Kawasan pendukung Kecamatan Inerie **Dengan kegiatan utama:** transportasi laut, perikanan, dan pertanian **Fungsi pendukung:** agrowisata, agroindustri, pertanian, dan peternakan		
Jerebuu	PPK	Pengembangan kegiatan pertanian	Kawasan peternakan kecil	
Inerie	PPK	Pengembangan kegiatan pertanian dan perikanan tangkap	Kawasan peternakan kecil	
Bajawa	PKWp	Pengembangan Kawasan perkotaan Bajawa, **Dengan kegiatan utama:** perdagangan jasa, perkantoran, administrasi pemerintahan. **Fungsi pendukung:** pariwisata, Pendidikan, kesehatan, agrowisata, agroindustri, dan wisata budaya	- Pengembangan transmigrasi: Kota Terpadu Mandiri Bajawa. - Kawasan peternakan kecil	RDTR Kota Bajawa memuat pengembangan BWP Bajawa sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Ngada, pengembangan agropolitan, pariwisata, dan perdagangan jasa dalam menggerakkan perekonomian BWP Bajawa
Golewa	PPK	Sebagai Kawasan pendukung kecamatan Golewa Selatan, Golewa Barat, dan Kota Bajawa.	Kawasan peternakan kecil	

Kecamatan	Arahan	Pemanfaatan	Fungsi Lain	RDTR
		Dengan kegiatan utama: agropolitan, transportasi laut, dan industri. **Kegiatan pendukung:** perdagangan jasa, agrowisata, wisata budaya, agrowisata, wisata budaya, agroindustri, dan perikanan		
Golewa Selatan	PPK	Pengembangan kegiatan pertanian dan perikanan tangkap	Kawasan peternakan kecil	
Golewa Barat	PPK	Pengembangan kegiatan pertanian	Kawasan peternakan kecil	
Bajawa Utara	PPK	Pengembangan kegiatan pertanian	Kawasan peternakan kecil	
Soa	PPK	**Sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)**, yang meliputi 14 desa. Kawasan pendukung Kecamatan Bajawa Utara, dan Kecamatan Wolomeze Pengembangan Kawasan perkotaan Soa meliputi, transportasi udara, dan pertanian. **Fungsi pendukung:** perdagangan jasa, Pendidikan, kesehatan, agrowisata, agroindustri padi, dan wisata	- Pusat penelitian dan museum Gadjah purba dan manusia purba. - Kawasan peternakan kecil	
Riung	PPK	Sebagai kawasan pendukung Kecamatan Riung Barat dan Wolomeze. **Dengan kegiatan utama:** pariwisata, perikanan. **Kegiatan pendukung:** jasa perhotelan, perdagangan dan jasa, industri kerajinan, agrowisata, dan peternakan	- Pengembangan TWAL Taman Wisata Alam Laut 17 Pulau Riung. - Kawasan peternakan kecil	
Riung Barat	PPK	Pengembangan kegiatan pertanian	Pengembangan kawasan	

Kecamatan	Arahan	Pemanfaatan	Fungsi Lain	RDTR
			peternakan besar ruminansia	
Wolomeze	PPK	Pengembangan kegiatan pertanian	- Pengembangan Kawasan agroindustri Biosolar Kemiri Sunan. - Kawasan peternakan besar.	

Sumber: Analisis, 2021

Kawasan tanaman pangan terdiri atas lahan beririgasi, lahan tidak beririgasi dan lahan cadangan pertanian yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada. Kawasan budidaya tanaman pangan di Kabupaten Ngada memiliki luas 6.783,36 Ha, yang tersebar di di seluruh kecamatan. Sedangkan kawasan peruntukan hortikultura memiliki luas 15.284 Ha, yang juga tersebar di seluruh kecamatan. Pengembangan pertanian hortikultura juga sangat diutamakan mengingat cukup tingginya tingkat kebutuhan sayur dan buah di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Ngada.

Kawasan peruntukan perkebunan di wilayah Kabupaten Ngada secara umum merupakan areal pertanian tanaman tahunan sebagai tanaman utama yang dikelola dengan masukan teknologi sederhana dan memperhatikan azas konservasi tanah dan air. Berdasarkan kepemilikannya perkebunan di Kabupaten Ngada dibedakan menjadi perkebunan rakyat yang dimiliki dan dikelola rakyat; perkebunan swasta yang dimiliki dan dikelola perusahaan swasta; dan perkebunan pemerintah yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan pemerintah. Kawasan perkebunan di Kabupaten Ngada memiliki luas 5.437,21 Ha, yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Ngada.

Kemudian pada sektor lainnya, peternakan merupakan salah satu komponen dalam sistem usaha tani lahan kering. Dengan masuknya kegiatan peternakan dalam pola usaha tani dapat mendorong pemakaian lahan yang mampu mengkonservasi tanah, penanaman rumput dan tanaman tahunan

sebagai sumber pakan ternak juga sekaligus berperan sebagai penguat teras. Sektor peternakan selain akan merupakan sumber tambahan pendapatan bagi petani dan pemenuhan konsumsi daging domestik, sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan pupuk kandang. Sesuai dengan potensi yang dimiliki, rencana pengembangan peternakan di Kabupaten Ngada berupa hewan sapi dan kambing yang memanfaatkan lahan padang rumput sebagai pengembangan daerah pengembalaan. Kawasan peternakan besar di Kabupaten Ngada memiliki luas sebesar 23.579,92 Ha, yang berlokasi di Kecamatan Riung Barat dan Wolomeze, sedangkan kawasan peternakan kecil direncanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Ngada, dengan sistem ternak dipelihara langsung oleh masyarakat pada lahan kosong di kebun.

Pada sektor perikanan, kawasan peruntukan perikanan tangkap di Kabupaten Bajawa terdapat di wilayah perairan Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Aimere, Kecamatan Inerie, dan Kecamatan Riung sesuai dengan RZWP3K. Kegiatan pengolahan ikan khususnya ikan laut, saat ini sudah merupakan salah mata pencaharian utama bagi masyarakat di wilayah pesisir tersebut.

Pada sektor pariwisata, Kabupaten Ngada termasuk dalam Klaster II Flores Barat meliputi wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo dengan konsep pengembangan pulau penuh pesona yang bertumpu pada binatang Komodo sebagai ciri khas serta kehidupan dan peninggalan budaya masyarakat. Pariwisata merupakan subsektor penting untuk memperkenalkan khasanah budaya Kabupaten Ngada untuk dikenal lebih luas di level nasional maupun internasional. Keanekaragaman potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Ngada akan dikembangkan dan direncanakan pengembangannya berdasarkan potensi daya tarik wisata.

6.4. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Perumusan program pembangunan daerah mengacu pada upaya mencapai tujuan dan sasaran, serta berdasarkan rumusan strategi yang telah dipilih. Program pembangunan daerah membangun keterpaduan antara program prioritas dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Berikut adalah program pembangunan daerah Kabupaten Ngada:

Tabel 6. 5. Program Pembangunan Daerah disertai Pagu Indikatif Kabupaten Ngada 2021-2026

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup																	
Tujuan: Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	0,04	4,79		4,91		5,03		5,18		5,44		5,71		5,71		
Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	34,28	34,62		34,97		35,32		35,85		36,39		36,93		36,93		
Program Pembangunan Daerah:																	
Program Penyuluhan pertanian	Persentase petani yang terlatih (tanaman pangan)	10%	15%	7.100.000.000	20%	7.100.000.000	30%	7.100.000.000	40%	7.100.000.000	50%	7.100.000.000	60%	7.100.000.000	60%	42.600.000.000	**Pertanian**
	Persentase kelompok petani yang menerapkan metode pertanian berorientasi	0	7%	1.680.000.000	14%	1.680.000.000	22%	1.680.000.000	29%	1.680.000.000	36%	1.680.000.000	43%	1.680.000.000	43%	10.080.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	agribisnis																
Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase kelompok petani yang mendapatkan bantuan permodalan (tanaman pangan)	2%	10%	2.500.000.000	22%	2.500.000.000	38%	2.500.000.000	60%	2.500.000.000	80%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	15.000.000.000	
	Persentase jaringan irigasi tersier dan pedesaan yang bekondisi baik	na	90,0%	5.450.000.000	92,5%	5.450.000.000	95,0%	5.450.000.000	97,5%	5.450.000.000	98,5%	5.450.000.000	100,0%	5.450.000.000	100,0%	32.700.000.000	
	Luas lahan tidur yang dikonversi menjadi lahan pertanian	0	50	500.000.000	100	500.000.000	150	500.000.000	200	500.000.000	250	500.000.000	300	500.000.000	300	3.000.000.000	
	Luas zonasi lahan pangan berkelanjutan	13.578	13.778	1.500.000.000	13.978	1.500.000.000	14.278	1.500.000.000	14.378	1.500.000.000	14.478	1.500.000.000	14.578	1.500.000.000	14.578	9.000.000.000	
Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase petani yang mampu menerapkan IPTEK	Na	13,50%	10.500.000.000	15,00%	10.500.000.000	16,50%	10.500.000.000	18,00%	10.500.000.000	20,00%	10.500.000.000	20,00%	10.500.000.000	20,00%	63.000.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase sarana produksi pertanian yang bekondisi baik	60%	65%	2.000.000.000	70%	2.000.000.000	75%	2.000.000.000	80%	2.000.000.000	85%	2.000.000.000	85%	2.000.000.000	85%	12.000.000.000	
Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase area pertanian yang tidak terserang hama penyakit	Na	80%	1.050.000.000	85%	1.050.000.000	90%	1.050.000.000	95%	1.050.000.000	99%	1.050.000.000	100%	1.050.000.000	100%	6.300.000.000	
Program Penyuluhan pertanian	Persentase petani perkebunan yang terlatih	9,20%	9,84%	2.500.000.000	10,5%	2.500.000.000	11,3%	2.500.000.000	12,06%	2.500.000.000	12,86%	2.500.000.000	13,66%	2.500.000.000	13,66%	15.000.000.000	
Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase kelompok petani yang mendapatkan bantuan permodalan (tanaman perkebunan)	90 orang	13%	2.500.000.000	40%	2.500.000.000	60%	2.500.000.000	80%	2.500.000.000	90%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	15.000.000.000	
	Luas area tanaman baru komoditi perkebunan (ha)	709	824	2.800.000.000	939	2.800.000.000	1054	2.800.000.000	1169	2.800.000.000	1284	2.800.000.000	1399	2.800.000.000	1399	16.800.000.000	
Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase peningkatan ketersediaan benih unggul	Na	90%	3.500.000.000	90%	3.500.000.000	90%	3.500.000.000	90%	3.500.000.000	90%	3.500.000.000	90%	3.500.000.000	90%	21.000.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(perkebunan)																
Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase area perkebunan yang tidak terserang hama dan penyakit	Na	80%	1.050.000.000	85%	1.050.000.000	90%	1.050.000.000	95%	1.050.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.050.000.000	100%	6.300.000.000	
Program Penyuluhan pertanian	Persentase peningkatan peternak yang terlatih	a, Petugas IB : 20 Org b, Petugas PKB : 22 Org c, Petugas ATR : 18 Org	10%	280.000.000	12%	310.000.000	14%	490.000.000	16%	330.000.000	18%	355.000.000	20%	355.000.000	20%	2.120.000.000	**Pertanian**
	Persentase kelompok peternak yang menerapkan metode budidaya ternak berorientasi agribisnis	152 kelompok	0	0	9,2%	1.713.000.000	12%	1.396.800.000	14%	1.531.480.000	17%	1.117.128.000	20%	1.117.128.000	20%	10.055.536.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase kelompok peternak yang dikelola sesuai SOP	152 Kelompok	0	0	20%	52.500.000	40%	52.500.000	60%	55.000.000	80%	58.000.000	100%	58.000.000	100%	326.000.000	
Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase kelompok peternak yang mendapatkan bantuan permodalan	0	2%	50.000.000	4%	55.000.000	6%	60.500.000	8%	65.550.000	10%	73.205.000	10%	73.205.000	10%	377.460.000	
	Persentase kelompok peternak yang memiliki akses air yang memadai/ mencukupi	152 kelompok	0	0	2%	705.000.000	4%	1.310.500.000	6%	765.550.000	8%	1.598.205.000	10%	1.598.205.000	10%	9.527.460.000	
Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase kelompok peternak yang menerapkan IPTEK produksi	152 Kelompok	5%	950.000.000	10%	950.000.000	15%	600.000.000	25%	600.000.000	40%	500.000.000	40%	500.000.000	40%	4.100.000.000	
	Persentase kelompok peternak yang memiliki pakan yang memadai/ mencukupi	152 Kelompok	20%	125.000.000	40%	150.000.000	60%	175.000.000	80%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.150.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase peningkatan ketersediaan bibit unggul	15000 ekor	40%	280.000.000	40%	550.000.000	50%	820.000.000	60%	1.090.000.000	70%	1.360.000.000	80%	1.360.000.000	80%	5.460.000.000	
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase toko pakan ternak yang terdaftar	10 toko	0	25.000.000	10%	26.000.000	20%	27.000.000	30%	28.000.000	40%	30.000.000	50%	30.000.000	50%	166.000.000	
Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Tingkat kelahiran ternak	Sapi Babi, Kerbau dan unggas yang dikembangkan	100%	950.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.450.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.950.000.000	100%	1.950.000.000	100%	9.200.000.000	
Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat kematian ternak	6 % dari Populasi Ternak	6%	3.110.000.000	6%	3.222.500.000	5%	3.336.000.000	4%	3.450.600.000	3%	3.566.410.000	2%	3.566.410.000	2%	20.251.920.000	
Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase kelompok petani yang menggunakan teknologi penanganan pasca panen	20%	30%	1.500.000.000	35%	1.500.000.000	40%	1.500.000.000	45%	1.500.000.000	50%	1.500.000.000	50%	1.500.000.000	50%	9.000.000.000	**Pertanian**

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(hortikultura)																
Program Penyuluhan pertanian	Persentase kelompok petani yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan penanganan pasca panen (hortikultura)	na	0	0	2%	2.000.000.000	4%	2.000.000.000	6%	2.000.000.000	8%	2.000.000.000	10%	2.000.000.000	10%	10.000.000.000	
Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase kelompok petani yang menggunakan teknologi penanganan pasca panen (perkebunan)	20%	30%	2.000.000.000	35%	2.000.000.000	40%	2.000.000.000	45%	2.000.000.000	50%	2.000.000.000	50%	2.000.000.000	50%	12.000.000.000	
Program Penyuluhan pertanian	Persentase kelompok petani yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan penanganan pasca panen (perkebunan)	na	0	0	2%	1.500.000.000	4%	1.500.000.000	6%	1.500.000.000	8%	1.500.000.000	10%	1.500.000.000	10%	7.500.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Penyuluhan pertanian	Persentase kelompok peternak yang menerapkan standarisasi ASUH	0	0	1.200.000.000	3%	627.000.000	4%	766.400.000	5%	884.900.000	6%	513.000.000	7%	513.000.000	7%	4.504.300.000	**Peternakan**
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	43,54%	43,54%	3.500.000.000	45,94%	3.850.000.000	48,34%	4.235.000.000	50,74%	4.658.500.000	52,34	5.124.350.000	55,54%	5.636.785.000	55,54%	27.004.635.000	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	34,28	34,62		34,97		35,32		35,85		36,39		36,93		36,93		
Program Pembangunan Daerah:																	
Program Pengelolaan perikanan budidaya	Persentase peningkatan ketersediaan benih	0	0	1.110.000.000	1	910.000.000	3	1.430.000.000	5	1.950.000.000	8	2.470.000.000	10	2.470.000.000	10	7.870.000.000	**Kelautan dan Perikanan**
	Persentase peningkatan ketersediaan media pengembangan benih	0	0	5.000.000.000	1	1.200.000.000	3	600.000.000	5	204.000.000	8	204.000.000	10	204.000.000	10	7.208.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase kelompok perikanan yang memiliki ketercukupan pakan ikan	0	5	1.188.000.000	25	495.000.000	35	693.000.000	55	1.089.000.000	67	1.326.600.000	69	1.326.600.000	69	4.791.600.000	
	Persentase kelompok yang menggunakan teknologi budidaya ikan	1	5	487.500.000	15	300.000.000	25	312.500.000	55	900.000.000	56	712.500.000	58	712.500.000	58	2.712.500.000	
	Persentase kelompok perikanan yang menggunakan metode budidaya yang berorientasi agribisnis	3	10	1.000.000.000	15	1.500.000.000	25	2.500.000.000	55	5.500.000.000	56	5.600.000.000	58	5.600.000.000	58	16.100.000.000	
	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang terlatih	0	0	175.000.000	1	525.000.000	5	875.000.000	10	1.225.000.000	17	2.275.000.000	19	2.275.000.000	19	5.075.000.000	
	Persentase peningkatan luas lahan perikanan budidaya (kolam)	1	1	1.202.000.000	2	2.029.500.000	5	2.759.500.000	10	3.392.000.000	17	4.092.000.000	19	4.092.000.000	19	13.475.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengelolaan perikanan tangkap	Persentase peningkatan ketersediaan sarana perikanan tangkap	2	6	3.550.000.000	8	7.980.000.000	11	5.945.000.000	15	6.735.000.000	17	8.160.000.000	19	8.160.000.000	19	32.370.000.000	
	Persentase nelayan yang terlatih	2	2	900.000.000	3	350.000.000	8	500.000.000	16	675.000.000	25	875.000.000	27	875.000.000	27	3.300.000.000	
	Persentase kelompok nelayan yang mendapat bantuan permodalan	2	2	750.000.000	6	175.000.000	13	225.000.000	22	325.000.000	35	575.000.000	37	575.000.000	37	2.050.000.000	
	Persentase kelompok nelayan yang menggunakan metode penangkapan ikan yang berorientasi bisnis	4	10	2.210.000.000	15	1.710.000.000	25	2.021.000.000	55	540.000.000	56	780.000.000	58	780.000.000	58	7.261.000.000	
Program Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase kawasan perikanan tangkap yang terbebas dari penggunaan	1	6	540.000.000	13	630.000.000	22	810.000.000	34	1.080.000.000	49	1.350.000.000	51	1.350.000.000	51	4.410.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	racun ikan dan setrum																
Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase peningkatan ketersediaan sarana penjaminan mutu	1	1	2.660.000.000	3	2.160.000.000	6	2.471.000.000	9	990.000.000	12	1.230.000.000	14	1.230.000.000	14	9.511.000.000	
	Persentase produk perikanan yang tidak mengandung zat kimia berbahaya	0	20	75.000.000	40	75.000.000	60	75.000.000	80	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	375.000.000	
Sasaran: Meningkatnya realisasi penanaman modal	Persentase peningkatan realisasi PMDN	0,84			2,37		3,17		4,02		4,89		4,94		4,94		
	Persentase peningkatan realisasi PMA	0,5			0,54		0,56		0,58		0,61		0,64		0,64		
Program Pembangunan Daerah:																	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Tingkat kemudahan perizinan investasi	N/A	N/A	-	0,84	431.456.300	1,54	474.601.930	2,37	522.062.123	4,02	574.268.335	4,89	631.695.168	4,89	2.634.083.856	**Penanaman Modal**
Program Promosi penanaman modal	Persentase promosi investasi langsung yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	-	20%	1.160.462.000	40%	1.277.000.000	60%	1.404.200.000	80%	1.544.575.000	100%	1.699.000.000	100%	7.085.237.000	
Program Pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	N/A	N/A	-	20,84%	640.000.000	32,08%	704.000.000	35,29%	774.400.000	38,83%	851.840.000	42,70%	937.024.000	42,70%	3.907.264.000	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP	N/A	60%	350.000.000	70%	381.500.000	80%	419.650.000,0	90%	409.800.000	100%	481.150.000	100%	481.150.000	100%	2.042.100.000	
Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,42			0,7		0,79		0,88		0,99		1,12		1,12		
Program Pembangunan Daerah:																	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan	25	25	100.000.000,00	40	7.902.000.000	55	7.850.000.000	70	7.700.000.000	85	7.700.000.000	100	9.300.000.000	100	36.452.000.000	**Pariwisata**
Program Pemasaran pariwisata	Persentase pemasaran destinasi wisata yang berhasil	10	10	-	28	1.600.000.000	46	1.600.000.000	64	1.600.000.000	82	1.600.000.000	100	1.600.000.000	100	8.000.000.000	
Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin	30	30	-	44	6.450.000.000	58	2.175.000.000	72	1.450.000.000	86	1.450.000.000	100	1.450.000.000	100	12.250.000.000	
	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat omzetnya	25	25	-	40	875.000.000	55	775.000.000	70	775.000.000	85	775.000.000	100	775.000.000	100	3.975.000.000	
Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	7,59			7,9		7,95		8,12		8,18		8,44		8,44		
Program Pembangunan Daerah:																	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase kelompok pedagang yang menerapkan metode marketing mix (4Ps)	na	na	-	6%	500.000.000	18%	500.000.000	35%	500.000.000	65%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.500.000.000	**Perdagangan**
Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar tradisional yang memiliki sarana berkondisi baik	47%	na	-	53%	3.000.000.000	63%	4.000.000.000	70%	4.000.000.000	83%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	21.000.000.000	
Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	1,43			1,51		1,55		1,59		1,63		1,71		1,71		
Program Pembangunan Daerah:																	
Program Perencanaan dan pembangunan industri	Persentase pelaku IKM yang terlatih	90 IKM	Na	-	16%	350.000.000	18%	350.000.000	20%	350.000.000	22%	350.000.000	24%	350.000.000	24%	1.750.000.000	Perindustrian
(Prioritas program ini juga diberikan kepada project bambu nasional	Tingkat kelancaran ketersediaan bahan dasar produksi	75%	na	-	75%	540.000.000	80%	540.000.000	85%	540.000.000	90%	540.000.000	100%	540.000.000	100%	2.700.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
di Ngada)	Persentase IKM yang mendapat bantuan permodalan	90 IKM	na	-	4%	120.000.000	12%	120.000.000	19%	120.000.000	27%	120.000.000	38%	120.000.000	38%	600.000.000	
	Persentase IKM yang menggunakan teknologi tepat guna	415 IKM	na	-	17%	800.000.000	18%	800.000.000	20%	800.000.000	22%	800.000.000	23%	800.000.000	23%	4.000.000.000	
	Persentase IKM yang menerapkan metode industri berorientasi bisnis	1563 IKM	1563 IKM	-	3%	150.000.000	4%	150.000.000	5%	150.000.000	6%	150.000.000	8%	150.000.000	8%	750.000.000	
Tujuan: Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Inflasi	1,84			1,84		1,84		1,84		1,84		1,84		1,84		
Sasaran: Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa	Indeks Harga Konsumen	106,28			110,23		112,26		114,32		116,42		118,57		118,57		
Program Pembangunan Daerah:																	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase peningkatan stabilitas ketersediaan barang pokok dan barang penting	64%	na	-	71%	850.000.000	79%	850.000.000	86%	850.000.000	93%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	4.250.000.000	**Perdagangan**
Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase penurunan kasus sengketa perdagangan	Na	-	-	50%	1.110.000.000	40%	500.000.000	30%	500.000.000	20%	500.000.000	10%	200.000.000	10%	2.810.000.000	
Sasaran: Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks ketahanan pangan	78,24			79,24		79,74		80,24		80,74		81,55		81,55		
Program Pembangunan Daerah:																	
Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase peningkatan stok cadangan pangan	1	1	200.000.000	1	250.000.000	2	300.000.000	3	350.000.000	4	400.000.000	5	400.000.000	5	1.500.000.000	**Pangan**

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase peningkatan ketersediaan lumbung pangan dan sarana pendukungnya	22	22	0	46	1.900.000.000	60	1.900.000.000	73,33	1.900.000.000	86,67	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	5.300.000.000	
Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase lembaga distribusi pangan yang berkembang baik (sesuai tahapan perkembangan)	16	16	500.000.000	16	375.000.000	32	525.000.000	48	525.000.000	64	525.000.000	100	525.000.000	100	2.450.000.000	
	Persentase toko tani yang aktif	NA	na	0	20	400.000.000	40	400.000.000	60	400.000.000	80	400.000.000	100	400.000.000	100	2.000.000.000	
	Persentase peningkatan diversifikasi dan pengolahan pangan non-nasi	8,3	83	0	12,5	1.100.000.000	25	1.100.000.000	50	1.100.000.000	75	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	5.500.000.000	
Program Pengawasan keamanan pangan	Persentase penurunan penggunaan obat kimia di luar ambang batas untuk produk pangan	100	100	0	100	400.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	2.150.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan daerah rawan pangan	49,67	49,67	0	60,26	1.250.000.000	73,51	1.250.000.000	80,13	1.250.000.000	86,75	1.250.000.000	100	1.250.000.000	100	6.000.000.000	
Tujuan: Meningkatnya pemerataan kesejahteraan	Indeks Gini	0,326			0,316		0,312		0,305		0,299		0,292		0,292		
Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap perekonomian	Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat	0			1,05		1,10		1,18		1,27		1,36		1,36		
	Persentase peningkatan kelas usaha kecil ke menengah	5,6			6,0		6,3		6,5		6,7		6,9		6,9		
Program Pembangunan Daerah:																	
Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang meningkat kualitas tata kelolanya	50 Koperasi	0	0	8%	450.000.000	16%	450.000.000	24%	650.000.000	58%	655.000.000	68%	675.000.000	68%	2.880.000.000	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Persentase produk usaha kecil yang tersertifikasi	5%	5%	-	24%	250.000.000	24%	275.000.000	24%	300.000.000	24%	325.000.000	24%	350.000.000	24%	1.500.000.000	
Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan kapasitas produksi UKM	17%	17%	-	27%	850.000.000	37%	950.000.000	47%	1.000.000.000	57%	1.050.000.000	67%	950.000.000	67%	4.800.000.000	
	Persentase peningkatan kapasitas pemasaran produk UKM	5%	5%	-	9%	250.000.000	13%	250.000.000	17%	250000.000.	21%	250.000.000	24%	250.000.000	24%	1.250.000.000	
Tujuan: Menurunnya kemiskinan	Tingkat kemiskinan	12,51	11,34		11,14		10,71		10,51		10,33		9,54		9,54		
Sasaran: Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	106,26	110,19		111,82		113,44		115,07		116,70		118,33		118,33		
Program Pembangunan Daerah:																	
Program Perencanaan dan pembangunan industri	Persentase IKM/ kelompok petani yang mengembangkan produk olahan hasil pertanian	192 IKM	-	-	12%	2.200.000.000	16%	2.200.000.000	20%	2.200.000.000	22%	2.200.000.000	25%	2.200.000.000	25%	11.000.000.000	**Perindustrian**

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase produk olahan hasil pertanian yang bersertifikat SNI	N/A	N/A	-	8%	100.000.000	12%	100.000.000	19%	100.000.000	27%	100.000.000	35%	100.000.000	35%	500.000.000	
Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase kelompok petani yang menerapkan metode marketing mix (4Ps)	N/A	-	-	20%	600.000.000	40%	600.000.000	60%	600.000.000	80%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	3.000.000.000	**Perdagangan**
Sasaran: Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Nilai Tukar Nelayan	27,68			49,82		59,79		71,75		86,1		103,32		103,32		
Program Pembangunan Daerah:																	
Program Perencanaan dan pembangunan industri	Persentase IKM/ kelompok pembudidaya ikan/ kelompok nelayan yang mengembangkan produk olahan hasil pertanian	na	-	-	14,29%	250.000.000	20%	250.000.000	25,71%	250.000.000	31,43%	250.000.000	37,15%	250.000.000	37,15%	1.250.000.000	**Perindustrian**
	Persentase produk olahan hasil perikanan yang	na	-	-	20%	100.000.000	40%	100.000.000	60%	100.000.000	80%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	bersertifikat SNI																
Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase kelompok nelayan yang menerapkan metode marketing mix (4Ps)	na	na	-	20%	500.000.000	40%	500.000.000	60%	500.000.000	80%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.500.000.000	**Perdagangan**
Tujuan: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,25	68,25	-	68,29		68,30		68,36		68,38		68,41		68,41		
Sasaran: Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	85,07	85,07		84.65		84.25		83.95		83.50		83.10		83.10		
Program Pembangunan Daerah																	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kendaraan bermotor yang lulus uji emisi	0	0	-	0	130.000.000	100%	370.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	1.850.000.000	**Perhubungan**
Program Pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase penanganan kasus kebakaran lahan	NA	8,10%	400.000.000	16,20%	440.000.000	24,30%	484.000.000	32,40%	532.400.000.	40,50%	585.640.000	42%	585.640.000	40%	2.442.040.000	**Lingkungan Hidup**

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran: Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	50,00	50,50		51		51,5		52		52,5		53		53		
Program Pembangunan Daerah:																	
Program Pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase perusahaan yang mengelola limbah sesuai ketentuan yang berlaku	55%	60%	550.000.000	65%	605.000.000	70%	665.500.000	75%	732.050.000	80%	805.255.000	85%	805.255.000	85%	3.357.805.000	**Lingkungan Hidup**
	Persentase sumber-sumber air yang diawasi	na	4,0%	75.000.000	8,0%	80.000.000	12%	85.000.000	16%	90.000.000	20%	95.000.000	24%	95.000.000	24%	425.000.000	
	Persentase sumber-sumber air yang direhabilitasi	9,9%	9,9%	0	11,9%	160.000.000	13,9%	170.000.000	15,9%	180.000.000	17,9%	190.000.000	19,9%	190.000.000	19,9%	890.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang taat ijin lingkungan, ijin PPLH dan LH	75%	75%	100.000.000	79%	110.000.000	86%	120.000.000	90%	130.000.000	95%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	740.000.000	**Lingkungan Hidup**

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran: Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69,320	69,320		69,321		69,322		69,323		69,324		69,325		69,325		
Program Pembangunan Daerah:																	
Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Persentase peningkatan luas RTH	548 Ha	0,12%	300.000.000	0,18%	330.000.000	0,20%	363.000.000	0,24%	399.300.000	0,29%	439.230.000.	0,35%	439.230.000	0,27%	1.831.530.000	**Lingkungan Hidup**
	Persentase RTH yang berkondisi baik	1,40%	1,40%	2.400.000.000	1,60%	2.640.000.000	1,64%	2.904.000.000	1,71%	3.194.400.000	1,77%	3.513.840.000	1,84%	3.513.840.000	1,84%	18.166.080.000	
	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	56,7 ha	0	0	66,7ha	100.000.000	76,7 ha	110.000.000	86,7 ha	121.000.000	96.7 ha	133.100.000	106,7ha	146.410.000	106,7 ha	610.510.000	
Sasaran: Menurunnya volume sampah	Persentase volume sampah yang tertangani	18,63	18,63		19		20		21		22		23		23		
Program Pembangunan Daerah:																	
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sarana persampahan berkondisi baik	58,3	60%	428.000.000	62%	3.500.000.000	64,00%	3.500.000.000	65,50%	3.500.000.000	66,70%	3.850.000.000	67,70%	4.235.000.000	67,70%	19.013.000.000	**Lingkungan Hidup**
	Persentase sampah di TPA yang dikelola menggunakan metode *sanitary landfill*	16,60%	16,60%	1.845.486.400	16,60%	3.850.000.000	16,60%	4.235.000.000	100%	4.658.500.000	100%	5.124.350.000	100%	5.124.350.000	100%	23.948.836.400	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase kelompok pengelola sampah yang menerapkan metode 3R	0%	0%	0	20%	300.000.000	40%	330.000.000	60%	363.000.000	80%	399.300.000	100%	439.230.000	100%	1.831530.000	
Misi 2: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia																	
Tujuan: Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	**Indikator tujuan:** Usia Harapan Hidup	68,04	68,44		68,84		69,24		69,64		70,04		70,44		70,44		
	Indeks Pembangunan Manusia	67,88	68,8		69,3		69,7		70,1		70,6		71,1		71,1		
Sasaran: Semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat	**Indikator sasaran:** Angka Kematian Ibu (AKI)	0	102/100.000 KH		102/100.000 KH		102/100.000 KH		102/100.000 KH		102/100.000 KH		102/100.000 KH		102/100.000 KH		
	Angka Kematian Bayi (AKB)	10,69/100KH	34/1000KH		34/1000KH		34/1000KH		34/1000KH		34/1000KH		34/1000KH		34/1000KH		

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Angka Kematian Balita (AKABA)	10,69/100KH	34/1000KH		34/1000KH		34/1000KH		34/1000KH		34/1000KH		34/1000KH		34/1000KH		
	Angka Stunting	15,7	14,36		13,02		11,68		10,34		9,0		9,0		9,0		
	Angka Kesakitan	7,23	6,78		6,33		5,88		5,43		5,0		5,0		5,0		
Program Pembangunan Daerah																	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	62,51	100	52.388.503.356	100	159.118.001.250	100	167.185.801.375	100	183.904.381.513	100	202.294.819.664	100	222.524.301.630	100	987.415.808.788	**Kesehatan**
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	61,31	100		100		100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	61,96	100		100		100		100		100		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Cakupan pelayanan balita sesuai standar	89,90	100		100		100		100		100		100		100		
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100		100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita PTM dan PM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	56,82	100		100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	71,79	100		100		100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat	0,11	0,12		0,13		0,14		0,15		0,16		0,17		0,18		
	Persentase penduduk usia pendidikan	72,57	100		100		100		100		100		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan																
	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	61,62	100		100		100		100		100		100		100		
	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	71,79	100		100		100		100		100		100		100		
	Persentase penduduk dengan gangguang jiwa berat yang terlayani kesehatan	74,65	100		100		100		100		100		100		100		
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RS yang sesuai standar	NA	100		100		100		100		100		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase ketercukupan sediaan farmasi	94,36	95,49	96.704.700	96,62	150.241.00	97,75	210.265.100	98,88	231.291.610	100	254.420.771	100	279.862.848	100	1.222.786.020	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga ber PHBS	24,29	26,00	14.281.408.800	27,43	3.190.701.120	30,57	3.885.466.032	33,71	4.274.012.635	36,85	4.701.413.899	40	5.171.555.289	40	35.504.557.775	
Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Rasio tenaga medis dan paramedis per satuan penduduk	0,67	0,68		0,69	7.471.686.200	0,70	7.471.686.200	0,71	8.218.854.820	0,72	9.040.740.302	0,73	9.944.814.332	0,74	42.147.781.854	
	Persentase SDMK sesuai standar	NA	100%		100%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	700.000.000	100%	800.000.000	100%	900.000.000	100%	3.500.000.000	
Sasaran: Terkendalinya pertumbuhan penduduk	**Indikator sasaran:** Angka Kelahiran Total (TFR)	3,7	3,5		3,3		3,1		2,9		2,7		2,5		2,5		
Program Pembangunan Daerah																	
Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rasio akseptor KB per 100 PUS	61,97	65,15	5.377.781.000	65,30	6.184.448.150	65,45	6.493.670.557	66,15	6.818.354.084	66,30	7.159.271.788	66,45	7.517.235.377	66,45	39.550.760.956	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase kebutuhan KB yang tidak terlayani (*unmeet need)*	6,32	6,07		5,82		5,57		5,32		5,07		4,82		4,82		
	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	NA	60		61		62		63		64		65		65		
Sasaran: Menurunnya Keluarga Pra Sejahtera	**Indikator Sasaran:** Persentase Keluarga Pra Sejahtera	26.50	25,84		25,19		24,56		23,95		23,35		22,75		22,75		
Program Pembangunan Daerah																	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase kelompok kegiatan yang aktif	NA	54	1.315.321.200	56	1.340.840.000	57	1.522.503.400	58	1.522.403.400	59	1.598.028.500	60	1.598.028.500	60	8.897.125.000	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
Sasaran: Meningkatnya akses pendidikan	**Indikator Sasaran:** Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	18,50	30,60		32,17		33,23		35		40,11		41,77		41,77		**Pendidikan**

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	92,37	93,45		94,20		94,45		95,30		95,40		96,48		96,48		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	83,14	83,15		84,20		85,30		86,30		87,21		88,12		88,12		
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,7	12,9		13,1		13,3		13,5		13,7		13,9		13,9		
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,52	8,73		8,94		9,15		9,36		9,57		9,78		9,78		
Program Pembangunan Daerah																	
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sekolah pendidikan SD dalam kondisi baik	46%	48%	116.040.010.870	56%	125.621.000.000	67%	128.104.700.000	78%	137.813.954.000	89%	139.839.454.000	100%	140.287.254.000	100%	787.706.372.870	**Pendidikan**
	Persentase SMP dalam kondisi baik	40%	47%		52%		63%		71		78		85		85		

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	NA	100		100		100		100		100		100		100		
	Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	NA	100		100		100		100		100		100		100		
Sasaran: Meningkatnya kualitas pendidikan	**Indikator Sasaran:** Rata-rata nilai ujian siswa	58	60		62		65		68		70		72		72		
	Nilai Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	65	68		69		70		73		75		77		77		

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Nilai akreditasi lembaga penyelenggara PAUD	B	B		B		B		A		A		A		A		
Program Pembangunan Daerah																	
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar	0,087	0,087	1.336.197.280	0,091	954.000.000	0,095	948.000.000	0,099	948.000.000	0,103	948.000.000	0,107	948.000.000	0,107	6.082.197.280	**Pendidikan**
	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah pertama	0,080	0,080		0,082		0,084		0,086		0,088		0,090		0,090		
	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompetensi	25%	30%		35%		40%		45%		50%		55%		55%		
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sekolah yang terakreditasi	40% PNF	45% PNF		50% PNF	125.621.000.000	60% PNF	128.104.700.000	70% PNF	137.813.954.000	80% PNF	139.839.454.000	90% PNF	168.511.254.000	100% PNF	699.890.362.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase PAUD yang terstandarisasi	48%	54%		61%		74%		88%		100%		100%		100%		
Sasaran: Meningkatnya kualitas dan layanan Perpustakaan Daerah	**Indikator sasaran:** Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Na	60		62		64		66		68		70		70		
Program Pembangunan Daerah																	
Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	NA	0,50		0,51	2.206.400.000	0,52	529.220.000	0,53	445.372.000	0,54	561.889.200	0,55	518.808.120	0,55	4.299.189.220	**Perpustakaan**
	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional	NA	1%		2%		35		4%		5%		6%		6%		
	IKM layanan perpustakaan	NA	80,0		80,5		81,0		81,5		82		82,5		82,5		

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran: Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	**Indikator Sasaran:** Peringkat pada event olahraga daerah (PORPROV)	3	3		3		3		2		2		2		2		
	Tingkat/Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Na	5%		10%		15%		20%		25%		30%		30%		
Program Pembangunan Daerah																	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pelatih yang bersertifikat	1,23%	1,5%	1.105.000.000	2%	1.875.000.000	2,5%	1.992.500.000	3%	2.121.250.000	3,5%	2.262.375.000	4%	2.416.112.500	4%	11.682.237.500	**Kepemudaan dan Olahraga**
	Cakupan pembinaan atlet muda	NA	45		50		60		70		80		90		90		
	Cakupan klub/cabang olahraga yang difasilitasi	52%	55%		58%		61%		64%		67%		70%		70%		

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	NA	50		55		60		65		70		75		75		
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	NA	60%	499.993.100	70%	980.000.000	80%	1.078.000.000	90%	1.185.800.000	100%	1.304.380.000	100%	1.434.818.000	100%	1.804.373.100	
	Tingkat/persentase pemuda dalam bidang kewirausahaan	NA	5%		10%		15%		20%		25%		30%		30%		
Sasaran: Meningkatnya keberdayaan perempuan dan partisipasinya dalam pembangunan	**Indikator sasaran:** Indeks Pemberdayaan Gender	59,22	70		70,57		71,14		71,71		72,28		72,85		72,85		
Program Pembangunan Daerah																	
Program Perlindungan Perempuan	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100%	100%	-	100%	160.000.000	100%	150.000.000	100%	140.000.000	100%	130.000.000	100%	120.000.000	100%	830.640.000	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan yang menjadi pengambil keputusan pada jabatan struktural	9,04%	9,04%	-	10%	400.000.000	10,24%	700.000.000	10,74%	700.000.000	10,99%	700.000.000	11,24%	700.000.000	11,24%	3.200.000.000	
	Persentase perempuan menjalankan usaha mandiri	1,58%	1,58%		1,59%		1,60%		1,62%		1,63%		1,65%		1,65%		
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Kehidupan Anak	**Indikator Sasaran:** Status Kabupaten Layak Anak	NA	Pratama		Pratama		Madya		Madya		Madya		Nindya		Nindya		
Program Pembangunan Daerah																	
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	100%	-	100%	160.000.000	100%	150.000.000	100%	140.000.000	100%	130.000.000	100%	120.000.000	100%	705.720.000	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase desa layak anak	0%	16,6%		33,2%	190.000.000	49,8%	250.000.000	66,14%	190.000.000	83%	250.000.000	100%	190.000.000	100%	1.070.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Tujuan: Menurunnya kemiskinan	**Indikator Tujuan:** Tingkat Kemiskinan	12,51	11,34		11,14		10,71		10,51		10,33		9,54		9,54		
Sasaran: Menurunnya tingkat pengangguran	**Indikator Sasaran:** Tingkat Pengangguran Terbuka	4,69	4,08		3,78		3,48		3,18		2,88		2,58		2,58		
Program Pembangunan Daerah																	
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kesesuaian tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja	33%	38%	-	43%	1.770.000.000	48%	545.000.000	53%	827.000.000	58%	852.000.000	63%	863.000.000	635	4.857.000.000	**Tenaga Kerja**
	Persentase pencari kerja yang memiliki usaha sendiri	53%	55%	-	58%	1.405.000.000	63%	130.000.000	68%	357.000.000	73%	332.000.000	75%	288.000.000	75%	2.512.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (termasuk disabilitas)	NA	5%		10%	35.000.000	15%	36.000.000	20%	40.000.000	25%	41.000.000	30%	44.500.000	30%	196.500.000	
MISI 3 MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR																	
Tujuan: Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan transportasi	**Indikator Tujuan:** Rata-rata kecepatan tempuh antar kawasan-kawasan prioritas	27,78 km/jam	28,00		28,16		28,54		28,93		29,32		29,70		29,70		
Sasaran: Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan	**Indikator Sasaran:** Persentase panjang jalan pada ruas prioritas dalam kondisi baik	69,45%	70,41%		71,37%		72,33%		73,29%		74,25%		75,21%		75,21%		
Program Pembangunan Daerah:																	
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	69,45%	69.45%	140000000000	70,83%	350000000000	72,21%	350000000000	73,60%	350000000000	74,98%	35000000000000	76,36%	35000000000000	76,36%	175000000000000	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih diwilayah kabupaten	NA	NA	100000000	100%	500000000	100%	500000000	100%	500000000	100%	500000000	100%	500000000	100%	2600000000	
	Indikator Tujuan: Persentase penurunan angka kecelakaan	23 kasus	21,00%		21,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		
Sasaran: Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	**Indikator Sasaran:** Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	38,68%	46,68%		54,68%		62,68%		70,68%		78,68%		86,68%		86,68%		
Program Pembangunan Daerah:																	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase terminal dalam kondisi baik	46,68%	46,68%		54,68%	125000000	62,68%	125000000	70,68%	125000000	78,68%	5025000000	86,68%	75000000	86,68%	5475000000	**Perhubungan**

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik	27,36%	27,36%	100000000	41,36%	1236250000	55,36%	1036250000	69,36%	936250000	69,36%	936250000	83,36%	525000000	83,36%	4670000000	
	Indikator Tujuan: Persentase kawasan pariwisata yang dapat diakses angkutan umum layak	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Sasaran: Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan transportasi umum	**Indikator Sasaran:** Persentase peningkatan akses angkutan umum	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pembangunan Daerah:																	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan layanan angkutan umum layak	86,67%	86,67%		86,67%	125000000	86,67%	75000000	100%	75000000	100%	125000000	100%	75000000	100%	475000000	**Perhubungan**

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar	10%	10%		65%	1216496340	75%	100000000	80%	100000000	85%	100000000	90%	100000000	90%	12564963400	
	Persentase kendaraan umum lolos uji kelayakan	0%	0%		0%	50000000	100%	100000000	100%	50000000	100%	100000000	100%	50000000	100%	350000000	
Tujuan: Meningkatnya kelayakhunian	**Indikator Tujuan:** Rasio pemukiman kumuh	13,4	12,13		10,6		7,9		5,1		2,4		0,0		0,0		
Sasaran: Meningkatnya akses pemukiman layak huni	**Indikator Sasaran:** Rasio rumah layak huni	78,00	79,00		81,00		83,00		85,00		87,00		88,00		88,00		
Program Pembangunan Daerah:																	
Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya	12,03%	12,03%	2700000000	23,27%	7650000000	35,30%	7650000000	47,32%	7650000000	59,35%	7650000000	71,38%	7650000000	71,38%	38250000000	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	NA	NA		100%	11000 00000	100%	11000 00000	100%	11000 00000	100%	1100000 000	100%	1100000 000	100%	550000 0000	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**
	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten	NA	NA		100%	10000 0000	100%	10000 0000	100%	10000 0000	100%	1000000 00	100%	1000000 00	100%	500000 000	
	Indikator Sasaran: Persentase kawasan permukiman dan perumahan dengan PSU layak	NA	89,09%		90,91%		92,73%		94,55%		96,36%		98,18%		98,18%		
Program Pembangunan Daerah:																	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persentase pemukiman yang memiliki jalan lingkungan	33,27%	33,27%	10000 00000	33,02%	75000 00000	33,66%	75000 00000	34,31%	75000 00000	34,96%	7500000 000	35,60%	7500000 000	35,60%	375000 00000	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(PSU)	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	35,47%	35,47%	1000000000	55,47%	2400000000	75,47%	2400000000	95,47%	2400000000	98,47%	2400000000	100%	2400000000	100%	1200000000	
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses listrik	72,03%	72,03%		77%	1025150000	82%	1025150000	92%	1025150000	100%	1025150000	100%	1025150000	100%	5125750000	
	Indikator Sasaran: Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	76,09%	80%		84%		88%		92%		96%		100%		100%		
Program Pembangunan Daerah:																	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Sumber Air	Persentase Rumah Tangga memiliki akses SPAM	48,43%	48,43%	1260000000	52,98%	250000000000	57,13%	250000000000	61,29%	250000000000	65,29%	25000000000	69,29%	25000000000	69,29%	1250000000000	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Minum																	
	Indikator Sasaran: Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	67,58%	70,27%		72,96%		75,65%		78,34%		81,03%		83,72%		83,72%		
Program Pembangunan Daerah:																	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	67,58%	67,58%	840000000	70,27%	1075000000	72,96%	1100000000	75,65%	1100000000	78,34%	11000000000	81,03%	11000000000	81,03%	54750000000	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran: Meningkatnya kualitas tata ruang dan bangunan	**Indikator Sasaran:** Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan	62,71%	67,11%		71,51%		75,91%		80,31%		84,71%		89,11%		89,11%		
Program Pembangunan Daerah:																	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kawasan memiliki rencana tata ruang	NA	NA	300000000	7,14%	1000000000	14,28%	1000000000	21,42%	1000000000	28,56%	10000000000	35,70%	10000000000	35,70%	5300000000	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	Persentase pelanggaran tata ruang yang ditindaklanjuti	NA	NA		100%	500000000	100%	500000000	100%	750000000	100%	75000000	100%	100000000	100%	350000000	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Taman Kota yang tertata	100%	100%	100.000.000	100%	110000000	100%	121000000	100%	133100000	100%	146410000	100%	146410000	100%	610510000	**Lingkungan Hidup**

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Kawasan Permukiman	Persentaase PSU pendukung tata kota dalam kondisi baik	6%	6%	15000 00000	12%	75000 00000	18%	75000 00000	24%	75000 00000	30%	7500000 000	38%	7500000 000	38%	375000 00000	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase jumlah dokumen perencanaan ketransmigrasian	NA	NA		20%	16000 0000	40%	65000 0000	60%	87500 0000	80%	7950000 00	100%	3050000 00	100%	278500 0000	**Transmigrasi**
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase warga transmigrasi yang mendapat pelatihan dan pendampingan	NA	NA		15%	20000 0000	30%	26000 0000	45%	47000 0000	65%	4900000 00	90%	5000000 00	90%	192000 0000	
	Indikator Sasaran: Persentase bangunan gedung sesuai dengan standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pembangunan Daerah:																	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase ketersediaan bangunan publik terhadap kebutuhan	NA	NA		100%	330000000	100%	330000000	100%	350000000	100%	35000000000	100%	35000000000	100%	171000000000	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	Persentase bangunan publik rusak diperbaiki	NA	NA		100%	1000000000	100%	1000000000	100%	2000000000	100%	2000000000	100%	2500000000	100%	8500000000	
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase kasus pertanahan yang diselesaikan	100%	100%		100%	375000000	100%	375000000	100%	375000000	100%	375000000	100%	375000000	100%	1875000000	**Pertanahan**
Program Penatagunaan Tanah	Persentase tanah aset pemerintah kabupaten bersertifikat	70,85%	70,85%		77,33%	300000000	83,81%	300000000	90,28%	300000000	96,76%	300000000	100%	300000000	100%	1500000000	
Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase tanah ulayat yang ditetapkan	NA	NA		8%	250000000	16%	250000000	24%	250000000	32%	250000000	40%	250000000	40%	1250000000	
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang teriventarisasi	NA	NA		8%	250000000	16%	250000000	24%	250000000	32%	250000000	40%	250000000	40%	1250000000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Tujuan: Menurunnya risiko bencana	**Indikator Tujuan:** Indeks Risiko Bencana	115,7	109,9		104,1		98,3		92,5		86,7		80,9		80,9		
Sasaran: Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	**Indikator Sasaran:** Angka korban bencana	170	150		100		70		40		30		0		0		
Program Pembangunan Daerah:																	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase daerah rawan longsor yang memiliki tembok penahan memadai	40%	40%	500000000	50%	150000000	60%	175000000	70%	175000000	80%	200000000	90%	500000000	90%	1200000000	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	Persentase daerah rawan yang memiliki pengendali abrasi memadai	50%	50%	800000000	60%	300000000	70%	300000000	80%	300000000	90%	300000000	100%	300000000	100%	1500000000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase titik genangan air di IKK yang tertangani	31,76%	31,76%		33,68%	150000000000	59,68%	150000000000	79,69%	200000000000	100%	2000000000000	100%	2000000000000	100%	9000000000000	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program penanggulangan bencana	Persentase desa tangguh bencana	NA	NA		5%	658100000000	10%	757100000000	15%	771500000000	20%	7870000000000	25%	8025000000000	25%	3776200000000	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**
	Persentase korban bencana yang mendapatkan penanganan	NA	NA		100%	100000000000	100%	100000000000	100%	150000000000	100%	15000000000000	100%	20000000000000	100%	70000000000000	
MISI 4 MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DAN MELAYANI																	
Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	**Indikator Tujuan:** Indeks Reformasi Birokrasi	50,06 (CC)	51 (CC)		55 5 (CC)		59 (CC)		63 (B)		67 (B)		71 (BB)		71 (BB)		
Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**Indikator Sasaran:** Nilai SAKIP	51,85 (CC)	54 (CC)		58 (CC)		62 (B)		67 (B)		73 (BB)		75 (BB)		75 (BB)		

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pembangunan Daerah:																	
Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase keterpaduan perencanaan bidang ekonomi dan Fisik dan Prasarana	na	100	300.000.000	100	465.787.267	100	512.365.994	100	563.602.593	100	619.962.852	100	681.959.138	100	3.143.677.844	**Perencanaan**
	Persentase keterpaduan perencanaan bidang sosial budaya	na	96	150.000.000	100	287.819.098	100	316.601.008	100	348.261.109	100	383.087.219	100	421.395.941	100	1.907.164.375	
Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keterpaduan RPJMD dengan renstra	98	98	1.585.022.040	100	50.000.000	100	50.000.000	100	500.000.000	100	50.000.000	100	17.685.284.375	100	19.920.306.415	**Perencanaan**
	Persentase keterpaduan RPJMD dengan RKPD	98	98	679.295.160	100	700.000.000	100	770.000.000	100	847.000.000	100	931.700.000	100	1.024.870.000	100	4.952.865.160	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase realisasi target program RPJMD	70	70	49.500.000	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.250.000	100	115.762.500	100	121.550.625	100	602.063.125	
	Persentase hasil musrenbang yang ditindaklanjuti dalam penganggaran daerah	98	98	648.869.500	100	400.000.000	100	420.000.000	100	441.000.000	100	463.050.000	100	486.202.500	100	2.859.122.000	
Program administrasi umum	Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal BB	na	5	930.000.000	10	930.000.000	20	480.000.000	25	570.000.000	30	570.000.000	45	627.000.000	45	4.107.000.000	**Sekretariat Daerah**
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi 8 area perubahan reformasi birokrasi	20	20	-	50	183.044.300	60	182.784.300	70	183.284.300	80	189.784.300	100	189.784.300	100	928681500	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Indikator Sasaran: Nilai EKPPD	27.500	28.000		28.500		29.000		29.500		30.000		30.500		30.500		
Program Pembangunan Daerah:																	
Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	90	90	2.752.489.537	100	779.523.010	100	483.606.910	100	788.656.910	100	486.706.910	100	796.806.910	100	6.087.790.187	**Sekretariat Daerah**
	Persentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan oleh pemerintah provinsi dan pusat	90	90	600.000.000	100	602.316.790	100	631.411.510	100	700.300.430	100	747.147.387	100	787.755.892	100	4.068.932.009	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	100	100	150.000.000	100	300.000.000	100	330.000.000	100	135.784.300	100	135.784.300	100	135.784.300	100	1.187.352.900	**Sekretariat Daerah**
	Persentase realisasi serapan anggaran tepat waktu	80	80	424.052.104	80	400.000.000	82	400.000.000	84	400.000.000	86	400.000.000	88	400.000.000	90	2.424.052.104	
	Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan	75	75	968.208.416	75	1.200.000.000	80	1.200.000.000	85	1.200.000.000	87	1.200.000.000	90	1.200.000.000	90	6.968.208.416	
	Kontribusi BUMD dan BLUD terhadap PAD	0	0	-	0	237.424.000	0	250.000.000	25	205.000.000	30	205.000.000	45	225.500.000	45	1.122.924.000	**Sekretariat Daerah**
	Persentase peningkatan omzet BUMD	0	0	-	0	537.424.000	0	580.000.000	25	340.784.300	30	340.784.300	45	361.284.300	45	2.160.276.900	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase layanan dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	100%	100%	4.837.900.000	100%	5.313.058.200	100%	5.797.008.020	100%	6.353.736.485	100%	6.916.414.147	100%	7.529.033.220	100%	36.747.150.072	**Sekretariat DPRD**
Program penataan desa	Persentase desa yang memiliki dan menjalankan Perdes tentang kewenangan lokal berskala desa	100%	100%	-	100%	15.345.110	100%	16.879.621	100%	18.567.583	100%	20.424.341	100%	22.466.776	100%	93.683.431	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
	Persentase fasilitasi administrasi kewilayah desa yang terselesaikan (batas desa, kode desa)	36,2%	36,2%	-	48,80	42.837.800	61,40	250.000.000	74,00	51.833.738	86,60	57.833.738	100	300.000.000	100	702.505.276	
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang mencapai SDGs Desa	ns	45		50		60		70		80		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran: Meningkatnya integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah	**Indikator Sasaran** Indeks manajemen resiko	na	Level 1		Level 1		Level 2		Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		
Program Pembangunan Daerah:																	
Program penyelenggaraan pengawasan daerah	Persentase TLHP internal dan eksternal	55%	55%	1.100.000.000	60%	1.818.298.400	65%	1.844.667.733	70%	1.911.583.726	75%	1.937.953.060	80%	1.994.869.053	80%	1.994.869.053	**Pengawasan**
	Indikator Sasaran Nilai Survei Penilaian Integritas	Na	80		80,5		80,9		81		81,02		81,02		81,02		
Program Pembangunan Daerah:																	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program perumusan kebijakan, pendampingan, asistensi	Persentase OPD dan pemerintah desa yang menjalankan WBK-WBBM	0%	0%	100.000.000	20%	150.000.000	20%	150.000.000	25%	192.000.000	30%	229.000.000	30%	229.000.000	30%	229.000.000	**Pengawasan**
	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	75%	75%	800.000.000	80%	1.200.000.000	85%	1.200.000.000	90%	1.200.000.000	95%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	6.800.000.000	
	Indikator Sasaran Indeks Profesionalitas ASN	Na	55		60		65		70		75		81		81		
Program Pembangunan Daerah:																	
Program kepegawaian daerah	Persentase keterpenuhan kebutuhan pegawai	52,50%	52,50%	225.500.000	54,35%	520.000.000	56,18%	520.000.000	57,98%	520.000.000	59,65%	520.000.000	61,26%	520.000.000	61,26	2.835.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal "Tinggi"	18,37%	18,37%	1.353.000.000	42,85%	439.162.000	52,04%	405.022.000	64,28%	293.162.000	79,58%	184.162.000	97,95%	184.162.000	98%	2.858.670.000	**Kepegawaian**
	Persentase layanan pegawai sesuai standar pelayanan	22,22%	22,22%	1.127.500.000	44,44%	1.095.000.000	66,67%	1.115.000.000	77,78%	1.130.000.000	88,89%	1.095.000.000	100,00%	845.000.000	100	6.407.500.000	
	Persentase ASN yang terlibat dalam transformasi budaya	na	na		na		na		na		na		na		na		
Program pengembangan SDM	Persentase jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	24,88%	24,88%	-	28%	600.000.000	32%	600.000.000	36%	600.000.000	39%	600.000.000	43%	600.000.000	43%	3.000.000.000	**Pendidikan dan Pelatihan**
	Persentase jabatan struktural yang telah lulus diklat Pim Tk 2, PKA, PKP	43,80%	43,80%	-	47%	1.300.000.000	50%	1.300.000.000	53%	2.800.000.000	57%	2.800.000.000	60%	2.800.000.000	60%	11.000.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan	100%	100%	1.660.000.000	100	2.814.000.000	100	1.910.000.000	100	2.222.000.000	100	2.318.000.000	100	2.654.000.000	100	10.764.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas keuangan pemerintah daerah	**Indikator Sasaran** Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Na	50		60		65		70		75		80		80		
Program Pembangunan Daerah:																	
Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset daerah yang diinventarisasi	52,54	52,54	1.000.000.000	61,74%	1.318.120.400	71,46%	1.449.932.440	81,70%	1.594.925.684	92,47%	1.754.418.252	100%	1.929.860.078	100,00%	9.047.256.854	**Keuangan**

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP	100%	100%	200.000.000	100%	1.378.460.500	100%	1.516.306.550	100%	1.667.937.205	100%	1.834.730.926	100%	2.018.204.018	100%	8.615.639.199	
	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	14,73	14,73	60.000.000	14	818.636.000	13,5	900.499.600	13	990.549.560	12	1.089.604.516	11,75	1.198.564.968	11,75	5.057.854.644	
	Persentase deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	12,25	12,25	170.000.000.000	12	178.107.117.553	11	178.201.741.093	10	178.305.826.987	10	178.420.321.470	9	178.546.265.402	9	1.061.581.272.506	
Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	Na	na	2.000.000.000	100	4.566.163.000	100	5.174.279.300	100	5.627.307.230	100	6.148.136.953	100	6.731.051.748	100	30.246.938.231	**Keuangan**
Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas	**Indikator Sasaran** Indeks Kepuasan Masyarakat	Na	50		55		62		75		78		82		82		
Program Pembangunan Daerah:																	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program administrasi umum	Persentase OPD yang memiliki IKM minimal "Baik"	Na	10	2.316.600.200	50	400.000.000	60	440.000.000	70	484.000.000	80	532.400.000	90	585.640.000	90	2.442.040.000	**Sekretariat Daerah**
Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase SPM yang tercapai sesuai target	Na	10	2.316.600.200	80	500.000.000	90	550.000.000	100	605.000.000	100	665.500.000	100	732.050.000	100	4.905.830.160	**Sekretariat Daerah**
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan publik kecamatan sesuai standar pelayanan	50	50	-	100	2.596.588.214	100	2.789.826.185	100	2.933.880.228	100	3.083.935.187	100	3.225.363.987	100	14.629.593.802	**Kecamatan**
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa di wailayah kecamatan yang tertib menjalankan kalender pembangunan	50	50	-	100	5.571.004.000	100	5.755.385.600	100	5.846.723.840	100	5.914.506.224	100	5.968.466.846	100	29.056.086.510	
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif dalam pembangunan	100	100	2.057.000.000	100	11.200.000.000	100	11.760.000.000	100	12.348.000.000	100	12.965.400.000	100	13.613.670.000	100	63.944.070.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program pendaftaran penduduk	Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP	87,27	87,27	300.549.600	88,67	300.549.600	90,81	306.981.361	93	313.704.252	96	323.115.379	99,85	335.555.321	99,85	1.880.455.513	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	10,11	10,11	162.304.693	15,46	162.304.693	18,5	167.238.755	21,29	171.904.716	25,57	179.262.237	27,88	183.403.194	27,88	1.026.418.288	
	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KK	94,57	94,57	254.035.795	95,84	254.035.795	96,58	255.915.659	97,2	257.502.336	98,2	260.077.359	99,91	264.524.681	99,91	1.546.091.625	
Program pencatatan sipil	persentase kepemilikan dokumen akta kematian	100	100	158.880.978	100	158.880.978	100	174.590.876	100	192.049.964	100	211.254.960	100	232.380.456	100	1.128.038.212	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	4,00	4,00	370.722.282	8	370.722.282	12	407.378.710	15	448.116.582	19	492.928.239	23	542.221.063	27	2.632.089.158	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya transparansi pemerintah daerah berbasis teknologi informasi	**Indikator Sasaran:** Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,8	2		2,2		2,4		2,6		2,8		3,0		3,0		
Program Pembangunan Daerah:																	
Program aplikasi informatika	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Na	18	100.000.000	18	300.000.000	32	315.000.000	57	330.750.000	68	347.287.500	100	364.651.875	100	1.757.689.375	**Komunikasi dan Informatika**
	Persentase layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi	Na	na	-	5	100.000.000	25	105.000.000	50	110.250.000	75	115.762.500	100	121.550.625	100	552.563.125	
	Indikator Sasaran: Indeks keterbukaan informasi publik	Na	60		62		65		68		72		75		75		

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pembangunan Daerah:																	
Program informasi dan komunikasi publik	Persentase OPD yang memiliki PPID pembantu aktif	Na	na	-	60	300.000.000	70	250.000.000	75	300.000.000	80	275.000.000	90	350.000.000	90	1.475.000.000	**Komunikasi dan Informatika**
	Persentase hasil komunikasi antara kepala daerah/wakil kepala daerah dengan masyarakat yang ditindaklanjuti	Na	na	-	60	500.000.000	70	525.000.000	75	551.250.000	80	578.812.500	90	607.753.125	90	2.762.815.625	
	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Na	na	-	60	300.000.000	70	325.000.000	75	350.000.000	80	375.000.000	90	400.000.000	90	1.750.000.000	
MISI 5 MEMPERKUAT KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT MELALUI TRANSFORMASI INSTITUSI BUDAYA																	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Tujuan: Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat	**Indikator Tujuan:** Angka Kemiskinan	12,51	11,34		11,14		10,71		10,51		10,33		9,54		9,54		
	Angka Konflik Sosial	23	15		12		9		7		5		3		3		
Sasaran: Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa	**Indikator Sasaran:** Indeks Desa Membangun	0,6218	0,6342		0,6469		0,6599		0,6731		0,6865		0,6965		0,6965		
Program Pembangunan Daerah:																	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif dalam pemberdayaan masyarakat	100%	100%	-	100%	683.190.000	100%	693.190.000	100%	704.190.000	100%	716.290.000	100%	729.600.000	100%	3.526.460.000	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
	Persentase desa yang melaksanakan konservasi sumber air	Na	na		20		20		20		20		20		20		
	Persentase desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam pengembangan ekonomi masyarakat	72,5%	72,5%	-	78,00	50.000.000	83,50	55.000.000	89,00	60.500.000	94,50	66.550.000	98,20	73.205.000	100%	305.255.000	
Program administrasi pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusunan dokumen perencanaan, penganggaran,	100%	100%	-	100%	3.102.200.000	100%	1.542.420.000	100%	3.566.662.000	100%	1.866.328.200	100%	4.109.961.020	100	14.187.571.220	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	dan pelaporan tepat waktu dan sesuai ketentuan regulasi																
	Persentase BUMDes yang berkembang/mengalami peningkatan omzet dan sumbangan ke PADes	45,9%	45,9%	-	56,72	50.000.000	67,54	55.000.000	78,36	60.500.000	89,18	66.500.000	100	73.205.000	100%	305.255.000	
	Persentase BUMDesMa yang berkembang dalam mengelola potensi/aset kawasan perdesaan	25	25	-	41,67	50.000.000	58,34	55.000.000	75,01	60.500.000	91,68	66.500.000	100	73.205.000	100%	305.205.000	
	Indikator Sasaran: Persentase PMKS yang berdaya	Na	10%		13%		18%		20%		23%		25%		25%		

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pembangunan Daerah:																	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Na	3%		6%	1.200.000.000	9%	1.250.000.000	12%	1.300.000.000	15%	1.350.000.000	18%	1.400.000.000	18%	6.500.000.000	**Sosial**
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten Ngada	Na	100%		100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	650.000.000	
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan		10%		20%	880.000.000	30%	953.000.000	40%	1.026.000.000	50%	1.099.000.000	60%	1.172.000.000	60%	5.130.000.000	**Sosial**

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	kebutuhan dasar																
	Presentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	100%	100%		100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	750.000.000	
	Presentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	Na	100%		100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500.000.000	
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS skala kab/kota yang menerima program	Na	2,3%		2,3%	867.800.000	2,36%	955.300.000	2,42%	1.035.300.000	2,5%	1.115.800.000	2,61%	1.196.300.000	2,61%	5.170.500.000	**Sosial**

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya																
Sasaran: Meningkatnya transformasi budaya	**Indikator Sasaran** Persentase penurunan biaya sosial	Na	3%		5%		10%		15%		18%		20%		20%		**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Anak**
	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Na	30%		40%		55%		70%		85%		100%		100%		**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
Program Pembangunan Daerah:																	
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan daerah yang dikembangkan	Na	15%		20%	100.000.000	25%	105.000.000	30%	110.250.000	35%	115.762.500	40%	121.550.625	40%	552.563.125	**Kebudayaan**

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan				20%	100.000.000	25%	105.000.000	30%	110.250.000	35%	115.762.500	40%	121.550.625	40%	552.563.125	
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Jumlah desa yang memiliki LPA aktif dalam transformasi budaya dan penyelesaian konflik	Na	na	-	135	50.000.000	135	55.000.000	135	60.500.000	135	66.550.000	135	73.205.000	135	305.255.000	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
	Persentase desa yang mosalaki terlibat dalam transformasi budaya	Na	na	-	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.500.000	100	66.550.000	100	73.205.000	100	305.255.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase perda transformasi budaya yang dijalankan	Na			100		100		100%		100%		100%		100%		**Sekretariat Daerah**
Sasaran: Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	**Indikator Sasaran** Presentase konflik sosial yang diselesaikan	Na	na	na	100		100		100		100		100		100		
Program Pembangunan Daerah:																	
Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase ganguan Trantribum yang ditangani	Na	100%	700.000.000	100%	735.000.000	100%	771.750.000	100%	810.337.500	100%	850.854.375	100%	893.397.094	100%	4.761.338.969	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Na	100%		100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	550.000.000	100%	1.100.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan kualitas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang tertangani	Na	100%	100.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	100%	2.850.000.000	
Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidkan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Cakupan sosialisasi/fasilitasi pendidikan politik kepada masyarakat	Na	10%	916.577.900	20%	916.577.900	40%	916.577.900	60%	1.017.163.540	80%	916.577.900	100%	916.577.900	100%	4.683.465.140	**Kesatuan Bangsa dan Politik**
Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang terlibat aktif dalam pembangunan	Na	30%	200.000.000	42%	223.361.880	52%	223.361.880	63%	223.361.880	73%	223.361.880	83%	223.361.880	83%	1.116.809.400	**Kesatuan Bangsa dan Politik**
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan	Cakupan sosialiasi/fasilitasi kewaspadaan nasional dan daerah	Na	11%		22%	685.389.200	44%	685.389.200	66%	685.389.200	88%	685.389.200	100%	685.389.200	100%	5.484.267.000	**Kesatuan Bangsa dan Politik**

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Target Capaian												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Fasilitasi Penanganan Konflik																	

Kabupaten Ngada pada periode pembangunan 2021-2026 menjalankan pendekatan pembangunan **tematik-holistik** berbasis optimalisasi potensi lokal melalui *tagline* **Tante Nela Paris** (Tani, Ternak, Nelayan, Pelaku Pariwisata) yang berada di dalam urusan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, serta Pariwisata. Tante Nela Paris ditopang oleh program di dalam urusan lain, baik yang menjadi penopang langsung maupun tidak langsung. Program yang menjadi penopang langsung terkait penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat, misalnya berupa penguatan usaha kecil dan menengah, serta pemberdayaan masyarakat desa, terutama terkait pengembangan BUM Desa. Adapun program yang menjadi pendukung terkait kebijakan dan pembangunan infrastruktur, antara lain berupa program pembangunan infrastruktur jalan, kebijakan pengelolaan perdagangan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan penciptaan iklim investasi. *Tagline* Tante Nela Paris melalui pendekatan tematik-holistik dilaksanakan melalui kerangka sebagai berikut:

- Pelaksanaan Tante Nela Paris memperhatikan pemberdayaan masyarakat di wilayah perkotaan, pesisir, dan pegunungan, termasuk wilayah yang secara geografis kurang potensial dalam pengembangan sektor unggulan pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata.
- Program untuk mendukung Tante Nela Paris harus memberi nilai tambah mulai dari hulu sampai hilir maupun dari aspek *on farm* ke *off farm*, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada, serta berdampak pada peningkatan pendapatan petani, peternak, nelayan, pelaku pariwisata dan mengurangi angka kemiskinan masyarakat Ngada dan berkontribusi pada Peningkatan PAD.
- Prioritas pembangunan pada sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata harus tetap memperhatikan pembangunan pada sektor lain yakni Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pelayanan Publik Lainnya.
- Perlu disiapkan berbagai aturan penunjang baik terkait Perda maupun Perkada untuk menjabarkan *tagline* Tante Nela Paris dengan berbagai bidang penopang dan pendukungnya.

Program Utama *Tagline* **Tante Nela Paris**	◆ Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian ◆ Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian ◆ Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ◆ Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian ◆ Perizinan usaha pertanian ◆ Penyuluhan Pertanian ◆ Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata ◆ Pemasaran Pariwisata ◆ Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ◆ Pengelolaan perikanan tangkap ◆ Pengelolaan Perikanan Budidaya ◆ Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ◆ Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
Program Penopang (Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan)	◆ Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) ◆ Program administrasi pemerintahan desa (BUM Desa) ◆ Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat ◆ Program perekonomian dan pembangunan (fasilitasi BUMD) ◆ Perencanaan dan pembangunan industri
Program Pendukung (Kebijakan dan Infrastruktur)	◆ Peningkatan sarana distribusi perdagangan ◆ Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ◆ Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri ◆ Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja ◆ Pengembangan iklim penanaman modal ◆ Pengelolaan sumber daya air ◆ Penyelenggaraan jalan

Gambar 6. 2. Program Tematik-Holistik menjabarkan *Tagline* Tante Nela Paris

6.5. Integrasi Rekomendasi Program KLHS RPJMD

Perumusan program pembangunan daerah dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu teknokratik, politik, dan juga memperhatikan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diterjemahkan ke dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dokumen perencanaan yang memperhatikan TPB berupaya mengarahkan pembangunan berkelanjutan melalui 4 pilar pembangunan, yaitu pilar ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola. Telaah tentang capaian indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah dianalisis di dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Ngada. KLHS RPJMD merumuskan beberapa rekomendasi program pembangunan daerah yang perlu diintegrasikan di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2021-2026 untuk mendukung capaian pembangunan berkelanjutan. Berikut integrasi rekomendasi program KLHS RPJMD dalam RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026:

Tabel 6. 6. Integrasi Rekomendasi Program KLHS RPJMD ke dalam RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026

Rekomendasi Program KLHS RPJMD Kabupaten Ngada	MISI, TUJUAN, DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN NGADA TAHUN 2021 -2026																																						
	Misi 1															Misi 2										Misi 3						Misi 4					Misi 5		
	Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup															Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia										Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar						Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani					Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat Melalui Transformasi Institusi Budaya		
	T1						T2		T3	T4		T5				T1									T2	T1			T2		T3	T1					T1		
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S1	S1	S2	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S1	S1	S2	S3	S1	S2	S1	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3
Peningkatan Ketahanan Pangan								√																															
Program Perizinan Usaha Pertanian	√																																						
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	√																																						
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	√																																						
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	√																																						
Program Penyuluhan Pertanian	√																																						
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro									√																														

Rekomendasi Program KLHS RPJMD Kabupaten Ngada	MISI, TUJUAN, DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN NGADA TAHUN 2021 -2026																																						
	Misi 1															Misi 2										Misi 3						Misi 4					Misi 5		
	Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup															Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia										Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar						Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani					Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat Melalui Transformasi Institusi Budaya		
	T1						T2		T3	T4		T5				T1									T2	T1			T2		T3	T1					T1		
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S1	S1	S2	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S1	S1	S2	S3	S1	S2	S1	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3
Program Penghijauan														√																									
Program Wajib Belajar 9 Tahun																			√																				
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat																√																							
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan																√																							
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan																√																							
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja																									√														
Program Penempatan Tenaga Kerja																									√														
Program Hubungan Industrial																									√														

Rekomendasi Program KLHS RPJMD Kabupaten Ngada	MISI, TUJUAN, DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN NGADA TAHUN 2021 -2026																																					
	Misi 1															Misi 2										Misi 3						Misi 4					Misi 5		
	Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup															Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia										Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar						Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani					Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat Melalui Transformasi Institusi Budaya		
	T1						T2		T3	T4		T5				T1									T2	T1			T2		T3	T1					T1		
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S1	S1	S2	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S1	S1	S2	S3	S1	S2	S1	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3
Program Peningkatan Pengetahuan dan SDM Penyuluh KB																	√																						
Program Pengadaan PNS/P3K Bidang KB																	√																						
Program Meningkatkan Pengetahuan Kader KB di Desa																	√																						
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan																							√																
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak																							√																
Program Pengembangan Perumahan																													√										

Rekomendasi Program KLHS RPJMD Kabupaten Ngada	MISI, TUJUAN, DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN NGADA TAHUN 2021 -2026																																					
	Misi 1															Misi 2										Misi 3						Misi 4					Misi 5		
	Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup															Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia										Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar						Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani					Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat Melalui Transformasi Institusi Budaya		
	T1						T2		T3	T4		T5				T1									T2	T1			T2		T3	T1					T1		
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S1	S1	S2	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S1	S1	S2	S3	S1	S2	S1	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																													√										
Program Penanggulangan Bencana																															√								
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah																																		√					
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik																																				√			
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa																																				√			
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan																																					√		

Rekomendasi Program KLHS RPJMD Kabupaten Ngada	MISI, TUJUAN, DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN NGADA TAHUN 2021 -2026																																						
	Misi 1															Misi 2										Misi 3						Misi 4					Misi 5		
	Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup															Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia										Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar						Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani					Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat Melalui Transformasi Institusi Budaya		
	T1						T2		T3	T4		T5				T1									T2	T1			T2		T3	T1					T1		
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S1	S1	S2	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S1	S1	S2	S3	S1	S2	S1	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya																																					√		
Program Pemberdayaan Sosial																																					√		
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial																																					√		

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Ngada, telah dihasilkan rekomendasi beberapa program yang perlu diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ngada untuk akselerasi pencapaian pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi program KLHS RJMD terdiri dari 30 program. Beberapa program dari seluruh rekomendasi program tersebut belum sesuai dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020, sehingga perlu penyesuaian. Hasil telaah menyatakan bahwa masih ada program yang belum masuk ke dalam RPJMD, namun secara substansi sudah terwakili dan hampir sama dengan program yang ada di dalam RPJMD dan program tersebut telah sesuai dengan kebutuhan daerah. Hasil integrasi rekomendasi KLHS secara rinci dapat dilihat pada tabel 6.7.

Tabel 6. 7. Rekomendasi KLHS RPJMD di dalam RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
Kualitas SDM Masih Rendah	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	51,23	Keterbatasan infrastruktur pendidikan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan 9 tahun sesuai standar jumlah siswa	1. Program Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sekolah pendidikan SD dalam kondisi baik	Pendidikan
						2. Meningkatkan kualitas/mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang terakreditasi			Angka Partisipasi Murni (APM) SD		Persentase SMP dalam kondisi baik	
						3. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kurikulum pendidikan 9			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP		Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar	

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
						tahun					dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	
									Harapan Lama Sekolah (HLS)		Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	
Kualitas SDM Masih Rendah	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	54,85	Keterbatasan infrastruktur pendidikan				Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		Persentase sekolah yang terakreditasi A	
Kualitas SDM Masih Rendah	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	10,05	Keterbatasan infrastruktur pendidikan dan infratruktur wilayah				Rata-rata nilai ujian siswa		Persentase PAUD yang terstandarisasi	
Kualitas SDM Masih Rendah	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	10,34	Keterbatasan infrastruktur pendidikan dan infratruktur wilayah				Nilai Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar	Pendidikan

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
Kualitas SDM Masih Rendah	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	27,13	Keterbatasan infrastruktur pendidikan dan infratruktur wilayah				Nilai akreditasi lembaga penyelenggara PAUD		Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah pertama	
											Persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompetensi	
Kualitas SDM Masih Rendah	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 98%	19,48		Strategi :	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Kesehatan
									Angka Kematian Bayi (AKB)		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	
									Angka Kematian		Persentase bayi baru lahir	

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
									Balita (AKABA)		mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	
									Angka Stunting		Cakupan pelayanan balita sesuai standar	
									Angka Kesakitan		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	
											Persentase penderita PTM dan PM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	
											Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	
											Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat	

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
											Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	
											Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	
											Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	
											Persentase penduduk dengan gangguang jiwa berat yang terlayani kesehatan	
											Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RS yang sesuai standar	

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
Kualitas SDM Masih Rendah	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	32,33		1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dengan pengutamaan pada upaya promotif-preventif. Arah Kebijakan: Peningkatan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan dan fasilitas kesehatan dasar	2. program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya		Persentase PMKS yang berdaya	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Sosial

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
Kualitas SDM Masih Rendah	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	Menurun	Kesadaran masyarakat terkait dengan asuransi kesehatan masih rendah	2. menurunnya presentase penduduk miskin				Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Sosial
Kualitas SDM Masih Rendah	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 90%	4,6	Keterbatasn anggaran dan kesadaran akan pentingnya imunisasi masih rendah	Strategi 1: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama lintas sektor; Arah Kebijakan 1: Peningkatan aksesibilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat;	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Kesehatan
Kualitas SDM Masih Rendah	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	9,6	Kesadaran akan pentingnya imunisasi masih rendah						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
Kualitas SDM Masih Rendah	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	Meningkat	Keterbatasan infratrusktur dan suprastruktur kesehatan		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	
											Cakupan pelayanan balita sesuai standar	
											Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	
											Persentase penderita PTM dan PM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	
											Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	
											Cakupan Pelayanan	

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
											Rujukan masyarakat	
											Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	
											Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	
											Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	
											Persentase penduduk dengan gangguang jiwa berat yang terlayani kesehatan	
											Persentase pemenuhan sarana dan	

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
											prasarana RS yang sesuai standar	
Kualitas SDM Masih Rendah	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	13,56	Kesadaran akan PHBS					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga ber PHBS	Kesehatan
Kualitas SDM Masih Rendah	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	8,7	21,36	Kesadaran akan PHBS dan tradisi merokok yang masih tinggi di masyarakat							
Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	Stagnan	Keterbatasan anggaran kesehatan	1. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu,	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan		Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Rasio tenaga medis dan paramedis per satuan penduduk	Kesehatan
						2: Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga Kesehatan					Persentase SDMK sesuai standar	

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	Menurun		1. Terciptanya pengembangan perumahan yang sehat dan layak	1. Program Pengembangan Perumahan	Dinas Kesehatan, DPKPP, DLH	Rasio rumah layak huni	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya	Perumahan dan Kawasan Permukiman
											Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	
											Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten	
Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan	Meningkat menjadi 100%	23,91	Kesadaran akan pentingnya PHBS masih rendah	2. Meningkatnya akses layanan air bersih dan sanitasi yang layak serta perumahan bagi masyarakat	2 program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Sumber Air Minum	Persentase Rumah Tangga memiliki akses SPAM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
		berkelanjutan.										
										Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. ***(jumlah KK)***	Meningkat menjadi 100%	Menurun	Keterbatasan infrastruktur sanitasi							

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
										Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	39,05	Infrastruktur jaringan PLN masih terkendala untuk daerah pedalaman						Persentase rumah tangga yang memiliki akses listrik	
Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air	Meningkat menjadi 100%	23,91	Infratruktur air bersih masih terbatas							

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
		minum layak.										
Kualitas SDM Masih Rendah	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 95,2; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	12,2	Pola pangan masih tergantung dengan beras	Meningkatkan kuantitas kualitas pangan masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan		Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase peningkatan stok cadangan pangan	Pangan
			62 kg/kapita/tahun							Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase peningkatan ketersediaan lumbung pangan dan sarana pendukungnya	Pangan
										Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase lembaga distribusi pangan yang berkembang baik (sesuai tahapan	Pangan

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
											perkembangan)	
											Persentase toko tani yang aktif	
											Persentase peningkatan diversifikasi dan pengolahan pangan non-nasi	
										Program Pengawasan keamanan pangan	Persentase penurunan penggunaan obat kimia di luar ambang batas untuk produk pangan	Pangan
Kemiskinan dan Penganggur an	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	Menuru n	Ketertarikan generasi muda terkait dengan tenaga kerja sektor pertanian cenderung menurun	1. Penguatan Jaringan Kerjasama dan Kemitraan Usaha Pertanian	1.PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dinas Pertanian, Dinas Tenaker		Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase kelompok petani yang mendapatkan bantuan permodalan (tanaman pangan)	Pertanuan
											Persentase jaringan irigasi tersier dan pedesaan yang	

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
											bekondisi baik	
											Luas lahan tidur yang dikonversi menjadi lahan pertanian	
											Luas zonasi lahan pangan berkelanjutan	
										Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase kelompok peternak yang menerapkan IPTEK produksi	Pertanian
						2. Meningkatkan Kemampuan Teknis dan Manajemen Pengelolaan Kelembagaan Petani	2.PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				Persentase kelompok peternak yang memiliki pakan yang memadai/ mencukupi	
						3. Memperkuat kelembagaan dan pembiayaan	3.PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN				Persentase peningkatan ketersediaan bibit unggul	

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
						pelaku sektor pertanian	BENCANA PERTANIAN					
						4. Menfasilitasi Usaha Peningkatan Produksi dan Prduktifitas Komoditi Pertanian yang berorientasi pada Permintaan Pasar	4.PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			Program Pengelolaan perikanan budidaya	Persentase peningkatan ketersediaan benih	Kelautan dan Perikanan
						5. Memfasilitasi Usaha Peningkatan Produksi Melalui Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				Persentase peningkatan ketersediaan media pengembangan benih	

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
						6. Meningkatnya penyediaan Komoditi Pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan					Persentase kelompok perikanan yang memiliki ketercukupan pakan ikan	
						7. Mengembangkan teknologi budidaya pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas					Persentase kelompok yang menggunakan teknologi budidaya ikan	
						8. Memfasilitasi Usaha Peningkatan Produksi Melalui Penyediaan dan Pengembangan Prasarana					Persentase kelompok perikanan yang menggunakan metode budidaya yang berorientasi agribisnis	

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
						Pertanian						
						9. Peningkatan Kemampuan Petani Dalam Rangka penyediaan Perbenihan dan Pembibitan					Persentase kelompok pembudidaya ikan yang terlatih	
						10. Meningkatnya Kapasitas dan Kesejahteraan Penyuluh Pertanian					Persentase peningkatan luas lahan perikanan budidaya (kolam)	
										Program Penyuluhan pertanian	Persentase petani yang terlatih (tanaman pangan)	Pertanian
											Persentase kelompok petani yang menerapkan metode pertanian berorientasi agribisnis	

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
										Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase kelompok petani yang mendapatkan bantuan permodalan (tanaman pangan)	Pertanian
											Persentase jaringan irigasi tersier dan pedesaan yang bekondisi baik	
											Luas lahan tidur yang dikonversi menjadi lahan pertanian	
											Luas zonasi lahan pangan berkelanjutan	
										Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase petani yang mampu menerapkan IPTEK	Pertanian
											Persentase sarana produksi pertanian yang bekondisi baik	

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
										Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase area pertanian yang tidak terserang hama penyakit	Pertanian
										Program Penyuluhan pertanian	Persentase petani perkebunan yang terlatih	Pertanian
										Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase kelompok petani yang mendapatkan bantuan permodalan (tanaman perkebunan)	Pertanian
											Luas area tanaman baru komoditi perkebunan (ha)	
										Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase peningkatan ketersediaan benih unggul (perkebunan)	Pertanian
										Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase area perkebunan yang tidak terserang hama dan	Pertanian

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
											penyakit	
										Program Penyuluhan pertanian	Persentase peningkatan peternak yang terlatih	Pertanian
											Persentase kelompok peternak yang menerapkan metode budidaya ternak berorientasi agribisnis	
											Persentase kelompok peternak yang dikelola sesuai SOP	
										Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase kelompok peternak yang mendapatkan bantuan permodalan	Pertanian

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
											Persentase kelompok peternak yang memiliki akses air yang memadai/ mencukupi	
										Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase kelompok peternak yang menerapkan IPTEK produksi	Pertanian
											Persentase kelompok peternak yang memiliki pakan yang memadai/ mencukupi	
											Persentase peningkatan ketersediaan bibit unggul	
										Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase toko pakan ternak yang terdaftar	Pertanian
										Program Penyediaan dan pengembangan	Tingkat kelahiran ternak	Pertanian

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
										sarana pertanian		
										Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat kematian ternak	Pertanian
										Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase kelompok petani yang menggunakan teknologi penanganan pasca panen (hortikultura)	Pertanian
										Program Penyuluhan pertanian	Persentase kelompok petani yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan penanganan pasca panen (hortikultura)	Pertanian

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
										Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase kelompok petani yang menggunakan teknologi penanganan pasca panen (perkebunan)	Pertanian
										Program Penyuluhan pertanian	Persentase kelompok petani yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan penanganan pasca panen (perkebunan)	Pertanian
											Persentase kelompok peternak yang menerapkan standarisasi ASU/H	
										Program Pengelolaan perikanan budidaya	Persentase peningkatan ketersediaan benih	Kelautan dan Perikanan

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
											Persentase peningkatan ketersediaan media pengembangan benih	
											Persentase kelompok perikanan yang memiliki ketercukupan pakan ikan	
											Persentase kelompok yang menggunakan teknologi budidaya ikan	
											Persentase kelompok perikanan yang menggunakan metode budidaya yang berorientasi agribisnis	
											Persentase kelompok pembudidaya ikan	

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
											yang terlatih	
											Persentase peningkatan luas lahan perikanan budidaya (kolam)	
										Program Pengelolaan perikanan tangkap	Persentase peningkatan ketersediaan sarana perikanan tangkap	Kelautan dan Perikanan
											Persentase nelayan yang terlatih	
											Persentase kelompok nelayan yang mendapat bantuan permodalan	
											Persentase kelompok nelayan yang menggunakan metode penangkapan ikan yang berorientasi bisnis	

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
										Program Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase kawasan perikanan tangkap yang terbebas dari penggunaan racun ikan dan setrum	Kelautan dan Perikanan
										Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase peningkatan ketersediaan sarana penjaminan mutu	Kelautan dan Perikanan
											Persentase produk perikanan yang tidak mengandung zat kimia berbahaya	
											Persentase kelompok petani yang menerapkan metode pertanian berorientasi agribisnis	
Kemiskinan dan Pengangguran	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	51%	20	Terbatasnya peluang kerja sektor formal	Meningkatkan lapangan kerja dan keterampilan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas	Dinas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kesesuaian tenaga kerja yang memiliki sertifikat	Tenaga Kerja

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
						tenaga kerja	Tenaga Kerja				kompetensi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja	
											Persentase pencari kerja yang memiliki usaha sendiri	
										Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (termasuk disabilitas)	Tenaga Kerja
Kemiskinan dan Pengangguran	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun	Stagnan	Terbatasnya peluang kerja/peluang berusaha							
Kemiskinan dan Pengangguran	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau	Menurun	Stagnan	Keterbatasn anggaran untuk melanjutkan pendidikan tinggi							

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
		mengikuti pelatihan (NEET). ***(Jumlah org)***										
Kemiskinan dan Pengangguran	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	stagnan	Peluang kerja pada industri pariwisata stagnan		Program Penempatan Tenaker	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata		Program Pemasaran pariwisata	Persentase pemasaran destinasi wisata yang berhasil	Pariwisata
										Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin	Pariwisata
											Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat omzetnya	Pariwisata
Kualitas SDM Masih Rendah	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program	Meningkat menjadi: TK formal	Stagnan	Jumlah tenaga kerja juga stagnan	Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Tenaga Kerja				

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
		Jaminan Sosial Bidang Ketenagak erjaan.	62,4 juta; TK informal 3,5 juta									
Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat	4	Pengajuan kredit/pinjaman dari industri kecil masih relatif rendah	Pembinaan terhadap pelaku usaha UMKM.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro.	Dinas PerindustrianDinas Koperasi UKM & Perdagangan	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase kelompok pedagang yang menerapkan metode marketing mix (4Ps)	Perdagangan
			Tahun 2020 = 2,4%							Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar tradisional yang memiliki sarana berkondisi baik	Perdagangan
										Program Perencanaan dan pembangunan industri	Persentase pelaku IKM yang terlatih	Perindustrian
			Tahun 2024 = 5%								Tingkat kelancaran ketersediaan bahan dasar produksi	

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%	9	Pengajuan kredit/pinjaman dari UMKM masih relatif rendah						Persentase IKM yang mendapat bantuan permodalan	
		(Akses KUR untuk UMKM non BPR)									Persentase IKM yang menggunakan teknologi tepat guna	
											Persentase IKM yang menerapkan metode industri berorientasi bisnis	
Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	menurun	Pengajuan kredit/pinjaman dari UMKM masih relatif rendah				Indeks Gini	Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang meningkat kualitas tata kelolanya	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
									Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan	Persentase produk usaha kecil yang tersertifikasi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
										Usaha Mikro		
										Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan kapasitas produksi UKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
									Persentase peningkatan kelas usaha kecil ke menengah		Persentase peningkatan kapasitas pemasaran produk UKM	
Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	menurun	Menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah	Meningkatkan manajemen tata kelola pemugutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta	Pengelolaan Pendapatan Daerah	BKAD, Dinas Sosial		Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	Keuangan
										Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset daerah yang diinventarisasi	Keuangan
										Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP	Keuangan

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	11	Kesadaran wajib pajak masih belum optimal	memanfaatkan teknologi terkini					Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	
Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	Menurun	Masih prioritas untuk pembiayaan infrastruktur						Persentase deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	
Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	Menurun	Menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah				Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Program Penyuluhan pertanian	Persentase petani yang terlatih (tanaman pangan)	Pertanian

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	30	Menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah						Persentase kelompok petani yang menerapkan metode pertanian berorientasi agribisnis	
										Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase kelompok petani yang mendapatkan bantuan permodalan (tanaman pangan)	Pertanian
											Persentase jaringan irigasi tersier dan pedesaan yang bekondisi baik	
											Luas lahan tidur yang dikonversi menjadi lahan pertanian	
											Luas zonasi lahan pangan berkelanjutan	
										Program Penyediaan dan	Persentase petani yang mampu	Pertanian

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
										pengembangan sarana pertanian	menerapkan IPTEK	
											Persentase sarana produksi pertanian yang bekondisi baik	
										Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase area pertanian yang tidak terserang hama penyakit	Pertanian
										Program Penyuluhan pertanian	Persentase petani perkebunan yang terlatih	Pertanian
										Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase kelompok petani yang mendapatkan bantuan permodalan (tanaman perkebunan)	Pertanian
											Luas area tanaman baru komoditi perkebunan (ha)	
										Program Penyediaan dan	Persentase peningkatan	Pertanian

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
										pengembangan sarana pertanian	ketersediaan benih unggul (perkebunan)	
										Program Penyuluhan pertanian	Persentase peningkatan peternak yang terlatih	Pertanian
											Persentase kelompok peternak yang menerapkan metode budidaya ternak berorientasi agribisnis	
											Persentase kelompok peternak yang dikelola sesuai SOP	
										Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase kelompok peternak yang mendapatkan bantuan permodalan	Pertanian

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
											Persentase kelompok peternak yang memiliki akses air yang memadai/ mencukupi	
										Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase kelompok peternak yang menerapkan IPTEK produksi	Pertanian
											Persentase kelompok peternak yang memiliki pakan yang memadai/ mencukupi	
											Persentase peningkatan ketersediaan bibit unggul	
										Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase toko pakan ternak yang terdaftar	Pertanian
										Program Penyediaan dan pengembangan	Tingkat kelahiran ternak	Pertanian

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
										sarana pertanian		
										Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat kematian ternak	Pertanian
										Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase kelompok petani yang menggunakan teknologi penanganan pasca panen (hortikultura)	Pertanian
										Program Penyuluhan pertanian	Persentase kelompok petani yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan penanganan pasca panen (hortikultura)	Pertanian

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
										Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase kelompok petani yang menggunakan teknologi penanganan pasca panen (perkebunan)	Pertanian
										Program Penyuluhan pertanian	Persentase kelompok petani yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan penanganan pasca panen (perkebunan)	Pertanian
											Persentase kelompok peternak yang menerapkan standarisasi ASU/H	
										Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
									Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	Program Pengelolaan perikanan budidaya	Persentase peningkatan ketersediaan benih	Kelautan dan Perikanan
											Persentase peningkatan ketersediaan media pengembangan benih	
											Persentase kelompok perikanan yang memiliki ketercukupan pakan ikan	
											Persentase kelompok yang menggunakan teknologi budidaya ikan	
											Persentase kelompok perikanan yang menggunakan metode budidaya	

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
											yang berorientasi agribisnis	
											Persentase kelompok pembudidaya ikan yang terlatih	
											Persentase peningkatan luas lahan perikanan budidaya (kolam)	
										Program Pengelolaan perikanan tangkap	Persentase peningkatan ketersediaan sarana perikanan tangkap	Kelautan dan Perikanan
											Persentase nelayan yang terlatih	
											Persentase kelompok nelayan yang mendapat bantuan permodalan	

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
											Persentase kelompok nelayan yang menggunakan metode penangkapan ikan yang berorientasi bisnis	
										Program Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase kawasan perikanan tangkap yang terbebas dari penggunaan racun ikan dan setrum	Kelautan dan Perikanan
										Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase peningkatan ketersediaan sarana penjaminan mutu	Kelautan dan Perikanan
											Persentase produk perikanan yang tidak mengandung zat kimia berbahaya	

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
									Persentase peningkatan realisasi PMDN	Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	Penanaman Modal
									Persentase peningkatan realisasi PMA	Program Promosi penanaman modal	Persentase promosi investasi langsung yang ditindaklanjuti	Penanaman Modal
										Program Pengembangan iklim penanaman modal	Tingkat kemudahan perizinan investasi	Penanaman Modal
									Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan	Pariwisata
										Program Pemasaran pariwisata	Persentase pemasaran destinasi wisata yang berhasil	Pariwisata

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
										Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin	Pariwisata
											Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat omzetnya	
									Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase kelompok pedagang yang menerapkan metode marketing mix (4Ps)	Perdagangan
										Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar tradisional yang memiliki sarana berkondisi baik	Perdagangan
									Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Program Perencanaan dan pembangunan industri	Persentase pelaku IKM yang terlatih	Perindustrian

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
											Tingkat kelancaran ketersediaan bahan dasar produksi	
											Persentase IKM yang mendapat bantuan permodalan	
											Persentase IKM yang menggunakan teknologi tepat guna	
											Persentase IKM yang menerapkan metode industri berorientasi bisnis	
Rawan bencana (longsor, banjir, kekeringan, dll)	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	Meningkat	Kesiapsiaggan bencana belum optimal	Mengurangi risiko bencana daerah dan meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi	Program Penanggulangan Bencana	BPBD	Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase daerah rawan longsor yang memiliki tembok penahan memadai	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
Rawan bencana (longsor, banjir, kekeringan, dll)	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	Stagnan	Kesiapsiaggan bencana belum optimal	bencana		BPBD			Persentase daerah rawan yang memiliki pengendali abrasi memadai	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rawan bencana (longsor, banjir, kekeringan, dll)	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	Meningkat	Kesiapsiaggan bencana belum optimal			BPBD		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase titik genangan air di IKK yang tertangani	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rawan bencana (longsor, banjir, kekeringan, dll)	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%	30	Kesiapsiaggan bencana belum optimal			BPBD		Program penanggulangan bencana	Persentase desa tangguh bencana	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Rawan bencana (longsor, banjir, kekeringan,	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat	Menurun	stagnan	Kesiapsiaggan bencana belum optimal	Mengurangi risiko bencana daerah dan meningkatkan ketangguhan		BPBD			Persentase korban bencana yang mendapatkan penanganan	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
dll)		bencana.				pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana						
Rawan bencana (longsor, banjir, kekeringan, dll)	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	mening kat	Kesiapsiaggan bencana belum optimal					Program Peningkatan kualitas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang tertangani	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
										Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten Ngada	Sosial

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
										Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Perumahan dan Kawasan Permukiman

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
Kemiskinan dan Pengangguran	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 6-7%	3,7	Belum optimalnya tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah serta keterbatasan lapangan kerja dan peluang berusaha	Menurunkan angka kemiskinan	Program Pemberdaya-an Sosial,	Dinas Sosial	Persentase PMKS yang berdaya	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Sosial

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
Kemiskinan dan Pengangguran	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	8,7	Banyak penyandang disablitas yang tempat tinggalnya jauh dari pusat kesehatan		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten Ngada	Sosial
										Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Sosial
											Presentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana	Sosial

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
											pelayanan kesejahteraan sosial.	
											Presentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	Sosial
										Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Sosial
									Nilai Tukar Petani	Program Perencanaan dan pembangunan	Persentase IKM/ kelompok petani yang	Perindustrian

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
										industri	mengembangkan produk olahan hasil pertanian	
											Persentase produk olahan hasil pertanian yang bersertifikat SNI	Perindustrian
									Nilai Tukar Nelayan	Program Perencanaan dan pembangunan industri	Persentase IKM/ kelompok pembudidaya ikan/ kelompok nelayan yang mengembangkan produk olahan hasil pertanian	Perindustrian
											Persentase produk olahan hasil perikanan yang bersertifikat SNI	Perindustrian
										Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase kelompok nelayan yang menerapkan metode marketing mix (4Ps)	Perdagangan

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
Kemiskinan dan Pengangguran	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 6-7%	3,7	Belum optimalnya tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah serta keterbatasan lapangan kerja dan peluang berusaha		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Sosial, Disnaker	Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kesesuaian tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja	Tenaga Kerja
											Persentase pencari kerja yang memiliki usaha sendiri	Tenaga Kerja
										Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (termasuk disabilitas)	Tenaga Kerja

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	46,4	Masih terbatasnya infrastruktur *fixed broadband*	Meningkatkan proporsi individu yang menguasai/memiliki telpon genggam	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Diskominfo	Indeks keterbukaan informasi publik	Program informasi dan komunikasi publik	Persentase OPD yang memiliki PPID pembantu aktif	Komunikasi dan Informatika
Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	39,83	Masih terbatasnya infrastruktur *mobile broadband*			Diskominfo			Persentase hasil komunikasi antara kepala daerah/wakil kepala daerah dengan masyarakat yang ditindaklanjuti	
											Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang	

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
											menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	stagnan	Masih banyak konversi lahan secara ilegal	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tutupan hutan	Program penghijauan	DLH	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Persentase peningkatan luas RTH	Lingkungan Hidup
		(Indeks Tutupan Hutan)									Persentase RTH yang berkondisi baik	
											Luas lahan kritis yang direhabilitasi	
Kualitas SDM Masih Rendah	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan	Meningkat menjadi 66%	1,92	Kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi modern masih belum optimal	Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern & meningkatkan pengetahuan	1. Peningkatan Pengetahuan dan SDM Penyuluh KB	P2KB	Angka Kelahiran Total (TFR)	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rasio akseptor KB per 100 PUS	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
		keluarga berencana dan mengguna kan alat kontrasepsi metode modern.				PUS						
						Strategi :	2. Pengadaan PNS / P3K Bidang KB.				Persentase kebutuhan KB yang tidak terlayani (*unmeet need)*	
						1. Pelatihan KIE dan Konseling kepada PLKB Non PNS.	3. Meningkatkan pengetahuan Keder KB di Desa				Persentase pemakaian kontrasepsi modern	
						2. Pengadaan PLKB PNS atau P3K.						
Kualitas SDM Masih Rendah	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaa n metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia	Meningkat menjadi 65%	0,92	Kesadaran PUS terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi modern masih belum optimal	3. Pelatihan KE dan konseling kepada Kader KB.			Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase kelompok kegiatan yang aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
		15-49 tahun yang berstatus kawin.										
Kualitas SDM Masih Rendah	3.7.2.(a)	*Total Fertility Rate* (TFR).	Menurun menjadi 2,28	1	Kesadaran PUS terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi modern masih belum optimal	Arah dan Kebijakan :						
Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai	5.6.1.(a)	*Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/ KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 7,4%	10,55	Kesadaran PUS terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi modern masih belum optimal	1. Melibatkan OPD lain seperti DINKES dan BP LITBANG serta Balai Pelatihan Kerja.						

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
Kualitas SDM Masih Rendah	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	20,92	Kesadaran PUS terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi modern masih belum optimal	2. Melibatkan Bagian Organisasi dan Kepegawean Daerah untuk pemetaan Kebutuhan PLKB						
Ketimpangan Sosial	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16	Menurun	Gender focal point sering berganti karena adanya mutasi jabatan.	Setiap tahun harus melaksanakan pelatihan bagi *Gender focal point*	1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	PMDP3A	Indeks Pemberdayaan Gender	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan yang menjadi pengambil keputusan pada jabatan struktural	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
Ketimpangan Sosial	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	Meningkat	#NAME?						Persentase perempuan menjalankan usaha mandiri	
Ketimpangan Sosial	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	meningkat	Belum semua desa menjadi desa Layak anak	1. Mewujudkan Ngada tanpa kejahatan dan kekerasan		PMDP3A	Status Kabupaten Layak Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					- Kesadaran masyarakat yang masih rendah	2. Mewujudkan Daerah Layak & Ramah Anak				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase desa layak anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
					- Kurangnya pengawasan orang tua	3. Melalui Dana Desa diharapkan mengangarkan kegiatan pelindungan peempuan dan anak						
					- Kesadaran masyarakat yang masih rendah							
Ketimpangan Sosial	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	meningkat	- Kurangnya pengawasan orang tua							

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
Ketimpangan Sosial	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa	Stagnan	Rata-rata dalam perencanaan pembangunan di desa masih berfokus pada kegiatan -kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tanpa mempertimbangkan indikator tingkat perkembangan desa.	Mewujudkan Ngada Maju dan Mandiri	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PMDP3A	Nilai EKPPD	Program penataan desa	Persentase desa yang memiliki dan menjalankan Perdes tentang kewenangan lokal berskala desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
										Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang mencapai SDGs Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
									Indeks Desa Membangun	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
											Persentase desa yang melaksanakan konservasi sumber air	
											Persentase desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam pengembangan	

REKOMENDASI KLHS									RPJMD 2021-2026			
Isu Utama	**No. Indikator**	**Indikator TPB**	**Target Nasional**	**Gap dengan Target Nasional**	**Permasalahan**	**Sasaran Strategis**	**Program**	**OPD Penanggung Jawab**	**Indikator Sasaran**	**Program**	**Indikator**	**Urusan**
											ekonomi masyarakat	
										Program administrasi pemerintahan Desa	Persentase BUMDes yang berkembang/mengalami peningkatan omzet dan sumbangan ke PADes	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
											Persentase BUMDesMa yang berkembang dalam mengelola potensi/aset kawasan perdesaan	

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab VII berisi tentang kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah. Kerangka pendanaan pembangunan memuat tentang proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dan alokasi belanja selama 2022-2026. Proyeksi alokasi belanja tersebut menjadi sumber pendanaan program perangkat daerah. Adapun progam perangkat daerah merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Nomenklatur program perangkat daerah bersumber dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan hasil pemutakhiran berupa Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, sedangkan penentuan pilihan program perangkat daerah berpijak pada strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan sebagai cara sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Berikut adalah kerangka pendanaan dan program perangkat daerah di dalam RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026.

Tabel 7. 1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngada 2021-2026

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kapasitas Riil Keuangan Daerah	340.514.928.179	393.313.872.126	400.753.789.080	408.191.360.848	425.976.224.929	440.319.924.555
Prioritas I	238.360.449.725	275.319.710.488	280.527.652.356	285.733.952.594	298.183.357.451	308.223.947.189
Prioritas II	102.154.478.454	117.994.161.638	120.226.136.724	122.457.408.255	127.792.867.479	132.095.977.367

Tabel 7. 2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Ngada 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai sakip Perangkat Daerah	na	CC	260.102.009.107	**B**	288.035.553.103	**B**	310.728.241.150	**B**	335.485.897.361	**BB**	362.486.788.453	**BB**	391.564.474.141	**BB**	**1.948.402.963.315**	Non Urusan (Seluruh OPD dan Sekretariat Daerah)
			Program administrasi umum	Persentase OPD yang memiliki nilai SAKIP minimal BB	na	5	930.000.000	10	930.000.000	20	480.000.000	25	570.000.000	30	570.000.000	45	627.000.000	45	4.107.000.000	Sekretariat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan 8 area perubahan reformasi birokrasi	20	20	-	50	183.044.300	60	182.784.300	70	183.284.300	80	189.784.300	100	189.784.300	100	928.681.500	
				Persentase OPD yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat minimal "Baik"	na	10	2.316.600.200	50	400.000.000	60	440.000.000	70	484.000.000	80	532.400.000	90	585.640.000	90	2.442.040.000	
				Indeks kepuasan layanan humas protokol dan umum setda	na	0	369.151.040	100	400.000.000	100	440.000.000	100	484.000.000	100	532.400.000	100	585.640.000	100	2.811.191.040	
1				Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
1	1			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sekolah pendidikan SD dalam kondisi baik	46%	48%	116.040.010.870	56%	125.621.000.000	67%	128.104.700.000	78%	137.813.954.000	89%	139.839.454.000	100%	140.287.254.000	100	**787.706.372.870**	Pendidikan
				Persentase SMP dalam kondisi baik	40%	47%		52%		63%		71%		78%		85%		85%		
				Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	NA	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	NA	100%		100		100		100		100		100		100		
				Persentase sekolah yang terakreditasi	40% PNF	40% PNF		50% PNF		60% PNF		70% PNF		80% PNF		90% PNF		100% PNF		
				Persentase PAUD yang terstandarisasi	48%	48%		61%		74%		88%		100%		100%		100%		
1	1	4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar	0,087	0,087	1.336.197.280	0,091	954.000.000	0,095	948.000.000	0,099	948.000.000	0,103	948.000.000	0,107	973.000.000	0,107	6.082.197.280	Pendidikan
				Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan menengah pertama	0,080	0,080		0,082		0,084		0,086		0,088		0,090		0,090		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompetensi	25%	30%		35%		40%		45%		50%		55%		55%		
1	2		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																	
1	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorgangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	62,51	100%	52.388.503.356	100%	159.118.001.250	100%	167.185.801.375	100%	183.904.381.513	100%	202.294.819.664	100%	222.524.301.630	100%	987.415.808.788	Kesehatan
				Persentase ibu bersalin mendapatkan layanan persalinan	61,31	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	61,96	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Cakupan pelayanan balita sesuai standar	89,90	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase penderita PTM dan PM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	56,82%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	71,79%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Cakupan Pelayanan rujukan masyarakat	0,11	0,12		0,13		0,14		0,15		0,16		0,17		0,17		
				Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	72,57	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	61,62%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	71,79%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase penduduk dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	74,65%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RS sesuai standar	NA	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	2	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga medis dan paramedis per satuan penduduk	0,67	0,68		0,69	7.471.686.200	0,70	7.471.686.200	0,71	8.218.854.820	0,72	9.040.740.302	0,73	9.944.814.332	0,73	42.147.781.854	Kesehatan
				Persentase SDMK sesuai standar	NA	100%		100%	500.000.000.	100%	600.000.000	100%	700.000.000	100%	800.000.000	100%	900.000.000	100%	3.500.000.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase ketercukupan sediaan farmasi	94,36%	95,49%	96.704.700	96,62%	150.241.00	97,75%	210.265.100	98,88%	231.291.610	100%	254.420.771	100%	279.862.848	100%	1.222.786.020	Kesehatan
1	2	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga ber PHBS	24,29%	26,00%	14.281.408.800	27,43%	3.190.701.120	30,57%	3.885.466.032	33,71%	4.274.012.635	36,85%	4.701.413.899	40%	5.171.555.289	40%	35.504.557.775	Kesehatan
1	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang																	
1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase daerah rawan longsor yang memiliki tembok penahan memadai	40%	40%	500.000.000	50%	750.000.000	60%	850.000.000	70%	950.000.000	80%	1.000.000.000	90%	1.050.000.000	90%	5.100.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase daerah rawan yang memiliki pengendali abrasi memadai	50%	50%	800000000	60%	750.000.000	70%	850.000.000	80%	950.000.000	90%	1.000.000.000	100%	1.050.000.000	100%	5.400.000.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	43.54%	43.54%	3.500.000.000	45.94%	3.850.000.000	48.34%	4.235.000.000	50.74%	4.658.500.000	52.34%	5.124.350.000	55.54%	5.636.785.000	55.54%	27.004.635.000	
1	3	3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Sumber Air Minum	Persentase Rumah Tangga memiliki akses SPAM	48,43%	48,43%	1.260.000.000	52,98%	25.000.000.000	57,13%	25.000.000.000	61,29%	25.000.000.000	65,29%	25.000.000.000	69,29%	25.000.000.000	69,29%	125.000.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	67,58%	67,58%	840000000	70,27%	10750000000	72,96%	11000000000	75,65%	11000000000	78,34%	11000000000	81,03%	11000000000	81,03%	54750000000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	3	6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase titik genangan air di IKK yang tertangani	31,76%	31,76%	-	33,68%	1.500.000.000	59,68%	1.500.000.000	79,69%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	9.000.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase ketersediaan bangunan publik terhadap kebutuhan	NA	NA	-	100%	33.000.000.000	100%	33.000.000.000	100%	35.000.000.000	100%	35.000.000.000	100%	35.000.000.000	100%	171.000.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase bangunan publik rusak diperbaiki	NA	NA	-	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.500.000.000	100%	8.500.000.000	
1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	69,45%	69,45%	14.000.000.000	70,83%	35.000.000.000	72,21%	35.000.000.000	73,60%	35.000.000.000	74,98%	35.000.000.000	76,36%	35.000.000.000	76,36%	17500.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	3	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten	NA	100%	100000000	100%	500000000	100%	500000000	100%	500000000	100%	500000000	100%	500000000	100%	260000000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kawasan memiliki rencana tata ruang	NA	5%	300000000	7,14%	1000000000	14,28%	1000000000	21,42%	1000000000	28,56%	1000000000	35,70%	1000000000	35,70%	530000000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase pelanggaran tata ruang yang ditindaklanjuti	NA	NA	-	NA	50.000.000	100%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	100.000.000	100%	350000000	
1	4		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																	
1	4	2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	NA	-	-	100%	1100000000	100%	1100000000	100%	1100000000	100%	1100000000	100%	1.100.000.000	100%	5.500.000.000	Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten	NA	-	-	100%	100000000	100%	100000000	100%	100000000	100%	100000000	100%	100000000	100%	500000000	
1	4	3	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya	12,03%	12,03%	2.700.000.000	23,27%	7.650.000.000	35,30%	7.650.000.000	47,32%	7650000000	59,35%	7650000000	71,38%	7650000000	71,38%	38250000000	Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase PSU pendukung tata kota dalam kondisi baik	6%	6%	1500000000	12%	7500000000	18%	7500000000	24%	7500000000	30%	7500000000	38%	7500000000	38%	37500000000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	4	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase pemukiman yang memiliki jalan lingkungan	33,27%	33,27%	1.000.000.000	33,40%	7.500.000.000	33,66%	7.500.000.000	34,31%	7.500.000.000	34,96%	7.500.000.000	35,60%	7.500.000.000	35,60%	37.500.000.000	Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	35,47%	35,47%	1000000000	55,47%	2.400.000.000	75,47%	2.400.000.000	95,47%	2.400.000.000	98,47%	2.400.000.000	100%	2.400.000.000	100%	12.000.000.000	
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses listrik	72,03%	75%	-	77%	1.025.150.000	79%	1.025.150.000	80%	1.025.150.000	81%	1.025.150.000	82%	1.025.150.000	82%	5.125.750.000	
1	5		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																	
1	5	2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase ganguan tantribum yang ditangani	NA	100%	700.000.000	100%	735.000.000	100%	771.750.000	100%	810.337.500	100%	850.854.375	100%	893.397.094	100%	4.761.338.969	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		100%		100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	750.000.000	
1	5	3	Program Penanggulangan Bencana	Persentase desa tangguh bencana	NA	-	-	5%	6581000000	10%	7571000000	15%	7715000000	20%	7870000000	25%	8025000000	25%	37762000000	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
				Persentase korban bencana yang mendapatkan penanganan	NA	100%		100%	1000000000	100%	1000000000	100%	1500000000	100%	1500000000	100%	2000000000	100%	7000000000	
				Persentase protap penanggulangan bencana yang di jalankan				20	25.000.000	40	25.000.000	60	30.000.000	80	30.000.000	100	35.000.000	100	145.000.000	
1	05	04	Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang	na	100%	100.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	100%	2.850.000.000	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				tertangani																
1	6		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																	
1	6	2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	NA	2,3%		2,3%	867.800.000	2,36%	955.300.000	2,42%	1.035.300.000	2,5%	1.115.800.000	2,61%	1.196.300.000	2,61%	5.170.500.000	Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	6	4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	na	10%		20%	880.000.000	30%	953.000.000	40%	1.026.000.000	50%	1.099.000.000	60%	1.172.000.000	60%	5.130.000.000	
				Presentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%	100%		100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	750.000.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Presentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	100%	100%		100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500.000.000	
1	6	5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	na	3%		6%	1.200.000.000	9%	1.250.000.000	12%	1.300.000.000	15%	1.350.000.000	18%	1.400.000.000	18%	6.500.000.000	
				Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah	na	100%		100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	650.000.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				tanggap darurat bencana																
2			Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																	
2	7		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																	
2	7	3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kesesuaian tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja	33%	33%	-	43%	1.770.000.000	48%	545.000.000	53%	827.000.000	58%	852.000.000	63%	863.000.000	63%	3.994.000.000	Tenaga Kerja
				Persentase pencari kerja yang memiliki usaha sendiri	53%	53%	-	58%		63%		68%		73%		75%		75%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	7	4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (termasuk disabilitas)	NA	5%		10%	35.000.000	15%	36.000.000	20%	40.000.000	25%	41.000.000	30%	44.500.000	30%	196.500.000	Tenaga Kerja
2	8		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																	
2	8	2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan yang menjadi pengambil keputusan pada jabatan struktural	9,04%	9,04%	-	10%	400.000.000	10,24%	700.000.000	10,74%	700.000.000	10,99%	700.000.000	11,24%	700.000.000	11,24%	3.200.000.000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase perempuan menjalankan usaha mandiri	1,58%	1,58%		1,59%		1,60%		1,62%		1,63%		1,65%		1,65%		
2	8	3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100%	100%	-	100%	160.000.000	100%	150.000.000	100%	140.000.000	100%	130.000.000	100%	120.000.000	100%	700.000.000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	Program Pemenuhan Hak	Persentase desa layak	0%	16,6%	-	33,2%	190.000.000	49,8%	250.000.000	66,14%	190.000.000	83%	250.000.000	100%	190.000.000	100%	1.070.000.000	Pemberdayaan Perempuan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Anak (PHA)	anak																dan Perlindungan Anak
2	8	7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	100%		100%	160.000.000	100%	150.000.000	100%	140.000.000	100%	130.000.000	100%	120.000.000	100%	700.000.000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan																		
2	9	2	Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase peningkatan ketersediaan lumbung pangan dan sarana pendukungnya	22	22		46	500.000.000	60	1.200.000.000	73,33	1.200.000.000	86,67	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	5.300.000.000	Pangan
2	9	3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan stok cadangan pangan	1	1		1	250.000.000	2	300.000.000	3	350.000.000	4	400.000.000	5	400.000.000	5	1.500.000.000	Pangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase lembaga distribusi pangan yang berkembang baik (sesuai tahapan perkembangan)	16	16		16	500.000.000	32	375.000.000	48	525.000.000	64	525.000.000	100	525.000.000	100	2.450.000.000	Pangan
				Persentase toko tani yang aktif	NA	NA		20	400.000.000	40	400.000.000	60	400.000.000	80	400.000.000	100	400.000.000	100	2.000.000.000	Pangan
				Persentase peningkatan diversifikasi dan pengolahan pangan non-nasi	8,3	8,3		12,5	1.100.000.000	25	1.100.000.000	50	1.100.000.000	75	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	5.500.000.000	Pangan
2	9	5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase penurunan penggunaan obat kimia di luar ambang batas untuk produk pangan	100	100		100	400.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	2.150.000.000	Pangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	49,67	49,67		60,26	1.200.000.000	73,51	1.200.000.000	80,13	1.200.000.000	86,75	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	6.000.000.000	Pangan
2	10		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan																	
2	10	4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase kasus pertanahan yang diselesaikan	100%	100%	-	100%	375000000	100%	375000000	100%	375000000	100%	375000000	100%	375000000	100%	1875000000	Pertanahan
2	10	7	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase tanah ulayat yang ditetapkan	NA	NA	-	8%	250000000	16%	250000000	24%	250000000	32%	250000000	40%	250000000	40%	1250000000	
2	10	8	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang teriventarisasi	NA	NA	-	8%	250000000	16%	250000000	24%	250000000	32%	250000000	40%	250000000	40%	1250000000	
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Bersertifikat	70,85%	70,85%	-	77,33%	300000000	83,81%	300000000	90,28%	300000000	96,76%	300000000	100%	300000000	100%	1500000000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	11		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																	
2	11	3	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan kasus kebakaran lahan	NA	8,10%	400.000.000	16,20%	440.000.000	24,30%	484.000.000	32,40%	532.400.000	40,50%	585.640.000	42%	585.640.000	42%	2.442.040.000	Lingkungan Hidup
				Persentase perusahaan yang mengelola limbah sesuai ketentuan yang berlaku	55%	60%	550.000.000	65%	605.000.000	70%	665.500.000	75%	732.050.000	80%	805.255.000	85%	805.255.000	85%	3.357.805.000	Lingkungan Hidup
				Persentase sumber-sumber air yang diawasi	NA	4,0%	75.000.000	8,0%	80.000.000	12%	85.000.000	16%	90.000.000	20%	95.000.000	24%	95.000.000	24%	425.000.000	Lingkungan Hidup
				Persentase sumber-sumber air yang direhabilitasi	9,9%	9,9%	0	11,9%	160.000.000	13,9%	170.000.000	15,9%	180.000.000	17,9%	190.000.000	19,9%	190.000.000	19,9%	890.000.000	Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	11	4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase peningkatan luas RTH	548 Ha	0,12%	300.000.000	0,18%	330.000.000	0,20%	363.000.000	0,24%	399.300.000	0,29%	439.230.000	0,35%	439.230.000	0,35%	1.831.530.000	Lingkungan Hidup
				Persentase RTH yang berkondisi baik	1,40%	1,40%	2.400.000.000	1,60%	2.640.000.000	1,64%	2.904.000.000	1,71%	3.194.400.000	1,77%	3.513.840.000	1,84%	3.513.840.000	1,84%	18.166.080.000	Lingkungan Hidup
				Persentase Taman Kota yang tertata	100%	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	100%	146.410.000	100%	610.510.000	Lingkungan Hidup
				Luas lahan kritis yang direhabilitasi	56,7ha	0	0	66,7 ha	100.000.000	76,7 ha	110.000.000	86,7 ha	121.000.000	96,7 ha	133.100.000	106,7 ha	146.410.000	106,7 ha	610.510.000	Lingkungan Hidup
2	11	6	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang taat ijin lingkungan, ijin PPLH dan LH	75%	75%	100.000.000	79%	110.000.000	86%	120.000.000	90%	130.000.000	95%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	740.000.000	Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sarana persampahan berkondisi	58,3%	60%	428.000.000	62%	3.500.000.000	64%	3.500.000.000	65,50%	3.500.000.000	66,70%	3.850.000.000	67,70%	4.235.000.000	67,70%	19.013.000.000	Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				baik																
				Persentase sampah di TPA yang dikelola menggunakan metode *sanitary landfill*	16,60%	16,60%	1.845.486.400	16,60%	3.850.000.000	16,60%	4.235.000.000	100%	4.658.500.000	100%	5.124.350.000	100%	5.124.350.000	100%	23.948.836.400	Lingkungan Hidup
				Persentase kelompok pengelola sampah yang menerapkan metode 3R	0%	0%	0%	20%	300.000.000	40%	330.000.000	60%	363.000.000	80%	399.300.000	100%	439.230.000	100%	1.831.530.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	12		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
2	12	2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP	87.27	87,27	300.549.600	88.67	300.000.000	90.81	330.000.000	93.00	363.000.000	96.00	399.300.000	99.85	335.555.321	99.85	1.880.455.513	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	10.11	10,11	162.304.693	15.46	162,304,693	18.5	167,238,755	21.29	171,904,716	25.57	179,262,237	27.88	183,403,194	27.88	1.026.418.288	
				Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KK	94.57	94,57	254.035.795	95.84	254,035,795	96.58	255,915,659	97.20	257,502,336	98.20	260,077,359	99.91	264,524,681	99.91	1.546.091.625	
2	12	3	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen akta kematian	100	100	158.880.978	100	158,880,978	100	174,590,876	100	192,049,964	100	211,254,960	100	232,380,456	100	1.128.038.212	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	4.00	4	370.722.282	8.00	370,722,282	12.00	407,378,710	15.00	448,116,582	19.00	492,928,239	23.00	542,221,063	23.00	2.632.089.158	
2	12	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan data kependudukan yang dimutakhirkan	98.97	98,97	210.900.000	98.98	210,900,000	98.99	210,914,125	99.00	210,935,216	99.01	210,956,309	99.02	210,977,404	99.02	1.265.583.054	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase OPD/instansi pemerintah yang memanfaatkan data kependudukan sesuai ketentuan regulasi	20	20	141.250.000	33	141.250.000	50	296.362.357	66	343.780.334	83	402.222.990	100	470.600.898	100	1.654.216.579	
2	13		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	13	2	Program Penataan Desa	Persentase desa yang memiliki dan menjalankan Perdes tentang kewenangan lokal berskala desa	100%	100%	-	100	15.345.110	100	16.879.621	100	18.567.583	100	20.424.341	100	22.466.776	100	93.683.431	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase fasilitasi administrasi kewilayah desa yang terselesaikan (batas desa, kode desa)	36,2	36,2%	-	48,80	42.837.800	61,40	250.000.000	74,00	51.833.738	86,60	57.833.738	100	300.000.000	100	702.505.276	
	13	3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang mencapai SDGs Desa	na	12	75.000.000	24	80.000.000	36	85.000.000	48	90.000.000	60	95.000.000	72	100.000.000	72	525.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	13	4	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan tepat waktu dan sesuai ketentuan regulasi	100	100	-	100	3.102.200.000	100	1.542.420.000	100	3.566.662.000	100	1.866.328.200	100	4.109.961.020	100	14.187.571.220	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase BUMDes yang berkembang/mengalami peningkatan omset dan sumbangan ke PADes	45,9	45,9%	-	56,72	50.000.000	67,54	55.000.000	78,36	60.500.000	89,18	66.500.000	91,68	73.205.000	91,68	305.205.000	
				Persentase BUMDesMa yang berkembang mengelola potensi/aset kawasan perdesaan	25	25%	-	41,67	50.000.000	58,34	55.000.000	75,01	60.500.000	91,68	66.500.000	100	73.205.000	100	305.205.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	13	5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif dalam pemberdayaan masyarakat	100%	100%	-	100%	683.190.000	100%	693.190.000	100%	704.190.000	100%	716.290.000	100%	729.600.000	100%	3.526.460.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam pengembangan ekonomi masyarakat	72,5	72,5%	-	78,00	50.000.000	83,50	55.000.000	89,00	60.500.000	94,50	66.550.000	98,20	73.205.000	98,20	305.255.000	
				Persentase desa yang melaksanakan konservasi sumber air	na	0	0	7	50.000.000	9	55.000.000	11	60.500.000	13	66.550.000	15	73.205.000	15	305.255.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Program Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyrakat Hukum adat	Jumlah desa yang memiliki LPA aktif dalam transformasi budaya dan penyelesaian konflik	na	135		135	50.000.000	135	55.000.000	135	60.500.000	135	66.550.000	135	73.205.000	135	305.255.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase desa yang memiliki mosalaki aktif terlibat dalam transformasi budaya	na	50		100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.500.000	100	66.550.000	100	73.205.000	100	305.255.000	
2	14		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana																	
2	14	3	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rasio akseptor KB per 100 PUS	61,97	65,30	5.377.781.000	65,30	6.184.448.150	65,45	6.493.670.557	66,15	6.818.354.084	66,30	7.159.271.788	66,45	7.517.235.377	66,45	39.550.760.956	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase kebutuhan KB yang tidak terlayani (*unmet need)*	6,32	6,07		5,82		5,57		5,32		5,07		4,82		4,82		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase pemakaian kontrasepsi modern	NA	60		61		62		63		64		65		65		
2	14	4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase kelompok kegiatan yang aktif	NA	54	1.315.321.200	56	1.340.840.000	57	1.522.503.400	58	1.522.503.400	59	1.598.028.500	60	1.598.028.500	60	8.897.225.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	15		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																	
2	15	2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase terminal dalam kondisi baik	46,68%	46,68%	-	54,68%	125.000.000	62,68%	125.000.000	70,68%	125.000.000	78,68%	5.025.000.000	86,68%	75.000.000	86,68%	5.475.000.000	Perhubungan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik	27,36%	27,36%	100.000.000	41,36%	1.236.250.000	55,36%	1.036.250.000	69,36%	936.250.000	79,36%	936.250.000	83,36%	525.000.000	83,36%	4.670.000.000	
				Cakupan layanan angkutan umum layak	86,67%	86,67%	-	86,67%	125.000.000	86,67%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	125000000	100%	75000000	100%	475000000	
				Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar	10%	10%	-	65%	12.164.963.400	75%	100.000.000	80%	100.000.000	85%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	12.564.963.400	
				Persentase kendaraan umum lolos uji kelayakan	0%	0%	-	0%	50.000.000	100%	100.000.000	100%	50.000.000	100%	100.000.000	100%	50.000.000	100%	350.000.000	
				Persentase kendaraan bermotor yang lulus uji emisi	0%	0%	-	0%	130.000.000	100%	370.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	1.850.000.000	
2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika																	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	16	2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang memiliki PPID pembantu aktif	na	na	-	60	300.000.000	70	250.000.000	80	300.000.000	90	275.000.000	100	350.000.000	100	1.475.000.000	Komunikasi dan Informatika
				Persentase hasil komunikasi antara kepala daerah/wakil kepala daerah dengan masyarakat yang ditindaklanjuti	na	na	-	60	500.000.000	70	525.000.000	80	551.250.000	90	578.812.500	100	607.753.125	100	2.762.815.625	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	na	na	-	60	300.000.000	70	325.000.000	80	350.000.000	90	375.000.000	100	400.000.000	100	1.750.000.000	
2	16	3	Program Aplikasi Informatika	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	na	18	100.000.000	18	300.000.000	32	315.000.000	57	330.750.000	68	347.287.500	100	364.651.875	100	1.757.689.375	Komunikasi dan Informatika
				Persentase layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi	na	na	-	5	100.000.000	25	105.000.000	50	110.250.000	75	115.762.500	100	121.550.625	100	552.563.125	
2	17		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah																	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	17	6	Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang meningkat kualitas tata kelolanya	50 Koperasi	0	-	8%	450.000.000	16%	450.000.000	24%	650.000.000	58%	655.000.000	68%	675.000.000	68%	2.880.000.000	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase produk usaha kecil yang tersertifikasi	5%	5%	-	24%	250.000.000	24%	275.000.000	24%	300.000.000	24%	325.000.000	24%	350.000.000	24%	1.500.000.000	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	8	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan kapasitas produksi UKM	17%	17%	-	27%	850.000.000	37%	950.000.000	47%	1.000.000.000	57%	1.050.000.000	67%	950.000.000	67%	4.800.000.000	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase peningkatan kapasitas pemasaran produk UKM	5%	5%	-	9%	250.000.000	13%	250.000.000	17%	250.000.000	21%	250.000.000	24%	250.000.000	24%	1.250.000.000	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																	
2	18	2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	na	na	-	20,84%	640.000.000	32,08%	704.000.000	35,29%	774.400.000	38,83%	851.840.000	42,70%	937.024.000	42,70%	3.907.264.000	Penanaman Modal
2	18	3	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi investasi langsung yang ditindaklanjuti	na	na	-	20%	1.160.462.000	40%	1.277.000.000	60%	1.404.200.000	80%	1.544.575.000	100%	1.699.000.000	100%	7.085.237.000	Penanaman Modal

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	18	5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat kemudahan perijinan investasi	na	na	-	0,84	431.456.300	1,54	474.601.930	2,37	522.062.123	4,02	574.268.335	4,89	631.695.168	4,89	2.634.083.856	Penanaman Modal
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perijinan dan Non Perijinan yang diterbitkan tepat waktu dna sesuai SOP	na	60%	350.000.000	70%	381.500.000	80%	419.650.000,0	90%	409.800.000	100%	481.150.000	100%	481.150.000	100%	2.042.100.000	
2	19		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga																	
2	19	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	NA	60%	499.993.100	70%	980.000.000	80%	1.078.000.000	90%	1.185.800.000	100%	1.304438.000	100%	1.434.818.000	100%	5.048.231.100	Kepemudaan dan Olahraga

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase pemuda dalam bidang kewirausahaan	NA	5%		10%		15%		20%		25%		30%		30%		
2	19	13	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pelatih yang bersertifikat	1,23%	1,5%	1.015.000.000	2%	1.875.000.000	2,5%	1.992.500.000	3%	2.121.250.000	3,5%	2.262.375.000	4%	2.416.112.500	4%	11.682.237.500	Kepemudaan dan Olahraga
				Cakupan pembinaan atlet muda	NA	45		50		60		70		80		90		90		
				Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	NA	50		55		60		65		70		75		75		
				Cakupan klub/cabang olahraga yang difasilitasi	52%	55%		58%		61%		64%		67%		70%		70%		
2	20		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	20	2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Keterisian E Database SIPD	89,09	89,09	-	100	500.000.000	100	525.000.000	100	551.250.000	100	578.812.500	100	607.753.125	100	2.762.815.625	Statistik
2	21		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																	
2	21	2	Program penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Persentase aplikasi persandian yang diterapkan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	na	na	-	10	300.000.000	25	315.000.000	45	330.750.000	75	347.287.500	100	364.651.875	100	1.657.689.375	Persandian
2	22		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																	
2	22	2	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan daerah yang dikembangkan	na	15%		20%	100.000.000	25%	105.000.000	30%	110.250.000	35%	115.762.500	40%	121.550.625	40%	552.563.125	Kebudayaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	22	5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	na	15%		20%	100.000.000	25%	105.000.000	30%	110.250.000	35%	115.762.500	40%	121.550.625	40%	552.563.125	Kebudayaan
2	23		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan																	
2	23	2	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	NA	0,50	-	0,51	2.206.400.000	0,52	529.220.000	0,53	445.372.000	0,54	561.889.200	0,55	518.808.120	0,55	4.261.689.320	Perpustakaan
				Persentase perpustakaan sesuai standar nasional	NA	1%		2%		3%		4%		5%		6%		6%		
				IKM layanan perpustakaan	NA	80,00		80,5		81,0		81,5		82		82,5		82,5		
2	24		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan																	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	24	2	Program Pengelolaan Arsip	Persentase ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja berbasis digital	na	na	-	10	200.000.000	10	200.000.000	15	250.000.000	15	250.000.000	20	300.000.000	20	1.200.000.000	Kearsipan
3			Urusan Pemerintahan Pilihan																	
3	25		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan																	
3	25	2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan ketersediaan sarana perikanan tangkap	2	6	3.550.000.000	8	7.980.000.000	11	5.945.000.000	15	6.735.000.000	17	8.160.000.000	19	8.160.000.000	19	32.370.000.000	Kelautan dan Perikanan
				Persentase nelayan yang terlatih	2	2	900.000.000	3	350.000.000	8	500.000.000	16	675.000.000	25	875.000.000	27	875.000.000	27	3.300.000.000	Kelautan dan Perikanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase kelompok nelayan yang mendapat bantuan permodalan	2	2	750.000.000	6	175.000.000	13	225.000.000	22	325.000.000	35	575.000.000	37	575.000.000	37	2.050.000.000	Kelautan dan Perikanan
				Persentase kelompok nelayan yang menggunakan metode penangkapan ikan yang berorientasi bisnis	4	10	2.210.000.000	15	1.710.000.000	25	2.021.000.000	55	540.000.000	56	780.000.000	58	780.000.000	58	7.261.000.000	Kelautan dan Perikanan
3	25	3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan ketersediaan benih	0	0	1.110.000.000	1	910.000.000	3	1.430.000.000	5	1.950.000.000	8	2.470.000.000	10	2.470.000.000	10	7.870.000.000	Kelautan dan Perikanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase peningkatan ketersediaan media pengembangan benih	0	0	5.000.000.000	1	1.200.000.000	3	600.000.000	5	204.000.000	8	204.000.000	10	204.000.000	10	7.208.000.000	Kelautan dan Perikanan
				Persentase kelompok perikanan yang memiliki ketercukupan pakan ikan	0	5	1.188.000.000	25	495.000.000	35	693.000.000	55	1.089.000.000	67	1.326.600.000	69	1.326.600.000	69	4.791.600.000	Kelautan dan Perikanan
				Persentase kelompok yang menggunakan teknologi budidaya ikan	1	5	487.500.000	15	300.000.000	25	312.500.000	55	900.000.000	56	712.500.000	58	712.500.000	58	2.712.500.000	Kelautan dan Perikanan
				Persentase kelompok perikanan yang menggunakan metode budidaya yang berorientasi	3	10	1.000.000.000	15	1.500.000.000	25	2.500.000.000	55	5.500.000.000	56	5.600.000.000	58	5.600.000.000	58	16.100.000.000	Kelautan dan Perikanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				agribisnis																
				Persentase kelompok pembudidaya ikan yang terlatih	0	0	175.000.000	1	525.000.000	5	875.000.000	10	1.225.000.000	17	2.275.000.000	19	2.275.000.000	19	5.075.000.000	Kelautan dan Perikanan
				Persentase peningkatan luas lahan perikanan budidaya (kolam)	1	1	1.202.000.000	2	2.029.500.000	5	2.759.500.000	10	3.392.000.000	17	4.092.000.000	19	4.092.000.000	19	13.475.000.000	Kelautan dan Perikanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	25	4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kedaulatan perikanan tangkap yang terbebas dari penggunaan racun ikan dan setrum	1	6	540.000.000	13	630.000.000	22	810.000.000	34	1.080.000.000	49	1.350.000.000	51	1.350.000.000	51	4.410.000.000	Kelautan dan Perikanan
3	25	5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan ketersediaan sarana penjaminan mutu	1	1	2.660.000.000	3	2.160.000.000	6	2.471.000.000	9	990.000.000	12	1.230.000.000	14	1.230.000.000	14	9.511.000.000	Kelautan dan Perikanan
				Persentase produk perikanan yang tidak mengandung zat kimia berbahaya	0	20	75.000.000	40	75.000.000	60	75.000.000	80	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	375.000.000	Kelautan dan Perikanan
3	26		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata																	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	26	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan	25	25	100.000.000,00	40	7.902.000.000	55	7.850.000.000	70	7.700.000.000	85	7.700.000.000	100	9.300.000.000	100	36.452.000.000	Pariwisata
3	26	3	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pemasaran destinasi wisata yang berhasil	10	10		28	1.600.000.000	46	1.600.000.000	64	1.600.000.000	82	1.600.000.000	100	1.600.000.000	100	8.000.000.000	Pariwisata
3	26	5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin	30	30		44	6.450.000.000	58	1.450.000.000	72	1.450.000.000	86	1.450.000.000	100	1.450.000.000	100	12.250.000.000	Pariwisata

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat omzetnya	25	25		40	875.000.000	55	775.000.000	70	775.000.000	85	775.000.000	100	775.000.000	100	3.975.000.000	
3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																	
3	27	2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase petani yang mampu menerapkan IPTEK	na	13,50%	10.500.000.000	15,00%	10.500.000.000	16,50%	10.500.000.000	18,00%	10.500.000.000	20,00%	10.500.000.000	20,00%	10.500.000.000	20,00%	63.000.000.000	Pertanian
				Persentase sarana produksi pertanian yang berkondisi baik	60%	65%	2.000.000.000	70%	2.000.000.000	75%	2.000.000.000	80%	2.000.000.000	85%	2.000.000.000	85%	2.000.000.000	85%	12.000.000.000	Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase peningkatan ketersediaan benih unggul (perkebunan)	na	90%	3.500.000.000	90%	3.500.000.000	90%	3.500.000.000	90%	3.500.000.000	90%	3.500.000.000	90%	3.500.000.000	90%	21.000.000.000	Pertanian
				Persentase kelompok peternak yang menerapkan IPTEK produksi	152 Kelompok (0)	5%	950.000.000	10%	950.000.000	15%	600.000.000	25%	600.000.000	40%	500.000.000	40%	500.000.000	40%	4.100.000.000	Pertanian
				Persentase kelompok peternak yang memiliki pakan yang memadai/ mencukupi	152 Kelompok (0)	20%	125.000.000	40%	150.000.000	60%	175.000.000	80%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.150.000.000	Pertanian
				Persentase peningkatan ketersediaan bibit unggul	15000 ekor	40	280.000.000	40%	550.000.000	50%	820.000.000	60%	1.090.000.000	70%	1.360.000.000	80%	1.360.000.000	80%	5.460.000.000	Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Tingkat kelahiran ternak	Sapi dan Kerbau yang di IB 500 ekor	100%	950.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.450.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.950.000.000	100%	1.950.000.000	100%	9.200.000.000	Pertanian
				Persentase kelompok petani yang menggunakan teknologi penanganan pasca panen (hortikultura)	20%	30%	1.500.000.000	35%	1.500.000.000	40%	1.500.000.000	45%	1.500.000.000	50%	1.500.000.000	50%	1.500.000.000	50%	9.000.000.000	Pertanian
				Persentase kelompok petani yang menggunakan teknologi penanganan pasca panen (perkebunan)	20%	30%	2.000.000.000	35%	2.000.000.000	40%	2.000.000.000	45%	2.000.000.000	50%	2.000.000.000	50%	2.000.000.000	50%	12.000.000.000	Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	27	3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase kelompok petani yang mendapatkan bantuan permodalan (tanaman pangan)	2%	10%	2.500.000.000	22%	2.500.000.000	38%	2.500.000.000	60%	2.500.000.000	80%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	15.000.000.000	Pertanian
				Persentase jaringan irigasi tersier dan pedesaan yang bekondisi baik	na	90,0%	5.450.000.000	92,5%	5.450.000.000	95,0%	5.450.000.000	97,5%	5.450.000.000	98,5%	5.450.000.000	100,0%	5.450.000.000	100,0%	32.700.000.000	Pertanian
				Luas lahan tidur yang dikonversi menjadi lahan pertanian	0	50	500.000.000	100	500.000.000	150	500.000.000	200	500.000.000	250	500.000.000	300	500.000.000	300	3.000.000.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Luas zonasi lahan pangan berkelanjutan	13.578	13.778	1.500.000.000	13.978	1.500.000.000	14.278	1.500.000.000	14.378	1.500.000.000	14.478	1.500.000.000	14.578	1.500.000.000	14.578	9.000.000.000	Pertanian
				Persentase kelompok petani yang mendapatkan bantuan permodalan (tanaman perkebunan)	90 orang	13%	2.500.000.000	40%	2.500.000.000	60%	2.500.000.000	80%	2.500.000.000	90%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	15.000.000.000	Pertanian
				Luas area tanaman baru komoditi perkebunan	709	824	2.800.000.000	939	2.800.000.000	1054	2.800.000.000	1169	2.800.000.000	1284	2.800.000.000	1399	2.800.000.000	1399	16.800.000.000	Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase kelompok peternak yang mendapatkan bantuan permodalan	152 kelompok	0	0	2%	55.000.000	4%	60.500.000	6%	65.550.000	8%	73.205.000	10%	73.205.000	10%	377.460.000	Pertanian
				Persentase kelompok peternak yang memiliki akses air yang memadai/ mencukupi	152 kelompok	0	0	2%	705.000.000	4%	1.310.500.000	6%	765.550.000	8%	1.598.205.000	10%	1.598.205.000	10%	9.527.460.000	Pertanian
3	27	4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat kematian ternak	6 % dari Populasi Ternak	6%	3.110.000.000	6%	3.222.500.000	5%	3.336.000.000	4%	3.450.600.000	3%	3.566.410.000	2%	3.566.410.000	2%	20.251.920.000	Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	27	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase toko pakan ternak yang terdaftar	10 toko pakan	0%	25.000.000	10%	26.000.000	20%	27.000.000	30%	28.000.000	40%	30.000.000	50%	30.000.000	50%	166.000.000	
3	27	7	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase petani yang terlatih (tanaman pangan)	10%	15%	7.100.000.000	20%	7.100.000.000	30%	7.100.000.000	40%	7.100.000.000	50%	7.100.000.000	60%	7.100.000.000	60%	42.600.000.000	Pertanian
				Persentase kelompok petani yag menerapkan metode pertanian berorientasi agribisnis	0	7%	1.680.000.000	14%	1.680.000.000	22%	1.680.000.000	29%	1.680.000.000	36%	1.680.000.000	43%	1.680.000.000	43%	10.080.000.000	Pertanian
				Persentase petani yang terlatih (perkebunan)	9,20%	9,84%	2.500.000.000	10,5%	2.500.000.000	11,3%	2.500.000.000	12,06%	2.500.000.000	12,86%	2.500.000.000	13,66%	2.500.000.000	13,66%	15.000.000.000	Pertanian
				Persentase peningkatan peternak yang terlatih	a. Petugas IB : 20 Org b. Petugas PKB : 22	10%	280.000.000	12%	310.000.000	14%	490.000.000	16%	330.000.000	18%	355.000.000	20%	355.000.000	20%	2.120.000.000	Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Org c. Petugas ATR : 18 Org															
				Persentase kelompok peternak yang menerapkan metode budidaya ternak berorientasi agribisnis	152 kelompok	0	0	9,2 %	1.713.000.000	12%	1.396.800.000	14%	1.531.480.000	17%	1.117.128.000	20%	1.117.128.000	20%	10.055.536.000	Pertanian
				Persentase kelompok peternak yang dikelola sesuai SOP	152 Kelompok (0)	0	0	20%	52.500.000	40%	52.500.000	60%	55.000.000	80%	58.000.000	100%	58.000.000	100%	326.000.000	Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase kelompok petani yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan penanganan pasca panen (hortikultura)	na	0	0	2%	2.000.000.000	4%	2.000.000.000	6%	2.000.000.000	8%	2.000.000.000	10%	2.000.000.000	10%	10.000.000.000	Pertanian
				Persentase kelompok petani yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan penanganan pasca panen (perkebunan)	na	0	0	2%	1.500.000.000	4%	1.500.000.000	6%	1.500.000.000	8%	1.500.000.000	10%	1.500.000.000	10%	9.000.000.000	Pertanian
				Persentase kelompok peternak yang menerapkan standarisasi ASUH	152 kelompo	0	1.200.000.000	3%	627.000.000	4%	766.400.000	5%	884.900.000	6%	513.000.000	7%	513.000.000	7%	4.504.300.000	Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	27	5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase area pertanian yang tidak terserang hama penyakit	na	80%	1.050.000.000	85%	1.050.000.000	90%	1.050.000.000	95%	1.050.000.000	99%	1.050.000.000	100%	1.050.000.000	100%	6.300.000.000	Pertanian
				Persentase area perkebunan yang tidak terserang hama penyakit	na	80%	1.050.000.000	85%	1.050.000.000	90%	1.050.000.000	95%	1.050.000.000	99%	1.050.000.000	100%	1.050.000.000	100%	6.300.000.000	Pertanian
3	28		Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan																	
3	29		Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral																	
3	30		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan																	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	30	3	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar tradisional yang memiliki sarana berkondisi baik	47%	na	-	53%	3.000.000.000	63%	4.000.000.000	70%	4.000.000.000	83%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	21.000.000.000	Perdagangan
3	30	4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase peningkatan stabilitas ketersediaan barang pokok dan barang penting	64%			71%	850.000.000	79%	850.000.000	86%	850.000.000	93%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	4.250.000.000	Perdagangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	30	6	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan kasus sengketa perdagangan	NA			50%	1.110.000.000	40%	500.000.000	30%	500.000.000	20%	500.000.000	10%	200.000.000	10%	2.810.000.000	Perdagangan
3	30	7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase kelompok pedagang yang menerapkan metode marketing mix (4Ps)	NA			6%	500.000.000	18%	500.000.000	35%	500.000.000	65%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.500.000.000	Perdagangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase kelompok petani yang menerapkan metode marketing mix (4Ps)	NA			20%	600.000.000	40%	600.000.000	60%	600.000.000	80%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	3.000.000.000	Perdagangan
				Persentase kelompok nelayan yang menerapkan metode marketing mix (4Ps)	na			20%	500.000.000	40%	500.000.000	60%	500.000.000	80%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.500.000.000	Perdagangan
3	31		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																	
3	31	2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (Prioritas program ini juga diberikan kepada project bambu nasional di Ngada)	Persentase pelaku IKM yang terlatih	90 IKM			16%	350.000.000	18%	350.000.000	20%	350.000.000	22%	350.000.000	24%	350.000.000	24%	1.750.000.000	Perindustrian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Tingkat kelancaran ketersediaan bahan dasar produksi	75%			75%	540.000.000	80%	540.000.000	85%	540.000.000	90%	540.000.000	100%	540.000.000	100%	2.700.000.000	Perindustrian
				Persentase IKM yang mendapat bantuan permodalan	90 IKM			4%	120.000.000	12%	120.000.000	19%	120.000.000	27%	120.000.000	38%	120.000.000	38%	600.000.000	Perindustrian
				Persentase IKM yang menggunakan teknologi tepat guna	415 IKM			17%	800.000.000	18%	800.000.000	20%	800.000.000	22%	800.000.000	23%	800.000.000	23%	4.000.000.000	Perindustrian
				Persentase IKM yang menerapkan metode industri berorientasi bisnis	1563 IKM			3%	150.000.000	4%	150.000.000	5%	150.000.000	6%	150.000.000	8%	150.000.000	8%	750.000.000	Perindustrian
				Persentase IKM/ kelompok petani yang mengembangkan produk olahan hasil pertanian	192 IKM			12%	2.200.000.000	16%	2.200.000.000	20%	2.200.000.000	22%	2.200.000.000	25%	2.200.000.000	25%	11.000.000.000	Perindustrian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase produk olahan hasil pertanian yang bersertifikat SNI	na			8%	100.000.000	12%	100.000.000	19%	100.000.000	27%	100.000.000	35%	100.000.000	35%	500.000.000	Perindustrian
				Persentase IKM/ kelompok pembudidaya ikan/ kelompok nelayan yang mengembangkan produk olahan hasil pertanian	na			14,29	250.000.000	20	250.000.000	25,71	250.000.000	31,43	250.000.000	37,15	250.000.000	37,15	1.250.000.000	Perindustrian
				Persentase produk olahan hasil perikanan yang bersertifikat SNI				20	100.000.000	40	100.000.000	60	100.000.000	80	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000	Perindustrian
3	32		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi																	
3	32	2	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase jumlah dokumen perencanaan	NA	NA	-	20%	160000000	40%	650000000	60%	875000000	80%	795000000	100%	305000000	100%	278500000	Transmigrasi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				ketransmigrasian																
3	32	4	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase warga transmigrasi yang mendapat pelatihan dan pendampingan	NA	NA	-	15%	200000000	30%	260000000	45%	470000000	65%	490000000	90%	500000000	90%	1920000000	
4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																	
4	1		Sekretariat Daerah																	
4	1	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	100	90	2.752.489.537	100	779.523.010	100	483.606.910	100	788.656.910	100	486.706.910	100	796.806.910	100	6.087.790.187	Sekretariat Daerah
				Persentase SPM yang tercapai sesuai target	na	10	1.853.280.160	80	500.000.000	90	550.000.000	100	605.000.000	100	665.500.000	100	732.050.000	100	4.905.830.160	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan oleh pemerintah provinsi dan pusat	90	90	600.000.000	100	602.316.790	100	631.411.510	100	700.300.430	100	747.147.387	100	787.755.892	100	4.068.932.009	
				Persentase kerjasama pemerintah daerah yang berjalan	na	100	300.000.000	100	315.000.000	100	330.750.000	100	347.287.500	100	364.651.875	100	382.884.469	100	2.040.573.844	
				Persentase perda transformasi budaya yang dijalankan	na	0	0	30	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	250.000.000	
4	1	3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	100	100	150.000.000	100	300.000.000	100	330.000.000	100	135.784.300	100	135.784.300	100	135.784.300	100	1.187.352.900	Sekretariat Daerah
				Persentase realisasi	80	80	424.05	80	400.000.	82	400.000.	84	400.000.	86	400.000.	88	400.000.	90	2.424.052.	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				serapan anggaran tepat waktu			2.104		000		000		000		000		000		104	
				Persentase penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan	75	75	968.208.416	75	1.200.000.000	80	1.200.000.000	85	1.200.000.000	87	1.200.000.000	90	1.200.000.000	90	6.968.208.416	
				Kontribusi BUMD terhadap PAD	0	0	-	0	237.424.000	0	250.000.000	25	205.000.000	30	205.000.000	45	225.500.000	45	1.122.924.000	
				Persentase peningkatan omset BUMD	0	0	-	0	537.424.000	0	580.000.000	25	340.784.300	30	340.784.300	45	361.284.300	45	2.160.276.900	
4	2		Sekretariat DPRD																	
4	2	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase layanan dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	100%	100%	4.837.900.000	100%	5.313.058.200	100%	5.797.008.020	100%	6.353.736.485	100%	6.916.414.147	100%	7.529.033.220	100%	36.747.150.072	Sekretariat DPRD
5			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																	
5	1		Perencanaan																	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	1	2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase realisasi target program RPJMD	70	70	49.500.000	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.250.000	100	115.762.500	100	121.550.625	100	602.063.125	Perencanaan
				Persentase hasil musrenbang yang ditindaklanjuti dalam penganggaran daerah	98	98	648.869.500	100	400.000.000	100	420.000.000	100	441.000.000	100	463.050.000	100	486.202.500	100	2.859.122.000	
				Persentase keterpaduan RPJMD dengan renstra	98	98	1.585.022.040	100	50.000.000	100	50.000.000	100	500.000.000	100	50.000.000	100	17.685.284.375	100	19.920.306.415	
				Persentase keterpaduan RKPD dengan RPJMD	98	98	679.295.160	100	700.000.000	100	770.000.000	100	847.000.000	100	931.700.000	100	1.024.870.000	100	4.952.865.160	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	1	3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keterpaduan perencanaan bidang ekonomi dan Fisik dan Prasarana	na	100	300.000.000	100	465.787.267	100	512.365.993	100	563.602.593	100	619.962.852	100	681.959.137	100	3.143.677.842	Perencanaan
				Persentase keterpaduan perencanaan bidang sosial budaya	na	96	150.000.000	100	287.819.098	100	316.601.078	100	348.261.108	100	383.087.219	100	421.390.094	100	1.907.158.597	
5	2		Keuangan																	
5	2	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP	100%			100%	1.378.460.500	100%	1.516.306.550	100%	1.667.937.205	100%	1.834.730.926	100%	2.018.204.018	100%	180.564.469.420	Keuangan
				Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	14,73			14	818.636.000	13,5	900.499.600	13	990.549.560	12	1.089.604.516	11,75	1.198.564.968	11,75	5.057.854.644	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	12,25			12	178.107.117.553	11	178.201.741.093	10	178.305.826.987	10	178.420.321.470	9	178.546.265.402	9	1.061.581.272.506	
5	2	3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset daerah yang diinventarisasi	52,54%	52,54	1.000.000.000	61,74%	1.318.120.400	71,46%	1.449.932.440	81,70%	1.594.925.684	92,47%	1.754.418.252	100,00%	1.929.860.078	100,00%	9.047.256.854	Keuangan
5	2	4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	na	Na	2.000.000.000	100	4.566.163.000	100	5.174.279.300	100	5.627.307.230	100	6.148.136.953	100	6.731.051.748	100	30.246.938.231	Keuangan
5	3		Kepegawaian																	
5	3	2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase keterpenuhan kebutuhan pegawai	52,50%	52,50%	225.500.000	54,35%	520.000.000	56,18%	520.000.000	57,98%	520.000.000	59,65%	520.000.000	61,26%	520.000.000	63,78%	2.835.000.000	Kepegawaian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal "Tinggi"	18,37	18,37%	1.353.000.000	42,85%	439.162.000	52,04%	405.022.000	64,28%	293.162.000	79,58%	184.162.000	97,95%	184.162.000	97,95%	2.858.670.000	
				Persentase layanan pegawai sesuai standar pelayanan	22,22%	22,22%	1.127.500.000	44,44%	1.095.000.000	66,67%	1.115.000.000	77,78%	1.130.000.000	88,89%	1.095.000.000	100,00%	845.000.000	100%	6.407.500.000	
				Persentase ASN yang terlibat dalam transformasi budaya	na	Na		na		na		na		na		na		na		
5	4		Pendidikan dan Pelatihan																	
5	4	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	24,88%	24,88%	-	28%	600.000.000	32%	600.000.000	36%	600.000.000	39%	600.000.000	43%	600.000.000	43%	3.000.000.000	Pendidikan dan Pelatihan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase jabatan struktural yang telah lulus diklat Pim Tk 2, PKA, PKP	43,80%	43,80%	-	47%	1.300.000.000	50%	1.300.000.000	53%	2.800.000.000	57%	2.800.000.000	60%	2.800.000.000	60%	11.000.000.000	
				'Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan	100%	100%	1.660.000.000	100%	2.814.000.000	100%	1.910.000.000	100%	2.222.000.000	100%	2.318.000.000	100%	2.654.000.000	100%	10.764.000.000	
5	5		Penelitian dan Pengembangan																	
5	5	2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian yang menjadi bahan perencanaan dan pengambilan keputusan	na	0		10%	750.000.000	10%	787.500.000	20%	1.614.375.000	25%	1.695.093.750	25%	1.779.848.438	25%	6.626.817.188	Penelitian dan Pengembangan
				Indeks Inovasi Daerah	Disclaimer			Kurang Inovatif	50.000.000	Inovatif	50.000.000	Inovatif	50.000.000	Sangat Inovatif	60.000.000	Sangat Inovatif	60.000.000	Sangat Inovatif	270.000.000	
5	6		Pengelolaan Perbatasan																	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
6			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan																	
6	1		Inspektorat Daerah																	
6	1	2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan internal dan eksternal	55%	55%	1.100.000.000	60%	1.818.298.400	65%	1.844.667.733	70%	1.911.583.726	75%	1.937.953.060	80%	1.994.869.053	80%	10.607.371.972	Pengawasan
				Persentase pengawasan internal dan eksternal yang dilaksanakan sesuai standar dan tepat waktu	na	Na	-	50	1.173.866.400	55	1.173.866.400	60	1.209.963.060	65	1.209.963.060	70	1.236.059.720	50	6.003.718.640	
6	1	3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang menjalankan WBK-WBBM	0%	0%	100.000.000	20%	150.000.000	20%	150.000.000	25%	192.000.000	30%	229.000.000	30%	229.000.000	30%	1.050.000.000	
				Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanju	75%	75%	800.000.000	80%	1.200.000.000	85%	1.200.000.000	90%	1.200.000.000	95%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	6.800.000.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				ti dan diselesaikan																
7			Unsur Kewilayahan																	
7	1		Kecamatan																	
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik kecamatan sesuai standar pelayanan	50%	50%	-	100%	2.596.588.214	100%	2.789.826.185	100%	2.933.880.228	100%	3.083.935.187	100%	3.225.363.987	100%	14.629.593.802	Kecamatan
7	1	3	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa di wailayah kecamatan yang tertib menjalankan kalender pembangunan	50	50	-	100	5.571.004.000	100	5.755.385.600	100	5.846.723.840	100	5.914.506.224	100	5.968.466.846	100	29.056.086.510	Kecamatan
7	1	6	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif dalam	100	50	2.057.000.000	100	11.200.000.000	100	11.760.000.000	100	12.348.000.000	100	12.965.400.000	100	13.613.670.000	100	63.944.070.000	Kecamatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PD penanggungjawab Urusan
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				pembangunan																
8			Unsur Pemerintahan Umum																	
8	1		Kesatuan Bangsa dan Politik																	
8	1	3	Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidkan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Cakupan sosialisasi/fasilitasi pendidikan politik kepada masyarakat	n.a	10%		20%	916.577.900	40%	916.577.900	40%	1.017.163.540	60%	916.577.900	80%	916.577.900	(100%)	5.499.467.400	Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang terlibat aktif dalam pembangunan	n.a	30%		42%	223.361.880	52%	223.361.880	63%	223.361.880	73%	223.361.880	83%	223.361.880	83%	1.316.809.400	Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	Cakupan sosialiasi/fasilitasi kewaspadaan nasional dan daerah	n.a	11%		22%	685.389.200	44%	685.389.200	66%	685.389.200	88%	685.389.200	100%	685.389.200	100%	3.426.946.000	

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII memuat tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU dan IKK menjadi bukti dalam penyusunan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun secara luas untuk membangun akuntabilitas kinerja pembangunan daerah.

8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah

IKU merupakan indikator yang berorintasi *outcome* atau *impact* yang menggambarkan ketercapaian mandat utama dari kepala daerah dan Kepala Perangkat Daerah. Penyusunan IKU memperhatikan pohon kinerja yang paling tinggi, indikator kinerja utama nasional dan provinsi, dan kebutuhan/konteks daerah. IKU Kepala Daerah Kabupaten Ngada sebagai berikut:

Tabel 8. 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Ngada 2021-2026

No	IKU Kepala Daerah	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,79	4,91	5,03	5,18	5,44	5,71
2	Indeks Gini	Nilai	0,321	0,316	0,312	0,305	0,299	0,292
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,34	11,14	10,71	10,51	10,33	9,54
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	68,25	68,29	68,30	68,36	68,38	68,41
5	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,44	68,84	69,24	69,64	70,04	70,44
6	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	68,8	69,3	69,7	70,1	70,6	71,1
7	Angka Stunting	Jumlah	14,36	13,02	11,68	10,34	9,0	9,0
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,08	3,78	3,48	3,18	2,88	2,58
9	Rata-rata kecepatan tempuh antar kawasan prioritas	Km/jam	28,00 km/jam	28,16 km/jam	28,54 km/jam	28,93 km/jam	29,32 km/jam	29,70 km/jam
10	Persentase penurunan angka kecelakaan	Persen	21,00%	21,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
11	Persentase kawasan pariwisata yang dapat diakses angkutan umum layak	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Rasio pemukiman kumuh	Persen	12,13	10,6	7,9	5,1	2,4	0,0
13	Indeks Risiko Bencana	Nilai	109,9	104,1	98,3	92,5	86,7	80,9
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai/ Predikat	51 (CC)	55 (CC)	59 (CC)	63 (B)	67 (B)	71 (BB)
15	Angka Konflik Sosial	Nilai	15	12	9	7	5	3
16	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,6342	0,6469	0,6599	0,6731	0,6865	0,6965

8.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama perangkat daerah adalah indikator di tingkat hasil atau dampak yang menjadi tanggungjawab kepala perangkat daerah. Indikator ini dapat dicapai dengan dukungan realisasi target indikator program perangkat daerah. Berikut adalah indikator kinerja utama masing-masing perangkat daerah Kabupaten Ngada:

Tabel 8. 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan	IKU	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,73	8,94	9,15	9,36	9,57	9,78
		Harapan lama sekolah	Tahun	12,9	13,1	13,3	13,5	13,7	13,9
2	Kebudayaan	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Persen	30%	40%	55%	70%	85%	100%
3	Kesehatan	AKI	Angka	102/100.000 KH	102/100.000 KH	102/100.000 KH	102/100.000 KH	102/100.000 KH	102/100.000 KH
		AKB	Angka	34/1000KH	34/1000KH	34/1000KH	34/1000KH	34/1000KH	34/1000KH
		Angka kesakitan	Angka	6,78	6,33	5,88	5,43	5,0	5,0
		Angka kematian balita	Angka	34/1000KH	34/1000KH	34/1000KH	34/1000KH	34/1000KH	34/1000KH
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jalan pada ruas prioritas dalam kondisi baik	Persen	70,41%	71,37%	72,33%	73,29%	74,25%	75,21%

No	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan	IKU	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan	Persen	67,11%	71,51%	75,91%	80,31%	84,71%	89,11%
		Persentase bangunan gedung sesuai dengan standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rasio rumah layak huni	Rasio	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00	88,00
		Persentase kawasan permukiman dan perumahan dengan PSU layak	Persen	89,09%	90,91%	92,73%	94,55%	96,36%	98,18%
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	80%	84%	88%	92%	96%	100%
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	70,27%	72,96%	75,65%	78,34%	81,03%	83,72%
6	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan gangguan K3	Persen	85%	90%	95%	100%	100%	100%
		Angka korban	Angka	150	100	70	40	30	0

No	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan	IKU	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		bencana							
7	Sosial	Persentase PMKS berdaya	Persen	10%	13%	18%	20%	23%	25%
8	Tenaga Kerja	Tingkat kesempatan kerja	Persen	95,19	96	97	98	99	100
9	Pemberdayaan Desa	Indeks Desa Membangun	Angka	0,6342	0,6469	0,6599	0,6731	0,6865	0,6965
		Persentase penurunan biaya sosial	Persen	3%	5%	10%	15%	18%	20%
10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Status Kabupaten Layak Anak	Predikat	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Nindya
		Tingkat partisipasi angkataan kerja perempuan/IPG	Persen	96,29	96,49	96,7	96,90	97,10	97,31
		Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	10,81	12,12	13,79	16,00	19,04	25
11	Pangan	Indeks ketersediaan	Angka	Na	93,93	93,93	93,93	93,93	93,93
		Indeks keterjangkauan	Angka	Na	77,13	77,63	78,13	78,63	79,13
		Indeks pemanfaatan	Angka	Na	67,3	67,8	68,3	68,8	69,3
		Persentase pangan yang memenuhi standar toleransi ambang batas	Persen	Na	60	70	80	90	100

No	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan	IKU	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
12	Lingkungan Hidup	IKU	Angka	85,07	84,65	84,25	83,95	83,50	83,10
		IKA	Angka	50,50	51,00	51,50	52,00	52,50	53,00
		IKTL	Angka	69,320	69,321	69,322	69,323	69,324	69,325
		Persentase volume sampah yang tertangani	Persen	18,63	19%	20%	21%	22%	23%
13	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IKM Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai	75	78	80	82	84	86
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	3,5	3,3	3,1	2,9	2,7	2,5
15	Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Persen	46,68%	54,68%	62,68%	70,68%	78,68%	86,68%
		Persentase peningkatan akses angkutan umum	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	Nilai	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	60	62	65	68	72	75
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan koperasi aktif (koperasi produsen)	Persen	4	4	5	6	7	8

No	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan	IKU	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Persentase peningkatan omzet UKM	Persen	2	2	2	2	2	2
		Persentase peningkatan kapasitas pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan	Persen	20	20	20	20	20	20
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor	Persen	2,04	2,04	2,87	3,67	4,52	8,39
		IKM Perizinan	Nilai	75	78	80	82	84	86
19	Kepemudaan dan Olahraga	Peringkat Proprov	Peringkat	3	3	3	2	2	2
		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persen	5%	10%	15%	20%	25%	25%
20	Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	37,78%	45,99%	54,3%	66,76%	79,23%	100%
		Spend of money	Nilai	9,067,500,000	11,067,500,000	13,067,500,000	16,067,500,000	19,067,000	24,067,500,000
21	Kearsipan	IKM Kearsipan	Nilai	75	78	80	82	84	86
22	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	60	62	64	66	68	70
		SKM Layanan Perpustakaan	Nilai	80,0	80,5	81	81,5	82	82,5
23	Kelautan dan	Produksi perikanan	Ton	311	311	431	657	788	1012

No	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan	IKU	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Perikanan	budidaya							
		Produksi perikanan tangkap	Ton	2688	2688	3408	4188	5028	6018
		Persentase produk perikanan yang bersertifikat	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	Pertanian	Produksi tanaman pangan							
		- Padi	Ton	51.958	51.958	56.193	60.773	65726	71.083
		- Jagung	Ton	19.725	19.725	21.333	23.071	24.952	26.985
		- Kedelai	Ton	604.8	604.8	654	707	765	827
		- Kacang Merah	Ton	75	75	81.1	87.8	94.9	102.7
		- Ubi Kayu	Ton	5.192	5.192	5.615	6.073	6.568	7.103
		Produktivitas tanaman pangan							
		- Padi	Ton	54	54	56	57.3	59	60.8
		- Jagung	Ton	30	30	31	31.8	32.8	33.8
		- Kedelai	Ton	18	18	19	19.1	19.7	20.3
		- Kacang Merah	Ton	15	15	15	15.9	16.4	16.9
		- Ubi Kayu	Ton	59	59	61	62.6	64.5	66.4
		Produksi tanaman perkebunan	Ton	6962,80	7082,42	7102,74	7173,76	7245,49	7317,94
		Persentase produk tanaman pangan dan holtikultura yang bersertifikat							

No	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan	IKU	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		- Tanaman Pangan							
		Padi	Persen	58.20%	58.20%	63.30%	67.90%	71.80%	75.20%
		Jagung	Persen	97.30%	97.30%	104.30%	110.40%	115.60%	120.10%
		-Hortikultura							
		Jahe	Persen	83.30%	83.30%	95.20%	96.70%	97.90%	98.70%
		Kunyit	Persen	80.00%	80.00%	83.80%	87.10%	89.80%	92.10%
		Persentase peningkatan populasi ternak (ternak besar dan unggas)	Persen	10,5	15,5	20,5	25,5	30,5	35,5
		Persentase peningkatan produksi daging	Persen	20,5	40,5	50,5	60,5	70,5	80,5
		Persentase peningkatan produksi telur	Persen	22,5	42,5	52,5	62,5	72,5	82,5
		Persentase produk hasil ternak yang bersertifikat ASUH	Persen	10	10	10	10	10	20
25	Perindustrian	Persentase peningkatan nilai produksi IKM (Salah satunya IKM Bambu)	Persen	16%	18%	20%	22%	24%	26%
		Persentase produk pertanian yang meningkat nilai tambahnya	Persen	10%	20%	22%	24%	26%	28%

No	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan	IKU	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Persentase produk perikanan yang meningkat nilai tambahnya	Persen	10%	20%	22%	24%	26%	28%
26	Perdagangan	Tingkat kelancaran distribusi barang pokok dan barang penting	Persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase peningkatan kapasitas pemasaran produk olahan pertanian	Persen	20	20	20	20	20	20
		Persentase peningkatan kapasitas pemasaran produk olahan perikanan	Persen	20	20	20	20	20	20
27	Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai/ Predikat	54 (CC)	58 (CC)	62 (B)	67 (B)	73 (BB)	75 (BB)
		Nilai EKPPD	Nilai	2,8000	2,8500	2,9000	2,9500	3,0000	3,0500
		IKM	Nilai	50	55	62	75	78	82
		Persentase kebijakan daerah yang diimplmentasikan	Persen	90	100	100	100	100	100
28	Sekretariat DPRD	IKM pelayanan dukungan tugas dan fungsi DPRD	Nilai	60	70	80	90	100	100

No	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan	IKU	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	na	60	65	65	70	70
30	Keuangan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	nilai	50	60	65	70	75	80
		Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Kontribusi PAD	Rupiah	55.201.351.668,00	112.632.303.176,64	117.043.865.514,71	121.469.674.464,79	128.429.899.401,43	135.646.221.183,75
31	Kepegawaian	Indeks Profesionalitas Aparatur	Nilai	55	60	65	70	75	81
29	Pengawasan	Maturitas SPIP	Level	1	1	2	2	3	3
		Kapabilitas APIP	Level	2	2	2	3	3	3
		Indeks Persepsi Anti Korupsi/Nilai Survei Penyelenggaraan Integritas	Nilai	80	80,5	80,7	80,9	81	81,02
30	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (rata-rata kecamatan)	Nilai	75	78	80	82	84	86
		Rata Jumlah desa maju/mandiri di setiap kecamatan	Jumlah	1	1	2	2	3	3
31	Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka konflik sosial	Jumlah	15	12	9	7	5	3

8.3. Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja kunci (IKK) adalah indikator yang memiliki stratifikasi di tingkat hasil (*outcome*). Indikator ini dapat berasal dari Permendagri 18 tahun 2020 dan indikator program perangkat daerah yang mampu menggambarkan ukuran-ukuran yang lebih kontekstual dengan kondisi Kabupaten Ngada. Berikut adalah indikator kinerja kunci Kabupaten Ngada tahun 2021-2026:

Tabel 8. 3. Penetapan Indikator Kinerja DaerahTerhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten NgadaTahun 2021-2026

No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	**Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**									
1.1.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	na	80	80	85	90	95	100	100
1.2.	Peningkatan PDRB perkapita /Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	0,04	4,79	4,91	5,03	5,18	5,44	5,71	5,71
1.3.	Indeks gini	Indeks	0,326	0,321	0,316	0,312	0,305	0,299	0,292	0,292
1.4	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	12,51	11,34	11,14	10,71	10,51	10,33	9,54	9,54
1.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67,88	68,8	69,3	69,7	70,1	70,6	71,1	71,1
1.6	Angka harapan lama sekolah	Angka	12,7	12,9	13,1	13,3	13,5	13,7	13,9	13,9
1.7	Angka rata-rata lama sekolah	Angka	8,52	8,73	8,94	9,15	9,36	9,57	9,78	9,78
1.8	Angka usia harapan hidup	Angka	68,04	68,44	68,84	69,24	69,64	70,04	70,44	70,44
1.9	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	4,69	4,08	3,78	3,48	3,18	2,88	2,58	2,58
1.10	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.11	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Persen	34,28	34,62	34,97	35,32	35,85	36,39	36,93	36,93
1.12	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen	34,28	34,62	34,97	35,32	35,85	36,39	36,93	36,93
1.13	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	0,42	0,64	0,70	0,79	0,88	0,99	1,12	1,12
1.14	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	7,59	7,86	7,90	7,95	8,12	8,18	8,44	8,44
1.15	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Persen	1,43	1,47	1,51	1,55	1,59	1,63	1,71	1,71
A	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**									
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**									
1.1	Tingkat partisipasi warga usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	3423 siswa/18,50	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	17740 siswa/92,37	100	100	100	100	100	100	100
1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	na	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	93	100	100	100	100	100	100	100
2	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**									
2.1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09	0,01	0,1	0,01
2.2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	N.A	100	100	100	100	100	100	100
2.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	49,39	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	51,75	100	100	100	100	100	100	100
2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	39,16	100	100	100	100	100	100	100
2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	96,1	100	100	100	100	100	100	100
2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	59,64	100	100	100	100	100	100	100
2.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	59,05	100	100	100	100	100	100	100
2.9	Persentasae warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	61,92	100	100	100	100	100	100	100
2.1	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	71,79	100	100	100	100	100	100	100
2.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	90,68	100	100	100	100	100	100	100
2.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	74,65	100	100	100	100	100	100	100
2.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	85,85	100	100	100	100	100	100	100
2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	64,08	100	100	100	100	100	100	100
3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang**									
3.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	Persen	31,76	34,5	39,68	59,68	79,68	99,68	100	100

No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	pengendalian banjir									
3.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	Persen	50	55	60	70	80	90	100	100
3.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	43,54	45,94	48,34	50,74	53,14	55,54	57,94	57,94
3.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persen	48,43	48,43	52,98	57,13	61,29	65,44	65,59	65,59
3.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	67,58	67,58	70,27	72,96	75,65	78,34	81,03	81,03
3.6	Rasio kepatuhan IMB	Persen	50	70	75	80	85	90	95	95
3.7	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	69,45	70,83	72,21	73,60	74,98	76,36	76,36	76,36
3.8	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
3.9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
4	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**									
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani									
4.4	Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rasio Rumah Layak Huni	Persen	78	79	81	83	85	87	88	88
4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)/Persentase kawasan permukiman dan perumahan dengan PSU layak	Persen	NA	89,09	90,91	92,73	94,55	96,36	98,18	98,18
5	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**									
5.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
5.3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	50	100	100	100	100	100	100	100
5.5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	70	100	100	100	100	100	100	100
5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu	40	40	42	35	30	25	20	20

No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**									
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten Ngada	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
B	**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**									
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**									
1.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	10	20	45	65	85	100	100	100
1.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	10	20	40	60	75	90	100	100
1.3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Persen	10	20	40	60	75	90	100	100
1.4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	10	20	40	60	75	90	100	100
1.5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten Ngada	Persen	7	17	40	60	75	90	100	100
2	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**									

No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	NA	20	22	25	26	28	30	30
2.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0,02	0,018	0,016	0,014	0,012	0,01	0,008	0,008
3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**									
3.1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya beras/jagung) sesuai kebutuhan	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
4	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**									
4.1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
4.3	Tersedianya *Tanah Obyek Landreform* (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
4.4	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
4.5	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**									
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	68,25	68,25	68,29	68,30	68,36	68,38	68,41	68,41
5.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah	Persen	18,63	18,63	19	20	21	22	23	23

No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	75	75	79	86	90	95	100	100
6	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
6.1	Perekaman KTP Elektronik	Persen	87,27	88	88,67	90,81	93	96	99,85	99,85
6.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	10,11	13,5	15,46	18,5	21,29	25,57	27,88	27,88
6.3	Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	4	6	8	12	15	19	27	27
6.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah	43	50	60	70	80	90	100	100
7	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**									
7.1	Persentase pengentasan desa tertinggal (desa tertinggal ke berkembang)	Persen	63,7	68	75	80	85	90	95	95
7.2	Persentase peningkatan status desa mandiri/maju	Persen	3,7	7	10	13	15	20	25	25
8	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
8.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	3,7	3,5	3,3,	3,1	2,9	2,7	2,5	2,5
8.2	Persentase kebuutuhan ber KB yang tidak terpenuhi	Persen	6,32	6,1	5,82	5,57	5,32	5,07	4,82	4,82
8.3	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	Persen	60	60	61	62	63	64	65	65
9	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**									

No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
9.1	Rasio konektivitas	Persen	1,69	1,69	1,69	1,69	1,80	1,80	1,80	1,80
9.2	Kinerja lalu lintas	Persen	0,50	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,40	0,40
10	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**									
10.1	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100
10.2	Persentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	NA	18	18	32	57	68	100	100
10.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten Ngada	Persen	NA	60	70	80	90	100	100	100
11	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**									
11.1	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Persen	NA	7,5	8,3	10,19	12,96	15,74	18,52	18,52
11.2	Persentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	2	2	10	10	10	10	10	100
12	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**									
12.1	Persentase peningkatan investasi	Persen	0,84	1%	1,54	2,37	3,17	4,02	4,89	4,89
13	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan**									

No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	dan Olahraga									
13.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	NA	5	10	15	20	25	30	30
13.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	NA	60	70	80	90	100	100	100
13.3	Peningkatan prestasi olahraga (Peringkat kompetisi olahraga Provinsi)	Peringkat	NA	3	3	3	2	2	1	1
14	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**									
14.1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
14.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
15	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**									
15.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
16	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**									
16.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	1,25	1,37	1,50	1,65	1,81	1,99	2,18	2,18
16.2	Indeks Pembangunan literasi masyarakat	Angka	NA	60	62	64	66	68	70	70
16.3	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
16.4	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Persen	20,62	22,73	25,73	28,30	31,13	34,24	37,66	37,66
16.5	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persen	0	1	2	3	4	5	6	6

No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
17	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**									
17.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
17.2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
18	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**									
18.1	Terlestarikannya cagar budaya	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
C	**Urusan Pemerintahan Pilihan**									
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**									
1.1	Jumlah total produksi perikanan budidaya	angka	54	311	431	657	788	1012	3199	3199
1.2.	Jumlah total produksi perikanan tangkap	angka	2088	2688	3408	4188	5028	6018	21330	21330
2	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**									
2.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	NA	3	5	7	10	12	15	15
2.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Ngada	Persen	NA	5	10	15	15	20	20	20
2.3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	NA	75	75	80	80	85	85	85
2.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	0,42	0,64	0,70	0,79	0,88	0,99	1,12	1,12
2.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	NA	2	5	7	10	15	20	20
3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**									

No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3.1	Produktivitas Tanaman Pangan									
	- Padi	Ton	58.20	58.20	58.20	63.30	67.90	71.80	75.20	75.20
	- Jagung	Ton	97.30	97.30	97.30	104.30	110.40	115.60	120.10	120.10
	- Kedelai	Ton	10.40	10.40	10.40	10.60	10.80	10.90	11.00	11.00
	- Kacang Merah	Ton	30.00	30.00	30.00	30.30	36.30	38.90	41.10	41.10
	- Ubi Kayu	Ton	11.40	11.40	11.40	11.90	12.40	12.80	13.10	13.10
3.2	Produktivitas Hortikultura									
	- Jahe	Ton	80.30	83.30	83.30	95.20	96.70	97.90	98.70	98.70
	- Kunyit	Ton	78.00	80.00	80.00	83.80	87.10	89.80	92.10	92.10
	- Lengkuas	Ton	78.00	80.00	80.00	83.80	87.10	89.80	92.10	92.10
	- Porang	Ton	N/A	10	10	10	10.6	10.9	11.3	
3.3	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	60	60	50	40	40	30	25	25
3.4	Tingkat kelahiran ternak	Ekor	Ternak Sapi dan Kerbau yang di IB :500 ekor	Ternak Sapi dan Kerbau yang di IB :500 ekor	300	300	300	300	300	1.500
3.5	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	6 % dari Populasi ternak	6%	5%	4%	3%	2%	2%	2%
4	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**									
4.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/IUTS/SIUP toko swalayan)	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
4.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**									
5.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Angka	5,6	5,8	6,0	6,3	6,5	6,7	6,9	6,9
5.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	0	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
5.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
5.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) di Kabupaten Ngada	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
5.5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
D	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**									
1	**Sekretariat Daerah**									
1.1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	36,35	40	42	44	46	48	50	50
E	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintah**									
1	**Keuangan**									
1.1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan	Rasio	14,73	14	13,5	13	12	11,75	11,75	11,75

No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.2	Rasio PAD	Persen	na	6.43	6.79	6.84	6.93	7	7.11	7.11
1.3	Rasio belanja urusana pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	8,15	8,15	9	9,15	9,3	9,75	10	10
1.4	Deviasi realisasi belanja terhadap belenja total dalam APBD	Persen	12,25	12,25	12	11	10	10	9	9
1.5	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	na	3.99	3.43	2.31	1.87	1.43	1.03	1.03
1.6	Manajemen asset	Jumlah	NA	327	332	339	351	364	1713	1713
1.7	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	4,8	4,8	4	4	3,7	3,6	3,5	3,5
1.8	Infromasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
1.9	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
1.10	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	**Kepegawaian**									
2.1	Rasio pegawai Pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan anaga Kesehatan)	Persen	95,54	95,89	96,24	96,59	96,94	97,28	97,98	97,98
2.2	Rasio Pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	Persen	24,88	24,88	28,44	31,99	35,55	39,10	42,65	42,65
2.3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	24,88	24,88	28,44	31,99	35,55	39,10	42,65	42,65
F	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**									
1	**Inspektorat Daerah**									
1.1	Maturitas SPIP	Level	1	1	1	2	2	3	3	3
1.2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan	Level	2	2	2	2	3	3	3	3

No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Intern Pemerintah (APIP)									
G	**Aspek Daya Saing**									
1	**Fokus pada Kemampuan Ekonomi**									
1.1	Nilai Tukar Petani	Persen	106,26	110,19	111,82	113,44	115,07	116,70	118,33	118,33
1.2	Produktivitas Total Daerah	Persen	30,98	31,5	32,11	32,67	33,24	33,81	34,37	34,37
2	**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**									
2.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1:7	1:7	1:7	1:6	1:6	1:5	1:5	1:5
2.2	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	32	32	32	50	50	60	70	70
2.3	Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	Persen	48,83	52,98	57,13	61,29	65,44	66,59	66,59	66,59
2.4	Rasio ketersediaan daya listrik	Persen	86,81	86,81	89,44	92	94,7	97,3	100	100
2.5	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	Persen	72,03	72,03	77	82	92	97	100	100
3	**Fokus Iklim Berinvestasi**									
3.1	Angka kriminalitas	Angka	6,92	6,50	5,58	5,0	4,46	3,32	2,21	2,21
3.2	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Jumlah								
3.3	Rata-rata lama proses perijinan	Waktu	5	5	4	3	3	2	1	1
3.4	Indeks kepuasan masyarakat (Survei eksterna kepuasan masyarakat)	Angka	3,34	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6
4	**Fokus Sumber Daya Manusia**									
4.1	Rasio ketergantungan	Persen	45,71	45,71	45,50	45,30	45,10	44,90	44,70	44,70

BAB IX
PENUTUP

Dokumen RPJMD Kabupaten Ngada tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi para pemangku kebijakan pembangunan. Dokumen ini menerjemahkan visi dan misi kepala daerah secara operasional. Visi dan misi dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan.

RPJMD Kabupaten Ngada tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaraan tahunan. RPJMD sebagai intrumen pengendalian kinerja dan bukti capaian pembangunan, maka disertai dengan indikator dan target yang diupayakan mencapai kondisi yang optimal. RPJMD perlu dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah tertentu untuk memastikan sinergi dan efektivitas, sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada, dunia usaha serta masyarakat dituntut untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen ini;
2. Dokumen RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2021-2026 ini selanjutnya dijabarkan dalam RKPD;
3. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada wajib menyusun Renstra-PD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing yang berpedoman pada RPJMD. Dokumen ini juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. Perangkat Daerah harus memastikan konsistensi antara dokumen RPJMD dengan perencanaan perangkat daerah;

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (BP-Litbang) Kabupaten Ngada wajib melakukan pengendalian dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian target kinerja di dalam RPJMD;
6. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dasar hukum, maka penyusunan RKPD 2027 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada yang berlaku.

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGADA

TAHUN 2021 - 2026